SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ditinjau kembali;

b. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, merupakan bagian dari upaya percepatan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 atau dokumen perencanaan daerah lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Perubahan ...

4. Perubahan Rencana Kerja selanjutnya disingkat Perubahan Renja adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Daerah adalah Kota Palu.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2024.
(2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. bab I : pendahuluan;
    b. bab II : evaluasi RENJA sampai dengan triwulan II tahun 2024;
    c. bab III : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
    d. bab IV : penutup.

(2) Dokumen ...

(2) Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX, Lampiran XXXX, dan Lampiran XXXXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Agustus 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 17

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan tahapan persiapan Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dan Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kemudian Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan Antara Rencana Kerja (Renja) OPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi, Sedangkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota dijabarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), kemudian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. PeraturanPemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992tentang Peran serta masyarakat Pendidikan Dalam Pendidikan Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Hasil Verifikasi dan Validasi Permutahiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
31. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2019 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan;
33. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu ini adalah untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pendidikan, serta kerangka pendanaan dan pengalokasian anggaran yang akan dilakukan pada tahun perencanaan.

Tujuan penyusunan dokumen RENJA ini adalah untuk memberikan kepastian atas sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, dan juga sebagai acuan dalam menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja yang menjadi dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang nantinya menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dan Analisis Kinerja

Pelayanan Perangkat Daerah Penelaahan Usulan

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

2.1.2 Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

IV. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN LALU

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis (Resntra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Berikut akan dijelaskan terkait dengan kegiatan yang mencapai target dan tidak mencapai target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan**	100						
1	01	02	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							
1	01	02	2,01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah unit sekolah baru yang di bangun	3	2	1		100	3	66.67
1	01	02	2,01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5	3	7		0	3	60,00
1	01	02	2,01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30	25	17		0,00	25	83,33
1	01	02	2,01		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		10	6	11		0,00	6	60,00
1	01	02	2,01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Dasar yang Menerima	176850	70740	35370	35370	100,00	106110	60,00

						Biaya Personil Peserta Didik							
1	01	02	2,01		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta didik yang mengikuti Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1500	900	300	300	100,00	1200	80,00
1	01	02	2,01		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	30	18	3		0,00	18	60,00
1	01	02	2,01		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	860	516	172		0,00	516	60,00
1	01	02	2,01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1050	350	172	172	100	522	49,71
1	01	02	2,01		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru	15	5	2		0	5	33,33
1	01	02	2,01		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	15	5	5		0	5	33,33
1	01	02	2,01		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	25	15	11		0	15	60,00
1	01	02	2,02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
1	01	02	2,02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	15	5	1	0	0	5	33,33
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah		10		1				
1	01	02	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasaran dan Utilitas Sekolah	15	10	2	0	0	10	66,67
1	01	02	2,02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	15	9	6	0	0	9	60,00
1	01	02	2,02		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium	10	6	3		0	6	60,00

1	01	02	2,02		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15	15	2		0	15	100,00
1	01	02	2,02		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	40		10		0	0	0,00
1	01	02	2,02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah	96048	31522	16008	16008	100,00	47530	49,49
1	01	02	2,02		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10	6	7		0,00	6	60,00
1	01	02	2,02		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1500	900	350	350	100,00	1250	83,33
1	01	02	2,02		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	240	144	48	48	100,00	192	80,00
1	01	02	2,02		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	15	9	3		0,00	9	60,00
1	01	02	2,03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
1	01	02	2,03		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		40	24	7		0,00	24	60,00
1	01	02	2,03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	20	6	15	5	33	11	55,00
1	01	02	2,03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	36545	17984	7450	7450	100,00	25434	69,60
1	1	02	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1355	452	270	270	100,00	722	53,26
1	1	02	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1355	452	270	270	2654,81	7620	53.26
1	1	02	2,04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							

1	1	02	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	10	6	1545	6	0,39	12	120,00
1	1	02	2	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50	30	10	10	100	40	80,00
1	1	02	2,04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	50	30	10	10	100,00	40	80,00
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan							
1	1	04	2,01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
1	1	04	2,01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan	10	6	3	3	100	9	90,00
1	1	04	2,01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	10	6	2	2	100	8	80,00
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan pengembangan kebudayaan**							
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2	22	02	2,02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							

					Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2	2 2	0 2	2,0 2	0 1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	100	60	5	0	0	60	60,00
2	**2 2**	**0 3**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Cakupan pengembangan kesenian tradisional**							
2	2 2	0 3	2,0 1		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							
2	2 2	0 3	2,0 1	0 1	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Penetapan Cagar Budaya	15	5	5	0	0	5	33,33
					Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							
2	2 2	0 3	2,0 1	0 3	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Pelindungan Cagar Budaya	8	3	3	3	100	9	75.00
					Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Pemanfaatan Cagar Budaya	8	3	3	3	100	9	75.00
X	**X X**	**0 1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**							
X	X X	0 1	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah							
X	X X	0 1	2,0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	15	9	4	2	50,00	11	73,33
X	X X	0 1	2,0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	3	2	1	50,00	4	80,00
X	X X	0 1	2,0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	3	1	1	100,00	4	80,00
X	X	0	2,0	0	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen (Lakip)	12	6	5	2	40,00	8	66,67

	X	1	1	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
X	X X	0 1	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
X	X X	0 1	2,0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan	16284	9771	3257	3257	100,00	13028	80,00
X	X X	0 1	2,0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	20	12	4	2	50,00	14	70,00
X	X X	0 1	2,0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
X	X X	0 1	2,0 3	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah pada Dinas Pendidikan	30	18	2	1	50,00	19	63,33
X	X X	0 1	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
X	X X	0 1	2,0 5	0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Penyusunan Penilaian Kinerja Guru (PKG) dalam rangka pengusulan	920	552	2	1	50,00	553	60,11
X	X X	0 1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah							
X	X X	0 1	2,0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan (Laptop, komputer, printer dll)Perlengkapan Kantor	40	24	6	4	66,67	28	70,00
X	X X	0 1	2,0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	60	12	6	50,00	66	66,00
X	X X	0 1	2,0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetakan kantor	250	150	4	2	50,00	152	60,80
X	X X	0 1	2,0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10	6	3	1	33,33	7	70,00
X	X	0	2,0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	300	180	15	7	46,67	187	62,33

	X	1	6	8		Kunjungan Tamu							
X	X X	0 1	2,0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110	66	25	22	88	88	80,00
X	X X	0 1	2,0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Saya Air dan Listrik	60	36	12	6	50	42	70,00
X	X X	0 1	2,0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium pegawai tetap dan tidak tetap, honor PPk, pejabat pengadaan dll)	60	36	12	6	50	42	70,00
X	X X	0 1	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
X	X X	0 1	2,0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115	69	23	12	52,17	81	70,43
X	X X	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (laptop, komputer, printer)	370	222	74	29	39,19	251	67,84
X	X X	0 1	2,0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15	9	1	1	100	10	66,67

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu sampei dengan Triwulan II tahun 2024 belum selurunya terealisasi sesuai dengan target yang telah di tetapkan berdasarkan anggran KAS dinas pendidikan dan kebudayan sampai dengan Triwulan II realisasi keuangan sudah mencapai 40.11 % dan realisasi fisik 50.72 % berdasarkan laporan pada aplikasi E-Mep sampai Triwulan II, meskipun demikian masih terdapat program/kegiatan yang penyerapannya masih rendah dikarenakan adanya pergeseran mendahului perubahan sehingga kegiatan yang seharusnya sudah bisa di laksanakan terkendala pada sumberdana kegiatan yang ada dalam SIPD dari 16 kegiatan yang di rencana dalam rencana kerja E-Mep yang realisasinya lebih dari 90,00% dan < dari 90% sebagai berikut :

1. Kegiatan penetapan cagar budaya realisasi keuangan sampai bulan juni sebesar 92.90 %. Dengan realisasi fisik 100 % dengan jumlah sub kegiatan hanya 1 yaitu Penetapan cagar budaya.
2. Kegiatan Administrasi barang milik daerah realisasi keuangan sampai bulan juni sebesar 68.93 %. Dengan realisasi fisik 100 % sehingga kegiatan tersebut sudah selesai.
3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi keuangan sampai bulan juni sebesar 28.78 %. Dengan realisasi fisik 80.73 %
4. Administrasi keuangan perangkat daerah realisasi keuangan sampai bulan juni sebesar 58.72 %. Dengan realisasi fisik 73.97 %

5. Administrasi umum perangkat daerah realisasi keuangan sampai bulan juni sebesar 20.74 %. Dengan realisasi fisik 33.77 %
6. Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah realisasi keuangan sampai bulan juni sebesar 31.69 %. Dengan realisasi fisik 46.64 %
7. Pengelolaan Pendidikan Dasar realisasi keuangan sampai bulan juni sebesar 35.27 %. Dengan realisasi fisik 40.34 % terdiri dari 12 sub kegiatan 10 sub kegiatan sudah terlaksana kegiatanya diantaranya : Pembangunan USB satu atap Uveentumbu Kawatuna sudah dalam tahap pengambilan MC0 dan pembuatan akses jalan mobilisasi material, Pembangunan ruang guru Sd Inp 1 Lere, SD Inp 5 Birobuli, SD inp Salena Padanjese proses pembangunanya sudah mencapai 10%, Pembangunan sarana, prasaranadan utilitas sekolah proses pembangunan mencapai 35 % untuk 7 sekolah dengan dana DAK, Pembangnan jamban siswa proses pembangunan fisik sudah mencapai 62%, Belanja Biaya operasional Sekolah sudah terealisasi Tahap I, Kegiatan pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa kegiatan fisik sudah 100%. rehab sedang/berat ruang kelas sekolah realisasi keuangan 22.58 % realisasi fisik 42.95%, dengan rincian rehab SD Inp 1 Kamonji, SDN Duyu, SDN 5 Palu, SD Inp Salena dan SD Kabonena sudah mencapai 67%, penyelenggaran proses belajar bagi peserta didk realisasi keuangan 20.63% realisasi fisik 33.33%
8. Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama realisasi keuangan sampai bulan juni sebesar 28.54 %. Dengan realisasi fisik 41.65%, dengan rincian : pembangunan ruang UKS SMP Negeri 3 Palu dalam proses pemasangan pondasi, pengecoran slof dan pembesia

dengan progres 8%, Pembangunan perpustakaan SMP Negeri 3 Palu Proses pemasangan Pondasi, Pembangunan ruang leb. IPA dan komputer 3 sekolah proses mencapai 6%,

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Selain itu kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu juga mengacu pada Indikator Kinerja Kunci yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Permendagri nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut disampaikan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dalam Tabel T-C.30

Tabel. 2.2

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU/ IKK	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi Capaian Tahun 2024		Proyeksi Tahun 2025		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)		IKU	16.5	17	17.4	17.6	16,51		17.4	17.6	
2	Rata-rata lama sekolah (tahun)		IKU	11.63	11.65	11.71	11.81	11,74		11.71	11.81	
3	Persentase kelestarian cagar budaya dalam kondisi lestari		IKU	100	100	100	100	100		100	100	
4	Presentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	SPM		100	100	100	100	87,86		100	100	
5	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu			CC (58)	CC (59)	B (60,50)		B		B (60,50)		
6	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Palu			B	BB	BB	BB	BB		BB	BB	
7	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)			B (76,61-88,30)	B (76,61-88,30)	A (88.31-100)	A (88.31-100)	B		A (88.31-100)	A (88.31-100)	
1	**Pendidikan**											

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU/ IKK	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi Capaian Tahun 2024		Proyeksi Tahun 2025		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		IKK	49.96	54.87	59.77	64.68	69,49		59.77	64.68	
1.3	Angka Partisipasi Kasar											
	1.3.1 Angka Partisipasi Kasar SD		IKK	90	92	95	97.00	97,74		95	97.00	
	1.3.2 Angka Partisipasi Kasar SMP		IKK	82	87	91	96.00	102,82		91	96.00	
1.4	Angka Partisipasi Murni											
	1.4.1 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A		IKK	84.32	88.24	92.16	96.08	91,18		96.08	91,18	
	1.4.2 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B		IKK	71,32	78,49	85,66	92.83	87,85		92.83	87,85	
1.5	Angka Partisipasi Sekolah											
	1.5.1 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A		IKK	88	91	94	97.00	96,94		97.00	96,94	
	1.5.2 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS/Paket B		IKK	75.2	81.4	87.6	93.8	104,00		93.8	104,00	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU/ IKK	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi Capaian Tahun 2024		Proyeksi Tahun 2025		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1.6	Angka Putus Sekolah											
	1.6.1 Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A		IKK	10	8	6	4	0	0	6	4	
	1.6.2 Angka Putus Sekolah SMP/MTS/Paket B		IKK		15	12	9	0		12	9	
1.7	Angka Kelulusan (AL)											
	1.7.1 Angka Kelulusan SD/MI/Paket A		IKK	100	100	100	100	100		100	100	
	1.7.2 Angka Kelulusan SMP		IKK	100	100	100	100	100		100	100	
1.8	Angka Melanjutkan (AM)											
	1.8.1 Angka Melanjutkan SD/MI/Paket A		IKK	88.69	91.52	94.35	97.17	85.77		97.17	85.77	
	1.8.2 Angka Melanjutkan SMP/MTS/Paket B		IKK									
1.9	Fasilitas Pendidikan											
	1.9.1 Sekolah Pendidikan SD/MI		IKK	75.20	81.40	87.60	93.80	96.92		93.80	96.92	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU/ IKK	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi Capaian Tahun 2024		Proyeksi Tahun 2025		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
	kondisi bangunan baik											
	1.9.2 Sekolah Pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik		IKK	62.40	71.80	81.20	90.60	94.84		90.60	94.84	
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar											
	SD		IKK	44.38	46.03	47.69	49.34	44.00		47.69	49.34	
	SMP		IKK	25.80	28.22	30.65	33.07	26.00		30.65	33.07	
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar											
	SD		IKK	19.2	21.4	23.6	25.8	18		23.6	25.8	
	SMP		IKK	17.6	21.2	24.8	28.4	19		24.8	28.4	
1.12	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)		IKK	99.85	99.95	99.88	99.88	100		99.88	99.88	
1.13	Kualifikasi S1 / D-IV											
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV SD		IKK	88.8	92	94.4	97.2	94.97		94.4	97.2	
1.15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV		IKK	96	97	98	99	98.74		98	99	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU/ IKK	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi Capaian Tahun 2024		Proyeksi Tahun 2025		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
	SMP											
16	**Kebudayaan**											
16.5	Terlestarikannya Cagar Budaya		IKK	75	78	83		44.44		80	80	
17.	**SPM Kemendagri 59 tahun 2021**											
17.2	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	SPM		N/A	54.86	57.48	61.39	56.24		57.48	61.39	
17.3	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	SPM		N/A	39.09	40.60	43.25	39.09		40.60	43.25	
17.4	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	SPM		N/A	65.54	68.66	71.01	68.63		68.66	71.01	
17.5	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	SPM		N/A	64.92	67.41	69.84	59.98		67.41	69.84	
17.6	Peningkatan Proporsi jumlah satuan PAUD	SPM		67,12	67,15	67,18	83.84	83.78		83.84	67,18	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU/ IKK	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi Capaian Tahun 2024		Proyeksi Tahun 2025		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
	yang mendapatkan Minimal Akreditasi B											
17.7	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/DIV	SPM		74,43	75,41	76,39	80.25	80.25		74.93	76,39	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu adalah sebagai berikut: Isu lokus pada renja tahun 2024

1. **Kualitas layanan Pendidikan**

a. Pemenuhan dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan;
b. Penambahan satuan pendidikan PAUD Negeri di Kota Palu
c. Peningkatan kualitas Infrastruktur pendidikan
d. Pemerataan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar
e. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan sistem pendidikan
f. Kebutuhan pelayanan publik yang baik sebagai perwujudan *good governance*
g. Digitalisasi satuan pendidikan

2. **Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia**

a. Penyetaraan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum sesuai kualifikasi pendidikan
b. Penataan dan pemerataan tenaga pendidik belum terlaksana dengan baik
c. Rendahnya kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam memanfaatkan teknologi informasi
d. Kelembagaan manajemen berbasis sekolah masih belum optimal

e. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran satuan pendidikan
f. Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum di kembangkan.

Untuk Isu strategis dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dari beberapa isu tahun 2024 menitik beratkan pada beberapa isu stratrgis diantaranya :

1. Digitalisasi Satuan Pendidikan

Kebijakan pembangunan pendidikan saat ini, di visi Pertama pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila dan kedua adalah tantangan kemajuan teknologi informasi dan era globalisasi. Terkait tantangan kemajuan teknologi informasi dan era globalisasi di era Merdeka Belajar, kebijakan yang diluncurkan oleh Mendikbudristek ini mendorong agar kita semua dapat membangun kolaborasi melalui berbagai sarana dan fasilitas. Salah satunya fasilitas digital yang dapat digunakan sebagai sumber belajar, sarana belajar serta dapat mengakses informasi yang akan membantu kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui TIK, satuan pendidikan dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan khususnya oleh Kemendikbudristek dalam akun belajar.id, untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan wawasan para guru di sekolah. dengan adanya ***akun belajar.id*** ini kegiatan belajar mengajar menjadi lebih mudah karena terintegrasi dengan Google. Guru bisa mendapatkan akses yang luar biasa dari Google. Pertama bisa melakukan panggilan video dengan menggunakan tools Google meet, untuk belajar bersama peserta didik.

2. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan sistem pendidikan

Implementasi dari Pemenuhan 9 (Sembilan) Indikator SPM dengan Menyusun program dari kegiatan untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar di daerah, mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, disusun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Kota Palu .

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Rapat koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidkan antara Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diwakili oleh BPMP provinsi Sulawesi Tengah yang di laksanakan di Makassar membahas Penerapan SPM di daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar SPM yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mencabut Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Hasil pembahasan Desk urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Koordinasi Teknis perencanaan Pembangunan T.A.2023 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menyepakati terpenuhinya kebutuhan dasar SPM Bidang Pendidikan melalui 9 (Sembilan) indikator yaitu jumlah anak usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS), Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS), Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS), Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesment Nasional, Rata-Rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesment Nasional, Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesment Nasional, Rata-Rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesment Nasional, Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan Paud yang mendapatkan minimal Akreditasi B, Pertumbuhan Proporsi Guru Paud formal dengan Kualifikasi S1/DIV dan Rasio Pengawas dan Penilik Paud.

Perencanaan Berbasis data Rujukannnya adalah Rapor Pendidikan, saat ini Rapor Pendidikan Kota Palu masih ada indikator yang masih kurang yaitu Numerasi tingkat SMP dan Angka Partsipasi Sekolah (APS) Paud sehingga perlunya tindak lanjut atau kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam Pemen uhan Indikator SPM yang masih kurang.

Harapannya Pemerintah Daerah dapat lebih meningkatkan kinerja capaian penerapan SPM, terutama bagi daerah yang hingga saat ini belum mencapai target kinerja 100% setiap Tahunnya. Khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu “Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, maka perlu komitmen dan kerja sama setiap pemangku kepentingan di daerah dan membuat laporan Tindak lanjut hasil Rapor Pendidikan Kota Palu.

3. Peningkatan kualitas Infrastruktur pendidikan

Infrastruktur pendidikan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran agar dapat lebih efektif dan efisien. Infrastruktur baik dari gedung, ruang kelas, maupun perpustakaan, sarana dan prasarana lainnya menjadi pendukung dalam proses pembelajaran dalam tiap jenjang sekolah.

Untuk peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan telah dilakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar SD maupun SMP di Kota Palu berupa rehabilitasi sedang atau berat, pembangunan perpustakaan, penambahan ruang, pembangunan laboratorium dan ruang praktikum, rehabilitasi sedang atau berat ruang kelas. Terkait peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada Tahun 2024 yang rencananya akan di usulkan di Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 melalui APBN yang pada saat ini berada di Tahap Verifikasi Usulan dari Satuan Pendidik melalui Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan akan di input di Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna).

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Target utama dalam Rencana Program dan Prioritas pembangunan Daerah Kota Palu di bidang pendidikan adalah mewujudkan pendidikan yang mudah, murah, terjangkau dan berkualitas. Selanjutnya penyelarasan Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dengan Rencana Program Tahun 2024 meliputi :

Tabel. 2.4.1
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
Tahun 2024

No.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Palu			445.061.659.712	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Palu			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Palu			445.061.659.712	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kota Palu			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Palu			435.341.883.483	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Palu			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Palu	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	328.696.234.079	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Palu	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	**Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	405.044.798	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Palu	**Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	118.520.950	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	77.116.250	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	68.704.548	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	140.703.050	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	321.395.392.573	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Palu	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN	2714 Orang	321.269.047.873	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yangMenerima Gaji	2714 Orang /Bulan	

				/Bulan				danTunjangan ASN		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 dokumen	126.344.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Palu	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	315.162.360	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kota Palu	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD	2 Laporan	315.162.360	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD	2 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	265.037.500	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Palu	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu	Jumlah DokumenMonitoring, Evaluasi,dan Penilaian KinerjaPegawai	2 dokumen	265.037.500	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu	Jumlah DokumenMonitoring, Evaluasi,dan Penilaian KinerjaPegawai	2 dokumen	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	**Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	2.021.986.994	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Palu	**Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah PaketKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan	5 paket	2.423.250	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah PaketKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan	5 paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatandan PerlengkapanKantor yangDisediakan	6 Paket	1.213.467.650	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatandan PerlengkapanKantor yangDisediakan	6 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangDisediakan	12 Paket	197.160.162	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangDisediakan	12 Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangDisediakan	4 Paket	35.225.932	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangDisediakan	4 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah DokumenBahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan	3 Dokumen	40.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah DokumenBahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan	3 Dokumen	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah LaporanFasilitasi KunjunganTamu	15 Laporan	54.570.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah LaporanFasilitasi KunjunganTamu	15 Laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah LaporanPenyelenggaraanRapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	25 Laporan	478.440.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah LaporanPenyelenggaraanRapat Koordinasi danKonsultasi	25 Laporan	

								SKPD		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	**Presentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	195.937.902	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Palu	**Presentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	
	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	39.690.000	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Kota Palu	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	1 unit	156.247.902	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Kota Palu	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	1 unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	3.163.531.200	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Palu	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrikyang Disediakan	12 Laporan	539.640.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrikyang Disediakan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan UmumKantor yangDisediakan	12 Laporan	2.623.891.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan UmumKantor yangDisediakan	12 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	934.140.752	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Palu	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan DinasJabatan yangDipelihara dandibayarkan Pajaknya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23 unit	621.340.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan DinasJabatan yangDipelihara dandibayarkan Pajaknya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara	74 unit	32.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara	74 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi	1 unit	280.100.752	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor danBangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi	1 unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Palu	**Pencapaian StandarPelayanan MinimalPendidikan**	**100%**	105.206.521.804	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Kota Palu	**Pencapaian StandarPelayanan MinimalPendidikan**	**100%**	

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Palu	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**100%**	51.134.577.525	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Palu	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**100%**	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Palu	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 unit	3.351.485.473	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Palu	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 unit	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Palu	Jumlah Ruang KelasBaru yang Bertambah	2 ruang	1.400.286.500	PenambahanRuang Kelas Baru	Kota Palu	Jumlah Ruang KelasBaru yang Bertambah	2 ruang	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Palu	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 ruang	959.341.050	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Palu	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 ruang	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Palu	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 Unit	4.614.283.757	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Palu	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 Unit	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kota Palu	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 ruang	2.274.094.285	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kota Palu	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 ruang	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Palu	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	10 paket	1.962.016.353		Kota Palu		10 paket	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Palu	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	153 paket	300.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Palu	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	153 paket	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Palu	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 paket	35.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Palu	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 paket	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Palu	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	35370 Peserta didik	31.312.764.387	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Palu	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	35370 Peserta didik	
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Palu	Jumlah SatuanPendidikan yangMenyelenggarakanProses Belajar danUjian	172 satuan pendidikan	111.355.125	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Palu	Jumlah SatuanPendidikan yangMenyelenggarakanProses Belajar danUjian	172 satuan pendidikan	
	Pembinaan Minat,Bakat danKreativitas Siswa	Kota Palu	Jumlah Siswa yangMengikuti AjangKompetisi/LombaAkademik dan NonAkademik	670 peserta didik	416.554.250	Pembinaan Minat,Bakat danKreativitas Siswa	Kota Palu	Jumlah Siswa yangMengikuti AjangKompetisi/LombaAkademik dan NonAkademik	670 peserta didik	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Palu	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	172 Satuan pendidikan	4.432.361.345	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**	Kota Palu	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	172 Satuan pendidikan	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Palu	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**100%**	38.609.490.388	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Palu	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**100%**	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Palu	Jumlah Ruang KelasBaru yang Bertambah	6 Ruang	1.899.117.399	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Palu	Jumlah Ruang KelasBaru yang Bertambah	6 Ruang	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Palu	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 ruang	230.501.750	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Palu	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 ruang	

	PembangunanPerpustakaanSekolah	Kota Palu	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang TelahDibangun	2 ruang	870.771.000	PembangunanPerpustakaanSekolah	Kota Palu	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang TelahDibangun	2 ruang	
	Pembangunan Laboratorium	Kota Palu	Jumlah Pembangunan Laboratorium	1 ruang	1.733.550.000	Pembangunan Laboratorium	Kota Palu	Jumlah Pembangunan Laboratorium	1 ruang	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Palu	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1.443.740.559	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Palu	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Palu	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 ruang	3.209.313.744	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Palu	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 ruang	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Palu	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	520.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Palu	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kota Palu	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 ruang	1.430.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kota Palu	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 ruang	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kota Palu	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1 unit	130.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kota Palu	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1 unit	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Palu	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 unit	199.150.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Palu	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 unit	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Palu	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	432.111.248		Kota Palu	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Palu	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	16008 Peserta didik	20.476.726.151	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Palu	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	16008 Peserta didik	
	Pengadaan AlatPraktik dan PeragaSiswa	Kota Palu	Jumlah Alat Praktikdan Peraga Siswa yangTersedia	3 Paket	1.365.540.000	Pengadaan AlatPraktik dan PeragaSiswa	Kota Palu	Jumlah Alat Praktikdan Peraga Siswa yangTersedia	3 Paket	
	PenyelenggaraanProses Belajar danUjian bagi PesertaDidik	Kota Palu	Jumlah Peserta Didikyang Mengikuti ProsesBelajar dan Ujian	16140 Peserta didik	77.668.500	PenyelenggaraanProses Belajar danUjian bagi PesertaDidik	Kota Palu	Jumlah Peserta Didikyang Mengikuti ProsesBelajar dan Ujian	16140 Peserta didik	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Palu	Jumlah Siswa yangMengikuti AjangKompetisi/LombaAkademik dan NonAkademik	650 peserta	550.147.400	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Palu	Jumlah Siswa yangMengikuti AjangKompetisi/LombaAkademik dan NonAkademik	650 peserta	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Palu	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	48 satuan pendidikan	6.119.072.637	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Palu	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	48 satuan pendidikan	
	Pengelolaan Pendidikan Anak	Kota	**Terlaksananya Pengelolaan**	**100%**		Pengelolaan Pendidikan Anak	Kota	**Terlaksananya Pengelolaan**	**100%**	

	Usia Dini (PAUD)	Palu	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		10.210.031.053	Usia Dini (PAUD)	Palu	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Palu	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8 unit	1.296.151.763	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Palu	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8 unit	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Palu	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 paket	953.417.103	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Palu	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 paket	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Palu	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	7450 peserta didik	62.639.650	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Palu	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	7450 peserta didik	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Palu	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	271 satuan pendidikan	1.809.924.537	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Palu	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	271 satuan pendidikan	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Palu	Terkelolanya Dana BOP PAUD	271 satuan pendidikan	6.087.898.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Palu	Terkelolanya Dana BOP PAUD	271 satuan pendidikan	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Palu	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**100%**	5.252.422.838	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Palu	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**100%**	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kota Palu	Jumlah satuan pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	10 satuan pendidikan	100.850.882	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kota Palu	Jumlah Peserta Didikyang Mengikuti ProsesBelajar	10 satuan pendidikan	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Palu	Jumlah SekolahNonformal/Kesetaraan yang DilaksanakanPembinaanKelembagaan danManajemen	10 Satuan pendidikan	1.508.065.556	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Palu	Jumlah SekolahNonformal/Kesetaraanyang DilaksanakanPembinaanKelembagaan danManajemen	10 Satuan pendidikan	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Palu	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan pendidikan	3.643.506.400	**Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan**	Kota Palu	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan pendidikan	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kota Palu	**Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**	**100%**	1.439.127.600	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Kota Palu	**Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**	**100%**	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Palu	**Terpenuhinya Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan**	**100%**	1.439.127.600	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Palu	**Terpenuhinya Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan**	**100%**	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan	3 Dokumen	1.391.095.000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan	3 Dokumen	

	Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2 laporan	48.032.600	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2 laporan	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kota Palu			9.719.776.229		Kota Palu			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Palu	**Cakupan pengembangan kebudayaan**	**100%**	9.326.343.895	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Kota Palu	**Cakupan pengembangan kebudayaan**	**100%**	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Kota Palu	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	**100%**	9.326.343.895	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Kota Palu	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Palu	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Pemanfaatan	1 Laporan	9.326.343.895	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Pemanfaatan	Kota Palu	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Laporan	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Palu	Terwujudnya pengembangan kesenian tradisional	**100%**	393.432.334	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Palu	Terwujudnya pengembangan kesenian tradisional	**100%**	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100%	324.341.000	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100%	
	Penetapan Cagar Budaya	Kota Palu	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 objek	324.341.000	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kota Palu	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 objek	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100%	69.091.334	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100%	
	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Palu	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6 objek	69.091.334	Pengembangan Cagar Budaya	Kota Palu	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	6 objek	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Atensi masyarakat terhadap pembangunan pendidikan diwujudkan melalui dukungan, partisipasi, serta usulan berbagai program dan kegiatan baik yang disalurkan melalui forum resmi eperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) maupun melalui berbagai usulan yang disampaikan melalui berbagai media dan forum lainnya. Dari Sekian Banyak usulan yang bisa dirangkum dari hasil musrenbang Tahun 2023 maupun forum lainnya pada umumnya terkait dengan rehab Ruang Kelas Sekolah baik PAUD, SD dan SMP sehingga dari usulan tersebut dapat kita lihat skala prioritas bagi sekolah yang benar-benar membutuhkan, Namun demikian ada beberapa usulan masyarakat terhadap pembangunan pendidikan yang terinventarisir diantaranya adalah :

Tabel. 2.5.1
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

INPUTAN USULAN HASIL SIPD
Teknokrat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Program Pengelolaan Pendidikan				
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jalan Suprapto No 55 kelurahan besusu tengah , Kota Palu	Pengadaan Mobiler Yaitu Meja Panjang dan Kursi Sekolah SDN		
		Jl. Malonda	Pembuatan Pagar Sekolah SD Inpres Tipo 150 m		
		SMPN 15 Palu	Pembuatan pagar SMPN 15		
		SD Negeri palupi	Pembuatan pagar SD Negeri palupi		
		SD Inpres 3 Birobuli	Pengadaan Mobiler SD Inpres 3 Birobuli		
		SMPN 22 Palu	Pengadaan Mobiler SMPN22 Palu		
		Jl. Basuki Rahmat, Lrg. Samping Indomobil	pekerjaan paving blok untuk lapangan upacara SDN Inpres 1 Tatura		
		Jl. Yanggebodu	perbaikan pagar UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tawaeli 1 paket		
		Lorong KaryaThayyibah	Perbaikan pagar SD KaryaThayyibah 1 Paket		
		SMP 9 Jl. Zebra	Bantuan alat musik Marching Band		
		Kel, Tondo, Layana, Talise	Kursus untuk Milenial di Kampung Inggris JATIM 10 orang		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU

3.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Perencanaan perubahan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berikut ini disajikan informasi tentang Rencana Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024

Tabel 3.3.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	4		5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kota Palu		459,223,525,684		439,371,022,076	-19,852,503,608	-0	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Kota Palu		459,223,525,684		439,371,022,076	-19,852,503,608	-0	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Kota Palu		449,982,221,384		429,651,245,847	-20,330,975,537	-0	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Palu	**100%**	340,159,710,535	**100%**	324,396,691,443	-15,763,019,092	-0	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Palu	**4 dokumen**	235,648,200	**4 dokumen**	405,044,798	169,396,598	1	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 dokumen	78,055,000.00	1 dokumen	118,520,950	40,465,950	1	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	46,307,250.00	1 dokumen	77,116,250	30,809,000	1	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	33,891,900.00	1 dokumen	68,704,548	34,812,648	1	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Laporan	77,394,050.00	1 Laporan	140,703,050	63,309,000	1	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Palu	**100%**	335,545,898,845	**100%**	317,340,688,114	-18,205,210,731	-0	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN	Kota Palu	2714 Orang /Bulan	335,430,913,845.00	2714 Orang /Bulan	317,202,343,414.00	-18,228,570,431	-0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	4 dokumen	114,985,000.00	4 dokumen	138,344,700.00	23,359,700	0	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kota Palu	**100%**	28,945,000	**100%**	315,162,360	286,217,360	10	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD	Kota Palu	2 Laporan	28,945,000.00	2 Laporan	315,162,360	286,217,360	10	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Palu	**100%**	61,457,500	**100%**	279,437,500	217,980,000	4	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah DokumenMonitoring, Evaluasi,dan Penilaian KinerjaPegawai	Kota Palu	2 dokumen	61,457,500.00	2 dokumen	279,437,500.00	217,980,000	4	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Palu	**100%**	120,919,790	**100%**	2,031,117,394	1,910,197,604	16	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah PaketKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan	Kota Palu	5 paket	2,423,250	5 paket	11,553,650.00	9,130,400	4	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatandan PerlengkapanKantor yangDisediakan	Kota Palu	6 Paket	150,000	6 Paket	1,213,467,650	1,213,317,650	8,089	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangDisediakan	Kota Palu	12 Paket	87,530,240.00	12 Paket	197,160,162	109,629,922	1	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangDisediakan	Kota Palu	4 Paket	287,300	4 Paket	35,225,932	34,938,632	122	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah DokumenBahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yangDisediakan	Kota Palu	3 Dokumen	700,000	3 Dokumen	40,700,000	40,000,000	57	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah LaporanFasilitasi KunjunganTamu	Kota Palu	15 Laporan	1,250,000.00	15 Laporan	54,570,000	53,320,000	43	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Kota Palu	25 Laporan	28,579,000.00	25 Laporan	478,440,000	449,861,000	16	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Palu	100%	180,000	100%	195,937,902	195,757,902	1,088	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	20 Unit	90,000	20 Unit	39,690,000	39,600,000	440	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kota Palu	1 unit	90,000	1 unit	156,247,902	156,157,902	1,735	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Palu	100%	3,575,031,200	100%	3,154,400,800	-420,630,400	-0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrikyang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	289,640,000.00	12 Laporan	530,509,600	240,869,600	1	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan UmumKantor yangDisediakan	Kota Palu	12 Laporan	3,285,391,200.00	12 Laporan	2,623,891,200	-661,500,000	-0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Palu	100%	591,630,000.00	100%	674,902,575	83,272,575	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan DinasJabatan yangDipelihara dandibayarkan Pajaknya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	23 unit	564,840,000.00	23 unit	388,501,823	-176,338,177	-0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara	Kota Palu	74 unit	26,700,000.00	74 unit	32,700,000	6,000,000	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/D	Kota Palu	1 unit	90,000	1 unit	253,700,752	253,610,752	2,818	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
		irehabilitasi								
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Pencapaian StandarPelayanan MinimalPendidikan**	Kota Palu	**100%**	107,022,278,324	**100%**	105,206,521,804	- 1,815,756,520	- 0	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Kota Palu	**100%**	53,383,295,154	**100%**	51,134,577,525	- 2,248,717,629	- 0	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Palu	1 unit	3,376,489,380.00	1 unit	3,351,485,473	- 25,003,907	- 0	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang KelasBaru yang Bertambah	Kota Palu	2 ruang		2 ruang		-	#DIV/0!	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Palu	1 ruang	60,000	1 ruang	959,341,050	959,281,050	15,988	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Palu	2 ruang	90,000					
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Palu	5 Unit	8,426,442,000.00	5 Unit	4,917,348,689	- 3,509,093,311	- 0	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	2 ruang	70,000.00					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	4 ruang		4 ruang		-	#DIV/0!	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Palu	10 paket	1,498,590,000.00	10 paket	1,962,016,353	463,426,353	0	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Palu	153 paket	700,000	153 paket	300,000,000	299,300,000	428	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang	Kota Palu	10 paket				-	#DIV/0!	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
		Tersedia								
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Palu	35370 Peserta didik	31,324,028,149.00	35370 Peserta didik	31,312,764,387	-11,263,762	-0	
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SatuanPendidikan yangMenyelenggarakanProses Belajar danUjian	Kota Palu	172 satuan pendidikan		172 satuan pendidikan		-	#DIV/0!	
	Pembinaan Minat,Bakat danKreativitas Siswa	Jumlah Siswa yangMengikuti AjangKompetisi/LombaAkademik dan NonAkademik	Kota Palu	670 peserta didik	416,554,250	670 peserta didik	416,554,250	-	-	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kota Palu	172 Satuan pendidikan	4,659,927,000.00	172 Satuan pendidikan	3,754,298,275.00	-905628725	-0	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Palu	10 paket	35,000.00	10 paket	35,000.00	0	-	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Palu	2 ruang	1,400,286,250.00	2 ruang	1,686,186,500.00	285900250	0	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kota Palu	172 satuan pendidikan	111,355,125.00	172 satuan pendidikan	111,355,125.00			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	4 ruang	2,168,668,000.00	4 ruang	2,363,192,423.00			

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Kota Palu	**100%**	39,063,965,000	**100%**	38,609,490,388	-454,474,612	-0	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kota Palu	1 Unit	90,000					
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang KelasBaru yang Bertambah	Kota Palu	6 Ruang		6 Ruang		-	#DIV/0!	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		1 ruang%	162,400					
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Palu	10 ruang	90,000	10 ruang	230,501,750	230,411,750	2,560	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang TelahDibangun	Kota Palu	2 ruang	4,564,855,000	2 ruang	870,771,000	-3,694,084,000	-1	
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium	Kota Palu	1 ruang	390,000	1 ruang	1,733,550,000	1,733,160,000	4,444	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Palu	1 Unit	1,414,043,400	1 Unit	1,443,740,559	29,697,159	0	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	8 ruang	3,540,460,000	8 ruang	3,209,313,744	-331,146,256	-0	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	2 ruang	520,000	2 ruang	520,000	-	-	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	3 ruang	1,430,000	3 ruang	1,430,000	-	-	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kota Palu	1 unit	130,000	1 unit	130,000	-	-	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	10 unit	650,000	10 unit	199,150,000	198,500,000	305	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kota Palu	1 Paket	100,154,500	1 Paket	432,111,248	331,956,748	3	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Palu	16008 Peserta didik	19,738,453,000	16008 Peserta didik	20,476,726,151	738,273,151	0	
	Pengadaan AlatPraktik dan PeragaSiswa	Jumlah Alat Praktikdan Peraga Siswa yangTersedia	Kota Palu	3 Paket	1,130,310,000	3 Paket	1,365,540,000	235,230,000	0	
	PenyelenggaraanProses Belajar danUjian bagi PesertaDidik	Jumlah Peserta Didikyang Mengikuti ProsesBelajar dan Ujian	Kota Palu	16140 Peserta didik		16140 Peserta didik		-	#DIV/0!	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yangMengikuti AjangKompetisi/LombaAkademik dan NonAkademik	Kota Palu	650 peserta	555,295,000	650 peserta	550,147,400	- 5,147,600	- 0	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kota Palu	48 satuan pendidikan	6,238,941,600	48 satuan pendidikan	6,119,072,637	- 119,868,963	- 0	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		48 satuan pendidikan	77,668,500	48 satuan pendidikan	77,668,500			

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		6 ruang	1,700,321,600	6 ruang	1,899,117,399			
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Kota Palu	**100%**	10,456,866,145	**100%**	10,210,031,053	-246,835,092	-0	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kota Palu	8 unit	1,853,116,000	8 unit	1,296,151,763	-556,964,237	-0	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kota Palu	5 paket	953,450,620	5 paket	953,417,103	-33,517	-0	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Kota Palu	7450 peserta didik	180,748,000	7450 peserta didik	62,639,650	-118,108,350	-1	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Palu	271 satuan pendidikan	1,654,053,525	271 satuan pendidikan	1,809,924,537	155,871,012	0	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terkelolanya Dana BOP PAUD	Kota Palu	271 satuan pendidikan	5,815,498,000	271 satuan pendidikan	6,087,898,000	272,400,000	0	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Kota Palu	**100%**	4,118,152,025	**100%**	5,252,422,838	1,134,270,813	0	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kota Palu	10 satuan pendidikan				-	#DIV/0!	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah SekolahNonformal/Kesetaraanyang DilaksanakanPembinaan Kelembagaan danManajemen	Kota Palu	10 Satuan pendidikan	1,569,039,925	10 Satuan pendidikan	1,508,065,556	-60,974,369	-0	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kota Palu	12 Satuan pendidikan	2,349,106,400	12 Satuan pendidikan	3,643,506,400	1,294,400,000	1	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kota Palu	10 Satuan pendidikan	200,005,700	10 Satuan pendidikan	100,850,882	-99,154,818	-0	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**	Kota Palu	**100%**	2,800,232,525	**100%**	48,032,600	-2,752,199,925		
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Terpenuhinya Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan**	Kota Palu	**100%**	2,800,232,525	**100%**	48,032,600	-2,752,199,925		
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kota Palu	3 Dokumen	1,391,095,000	3 Dokumen		-1,391,095,000		
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non	Kota Palu	2 laporan	1,409,137,525	2 laporan	48,032,600	-1,361,104,925	-1	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
	Nonformal/Kesetaraan	Formal/Kesetaraan								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		Kota Palu		9,241,304,300		9,719,776,229	478,471,929	0	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Cakupan pengembangan kebudayaan**	Kota Palu	**100%**	8,750,395,000	**100%**	9,326,343,895	575,948,895	0	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Kota Palu	**100%**	8,750,395,000	**100%**	9,326,343,895	575,948,895	0	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Pemanfaatan	Kota Palu	1 Laporan	8,750,395,000	1 Laporan	9,326,343,895	575,948,895	0	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terwujudnya pengembangan kesenian tradisional	Kota Palu	**100%**	324,860,900	**100%**	393,432,334	68,571,434	0	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	324,341,000	100%	324,341,000	-	-	
	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kota Palu	1 objek	324,341,000	1 objek	324,341,000	-	-	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat	Terlaksananya Pengelolaan Cagar	Kota Palu	100%	519,900	100%	69,091,334	68,571,434	132	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
	Kabupaten/Kota	Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Kota Palu	6 objek	519,900	6 objek	69,091,334	68,571,434	132	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				166,048,400.00					
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Kota Palu	1 Musium	166,048,400.00					
	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu		Kota Palu	1 Musium	166,048,400.00					

3.2 Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan

Capaian program dan kegiatan berkaitan erat dengan indikator kinerja yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu selama 1 (satu) tahun anggaran kegiatan, yang diharapkan dapat mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapatdicapai, relevan dan sesuaidengan kurun waktutertentu. Besaran target kinerja yang akan dilaksanakan DinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Palu selama Tahun 2024 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Akhir Tahun Renstra 2021	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatkan Aksesbilitas dan kualitas pendidikan pada satuan Pendidikan PAUD dan pendidikan Dasar	Harapan Lama Sekolah	16.23	16.5	17	17.4	17.6	18
			Rata-rata Lama sekolah (tahun)	11.61	11.63	11.65	11.71	11.81	12
			Presentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan anak Usia Dini		100	100	100	100	100
			Presentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar		100	100	100	100	100
			Presentase Standar Pelayanan Minimal Kesetaraan		100	100	100	100	100
			Pendidikan Anak Usia Dini APK (PAUD)	45.06	49.96	54.87	59.77	64.68	69.58
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	86.89	90	92	95	97	100
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	77.67	82	87	91	96	100
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD	80.4	84.32	88.24	92.16	96.08	100
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	64.16	71,32	78,49	85,66	92,83	100
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-	86	88.8	92	94.4	97.2	100

			IV SD						
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP	95	96	97	98	99	100
	Meningkatnya pengembangan kebudayaan berdasarkan nilai keagamaan dan kearifan lokal	Meningkan pelestarian cagar budaya Daerah, Kesenian Tradisional dan Kebudayan Daerah pada Dinas Pendidkan Kota Palu	Indeks Pembangunan Pebudayaan (Dimensi 2 dan Dimensi 4)	48,11	51,56	52,42	53,28	54,14	55
			Presentase Terlestarikanya cagar budaya	55	57	58	59	61	61
2	Mewujudkan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	N/A	CC (58)	CC (59)	B (60,50)	B (61)	B (63)
			Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Palu	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)	BB (70-80)
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (76,61-88,30)	B (76,61-88,30)	B (76,61-88,30)	B (76,61-88,30)	A (88,31-100,00)	A (88,31-100,00)

Tabel. 3.2.2

Perubahan Atas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Akhir Tahun Renstra 2021	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan kelestarian budaya	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	16.23	16.5	17	17.4	17.6	18
			Rata-rata Lama sekolah (tahun)	11.61	11.63	11.65	11.71	11.81	12
		Meningkatnya kelestarian budaya kota palu	Persentase kelestarian cagar budaya dalam kondisi lestari		100	100	100	100	100

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
1	**Pendidikan**							

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
1.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	45.06	49.96	54.87	59.77	64.68	69.58	69.58
1.3	Angka Partisipasi Kasar							
	1.3.1 Angka Partisipasi Kasar SD	86.89	90	92	95	97	100	100
	1.3.2 Angka Partisipasi Kasar SMP	77.67	82	87	91	96	100	100
1.4	Angka Partisipasi Murni							
	1.4.1 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	80.4	84.32	88.24	92.16	96.08	100	100
	1.4.2 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B	64.16	71,32	78,49	85,66	92,83	100	100
1.5	Angka Partisipasi Sekolah							
	1.5.1 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	85	88	91	94	97	100	100
	1.5.2 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS/Paket B	69	75.2	81.4	87.6	93.8	100	100
1.6	Angka Putus Sekolah							
	1.6.1 Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	12	10	8	6	4	2	2
	1.6.2 Angka Putus Sekolah SMP/MTS/Paket B	18	15	12	9	6	3	3

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
1.7	Angka Kelulusan (AL)							
	1.7.1 Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100	100	100
	1.7.2 Angka Kelulusan SMP	100	100	100	100	100	100	100
1.8	Angka Melanjutkan (AM)							
	1.8.1 Angka Melanjutkan SD/MI/Paket A	85.86	88.69	91.52	94.35	97.17	100	100
	1.8.2 Angka Melanjutkan SMP/MTS/Paket B	141.62	133.30	124.97	116.65	108.32	100	100
1.9	Fasilitas Pendidikan							
	1.9.1 Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	69 %	75.20	81.40	87.60	93.80	100.00	100.00
	1.9.2 Sekolah Pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik	53 %	62.40	71.80	81.20	90.60	100.00	100.00
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar							
	SD	42.73	44.38	46.03	47.69	49.34	51	51
	SMP	23.38	25.80	28.22	30.65	33.07	35.5	35.5
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar							

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
	SD	17	19.2	21.4	23.6	25.8	28	28
	SMP	14	17.6	21.2	24.8	28.4	32	32
1.12	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99.68	99.85	99.95	99.88	99.88	99.9	99.88
1.13	Kualifikasi S1 / D-IV							
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV SD	86	88.8	92	94.4	97.2	100	100
1.15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV SMP	95	96	97	98	99	100	100
1.16	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	N/A	53.23	57.32	61.41	65.49	69.58	69.58
1.17	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	N/A	90.00	92.50	95.00	97.50	100	100
1.18	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	N/A	79.33	84.50	89.67	94.83	100	100
16	**Kebudayaan**							

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	4	4	4	4	4	4
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	11	11	11	11	11	11	11
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	6	6	6	6	6	6	6
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3	6	6	6	6	6	6
17.	SPM Kemendagri 59 tahun 2021							
17.1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	N/A	52,32	57,32	62,32			
17.2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar (APS)	N/A	90,00	92,50	94,50			
17.3	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	N/A	1,75	1,85	1,95			
17.4	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	N/A	1,59	1,69	1,79			
17.5	Rata-rata kemampuan Literasi SMP	N/A	1,87	1,97	2,07			

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
	berdasarkan asesmen nasional							
17.6	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	N/A	1,60	1,70	1,80			
17.7	Peningkatan Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B	N/A	67,12	67,15	67,18			
17.8	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/DIV	N/A	74,43	75,41	76,39			
17.9	Rasio pengawas dan Penilik PAUD	N/A	3,21	4,13	5,05			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu pada tahun 2024 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Palu.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke-4 (2020-2024), pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang telah hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam RPJMN 2020-2024, strategi RPJMN Bidang Kesehatan 2020-2024 yang ingin dicapai ada 5 yaitu : (1) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; (2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat; (3) Peningkatan pengendalian penyakit; (4) Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas); (5) Penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Dinas Kesehatan Kota Palu adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian penyusunan APBD. Renja Perangkat Daerah menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Dinas Kesehatan Kota Palu juga memuat usulan dari hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Palu;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Musrenbang Kota Palu;
22. Peraturan Daerah Kota Palu No 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Palu No 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041;
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Walikota Palu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
27. Peraturan Walikota Palu Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kerangka pendanaan, pagu indikatif dan prakiraan maju yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 adalah sebegai berikut :

1. Sebagai dasar evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan 2023 serta perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan Tahun 2025;
2. Sebagai acuan dalam menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja Tahun 2024;
3. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan;
4. Sebagai dasar bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan;
5. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan tetap berpedoman pada RKPD Kota Palu Tahun 2024, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Palu

2.4 Review terhadap Rancangan Awal

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Palu

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan

4.1 Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA PALU TAHUN 2023

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan telah ditetapkan beberapa indikator kinerja baik itu indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci untuk menilai kinerja pembangunan kesehatan di Kota Palu yang bisa dilihat dari evaluasi pencapaian kinerja kegiatan selama Tahun 2023.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian kinerja Renstra diharapkan dapat mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Dalam upaya mengarahkan pelaksanaan seluruh rencana kegiatan maka kegiatan evaluasi harus direalisasikan dengan mekanisme dan durasi waktu yang sesuai kebutuhan pengembangan program.

Pada Tahun 2023 terdapat 5 (lima) program yang terbagi menjadi 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) sub kegiatan. Penentuan target kinerja meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan yang mencakup. Ada beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dimana hal ini menyesuaikan dengan kondisi OPD dalam rangka pemenuhan 53 Program unggulan Wali Kota Palu Tahun 2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja s.d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 (T-C.29) berikut ini:

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS KESEHATAN KOTA PALU S/D TAHUN 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2021-2026 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun	
					Target RENJA Tahun 2022 (%)	Realisasi RENJA Tahun 2022 (%)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(10/4)*
01 2.03 05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00	2	200,0
01 2.03 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100,00	24	200,0
01 2.03 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00	2	200,0
01 2.03 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	24	200,0
01 2.03 09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Laporan	37 Laporan	37 Laporan	37 Laporan	100,00	74	200,0
01 2.03	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	100 %	**100 %**	100 %	100,00	**200**	**200,0**
01 2.03 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit		5 Unit	5 Unit	100,00	5	62,5
01 2.03	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100,00**	**200**	**200,0**
01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	24	200,0
01 2.03 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	2	200,0
01 2.03 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	24	200,0
01 2.03	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100,00**	**200**	**200,0**
01 2.03 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	2	200,0
01 2.03 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	400 Unit	359 Unit	338 Unit	338 Unit	100,00	697	174,3

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2021-2026 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun	
									Target RENJA Tahun 2022 (%)	Realisasi RENJA Tahun 2022 (%)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(10/4)
01	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP**	**14 Puskesmas**	**14 Puskesmas**	**14 Puskesmas**	**14 Puskesmas**	**100,00**	**28**	**200,0**
01	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.818 bumil	8.155 bumil	7.727 bumil	7.622 bumil	98,64	15777	201,8
01	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.460 bulin	7.379 bulin	7.379 bulin	7.386 bulin	100,09	14765	197,9
01	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.105 bayi	7.233 bayi	7.025 bayi	7.387 bayi	105,15	14620	205,8
01	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46.150 balita	38.327 balita	35.796 balita	31.569 balita	88,19	69896	151,5
01	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	59.590 murid	9.286 murid	60.256 murid	38.590 murid	64,04	47876	80,3
01	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250.871 jiwa	65.393 jiwa	251.188 jiwa	33.287 jiwa	13,25	98680	39,3
01	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27.719 jiwa	14.577 jiwa	27.364 jiwa	20.262 jiwa	74,05	34839	125,7
01	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67.697 jiwa	17.057 jiwa	67.688 jiwa	25.030 jiwa	36,98	42087	62,2
01	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.680 jiwa	9.194 jiwa	23.677 jiwa	10.508 jiwa	44,38	19702	83,2
01	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	781 kasus	177 kasus	785 kasus	199 kasus	25,35	376	48,2
01	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8.613 jiwa	3.051 jiwa	8.656 jiwa	7.185 jiwa	83,01	10236	118,8
01	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan ResikoTerinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8.474 kasus	8.206 kasus	8.804 kasus	10.730 kasus	121,88	18936	223,5
01	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi KLB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2	200,0
01	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2	200,0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2021-2026 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun	
									Target RENJA Tahun 2022 (%)	Realisasi RENJA Tahun 2022 (%)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(10/4)*
01	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2	200,0
01	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2	200,0
01	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	8	200,0
01	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2	200,0
01	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2	200,0
01	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2	200,0
01	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Orang	Orang	Orang	#DIV/0!	0	#DIV/0!
01	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Orang	Orang	Orang	#DIV/0!	0	#DIV/0!
01	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2	200,0
01	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2	200,0
01	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2	200,0
01	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	70000 Orang	70000 Orang	37.682 Orang	9813 Orang	26,04	79813	114,0
01	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyelahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes) dan Sekolah	675 Orang	320 Orang	320 Orang	5 Orang	1,56	325	48,1

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2021-2026 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun	
									Target RENJA Tahun 2022 (%)	Realisasi RENJA Tahun 2022 (%)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(10/4)*
01	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2	200,0
01	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	2	40,0
01	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin RS Kelas C , D dan Faskes Tingkat daerah Kab/Kota**	**Penerbitan Izin RS yang dkeluarkan**	**10 RS**	**10 RS**	**10 RS**	**10 RS**	**100,00**	**20**	**200,0**
01	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100,00	20	200,0
01	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	13 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100,00	20	153,8
01	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	66 Unit						
01	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen						
01	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Meningkatnya kapasitas SDM Kesehatan Kota Palu**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100,00**	**200**	**200,00**
01	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota**	**Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	100	**100**	**100,0**
01	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1	100,0
01	**02**	**03**	**2.03**		**Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP.UKM manusia di Wilayah Kab/Kota**	**Terlaksananya Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	100	**100**	**100,0**
01	02	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1	100,0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2021-2026 (%)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (%)		Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun	
											Target RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi RENJA Tahun 2022 (%)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(10/4)*
01	**02**	**03**	**2.04**		**Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**500**	**Nakes**	**100**	**Nakes**	**275**	**Nakes**	**50**	**Nakes**	**18,18**	**150**	**30,00**
01	02	03	2.04	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	500	Nakes	100	Nakes	275	Nakes	50	Nakes	18,18	150	30,00
01	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN MINUMAN**	**Tersedianya Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan pengawasan makanan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**200**	**200,00**
01	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Izin apotek, toko obat dan usaha tradisonal yg dkeluarkan**	**314**	**Sarana**	**258**	**Sarana**	**270**	**Sarana**	**270**	**Sarana**	**100,00**	**528**	**168,15**
01	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	256	Apotek	209	Apotek	215	Apotek	215	Apotek	100,00	424	165,63
							25	Toko obat	19	Toko obat	20	Toko obat	20	Toko obat	100,00	39	156,00
							33	Batra	30	Batra	35	Batra	35	Batra	100,00	65	196,97
01	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT**	**265**	**PIRT**	**235**	**PIRT**	**235**	**PIRT**	**235**	**PIRT**	**100,00**	**470**	**177,36**
01	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi untuk Produksi Makanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	2	200,00
01	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Tertibnya penerbitan sertifikat laik sehat sanitasi TPM**	**1225**	**PTM**	**250**	**PTM**	**250**	**PTM**	**250**	**PTM**	**100,00**	**500**	**40,8**
01	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, rumah makan/restoran dan Depot Air	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	2	200,0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2021-2026 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun	
									Target RENJA Tahun 2022 (%)	Realisasi RENJA Tahun 2022 (%)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(10/4)*
01	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Tertibnya penerbitan stiker pembinaaan makanan jajanan**	**8200 Stiker**	**1500 Stiker**	**1500 Stiker**	**1500 Stiker**	**100,00**	**3000**	**36,6**
01	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan san Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2	200,0
01	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT**	**Terlaksananya pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100,00**	**100**	**100,0**
01	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	135 Unit PIRT		1 Unit PIRT	Unit PIRT	0,00	0	0,0
01	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Terlaksananya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100,00**	**200**	**200,00**
01	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100,00**	**200**	**200,00**
01	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2	100,00
01	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100,00**	**200**	**200,00**
01	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2	200,00
01	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100,00**	**200**	**200,00**
01	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisii Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2	200,00

Berdasarkan uraian pada tabel di atas terlihat bahwa dalam penganggaran Tahun 2023 tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Palu dilaksanakan berdasarkan nomenklatur Kepmendagri No 050-5889 yang sudah ditetapkan dalam RKPD Kota Palu, dan hampir semua program/kegiatan/sub kegiatan yang ada mendukung program unggulan Wali Kota Palu.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Capaian kinerja pembangunan kesehatan di Kota Palu juga terdapat di dalam kewenangan wajib SPM bidang kesehatan maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selama Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Palu mengukur dan mengevaluasi kinerja program sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam Permenkes yang baru, Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Indikator Kinerja Kunci Daerah (IKK) yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah terbagi atas beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

   Pada aspek kesejahteraan masyarakat, parameter umum yang mencakup bidang Kesehatan termasuk ke dalam golongan aspek kesejahteraan sosial dengan indikator yang diukur yaitu:

   1) Angka Harapan Hidup
   2) Prevalensi balita gizi buruk
   3) Prevalensi balita gizi kurang
   4) Cakupan Desa Siaga Aktif

2. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum, parameter umum yang mencakup bidang Kesehatan termasuk ke dalam pelayanan dasar dengan indikator yang diukur yaitu:

1) Angka kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
2) Angka kelangsungan hidup bayi
3) Angka kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup
4) Angka kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup
5) Angka kematian Ibu per 1.000 Kelahiran Hidup
6) Rasio Posyandu per satuan penduduk
7) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk
8) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
9) Rasio Dokter per satuan penduduk
10) Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk
11) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
12) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
13) Cakupan Desa/Kelurahan UCI
14) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
15) Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
16) Cakupan balita pneumonia yang ditangani
17) Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD
18) Penderita Diare yang ditangani
19) Angka Kejadian Malaria
20) Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
21) Cakupan kunjungan bayi
22) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
23) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB penyelidikan epid <24 jam
24) Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil
25) Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
26) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
27) Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
28) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
29) Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
30) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
31) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
32) Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
33) Persentase penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

34) Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan
35) Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
36) Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

Tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Kesehatan dari Tahun 2021 s/d Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel 2.2 (T-C.30) berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA PALU

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU / IKK	Target RENSTRA Tahun....				Realisasi Capaian Tahun....		Proyeksi Tahun....		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	SPM	IKK	100	100	100	100	98,64	98,64	100	100	
2	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	SPM	IKK	100	100	100	100	100,09	100,09	100	100	
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	SPM	IKK	100	100	100	100	105,15	105,15	100	100	
4	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	SPM	IKK	100	100	100	100	88,19	88,19	100	100	
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	SPM	IKK	100	100	100	100	64,04	64,04	100	100	
6	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	SPM	IKK	100	100	100	100	13,25	13,25	100	100	
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	SPM	IKK	100	100	100	100	74,05	74,05	100	100	
8	Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM	IKK	100	100	100	100	36,98	36,98	100	100	
9	Persentase penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM	IKK	100	100	100	100	44,38	44,38	100	100	
10	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan	SPM	IKK	100	100	100	100	25,35	25,35	100	100	
11	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	SPM	IKK	100	100	100	100	83,01	83,01	100	100	
12	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	SPM	IKK	100	100	100	100	121,88	121,88	100	100	
13	Indeks pelayanan kesehatan puskesmas		IKU	86,50	87,00	87,50	88,00	81,03		87,50	88,00	
14	Prevalensi balita Stunting		IKU	16	14	12	10	6,19		12	10	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU / IKK	Target RENSTRA Tahun....				Realisasi Capaian Tahun....		Proyeksi Tahun....		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
15	Persentase penanggulangan kejadian luar biasa		IKU	100	100	100	100	100	-	100	100	
16	Persentase penanggulangan kasus kejadian Covid-19		IKU	100	100	100	100	100	-	100	100	
17	Case Fatality Rate (CFR) Covid-19		IKU	1,75	1,50	1	<1	0,38	-	1	<1	
18	Angka kelangsungan hidup bayi		IKK	0,9980	0,9975	0,9972	0,9968	0,9865	-	0,9972	0,9968	
19	Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup		IKK	19,50	16,50	15,00	15,00	1,49	-	15,00	15,00	
20	Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup		IKK	12,20	11,60	11,00	10,00	1,08	-	11,00	10,00	
21	Angka kematian Ibu per-1.000 Kelahiran Hidup		IKK	182,25	180,31	178,94	177,64	0	-	178,94	177,64	
22	Rasio Puskesmas per satuan penduduk penduduk (/1.000 pddk)		IKK	3,78	3,79	3,79	3,80	3,746	-	3,79	3,80	
23	Rasio Dokter per satuan penduduk (/1.000 pddk)		IKK	59,33	60,33	61,33	62,33	-	-	61,33	62,33	
24	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		IKK	100	100	100	100	119,15	-	100	100	
25	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		IKK	100	100	100	100	100,15	-	100	100	
26	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		IKK	100	100	100	100	89,13	-	100	100	
27	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		IKK	100	100	100	100	100,00	-	100	100	
28	AFP rate (/100.000 pddk <15 th)		IKK	100	100	100	100	10,52	-	100	100	
29	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani		IKK	100	100	100	100	47,48	-	100	100	

30	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD		IKK	100	100	100	100	100	-	100	100	
31	Penderita Diare yang ditangani		IKK	100	100	100	100	100	-	100	100	
No.	**Indikator**	**SPM/Standar Nasional**	**IKU / IKK**	**Target RENSTRA Tahun....**				**Realisasi Capaian Tahun....**		**Proyeksi Tahun....**		**Catatan Analisis**
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
32	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan		IKK	100	100	100	100	92,84	-	100	100	
33	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		IKK	100	100	100	100	35,84	-	100	100	
34	Cakupan kunjungan bayi		IKK	100	100	100	100	100,00	-	100	100	
35	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		IKK	100	100	100	100		-	100	100	
36	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		IKK	100	100	100	100	100,00	-	100	100	

) 2023 masih dalam pelaksanaan kegiatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Palu

Sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayahnya, maka Dinas Kesehatan Kota Palu dalam penyelenggaraannya mengacu kepada dasar-dasar Pembangunan Kesehatan yang mencerminkan upaya penyediaan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inovatif, dan berbasis teknologi, serta perluasan cakupan pelayanan kesehatan, utamanya dalam pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) melalui upaya promotif dan preventif.

Dari hasil capaian kinerja program di atas dan didasarkan pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap urusan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Palu, maka isu-isu penting Dinas Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Isu Strategis Dinas Ksesehatan Kota Palu

Identifikasi Permasalahan	Akar Masalah	Isu Strategis
1	*2*	*3*
Masih berfluktuasinya Kasus Kematian Ibu (AKI) walaupun	Pencegahan kematian ibu tidak dilakukan secara terintegrasi dan tidak didukung oleh	Pencegahan Kematian Ibu secara terintegrasi
Masih adanya Kasus Kematian Bayi (AKB)	Adanya kelainan bawaan dari bayi, komplikasi neonatus,	Pencegahan Kematian Bayi

Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting	Metode pencegahan dan penanganan yang dilakukan masih kurang tepat sasaran	Pencegahan dan penanganan Balita Gizi Buruk dan Balita Stunting Terintegrasi
Identifikasi Permasalahan	**Akar Masalah**	**Isu Strategis**
1	*2*	*3*
Masih belum terkendalinya penyakit menular, seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru dan Penyakit	Masih Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular serta pencegahannya	Peningkatan KIE kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok potensial di masyarakat
Belum semua masyarakat mempunyai Jaminan Kesehatan	Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftar sebagai pesert JKN	Penguatan sistem jaminan sosial
Rasio tenaga medis belum sesuai standar kebutuhan tenaga	Belum meratanya distribusi tanaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan	Mapping dan pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas
Masih rendahnya pelayanan penderita penyakit tidak menular (Hipertensi, DM, Tumor, dll)	Masih belum maksimalnya skrining pelayanan kesehatan di masyarakat	Penguatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga
Mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang masih belum optimal)	Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan (Continual Quality Improvement)

Sesuai dengan amanat Kepala Daerah, bahwa Program unggulan yang terkait bidang kesehatan tidak bisa terlepas dari Isu - isu pokok dan atau strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi.
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat, untuk penurunan kasus Stunting.
3. Peningkatan pengendalian penyakit.
4. Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan

Hal ini sejalan dengan program Kesehatan yang ada dalam 53 program unggulan Wali Kota Palu sebagai berikut :

1. Palu Kota Sehat

Indikator Kinerja :

a. Angka Kematian Ibu (AKI) (Target 178/100.000 KH)
b. Angka Kematian Bayi (AKB) (Target 12/1.000 KH)
c. Prevalensi Stunting pada Balita (Target 14%)
d. Prevalensi Wasting pada Balita (Target 7%)
e. Prevalensi Underweight pada Balita (Target 12%)
f. Imunisasi Dasar Lengkap (Target 100%)
g. Terduga TBC (Target 9.950 jiwa)
h. Malaria (Target API <1 / 1.000 pddk))
i. DBD (Target Insiden Rate 49/100.000 pddk)
j. Fasilitas Kesehatan Terakreditasi (Target 14 Puskesmas)
k. Posyandu Aktif (Target 95%)
l. Desa Kelurahan ODF (Open Defucation Free) Jamban Sehat (Target 95%)
m. Akses Air Minum Aman (Target 95%)

2. Transformasi Puskesmas menjadi Klinik Modern

Indikator Kinerja :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : Target = 87,6%
b. Indeks Klinical Output
    1. Angka kesakitan (Target = 0)
    2. Angka kematian (Target = 0)
    3. Angka rujukan (Target = 0)

3. Satu Ambulance Satu Kelurahan

Indikator Kinerja :

a. Pengadaan Mobil Ambulance Kelurahan (5 unit)

4. BPJS Gratis Masyarakat Miskin

Indikator Kinerja :

a. Pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap 70.000 jiwa (kepesertaan BPJS Kelas III Jamkesda)

2.4 Review terhadap Rancangan Awal

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Palu adalah meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Rancangan awal RKPD merupakan hasil proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Di dalam penyusunan rancangan awal dilakukan review RPJMD, review usulan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dari usulan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan prioritas pembangunan untuk tahun rencana, kajian RKP, dan analisis isu strategis.

Rencana Kerja OPD harus sejalan dengan RKPD Kota Palu, olehnya itu perlu dilakukan kajian terhadap keselarasan antara Renja Dinas Kesehatan Kota Palu dengan RKPD Kota Palu Tahun 2024. Pada perencanaan kegiatan Tahun 2024 ada penambahan 3 sub kegiatan baru terkait penguatan penganggaran penyakit AIDS, TB, dan Malaria (ATM).

Adapun rancangan awal program dan kegiatan Dinas Kesehatan untuk Tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 (T-C.31) berikut :

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL DINAS KESEHATAN KOTA PALU TAHUN 2024

OPD : DINAS KESEHATAN KOTA PALU

	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Nilai SAKIP OPD**	**B**	**57.778.680.706**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Nilai SAKIP OPD**	**B**	**62.865.165.162**	
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Palu**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 Dok**	**245.053.600**	**1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Palu**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13 dokumen**	**545.466.100**	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.742.400	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	247.254.700	
	2. Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	137.524.300	2. Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	175.927.350	
	3. Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	30.501.375	3. Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	13.953.000	
	4. Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	16.454.150	4. Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	51.313.950	Penguatan SAKIP OPD
	5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	34.831.375	5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	57.017.100	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Palu**	**Persentase realisasi keuangan**	**100%**	**49.606.618.506**	**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Palu**	**Persentase realisasi keuangan**	**100%**	**52.549.803.262**	
	1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.099 orang	49.576.865.956	1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.099 orang	52.510.323.512	GAJI
	2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	14.875.050	2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	14.644.950	
	3. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.309.950	3. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.609.800	
	4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Palu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	2.740.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	5. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 lappran	8.920.000	5. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	10.050.000	
	6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Palu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.647.550	6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Palu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8.435.000	
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Palu**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**6.360.000**	**3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Palu**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**36.420.000**	
	1. Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Palu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.360.000	1. Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Palu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	36.420.000	
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**18.620.000**	**4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**18.822.350**	
	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Palu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	18.620.000	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Palu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	18.822.350	
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**438.160.950**	**5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**509.057.150**	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.938.300	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	7.627.500	
	2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	7.304.900	2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	7.991.700	
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Palu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	15.777.200	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Palu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	31.555.400	
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	81.668.050	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	79.677.550	
	5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	25.380.000	5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	63.940.000	
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.500.000	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3.950.000	
	7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	2.037.500	8. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.500.000	
	8. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	301.555.000	9. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	302.815.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Palu**	**Tersedianya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**250.000**	
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	0 Unit	250.000	
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	**Palu**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**5.999.648.650**	**7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Palu**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**7.272.805.100**	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	867.556.250	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	863.113.500	
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.132.092.400	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.409.691.600	Honor PTT, PHL
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**1.464.219.000**	**8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**1.932.541.200**	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	426.900.000	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 unit	559.600.000	
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	338 unit	1.011.569.000	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	231 unit	1.301.635.200	
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 unit	8.500.000	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 unit	11.480.000	
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	96 unit	17.250.000	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	59.826.000	rehab kantor dinas
B	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Palu**	**Persentase pemenuhan SPM Kesehatan**	**100%**	**70.288.998.669**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Palu**	**Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat**	**100%**	**64.956.693.960**	
	1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM & UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	**Palu**	**Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP**	**14 Puskesmas**	**6.458.411.170**	**1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM & UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota**	**Palu**	**Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP**	**14 Puskesmas**	**5.391.224.554**	
	1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Palu	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 unit	5.000.500	
	2. Pengembangan Puskesmas					2. Pengembangan Puskesmas	Palu	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 unit	250.000	
	3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Palu	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 unit	1.009.950	DAK FISIK

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	4. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Palu	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 unit	727.000.000	4. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
	5. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Palu	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	449 unit	1.569.037.920	5. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Palu	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	500 unit	1.562.891.720	DAK FISIK, APBD
	6. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Palu	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	369 unit	176.000.000	6. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Palu	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	369 unit	208.807.000	DAK NON FISIK
	7. Pengadaan Obat, Vaksin	Palu	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 paket	3.476.957.668	7. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Palu	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 paket	3.551.565.384	DAK FISIK, APBD
	8. Pengadaan Bahan Habis Pakai	Palu	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 paket	509.415.582	8. Pengadaan Bahan Habis Pakai					DAK FISIK
	9. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					9. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Palu	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 paket	61.700.000	
	2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	**Palu**	**Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP**	**14 Puskesmas**	**63.748.707.149**	**2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Palu**	**Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP**	**14 Puskesmas**	**59.403.363.006**	
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Palu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.547 orang	626.127.500	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Palu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.770 bumil	108.775.000	DAK Non Fisik, APBD
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Palu	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.158 orang	23.905.100	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Palu	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.416 bulin	358.107.950	DAK Non Fisik
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Palu	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	7.521 orang	26.475.000	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Palu	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6.837 bayi	11.499.800	DAK Non Fisik
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Palu	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49.674 orang	9.849.900	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Palu	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45.158 balita	15.249.700	DAK Non Fisik
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Palu	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	45.918 orang	141.735.100	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Palu	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41.744 murid	11.025.100	DAK Non Fisik
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Palu	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275.422 orang	16.625.000	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Palu	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	251.188 jiwa	545.500.000	
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Palu	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29.115 orang	733.724.850	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Palu	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30.512 orang	784.925.000	
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Palu	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31.063 orang	14.000.000	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Palu	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68.126 jiwa	2.000.000	
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Palu	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.051 orang	11.200.000	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Palu	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.830 jiwa	3.050.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Palu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	795 orang	736.250	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Palu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	785 kasus	5.950.000	APBD, DAK Non Fisik
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Palu	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16.385 orang	27.900.000	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Palu	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8.657 orang	135.100.000	APBD, DAK Non Fisik
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan ResikoTerinfeksi HIV	Palu	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7.192 orang	6.012.000	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan ResikoTerinfeksi HIV	Palu	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8.804 kasus	41.500.000	APBD, DAK Non Fisik
	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi KLB	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 dokumen	180.768.700	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi KLB	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	46.820.000	APBD, DAK Non Fisik
	14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 dokumen	2.000.000	14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1.000.000	
	15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	950.575.900	15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Palu	Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	951.195.000	APBD, DAK Non Fisik
	16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	1.025.150	16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	17.914.950	APBD, DAK Non Fisik
	17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	410.428.850	17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	393.405.000	APBD, DAK Non Fisik
	18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	1.668.850	18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Palu	Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	27.729.800	APBD, DAK Non Fisik
	19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 dokumen	6.324.850	19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	26.694.350	Kenaikan item kegiatan
	20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	20.612.000	20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	8.133.500	APBD, DAK Non Fisik
	21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Palu	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	150 orang	-	21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Palu	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	150 orang	1.120.000	
	22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Palu	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	14 Puskesmas	1.750.000	22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					
	23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 dokumen	925.524.650	23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus					
	24. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	522.532.350	24. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	544.759.400	APBD, DAK Non Fisik

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	25. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	40.503.516.304	25. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Palu	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	70.000 jiwa	19.081.396.600	Jamkesda & Non Kapitasi
									14 Puskesmas	16.850.413.456	JKN Kapitasi Puskesmas
	26. Deteksi Dini Penyelahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Palu	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	450 orang	1.875.000	26. Deteksi Dini Penyelahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Palu	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes) dan Sekolah	75 orang	4.680.000	
	27. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Pitensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Palu	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang	1 paket	4.975.000	27. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Pitensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Palu	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang	8 paket	4.625.000	
	28. Penyelenggaraan Kota Sehat	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 dokumen	184.714.320	28. Penyelenggaraan Kota Sehat	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1.525.000	
	30. Operasional Pelayanan Puskesmas	Palu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	18.011.761.000	29. Operasional Pelayanan Puskesmas	Palu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	5.762.494.750	DAK Non Fisik
									14 Puskesmas	13.447.141.000	
	31. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Palu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dokumen	4.587.550	30. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Palu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	30.900.000	
	32. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota	Palu	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	2 unit	266.420.375	31. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota	Palu	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	2 unit	98.106.800	DAK Non Fisik
	33. Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Palu	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	6.505.800	32. Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Palu	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	4.955.800	APBD, DAK Non Fisik
	34. Penyediaan & Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Palu	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	33.462.450	34. Penyediaan & Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Palu	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	57.070.050	
	35. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis	Palu	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350 orang	23.462.450	35. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis	Palu	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	10.000.000	
	36. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Palu	Jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	500 orang	24.462.450	36. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Palu	Jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	6.000.000	
	37. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Palu	Jumlah Orang dengan Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 orang	21.462.450	37. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Palu	Jumlah Orang dengan Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29 Orang	2.600.000	
	3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Kab/Kota	**Palu**	**Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan**	**1 Dinas, 14 Puskesmas**	**72.895.100**	**3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Kab/Kota**	**Palu**	**Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan**	**1 Dinas, 14 Puskesmas**	**144.585.600**	
	1. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	45 dokumen	38.703.050	1. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan					

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 dokumen	25.842.050	2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 dokumen	144.585.600	
	3. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Palu	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	2 unit	8.350.000	3. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet					
	4. Penerbitan Izin RS Kelas C , D dan Faskes Tingkat daerah Kab/Kota	**Palu**	**Penerbitan Izin RS yang dkeluarkan**	**10 RS**	**8.985.250**	**4. Penerbitan Izin RS Kelas C , D dan Faskes Tingkat daerah Kab/Kota**	**Palu**	**Penerbitan Izin RS yang dkeluarkan**	**13 RS**	**17.520.800**	
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C dan D	Palu	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	10 unit	3.485.150	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C dan D	Palu	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	13 unit	14.283.250	
	2. Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Palu	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	10 unit	1.887.550	2. Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Palu	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	93 unit	3.237.550	
	3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Palu	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	13 unit	3.612.550	3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					
C.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Palu**	**Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan**	**100%**	**98.232.125**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Palu**	**Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan**	**100%**	**27.775.200**	
	1. Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota	**Palu**	**Jumlah Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota**	**256 Sarana Praktek Swasta**	**1.264.400**	**1. Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota**	**Palu**	**Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota**	**256 Sarana Praktek Swasta**	**2.799.950**	
	1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kab/Kota	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2 dokumen	1.264.400	1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kab/Kota	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dokumen	2.799.950	
	2. Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP.UKM manusia di Wilayah Kab/Kota	**Palu**	**Terlaksananya Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan**	**14 Puskesmas, 13 RS**	**1.224.800**	**2. Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP.UKM manusia di Wilayah Kab/Kota**	**Palu**	**Terlaksananya Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan**	**14 Puskesmas, 13 RS**	**2.350.250**	
	1. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen	1.224.800	1. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen	2.350.250	
	3. Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	**Palu**	**Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100 nakes**	**95.742.925**	**3. Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Palu**	**Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2754 nakes**	**22.625.000**	
	1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Palu	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	95.742.925	1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Palu	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	403 Orang	22.625.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
D.	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN MINUMAN**	**Palu**	**Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman**	**100%**	**385.336.480**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN MINUMAN**	**Palu**	**Tersedianya Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan pengawasan makanan**	**100%**	**407.462.500**	
	1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					**1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Palu**	**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**75 Unit**	**2.100.000**	
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 Dokumen	2.100.000	
	2. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga					**2. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Palu**	**Tertibnya penerbitan sertifikat PKRT**	**28 PKRT**	**2.700.000**	
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan sertifikat Produksi Alkes Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu dan Perusahaan Rumah Tangga.					1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan sertifikat Produksi Alkes Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu dan Perusahaan Rumah Tangga.	Palu	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	2.700.000	
	3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Palu**	**Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT**	**265 PIRT**	**243.798.176**	**3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Palu**	**Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT**	**265 PIRT**	**274.540.500**	
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi untuk Produksi Makanan	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dokumen	243.798.176	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	274.540.500	DAK Non FISIK (BPOM)
	4. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Palu**	**Tertibnya penerbitan sertifikat laik sehat sanitasi TPM**	**1.225 TPM**	**1.925.150**	**4. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Palu**	**Tertibnya penerbitan sertifikat laik sehat sanitasi TPM**	**1.225 TPM**	**15.915.000**	
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 dokumen	1.925.150	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	15.915.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	5. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Palu**	**Tertibnya penerbitan stiker pembinaaan makanan jajanan**	**1.650 stiker**	**1.869.150**	**5. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	Palu	**Tertibnya penerbitan stiker pembinaaan makanan jajanan**	**336 stiker**	**4.475.000**	
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 dokumen	1.869.150	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan san Sentra Makanan Jajanan	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	4.475.000	
	6. Pemeriksaan dan tIndak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga	**Palu**	**Terlaksananya pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT**	**135 sarana PIRT**	**137.744.004**	**6. Pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT**	**Palu**	**Terlaksananya pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT**	**135 sarana PIRT**	**107.732.000**	
	1. Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Palu	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	135 unit	137.744.004	1. Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Palu	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	135 sarana	107.732.000	DAK Non FISIK (BPOM)
E.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Palu**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**	**100%**	**2.367.867.050**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Palu**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**	**100%**	**2.662.017.250**	
	1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	**Palu**	**Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan**	**100%**	**3.238.900**	**1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Palu**	**Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan**	**100%**	**9.500.000**	
	1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Palu	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	3.238.900	1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Palu	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	9.500.000	
	2. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota		**Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS**	**100%**	**119.721.000**	**2. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota**		**Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS**	**100%**	**385.007.250**	
	1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 dokumen	119.721.000	1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	385.007.250	DAK Non Fisik
	3. Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota		**Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM**	**100%**	**2.244.907.150**	**3. Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota**		**Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM**	**100%**	**2.267.510.000**	
	1. Bimbingan Teknis dan Supervisii Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	2.244.907.150	1. Bimbingan Teknis dan Supervisii Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	2.267.510.000	
					130.919.115.030					**130.919.114.072**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) adalah melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), rapat forum SKPD/Gabungan SKPD, serta kegiatan diskusi kelompok terfokus (FGD). Musrenbang merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rencana pembangunan daerah (khususnya kesehatan) dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya.

Pelaksanaan Musrenbang setiap tahunnya dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Kota Palu dan diadakan di setiap Kelurahan yang ada di Kota Palu. Usulan masyarakat melalui mekanisme musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan selanjutnya dilakukan penyelarasan dengan program dan kegiatan OPD pada forum OPD yang dilaksanakan sebelum Musrenbang Kota.

Terhadap usulan masyarakat yang selaras dengan program dan kegiatan OPD dan merupakan prioritas pembangunan selanjutnya diusulkan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Dari hasil Musrenbang diperoleh daftar prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan dengan tolok ukur capaian kinerjanya yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui OPD terkait. Untuk usulan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bidang kesehatan dari setiap Kelurahan di Kota Palu untuk tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KOTA PALU

OPD : DINAS KESEHATAN KOTA PALU

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM & UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota				
	1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kel. Tanamodindi, Kota Palu	- Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu)	1 Unit	Dipertimbangkan
	2. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jalan Anoa Lrg.Sehati RT.04/RW.05 Kelurahan Tatura Utara , Kota Palu	- Pengadaan Kelengkapan Posyandu (berupa pengadaan kursi,meja, tenda serta alat lain		Diusulkan Tahun 2024
		Posyandu Bunga Tanjung Jalan Tg. Tada 2, Kec. Palu Timur, Kel. Lolu Selatan, Kota Palu	- Pengadaan Kelengkapan Posyandu		Diusulkan Tahun 2024
		Kelurahan Lambara, Kota Palu	- Pengadaan Sarana Posyandu		
		Kelurahan Mamboro, Kota Palu	- Alat ukur tinggi bayi	1 RT	Sudah terakomodir
		Kelurahan Tavanjuka, Kota Palu			Sudah terakomodir
		Jl. Lekatu No. 70, Kelurahan Tavanjuka, Kota Palu	- Alat Ukur Tinggi Badan	1 RT	Sudah terakomodir
		Kelurahan Tanamodindi, Kota Palu	- Alat USG untuk memeriksa ibu hamil		Sudah terakomodir
		Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu	- Pengadaan Mobiler Poskesdes		Dipertimbangkan
		Jl.pangeran hidayat kelurahan lere kecamatan palu barat, Kota Palu	- Pengadaaan Mobil Ambulance		Dipertimbangkan
		Jl. Kancil Bawah, Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Tatura Selatan, Kota Palu			
		jln. miangas kelurahan lolu selatan kecamatan palu timur, Kota Palu			
		Kelurahan tondo, Kota Palu			

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jl. Lalove Lr. Kasih, Kel. Tatura Utara	- Pengadaan Alat Sunat		Diusulkan Tahun 2024
		Kelurahan Talise VAlangguni, Kota Palu	- Pengadaan Alat Kesehatan untuk Posyandu Lansia		
		Kelurahan Talise, Kota Palu	Pengadaan Alat Pengukur Tekanan Darah		
			Pengadaan Timbangan Bayi Manual		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota				
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Wilayah Kelurahan Tavanjuka, Kota Palu	- Pemberian Pelayanan Kesehatan Terhadap Lansia		Sudah terakomodir
		Kelurahan Lolu Utara, Kota Palu			
		Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kota Palu	- Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Lansia	3 Posyandu	
		Kelurahan Pantoloan Boya, Kota Palu			
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Kel. Baiya	- Penyuluhan Narkoba di Lingkungan Masyarakat	2 Kali	Sudah terakomodir
		Kel. Pantoloan		2 Kali	Sudah terakomodir
		Kel.Pantoloan Boya	- Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	4 Kali	Sudah terakomodir
		Kel.Baru	- Penyuluhan Narkoba	4 Kali	Sudah terakomodir
		Kel.Pantoloan Boya			Sudah terakomodir
		Kel. Baru	- Sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat terkait pencegahan pernikahan dini		Sudah terakomodir
	3. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jalan Anoa Kelurahan Tatura Utara , Kota Palu	- Bantuan BPJS gratis Untuk Anak - Anak		Penyesuaian dengan data dari DInas Sosial
		Wilayah RT 04 RW.05 Kelurahan Lolu Selatan, Kota Palu	- Penambahan Kartu Indonesia Sehat (KIS)		
		Kel. Pantoloan Boya	- Bantuan Iuran BPJS Untuk Masyarakat Kurang Mampu		
	4. Deteksi Dini Penyelahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Kel. Lambara	- Pembinaan remaja / Rehabilitasi Pencegahan Narkoba		Kerjasama dengan BNN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kelurahan Duyu, Kota Palu	- Bantuan Tambahan makanan Posyandu	5 Posyandu	Terakomodir di Tahun 2023
		Kelurahan Pantoloan, Kota Palu	Pemberian Bahan Makanan bagi anak yang terindikasi Stunting		
		Kelurahan Nunu, Kota Palu	- Sosialisasi Stunting dan Gizi Buruk		
		Kelurahan Kabonena, Kota Palu			
		Semua wilayah kelurahan Birobuli Selatan			
		Kel. Petobo, Kota Palu		2 Posyandu	
		Kelurahan Palupi, Kota Palu			
		Wilayah Kelurahan Tavanjuka, Kota Palu		3 Posyandu	
		Kelurahan Nunu, Kota Palu			
		Kelurahan Duyu, Kota Palu			
		Kelurahan Boyaoge, Kota Palu			
		Kelurahan Lambara, Kota Palu	- Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita		Terakomodir di Tahun 2023
		Kelurahan Pantoloan Boya, Kota Palu			
		Kelurahan Petobo, Kota Palu		2 Posyandu	
		Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kota Palu	- Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Lansia	3 Posyandu	
		Kelurahan Pantoloan Boya, Kota Palu			
		Kelurahan Tavanjuka, Kota Palu	- Peningkatan Asupan Gizi Ibu Hamil dan Menyusui		Terakomodir di Tahun 2023
		Kelurahan Pantoloan Boya, Kota Palu			
2.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota				
	1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kel. Pantoloan Boya	- Penyuluhan Nakorba	1 Lokasi	Dipertimbangkan
			- Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	1 Lokasi	Dipertimbangkan
		Kel. Pantoloan	- Sosialisasi dan edukasi bagi Masyarakat Tentang Pencegahan Pernikahan Dini	1 Lokasi	Dipertimbangkan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun tetap mengikuti visi dan misi Pemerintah (Kabinet Indonesia Maju) yaitu ***"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-royong".*** Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi pemerintah yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, serta
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Pembangunan kesehatan di Kota Palu diselenggarakan dalam upaya mencapai Visi Kota Palu pada masa 5 (lima) tahun mendatang, mengacu kepada Dokumen RPJMD Kota Palu, yakni ***"Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan".***

Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya masa mendatang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan pemerintah Kota Palu. Visi merupakan tujuan menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Sesuai dengan amanat visi tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah mekngacu pada realitas masalah, potensi dan daya dukung lingkungan yang bercirikan nilai-

nilai sosial budaya, sehingga kebijakan pembangunan tersebut diharapkan mampu membuka ruang bagi partisipasi publik, untuk mewujudkan Pembangunan Kota yang melayani dan dinikmati oleh warganya bercirikan harmonis dalam keragaman.

Upaya untuk mewujudkan Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan ditempuh dengan empat misi pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun perekonomian yang **mandiri** dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang **aman dan nyaman** dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang **tangguh** menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19; dan;
4. Menciptakan pemerintahan yang **profesional** dan selalu hadir melayani.

Penentuan prioritas pembangunan Daerah juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun prioritas pembangunan jangka menengah daerah, meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif;
2. SDM unggul, tangguh dan berdaya saing;
3. Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif;
4. Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
5. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

6. Pencapaian target dan sasaran SDGs.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan bidang kesehatan yaitu **meningkatkan derajat kesehatan**, Dinas Kesehatan Kota Palu telah merumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi, yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2021-2026, demi mencapai Misi ke-3 Pemerintah Daerah yaitu **Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global Dan Mampu Beradaptasi Terhadap Bencana Dan Covid – 19.**

Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan yaitu :

1. **Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kesehatan Kota Palu**
2. **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat"**

dengan 3 sasaran sebagai berikut :

1. **Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel**
2. **Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat**
3. **Meningkatkan ketangguhan sumber daya manusia.**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang selaras dengan RPJMD Kota Palu, maka pembangunan kesehatan di Kota Palu Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan 2 (dua) strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;
2. Melakukan percepatan penanganan *Covid-19*.

Dengan memperhatikan analisis situasi, isu-isu strategis serta Visi dan Misi Dinas Kesehatan, maka pembangunan bidang kesehatan di Kota Palu Tahun 2021-2026

diarahkan pada upaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan serta pemerataan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
3. Memberikan iuran Jaminan dan kualitas kesehatan penduduk miskin dan kelompok rentan
4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak
5. Meningkatkan penanggulangan stunting.
6. Penanganan masyarakat terpapar Covid-19 (kuratif) dengan pendekatan kegotong-royongan (tingkat RT).

Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sesuai dengan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi dan misi serta sasaran strategis dan kebijakan pembangunan kesehatan jangka menengah (RPJMD), maka Dinas Kesehatan Kota Palu merumuskan sasaran serta indikator sesuai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk setiap tahun anggaran.

Sesuai dengan konsep RPJMD Kota Palu Tahun 2021–2026 dan juga sebagai penjabaran dari Misi Dinas Kesehatan Kota Palu, maka tujuan pembangunan kesehatan yang harus dicapai Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021–2026 adalah "**Meningkatkan reformasi birokrasi Dinas Kesehatan Kota Palu dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat"**.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 dan yang dianggap

perlu untuk dilaksanakan selama Tahun 2024 sudah mengacu pada Nomenklatur baru yaitu Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan dengan acuan target secara nasional maupun daerah/kabupaten.
2. Pencapaian SDGs point 1C, 4, 5, dan 6.
3. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Palu

Terkait dengan pencapaian visi misi program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu dan telah disesuaikan dengan program kegiatan yang ada dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 00.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan usulan program baru, ada 4 program kesehatan yang berkaitan dengan 53 program unggulan adalah :

1. Palu Kota Sehat
2. Transformasi Puskesmas menjadi Klinik Modern
3. Satu Ambulans Satu Kelurahan
4. BPJS gratis warga tidak mampu

Garis besar Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024 yaitu :

a. Jumlah program yang diusulkan adalah 5 (lima) Program, 24 (dua puluh empat) Kegiatan dan 87 (delapan puluh tujuh) Sub Kegiatan.
b. Sifat penyebaran lokasi sasaran program dan kegiatan ada yang terpusat di Dinas Kesehatan dan ada yang tersebar di seluruh UPTD Dinas Kesehatan dan jaringannya.

Adapun Rekapitulasi rumusan rencana dan pendanaan program/kegiatan untuk Tahun 2024 dan juga perencanaan untuk tahun selanjutnya (Tahun 2025), selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 (T-C.33) berikut :

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN TAHUN 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1													
1	**02**				**KESEHATAN**		**Palu**		**130.919.114.072**	**APBD**			**137.570.332.276**
		01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Nilai SAKIP OPD**	**Palu**	**B**	**62.865.165.162**	**APBD**		**B**	**66.008.685.920**
		01	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Palu**	**13 dokumen**	**545.466.100**	**APBD**		**12 dokumen**	**572.739.405**
		01	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	2 dokumen	247.254.700	APBD		1 dokumen	259.617.435
		01	2.01	002	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palu	2 dokumen	175.927.350	APBD		2 dokumen	184.723.718
		01	2.01	003	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Palu	2 dokumen	13.953.000	APBD		2 dokumen	14.650.650
		01	2.01	006	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	5 laporan	51.313.950	APBD		5 laporan	53.879.648
		01	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	2 laporan	57.017.100	APBD		2 laporan	59.867.955
		01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	**Palu**	**100%**	**52.549.803.262**	**APBD**		**100%**	**55.177.293.425**
		01	2.02	001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	1.099 orang	52.510.323.512	APBD	GAJI/TPP (Dinas)	1.099 orang	55.135.839.688
		01	2.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palu	12 dokumen	14.644.950	APBD		1 dokumen	15.377.198
		01	2.02	005	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	1 laporan	3.609.800	APBD		1 laporan	3.790.290
		01	2.02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Palu	1 dokumen	2.740.000	APBD		1 dokumen	2.877.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Palu**	**100%**	**7.272.805.100**	**APBD**		**100%**	**7.636.445.355**
		01	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palu	12 Laporan	863.113.500	APBD		12 Laporan	906.269.175
		01	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palu	12 Laporan	6.409.691.600	APBD	Honor PTT, PHL	12 Laporan	6.730.176.180
		01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**Palu**	**100%**	**1.932.541.200**	**APBD**		**100%**	**2.029.168.260**
		01	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Palu	1 Unit	559.600.000	APBD		1 Unit	587.580.000
		01	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palu	338 Unit	1.301.635.200	APBD		338 Unit	1.366.716.960
		01	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Palu	100	11.480.000	APBD		100	12.054.000
		01	2.03	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palu	100	59.826.000	APBD		100	62.817.300
01	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat**	**Palu**	**100%**	**64.956.693.960**	**APBD**		**100%**	**68.309.528.658**
01	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayan Kesehatan untuk UKM & UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota**	**Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP**	**Palu**	**14 Puskesmas**	**5.391.224.554**	**APBD**		**14 Puskesmas**	**5.660.785.782**
01	02	02	2.01	003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Palu	1 unit	5.000.500	APBD		1 unit	5.250.525
01	02	02	2.01	006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Palu	1 unit	250.000	APBD		1 unit	262.500
01	02	02	2.01	009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Palu	2 unit	1.009.950	DAK FISIK		2 unit	1.060.448
01	02	02	2.01	014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Palu	500 unit	1.562.891.720	DAK FISIK, APBD		500 unit	1.641.036.306
01	02	02	2.01	015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Palu	369 unit	208.807.000	DAK NON FISIK		369 unit	219.247.350

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	02	02	2.01	023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Palu	1 paket	3.551.565.384	DAK NON FISIK, APBD		1 paket	3.729.143.653
01	02	02	2.01	026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Palu	1 paket	61.700.000	DAK NON FISIK		1 paket	64.785.000
01	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP**	**Palu**	**14 Puskesmas**	**59.403.363.006**	**DAK Non Fisik, APBD**		**14 Puskesmas**	**62.478.531.156**
01	02	02	2.02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	7.770 bumil	108.775.000	DAK Non Fisik, APBD		8.547 bumil	114.213.750
01	02	02	2.02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	7.416 bulin	358.107.950	DAK Non Fisik		8.158 bulin	376.013.348
01	02	02	2.02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	6.837 bayi	11.499.800	DAK Non Fisik		7.521 bayi	12.074.790
01	02	02	2.02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	45.158 balita	15.249.700	DAK Non Fisik		49.674 balita	16.012.185
01	02	02	2.02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	41.744 murid	11.025.100	DAK Non Fisik		45.918 murid	11.576.355
01	02	02	2.02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	251.188 jiwa	545.500.000	APBD		275.422 jiwa	572.775.000
01	02	02	2.02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	30.512 orang	784.925.000			29.115 jiwa	824.171.250
01	02	02	2.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	68.126 jiwa	2.000.000	APBD		31.063 jiwa	2.100.000
01	02	02	2.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	23.830 jiwa	3.050.000	APBD		10.051 jiwa	3.202.500
01	02	02	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Palu	785 kasus	5.950.000	APBD, DAK Non Fisik		795 kasus	6.247.500
01	02	02	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Palu	8.657 orang	135.100.000	APBD, DAK Non Fisik		16.385 jiwa	141.855.000
01	02	02	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan ResikoTerinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Palu	8.804 kasus	41.500.000	APBD, DAK Non Fisik		7.284 kasus	43.575.000
01	02	02	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi KLB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Palu	1 Dokumen	46.820.000	APBD, DAK Non Fisik		1 Dokumen	49.161.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	02	02	2.02	014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Palu	1 Dokumen	1.000.000	APBD		1 Dokumen	1.050.000
01	02	02	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Palu	1 Dokumen	951.195.000	APBD, DAK Non Fisik		1 Dokumen	998.754.750
01	02	02	2.02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Palu	1 Dokumen	17.914.950	APBD, DAK Non Fisik		1 Dokumen	18.810.698
01	02	02	2.02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Palu	1 Dokumen	393.405.000	APBD, DAK Non Fisik		1 Dokumen	413.075.250
01	02	02	2.02	018	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Palu	1 Dokumen	27.729.800	APBD, DAK Non Fisik		1 Dokumen	29.116.290
01	02	02	2.02	019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Palu	1 Dokumen	26.694.350	APBD		1 Dokumen	28.029.068
01	02	02	2.02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Palu	1 Dokumen	8.133.500	APBD, DAK Non Fisik		1 Dokumen	8.540.175
01	02	02	2.02	021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Palu	150 orang	1.120.000	APBD		175 orang	1.176.000
01	02	02	2.02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Palu	1 Dokumen	544.759.400	DAK NON FISIK / APBD		1 Dokumen	571.997.370
01	02	02	2.02	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	Palu	70.000 jiwa	35.931.810.056	JAMKESDA / NON KAPITASI		70.000 jiwa Jamkesda	37.728.400.559
01	02	02	2.02	027	Deteksi Dini Penyelahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes) dan Sekolah	Palu	75 orang	4.680.000	APBD		75 orang	4.914.000
01	02	02	2.02	028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Pitensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Palu	8 paket	4.625.000	APBD		8 paket	4.856.250
01	02	02	2.02	029	Penyelenggaraan Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Palu	1 Dokumen	1.525.000	APBD		1 Dokumen	1.601.250
01	02	02	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Palu	1 Dokumen	19.209.635.750	APBD		1 Dokumen	20.275.117.538

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	02	02	2.02	034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Palu	1 Dokumen	30.900.000	DAK NON FISIK		1 Dokumen	32.445.000
01	02	02	2.02	035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Palu	2 unit	98.106.800	APBD		2 unit	103.012.140
01	02	02	2.02	036	Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Palu	1 Laporan	4.955.800	APBD, DAK Non Fisik		1 Laporan	5.203.590
01	02	02	2.02	038	Penyediaan & Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Palu	1 unit	57.070.050	APBD		1 unit	59.923.553
01	02	02	2.03	040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Palu	50 Orang	10.000.000	APBD		65 Orang	10.500.000
01	02	02	2.03	041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Palu	30 Orang	6.000.000	APBD		35 Orang	6.300.000
01	02	02	2.03	042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang dengan Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Palu	29 Orang	2.600.000	APBD		30 Orang	2.730.000
01	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Kab/Kota**	**Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan**	**Palu**	**1 Dinas, 14 Puskesmas**	**144.585.600**	**APBD**		**1 Dinas, 14 Puskesmas**	**151.814.880**
01	02	02	2.03	002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Palu	2 dokumen	144.585.600	APBD		2 dokumen	151.814.880
01	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin RS Kelas C , D dan Faskes Tingkat daerah Kab/Kota**	**Penerbitan Izin RS yang dkeluarkan**	**Palu**	**13 RS**	**17.520.800**	**APBD**		**13 RS**	**18.396.840**
01	02	02	2.04	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Palu	13 unit	14.283.250	APBD		13 unit	14.997.413
01	02	02	2.04	002	Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Palu	93 unit	3.237.550	APBD		93 unit	3.399.428
01	02	03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan**	**Palu**	**100%**	**27.775.200**	**APBD**		**100%**	**29.163.960**
01	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota**	**Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota**	**Palu**	**256 Sarana Praktek Swasta**	**2.799.950**	**APBD**		**256 Sarana Praktek Swasta**	**2.939.948**
01	02	03	2.01	002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Palu	1 dokumen	2.799.950	APBD		-1535550	2.939.948

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**02**	**03**	**2.03**		**Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP.UKM manusia di Wilayah Kab/Kota**	**Terlaksananya Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan**	**Palu**	**14 Puskesmas, 13 RS**	**2.350.250**	**APBD**		**256 Sarana Praktek Swasta**	**2.467.763**
01	02	03	2.03	002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Palu	2 dokumen	2.350.250	APBD		-112545000%	2.467.763
01	**02**	**03**	**2.04**		**Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Palu**	**2754 nakes**	**22.625.000**	**APBD**		**100 Nakes**	**23.756.250**
01	02	03	2.04	001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Palu	403 Orang	22.625.000	APBD		100 Orang	23.756.250
01	02	04			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN MINUMAN**	**Tersedianya Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan pengawasan makanan**	**Palu**	**100%**	**407.462.500**	**DAK BPOM, APBD**		**100%**	**427.835.625**
01	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Palu**	**75 Unit**	**2.100.000**	**APBD**		**75 Unit**	**2.205.000**
01	02	04	2.01	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Palu	3 Dokumen	2.100.000	APBD		1 Dokumen	2.205.000
01	**02**	**04**	**2.02**		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Tertibnya penerbitan sertifikat PKRT**	**Palu**	**28 PKRT**	**2.700.000**	**APBD**		**29 PKRT**	**2.835.000**
01	02	04	2.02	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan sertifikat Produksi Alkes Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu dan Perusahaan Rumah Tangga.	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Palu	1 Dokumen	2.700.000	APBD		1 Dokumen	2.835.000
01	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT**	**Palu**	**265 PIRT**	**274.540.500**	**DAK BPOM**		**265 PIRT**	**288.267.525**
01	02	04	2.03	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Palu	1 Dokumen	274.540.500	DAK BPOM		1 Dokumen PIRT	288.267.525

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Tertibnya penerbitan sertifikat laik sehat sanitasi TPM**	**Palu**	**1.225 TPM**	**15.915.000**	**APBD**		**1.225 TPM**	**16.710.750**
01	02	04	2.04	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Palu	1 Dokumen	15.915.000	APBD		1 Dokumen	16.710.750
01	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Tertibnya penerbitan stiker pembinaaan makanan jajanan**	**Palu**	**336 stiker**	**4.475.000**	**APBD**		**336 stiker**	**4.698.750**
01	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan san Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Palu	1 Dokumen	4.475.000	APBD		1 Dokumen	4.698.750
01	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT**	**Terlaksananya pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT**	**Palu**	**135 sarana PIRT**	**107.732.000**	**APBD**		**135 sarana PIRT**	**113.118.600**
01	02	04	2.06	001	Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Palu	135 sarana	107.732.000	DAK BPOM		135 sarana	113.118.600
01	02	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**	**Palu**	**100%**	**2.662.017.250**	**APBD**		**100%**	**2.795.118.113**
01	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan**	**Palu**	**100%**	**9.500.000**	**APBD**		**100%**	**9.975.000**
01	02	05	2.01	001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Palu	2 Dokumen	9.500.000	APBD		1 Dokumen	9.975.000
01	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS**	**Palu**	**100%**	**385.007.250**	**APBD**		**100%**	**404.257.613**
01	02	05	2.02	001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Palu	1 Dokumen	385.007.250	APBD		1 Dokumen	404.257.613
01	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM**	**Palu**	**100%**	**2.267.510.000**	**APBD**		**100%**	**2.380.885.500**
01	02	05	2.03	001	Bimbingan Teknis dan Supervisii Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Palu	1 Dokumen	2.267.510.000	APBD		1 Dokumen	2.380.885.500
									130.919.114.072				**137.570.332.277**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja/kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun.

4.1 Target Kinerja Capaian dan Program

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kota Palu selama Tahun 2024 adalah :

Program Wajib :

1. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat**
   Terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:
   1) Penyediaan Fasilitas Pelayan Kesehatan untuk UKM & UKP (dengan 7 Sub Kegiatan);
   2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota (dengan 37 Sub Kegiatan);
   3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (dengan 1 Sub Kegiatan) ;
   4) Penerbitan Izin Kelas C, D dan Faskes Tingkat Daerah Kab/Kota (dengan 2 Sub Kegiatan).

2. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**
   Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
   1) Pemberian izin Praktek Tenaga kesehatan di Wilayah Kab/Kota (dengan 1 Sub Kegiatan);
   2) Perencanaan Kebutuhan & Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP.UKM manusia di Wilayah Kab/Kota (dengan 1 Sub Kegiatan);
   3) Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota (dengan 1 Sub Kegiatan).

3. **Program Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan Makanan Minuman**

   Terdiri dari 6 (empat) kegiatan, yaitu:

   1) Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota (dengan 1 Sub Kegiatan);
   2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu (dengan 1 Sub Kegiatan);
   3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (dengan 1 Sub Kegiatan);
   4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (dengan 1 Sub Kegiatan);
   5) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (dengan 1 Sub Kegiatan).
   6) Pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT (dengan 1 Sub Kegiatan).

4. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

   Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

   1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota (dengan 1 Sub Kegiatan);
   2) Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota (dengan 1 Sub Kegiatan);
   3) Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota (dengan 1 Sub Kegiatan).

Program Penunjang :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   Terdiri dari 8(tujuh) kegiatan, yaitu:

   1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dengan 5 Sub Kegiatan);
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (dengan 6 Sub Kegiatan);
   3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (dengan 1 Sub Kegiatan);
   4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (dengan 1 Sub Kegiatan);

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah (dengan 8 Sub Kegiatan);
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (dengan 1 Sub Kegiatan);
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (dengan 2 Sub Kegiatan);
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (dengan 4 Sub Kegiatan).

Tabel 4.1
RENCANA KERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
DINAS KESEHATAN KOTA PALU TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
1										
1	**02**				**KESEHATAN**		**Palu**		**130.919.114.072**	**APBD**
		01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Nilai SAKIP OPD**	**Palu**	**B**	**62.865.165.162**	**APBD**
		01	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Palu**	**13 dokumen**	**545.466.100**	**APBD**
		01	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	2 dokumen	247.254.700	APBD
		01	2.01	002	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palu	2 dokumen	175.927.350	APBD
		01	2.01	003	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palu	2 dokumen	13.953.000	APBD
		01	2.01	006	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	5 laporan	51.313.950	APBD
		01	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palu	2 laporan	57.017.100	APBD
		01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	**Palu**	**100%**	**52.549.803.262**	**APBD**
		01	2.02	001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	1.099 orang	52.510.323.512	APBD
		01	2.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palu	12 dokumen	14.644.950	APBD
		01	2.02	005	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	1 laporan	3.609.800	APBD
		01	2.02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Palu	1 dokumen	2.740.000	APBD
		01	2.02	007	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palu	4 laporan	10.050.000	APBD
		01	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Palu	1 Dokumen	8.435.000	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
		01	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Palu**	**100%**	**36.420.000**	**APBD**
		01	2.03	004	Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Palu	1 Laporan	36.420.000	APBD
		01	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Palu**	**100%**	**18.822.350**	**APBD**
		01	2.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Palu	1 Dokumen	18.822.350	APBD
		01	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Palu**	**100%**	**509.057.150**	**APBD**
		01	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palu	1 paket	7.627.500	APBD
		01	2.06	002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palu	1 paket	7.991.700	APBD
		01	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Palu	1 paket	31.555.400	APBD
		01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palu	1 paket	79.677.550	APBD
		01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Palu	1 paket	63.940.000	APBD
		01	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Palu	4 Dokumen	3.950.000	APBD
		01	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palu	12 Laporan	11.500.000	APBD
		01	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	31 Laporan	302.815.000	APBD
		01	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Palu**	**100%**	**250.000**	**APBD**
		01	2.07	009	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Palu	0 Unit	250.000	APBD
		01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Palu**	**100%**	**7.272.805.100**	**APBD**
		01	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palu	12 Laporan	863.113.500	APBD
		01	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palu	12 Laporan	6.409.691.600	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
		01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**Palu**	**100%**	**1.932.541.200**	**APBD**
		01	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Palu	1 Unit	559.600.000	APBD
		01	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palu	338 Unit	1.301.635.200	APBD
		01	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Palu	100	11.480.000	APBD
		01	2.03	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palu	100	59.826.000	APBD
01	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat**	**Palu**	**100%**	**64.956.693.960**	**APBD**
01	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayan Kesehatan untuk UKM & UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota**	**Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP**	**Palu**	**14 Puskesmas**	**5.391.224.554**	**APBD**
01	02	02	2.01	003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Palu	1 unit	5.000.500	APBD
01	02	02	2.01	006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Palu	1 unit	250.000	APBD
01	02	02	2.01	009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Palu	2 unit	1.009.950	DAK FISIK
01	02	02	2.01	014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Palu	500 unit	1.562.891.720	DAK FISIK, APBD
01	02	02	2.01	015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Palu	369 unit	208.807.000	DAK NON FISIK
01	02	02	2.01	023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Palu	1 paket	3.551.565.384	DAK NON FISIK, APBD
01	02	02	2.01	026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Palu	1 paket	61.700.000	DAK NON FISIK

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
01	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP**	**Palu**	**14 Puskesmas**	**59.403.363.006**	**DAK Non Fisik, APBD**
01	02	02	2.02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	7.770 bumil	108.775.000	DAK Non Fisik, APBD
01	02	02	2.02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	7.416 bulin	358.107.950	DAK Non Fisik
01	02	02	2.02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	6.837 bayi	11.499.800	DAK Non Fisik
01	02	02	2.02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	45.158 balita	15.249.700	DAK Non Fisik
01	02	02	2.02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	41.744 murid	11.025.100	DAK Non Fisik
01	02	02	2.02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	251.188 jiwa	545.500.000	APBD
01	02	02	2.02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	30.512 orang	784.925.000	
01	02	02	2.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	68.126 jiwa	2.000.000	APBD
01	02	02	2.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Palu	23.830 jiwa	3.050.000	APBD
01	02	02	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Palu	785 kasus	5.950.000	APBD, DAK Non Fisik
01	02	02	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Palu	8.657 orang	135.100.000	APBD, DAK Non Fisik
01	02	02	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan ResikoTerinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Palu	8.804 kasus	41.500.000	APBD, DAK Non Fisik
01	02	02	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi KLB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Palu	1 Dokumen	46.820.000	APBD, DAK Non Fisik
01	02	02	2.02	014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Palu	1 Dokumen	1.000.000	APBD
01	02	02	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Palu	1 Dokumen	951.195.000	APBD, DAK Non Fisik

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
01	02	02	2.02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Palu	1 Dokumen	17.914.950	APBD, DAK Non Fisik
01	02	02	2.02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Palu	1 Dokumen	393.405.000	APBD, DAK Non Fisik
01	02	02	2.02	018	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Jumlah Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Palu	1 Dokumen	27.729.800	APBD, DAK Non Fisik
01	02	02	2.02	019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Palu	1 Dokumen	26.694.350	APBD
01	02	02	2.02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Palu	1 Dokumen	8.133.500	APBD, DAK Non Fisik
01	02	02	2.02	021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Palu	150 orang	1.120.000	APBD
01	02	02	2.02	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	Palu	70.000 jiwa	35.931.810.056	JAMKESDA / NON KAPITASI
01	02	02	2.02	027	Deteksi Dini Penyelahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes) dan Sekolah	Palu	75 orang	4.680.000	APBD
01	02	02	2.02	028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Pitensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Palu	8 paket	4.625.000	APBD
01	02	02	2.02	029	Penyelenggaraan Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Palu	1 Dokumen	1.525.000	APBD
01	02	02	2.03	030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Palu	1 unit	-	APBD
01	02	02	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Palu	1 Dokumen	19.209.635.750	APBD
01	02	02	2.02	034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Palu	1 Dokumen	30.900.000	DAK NON FISIK
01	02	02	2.02	035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Palu	2 unit	98.106.800	APBD
01	02	02	2.02	036	Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Palu	1 Laporan	4.955.800	APBD, DAK Non Fisik
01	02	02	2.02	038	Penyediaan & Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Palu	1 unit	57.070.050	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
01	02	02	2.03	040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Palu	50 Orang	10.000.000	APBD
01	02	02	2.03	041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Palu	30 Orang	6.000.000	APBD
01	02	02	2.03	042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang dengan Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Palu	29 Orang	2.600.000	APBD
01	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Kab/Kota**	**Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan**	**Palu**	**1 Dinas, 14 Puskesmas**	**144.585.600**	**APBD**
01	02	02	2.03	002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Palu	2 dokumen	144.585.600	APBD
01	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin RS Kelas C , D dan Faskes Tingkat daerah Kab/Kota**	**Penerbitan Izin RS yang dkeluarkan**	**Palu**	**13 RS**	**17.520.800**	**APBD**
01	02	02	2.04	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Palu	13 unit	14.283.250	APBD
01	02	02	2.04	002	Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Palu	93 unit	3.237.550	APBD
01	02	03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan**	**Palu**	**100%**	**27.775.200**	**APBD**
01	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota**	**Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota**	**Palu**	**256 Sarana Praktek Swasta**	**2.799.950**	**APBD**
01	02	03	2.01	002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Palu	1 dokumen	2.799.950	APBD
01	**02**	**03**	**2.03**		**Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP.UKM manusia di Wilayah Kab/Kota**	**Terlaksananya Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan**	**Palu**	**14 Puskesmas, 13 RS**	**2.350.250**	**APBD**
01	02	03	2.03	002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Palu	2 dokumen	2.350.250	APBD
01	**02**	**03**	**2.04**		**Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Palu**	**2754 nakes**	**22.625.000**	**APBD**
01	02	03	2.04	001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Palu	403 Orang	22.625.000	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
01	02	04			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN MINUMAN**	**Tersedianya Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan pengawasan makanan**	**Palu**	**100%**	**407.462.500**	**DAK BPOM, APBD**
01	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Palu**	**75 Unit**	**2.100.000**	**APBD**
01	02	04	2.01	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Palu	3 Dokumen	2.100.000	APBD
01	**02**	**04**	**2.02**		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Tertibnya penerbitan sertifikat PKRT**	**Palu**	**28 PKRT**	**2.700.000**	**APBD**
01	02	04	2.02	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan sertifikat Produksi Alkes Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu dan Perusahaan Rumah Tangga.	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Palu	1 Dokumen	2.700.000	APBD
01	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT**	**Palu**	**265 PIRT**	**274.540.500**	**DAK BPOM**
01	02	04	2.03	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Palu	1 Dokumen	274.540.500	DAK BPOM
01	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Tertibnya penerbitan sertifikat laik sehat sanitasi TPM**	**Palu**	**1.225 TPM**	**15.915.000**	**APBD**
01	02	04	2.04	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Palu	1 Dokumen	15.915.000	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
01	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Tertibnya penerbitan stiker pembinaaan makanan jajanan**	**Palu**	**336 stiker**	**4.475.000**	**APBD**
01	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan san Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Palu	1 Dokumen	4.475.000	APBD
01	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT**	**Terlaksananya pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT**	**Palu**	**135 sarana PIRT**	**107.732.000**	**APBD**
01	02	04	2.06	001	Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Palu	135 sarana	107.732.000	DAK BPOM
01	02	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**	**Palu**	**100%**	**2.662.017.250**	**APBD**
01	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan**	**Palu**	**100%**	**9.500.000**	**APBD**
01	02	05	2.01	001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Palu	2 Dokumen	9.500.000	APBD
01	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS**	**Palu**	**100%**	**385.007.250**	**APBD**
01	02	05	2.02	001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Palu	1 Dokumen	385.007.250	APBD
01	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM**	**Palu**	**100%**	**2.267.510.000**	**APBD**
01	02	05	2.03	001	Bimbingan Teknis dan Supervisii Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Palu	1 Dokumen	2.267.510.000	APBD
									130.919.114.072	

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 memuat arah kebijakan, sasaran kegiatan, tujuan program yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Renja 2024 merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu.

Renja sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Palu di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu.

2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
   a. Dinas Kesehatan Kota Palu berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Palu Tahun 2024.

   b. Dinas Kesehatan Kota Palu berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 dan RKPD Kota Palu Tahun 2024.

   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2024.

3) Rencana Tindak Lanjut.

   Renja Dinas Kesehatan Kota Palu diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Palu selama 1 (satu) tahun kegiatan yaitu Tahun

2024 yang hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kota Palu. Semoga upaya Dinas Kesehatan Kota Palu untuk mencapai indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan selama Tahun 2024 dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini diucapkan terima kasih. Tentunya Renja Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024 ini dapat terlaksana dan mencapai tujuannya bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu dan jajarannya, serta masyarakat.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

BADAN RUMAH SAKIT ANUTAPURA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencana-an Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 diwajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dan memiliki Rencana Kerja (Renja) yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Tahapan ataupun proses penyusunan Renja SKPD yaitu pertama melakukan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan persiapan pembentukan Tim penyususun Renja SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penysunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi, yang kedua melakukan penyusunan rancangan Renja dengan tahap perumusan rancangan Renja SKPD dan tahap penyajian rancangan Renja SKPD, yang ketiga pelaksanaan forum SKPD dengan tujuan untuk menyelaraskan Program dan Kegiatan SKPD, mempertajam indikator dan target Program Kegiatan SKPD, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif masing-masing SKPD keempat penetapan Renja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman dilingkungan

SKPD dalam Menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Selain itu, Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura (RSUD) Kota Palu dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja RSUD Anutapura Kota Palu harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Palu Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Tahun 2024. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaaan Anggaran SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu ini telah selaras dan memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Disamping itu Renja juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah. Renja OPD

ini berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program OPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tertuang dalam Renstra PD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu merupakan bagian internal dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Kota Palu dengan mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kota madya Tingkat II Kota Palu;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
11. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang tenaga Kesehatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan;
29. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041;
30. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 23);

32. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Susunan Kedudukan Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
33. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Wali Kota 45 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu;
34. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu;
35. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
36. Peraturan walikota Palu Nomor 15 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15)
37. Peraturan Direktur RSUD Anutapura Palu Nomor 445/11.1X/SK/HK/RSUD.AP/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu Tahun 2022-2026;
38. Peraturan Direktur RSUD Anutapura Palu Nomor 445/12.5/SK/HK/RSUD.AP/2022 Tentang Tim Penyusun Renja Perangkat Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 adalah penjabaran atas Renstra RSUD Anutapura Palu, menentukan arah strategi pembangunan rumah sakit tahun 2021 - 2026, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kegiatan.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD Anutapura Palu Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Anutapura dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Anutapura.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja RSUD Anutapura Palu Tahun 2024 ini disusun menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target – target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai rencana.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Anutapura Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Anutapura Palu dan Pencapaian Renstra RSUD Anutapura Palu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1.02.01	**Program** : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapubaten/Kota	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian keuangan RI No. PER/36/PB/2016		83,57%	81%				
1.2	**Kegiatan :** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan							
1.02.01	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN							
1.020 1.2.10	**Kegiatan** : Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian SPM Gawat Darurat	75,00%	87,50%	75,%	87,50%	116,67%	175,00%	175,00%
		Persentase Capaian SPM Rawat Jalan	66,67%	66,67%	83,33%	83,33%	100,00%	150,00%	150,00%

		Persentase Capaian SPM Rawat Inap	81,82%	81,82%	81.82%	81,82%	100,00%	163,64%	163,64%
		Persentase Capaian SPM Bedah	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%
		Persentase Capaian SPM Persalina dan Perinatologi	62,50%	37,50%	62,50%	75,00%	120,00%	112,50%	112,50%
		Persentase Capaian SPM Intensif	50,00%	50,00%	50%	100,00%	200,00%	150,00%	150,00%
		Persentase Capaian SPM Radiologi	75,00%	100,00%	75,00%	100,00%	133,33%	200,00%	200,00%
		Persentase Capaian SPM Laboratorium dan Patologi Klinik	75,00%	100,00%	75,00%	100,00%	133,33%	200,00%	200,00%
		Persentase Capaian SPM Rehabilitasi Medik	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%
		Persentase Capaian SPM Farmasi	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	100,00%	150,00%	150,00%
		Persentase Capaian SPM Gizi	100,00%	66,67%	100%	100,00%	100,00%	166,67%	166,67%
		Persentase Capaian SPM Transfusi Darah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%
		Persentase Capaian SPM Keluarga Miskin	100,00%	100,00%	100 %	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%
		Persentase Capaian SPM Rekam Medis	75,00%	25%	75%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Capaian SPM Pengelolaan Limbah	50,00%	100,00%	50,00%	75,00%	150,00%	175,00%	175,00%
		Persentase Capaian SPM Administrasi dan Manajemen	55,56%	44,44%	75,00%	33,33%	44,44%	77,77%	77,77%
		Persentase Capaian SPM Ambulans/Kereta Jenazah	100,00%	100,00%	75,00%	100,00%	133,33%	200,00%	200,00%
		Persentase Capaian SPM Pemulasaran Jenazah	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%
		Persentase Capaian SPM Pelayanan Laundry	50,00%	100,00%	50,00%	100,00%	200,00%	200,00%	200,00%

		Persentase Capaian SPM Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit	33,33%	100,00%	33,33%	33,33%	100,00%	133,33%	133,33%
		Persentase Capaian SPM Pencegahan dan Pengendalian infeksi	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%
1.02.01.2.10.01	**Sub Kegiatan** : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang Pelayanan Pelayanan BLUD	13 Unit Kerja	13 Unit Kerja	13 Unit Kerja	13 Unit Kerja	13 Unit Kerja	13 Unit Kerja	13 Unit Kerja
1.02.02	**Program :** Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	100%
1.02.02.2.01	**Kegiatan** : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan penyediaan sarana , prasarana dan peralatan kesehatan yang handal sesuai standar RS Kelas B dan standar akreditasi	70,3%	70,3%	70,3%	70,3%	70,3%	70,3%	100%
1.02.02.2.01.14	**Sub Kegiatan :** Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	124 Unit	124 Unit	275 Unit	136 Unit	136 Unit	136 Unit	136 Unit
1.02.02.2.02	**Kegiatan** : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah BAB akreditasi yang dilaksanakan	16 BAB	16 BAB	16 BAB	16 BAB	16 BAB	16 BAB	16 BAB

1.02.02.2.02.32	**Sub Kegiatan** : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket
1.02.03	**Program :** Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar	49,5%	46,5%	47,6%	47,6%	100%	47,6%	100%	46,5 %
1.02.03.2.02	**Kegiatan :** Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase tenaga RS yang mendapat Pelatihan 20 Jam/Tahun	47,6%	47,6%	24,00%	2,34%	2,34%	2,34%	49,94%	49,94 %
1.02.03.2.02.02	**Sub Kegiatan** : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatansesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	6 Orang	6 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang

Dari tabel 2.1 diatas capaian realisasi terhadap Indikator Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut *:*

1. Persentese capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementeriaan Keuangan RI No. PER/36/PB/2016 indikator belum ada realisasi karena penilaian indikator ini di lakukan setelah berakhirnya tahun berjalan (dilakukan pada tahun berikutnya).
2. Indikator Persentase capaian SPM capaian realisasi dari target 80% telah tercapai yakni 76,98%. Indikator ini tidak tercapai karena terdapat 2 SPM yang rendah capaiannya yaitu : Persentase Capaian SPM Administrasi dan Manajemen, dan Persentase Capaian SPM Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, pengukuran terhadap indikator SPM dilakukan setiap triwulan.
3. Indikator persentase tenaga RS yang mendapat pelatihan 20 jam/tahun dari target ≥23,21%, realisasi capain 2,34%. Faktor yang menyebabkan indikator ini tidak tercapai adalah keterbatasan anggaran. Selain bersumber dari APBD, peningkatan SDM juga dianggarkan melalui BLUD akan tetapi karena jumlah SDM RS yang besar sehingga anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar sementara pendapatan BLUD pengalokasian diutamakan ke oprasional pelayanan maka pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas.

2.2. Analisis Kinerja pelayanan RSUD Anutapura

Capaian kinerja RSUD Anutapura dilakukan cara mengukur realisasi indikator kinerja yang di perjanjikan antara Direktur RSUD Anutapura dengan Walikota Palu. Indikator dari sasaran strategis terdiri atas delapan indikator yan menjadi kinerja utama Direktur, Realisasi indikator kinerja utama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Anutapura Palu

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Pencapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13
1	Capaian kinerja BLUD	%		-	80%	81%	82%	-	83,57%	83,70%	83,95%	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%		76,61%	78%	80%	82%	77,78%	79,42%	80%	82%	

Kendala yang hadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai tersebut :

No	Indikator Kinerja Utama	Permasalahan/Kendala	Alternatif Solusi
1	BOR	1. Adanya rujukan berjenjang yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan 2. Beberapa pasien dengan skoring Covid-19 tinggi menunggu hasil PCR dan konsultasi ke DPJP 3. Renovasi ruang perawatan dan selasar mengakibatkan beberapa ruang perawatan tidak dapat difungsikan. 4. Beberapa ruang perawatan digunakan untuk ruang perawatan Covid-19.	1. Koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait rujukan ke RS kelas B. 2. Koordinasi antar unit untuk optimalisasi hasil pemeriksaan. 3. Koordinasi dengan Pihak Pelaksana rehabilitasi untuk penyelesaian dan akses alternatif keruang perawatan.
2.	NDR	Kondisi pasien pada saat dirujuk sudah dalam kondisi tingkat keparahan tinggi	Meningkatkan kualitas layanan (kecepatan, ketersediaan) DPJP dan fasilitas pendukung .
3.	GDR	Kondisi pasien pada saat dirujuk sudah dalam kondisi tingkat keparahan tinggi	Meningkatkan kualitas layanan (kecepatan, ketersediaan) DPJP dan fasilitas pendukung .
4.	Akreditasi RS	RS belum memenuhi semua elemen penilaian yang ada di standar penilaian	RS memenuhi elemen penilaian yang belum terpenuhi di standar penilaian
5.	Akreditasi RS Pendidikan	Keterbatasan ruangan untuk praktik klinik dokter muda (Coass)	1. Mengalihkan beberapa ruang perawatan untuk ruang nginap tenaga

			coass 2. Menyiapkan ruang diskusi tenaga coass di Gedung Murai dan AMC
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Belum terpasang standar dan alur pelayanan di unit pelayanan 2. Terkait SDM : kedatangan Dokter spesialis dirawat jalan yang belum semuanya tepat waktu 3. Antrian pendaftaran di anjungan pendaftaran mandiri (APM) kadang lambat 4. Masih ada dokter spesialis radiologi yang datang tidak tepat waktu	1. Memasang standar dan alur pelayanan di unit pelayanan 2.Dokter spesialis yang lebih dari 1 akan dilakukan pengaturan jadwal pelayanan di rawat jalan. 3. Menempatkan tenaga keamanan/security untuk penggunaan APM 4. Koordinasi dengan dokter spesialis yang terkait untuk datang tepat waktu.
7.	Nilai Reformasi Birokrasi	Tim Reformasi Birokrasi belum bekerja secara maksimal karena masih berfokus ke kegiatan penilaian akreditasi RS. Terkait SDM : keterbatasan tenaga	Tim Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi secara berkala untuk pemenuhan elemen masing-masing area perubahan.
8.	Nilai SAKIP	1. Dokumen Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja belum ada 2. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	1. Perlu dibuat Pedoman Teknis pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja 2. Perlu dibuatkan jadwal berkala untuk pelaksanaan Monev kinerja.

Selain Indikator kinerja utama pada tabel C.30 terdapat capaian standar pelayanan minimal Rumah Sakit berdasarkan Permenkes RI no.129 Tahun 2008 sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Anutapura

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		SPM/STANDAR NASIONAL	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
*		**Standar Pelayanan Minimal (SPM)**						
1	**GAWAT DARURAT**	1	Kemampuan menangani Life Saving Anak dan Dewasa	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
		3	Pemberian Pelayanan kegawat daruratan yg bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	100%	100%	50%	100%	100%
		4	Ketersediaan TIM Penanggulangan Bencana	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim
		5	Waktu Tanggap Pelayanan Dokter	≤5 menit terlayani pasien datang	≤ 5 menit terlayani pasien datang	≤ 5	≤ 5 menit terlayani pasien datang	≤ 5 menit terlayani pasien datang
		6	Kepuasan Pelanggan	≥70%	75%	68,50%	75%	82.67%
		7	Kematian Pasien ≤ 24 jam	≤ 2/1000 Pindah ke R. Inap setelah 8 jam	2/1000 Pindah ke R. Inap setelah 8 jam	0,0075/1000 Pindah ke R. Inap setelah 8 jam	2/1000 Pindah ke R. Inap setelah 8 jam	0.0035/1000 Pindah ke R. Inap setelah 8 jam
		8	Tidak ada pasien yg di haruskan membayar uang muka di IGD	100%	100%	100%	100%	100%
2	**RAWAT JALAN**	1	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100% Dok Sp.	93%	91,30%	93%	94.5%
		2	Ketersediaan Pelayanan :	a. Klinik Anak & Tumbuh Kembang	ada	ada	Ada	Ada
				b. Klinik Peny. Dalam	ada	ada	Ada	Ada
				c. Klinik Kebidanan	ada	ada	Ada	Ada
				d. Klinik Bedah	ada	ada	Ada	Ada
				e. Klinik Mata	ada	ada	Ada	Ada
				f. Klinik Saraf	ada	ada	Ada	Ada
				g. Klinik THT	ada	ada	Ada	Ada
				h. Klinik Gigi & Mulut	ada	ada	Ada	Ada
				i. Klinik Jiwa	ada	ada	Ada	Ada
				j. Klinik Kul - Kel	ada	ada	Ada	Ada

				k. Klinik Ortopedi	ada	ada	Ada	Ada
				l. Klinik Paru	ada	ada	Ada	Ada
				m. Klinik KB	ada	ada	Ada	Ada
				n. Klinik Jantung	ada	ada	Ada	Ada
				o. Klinik Gizi	ada	ada	Ada	Ada
				p. Klinik Psikologi	ada	ada	Ada	Ada
		3	Jam Buka Pelayanan	Jam 08.00 s/d 13.00 setiap hr kerja kecuali jumat 08.00 s/d 11.00	100%	100%	100%	100%
		4	Waktu tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 menit	≤ 60 menit	60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit
		5	Kepuasan Pelanggan	≥90 %	83,5%	77.89%	75%	73.82%
		6	1). Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan Mikroskopis TB	≥ 60 %	100%	74,3%	100%	47.4%
			2). Terlaksananya kegiatan pencatatan dan Pelaporan TB di RS	≥ 60 %	100%	100%	100%	100%
3	**RAWAT INAP**	1	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap :					
				a. dr. Spesialis	tersedia	tersedia	Tersedia	Tersedia
				b. Bidan / Perawat (DIII)	tersedia	tersedia	Tersedia	Tersedia
		2	Dokter penanggung jawab PASIEN Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap :	a. Anak	ada	ada	Ada	Ada
				b. Peny. Dalam	ada	ada	Ada	Ada
				c. Kebidanan	ada	ada	Ada	Ada
				d. Bedah	ada	ada	Ada	Ada
				e. Mata	ada	ada	Ada	Ada
				f. Saraf	ada	ada	Ada	Ada
				g. THT	ada	ada	Ada	Ada
				h. Jiwa	ada	ada	Ada	Ada
				i. Kulit dan Kelamin	ada	ada	Ada	Ada
				j. Ortopedi	ada	ada	Ada	Ada
				k. Paru	ada	ada	Ada	Ada
				l. Jantung	ada	ada	Ada	Ada
				m. Gizi Klinik	ada	ada	Ada	Ada
				n. Klinik psikologi	ada	100%	100%	100%
		4	Jam Visite dokter Spesialis	Jam 08.00 sd 14.00 tiap hari kerja	100%	ada	Ada	Ada
		5	Kejadian Infeksi Pasca Operasi	≤ 1,5%	≤ 1,5%	0%	≤ 1,5%	0.65%
		6	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5%	≤ 1,5%	0%	≤ 1,5%	0.35%
		7	Tidak adanya kejadian Pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100%	100%	100%	100%	100%

		8	Kematian Pasien > 48 jam	≤ 25/1000	≤ 25/1000	0,004/1000	≤ 25/1000	0.003/1000
		9	Kejadian pulang paksa	≤ 5%	≤ 5%	1,10%	≤ 5%	0.58%
		10	Kepuasan Pelanggan	≥90%	83,5%	77,5%	75%	81.23%
		k)	Rawat Inap TB :					
			a. Penegakan diagnosis TB melalui Pemeriksaan Mikroskopis TB	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Pencatatan & Pelaporan TB di RS	100%	100%	100%	100%	100%
4	**BEDAH SENTRAL**	1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 Hari	2 hr	1 Hari	2 hr	1 Hari
		2	Kejadian Kematian di meja Operasi	≤ 1%	≤ 1%	0%	≤ 1%	0%
		3	Tidak adanya kejadian Operasi sala sisi	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Tidak adanya Operasi salah Orang	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing / lain pada tubuh pasien setelah Operasi	100%	100%	100%	100%	100%
		7	Komplikasi anastesi, Overdosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube	≤6%	≤6%	0%	≤6%	0%
5	**PERSALINAN & PERINATALOGI**	1	Kejadian kematian Ibu karena persalinan :	a. Perdarahan ≤ 1 %	≤ 1 %	0%	≤ 1 %	0%
				b. Pre eklampsia ≤ 30%	≤ 30%	0%	≤ 30%	0%
				c. Sepsis ≤ 0,2%	≤ 0,2%	0%	≤ 0,2%	0%
		2	Pemberi pelayanan persalinan Normal	a. Dokter Spesialis Sp.OG	10%	8,7%	10%	12.5%
				b. Dokter Umum Terlatih APN	15%	13,0%	15%	0%
				c. Bidan	75%	78,3%	75%	75%
		3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	TIM PONEK yang terlatih	100%	100%	100%	100%
		4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi :	a. Dokter Spesialis OG. (Sp.OG)	100%	100%	100%	33.3%
				b. Dokter Anak. (Sp.A)	100%	100%	100%	44.4%
				c. Dokter Anastesi. (Sp.An)	100%	100%	100%	22.2%
		5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%	100%	96,5%	100%	92.9%
		6	Pertolongan Persalinan melalui SC	≤ 20%	50%	52,50%	50%	55.5%
		7	Keluarga Berencana :					
			a. Presentase KB (Vasektomi dan Tubektomi) yang di lakukan oleh tenaga kompoten dr Sp.OG, dr. Sp. B dan dr. umum terlatih	100%	100%	100%	100%	100%

			b. Presentasi peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih	100%	100%	100%	100%	100%
		8	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	83,5%	0%	75%	100%
6	**INTENSIF**	1	Rata - rata Pasien yang kembali ke keperawatan Intensif dengan Kasus yang sama < 72 Jam (3 hari)	≤ 3%	≤ 3%	0.31%	≤ 3%	0%
		2	Pemberi pelayanan Unit Intensif :					
				dr. Spesialis Anastesi Dan dokter spesialis sesuai kasus yang ditangani	100%	100%	100%	100%
				100% Perawat D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU	84%	18,8%	85%	36.8%
7	**RADIOLOGI**	1	Waktu tunggu Hasil Pelayanan Thorax Foto	≤ 3 Jam	4 Jam	1 jam 23 Menit	3 Jam	1 jam 47 Menit
		2	Pelaksanaan Ekspertisi	Dokter Sp. Rad	100%	100%	100%	100%
		3	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan Foto < 2%	≤ 2%	0,02%	≤ 2%	0,03%
		4	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	83,5%	85,43%	80%	86.00%
8	**LAB. PATALOGI KLINIK**	1.	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium	< 140 menit kimia darah dan darah rutin	120 menit	79,0 Menit	120 menit	78.3 Menit
		2.	Pelaksanaan Ekspertisi	Doktter Sp. PK	100%	100%	100%	100%
		3.	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Lab	100%	100%	100%	100%	100%
		4.	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	78%	92%	76%	92%
9	**REHABILITASI MEDIK**	1	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50%	≤ 50%	0.09%	≤ 50%	8.0%
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindak rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Kepuasan Pelanggan	≥80%	83,5%	85%	75%	85%
10	**FARMASI**	1	Waktu tunggu pelayanan :					
			a. Obat jadi	≤30 menit	≤30 menit	15,45 menit	≤30 menit	21.30 menit
			b. Obat Racikan	≤ 60 menit	≤ 60 menit	29,38 menit	≤ 60 menit	29.90 menit
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	83,5%	80,45%	80%	82%
		4	Penulisan resep sesuai Formularium	100%	100%	100,00%	90%	100%
11	**GIZI**	1	Ketepatan waktu pemberian makan kepada pasien	≥90%	≥90%	99.85%	≥90%	97.95%
		2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤20%	≤20%	17.70%	≤20%	12.41%
		3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	99.98%	100%	99.98%
12	**TRANSFUSI DARAH**	1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% terpenuhi	95%	100%	97%	100%
		2	Kejadian Reaksi Transfusi	≤ 0.01 %	≤ 0.01 %	0,000%	≤ 0.01 %	0,000%

13	**PELAYANAN GAKIN**		Pelayanan terhadap GAKIN yang datang ke RS pada setiap Unit pelayanan	100% terpenuhi	100%	100%	100%	100%
14	**REKAM MEDIK**	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	72%	100%	100%
		2	Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	90%	100%	97%
		3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	≤ 10 menit	13 Menit	≤ 10 menit	3 Menit
		4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	≤ 15 menit	20 Menit	≤ 15 menit	7 Menit
15	**PENGELOLAAN LIMBAH**	1	Limbah Cair					
				a. BOD < 30 mg/l	< 30 mg/l	BOD <44,358 mg/l	< 50 mg/l	< 4.92mg/l
				b. COD < 80 mg/l	<80 Mmhg/l	COD <17.707 mg/l	<80 Mmhg/l	<25Mmhg/l
				c. TSS < 30 mg/l	<30 Mg/l	TSS < 17,33 mg/l	<30 Mg/l	<32Mg/l
				d. PH 6 - 9	6-9	PH 7	6-9	7
		2	PengelolaanlLimbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	87.25%	100%	94.53%
16	**ADMINISTRASI & MANAJEMEN**	1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	82%	100%	96%
		2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Ketepatan waktu pengusulan naik pangkat	100%	100%	72%	100%	26.6%
		4	Ketepatan waktu pengurusan naik berkala	100%	100%	29%	100%	42.4%
		5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60%	≥ 60%	63%	≥23,21%	34.17%
		6	Cost recovery	≥ 40%	100%	149%	100%	86.49%
		7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	83%	100%	92%	100%
		8	Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	1 jam	52 Menit	1 jam	92 Menit
		9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (intensif) sesuai kesepakatan waktu	100%	80%	2,38%	90%	100%
17	**AMBULANCE/ KERETA JENAZAH**	1	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam

		2	Kecepatan memberikan pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah di RS (≤ 30 menit)	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	sesuai ketentuan daerah	≤ 1 Jam	≤ 1 Jam	≤ 1 Jam	≤ 1 Jam
18	**PEMULASARAN JENAZAH**		Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	30 Menit
19	**PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT**	1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat (maksimal 15 menit)	≥ 80 %	≥ 80 %	81,8%	≥ 80 %	83.5%
		2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	75%	88,4%	80%	82.6%
		3	Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat dengan ketentuan kalibrasi	100%	90%	80%	90%	93.27%
20	**PELAYANAN LAUNDRY**	1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	95%	80.32%	90%	90%
		2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	99	100%	90%	100%
21	**Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)**	1	Ada Anggota PPI yang terlatih	≥ 75%	100%	0%	100%	100%
		2	Ketersediaan APD di setiap Intalasi/Unit Pelayanan	≥ 60%	≥ 60%	0%	≥ 60%	100%
		3	Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Infeksi Nosokomial (minimum 1 parameter)	≥75 %	90%	0%	95%	100%

Selain Indikator Standar Pelayanan Minimal, kinerja pelayanan rumah sakit sebagai BLUD di nilai dari indikator berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2021 tentang Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum.

Selain itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah kegiatan penilaian kinerja RSD BLUD terdiri dari Perspektif pembelajaran

dan Pertumbuhan, proses bisnis internal, pelanggan dan keuangan yang dikenal dengan metode *Balanced Score Card* (BSC).

Indikator kinerja penilaian kinerja BLUD bidang layanan kesehatan yaitu :

1. Kinerja dari Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
    a. Kecukupan SDM
    b. Pelatihan 20 jam per pegawai
    c. Kecukupan Sarana Medis
    d. Pengembangan SIM RS
    e. Peningkatan Pendapatan RSD per pegawai
2. Kinerja dari Perspektif Proses Layanan Internal
    a. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Kritis
    b. Waktu Tunggu di Rawat Jalan
    c. Waktu Tanggap Darurat di IGD
    d. Penundaan Operasi Elektif
    e. *Net Death Rate*
3. Kinerja dari Perspektif Pelanggan
    a. Indeks Kepuasan Pelanggan
    b. Penanganan Komplain
    c. Rujukan Keluar Rawat Inap
    d. Retensi Pelanggan Rawat Jalan
    e. Pasien Pulang Paksa (Pulang Atas Permintaan Sendiri)
4. Kinerja dari Perspektif Keuangan
    a. Rasio Kas
    b. *Cost Recovery Rate*
    c. *Profit Margin*
    d. Kewajiban dibagi asset
    e. Pertumbuhan Pendapatan

    Rincian indikator kinerja BLUD sebagai berikut

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Keuangan BLUD

NO.	SUB ASPEK/KELOMPOK INDIKATOR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR	pembobotan	STANDAR	TARGET 2024
1. Kinerja dari Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan				
	1). Kecukupan SDM	8	100%	100%
	2) Pelatihan 20 Jam Pegawai	5	> 60%	> 60%
	3) Kecukupan Sarana Medis	8	100%	100%
	4) Pengembangan SIM RS	5	100%	100%
	5) Kenaikan Pendapatan RSD Per Pegawai	4	≥ 5% Per Tahun	≥ 5% Per Tahun
	Total Bobot	**30**		
2. Perspektif Proses Layanan Internal				
	1) Waktu Tunggu Laboratorium Kritis	5	100%	100%
	2) Waktu Tunggu Rawat Jalan	3	≤ 60 Menit	≤ 60 Menit
	3) Waktu Tanggap Darurat IGD	5	100%	100%
	4) Penundaan Operasi Elektif	3	< 5%	< 5%
	5) *Net Death Rate (NDR)*	4	≤ 25‰ (Permil)	≤ 25‰ (Permil)
	Total Bobot	**20**		
3. Perspektif Pelanggan				
	1) Indeks Kepuasan Pelanggan	9	≥ 80%	≥ 80%
	2) Penanganan Komplain	8	> 75%	> 75%
	3) Rujukan Keluar Pasien Rawat Inap	5	100%	100%
	4) Retensi Pelanggan Rawat Jalan	5	> 75%	> 75%
	5) Pasien Pulang Paksa	3	< 5%	< 5%
	Total Bobot	**30**		
4. Perspektif Keuangan				
	1) Rasio Kas	5	60% - 80%	60% - 80%
	2) Cost Recovery Rate (CRR)	5	> 60 %	> 60 %
	3) *Profit Margin*	3	10% - 15%	10% - 15%
	4) Rasio Kewajiban Terhadap Aset	2	< 10%	< 10%
	5) Pertumbuhan Pendapatan	5	> 7%	> 7%
	Total Bobot	**20**		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Anutapura Palu

Berdasarkan telaah atas penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Anutapura Palu, permasalahan yang masih dihadapi adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya Pelayanan di Unit - unit Pelayanan
b. Terdapat angka kematian Ibu melahirkan dan angka kematian bayi di RSUD Anutapura
c. Capaian indikator Mutu Pelayanan yaitu BOR belum mencapai standar yang efisien yaitu 60-80%
d. Capaian SPM belum seluruhnya mencapai 100%
e. Capaian ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alkes belum sesuai standar Permenkes untuk RS Kelas B
f. RSUD Anutapura Palu masuk dalam penetapan Kemenkes sebagai Rumah Sakit pemberi layanan unggulan stroke.
g. Kurangnya sarana pendukung (hardware) untuk implementasi rekam medik elektronik (RME).
h. Gedung AMC belum sepenuhnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta alat kesehatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka isu – isu strategis RSU Anutapura:

1. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2. Penguatan Rumah Sakit Rujukan
3. Kesehatan Ibu dan Anak
4. Kualitas dan Kuantitas SDM
5. Kualitas dan Kuantitas Sarana, Prasarana dan Peralatan.
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Pemenuhan Sarana, prasarana layanan unggulan stroke
8. Optimalisasi Rekam Medis elektronik

9. Sarana dan Prasarana serta alat kesehatan Gedung AMC belum lengkap.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Sinkronisasi terhadap rancangan awal RKPD perlu dilakukan sebagai langkah awal maupun dasar bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program – program yang dijadikan pedoman dalam pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program, Kegiatan dan sub kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura disesuaikan dengan rancangan awal RKPD sehingga dapat dirumuskan program / kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja. Berikut ini Tabel Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program :** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapubaten/Kota	RSUD Anutapura	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian keuangan RI No. PER/36/PB/2016	A	**140.347.528.243**	**Program :** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapubaten/Kota	RSUD Anutapura	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian keuangan RI No. PER/36/PB/2016	A	**152.617.942.856**	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Anutapura	Persentase Realisasi Keuangan	95%	45.347.528.243	**Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Anutapura	Persentase Realisasi Keuangan	95%	51.644.025.236	DAU
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Anutapura	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	518 orang/ bulan	45.347.528.243	**Sub Kegiatan** : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Anutapura	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	518 orang/ bulan	51.644.025.236	
	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Anutapura	Persentase Capaian SPM Gawat Darurat	75,00%	**95.000.000.000**	**Kegiatan** : Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Anutapura	Persentase Capaian SPM Gawat Darurat	75,00%	**100.973.917.620**	BLUD
			Persentase Capaian SPM Rawat Jalan	66,67%				Persentase Capaian SPM Rawat Jalan	67%		
			Persentase Capaian SPM Rawat Inap	81,82%				Persentase Capaian SPM Rawat Inap	81,82%		
			Persentase Capaian SPM Bedah	100%				Persentase Capaian SPM Bedah	100%		
			Persentase	62,50%				Persentase	62,50%		

			Capaian SPM Persalinan dan Perinatologi				Capaian SPM Persalinan dan Perinatologi		
			Persentase Capaian SPM Intensif	50%			Persentase Capaian SPM Intensif	50%	
			Persentase Capaian SPM Radiologi	75%			Persentase Capaian SPM Radiologi	75%	
			Persentase Capaian SPM Laboratorium dan Patologi Klinik	75%			Persentase Capaian SPM Laboratorium dan Patologi Klinik	75%	
			Persentase Capaian SPM Rehabilitasi Medik	100%			Persentase Capaian SPM Rehabilitasi Medik	100%	
			Persentase Capaian SPM Farmasi	75%			Persentase Capaian SPM Farmasi	75%	
			Persentase Capaian SPM Gizi	100%			Persentase Capaian SPM Gizi	100%	
			Persentase Capaian SPM Transfusi Darah	100%			Persentase Capaian SPM Transfusi Darah	100%	
			Persentase Capaian SPM Keluarga Miskin	100%			Persentase Capaian SPM Keluarga Miskin	100%	
			Persentase Capaian SPM Rekam Medis	75%			Persentase Capaian SPM Rekam Medis	75%	
			Persentase Capaian SPM Pengelolaan Limbah	50%			Persentase Capaian SPM Pengelolaan Limbah	50%	
			Persentase Capaian SPM Administrasi dan Manajemen	56%			Persentase Capaian SPM Administrasi dan Manajemen	56%	
			Persentase Capaian SPM Ambulans/Kereta Jenazah	100%			Persentase Capaian SPM Ambulans/Kereta Jenazah	100%	
			Persentase Capaian SPM Pemulasaran Jenazah	100%			Persentase Capaian SPM Pemulasaran Jenazah	100%	

			Persentase Capaian SPM Pelayanan Laundry	75%			Persentase Capaian SPM Pelayanan Laundry	75%	
			Persentase Capaian SPM Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit	33,33%			Persentase Capaian SPM Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit	33,33%	
			Persentase Capaian SPM Pencegahan dan Pengendalian infeksi	66,67%			Persentase Capaian SPM Pencegahan dan Pengendalian infeksi	66,67%	
			Persentase pengiriman Laporan SIRS	100%			Persentase pengiriman Laporan SIRS	100%	
			Persentase evaluasi pendokumentasian asuhan keperawatan di Rawat Inap	100%			Persentase evaluasi pendokumentasian asuhan keperawatan di Rawat Inap	100%	
			Persentase hasil survei kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan	100%			Persentase hasil survei kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan	100%	
			Persentase ketersediaan bahan-bahan logistik keperawatan	90%			Persentase ketersediaan bahan-bahan logistik keperawatan	90%	
			Cakupan Pengelolaan aset	100%			Cakupan Pengelolaan aset	100%	
			Persentase pengelolaan surat menyurat	100%			Persentase pengelolaan surat menyurat	100%	
			Cakupan pengelolaan keamanan dan ketertiban	100%			Cakupan pengelolaan keamanan dan ketertiban	100%	
			Persentase produk hukum yang dikaji	100%			Persentase produk hukum yang dikaji	100%	

			tepat waktu					tepat waktu			
			Persentase penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat	100%				Persentase penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat	100%		
			Cakupan pengordinasian keprotokolan dilingkungan RS	100%				Cakupan pengordinasian keprotokolan dilingkungan RS	100%		
			Cakupan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan	100%				Cakupan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan	100%		
			Level pengembangan SIM RS	Siloed 1				Level pengembangan SIM RS	Siloed 1		
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang Pelayanan	1 unit kerja	95.000.000.000	**Sub Kegiatan :** Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Anutapura	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang Pelayanan	1 unit kerja	100.973.917.620	
2	**Program :** Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RSUD Anutapura	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan	100%	**33.569.978.250**	**Program :** Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan	100%	**33.569.978.250**	DAK
	Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Fasilitas pelayanana Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan :	RSUD	Jumlah alat	124	25.651.345.050	**Sub Kegiatan :**	RSUD	Jumlah alat	124	25.651.345.050	Untuk memenuhi

	Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Anutapura	kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	unit		Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Anutapura	kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	unit		sarana dan prasarana Gedung AMC dan Layanan Unggulan Stroke
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Anutapura	Jumlah BAB akreditasi yang dilaksanakan	16 BAB	**7.918.633.200**	**Kegiatan :** Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Anutapura	Jumlah BAB akreditasi yang dilaksanakan	16 BAB	**7.918.633.200**	APBD
	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Anutapura	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3 Paket	7.918.633.200	**Sub Kegiatan** : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Anutapura	Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3 Paket	7.918.633.200	
3	**Program :** Peningkatan Kapasitas sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD Anutapura	Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar	48,5%	**113.783.000**	**Program :** Peningkatan Kapasitas sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD Anutapura	Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar	48,5%	**113.783.000**	APBD
	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah kabupaten/Kota	RSUD Anutapura	Persentase tenaga RS yang mendapat Pelatihan 20 Jam/Pertahun	47,6%	113.783.000	**Kegiatan :** Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah kabupaten/Kota	RSUD Anutapura	Persentase tenaga RS yang mendapat Pelatihan 20 Jam/Pertahun	47,6%	113.783.000	APBD
	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	RSUD Anutapura	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	6 orang	113.783.000	**Sub Kegiatan :** Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	RSUD Anutapura	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	6 orang	113.783.000	APBD
Total Pagu Rancangan Perubahan RKPD 2024				**174.031.289.493**		**Total Pagu Hasil Analisis Kebutuhan 2024**				**186.301.704.106**	

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa antara rancangan Perubahan RKPD dan hasil Analisa kebutuhan :

1. Terdapat perubahan jumlah anggaran yang pada kegiatan peningkatan pelayanan BLUD sebesar Rp. 25.973.917.620 dengan rincian 17.973.917.619 bersumber dari Silpa tahun 2023 dan 8.000.000.000 dari estimasi pendapatan tahun 2024.
2. Terdapat pembayaran hutang insentif Nakes sebesar Rp. 95.714.412

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan data hasil musrenbang tidak terdapat usulan masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari RSUD Anutapura Palu sebagai organisasi pemberi pelayanan kesehatan perorangan.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Palu

Nama Perangkat Daerah **: Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu Kota Palu**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD ANUTAPURA PALU

Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka program dan kegiatan yang akan di laksanakan tahun 2024.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Mutu Pelayanan Kesehatan rujukan dalam menghadapi perkembangan global dan mewujudkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Berbasis IT sebagai rumah sakit dan Pendidikan pada tahun 2024 RSUD Anutapura Palu sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				Renja 2024		APBD 2024		Perubahan Renja 2024		Bertambah / Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-8)	12=(11/6)	13
1.02.01	**Program** : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kapubaten/Kota	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian keuangan RI No. PER/36/PB/2016	RSUD Anutapura	A	**146.966.741.832**	A	**140.347.528.243**	A	**152.617.942.856**	**12.270.414.613**	**8.74%**	
1.02.01.2.02	**Kegiatan :** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	RSUD Anutapura	95%	51.966.741.832	95%	45.347.528.243	95%	51.644.025.236	6.296.496.993	13.88%	
1.02.01.2.02.01	**Sub Kegiatan :** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	RSUD Anutapura	518 org/bulan	51.966.741.832	518 org/bulan	45.347.528.243	518 org/bulan	51.644.025.236	6.296.496.993	13.88%	
1.02.01.2.10	**Kegiatan** : Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian SPM Gawat Darurat	RSUD Anutapura	75,00%	95.000.000.000	75,00%	95.000.000.000	75,00%	100.973.917.620	5.973.917.620	6,29%	
		Persentase Capaian SPM Rawat Jalan		66,67%		66,67%		66,67%				
		Persentase Capaian SPM Rawat Inap		81,82%		81,82%		81,82%				
		Persentase Capaian SPM Bedah		100%		100%		100%				
		Persentase Capaian SPM Persalinan dan Perinatologi		62,50%		62,50%		62,50%				
		Persentase Capaian SPM Intensif		50%		50%		50%				
		Persentase Capaian SPM Radiologi		75%		75%		75%				
		Persentase Capaian SPM Laboratorium dan Patologi Klinik		75%		75%		75%				
		Persentase Capaian SPM Rehabilitasi Medik		100%		100%		100%				

		Persentase Capaian SPM Farmasi		75%		75%		75%				
		Persentase Capaian SPM Gizi		100%		100%		100%				
		Persentase Capaian SPM Transfusi Darah		100%		100%		100%				
		Persentase Capaian SPM Keluarga Miskin		100%		100%		100%				
		Persentase Capaian SPM Rekam Medis		75%		75%		75%				
		Persentase Capaian SPM Pengelolaan Limbah		50%		50%		50%				
		Persentase Capaian SPM Administrasi dan Manajemen		56%		56%		56%				
		Persentase Capaian SPM Ambulans/Kereta Jenazah		100%		100%		100%				
		Persentase Capaian SPM Pemulasaran Jenazah		100%		100%		100%				
		Persentase Capaian SPM Pelayanan Laundry		75%		75%		75%				
		Persentase Capaian SPM Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit		33,33%		33,33%		33,33%				
		Persentase Capaian SPM Pencegahan dan Pengendalian infeksi		66,67%		66,67%		66,67%				
		Persentase pengiriman Laporan SIRS		100%		100%		100%				
		Persentase evaluasi pendokumentasian asuhan keperawatan di Rawat Inap		100%		100%		100%				
		Persentase hasil survei kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan		100%		100%		100%				

		Persentase ketersediaan bahan-bahan logistik keperawatan		90%		90%		90%				
		Cakupan Pengelolaan aset		100%		100%		100%				
		Persentase pengelolaan surat menyurat		100%		100%		100%				
		Cakupan pengelolaan keamanan dan ketertiban		100%		100%		100%				
		Persentase produk hukum yang dikaji tepat waktu		100%		100%		100%				
		Persentase penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat		100%		100%		100%				
		Cakupan pengordinasian keprotokolan dilingkungan RS		100%		100%		100%				
		Cakupan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan		100%		100%		100%				
		Level pengembangan SIM RS		Integrated 1		Integrated 2		Integrated 2				
1.02.01.2.10.01	**Sub Kegiatan :** Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Anutapura	13 unit kerja	95.000.000.000	13 unit kerja	95.000.000.000	13 unit kerja	100.973.917.620	5.973.917.620	6.29%	
1.02.02	**Program :** Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan	RSUD Anutapura	80%	22.775.846.080	80%	33.569.978.250		33.569.978.250	-	0.00%	
1.02.02.2.01	**Kegiatan** : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang handal sesuai standar RS Kelas B dan standar akreditasi	RSUD Anutapura	70.3%	21.785.846.080	70.3%	25.651.345.050	70.3%	25.651.345.050	-	0.00%	
1.02.02.2.01.14	**Sub Kegiatan** : Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	RSUD Anutapura	124 unit	21.785.846.080	124 unit	25.651.345.050	124 unit	25.651.345.050	-	0.00%	

1.02.2.02	**Kegiatan** : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah BAB akreditasi yang dilaksanakan	RSUD Anutapura	16 BAB	990.000.000	16 BAB	7.918.633.200	16 BAB	7.918.633.200	-	0.00%	
1.02.02.2.01.32	**Sub Kegiatan** : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Anutapura	3 Paket	990.000.000	3 Paket	7.918.633.200	3 Paket	7.918.633.200	-	0.00%	
1.02.03	**Program :** Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar	RSUD Anutapura	**49,5%**	**113.783.000**	**49,5%**	**113.783.000**	**49,5%**	**113.783.000**	-	0.00%	
1.02.03.2.02	**Kegiatan :** Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase tenaga RS yang mendapat Pelatihan 20 Jam/Tahun	RSUD Anutapura	47,6%	113.783.000	47,6%	113.783.000	47,6%	113.783.000	-	0.00%	
1.02.03.2.02.02	**Sub Kegiatan** : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	RSUD Anutapura	6 Orang	113.783.000	6 Orang	113.783.000	6 Orang	113.783.000	-	0.00%	
TOTAL PAGU				**169.856.370.912**		**174.031.289.493**		**186.301.704.106**		**12.270.416.613**	**7,05%**	

BAB IV
PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 2024

RENJA RSUD Anutapura Palu Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra RSUD Anutapura Palu Tahun 2021-2026 menyesuaikan pada aturan atau regulasi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan rumah sakit dan Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan pencapaian kinerja.

Perubahan Renja RSUD Anutapura Palu Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja anggaran (RKA) memuat program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas SDM sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar RS Kelas B dan standar Akreditasi sehingga tujuan dan sasaran dalam Renstra RSUD Anutapura Palu Tahun 2021-2026 dapat terwujud. Dalam hal ketersediaan alokasi anggaran tidak mencukupi, maka RSUD Anutapura harus tetap melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sesuai prioritas dengan dukungan sumber daya yang ada dan dapat bekerja secara efektif dan efisien.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja RSUD Anutapura Palu Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berkualitas dan profesional.

Guna mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA 2021-2026, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut,

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. RSUD Anutapura Palu berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Anutapura Palu Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Palu Tahun 2024.
b. RSUD Anutapura Palu berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 mengacu pada Renja RSUD Anutapura Palu Tahun 2024;
c. Dokumen Perubahan Renja RSUD Anutapura Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBN, APBD dan BLUD ;
d. Seluruh bagian, bidang dan unit pelayanan agar melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik – baiknya, dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar bagian dan bidang ;
e. Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 tetap dilakukan pemantauan dan evaluasi;
f. Perubahan Renja RSUD Anutapura Palu Tahun 2024, menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya ;

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Anutapura Palu selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana

peningkatan kinerja.

Agar dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja RSUD Anutapura Palu Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh pendanaan yang memadai serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Perubahan Renja RSUD Anutapura Tahun 2024 akan menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di tahun berikutnya oleh pimpinan RSUD Anutapura Palu sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Perubahan Renja RSUD Anutapura Palu ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Anutapura Palu dan tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Palu.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PALU

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) merupakan suatu pedoman dalam menyususn perencanaan tekhnis operasional Organisasi Perangkat Daeah yang memuat tujuan dan sasaran strategi , kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1(atau) tahun , baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Triwulan IV (TW IV) ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Adapun yang menjadi latar belakang Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 adalah pelakasanaan konsolidasi tanah wilayah Talise Valangguni yang tidak dapat dilaksanakan karena telah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Palu.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) mencakup :

1. Pernyataan visi, misi. Strategi, tujuan dan sasaran organisasi;
2. Rumusan tentang tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Uraian tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan uraian perubahan pekerjaan pada Triwulan IV (TW IV);
4. Uraian tentang permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mengalami Perubahan Rencana Kerja.

Berdasarkan amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa setiap kepala perangkat daerah harus menyiapkan rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah dan berpedoman pada renstra.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) Kota Palu Tahun 2024 merupakan rencana tahun keempat Renstra.

Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) DPRP Kota Palu Tahun 2021 – 2026, dan dilanjutkan dalam Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) DPRP Kota Palu tahun 2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) DPRP Kota Palu Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas DPRP Kota Palu.

Secara umum Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) DPRP Kota Palu tahun 2024 tetap memuat kebijakan pembangunan Ruang Kota dan Pertanahan, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pelayanan pertanahan. Uraian ini akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan sampai dengan tahun 2023 sebelum perubahan, serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2023 perubahan. Isu-isu strategis sektor penataan ruang dan Pertanahan, antara lain: ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang, masih banyaknya tanah aset Pemkot yang belum memiliki alas hak dan fasilitasi konflik-konflik pertanahan**.**

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2024 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan DPRP Kota Palu pada tahun 2024. Prioritas pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. Merupakan tugas Pemerintah sebagai pelaku utama; dan
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) DPRP Kota Palu Tahun 2024 memuat uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing-masing program yang didasarkan atas pagu indikatif.

Berdasarkan arah kebijakan pada masing-masing bidang, yang meliputi Bagian Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang, Bidang Pengendalian Ruang dan Bidang Pertanahan, selanjutnya disusun program-program pembangunan yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja

(Renja) DPRP Kota Palu merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) dan Anggaran Perubahan (RKA-P) yang merupakan bagian dari penyusunan Perubahan APBD.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) DPRP Kota Palu tahun 2024 diharapkan dapat dijadikan acuan/pedoman bagi para Pejabat Eselon II, III dan IV, pejabat fungsional beserta para staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13-237);
35. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

39. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penataan ruang dan Pertanahan Kota Palu;
40. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) DPRP Kota Palu Tahun 2024.

I. Maksud

Menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) agar program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

II. Tujuan

Agar dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) yang telah disusun untuk dipatuhi sebagai bahan acuan serta pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) dan Anggaran Perubahan (RKA-P).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) DPRP Kota Palu adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) agar subtansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja), proses penyusunan Rencana Kerja (Renja), keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pendoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perancanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan, serta susunan garis besar isi Dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TW II TAHUN 2023

Berisikan uraian mengenai :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah TW II dan Capaian Renstra

Bab ini membuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan sebelum Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) dan perkiraan capaian bulan berjalan, mengacu pada APBD bulan berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uaraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan halkritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarkan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah terhadap capaian progam nasional seperti SPM dan SDG's;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
5. Formulsi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan Perubahan RKPD, misalnya: terhadap rumusan program, kegaiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan Perubahan RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggarakan tugas pokok dan fungsi OP

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan disertai dengan pandanaan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TW II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu TW II Berdasarkan Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

Kegiatan review hasil evaluasi Pelaksanaan Renja DPRP Kota Palu TW II dan Pencapaian Kinerja Renstra Renja DPRP Kota Palu bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan DPRP Kota Palu dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra DPRP Kota Palu, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan di dalam Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) DPRP Kota Palu terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 34 Urusan Pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pilihan. Review didasarkan atas Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPRP Kota Palu tahun-tahun sebelumnya, Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra DPRP Kota Palu, dan perkiraan pelaksanaan DPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2023.

Untuk Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPRP Kota Palu TW II berupa matriks analisis, dapat dilihat pada **Tabel 2.1**

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d TW II Tahun 2024
Kota Palu

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)x100%
1	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	- **Nilai SAKIP OPD**	**BB**	**BB**	**A**				
1.1	- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	- **Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**34 Dok**	**8 Dok**	**4 Dok**	**4 dok**	**100%**	**10 Dok**	**29%**
1.1.1	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dok	2 Dok	1 Dok	1 dok	100%	4 Dok	25%
1.1.2	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	2 Dok	33%
1.1.3	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	2 Dok	33%
1.1.4	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	2 Dok	33%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)x100%
1.2	- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	- **Persentase realisasi keuangan**	**100%**	**19.5%**	**20%**	**19.5%**	**100%**	**58.5%**	**59%**
1.2.1	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	292 Org	38 Org/Bln	35 Org/Bln	35 Org	100%	70 Org	24%
1.2.2	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dok	2 Lap	1 Lap	1 Dok	100%	2 Dok	33%
1.3	- **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	- **Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**20%**	**20%**	**10%**	**50%**	**30%**	**30%**
1.3.1	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100 Unit	7 Unit 4 Dok	1 Dok	17 Unit	40%	27 unit	27%
1.3.2	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25 Lap	4 Dok	1 Dok	2 Lap	100%	7 Lap	28%
1.4	**- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**- Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**0%**	**20%**	**40%**	**20%**	**40%**	**40%**
1.4.1	**-** Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	**-** Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 ASN	2 Org	0	0	0	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)x100%
1.5	- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**	- **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah di Laksanakan**	**100%**	**10.71%**	**9.71%**	**9.71%**	**100%**	**28.14%**	**28.14%**
1.5.1	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	32 Paket	1 Paket	50 %	0	1 Paket	14,3%
1.5.2	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	37 Paket	8 Unit	11 Paket	100%	32 Paket	74%
1.5.3	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	244 Paket	86 Paket	48 Jenis	20 Paket	50%	59 Paket	24%
1.5.4	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	9 Paket	3 Jenis	3 Paket	100%	9 Paket	60%
1.5.5	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dok	4 Dok	2 Jenis	2 Dok	100%	6 Dok	60%
1.5.6	- Fasilitas Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Lap	4 Dok	2 Jenis	0	0	1 Lap	17%
1.5.7	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Lap	38 Lap	23 Kali	0	0	1 Lap	17%
1.6	- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	- **Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**7%**	**3,3%**	**3,3%**	**100%**	**10%**	**10%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)x100%
1.6.1	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	0 Unit	0	0	0	0	20%
1.6.2	- Pengadaan Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	160 Unit	22 Unit	32 Unit	7 Unit	32%	7 Unit	4,38%
1.6.3	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0	32 Unit	1 Unit	25%	1 Unit	5%
1.7	**- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**- Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**0**	**0**	**100%**	**17%**
1.7.1	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Lap	2 Lap	12 Bulan	0	0	1 Lap	17%
1.7.2	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Lap	2 Lap	12 Bulan	0	0	1 Lap	17%
1.8	**- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**- Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**24%**	**25%**	**25%**	**100%**	**58%**	**58%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)x100%
1.8.1	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	18 Unit	12 Unit	75%	12 Unit	75%
1.8.2	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	7 Unit	7 Unit	9 Unit		9 Unit	100%
1.8.3	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163 Unit	71 Unit	163 Unit	11 Unit	100%	82 Unit	50%
1.8.4	- Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	0	0	0	3 Unit	100%
2	**Penataan Bangunan Gedung**	- **Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan**	**100%**	**16,26%**	**33.94%**	**17,42%**	**117%**	**50%**	**50%**
		- **Persentase Bangunan yang ditargetkan memenuhi standar teknis bangunan Gedung**	**100%**	**50%**	**19.82%**	**17,42%**	**117%**	**50%**	**50%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)x100%
		- **Persentase Regulasi penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu**	**100%**	**100%**	**20%**	**100%**	**100%**	**3 Peraturan**	**20%**
2.1	- **Penyelenggaraan Bangunan di Wilayah Daerah Kota Palu, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertipikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	- **Jumlah Rekomendasi Bangunan Gedung yang dikelola secara Teknis**	**3358 Bangunan**	**546 Bangunan**	**666 Rek PBG**	228 rek PBG	**34.23%**	**774 Bangunan**	**23,05%**
		- **Jumlah Dokumen Pendataan Bangunan Gedung yang disusun**	**4 Dok**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 Dok**	**100%**
		- **Jumlah Regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu yang ditetapkan**	**15 Peraturan**	**Peraturan -**	**3 Peraturan**	**3 Peraturan**	**100%**	**3 Peraturan**	**20%**
2.1.1	- Penyelenggaraan Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	- Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	3358 Bangunan	1261 Bangunan	605 Rek PBG	301 bangunan	49,75%	1562 Bangunan	46,52%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)x100%
2.1.2	- Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	- Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	15 Peraturan	**4** Peraturan	02 Peraturan	0	0	3 Peraturan	20%
3	**Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	- **Persentase dokumen penyelenggaraan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan**	**100%**	**20%**	**20%**	**15,58%**	**100%**	**48,05%**	**48,05%**
3.1	- **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganmya di Daerah Kota Palu**	- **Jumlah dokumen penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan**	**77 Dok**	**12 Dok**	**5 dok**	**12 Dok**	**100%**	**37 Dok**	**48%**
3.1.1	- Penataan Bangunan dan Lingkungan	- Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5 Dok	1 Dok	83 Kawasan	0	0	0	0
3.1.2	- Monitoring Penataan Bangunan dan Lingkungam	- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	72 Dok	1 Dok	150 Dok	12 Dok	100%	36 Dok	50%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)x100%
4	**Penyelenggaraan Penataan Ruang**	- **Persentase ketaatan terhadap RTRW**	**100%**	**80%**	**90.00%**	**0**	**0**	**80%**	**80%**
4.1	- **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	- **Jumlah Peraturan Pelaksanaan Tata Ruang yang ditetapkan**	**5 Dok**	**2 Peraturan**	**1 peraturan**	**0**	**0**	**1 Dok**	**20%**
4.1.1	- Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	- Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	5 Dok	2 Dok	1 peraturan	0	0	0	0
4.1.2	- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	- Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	5 Dok	2 Dok	1 peraturan	0	0	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)x100%
4.2	- **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	- **Jumlah Laporan pemanfaatan ruang yang disusun (PKKPR) yang dikeluarkan**	**78 Dok**	**12 Dok**	**12 Dok**	**0**	**0**	**12 Dok**	**15%**
4.2.1	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	72 Dok	2 Dok	1 dokumen	0	0	12 Dok	17%
	- Sistem Informasi Penataan Ruang	- Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	6 Dok	1315KRK	dokumen	0	0	0	0
4.3	- **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	- **Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun**	**20 Dok**	**0 Dok**	**4 dok**	**0**	**0**	**5 Dok**	**25%**
4.3.1	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	5 Dok	2 Dok	1 dokumen	0	0	2 Dok	40%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)x100%
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	5 Dok	2 Dok	1 dokumen	0	0	1 Dok	20%
4.3.2	- Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	- Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	5 Kasus	2 Kasus	1 kasus	0	0	1 Kasus	20%
4.3.3	- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	- Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dok	2 Kasus	1 dokumen	0	0	1 Dok	20%
5	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	- **Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**100%**	**10,77%**	**40%**	**0**	**0**	**37%**	**10%**
5.1	- **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	- **Jumlah laporan sengketa Tanah garapan dalam kota yang disususun**	**12 Laporan**	**13 Kasus**	**1 laporan**	**0**	**0**	**2 Laporan**	**16%**
5.1.1	- Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah kasus tanah asset Pemda yang diinventarisir	65 Kasus	7 Kasus	10 Kasus	0	0	7 Kasus	11%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)x100%
5.1.2	- Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65 Berita Acara	15 Berita Acara	13 Berita Acara	0	0	7 Berita Acara	11%
6	**Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	- **Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan**	**100%**	15 Berita Acara	**100%**	**0**	**0**	**20%**	**20%**
6.1	- **Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	- **Jumlah laporan penyelesaian gantirugi dan santunan Tanah untuk pembangunan yang disusun**	**5**	**4 Lap**	**2 laporan**	**0**	**0**	**2 Lap**	**20%**
6.1.1	- Penetapan daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah laporan penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah	5 Lap	0	0	0	0	0	0
6.1.2	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santuan Tanah	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	5 Dok	2 Lap	1 laporan	0	0	1 Dok	20%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)x100%
	untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
7	**Program Penatagunaan Tanah**	**- Persentase pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah Pemda Kota Palu**	**100%**	**11,7%**	**20%**	**0**	**0**	**8,65%**	**8,65%**
7.1	**- Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**	**- Jumlah laporan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kab/Kota**	**18 Lap**	**2 Lap**	**2 Lap**	**0**	**0**	**1 Lap**	**6%**
7.1.1	- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 Lap	155 Lap	266 sertipikat	0	0	1 Lap	17%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)x100%
7.1.2	- Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	6 Lap	0 Dok	1 dokumen	0	0	1 Lap	17%
7.1.3	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lap	2 Dok	1 dokumen	0	0	1 Lap	17%

2.1.1 Realisasi Program dan Kegiatan yang direncanakan

A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Program : Penatagunaan Tanah
   Kegiatan : Pengunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kab/Kota
   Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
   Outcome : Persentase Penguasaan, pemilikian, penggunaan dan pemanfaatan tanah
   Output : Jumlah sertipikat asset tanah pemda yang diterbitkan

B. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Program : Penataan Bangunan Gedung
   Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan di Wilayah Daerah Kota Palu, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertipikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
   Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan

Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

Outcome : Jumlah bangunan yang memenuhi standar teknis bangunan gedung

Output : Jumlah Bangunan Gedung yang diterbitkan surat Persetujuan bangunan gedung (PBG)

2. Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTR) Kab/Kota

Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

Outcome : Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW

Output : Jumlah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) yang dikeluarkan

2.1.2 Faktor – faktor Penyebab

a. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat mencapai dilaksanakan karena dalam

pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, terdapat kendala teknis.

Pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II, program Penatagunaan Tanah dengan target luas tanah asset Pemda Kota Palu yang bersertifikat sebesar 481.630,73 Ha.

Faktor – faktor penyebab program dan kegiatan tidak dapat memenuhi target yaitu :

- Usulan penerbitan Sertifikat aset tanah pemda dilaksanakan oleh Dinas penataan ruang dan pertanahan kota palu bidang urusan pertanahan, namun penerbitan sertifikat aset tanah pemda menjadi wewenang badan pertanahan negara (BPN) kota palu. Dengan adanya lintas koordinasi antar sector mempengaruhi pencapaian penerbitan sertifikat, karena adanya proses teknis maupun proses administrasi;
- Adanya perbedaaan data fisik tanah dilapangan yang telah diukur dan data yuridis yang tertuang dalam alas hak;
- Adanya beberapa aset pemda yang masih diklam oleh masyarakat sehingga membutuhkan penyelesaian oleh Pemda (sengketa);
- Banyaknya Aset Pemda yang bukti dokumen kepemilikannya tidak ditemukan.

b. Faktor – faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan

Program penataan bangunan gedung, realisasi rekomendasi PBG yang dikeluarkan sebanyak 228

rekomendasi atau sebesar 34,23% dari target sebanyak 666 Rekomendasi PBG. Demikian pula dengan jumlah pendapatan asli daerah dari retribusi PBG mencapai 45,3% dari target Rp., Rp. 3.656.340.000 yakni sebesar, 1.658.132.900 -. Hal ini disebabkan karena intensitas pengawasan dan penertiban bangunan gedung meningkat.

Program penyelenggaraan Penataan Ruang, realisasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebesar 8.648,5088 Ha atau sebesar 114 %. Hai ini disebabkan adanya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah .

2.1.3 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah

Disebabkan beberapa kendala teknis, terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang hingga akhir TW II Tahun 2023, sehingga target capaian harus dilakukan perubahan rencana kerja Tahun 2024. Hal ini sangat berimplikasi terhadap belum tercapaianya target capaian Renstra OPD 2021-2026 Dinas penataan ruang dan pertanahan kota palu.

Disebabkan intesitas penertiban dan pengawasan serta ketaatan terhadap RTRW sehingga berimplikasi tercapainya terget capaian Renstra OPD.

2.1.4 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Rencana Kerja pada tahun Anggaran 2022.
2. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan.
3. Efisiensi alokasi belanja.
4. Penambahan alokasi pagu anggaran untuk kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu digunakan beberapa Indikator, Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 1 Tahun 2014, dengan sasaran target sesuai dengan renstra DPRP Kota Palu dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Untuk lebih jelasnya, pencapaian kinerja pelayanan DPRP Kota Palu dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan DPRP
Berdasarkan Indikator SPM dan IKK

No	Indikator kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2025	2026	Analisis
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	-		85%	90%	95%	100%	95,48 %				98%	100%	
2	Persentase Bangunan ber-Persetujuan Bangunan Gedung			100%	100%	100%	100%	78,06 %				100%	100%	
3	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	-		18,02%	19,82%	21,80%	23,98 %	31,36 %				35%	50%	
4	Nilai SAKIP penataan ruang dan pertanahan kota palu	-		BB	BB	BB	A	BB				A	A	
5	Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	-	100%	33,88%	33,94%	34,02%	34,10 %	34,25 %						Hasil pendataan bangunan gedung tahun 2022

No	Indikator kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2025	2026	Analisis
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*
6	Ketaatan terhadap RTRW	-	100%	85%	90%	95%	100%	95,48 %				98%	100%	Analisis melalui hasil penyusunan dokumem evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Palu
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%	Hasil pendataan bangunan gedung tahun 2022
8	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%	
9	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%	

No	Indikator kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2025	2026	Analisis
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*
10	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal		100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%	
11	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diretribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		100%	100%	100%	100%	100%	0				100%	100%	
12	Tersedianya tanah untuk masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	0				100%	100%	
13	Penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%	

Dari **Tabel 2.2** tersebut terlihat secara umum pencapaian kinerja DPRP kota palu cukup baik. Untuk persentase pemanfaatan ruang berbasis penanggulangan risiko bencana sangat baik, Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW, Ketaatan terhadap RTRW

Untuk Rasio Bangunan ber-PBG persatuan bangunan, hingga tahun 2024 sampai dengan Triwulan II mencapai 34,55 % dari target prediksi jumlah bangunan di Kota Palu sebanyak 103.252 bangunan dan bangunan yang sudah ber-PBG 35.671 bangunan yg ber-PBG bangunan.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRP kota palu sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dapat dilihat pada **Tabel 2.2** di halaman berikut. Secara umum realisasi capaian IKK belum sesuai dengan target renstra.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRP Kota Palu

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan DPRP kota palu, kajian evaluasi pelaksanaan DPRP serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra DPRP, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang tekait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRP Kota Palu.

Isu penting adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu penting juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu penting.

Suatu isu strategis diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DPRP Kota Palu di masa lima tahun mendatang.

Adapun informasi mengenai permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi DPRP Kota Palu dapat dilihat pada **Tabel 2.3.1** di halaman berikut. Selanjutnya akan dianalisa pula isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi DPRP Kota Palu dari faktor-faktor eksternal lainnya. Isu-isu strategis tersebut dapat dilihat pada **Tabel 2.3.2.**

Tabel 2.3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PALU

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kota beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital		Perda RTRW Kota Palu No.02/ 2021-2041	Penggangaran dalam dukungan pembuatan peta digital		
Informasi ruang kepada masyarakat terkait aktifitas kegiatan atau pembangunan melalui keterangan rencana kota (KRK)		Perda RTRW Kota Palu No.02/ 2021-2041	Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut KRK		Sikap masyarakat yang tidak menindak lanjuti hasil keterangan rencana kota untuk pembuatan persetujuan bangunan gedung (PBG)
Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung		Perda No.6 /2011 tentang bangunan gedung, Perda No.10/2012 tentang IMB, SK Walikota No.650/1085/DPRP/2013 tahun 2013 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Pagar.	Terlaksananya pelatihan pengawas bangunan	Minimnya pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan bangunan gedung	Kurangnya jumlah ASN teknis dan PHL teknis dalam Pengawasan dan Penertiban Bangunan. Keterlibatan pihak kelurahan yang tidak efektif terhadap pengawasan terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah masing-masing.
PAD dari Retribusi IMB/PBG	Rp. 1.974.886,600	Target: Rp. 3.600.000.000	Peningkatan intensitas pengawasan/monitoring dan penertiban bangunan gedung	Jumlah permohonan bangunan dengan skala besar dan permohonan bangunan Gedung dengan fungsi usaha meningkat.	Perubahan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Legalitas Tanah Aset Pemko Palu	Sebagian besar aset Pemda Kota Palu belum memiliki alas hak (Sertifikat Tanah), sehingga rawan terjadi kasus akuisisi oleh masyarakat.	1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala No. 14 Thn. 1995 tentang Penyerahan Sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala sesuai Perda No. 3 Thn. 1995, tgl 10 Januari 1995 dan Penyerahan Aset, Personil Pegawai Negeri Sipil Pemda Tingkat II Donggala kepada Kodya Palu 2. Surat Keputusan DPRD Kab. Donggala No. 25 Thn. 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kab. Donggala yang telah Dikuasai oleh Pemerintah Kota Palu	Kegiatan Sertifikat Tanah membutuhkan dana yang tidak sedikit dan proses yang rumit dan lama.	1. Rumitnya Pengurusan Sertifikat Tanah karena harus melaksanakan koordinasi dengan beberapa pihak, yakni: BPN, Kelurahan, Kecamatan dan Pemkab. Donggala.	Kurangnya Pegawai Negeri Sipil yang menangani proses pelaksanaan terbitnya Sertifikat Tanah Pemda
Sengketa dan Konflik serta Perkara Pertanahan.			Fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan merupakan tugas dan fungsi DPRP Kota Palu dan menjadi salah satu Program/Kegiatan Dinas.	Penanganan Sengketa dan Konflik serta Perkara Pertanahan yang terjadi di masyarakat melibatkan Kelurahan, Kecamatan, BPN dan Bag. Pemerintahan Sekda Kota Palu	Penanganan Sengketa dan Konflik serta Perkara Pertanahan biasanya diselesaikan di tingkat Kelurahan, tanpa melibatkan DPRP Kota Palu.

Tabel 2.3.2
IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS (LINGKUNGAN EKSTERNAL)

Strategis	**Dinamika Internasional**	
	1	Dengan berlakunya **Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)**/*Asean Economic Community (AEC),* maka Pemerintah Kota Palu dituntut untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing di kancah internasional, khususnya di Asia.
	2	***Sustainable Development Goals (SDGs)***, yakni sebuah *roadmap* baru dalam pembangunan internasional. *Roadmap* ini menggantikan *Millenium Development Goals (MDGs)* yng tidak berlaku lagi sejak akhir tahun 2015. Tujuan dari SDGs ini tidak berbeda jauh dari MDGs, yang akan dicapai pada tahun 2030, yakni: mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kesepakatan global ini menjadi tantangan kepada Pemerintah Kota Palu untuk mampu mencapai target yang telah ditentukan.
	3	Isu ***Global Warming*** **(Pemanasan Global)** yang menjadi perhatian dunia untuk menjaga pelestarian lingkungan, sangat erat kaitannya dengan peran Kota Palu yang merupakan salah satu pendukung paru-paru dunia melalui kebijakan yang pro lingkungan. Salah satu dampak isu lingkungan bagi arah kebijakan pemerintah Kota Palu ialah Penyiapan 30% luas lahan kota bagi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
	Dinamika Nasional	
	1	Pembangunan **transportasi di perkotaan** masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, yang harus diakomodir dalam Rencana Tata Ruang, khususnya pada Struktur Ruang Kota.
	2	**Sistem Informasi Pembangunan Daerah** merupakan amanah dari UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ganti dengan UU 23 Tahun 2014. Kebijakan ini kemudian bentuk dalam sebuah Peraturan Menteri Dalam Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam pelaksanaannya. Keterkaitan isu berkaitan dengan sistem informasi nasional bagi perkembangan Kota Palu adalah : a. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi sumber daya berbasis GIS b. Belum terintegrasinya sistem informasi antar perangkat daerah untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam perencanaan daerah

	Dinamika Regional/Lokal	
	1	Bencana gempa bumi, tsunami dan liquifaksi yang menimpa Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi (Pasigala), telah menelan ribuan korban dan meluluhlantakkan prasarana dan sarana daerah. Diperlukan perencanaan pembangunan yang berbasis kebencanaan dengan analisa dari berbagai disiplin ilmu. Demikian juga dengan proses tanggap darurat bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, membutuhkan anggaran yang sangat besar dan waktu yang relatif cukup lama untuk mengembalikan kondisi Pasigala agar kembali kondusif, tentunya dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi.
	Lain-Lain	
	1	Tantangan untuk mewujudkan kota sebagai ***Leaveable City*** **(Kota Layak Huni)** yang ***Smart,*** **Rasional** dan **Berkelanjutan**
	2	**Politik Anggaran**, bagaimana besaran nilai anggaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan Program/Kegiatan, namun ditentukan oleh kepentingan oknum anggota legislatif tertentu dengan agenda politik tertentu.

2.4 Review Terhadap Perubahan Rencana RKPD 2024

Review terhadap Perubahan Rencana RKPD Perubahan dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DPRP Kota Palu, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan Perubahan Rencana RKPD.

Review terhadap Perubahan Rencana RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program, kegiatan, sub kegiatan Indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang

dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya, review terhadap Perubahan Rencana RKPD tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 2.4** berikut.

Tabel 2.4
Review Terhadap Perubahan Rencana RKPD Tahun 2024
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Nilai SAKIP OPD**	**BB**	**6.394.452.921**	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20%**	**6.202.267.445**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Dok**	**30.324.450**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen perencanaan , penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**	**6 Dok**	**30.672.900**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	3.963.250	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3.963.250
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	5.310.700	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	5.479.850
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.310.700	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.490.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	15.739.800	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	15.739.800
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Realisasi Keuangan**	**95%**	**4.307.768.901**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun**	**2 Laporan**	**4.278.068.245**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ bulan	4.294.708.801	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.265.008.145
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	13.060.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.060.100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**7.400.200**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun**	**2 laporan**	**7.400.200**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	5.500.100	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	5.500.100

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1.900.100	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1.900.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum perangkat daerah**	**100%**	**378.304.500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum yang disusun**	**1 Laporan**	**430.027.500**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.255.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.255.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Unit	1.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Unit	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	59 Paket	90.729.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	94.597.250
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	19.121.750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.871.750
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dok	6.900.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	6.900.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	8.811.000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	6.261.000
	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	250.487.000	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	302.142.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**100%**	**3.735.200**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah**	**1 Laporan**	**-**
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	3.300.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	435.200	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan**	**100%**	**1.131.519.600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang yang disusun**	**2 Laporan**	**1.060.356.600**
	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	142.740.000	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	142.740.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	988.779.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	917.616.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**535.400.070**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah laporan pemeliharan Barang Milik Daerah yang di susun**	**1 Laporan**	**395.742.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	326.796.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	254.800.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	135.636.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	111.321.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163 Unit	70.490.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	101 Unit	29.630.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	2.478.070	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	-
2.	**Penataan Bangunan Gedung**	**Kota Palu**	**Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan**	**33,94%**	**623.534.750**	**Penataan Bangunan Gedung**	**Kota Palu**	**Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan**	**100%**	**505.539.750**
			Persentase Bangunan yang ditargetkan memenuhi standar teknis bangunan Gedung	**19,82%**						
			Persentase Regulasi penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu	**20%**						
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		**Jumlah Rekomendasi Bangunan Gedung yang dikelola secara teknis**	**605 Rek PBG**	**623.534.750**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		**Jumlah laporan penyelenggaraan bangunan gedung**	**3 Laporan**	**505.539.750**
			Jumlah Dokumen Pendataan Bangunan Gedung yang disusun	**1 Dok**						
			Jumlah Regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu yang ditetapkan	**2 Peraturan**						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dok	8.261.000	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggara-an Bangunan Gedung	1 Dok	8.261.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	30 Orang	190.031.750	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	150 Peserta	90.306.750
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Pemilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100 Dok	425.242.000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Pemilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dok	406.972.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
3.	**Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Kota Palu**	**Persentase ketaatan terhadap RTRW**	**90,08%**	**204.396.800**	**Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Kota Palu**	**Ketaatan Terhadap RTRW**	**90%**	**135.034.200**
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		**Jumlah Peraturan Pelaksanaan Tata Ruang yang ditetapkan**	**2 peraturan**	**3.150.000**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**		**Jumlah Peraturan Pelaksanaan Tata Ruang yang ditetapkan**	**2 Dok**	**-**
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Peraturan	1.150.000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	-
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undagan Bidang Penataan Ruang	20 Orang	2.000.000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undagan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Laporan pemanfaatan ruang yang disusun**	**1 Laporan**	**75.622.450**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan Pemanfaatan Ruang yang disusun**	**1 Laporan**	**67.887.500**
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan	75.622.450	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Layanan	67.887.500

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun**	**4 Dokumen**	**125.624.350**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun**	**3 Dokumen**	**67.146.700**
	Operasional Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang		Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidanh Penataan Ruang	1 Dokumen	20.412.650	Operasional Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang		Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidanh Penataan Ruang	2 Kasus	-
	Operasional Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	12 Laporan	66.726.500	Operasional Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	43.311.500
	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang		Jumlah Berita acara Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	5 Berita Acara	38.485.200	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang		Jumlah Berita acara Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	8 Berita Acara	23.835.200
4.	**Penyelesaiaan Sengketa Tanah Garapan**	**Kota Palu**	**Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**60%**	**38.862.700**	**Program Penyelesaiaan Sengketa Tanah Garapan**	**Kota Palu**	**Persentase penyelesaiam sengketa tanah garapan**	**100%**	**36.785.200**
	Penyelesaiaan Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota		**Jumlah laporan sengketa Tanah garapan dalam kota yang disususun**	**1 Laporan**	**38.862.700**	**Penyelesaiaan Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota**		**Jumlah laporan sengketa Tanah garapan dalam kota yang disususun**	**1 Laporan**	**36.785.200**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13 Kasus	38.862.700	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	13 Berita Acara	36.785.200
5.	**Penyelesaiaan Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	**Kota Palu**	**Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan**	**100%**	**37.900.250**	**Program Penyelesaiaan Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	**Kota Palu**	**Persentase Masyarakat penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Palu**	**100%**	**20.795.250**
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah laporan penyelesaian gantirugi dan santunan Tanah untuk pembangunan yang disusun**	**2 Laporan**	**37.900.250**	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen penyelesaian gantirugi dan santunan Tanah untuk pembangunan yang disusun**	**1 Dokumen**	**20.795.250**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaiaan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	1 Laporan	37.900.250	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaiaan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan	1 Dokumen	20.795.250

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		
6.	**Program Penatagunaan Tanah**	**Kota Palu**	**Persentase pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah Pemda Kota Palu**	**20%**	**140.440.000**	**Program Penatagunaan Tanah**	**Kota Palu**	**Persentase pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah Pemda Kota Palu**	**100%**	**106.335.000**
			Persentase kawasan pemetaan	**20%**						
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kab/Kota		**Jumlah sertipikat Tanah berdasarkan pengunaannya yang diterbitkan**	**266 Sertipikat**	**140.440.000**	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kab/Kota**		**Jumlah dokumen penggunaan tanah yang hamparannya dalam 1 daerah kota**	**2 Dokumen**	**106.335.000**
			Jumlah kawasan pemetaan berdasarkan hasil konsolidasi tanah dan penggunaan zona nilai tanah	**2 Lokasi**						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	134.715.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	102.090.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.725.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.245.000
				Total	***7.439.587.421***				***Total***	***7.006.756.845***

Hasil review tersebut terlihat bahwa antara Perubahan Rencana RKPD 2023 dengan hasil análisis kebutuhan DPRP Kota Palu tidak ada perbedaan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Seperti diketahui bersama, pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan :

1. Pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pem,bangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD); dan pendekatan *bottom up approach* (pendekatan dari bawah ke atas) dan ada pula *top-down approach* (pendekatan dari atas ke bawah), yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, daerah kabupaten/Kota, daerah provinsi hingga nasional. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunantahun yang

direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPRP Kota Palu. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, tokoh masyarakat, pemuda, kaum perempuan/ibu-ibu, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD Kota yang langsung ditujukan kepada OPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kota (bila sudah dilakukan) dan lain-lain, yang dihadiri oleh anggota Legislatif.

Berbagai usulan anggota masyarakat tersebut kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu :

1. Infrastruktur dan Lingkungan
2. Ekonomi dan Keuangan
3. Sosial dan Budaya.

Hasil musyawarah pembangunan kelurahan kemudian disaring sesuai dengan tingkat prioritas untuk dibawa ke musrenbang kecamatan. Demikian pula hasil musrenbang kecamatan, kemudian lebih dikerucutkan lagi (sesuai dengan skala prioritas) untuk dibawa ke musrenbang kota. Hasil dari musyawarah pembangunan kota-lah kemudian yang akan dimasukkan ke dinas/Instansi terkait untuk menjadi usulan program dan kegiatan dinas/instansi tersebut.

Adapun hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui musyawarah pembangunan Kota Tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.5**

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Perubahan
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

KODE	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
	1.	**Program Penyelesaiaan Sengketa Tanah Garapan**	Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Mantikulore, Kelurahan Talise Valangguni	**Persentase penyelesaiam sengketa tanah garapan**	100%	Usulan Reses DPRP Kota Palu
	1.1	Kegiatan Penyelesaiaan Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota		Jumlah laporan sengketa Tanah garapan yang disususun	1 Lap	
	1.1.1	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kasus tanah aset pemda yang mediasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Kasus	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah pemerintah kota palu tahun 2024 Perubahan berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Pemerintah Kota.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil analisis

dengan arahan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan DPRP Kota Palu menurut rancangan Perubahan RKPD. Untuk lebih jelasnya, berikut rincian program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024					Sumber Dana
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Bertambah/ Berkurang	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*				*7*
1	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**DPRP**	**BB**	**6.310.207.125**	**BB**	**6.202.267.445**	**- 107.939.680**	**APBD**
1.1	- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen perencanaan , penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**		**6 Dok**	**30.324.450**	**6 Dok**	**30.672.900**	**348.450**	
1.1.1	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dok	3.963.250	3 Dok	3.963.250	-	
1.1.2	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	5.310.700	1 Dok	5.479.850	169.150	
1.1.3	- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dok	5.310.700	1 Dok	5.490.000	179.300	
1.1.4	- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dok	15.739.800	1 Dok	15.739.800	-	
1.2	- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun**		**2 Laporan**	**4.223.523.105**	**2 Laporan**	**4.278.068.245**	**54.545.140**	
1.2.1	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		35 Orang/ bulan	4.210.463.005	35 Orang/ bulan	4.265.008.145	54.545.140	
1.2.2	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Lap	13.060.100	1 Lap	13.060.100	-	

1.3	-	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**2 Laporan**	**7.400.200**	**2 Laporan**	**7.400.200**	**-**	
	1.3.1	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dok	5.500.100	1 Dok	5.500.000	-	
	1.3.2	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Lap	1.900.100	1 Lap	1.900.100	-	
1.4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Jumlah ASN yang telah memiliki kapasitas sumber daya aparatur		**-**	-	-	-	-	
	1.4.1	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		-	-	-	-	-	
1.5	-	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi umum yang disusun**		**1 Laporan**	**378.304.500**	**1 Laporan**	**430.027.500**	**51.723.000**	
	1.5 1	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1.255.500	1 Paket	1.255.500	-	
	1.5.2	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11 Unit	1.000.000	11 Unit	-	- 1.000.000	
	1.5.3	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket	90.729.250	7 Paket	94.597.250	3.868.000	
	1.5.4	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	19.121.750	1 Paket	18.871.750	- 250.000	
	1.5.5	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dok	6.900.000	1 Dok	6.900.000	-	
	1.5.6	-	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Lap	8.811.000	1 Lap	6.261.000	- 2.550.000	
	1.5.7	-	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Lap	250.487.000	1 Lap	302.142.000	51.655.000	
1.6	-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah**		**1 Laporan**	**3.735.200**	**1 Laporan**	**-**	**- 3.735.200**	

		1.6.1		-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		-	-	-	-	-	
		1.6.2		-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit	3.300.000	3 Unit	-	- 3.300.000	
		1.6.3		-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya disediakan		-	-	-	-	-	
		1.6.4		-	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		1 Unit	435.200	1 Unit	-	- 435.200	
	1.7	**-**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang yang disusun**		**2 Laporan**	**1.131.519.600**	**2 Laporan**	**1.060.356.600**	**- 71.163.000**	
		1.7.1		-	Penyediaan Jasa Kpmunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Lap	142.740.000	1 Lap	142.740.000	-	
		1.7.2		-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Lap	988.779.600	1 Lap	917.616.600	- 71.163.000	
	1.8	**-**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Jumlah laporan pemeliharan Barang Milik Daerah yang di susun**		**1 Laporan**	**535.400.070**	**1 Laporan**	**395.742.000**	**- 139.658.070**	
		1.8.1		-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		19 Unit	326.796.000	19 Unit	254.800.000	- 71.996.000	
		1.8.2		-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 Unit	135.636.000	7 Unit	111.321.000	- 24.324.000	
		1.8.3		-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		101 Unit	70.490.000	101 Unit	29.630.000	- 40.860.000	

		1.8.4		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	2.478.070	1 Unit	-	- 2.478.070	
2		**Penataan Bangunan Gedung**				**Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan**		**100%**	**623.534.750**	**100%**	**505.539.750**	- 117.995.000	
	2.1	-	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**			**Jumlah laporan penyelenggaraan bangunan gedung**		**1 Laporan**	**623.534.750**	**1 Laporan**	**505.539.750**	- 117.995.000	
		2.1.1		-	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		1 Dok	8.261.000	1 Dok	8.261.000	-	
		2.1.2		-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya		150 Peserta	190.031.750	150 Peserta	90.306.750	- 99.725.000	
		2.1.3		-	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Pemilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		1 Dok	425.242.000	1 Dok	406.972.000	- 18.270.000	
3		**Penyelenggaraan Penataan Ruang**				**Persentase ketaatan terhadap RTRW**		**90%**	**204.396.800**	**90%**	**135.034.200**	- 69.362.600	
	3.1	-	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**			**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tata Ruang yang ditetapkan**		**2 Dokumen**	**3.150.000**	**2 Dokumen**	-	- 3.150.000	

		3.1.1		-	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		1 Dok	1.150.000	1 Dok	-	- 1.150.000	
		3.1.2		-	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undagan Bidang Penataan Ruang		1 Dok	2.000.000	1 Dok	-	- 2.000.000	
	3.2	**-**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**			**Jumlah Laporan pemanfaatan ruang yang disusun**		**1 Laporan**	**75.622.450**	**1 Laporan**	**67.887.500**	**- 7.734.950**	
		3.2.1		-	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		1 Layanan	75.622.450	1 Layanan	67.887.500	- 7.734.950	
	3.3	-	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**			**Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun**		**3 Dok**	125.624.350	**3 Dok**	67.146.700	- 58.477.650	
		3.3.1		-	Operasional Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidanh Penataan Ruang		2 Kasus	20.412.650	2 Kasus	-	- 20.412.650	
		3.3.2		-	Operasional Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		1 Laporan	66.726.500	1 Laporan	43.311.500	- 23.415.000	
		3.3.3		-	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah Berita acara Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang		8 Berita Acara	38.485.200	8 Berita Acara	23.835.200	- 14.650.000	
4		**Penyelesaiaan Sengketa Tanah Garapan**				**Persentase penyelesaiam sengketa tanah garapan**		**100%**	**38.862.700**	**100%**	**36.785.200**	**- 2.077.500**	
	4.1	-	**Penyelesaiaan Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota**			**Jumlah laporan sengketa Tanah garapan dalam kota yang disususun**		**1 Lap**	**38.862.700**	**1 Lap**	**36.785.200**	**- 2.077.500**	
		4.1.1		-	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		13 Berita Acara	38.862.700	13 Berita Acara	36.785.200	- 2.077.500	
5		**Penyelesaiaan Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**				**Persentase Masyarakat penerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Palu**		**100%**	**37.900.250**	**100%**	**20.795.250**	**- 17.105.000**	

	5.1	-	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**Jumlah Dokumen penyelesaian gantirugi dan santunan Tanah untuk pembangunan yang disusun**		**1 Dok**	**37.900.250**	**1 Dok**	**20.795.250**	**- 17.105.000**	
		5.1.1		-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaiaan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Dok	37.900.250	1 Dok	20.795.250	- 17.105.000	
6		**Program Penatagunaan Tanah**				**Persentase pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah Pemda Kota Palu**		**100%**	**140.440.000**	**100%**	**106.335.000**	**- 34.105.000**	
	6.1	-	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kab/Kota**			**Jumlah dokumen penggunaan tanah yang hamparannya dalam 1 daerah kota**		**2 Dokumen**	**140.440.000**	**2 Dokumen**	**106.335.000**	**- 34.105.000**	
		6.1.1		-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Dok	134.715.000	1 Dok	102.090.000	- 32.625.000	
		6.1.2		-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dok	5.725.000	1 Dok	4.245.000	- 1.480.000	
								Total	***7.355.341.625***		***7.006.756.845***		

BAB IV
PENUTUP

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kendala keterbatasan sumber daya yang ada mengharuskan penentuan prioritas Program dan kegiatan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tentunya harus dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan responsif gender. Namun kenyataannya, pelaksanaan pembangunan belumlah optimal.

Kondisi *force majeur* bencana, Pemerintah Daerah mengalihkan sejumlah anggaran untuk Kegiatan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Berdasarkan pengalaman dan temuan permasalahan tersebut di atas -selain *capacity building* pelaku perencanaan, khususnya aparatur Pemerintah sebagai *steering*/pengarah- maka pencapaian *Sustainable Development Goals (SDG's)* merupakan target utama.

Hal yang tak kalah penting lainnya adalah adanya fungsi sinkronisasi dan koordinasi dari seluruh aktor pembangunan, yakni Pemerintah: mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi sampai ke Pemerintah Pusat dan unsur non Pemerintah: Akademisi, Perbankan, LSM, Pengusaha, dan Masyarakat melalui kelembagaan lokal.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2024 diharapkan dapat dijadikan acuan maupun pedoman dalam pelaksanaan proses pembangunan di sektor Penataan Ruang dan Pertanahan di masa

mendatang. Rencana kerja perangkat daerah ini memuat tujuan dan sasaran pencapaian misi, program dan usulan kegiatan DPRP Kota Palu. Berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja.

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) DPRP Kota Palu Tahun 2023 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Secara umum Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) DPRP Kota Palu Tahun 2024 memuat keseluruhan Rencana Program dan Kegiatan di lingkungan DPRP Kota Palu serta sumber pembiayaannya

Demikian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) DPRP Kota Palu Tahun 2024 yang disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Urusan Penataan Ruang dan Pertanahan bagi seluruh staf dan eselon pada DPRP Kota Palu.

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (10 mengamanatkan bahwa " Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah". Proses Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Palu. Sebagai sebuah dokumen Resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis,

yaitu menjembatani antara perencanaan pada organisasi Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan Program/Kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Target kinerja tahunan di dalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Palu merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam periode satu tahun, ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dalam penyusunan rancangan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Palu dilakukan penyesuaian terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun perencanaan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah kabupaten bersebelahan, kota dan provinsi, arahan Menteri dan Standard Pelayanan Minimal terkait.

Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran. Sebagai tindak lanjut penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang pemadam kebakaran disusun Program Kerja Pembangunan yang diintegrasikan kedalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Palu untuk periode satu tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu berpegang pada landasan hukum peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan dan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan;
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
29. Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan

kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Tahun 2023 ini adalah :

1. Memberikan arah pedoman dan kebijakan bagi seluruh personil dalam melaksanakan tugas di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
2. Menjadikan pedoman arah kebijakan dalam menetapkan RKA untuk tahun rencana, yang selanjutnya disusun kedalam APBD Kota Palu;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi dan monitoring kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) tentang rencana pembangunan tahunan, serta pencapaiannya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 disusun secara garis besar dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian Penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2022 dan Capaian Renstra.

Evaluasi terhadap Pencapaian pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra 2021-2026 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu sebagaimana termuat dalam tabel 2.1 dilakukan berdasarkan data-data yang termuat dalam Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun 2022, serta Laporan Realisasi Capaian Kinerja dan Capaian Serapan Anggaran. Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2022 yang di tunjang dengan oleh 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapeten/Kota.

   Pada Tahun 2022 yang di dukung 8 (delapan) Kegiatan serta 18 (delapan belas) Sub kegiatan dengan Alokasi Anggaran Untuk Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 9.044.100.534,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.752.575.999,- atau persentase Realisasi keuangan mencapai 96,77%. Namun Realisasi fisik Sub Kegiatan telah memenuhi Target Kinerja yaitu mencapai 100%. Adupun Deviasi Anggaran itu merupakan Sisa Belanja yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya Belanja Tagihan Listrik dan tagihan Indihome yang dibayarkan Invoice Perbulan.

2. Program Pencegahan, Penaggulangan, penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran.

   Pada Tahun 2022 yang di dukung 4 (empat) Kegiatan serta 8 (delapan belas) Sub kegiatan dengan Alokasi Anggaran Untuk Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan

Penyelamatan non Kebakaran sebesar Rp. 1.489.692.255,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.382.876.530,- atau persentase Realisasi keuangan mencapai 92,83%. Namun Realisasi fisik Sub Kegiatan telah memenuhi Target Kinerja yaitu mencapai 100%. Adupun Deviasi Anggaran itu merupakan Sisa Belanja yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya Belanja Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang di belanjakan sesuai Harga Penawaran yang telah di tentukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun Revieu terhadap Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra s/d Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palu s/d Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target dan Realisasi				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
1					Urusan Wajib													
1	05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat													
1	05	01																
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**NILAI SAKIP OPD**			-		-		-		-	B		B
1	05	01	2.01		***Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah***	**Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												
1	05	01	2.01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	2	Dok	2	dok	2	dok	1,00	4	Dok	40%
1	05	01	2.01	02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	1,00	2	Dok	40%
1	05	01	2.01	03	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	1,00	2	Dok	40%

1	05	01	2.01	06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dok	1	Dok	1	Dok	-	Dok	-	1	Dok	20%
1	05	01	2.02		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Persentase Realisasi Keuangan**												
1	05	01	2.02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215	orang	86	org	43	org	43	org	1,00	129	orang	60%
1	05	01	2.02	05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	1,00	2	Dokumen	40%
1	05	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perangkat daerah**												
1	05	01	2.06	02	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	5	paket	1	paket	1	paket	1	paket	1,00	2	paket	40%
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	450	paket	176	paket	88	paket	35	paket	0,40	211	paket	47%
1	05	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	120	paket	45	paket	22	paket	10	paket	0,45	55	paket	46%
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	laporan	98	laporan	53	laporan	25	laporan	0,47	123	laporan	49%
1	05	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan barang milik daerah**												
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit Kenderaan Perorangan Dinas atau kenderaan Dinas Jabatab yang disediakan	9	unit	4	unit	3	unit	3	unit	1,00	7	unit	78%
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau banguna lainnya yang disediakan	60	unit	38	paket	24	paket	1	paket	0,04	39	Paket	65%

1	05	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
1	05	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa layanan Telepon, fax, listrik, yang terbayar	60	laporan	24	laporan	12	laporan	6	laporan	0,50	30	laporan	50%
1	05	02	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	laporan	24	laporan	12	laporan	6	laporan	0,50	30	laporan	50%
1	05	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**										
1	05	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah kenderaan Perorangan Dinas atau kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.	9	kenderaan	4	kenderaan	3	kenderaan	3	kenderaan	1,00	7	kenderaan	78%
1	05	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kenderaan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	kenderaan	7	kenderaan	4	kenderaan	3	kenderaan	0,75	10	kenderaan	77%
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	60	unit	28	unit	14	unit	4	unit	0,29	32	item	53%
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	paket	2	unit	1	unit	1	unit	1,00	3	item	60%

1	05	04			**PROGRAM PENCEGAHAN,PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan bencana kebakaran kabupaten/kota**	**100 %**	-					
1	05	04	2.01		**Pencegahan ,Pengendalian,pemadaman,penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten /kota**	**Meningkatnya Kesiagaan dan Uopaya Mencegah Bencana Kebakaran**							
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabuoaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan /Penanggulamgan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	25 dokumen	10 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1,00	14 Dokumen	56%
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	60 laporan	24 laporan	12 laporan	6 laporan	0,50	30 laporan	50%
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	12 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	0,50	30 dokumen	250%
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penaggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangn Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar Teknis terkait.	200 unit	85 unit	40 unit	- unit	-	85 unit	43%
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur yang memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100 orang	40 orang	20 orang	- orang	-	40 orang	40%
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa diperbaharuai atau dimutakhirkan seacra berkala (setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	3 Desa/Kel	1 Desa/Kel	1 Desa/Kel	- Desa/Kel	-	1 Desa/Kel	33%

1	05	04	2.02		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Terlaksannya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**								
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1613	dokumen	618	dokumen	313	dokumen	100	dokumen	0,32	718	dokumen	45%
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1613	dokumen	618	dokumen	313	dokumen	100	dokumen	0,32	718	dokumen	45%
1	05	04	2.03		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Terlaksannya Investigasi Kejadian Kebakaran**												
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian	Jumlah Laporan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	51	laporan	10	kali	8	kali	2	kali	0,25	12	kali	24%
1	05	04	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Terwujudnya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**												
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya setiap tahunnya.	322	orang	168	orang	56	orang	-	orang	-	168	orang	52%

Berdasarkan Revieu terhadap Evaluasi pencapaian Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk capaian kinerjanya rata-rata telah terealisasi 100%, sementara untuk serapan anggaran mencapai 96,23% atau dari target Belanja Operasi sebesar Rp. 10.553.792.789,- telah terealisasi sebesar Rp. 10.135.452.529,- Adapun selisih dari serapan anggaran program dan kegiatan yang tidak terealisasikan pada tahun anggaran 2022 merupakan selisih atas penawaran harga pengadaan barang dan jasa.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah, seperti : BPBD, Dinsos,Dinkes, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, Pihak Swasta dan Unsur Masyarakat. Merujuk Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota, bahwa Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggung jawab pemerintah daerah otonom, dalam hal ini adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu. Untuk itu ditetapkanlah Standar Pelayanan Minimum (SPM) indikator kinerja sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah.

Pengaturan SPM indikator kinerja penanggulangan kebakaran meliputi;[1] cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota, [2] tingkat waktu tanggap (response time

rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK), [3] persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan [4] jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK serta [5] Jumlah Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar).

Adapun hasil evaluasi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu berdasarkan target SPM, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1	Pengembangan Pos Cakupan pelayanan Pencegahan,Penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan Bencana lainnya			0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0	-	0	0	Untuk memenuhi target SPM sebesar 80% perlu penambahan 1 WMK dan 5 Pos Pelayanan Kebakaran
2	Tingkat waktu tanggap (Response time rate) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit		15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	13 menit	-	13 menit	13 menit	-
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan korban bencana kebakaran, non kebakaran dan bencana	100%		96,77%	97,16%	97,51%	97,88%	78,28	-	78,28	78,28	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) agar segera direalisasikan di tahun 2023.
4	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi melalui DIKLAT peningkatan kapasitas Nasional, Lokal dan Magang	-	-	32,61%	35,61%	36,61%	37,61%	26,08	-	26,08	26,08	
5	Persentase penyuluhan, informasi , sosialisasi, simulasi pencegahan kebakaran berbasis kelurahan & Institusi lainnya.	-	-	18,87%	19,87%	22,04%	25,22%	18,87	-	18,87	18,87	
6	Persentase Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dan kerjasama Pihak Ketiga	-	-	22,39%	25,39%	36,26%	40,61%	32,6	-	32,6	32,6	

7	Persentase daya dukung sarana prasarana dan peralatan kerja dalam penanganan kebakaran , non kebakaran dan bencana lainnya.	-	-	26,42%	19,45%	19,45%	18,53%	44,55	-	44,55	44,55	
8	Persentase daya dukung peralatan dan perlengkapan kerja personil (APD) pemadam kebakaran dan penyelamatan	-	-	29,41%	7,64%	25,14%	12,75%	53,56	-	53,56	53,56	
9	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	-	-	CC (58)	CC (59)	B (60,50)	B (61)	25,44	-	25,44	25,44	
10	Nilai SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	-	-	B (65,50)	B (66,50)	B (67,50)	B (68,50)	68,58	-	68,58	68,58	
11	Indeks Kepuassan Masyarakat	-	-	CC (58)	CC (58)	B (68,50)	B (69,50)	83,5	-	83,5	83,5	

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyalamatan Kota Palu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, untuk Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, berbeda dengan peraturan perundang - undangan sebelumnya yang menempatkan Pemadam kebakaran di dalam urusan wajib pemerintahan daerah bidang perumahan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu pencegahan kebakaran, bidang pemadaman kebakaran, dan bidang penyelamatan, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku.

Adapun pokok bahasan yang termuat dalam Bab ini adalah sebagai berikut :

a. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

   Penyelenggaraan kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mengacu pada Standard Pelayanan Minimal (SPM) sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah, yang terdiri dari :

1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

   Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Palu, sampai dengan tahun 2022 telah mencapai persentase sebesar 75,94% dari yang ditargetkan Renstra 2021-2026 sebesar 100%, atau dengan kata lain hampir memenuhi target SPM sebesar 80%. Namun Jika merujuk pada Peraturan yang ada dan kondisi saat ini, untuk wilayah Kota Palu dengan luas 395,06 KM^2 seharusnya terbentuk 4 (empat) WMK dengan 8 (delapan) Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran. Kesenjangan sebesar 4,06% dari target SPM atau 24,06% dari target Renstra, disebabkan karena WMK yang terbentuk baru ada 3 WMK dengan dukungan 3 (tiga) Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran, sehingga untuk memenuhi target dari indikator kinerja tersebut butuh penambahan 1 WMK dan 5 Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran.

2. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)

   Untuk Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) sampai dengan tahun 2022 telah tercapai sebesar 86,66% dari target Renstra sebesar 100%, sehingga dapat dikatakan berhasil karena telah melebihi dari target SPM 75%. .

3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi.

   Berdasarkan data kepegawaian yang ada sampai dengan tahun 2022 Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi sebesar 26,08% dari target Renstra 2021-2026 sebesar 32,61%. yang ditargetkan mendapat sertifikasi, yang direncanakan dipenuhi secara bertahap setiap tahunnya dengan adanya Pelatihan Pemadam Kebakaran, sehingga pada akhir periode Renstra 2021-2026.
4. Jumlah Relawan Kebakaran (REDKAR)

Kelembagaan masyarakat atau kelompok masyarakat binaan sebagai upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulan terhadap bencana kebakaran secara mandiri telah terbentuk 9 (Sembilan) Kelurahan.

Dengan capaian persentase 32,60 %, atau melebihi dari target Rensta 2022-2026 yang di targetkan sebesar 22,39%.

5. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000 – 5000 Liter Pada WMK.

   Target SPM sebesar 90% untuk Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000 – 5000 Liter Pada WMK belum terpenuhi, sampai dengan tahun 2022 baru tercapai 56,25% atau baru 9 unit dari target 16 unit yang direncanakan dan 1 unit dalam kondisi rusak berat, dengan dengan rincian sebagai berikut :

JENIS MOBIL	KAPASITAS	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	BURUK	
Mobil Suplay	5000 Liter	3 unit	-	3 unit
Mobil Suplay	4000 Liter	1 unit	-	1 unit
Mobil Penembak	5000 Liter	2 unit	-	2 unit
Mobil Penembak	4000 Liter	1 unit		1 unit
Mobil Pompa (Machida)		1 unit		1 unit
Mobil Rescue		1 unit		1 unit
Jumlah		9 Unit		9 Unit

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

   1) Belum tersusunnya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)

2) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran masih belum memenuhi persyaratan, disebabkan karena kurangnya jumlah WMK dan Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran dari yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kegiatan operasional pemadaman dan penyelamatan.
3) Rendahnya jumlah aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memenuhi standar kualifikasi, sampai dengan tahun 2022 tercatat baru sekitar 26,08% yang telah mengikuti pelatihan pemadam dari target Renstra 2021-2026 sebesar 32,61%.
4) Minimnya sarana prasarana pendukung pos pelayanan kebakaran termasuk sumber air, bak penampung air, mobil pemadam kapasitas 3000-5000 Ltr serta peralatan dan perlengkapan penunjang lainnya, terutama peralatan dan perlengkapan penyelamatan.
5) Rendahnya kepedulian masyarakat dalam upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran, serta kesadaran untuk melengkapi bangunan dengan sistem/ sarana proteksi kebakaran.
6) Keterbatasan keuangan daerah, sehingga sulit merealisasikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

c. Rekomendasi dan Catatan Strategis;

Berdasarkan analisis tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, maka selanjutnya dapat disusun rekomendasi dan catatan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 yaitu ;

1. Pembangunan Kantor Administrasi dan Pool Armada Damkarmat ;

2. Pembangunan Sarana Prasarana Air Baku 100 kubik pada empat Kawasan ;
3. Pengembangan Pos Jaga pada 3 Kecamatan antara lain Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Ulujadi ;
4. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu.
5. Pendampingan, Penguatan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berbasis RT Kota Palu ;
6. Penyediaan Pompa Apung (Floating Pump) untuk kawasan padat penduduk pinggiran sungai Palu ;
7. Penambahan armada Damkarmat Berkapasitas Kecil untuk kawasan perbukitan dan infrastruktur sempit;
8. Peningkatan kapasitas teknis dan kualifikasi personil Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari hasil analisis kebutuhan program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 pada Dinas Pemadam Kebakaran terdapat beberapa perubahan kegiatan, indikator kinerja, target, dan kebutuhan Dana yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Kebutuhan dana pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp.8.671.254.590,- sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemadam Kebakaran tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.11.620.867.062,- untuk 2 Program yaitu ; [1] Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, [2] Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Palu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program ,Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program ,Kegiatan dan Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
					8.670.403.340					11.497.785.262	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai SAKIP OPD**	**B**	**8.644.120.540**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai SAKIP OPD**	**B**	**9.759.966.088**	
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**1.867.300**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**3.509.415**	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	**570.300**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	**869.190**	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	**382.500**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	**798.000**	
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	**689.500**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	**975.975**	
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 lap	**225.000**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	**866.250**	
2.	**Administrasi keuangan Perangkat Daerah**		**Tersedianya Administrasi keuangan**		**4.824.211.140**	**Administrasi keuangan Perangkat Daerah**		**Tersedianya Administrasi keuangan**		**4.825.758.380**	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 org/bln	4.823.820.940	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 org/bln	4.824.820.940	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	390.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	937.440	

4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan Administrasi Umum OPD**		**11.831.600**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan Administrasi Umum OPD**		**488.876.588**	
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	4.167.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 paket	21.617.663	
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	3.204.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	115.398.675	
c.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34 lap	4.460.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	53 lap	351.860.250	
6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**3.723.360.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**3.967.441.380**	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	4.847.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 laporan	63.000.000	
b.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 laporan	3.718.512.900	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	66 laporan	3.904.441.380	
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**82.850.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**474.380.325**	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan		Jumlah kenderaan Perorangan Dinas atau kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.	9 unit	400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan		Jumlah kenderaan Perorangan Dinas atau kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.	9 unit	341.960.325	

b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kenderaan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	unit	2.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kenderaan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	40.582.500	
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	1	unit	150.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	14 unit	1.837.500	
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.		Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	80.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.		Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 paket	90.000.000	
II.	**Program Pencegahan,Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**97,16%**		**26.282.800**	**Program Pencegahan,Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**101,25%**	**1.737.819.174**	
1.	Pencegahan ,Pengendalian,pemadaman,penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten /kota		Meningkatnya Kesiagaan dan Upaya Mencegah Bencana Kebakaran			**17.237.100**	Pencegahan ,Pengendalian,pemadaman,penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten		Meningkatnya Kesiagaan dan Upaya Mencegah Bencana Kebakaran		**1.652.373.009**	
a.	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabuoaten / Kota		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan /Penanggulamgan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4	dok	2.134.800	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabuoaten / Kota		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan /Penanggulamgan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	6 kali	21.195.930	
b.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	12	lap	1.258.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	12 lap	589.504.020	
c.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	12	dok	1.011.800	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	12 dok	44.215.290	
d.	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah Aparatur yang memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20	org	450.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah Aparatur yang memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	30 org	61.850.250	

e.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penaggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangn Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar Teknis terkait.	354	item	12.382.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penaggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangn Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar Teknis terkait.	40 item	935.607.519	
2.	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		**Terlaksannya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**			**800.000**	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		**Terlaksannya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Naik 3 %	**11.077.500**	
a.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	314	dok	400.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	313 bangunan	5.722.500	
b.	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	314	dok	400.000	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	313 bangunan	5.355.000	
3.	**Investigasi Kejadian Kebakaran**		**Terlaksannya Investigasi Kejadian Kebakaran**			**900.000**	**Investigasi Kejadian Kebakaran**		**Terlaksannya Investigasi Kejadian Kebakaran**		**4.536.000**	
a.	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan, meliputi Penelitian	100	dok	900.000	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan, meliputi Penelitian dan Pengujian	5 dok	4.536.000	
4.	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**			**7.345.700**	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**69.832.665**	
.a.	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana		Jumlah Dokumen yang memuat Jumlah SKKL Desa/Keluarahan yang telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	48	dokume	7.345.700	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana		Jumlah Dokumen yang memuat Jumlah SKKL Desa/Keluarahan yang telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	56 orang	69.832.665	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah Rencana Pembangunan Kota Palu Tahun 2024 telah dilaksanakan dan untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun Anggaran 2024, terdapat usulan Program maupun kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan, baik yang berasal dari usulan masyarakat maupun stakeholder dalam forum musrenbang.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	-	-	-	-	-
	Program Pencegahan, Penanganan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan non Kebakaran				
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Kecamatan Tawaeli	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan /Penanggulamgan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Paket	Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan Kebakaran dan Produser Penyelamatan pada Situasi Darurat
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukas Masyarakat	8 kelurahan	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1 Paket	Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran di Kel. Talise Valangguni, Kelurahan Talise, Kel.Layana, Kel.Tondo, Kel. Lolu Selatan, Kel. Besusu barat, kel.Besusu Tengah, Kel.Poboya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional mengandung makna peningkatan kesejahteraan material dan spiritual, (karena diarahkan untuk mencapai tujuan Bangsa), yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan, suasana peri kehidupan bangsa yang aman tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan nasional merupakan upaya pengembangan dan penggunaan semua potensi nasional dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional berpedoman kepada wawasam Nusantara yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, serta satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Untuk tetap memungkinkan berlangsungnya pembangunan nasional menuju ke tujuan yang ingin di capai dan agar dapat secara efektif menjamin kepentingan nasional, Ketahanan Nasional perlu terus ditingkatkan. Ketahanan ini meliputi ketahanan dalam segenap aspek kehidupan sebagai suatu totalitas,

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam pembangunan nasional lima tahun kedepan memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan,

kecukupan energi dan pengelolaan sumberdaya maritim dan kelautan. Pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumberdaya manusia serta kemampuan iptek bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Kebijakan perencanaan pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Arah Kebijakan Penganggaran Kebakaran untuk peningkatan kinerja daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu memprioritaskan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pengadaan Alat Pelindung Diri, Pelatihan Petugas Kebakaran dan Penyelamatan, Sosialisasi Kebijakan, pemetaan dan pemutakhiran daerah rawan kebakaran, pengelolaan data dan informasi kebakaran dan implemantasi jabatan fungsional pemadam kebakaran tingkat ketrampilan dan keahlian di Kabupaten/Kota.

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu hadir memberikan rasa aman, serta turut meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, sub bidang Pemadam Kebakaran dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran, yang

pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteran sosial dan ekonomi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan di bidang ini dilakukan dengan strategi, membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu merujuk kepada Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2021-2026. Di mana tujuannya adalah mendukung tercapainya Misi ke 2 dan ke 4 RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan Infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana dan menciptakan pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani, dengan tujuan mewujudkan kualitas lingkungan yang aman, nyaman, serta berketahanan terhadap bencana, dengan sasaran meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2021-2026, serta identifikasi faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor), dimana penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palu yang sejalan dengan tugas dan fungsi, maka tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota

Palu yang ingin dicapai, yang nantinya diharapkan menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program adalah :

a. Tujuan

1. Menurunkan resiko akibat bencana kebakaran
2. Mewujudkan Reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

b. Sasaran

1. Meningkatnya cakupan pelayanan dan Ratio Waktu Tanggap (Response Time Rate) 15 menit dalam radius 7,5 km (Response distance).
2. Meningkatnya Kapasitas dan kemampuan aparatur, dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnnya
4. Meningkatkan Sarana Prasarana dan peralatan kerja lapangan
5. Meningkatkan ketersediaan perlengkapan dan peralatan kerja personil (APD) pemadam kebakaran dan penyelamatan
6. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 didasarkan pada Visi - Misi Walikota Palu dan juga berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyalamatan Kota Palu yaitu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, untuk Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Serta pencapaian target SPM sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2021.

Adapun program dan kegiatan, pagu indikatif tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu
Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
[1]					[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1							Kota Palu						
1		04							**8.670.403.340**				**9.537.446.644**
1		**04**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP OPD**			**8.644.120.540**				**9.508.535.564**
1		04	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dok	**570.300**			2 Dokumen	627.330
1		04	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 dok	**382.500**			1 Dokumen	420.750
1		04	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dok	**689.500**			1 Dokumen	758.450
1		04	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan		1 lap	**225.000**			1 laporan	247.500

1	05	04	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12	org/bln	4.823.820.940			12	org/bln	5.306.203.034
1	05	04	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Lap	390.200			1	Lap	429.220
1	05	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1	paket	4.167.400			1	paket	4.584.140
1	05	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		12	paket	3.204.200			12	paket	3.524.620
1	05	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		34	lap	4.460.000			34	lap	4.906.000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12	laporan	4.847.600			24	Laporan	5.332.360
1	05	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan		12	laporan	3.718.512.900			66	Laporan	4.090.367.160
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah kenderaan Perorangan Dinas atau kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.		9	unit	400.000			9	unit	440.000

1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kenderaan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		22	unit	2.300.000			22	unit	2.530.000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara		1	unit	150.000			1	unit	165.000
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1	unit	80.000.000			1	unit	88.000.000
1	05	04			**Program Pencegahan,Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**				**26.282.800**					**28.911.080**
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabuoaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan /Penanggulamgan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		4	dok	2.134.800	-	-	4	dok	2.348.280
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		12	lap	1.258.000			12	lap	1.383.800

1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran		12	dok	1.011.800			12 dok	1.112.980
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penaggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangn Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar Teknis terkait.		354	unit	12.382.500			354 unit	13.620.750
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur yang memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		30	org	450.000			30 Orang	495.000
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		314	dok	400.000			314 dok	440.000

1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		314	dok	400.000			314	dok	440.000
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian		100	dok	900.000			100	dok	990.000
1	05	04	2.04	01	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang memuat Jumlah SKKL Desa/Keluarahan yang telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar		48	dokumen	7.345.700			48	dokumen	8.080.270

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALU

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Pendanaan untuk program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu

Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
[1]					[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1							Kota Palu				
1	05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				**8.670.403.340**		
1	05	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP OPD**			**8.644.120.540**		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dok	**570.300**		
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 dok	**382.500**		
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dok	**689.500**		
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 lap	**225.000**		

1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12	org/bln	4.823.820.940		
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Lap	390.200		
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1	paket	4.167.400		
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		12	paket	3.204.200		
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		34	lap	4.460.000		
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12	laporan	4.847.600		
1	05	02	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan		12	laporan	3.718.512.900		
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah kenderaan Perorangan Dinas atau kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.		9	unit	400.000		

1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kenderaan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		22	unit	2.300.000		
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara		1	unit	150.000		
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1	unit	80.000.000		
1	05	04			**Program Pencegahan,Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**				**26.282.800**		
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabuoaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan /Penanggulamgan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		4	dok	2.134.800	-	-
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		12	lap	1.258.000		

1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran		12	dok	1.011.800		
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penaggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangn Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar Teknis terkait.		354	unit	12.382.500		
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur yang memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		30	org	450.000		
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		314	dok	400.000		

1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		314	dok	400.000		
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian		100	dok	900.000		
1	05	04	2.04	01	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang memuat Jumlah SKKL Desa/Keluarahan yang telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar		48	dokumen	7.345.700		

BAB V
PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dalam Pelaksanaan Penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam RENJA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu tahun 2024 harus menerapkan Prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabel.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintahan Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu sebagai berikut :

a. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu Tahun 2024 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas Pelaksanaan setiap Program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Palu harus memperhatikan/mempedoman dokumen-dokumen Perencanaan yang ada diantaranya RENSTRA 2021-2026, Rancangan RKPD Kota Palu Tahun 2024, serta Visi dan Misi Kepala Daerah 2021-2026.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

a. Perlu Peningkatan Kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan seminar serta kegiatan lainya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

b. Aparatur Perencana yang ada saat ini dari sisi kualitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.

c. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.

d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

e. Meningkatkan peran serta msyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan Peundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALU

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kota Palu Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Perubahan (Renja) Satpol PP tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), dalam Pasal 11 ayat (3) bahwa Rencana Perangkat Daerah terdiri atas (a) Renstra Perangkat Daerah, dan (b) Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Satpol PP Kota Palu Tahun 2024 difokuskan pada pergeseran dan penambahan anggaran Program, kegiatan, sub kegiatan serta belanja yang disesuaikan dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang termuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 serta Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2023 dan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palu

Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

22. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Sat Pol PP;
23. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota palu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Palu tahun 2023 Nomor 14);
24. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kota Palu Tahun 2024 adalah untuk memberikan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Palu serta pengalokasian anggaran yang akan dilakukan pada tahun perencanaan.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Kota Palu Tahun 2024, Yaitu:

1. Sebagai dasar Penyusunan RKA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024;
2. Sebagai Pedoman pelaksanaan Perubahan Anggaran tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Satpol PP Kota Palu Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satpol PP Triwulan II dan Capaian Renstra Satpol PP Kota Palu

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satpol PP Kota Palu Triwulan II dan Capaian Renstra Satpol PP Kota Palu

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Satpol PP Kota Palu dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1						**Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**								
1	5					**Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**								
1	**5**	**1.05.0.00.0.0.02.0.0**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah**							
1	**5**	**1.05.0.00.0.0.02.0.0**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	25 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	20 %	11 Dokumen	44,00 %

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50 %	5 Dokumen	50 %
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	3 Dokumen	60 %
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	2 Dokumen	40 %
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	3 Laporan	60 %
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50 %	30 Bulan	50 %
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50% %	30 Bulan	50 %

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 %	1 Laporan	20 %
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Dearah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	5 Paket	2 Paket	1 Paket	0 Paket	0,00 %	2 Paket	40 %
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 TW	3 TW	3 TW	1 TW	33,33 %	4 TW	26,67 %
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0 %	1 Paket	20 %

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	6 Paket	6 Paket	5 Paket	83,33 %	11 Paket	36,67 %
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan	10 Paket	4 Paket	2 Paket	1 Paket	50 %	5 Paket	50 %
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50 %	5 Dokumen	50 %
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan	26 Laporan	23 Laporan	8 Laporan	34,78 %	34 Laporan	29,57 %
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**							
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Unit	37 Unit	1 Unit	0 Unit	0 %	37 Unit	51,3889 %

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	13 Unit	1 Unit	0 Unit	0 %	13 Unit	48,15 %
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 %	30 Laporan	50 %
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 %	30 Laporan	50 %
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 %	30 Laporan	50 %
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**							

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	12 Unit	6 Unit	3 Unit	50 %	15 Unit	50 %
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	30 Unit	15 Unit	8 Unit	53,33 %	38 Unit	50,67 %
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	12 Unit	46 Unit	5 Unit	10,87 %	17 Unit	36,96 %
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	45	20	15	3	20	23	51,11

							Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	Unit	Unit	%	Unit	%
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**2**			**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**							
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**2**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	500 Kasus	200 Kasus	58 Kasus	30 Kasus	51,72 %	230 Kasus	46 %
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	190	100	38	25	65,79	125	65,79

								Kasus	Kasus	Kasus	Kasus	%	Kasus	%
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarkat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5184 Dokumen	2592 Dokumen	1296 Dokumen	648 Dokumen	50 %	3240 Dokumen	62,50 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mengemban amanah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai sasaran strategis. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis.Perumusan indikator kinerja sasaran lebih di fokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra dan RPJMD 2021 – 2026.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD Saruan Polisi Pamong Praja Kota Palu serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sesuai dengan dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu tahun 2021 – 2026 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan , sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sat Pol PP Kota Palu

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penegakan Perda	√		100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah LINMAS Per 10.000 Penduduk		√	2 Linmas/ Kel.	2 Linmas/ Kel.	2 Linmas/ Kel.	2 Linmas/ Kel.	2 Linmas/ Kel.	2 Linmas/ Kel.	2 Linmas/ Kel.	2 Linmas/ Kel.	
3	Tingkat Penyelesaian Pelangaran K3 (Ketertiban, Ketentranam dan Keindahan)		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	√		12 Pol PP/10.000 Penduduk	12 Pol PP/10.000 Penduduk	12 Pol PP/10.000 Penduduk	12 Pol PP/10.000 Penduduk	12 Pol PP/10.000 Penduduk	12 Pol PP/10.000 Penduduk	12 Pol PP/10.000 Penduduk	12 Pol PP/10.000 Penduduk	
5	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	√		100	100	100	100	100	100	100	100	

6	Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu		√	CC (58)	CC (59)	B (60,50)	B (61)		-			
7	Nilai SAKIP Satpol PP Kota Palu		√	B (65,50)	B (66,50)	B (67,50)	B (68,50)	CC (52,50)	A	BB (>70-80)	BB (>70-80)	
8	Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sat Pol PP Kota Palu

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah timbulnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya yang disebabkan oleh adanya faktor kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, adanya faktor kelemahan yang tidak diatasi, adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sehingga menyebabkan suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada bagian kelompok masyarakat.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, Kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satpol PP

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	– Adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta gangguan keamanan di lingkungan	– Munculnya masalah krusial konflik di masyarakat – Masih adanya pelangaran K3 di masyarakat	– Adanya isu-isu yang meresahkan masyarakat – Kurangnya kewaspadaan dini dan mitigasi terhadap gangguan lingkungan
2	–Pelanggaran Perda dan Perwali yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi	– Kurangnya Sosialisasi Perda dan Perwali	–Pengaruh reformasi dan globalisasi yang berdampak pada pelanggaran

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi serta mulai nampak perubahan gaya hidup di masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran dan kesenjangan hidup yang tinggi, maka hal tersebut dapat membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas atau rendah.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada suatu pemerintah daerah adalah dengan mengkaji dan menganalisis gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kriminalitas yang terjadi dan dapat ditangani oleh pemerintah daerah.Semakin banyak terjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta tindakan krimininalitas disuatu daerah

menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi diantara penduduknya.

Oleh karena sebagai wujud tata kelola aparatur penegak Perda untuk meningkatkan kinerja dan untuk menjaga stabilitas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu wajib menyediakan pelayanan publik yang memadai dan berkualitas dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif serta perlindungan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review Terhadap Ranacangan Perubahan RKPD dapat di lihat dalam table 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024

No.						Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
						Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Nilai SAKIP SATPOL PP**	**B**	**13.996.623.876**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Nilai SAKIP SATPOL PP**	**BB**	**14.158.982.924**
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	**4.418.400**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	**3.630.000**

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	756.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	540.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.527.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.350.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.377.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.200.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	756.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	540.000

1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase realisasi keuangan**	**95%**	**5.824.137.676**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase realisasi keuangan**	**100 %**	**5.698.032.824**
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 orang/bulan	5.823.635.076	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	5.697.530.224
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	502.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	502.600

1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Dearah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**533.983.150**	**Administrasi Umum Perangkat Dearah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**570.805.650**
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.578.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 triwulan	3.578.600
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.750.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Jenis	0

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	127.565.550	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Jenis	173.485.550
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan	3 Paket	29.062.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan	3 Jenis	28.714.500
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Jenis	10.100.000

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	354.927.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	354.927.000
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**100%**	**39.161.400**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**100 %**	**400.000.000**
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	24.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	0

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	15.161.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**100%**	**6.282.313.200**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**100 %**	**6.236.003.200**
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	97.724.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	97.724.800

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.184.588.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.138.278.400
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**1.312.610.050**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100 %**	**1.250.511.250**

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	306.188.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	291.188.800

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	966.441.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	928.072.450
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	30.220.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	25.150.000

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	9.760.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	6.100.000
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**2**			**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kota Palu**	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**100%**	**14.273.100.000**	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kota Palu**	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**100 %**	**14.696.100.000**

1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**2**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksanya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**14.273.100.000**	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksanya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**14.696.100.000**

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	2	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Kota Palu	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	58 Kasus	13.521.900.000	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Kota Palu	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	58 Kasus	14.011.500.000

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	2	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Palu	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	38 Kasus	103.200.000	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Palu	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	38 Kasus	84.600.000

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	2	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarkat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Palu	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.296 Laporan	648.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarkat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Palu	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.296 Laporan	600.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satpol PP Kota Palu Tahun 2024 tidak terdapat usulan Musrenbang maupun Pokir dari masyarakat serta pemangku kepentingan untuk OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dalam perencanaan satuan polisi pamong praja kota palu perlu mendasari penetapan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota palu Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2006-2025 untuk pembangunan daerah tahap kedua. Dukungan terhadap pencapaian visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlaku.

   Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di kota palu serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi pemerintah kota palu tahun 2021-2026 yang hendak dicapai adalah : **“KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN’’**

   Sebagai penjabaran visi kota palu diatas disusunlah misi pembanguan kota palu 2021-2026 dalam rangka mewujudkan visi **“KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS**

PEMBANGGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN'' dengan rincian sebagai berikut :

1. Membangun Perekonomian Yang Mandiri Dan Siap Bersaing Dalam Perkembangan Ekonomi Regional Dan Global;
2. Membangun Kembali Tatanan Lingkungan Yang Aman Dan Nyaman Dengan Dukungan Infrastruktur Yang Berketahanan Terhadap Bencana;
3. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global Dan Mampuh Beradaptasi Terhadap Bencana Dan Covid-19;
4. Menciptakan Pemerintah Yang Profesional Dan Selalu Hadir Melayani.

Bagian ini akan menyajikan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu untuk Tahun 2024. Adapun Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 secara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Cat. Penting
									Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
1						**Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**									
1	5					**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**									
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nilai SAKIP SATPOL PP**	**Kota Palu**	**BB**	**13.996.623.876**	**BB**	**14.158.982.924**			
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**4 dokumen**	**4.418.400**	**4 dokumen**	**3.630.000**	-788.400	-17,84	

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 dokumen	756.600	1 dokumen	540.000	-216.600	-28,63	
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.527.600	1 dokumen	1.350.000	-177.600	-11,63	
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.377.600	1 dokumen	1.200.000	-177.600	-12,89	
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Laporan	756.600	1 Laporan	540.000	-216.600	-28,63	
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	**Kota Palu**	**95%**	**5.824.137.676**	**100%**	**5.698.032.824**	-126.104.852	-2,17	
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	300 orang/bulan	5.823.635.076	300 orang/bulan	5.697.530.224	-126.104.852	-2,17	

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	502.600	1 Laporan	502.600	0	0,00	
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Dearah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**533.983.150**	**100%**	**570.805.650**	36.822.500		
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	3.578.600	1 Paket	3.578.600	0	0,00	

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	8.750.000	1 Paket	0	-8.750.000	-100,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	6 Paket	127.565.550	6 Paket	173.485.550	45.920.000	36,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan	Kota Palu	3 Paket	29.062.000	3 Paket	28.714.500	-347.500	-1,20	
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 Dokumen	10.100.000	12 Dokumen	10.100.000	0	0,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	23 Laporan	354.927.000	23 Laporan	354.927.000	0	0,00	
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**39.161.400**	**100%**	**400.000.000**	360.838.600	921,41	

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Palu		0	1 Unit	400.000.000	400.000.000	100,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	1 Unit	24.000.000	1 Unit	0	-24.000.000	-100,00	
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	10 unit	15.161.400	10 unit	0	-15.161.400	-100,00	
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**6.282.313.200**	**100%**	**6.236.003.200**	-46.310.000	-0,74	
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	97.724.800	12 Laporan	97.724.800	0	0,00	

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	6.184.588.400	12 Laporan	6.138.278.400	-46.310.000	-0,75	
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**1.312.610.050**	**100%**	**1.250.511.250**	-62.098.800	-4,73	
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	6 Unit	306.188.800	6 Unit	291.188.800	-15.000.000	-4,90	

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	15 Unit	966.441.250	15 Unit	928.072.450	-38.368.800	-3,97	
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	46 Unit	30.220.000	46 Unit	25.150.000	-5.070.000	-16,78	
1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	1	2.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	15 Unit	9.760.000	15 Unit	6.100.000	-3.660.000	-37,50	
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**2**			**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**Kota Palu**	**100%**	**14.273.100.000**	**100%**	**14.696.100.000**	423.000.000	2,96	

1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.00**	**2**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**14.273.100.000**	**100%**	**14.696.100.000**	423.000.000	2,96	

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	2	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Palu	58 Kasus	13.521.900.000	58 Kasus	14.011.500.000	489.600.000	3,62	

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	2	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Palu	38 Kasus	103.200.000	38 Kasus	84.600.000	-18.600.000	-18,02	

1	5	1.05.0.00.0.00.02.00	2	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarkat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Palu	1.296 Laporan	648.000.000	1.296 Laporan	600.000.000	-48.000.000	-7,41	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan yang di susun berdasarkan perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2024 dalam menunjang tercapainnya Visi dan Misi Daerah Kota Palu serta Target dan sasaran pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 sebagai bahan dalam penyusunan perubahan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD Kota Palu.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024, maka penetapan Prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi daerah di harapakan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah lingkup pemerintah Daerah Kota Palu maupun dengan instansi pemerintah yang membidangi fungsi lain.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALU

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja perubahan PD), adalah perubahan perencanaan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2024. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Pergeseran pagu kegiatan antar, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dalam menyusun rencana kerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peranserta Lembaga Internasional da Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

16. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Palu;
17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 2, Tambaran Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
18. Peraturan Walikota Palu Nomor Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.
19. Peraturan Walikota Palu Nomo4 20 Tahun 2022 tentang perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
20. Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota tahun 2024 Nomor 15).

1.3 Maksud danTujuan

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan rencana Kerja Peubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024

a. Maksud

Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan serta memberikan pedoman kerja dalam penyusunan

program dan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dan mengacu kepada RKPD perubahan Kota Palu Tahun Anggaran 2024.

b. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan BPBD Kota Palu Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Memberikan acuan bagi BPBD Kota Palu dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran perubahan (RKA) 2024
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan BPBD Kota Palu
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan BPBD Kota Palu dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD perubahan);
4. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan BPBD Kota Palu Tahun Anggaran 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan 2

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2024 BPBD Kota Palu melaksanakan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   meliputi kegiatan :

   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      I. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      II. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      III. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      IV. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      I. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
      II. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      I. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
      II. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
      III. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

IV. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
V. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
VI. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
I. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
II. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
I. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
II. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
III. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IV. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penanggulangan Bencana meliputi :
a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
I. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
II. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
III. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

IV. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
V. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota
VI. Penyusunan Rencana Kontijensi

b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
I. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
II. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

c. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
I. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu mengelola anggaran sebesar Rp. 7.275.379.690,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 6.623.749.367,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 628.047.500,- Belanja Operasi dan belanja modal digunakan untuk belanja pegawai dan tunjangan, membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Palu. Program dan kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kota Palu terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2023 adalah realisasi fisik rata-rata sebesar 89,48% dan realisasi keuangan sebesar 89,48%, sedangkan penyerapan dana sebesar Rp. 7.275.379.690,-

Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu sebelum perubahan mengelola anggaran sebesar Rp. 6.629.918.281,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 6.449.527.681,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 180.390.600,- dan setelah perubahan menjadi Rp.

6.123.815.916,- yang terdiri dari belanja operasional Rp. 5.490.530.379,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 20.000.000,-

Realisasi Keuangan BPBD Tahun 2023 dan Tahun 2024 akhir TW 2 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel. 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN

PENCAPAIAN RENSTRA BPBD KOTA PALU s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode Rekening					Program, Kegiatan dan sub kegiatan	indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2021 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1	5	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah**							
1	5	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah**							
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100 %	4 dok	80 %
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100 %	4 dok	80 %
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100 %	4 dok	80 %
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100 %	4 dok	80 %

Kode Rekening					Program, Kegiatan dan sub kegiatan	indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1	5	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							
1	5	1	2.02	1	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	24 bulan	12 bln	6 bln	50 %	30 bulan	50 %
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 laporan	8 laporan	3 laporan	1 laporan	33 %	9 laporan	60 %
1	5	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**							
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	2 paket	1 paket	1 paket	100 %	3 paket	60 %
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100 %	3 paket	60 %
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Materei	5 Paket	2 paket	1 paket	1 paket	100 %	3 paket	60 %

Kode Rekening					Program, Kegiatan dan sub kegiatan	indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5 Paket	2 paket	1 paket	1 paket	100 %	3 dok	60 %
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Jasa Media Massa	20 dok	8 dok	4 dok	4 dok	100 %	12 dok	60 %
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi	200 lap	81 lap	28 lap	lap	32 %	104 lap	52 %
1	5	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik Kantor	60 bulan	24 bulan	12 BLN	6 bulan	50 %	30 %	50 %
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bulan	24 bulan	12 BLN	6 bulan	50 %	30 %	50 %

Kode Rekening					Program, Kegiatan dan sub kegiatan	indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024				Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9=(5+7)		10=(9/4)	
1	5	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**														
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65	Unit Roda empat dan Roda 2	26	Unit Roda empat 4 unit Roda dua	8	Unit Roda empat 4 unit Roda dua	8	Unit Roda empat 4 unit Roda dua	100	%	39	Unit Roda empat 4 unit Roda dua	60	%
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	65	Unit Roda empat dan Roda 2	26	Unit Roda empat dan Roda 2	13	Unit Roda empat dan Roda 2	13	Unit Roda empat dan Roda 2	100	%	39	Unit Roda empat	60	%
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang Dipelihara	145	unit laptop, komputer . Printer	29	unit laptop, komputer . Printer	29	unit laptop, komputer . Printer	15	unit laptop, komputer . Printer	50	%	43	unit laptop, komputer ,Printer	30	%
1	5	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75	unit AC, Genset	15	unit AC, 15Genset	15	unit AC, Genset	7	unit AC, Genset	30	%	43	unit AC, Genset		%

Kode Rekening					Program, Kegiatan dan sub kegiatan	indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1	5	3			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Terselenggaranya Program Penangulangan Bencana**							
					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase Jumlah desa/Kelurahan yang mendapan informasi rawan bencana**							
					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	4 kali	0 kali	1 kali	1 kali	100 %	1 kali	25 %

Kode Rekening					Program, Kegiatan dan sub kegiatan	indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	9=(5+7) 10=(9/4)
1	5	3	2.2		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	Terlayaninya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Terlaksananya pengembangan budaya sadar bencana di sekolah, Puskesmas dan masyarakat	250 org	50 org	50 siswa	50 org	100 %	100 org	40 %
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terpasangnya Rambu jalur Evakuasi Bencana	273 buah blue line, rambu evakuasi	17 buah blue line	64 buah blue line, rambu evakuasi	0 buah blue line, rambu evakuasi	0 %	17 buah blue line, rambu evakuasi	6 %
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3 Kawasan	0 kawasan	1 kawasan	0 kawasan	0 %	0 kawasan	0 %
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Stimulan Bantuan Dana Rumah	5 sektor	2 sektor	3 sektor	2 sektor	67 %	4 sektor	80 %
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas TRC Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Simulasi Kesiapsiagaan menghadapi bencana	30 kali	10 kali	5 kali	0 org	0 %	10 org	33 %
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersusunnya Rencana Kontijensi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	2 dok	200 %

Kode Rekening					Program, Kegiatan dan sub kegiatan	indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1	5	3	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Terlayaninya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**							
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kecepatan respon untuk pencarian, penyelamatan dan evakuasi	30 menit	10 menit	10 menit	10 menit	100 %	20 menit	67 %
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Penanggulangan Bencana	20 jenis	5 jenis	5 jenis	2 jenis	40 %	7 jenis	35 %
1	5	3	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Terlaksananya pelatihan kelurahan Siaga Tanggap Darurat**							
1	5	3	2.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	5 tahun	2 tahun	1 tahun	1 tahun	0 tahun	3 Tahun	60 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang mencakup tugas pencegahan bencana, penanganan kondisi kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi serta tugas pembantuan sesuai ketentuan yang berlaku, BPBD Kota Palu telah melaksanakan beberapa Program kegiatan yakni Program kesiapsiagaan bencana, Program Pencegahan dini dan penanggulangan bencana, program penyiapan logistic bencana, Program Penanganan Bencana dan Kejadian Luar biasa, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Pada Tahun Anggaran 2022 sesuai RPJMD BPBD Kota Palu masuk di misi ke 5 tujuan ke 2 dengan sasaran Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana dengan uraian capaian kinerja indikataor sebagai berikut :

1. Prosentase peningkatan pengembangan budaya sadar bencana di laksanakan di sekolah-sekolah rawan bencana yang terakomodir dalam dokumen anggaran dari 22 sekolah yang diusulkan yang dapat terakomodir sebanyak 11 sekolah atau 50%
2. Persentase pembentukan kelurahan tangguh bencana yang direncanakan 3 kelurahan dalam dokumen anggaran dapat dilaksanakan di 3 kelurahan tersebut atau 100%.
3. Terlaksananya penyuluhan-penyuluhan kebencanaan di lembaga-lembaga Negara (kejaksaan, kantor pajak,

pengadilan negeri, Akademi keperawatan Bala Keselamatam Palu)

4. Terlaksananya Pengamatan gejala bencana dan penyebarluasan informasi ancaman bencana di Kota Palu melalui pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOP PB) BPBD Kota Palu yang bekerja satu kali dua puluh empat jam
5. Tersedianya logistik/peralatan Penanggulangan bencana
6. Terlaksananya simulasi saat tanggap darurat yang dilaksankan di 4 kelurahan pesisir pantai
7. Persentase Koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pemulihan dan pembangunan pasca bencana
8. Terlaksananya Penyaluran Dana Stimulan Percepatan Perbaikan Perumahan Pasca Bencana sebanyak 1500 KK
9. Terlaksananya Penyaluran Hunian Tetap bagi warga terdampak bencana Pasca Bencana 2018

Pencapain kinerja pelayanan BPBD dapat dilihat di Tabel 2.2

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PALU

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Reformasi Birokrasi BPBD Kota Palu			CC (>50-60)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)					
2	Nilai SAKIP BPBD Kota Palu			B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)	B (>60-70)	A (>80-100)	A (>80-100)	A (>80-100)	
3	Indeks Risiko Bencana			150,00 point	148,50 point	140,20 point	135,80 point	151,43 point	132,30 point	110,00 point	100,00 point	
4	Indeks Ketahanan Daerah			0,50 point	0,56 point	0,60 point	0,62 point	0,56 point	0,67 point	0,70 point	0,80 point	
5	Persentase pemerintah desa/kelurahan yang menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana			35 %	35 %	75 %	85 %	35 %	35 %	75 %	85 %	
6	Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana			50 %	65 %	75 %	85 %	50 %	65 %	75 %	85 %	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
8	Perentasi warga kota palu yang memperoleh layanan			35 %	45 %	50 %	75 %	35 %	45 %	50 %	75 %	
9	Perentasi warga kota palu yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			45 %	50 %	65 %	75 %	45 %	50 %	65 %	75 %	
10	Perentasi warga kota palu yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana			50 %	65 %	75 %	85 %	50 %	65 %	75 %	85 %	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, upaya penyelenggaraan bencana sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan secara komperhensif dan sistematis, olehnya terdapat berbagai permasalahan utama dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. permasalahan tersebut terdapat pada tahapan:

1. Pra bencana yang menyangkut pada kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan
2. Pada tahapan saat terjadi bencana yang menyangkut pada upaya tanggap darurat dan logistic serta peralatan .
3. Pasca bencana yang menyangkut pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana.

Permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- Masih terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.
- Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif.
- Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah,dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul diantaranya :

a masih terbatasnya kebijakan penanggulangan bencana di daerah,

b. masih terbatasnya pengembangan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah,

c. belum memadainya kerjasama kelembagaan dengan pemerintah daerah , lsm, organisasi non pemerintah dan masyarakat,

d. keterbatasan alokasi pendanaan bagi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang bersumber dari pemerintah daerah).

2. Tanggap Darurat dan Pengelolaan Bantuan Darurat

Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah :

- Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di daerah
- Belum memadainya kinerja dan koordinasi aparat dalam penanggulangan bencana
- Masih rendahnya pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan
- Masih rendahnya ketersediaan logistic dan peralatan di daerah
- Masih tingginya ketergantungan kepada pemerintah pusat

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Permasalahan yang dihadapi diantaranya :

- Belum adanya basis data yang yang termutakhirkan dan teradministrasi secara regular
- Belum akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana

- Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan secara spasial
- Belum maksimalnya koordinasi dalam hal penilaian kerusakan dan kerugian
- Belum terencananya dengan baik perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
- Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi

Adapun faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong pelayanan OPD BPBD kota Palu yang dapat mempengaruhi VISI dan Misi Kota Palu Tahun 2021–2026 yaitu :

Faktor lingkungan Internal

a. Kekuatan

- Adanya point arah dan kebijakan berupa pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta pengurangan risiko bencana.
- Jumlah dukungan Politik di lembaga legislative yang cukup memadai
- Beberapa SKPD di Kota Palu telah membentuk Tim yang menangani kebencanaan (Dinas Kesehatan , RSUD Anutapura, Dinas Sosial, Dinas PU dan PMI)
- Kondusifnya keamanan dan ketersediaan jumlah tenaga kerja

b. Kelemahan

- Minimnya industry skala menengah dan besar

- Fasilitasi permodalan masih rendah untuk usaha berskala besar (Jumlah, kewenangan)
- Tidak adanya forum dialog yang secara rutin diadakan antara Pimpinan dengan aparat
- Keterbatasan dana pembangunan (DAU,DAK,PAD, Hibah)

Faktor lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Terbentuknya kelembagaan BPBD provinsi dan BPBD kabupaten
- Mudahnya akses dari dan keluar kota (darat , laut, udara)
- Tersedianya dana on call pa BPBD yang dapat di akses setiap saat ketika terjadi bencana
- Adannya beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di kebencanaan (WVI, YPR,JAMBATA)

b. Ancaman

- Masa jabatan pimpinan yang sangat pendek sehingga sulit meletakan program kebencanaan untuk jangka panjang.
- Letak geografis kota Palu yang dikelilingi perbukitan dan dilewati kurang lebih 50 sungai yang mengalir ke sungai palu.
- Masyarakatnya heterogen sehingga mendorong terbentuknya organisasi – organisasi kesukuan, dan golongan yang akan dapat terjadi konflik social.

- Rendahnya pengamalan agama dari setiap pemeluknya, kebaikan – kebaikan tidak tersebar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadai kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan RKPD, maka penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan jelas dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi maupun pelaksanaan perencaan.

Berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, BPBD sebagai badan yang bertugas dibidang Penanggulangan Bencana berada pada tujuan kedua pada misi kelima yaitu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

TABEL; 2.4

REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALU

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil analisis Kebutuhan				
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target/ capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Palu	Persentase kecukupan dukungan perencanaan, anggaran, kepegawaian, sarana dan prasarana serta sistem dasar penanggulangan bencana.	100 %	**4.995.747.674**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Palu	Persentase kecukupan dukungan perencanaan, anggaran, kepegawaian, sarana dan prasarana serta sistem dasar penanggulangan bencana.	100 %	**5.192.275.562**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu	4 dok	**40.022.450**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Palu	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu	4 dok	**128.232.400**	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	1 dok	2.339.800	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	1 dok	2.339.800	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	1 dok	2.080.400	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	1 dok	2.080.400	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	1 dok	3.125.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	1 dok	3.125.000	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil analisis Kebutuhan				
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	1 dok	32.477.250	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	1 dok	120.687.200	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian keuangan yang dikerjakan tepat waktu	100 %	**3.476.213.274**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Palu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian keuangan yang dikerjakan tepat waktu		**3.640.524.012**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Persentase jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	36 org/bln	3.472.846.124	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Persentase jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	100 %	3.637.156.862	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat	1 Lap	3.367.150	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 dok	3.367.150	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	100 %	**322.828.250**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Palu	Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran		**380.188.450**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan	1 Paket	2.573.700	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan	100 %	660.000	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	31.482.100	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	-	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil analisis Kebutuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target/ capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Paket	44.899.050	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	100	%	45.149.050	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	10.542.400	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100	%	7.724.400	
5	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24	Dok	6.100.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	%	5.100.000	
6	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	4	Lap	14.500.000	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	100	%	14.500.000	
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		Lap	212.731.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	%	307.055.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	Presentase Kecukupan Sarana dan Prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	100	%	**52.500.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Palu	Presentase Kecukupan Sarana dan Prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	100	%	**0**	
1	Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang disediakan	Kota Palu	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang disediakan	2	unit	50.000.000	Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang disediakan	Kota Palu	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang disediakan	2	unit	0	
2	Pengadaan Meubel	Kota Palu	Jumlah Paket meubel yang disediakan	1	unit	2.500.000	Pengadaan Meubel	Kota Palu	Jumlah Paket meubel yang disediakan	1	unit	0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	Persentase kecukupan jasa penunjang	100	%	**718.190.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Palu	Persentase kecukupan jasa penunjang	100	%	**688.614.000**	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil analisis Kebutuhan				
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target/ capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Lap	123.166.400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Lap	83.011.200	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Lap	595.023.600	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	605.602.800	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi	100 %	**385.993.700**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Palu	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi	100 %	**354.716.700**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Kota Palu	JumlahKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara	9 unit	239.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Kota Palu	JumlahKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara	9 unit	215.950.000	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah kenderaan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	128.213.700	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah kenderaan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	122.816.700	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	38 unit	11.790.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	38 unit	11.560.000	
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	14 unit	6.390.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	14 unit	4.390.000	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil analisis Kebutuhan				
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target/ capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan Persentase pemerintah desa/kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana Persentase warga Kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 % 75 % 75 % 50 % 65 % 85 %	1.078.172.324	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan Persentase pemerintah desa/kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana Persentase warga Kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 % 75 % 75 % 50 % 65 % 85 %	920.441.960	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Palu	Presentase jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana	100%	**79.154.750**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Kota Palu	Presentase jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana	100 %	-	
	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana)	Kota Palu	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana	0 orang	79.154.750	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana)	Kota Palu	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana	0 orang	-	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil analisis Kebutuhan				
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Palu	persentase kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100 %	**192.844.400**	**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Kota Palu	persentase kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100 %	**135.650.400**	
1	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Palu	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	10 Kelura	100.594.800	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Palu	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	10 Kelurah	67.900.800	
2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	orang	33.974.800	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	orang	28.474.800	
3	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0 orang	20.774.800	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0 orang	19.274.800	
4	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Laporan Layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	9 buah	37.500.000	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Laporan Layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	9 buah	20.000.000	
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Palu	persentase jiwa yang terselamatkan dari kejadian ancaman	100 %	**354.712.994**	**Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Kota Palu	persentase jiwa yang terselamatkan dari kejadian ancaman	100 %	**336.325.300**	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil analisis Kebutuhan				
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Laporan Kejadian Bencana yang tertangani secara cepat	12 lap	184.713.000	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Laporan Kejadian Bencana yang tertangani secara cepat	12 Lap	199.206.400	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 orang	170.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0 orang	137.118.900	
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Palu	Persentase kecukupan dukungan sistem dasar penanggulangan bencana	100 %	**451.460.180**	**Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Kota Palu	Persentase kecukupan dukungan sistem dasar penanggulangan bencana	100 %	**448.466.260**	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan penanggulangan bencana	Kota Palu	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengawasan dan Pendampingan yang dilaksanakan	10 keg	241.791.280	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan penanggulangan bencana	Kota Palu	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengawasan dan Pendampingan yang dilaksanakan	10 keg	277.669.010	
2	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kab	Kota Palu	Jumlah Penyelesaian kegiatan pasca bencana disemua sektor berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Keg	209.668.900	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kab	Kota Palu	Jumlah Penyelesaian kegiatan pasca bencana disemua sektor berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Keg	170.797.250	

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Setiap tahunnya apabila dipandang perlu guna menampung aspirasi yang berkembang dalam forum musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota maka BPBD kota Palu telah mengadakan Forum SKPD dan hasil reses dari anggota dewan perwakilan daerah Kota Palu yang mana kegiatan ini bertujuan untuk menampung usulan program/kegiatan dari Pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, SKPD terkait.

Untuk Tahun ini tidak ada usulan program dan kegiatan dari musrenbang dan hasil reses anggota dewan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Untuk mengetahui rumusan rencana program dan kegiatan BPBD pada Tahun 2024 dilihat pada Tabel 3.1

TABEL 3.1/Tabel TC.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Lokasi	RENCANA TAHUN 2024							catatan penting
									Renja 2024		APBD 2024		Perubahan Renja 2024		Bertambah/Berkurang		
									Target Capaian kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-8)	12=(11/8)*100	13
1	05	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase kecukupan dukungan perencanaan, anggaran, kepegawaian, sarana dan prasarana serta sistem dasar penanggulangan bencana.	Kota Palu	100 %	**4.995.747.674**	100 %	**5.457.740.785**	100 %	**5.192.275.562**	**(265.465.223)**	**-4,86**	
1	05	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu	Kota Palu	4 dok	**40.022.450**	4 dok	**40.421.400**	4 dok	**128.232.400**	**87.811.000**	**217,24**	
1	05	01	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	Kota Palu	1 dok	2.339.800	1 dok	2.339.800	1 dok	2.339.800	-	**0,00**	
1	05	01	2	01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	Kota Palu	1 dok	2.080.400	1 dok	2.080.400	1 dok	2.080.400	-	**0,00**	
1	05	01	2	01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	Kota Palu	1 dok	3.125.000	1 dok	3.125.000	1 dok	3.125.000	-	**0,00**	

1	05	01	2	01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	Kota Palu	1	dok	32.477.250	1	dok	32.876.200	1	dok	120.687.200	**87.811.000**	**267,10**	
1	05	01	2	02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian keuangan yang dikerjakan tepat waktu	Kota Palu	100	%	**3.476.213.274**	100	%	**3.733.767.735**	100	%	**3.640.524.012**	**(93.243.723)**	**-2,50**	
1	05	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	Kota Palu	36	org/bln	3.472.846.124	36	org/bln	3.730.400.585	36	org/bln	3.637.156.862	**(93.243.723)**	**-2,50**	
1	05	01	2	02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	Kota Palu	1	Lap	3.367.150	1	Lap	3.367.150	1	Lap	3.367.150	-	**0,00**	
1	05	01	2	06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	Kota Palu	100	%	**322.828.250**	100	%	**354.174.750**	100	%	**380.188.450**	**26.013.700**	**7,34**	
1	05	01	2	06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan	Kota Palu	1	Paket	2.573.700	1	Paket	2.573.700	1	Paket	660.000	**(1.913.700)**	**-74,36**	
1	05	01	2	06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Palu	3	Paket	31.482.100	3	Paket	41.390.600	3	Paket	-	**(41.390.600)**	**-100,00**	
1	05	01	2	06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Palu	1	Paket	44.899.050	1	Paket	44.899.050	1	Paket	45.149.050	**250.000**	**0,56**	
1	05	01	2	06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Palu	1	Paket	10.542.400	1	Paket	10.542.400	1	Paket	7.724.400	**(2.818.000)**	**-26,73**	
1	05	01	2	06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palu	24	Dok	6.100.000	24	Dok	6.100.000	24	Dok	5.100.000	**(1.000.000)**	**-16,39**	

1	05	01	2	09	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kenderaan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Palu	8	unit	128.213.700	8	unit	128.213.700	8	unit	122.816.700	**(5.397.000)**	**-4,21**	
1	05	01	2	09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Palu	38	unit	11.790.000	38	unit	13.980.000	38	unit	11.560.000	**(2.420.000)**	**-17,31**	
1	05	01	2	09	0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Palu	14	unit	6.390.000	14	unit	6.390.000	14	unit	4.390.000	**(2.000.000)**	**-31,30**	
1	05	03				**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan Persentase pemerintah desa/kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana Persentase warga Kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kota Palu	100 % 75 % 75 % 50 % 65 % 85 %		1.078.172.323	100 % 75 % 75 % 50 % 65 % 85 %		1.087.931.700	100 % 75 % 75 % 50 % 65 % 85 %		920.441.960	**(167.489.740)**	**-15,40**	
1	05	03	2	01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Presentase jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana	Kota Palu	100	%	**79.154.750**	100	%	**79.304.550**	100	%	-	**(79.304.550)**	**-100,00**	
1	05	03	2	01	0004	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana	Kota Palu	150	orang	79.154.750	150	orang	79.304.550	150	orang	-	**(79.304.550)**	**-100,00**	

1	05	03	2	02		**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	persentase kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Kota Palu	100	%	**192.844.400**	100	%	**192.644.400**	100	%	**135.650.400**	**(56.994.000)**	**-29,59**	
1	05	03	2	02	0006	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kota Palu	10	Kelura	100.594.800	10	Kelura	86.894.800	10	Kelura	67.900.800	(18.994.000)	-21,86	
1	05	03	2	02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	Kota Palu	150	orang	33.974.800	150	orang	47.474.800	150	orang	28.474.800	(19.000.000)	-40,02	
1	05	03	2	02	0016	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Palu	0	orang	20.774.800	0	orang	20.774.800	0	orang	19.274.800	(1.500.000)	-7,22	
1	05	03	2	02	0017	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kota Palu	9	buah	37.500.000	9	buah	37.500.000	9	buah	20.000.000	(17.500.000)	-46,67	
1	05	03	2	03		**Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	persentase jiwa yang terselamatkan dari kejadian ancaman	Kota Palu	100	%	**354.712.993**	100	%	**357.479.850**	100	%	**336.325.300**	**(21.154.550)**	**-5,92**	

1	05	03	2	03	0002	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kejadian Bencana yang tertangani secara cepat	Kota Palu	12	lap	184.713.000	12	lap	184.713.000	12	lap	199.206.400	**14.493.400**	**7,85**	
1	05	03	2	03	0009	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kota Palu	100	orang	170.000.000	100	orang	172.766.850	100	orang	137.118.900	**(35.647.950)**	**-20,63**	
1	05	03	2	04		**Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase kecukupan dukungan sistem dasar penanggulangan bencana	**Kota Palu**	**100**	**%**	**451.460.180**	**100**	**%**	**458.502.900**	**100**	**%**	**448.466.260**	**(10.036.640)**	**-2,19**	
1	05	03	2	04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengawasan dan Pendampingan yang dilaksanakan	Kota Palu	10	keg	241.791.280	10	keg	270.559.650	10	keg	277.669.010	7.109.360	2,63	
1	05	03	2	04	0010	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kab	Jumlah Penyelesaian kegiatan pasca bencana disemua sektor berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kota Palu	1	Keg	209.668.900	1	Keg	187.943.250	1	Keg	170.797.250	(17.146.000)	-9,12	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Tahun 2024, merupakan inplementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu 2021 – 2026 dan perwujudan Visi, Misi, Kota Palu sebagai acuan kebijakan dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu untuk mendukung pencapaian sasaran penanggulangan bencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kota Palu.

Kedepannya kami terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian sasaran, tujuan sebagaimana yang telah di amanatkan dalam visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dengan menyusun perencanan matang dan terpadu, pengalokasian anggaran kegiatan dengan melihat skala prioritas serta kemampuan penganggaran/pembiayaan program/kegiatan oleh Pemerintah Kota Palu. Selanjutnya meningkatkan koordinasi dengan pihak pihak terkait, meningkatkan profesionalisme kerja, kualitas sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta dukungan semua pihak diharapkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu di tahun-tahun mendatang akan lebih sempurna dari pada tahun-tahun sebelumnya.

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan yang menyebutkan Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.RenjaPerangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah .Dokumen Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan halter sebut diatas, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial merupakan penjabaran tahunan dari Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021 – 2026. Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, dengan memperhatikan aspirasi terhadap permasalahan dan perkembangan lingkungan strategis. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja mempunyai arti strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program pembengunan tahunan pemerintah daerah, Renja sebagai acuan Dinas Sosial untuk memasukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Tahun 2024.

Rencana kerja Dinas Sosial Tahun 2024 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai, rencana strategis (Renstra) baik program dan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Berdasarkan perencanaan sebagai berikut melalui Forum Perangkat Daerah, musyawarah perencanaan pembangunan Kota, musyawarah perencanaan pembangunan Propinsi, dan musyawarah perencanaan pembangunan Nasional.

Keterkaitan Renja Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016, Keterkaitan Dinas Sosial Dengan Dokumen Perencanaan lainnya Tahun 2021-2026 bersinergi dengan Renstra Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditunjukkan dengan penentuan isu strategis serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target indikator serta isu strategis sehingga penanganan ditingkat nasional hingga daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Palu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
21. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial.
23. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Sosial dapat menyelesaikan permasalahan, hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi penghambatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung upaya mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Adapun tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyiapkan rancangan dari program kegiatan yang diusulkan serta merupakan jabaran dari Renstra Dinas Sosial Kota Palu;
2. Menjamin pencapaian tujuan dan ssaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Penyusunan Renja Dinas Sosial adalah untuk melaksanakan program kegiatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Renja Dinas Sosial Kota Palu adalah penjabaran perencanaan tahunan dari perencanaan strategis. Dalam penyusunan Renja Tahun 2024 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program dan kegiatan serta penggunaan anggaran tahun 2023. Pada tahun 2023 Dinas Sosial Kota Palu telah melaksanakan 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 35 sub kegiatan. Keseluruhan program dan kegiatan bertujuan untuk mencapai yaitu :

Realisasi pelaksanaan progam dan kegiatan menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 40%. realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. .***8.982.690.147*** dari total anggaran sebesar Rp. **18.350.372.447**. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Palu sampai dengan triwulan II tahun 2023, Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya capaian kinerja sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT
   a. Realisasi program/kegiatan sekretariat yang belum dilaksanakan
      antara lain dikarenakan tidak bisa terbelanjakan karena tinta print bukan belanja modal tetapi masuk ATK/barang habis pakai
   b. Pajak kendaraaan operasional sebagaian sudah terbayarkan dan sebagaian masih dalam proses
   c. Belanja jasa komunikasi bidang telematika berorientasi masih dalam proses .

II. Bidang Penanaganan Fakir Miskin

Untuk Program/kegiatan Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam sub kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekomomi masyarakat masih dalam proses.

III. Bidang Pelayanan dan Rehabiltasi sosial

Untuk Program/kegiatan Pelayanan dan Rehabiltasi sosial:

a. Terbayarkannya sesuai jumlah kasus laporan dari masyarakat dan kebutuhan belanja perlengkapan jenazah,sesuai kebutuhan honor penggali liang lahat,sesuai dengan kebutuhan sewa kendaraan saran mobilitas darat,
b. Untuk sub kegiatan permakanan Komisaris Daerah (KOMDA) Lansia dialihkan ke acara Puncak Hari Ulang Tahun Lanjut Usia (HLUN) Kota Palu,
c. Untuk sub kegiatan bimbingan fisik,mental,spritual dan sosial terbayarkan sesuai kebutuhan dan laporan dari masyarakat (Logistik), terbyarkan sesuai laporan dari masyrakat (kasus ODGJ,petugas Rumah singgah,Pendampig Napza)
d. Belanja Medical ChekUp masih dalam proses.

IV. Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat

a. Realisasi program/kegiatan Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat belanja persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersalurkan sesuai laporan dari masyarakat,kegiatan aktifitas lapangan posko kesiapsiagaan bencana, pelaksanaan pengelolaan dapur umum dan tim pengelola gudang logistik bencana .
b. Pelayanan dukungan psikososial masih dalam proses Asesment.
c. Koordinasi ,sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Tagana terbayarkannya sesuai kebutuhan rapat Monitoring dan Evaluasi Tagana.

V. Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat

a. Adanya keterlambatan pelaporan kegiatan

Faktor-faktor penyebab tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan;

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya capaian kinerja sebagai berikut :

1. Terdapat kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan tetapi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
2. Pada saat perencanaan penganggaran dari bagian-bagian tidak memperhitungkan jumlah kebutuhan dan waktu pelaksanaannya.

b. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain :

1. Dalam perencanaan program/kegiatan aspek indikator dan target kinerja harus jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan;
2. Untuk meningkatkan efisiensi anggaran harus memperhatikann aspek kepatutan, kewajaran, realistis, rasional dan proposional, agar dalam pencapaian sasaran program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan.

Gambaran lengkap evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2023 terhadap program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap renstra, target kinerja, anggaran renja, realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2023 seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9 (5+7)*	*10 (9/4)*
6				**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**		Jumlah diakumulasi selama 5 thn						
6	01			**Sosial**								
6	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**							
1.06	01	2.01	01	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Persentase Penyusunan Dokumen Renstra, Renja RKA, RKA Perubahan**							
1.06	01	2.01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	3 dok	60 %

6	01	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	1 dok	1 dok	1 dok	99,85 %	2 dok	40 %
1.06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	1 dok	1 dok	1 dok	99,75 %	2 dok	40 %
1.06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	2 dok	40 %
1.06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen kinerja perangkat daerah	5 Dok	2 dok	1 dok	2 dok	100 %	4 dok	80 %
1.06	01	2.02		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.***								
1.06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	60 Bulan	6 bln	12 bln	6 bln	94 %	12 bln	20 %
1.06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD.	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Dok	2 dok	1 dok	2 dok	100 %	4 dok	80 %
1.06	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah.**								
1.06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	60 jenis	21 jenis	8 jenis	21 jenis	99,30 %	42 jenis	70 %

1.06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor	44 jenis	7 Jenis	7 jenis	7 Jenis	100 %	14 Jenis	32 %
1.06	01	2.06	25	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan.	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	26 item	6 jenis	3 jenis	6 jenis	98,62 %	12 jenis	47 %
1.06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	240 Media/bln	3 Media 7 iklan	36 Media,	3 Media 7 iklan	75,71 %	6 Media 14 iklan	2,5 %
1.06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	9.260 dos 1.320 galon	1166 dos dan 220 galon	220 dos 176 dos	1166 dos dan 220 galon	99,87 %	2332 dos dan 440 galon	26 % - 33%
1.06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 kali	34 kali	29 kali	34 kali	98,76 %	68 kali	45 %
1.06	01	2.07		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.***								
1.06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	660 unit	1 unit	1 Unit	1 unit	100%	2 unit	0,30%
1.06	01	2.08		***Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***								
1.06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	180 bln		24 bln	12 bln	75,58 %	12 bln	6,6%
1.06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bln	6 bln	12 bln	12 bln	91,26 %	18 bln	30 %

1.06	01	2.09		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.***								
1.06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan		85 unit		12 unit	6 unit	66%	6 unit	7,0%
1.06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional	85 unit	24 unit	5 Unit	29 Unit	100%	53 unit	62,3 %
1.06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75 unit	144 unit	36 unit	180 Unit	100 %	324 unit	43 %
1.06	02			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**								
1.06	02	2.02		***Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota.***								
1.06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Penertiban Iin Undian Gratis Berhadia dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 kali	4 kali	4 kali	4 kali	50 %	8 kali	40 %

1.06	02	2.03		***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.***								
1.06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 kali	46 org	92 org	138 org	72 %	184 org	19 %
1.06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 kali	9 org	9 org	18 org	70%	27 org	14 %
1.06	01	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 kali	46 pendamping	42 pendamping	88 org	75 %	134 org	6,8 %

1.06	01	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 kali	46 kelurahan	0	46 kelurahan	60 %	92 kelurahan	0
1.06	03			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**								
1.06	03	2.01		***Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.***								
1.06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	25 kasus	5 kasus	5 kasus	10 kasus	65%	19 kasus	76 %
1.06	04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		29,524 Orang	3.845 Orang	3.845 Orang	16.311 Orang	100%	20.156 Orang	69 %

1.06	04	2.01		***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlatar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.***								
1.06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan.	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Permakanan	2.100/ bungkus	420 dos	380 dos	800 dos	25 %	1220 dos	58 %
1.06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	20 kali	4 kali	4 kali	8 kali	0%	12 kali	48 %
1.06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	20 kali	4 kali	4 kali	8 kali	53 %	12 kali	60 %
1.06	04	2.02		***Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.***								
1.06	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Lembaga dan Kemitraan yg bekerjasama dalam	20 kali	1 unit	1 unit	3 unit	50 %	4 unit	20 %

				Sosial Kabupaten/Kota.	pelaksanaan rehabilitasi sosial							
1.06	05			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**								
1.06	05	2.02		*Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.*		5 sistem		1 Sistem				
1.06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Daerah/Kota	9,200 ok	1 sistem	1 sistem	2 sistem	65 %	3 sistem	11 %
1.06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3,285 org	846 org	122 klp/kk	168 klp	37 %	1.014 klp	31 %
1.06	06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**								
1.06	06	2.01		***Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota***								

1.06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan.	Cakupan makanan dan minuman yang tersedia	135.38 bungkus	1 paket	1 paket	3 paket	57 %	4 paket	60 %
1.06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang.	Cakupan sandang yang tersedia	16.349 jenis	3165 item	76 item		90 %		
1.06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	230 kelurahan		46 kelurahan				23 %
1.06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	20 kelurahan	4 kali	4 kali		25 %		23 %
1.06	06	2.02		***Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota***								
1.06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruan Siaga Bencana.	Jumlah pelaksanaan Sub Kegaiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	165 org	33 tagana	33 org	96	73 %	129org	78%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Keberadaan Dinas Sosial diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Derah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 23) dan PeraturanWali Kota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palu.

Berdasarkan aturan normatif bahwa kedudukan Dinas Sosial merupakan unsur staf, dipimpin Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Dinas Sosial Kota Palu menyelenggarakan hal-hal yaitu :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis lingkup partisipasi sosial dan masyarakat rehabilitas sosial, pelayanan sosial dan pembinaan sosial serta pemberdayaan sosial;
b. Penyelenggara pembinaan pengumpulan data, penyusunan rencana dan program dibidang partispasi masyarakat rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pemberdayaan sosial;
c. Pengkoodinasian pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang partisipasi masyarakat, rehabilitasi pelayanan sosial, dan pemberdayaan sosial;
d. Penyelenggaraan ketata usahaan dan tata laksana;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsi.

2.2.1 Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

Program kegiatan pada Dinas Sosial Kota palu ditahun 2023 terdapat 6 program, kegiatan 14 dan sub kegiatan 35. Adapun kendala yang terdapat pada Triwulan II pada program perlindungan jaminan sosial yang terdapat di sub kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat terdapat kegiatan Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dimana Kendala tersebut berdasarkan verifikasi data dan assemen lalu pada Program Pelayanan dan Rehablitasi Sosial yang terdiri dari pemenuhan kebutuhan dasar pada Penyandang disabiltas terlantar yang terlayani 115 orang, Anak terlantar 2 orang, Lanjut usia terlantar orang dan Gelandangan pengemis 8 orang dan untuk Program Perlindungan Sosial korban bencana alam 426 jiwa,bencana sosial 89 jiwa, jumlah keseluruhan korban bencana 515 jiwa.

Program Pemberdayaan Masyarakat terbayarkan sesuai kebutuhan dan sub kegiatan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam Penanganan Kasus pada Tahun Anggaran 2022 5 SDM dan untuk tahun anggaran 2023 sub kegiatan LK3 dihapuskan dari Kementrian Sosial RI.

Dengan Total anggaran sebesar **Rp. 18.350.372.447,-** dengan realisasi yang dicapai berdasarkan Data capaian serapan anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar *Rp.* ***8.982.690.147,***-atau sekitar **40** %.

Untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2023, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Renstra Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021-2026. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Palu adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

KOTA PALU

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1.	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	Baik
2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100%	100%	100%	100%	-		100%	100%	Baik
3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah mendapat jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	Baik
4	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial dan Pelayanan Sosial	100%	100%	100%	100%	-			100%	Baik
5	Persentase pembinaan kepada penyandang cacat fisik mental dan mental serta lanjut usia tidak potensial	100%	100%	100%	100%	-		100%	100%	Baik

6	Persentase pembinaan kepada eks penyandang penyakit sosial	100%	100 %	100%	100%	-	-	100%	100%	Baik
7	Persentase pengetahuan dan keterampilan bagi anak terlantar	100%	100 %	100%	100%	-	-	100%	100%	
8	Cakupan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan	100%	100 %	100%	100%	-	–	100%	100%	
10	Cakupan keberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100 %	100%	100%	-	–	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Palu

Berdasarkan aturan normatif bahwa kedudukan Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana, dipimpin Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Dinas Sosial Kota Palu menyelenggarakan hal-hal yaitu :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis lingkup partisipasi sosial dan masyarakat rehabilitas sosial, pelayanan sosial dan pembinaan sosial serta pemberdayaan adat sosial;
b. Penyelenggara pembinaan pengumpulan data, penyusunan rencana dan program dibidang partispasi masyarakat rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pemberdayaan adat sosial;
c. Pengkoodinasian pengendalin dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang partisipasi masyarakat, rehabilitasi pelayanan sosial, dan pemberdayaan adat sosial;
d. Penyelenggaraan ketata usahaan dan tata laksana;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsi.

Dalam tataran teknis operasional, permasalahan dilingkup Dinas Sosial Kota Palu, meliputi:

1. Minimnya pemberdayaan kemiskinan di perkotaan
2. Meningkatnya Pengguna NAPZA ;
3. Melakukan pembinaan eks trauma dan tuna sosial (narkoba, HIV/AIDS);
4. Minimnya pemberdayaan terhadap penyandang Disabiltas;
5. Minimnyapelayanan dan penanganan ODGJ terlantar:
6. Minimnya pemberdayaan masyarakat korban konflik sosial;
7. Belum maksimalnya pengololaan data DTKS;

8. Minimnya pelayanan anak dan pemberian bantuan UEP terhadap lansia;
9. Minimnya pemberdayaan terhadap fakir miskin;
10. Minimnya penanganan kepada Anak Jalanan, anak terlantar, Lansia Terlantar dan GEPENG;
11. Rendahnya kepedulian sosial masyarakat;
12. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan LKS ;
13. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan PPKS;
14. Minimnya pemahaman masyarakat tentang PUB;
15. Belum tersediaPerda PUB;
16. Masih kurangnya sarana dan prasarana PSKS;
17. Minimnya pemahaman masyarakat dalam perolehan bantuan terhadap korban bencana;
18. Belum optimalnya pengawasan izin pengumpulan sumbangan;
19. Minimnya pemahaman masyarakat dalam kesiapsiagaan penanganan bencana;
20. Perlunya penanganan dan pemberian bimbingan fisik, mental dan spiritual dan sosial terhadap penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis, pemulung, dan kelompok rentan.
21. Masih kurangnya fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kurang mampu
22. Perlunya pembentukan Tim Reaksi Cepat Jaga Kota Palu.

Terdapat korelasi faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Palu sebagai perangkat daerah untuk mendukung kinerja WaliKota dan Wakil WaliKota Palu, serttera memeran kan fungsi pengkoordinasian kelembagaan teknis daerah agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dievaluasi apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2023 mengalami perubahan dan untuk itu perlu melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Sosial Kota Palu tahun anggaran 2024 sebagaimana berikut ini :

TABEL 2.4

REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (termasuk musrenbang inklusif , Kepmen 59)					
	Program dan Kegiatan	**LOKASI**	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**TARGET CAPAIAN KINERJA**	**PAGU INDIKATIF**	**Program dan Kegiatan**	**LOKASI**	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**TARGET CAPAIAN KINERJA**	**PAGU INDIKATIF**	**Ket**
	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	10	11	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH *Perencanaan,***	**Kota Palu**	**Nilai SAKIP OPD**		**5.920.795.233**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH *Perencanaan,***	**Kota Palu**			**6.469.558.956**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kota Palu*	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Dokumen	**3.937.500**	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kota Palu*	*Terwujudnya Penyusunan Dokumen Restra, Renja, RKA, RKA Perubahan, Lapotran TEPRA dan Lakip Dinas Sosial Kota Palu*		**4.331.250**	Penyesuaian kepmen 50-59
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Palu	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	562.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Palu	Jumlah dokumen Perencanaan	1 Dokumen	618.750	

Perangkat Daerah.					Perangkat Daerah.		perangkat daerah			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA Dinas Sosial Kota Palu dan lapora hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA Dinas Sosial Kota Palu dan lapora hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	1 Dokumen	825.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Dinas Sosial Kota Palu dan lapora hasil koordinasi penyusunan perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.625.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Dinas Sosial Kota Palu dan lapora hasil koordinasi penyusunan perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.787.500	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Sosial Kota Palu dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Sosial Kota Palu dan laporan hasil Koordinasi penyusunan	1 Dokumen	1.100.000	

		Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	***Kota Palu***	***Presentase Realisasi Keuangan***	**95%**	**4.154.839.845**	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.***	***Kota Palu***	***Jumlah orang yg menerima gaji dan Tunjangan ASN Dinas Sosial Kota Palu***	1 Dokumen	**4.575.823.830**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tujangan ASN	40 Orang/Bulan	4.152.914.845	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Kota Palu	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		4.568.206.330	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.	Kota Palu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	2 Laporan	1.925.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.	Kota Palu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Dinas Sosial Kota Palu dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan	12 Bulan	7.617.500	

			n/Semesteran SKPD					Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	***Kota Palu***	***Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100%**	**591.297.800**	***Administrasi Umum Perangkat Daerah.***	***Kota Palu***	***Tersedianyan Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih Kantor, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan, Penggandaan, Bahan Bacaan, Iklan Media Cetak, Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan***	**100%**	**601.611.780**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Kota Palu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia	15 Paket	44.378.000	Penyediaan Peralatan dan Perlenkapan Kantor.	Kota Palu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia	23 unit	213.815.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan.	40 Paket	58.302.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan.	40 Paket	64.133.080	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	3 Paket	52.928.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	3 Paket	58.220.800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokuemn Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokuemn Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.910.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	23.078.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	25.385.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	404.511.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	444.962.100	
	Pengadaan Brang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah	**Kota Palu**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100%**	**6.550.000**	**Pengadaan Brang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Kota Palu**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100%**	**7.205.000**	

	Daerah					**Daerah**					
	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	6.550.000	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	7.205.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Palu**	**Prentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**733.750.088**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Prentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**807.125.097**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	63.690.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	675.850.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	743.435.097	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Palu**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**430.420.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**473.462 .000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota palu	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	237.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota palu	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	261.250. 000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	162.320.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	178.552. 000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	54 Unit	14.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	54 Unit	15.840.0 00	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	16.200.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	17.820.000	
	Program Pemberdayaan Sosial	**Kota Palu**	**Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**100%**	**477.200.000**	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Kota Palu**	**Presentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**100%**	**524.920.000**	
	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Palu**	**Persentase Pelaksanaa Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**20%**	**33.500.000**	**Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Persentase Pelaksanaa Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**20%**	**36.850.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadia dan Pengumpulan	4 Dokumen	33.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis	4 Dokumen	36.850.000	

			Uang atau Barang			barang		Berhadia dan Pengumpulan Uang atau Barang			
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah Kabupaten/Kota	**Kota Palu**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan social Kabupaten/kota**	**20%**	**443.700.000**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan social Kabupaten/kota**	**20%**	**488.070.000**	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	213.500.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	234.850.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	9 Orang	36.700.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat	9 Orang	40.370.000	

								Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/kota	46 Keluarga	193.500.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/kota	46 Keluarga	212.850.000	
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	**Kota Palu**	**Persentase Tercapainya Penanganan warga negara Migran Lorban Tindak Kekerasan**	**100%**	**28.000.000**	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**Kota Palu**	**Persentase Tercapainya Penanganan warga negara Migran Lorban Tindak Kekerasan**	**100%**	**30.800.000**	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Keluraha	**Kota palu**	**Persentase Pelaksanaan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasidi Daerah kabupaten/Kota**	**100%**	**28.000.000**	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah kabupaten/Kota Untuk**	**Kota palu**	**Persentase Pelaksanaan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasidi Daerah**	**100%**	**30.800.000**	

	n Asal		**untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**			**dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**		**kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**			
	Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Keluraha n Asal	Kota Palu	Jumlah Warga Negara Migran Korbang Tindak Kekerasan yang Dipulankan dari Titik Debarkasi di daerah Provinsi untuk Dipulang Ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan kabupaten/Kota	5 Orang	28.000.000	Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Palu	Jumlah Warga Negara Migran Korbang Tindak Kekerasan yang Dipulankan dari Titik Debarkasi di daerah Provinsi untuk Dipulang Ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan kabupaten/Kota	5 Orang	30.800.000	
	Program Rehabilitasi Sosial	**Kota Palu**	**Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar, lansia Terlantar, Disabilitasi, DGDJ Terlantar dan**	**100%**	**883.101.954**	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Kota Palu**	**Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar, lansia Terlantar, Disabilitasi, DGDJ**	**100%**	**971.412.149**	

			Gelandangan Pengemis					**Terlantar dan Gelandangan Pengemis**			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosiaal	**Kota Palu**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Rehabiliotasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti Sosial**	**20%**	**871.389.454**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosiaal**	**Kota Palu**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Rehabiliotasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti Sosial**	**25%**	**958.528.399**	
	Penyediaan Permakanan	Kota Palu	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	19.450.500	Penyediaan Permakanan	Kota Palu	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	21.395.550	

	Penyediaan Sandang	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian da Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	200.000.000	Penyediaan Sandang	Kota palu	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian da Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	64.716.514	
	Penyediaan Alat Bantu	Kota palu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang	64.025.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota palu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang	70.427.500	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Kota Palu	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	71 Orang	787.913.954	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Kota palu	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	71 Orang	866.705.349	

	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya BUkan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Kota Palus**	**Persentase Pelaksanaan Program Rehabilitas Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya BUkan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**20 %**	**11.712.500**	**Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya BUkan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Kota Palus**	**Persentase Pelaksanaan Program Rehabilitas Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**25%**	**12.883.750**	
	Kerjasam Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/kota	1 Dokumen	11.712.500	Kerjasam Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/kota	1 Dokumen	12.883.750	
	Programm Perlindungan Dan Jaminan Sosial	**Kota Palu**	**Persentase fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Modal**	**100%**	**7.347.580.745**	**Programm Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**Kota Palu**	**Persentase fakir Miskin yang Mendapatkan**	**100%**	**10.929.057.425**	

			Usaha dan Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Jaminan Sosial (BPJS Gratis)					**Bantuan Modal Usaha dan Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Jaminan Sosial (BPJS Gratis)**			
	Pengelolaan Data Fakis Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Palu**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kota**	**100%**	**7.347.580.745**	**Pengelolaan Data Fakis Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kota**	**100%**	**10.929.057.425**	
	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Keluarga	462.688.000	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Keluarga	808.013.800	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Palu	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi masyarakat	250 Orang	6.884.892.745	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Palu	Jumlah Orang Ynag Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi masyarakat	250 Orang	10.121.043.625	

			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Program Penanganan Bencana	**Kota Palu**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota**	**99,63%**	**920.768.510**	**Program Penanganan Bencana**	**Kota Palu**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota**	**99,70 %**	**974.895 .361**	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Kota Palu**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**20%**	**793.783.510**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**20%**	**835.211 .861**	
	Penyediaan Makanan	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1	50 Orang	379.858.300	Penyediaan Makanan	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan	50 Orang	417.844. 130	

			Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Sandang	Kota Palu	Jumlah Orang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	365.300.210	Penyediaan Sandang	Kota Palu	Jumlah Orang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	401.830.231	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Palu	Jumlah Tempat Pengungsi Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Unit	34.500.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Palu	Jumlah Tempat Pengungsi Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Unit	70.950.000	
	Pelayanan Dukungan Psikologis	Kota Palu	Jumlah Korban yang Mendapatkan Layanan	50 Orang	14.125.000	Pelayanan Dukungan Psikologis	Kota Palu	Jumlah Korban yang Mendapatkan Layanan	50 Orang	15.537.500	

			Dukungan Psikologis Kewenangan Kabupaten/Kota					Dukungan Psikologis Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap KesiapSiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Kota Palu**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**100%**	**126.985.000**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap KesiapSiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**100%**	**139.683.500**	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Palu	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	126.985.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Palu	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	139.683.500	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrembang, dimulai dari Musrembang tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan sampai Musrembang tingkatKota.Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upayamensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaranpembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Setda Kota Palu tidak terdapat usulan Musrembang hal tersebut dikarenakan Setda Kota Palu berperan sebagai unsur staf yang bertugas untuk membantu Wali Kota dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

TABEL 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN

TAHUN 2024 KOTA PALU

DINAS SOSIAL KOTA PALU

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Cat.
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan:Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kube kuliner makanan	Kel. silae	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	2 Klpk	
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan DataFakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kube Tenda	Kel,Lambara	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	2 Klpk	
3.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Kel Lambara	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 Klpk	

	Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga pengadaan container jualan minuman dingin dan kue				
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Pengadaan Container Jualan Minuman dingin dan kue	Kel, Talise valangguni	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 Klpk	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Pengadaan Peralatan Meubel	Kel palupi	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 Klpk	

6.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Bantuan Peralatan Usaha Kuliner Makanan	Kel Duyu	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 Klpk	
7.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Peralatan Usaha Menjahit	Kel Tanamodindi	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 Klpk	
8.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kuliner Makanan	Kel,Besusu Timur	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 Klpk	
9.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan	Kel Siranindi	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan	1 Klpk	

	Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Bantuan Peralatan Usaha Kuliner Makanan		Kelompok Usaha Bersama		
10	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Bantuan Usaha Pencucian Motor	Kel Lere	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 Klpk	
11	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Bantuan alat Perbengkelan	Kel Kayumalue Ngapa	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 Klpk	
12	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan	Kel Mamboro	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok	1 klpk	

	Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Bantuan Usaha Bengkel		Usaha Bersama		
13	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Bantuan Peralatan Usaha Pertukangan/batu	Kel Besusu Barat	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
14	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Bantuan Peralatan Usaha	Kec Ulu jadi	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	7 klpk	
15	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan	Kec mantikolore	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan	5 klpk	

	Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Bantuan Kube Tenda		Kelompok Usaha Bersama		
16	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Bantuan Alat Bengkel	Kec mantikolore	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	2 klpk	
17	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube Kuliner	Kec Tatanga	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	3 klpk	
18	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin	Kec Palu Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok	3 klpk	

	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube Sewa Kursi		Usaha Bersama		
19	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Bantuan Kube	Kec Tatanga	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	2 klpk	
20	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube Tenda	Kec Palu Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	3 klpk	
21	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kec kamonji	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	

	Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Usaha pengisian ulang air galon				
22	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube alat pertukangan meubel	Kel Kamonji	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
23	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube Tenda dan kursi	Kel pantoloan	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
24	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial	Kel Tawanjuka	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	

	kesejahteraan keluarga Kube Tenda dan kursi				
24	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Alat Pertukangan kayu/batu	Kec ulu jadi	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
25	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube tenda, kursi,meja,sound system	Kel Watusampu	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
26	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube Tenda dan kursi	Kel Talise	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	4 klpk	

27	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Bantuan alat Bengkel	Kel Kawatuna	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube Tenda dan kursi	Kel Balaroa	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
28	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube tenda dan kursi	Kec mantikolore	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	6 klpk	
29	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan	Kel Palupi	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan	1 klpk	

	Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Usaha Loundry		Kelompok Usaha Bersama		
30	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube Alat musik kelompok	Kel tatura Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
31	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube alat alat catering	Kel Birobuli utara	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
32	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kel Birobuli selatan	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	

	Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube Tenda				
33	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube Alat musik kelompok	Kel Birobuli selatan	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1klpk	
34	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube alat-alat bakery	Kel tawanjuka	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
35	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Kel Petobo	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	

	Kube alat-alat catering				
36	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Bantuan mesin rumput	Kec palu barat	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	2 klpk	
37	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Usaha modal kue	Kel kamonji	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
38	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube Pengisian ulang air galon	Kel Balaroa	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
39	Perlindungan dan Jaminan Sosial		Terlaksananya Fasilitasi		

	Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga		Bantuan Kelompok Usaha Bersama		
40	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Pengadaan alat musik kelompok	Kel Ujuna	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
40	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube Abon ikan tuna	Kel tatura utara	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
41	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kel Tatura utara	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	

	Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube Usaha air minum galon				
42	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube Usaha air minum galon	Kel palupi	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
43	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube usaha menjahit	Kel Tatura utara	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
44	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi	Kel Tatura utara	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	

	bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube tenda dan kursi				
45	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube menjahit	Kel Birobuli selatan	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
46	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube alat Pertukangan/meubel	Kel Besusu timur	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	1 klpk	
47	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan; Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kube Kuliner	Kec Palu Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama	4 klpk	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembengunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

RPJMN Tahun 2021-2026 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, proyek prioritas strategis, program kementerian kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, arah pembengunan kewilayahan, prioritas pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Tahun 2020-2024 merupakan titik tolak pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan public, serta kesejahteraan rakya yang lebih baik.

Bahwa berdasarkan arahan Presiden RI telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi NAWA CITA dan pencapaina sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastuktur;
   Melanjutkan pembangunan infrastuktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan

distribusi, mempermudah akses ke kawsan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi;
   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menertibkan2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi;
   Memperioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan 7 daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Palu

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakuakan untuk mencapai visi, misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Palu Yaitu :

1. Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan Korban Bencana Alam dan non alam serta Sosial
2. Meningkatnya kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan Masyarakat
3. Mewujudkan reformasi birokrasi Dinas sosial Kota Palu

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Palu yaitu :

1. Terlaksananya pendampingan dan penyaluran bantuan untuk warga miskin;

2. Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA terdiri dari kegiatan:

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

C. Administrsi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuan Perundang-undangan;
5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

E. Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL terdiri dari kegiatan:

A. Pengumpulan Sumbangan dalam Daearah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan :

1) Koordinasi dan Singkronisasi Penertiban Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan.

B. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan :

1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
5) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

3. **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN terdiri dari kegiatan:**
   A. **Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal terdiri dari sub kegiatan :**

      1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daearah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

4. **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL terdiri dari kegiatan:**
   A. **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial terdiri dari sub kegiatan :**
      1) Penyediaan Permakanan;
      2) Penyediaan sandang;
      3) Penyediaan Alat Bantu;
      4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
   B. **Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial terdiri dari sub kegiatan :**
      1) Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.

5. **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL terdiri dari kegiatan:**
   A. **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan :**
      1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
      2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

6. **PROGRAM PENANGANAN BENCANA terdiri dari kegiatan:**
   A. **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan :**
      1) Penyediaan Makanan;

2) Penyediaan Sandang;
3) Pelayanan Dukungan Psikososial.

B. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan :

1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;
2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Palu tahun 2023 serta perkiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL KOTA PALU

TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (isinya hasil analisis tabel sebelumnya)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1				*2*	*3*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*
1.06				**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**15.577.446.442**				**20.032.358.058**
1.06	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**Kota Palu**	**100%**	**5.920.795.233**			**20%**	**6.683.374.659**
1.06	**01**	**2.01**		**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Presentase Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, RKA, RKA Perubahan, Laporan TEPPA dan LAKIP**			**3.937.500**			**20**	**4.331.250**
1.06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	4 Dokumen	562.500	DAU/DDL/DID		4 dok	618.750

1.06	01	2.01	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	750.000	DAU/DDL/DID		1 dok	825.000
1.06	01	2.03	03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	1.625.000	DAU/DDL/DID		1 dok	1.787.500
1.06	01	2.01	06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.000.000	DAU/DDL/DID		1 Laporan	1.100.000
1.06	**01**	**2.02**		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	Tersusunya laporan keuangan dan aset			**4.154.839.845**			**20**	**4.575.853.829**
1.	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	40 Orang/Bulan	4.152.914.845	DAU/DDL/DID		45 Orang/Bulan	4.568.206.329
1.06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan	Kota Palu	2 Laporan	1.925.000	DAU/DD		1 laporan	7.617.500

				Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran/SKPD				L/DID			
1.06	**01**	**2.06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Jumlah Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersi Kantor, AlatTulis Kantor, Bahan Cetakan, Penggandaan, Bahan Bacaan, Iklan Media Cetak, Makanan dan Minuman, Tamu danKegiatan			**591.297.800**			**20**	**815.427.580**
1.06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Palu	15 Paket	44.378.000	DAU/DD L/DID		17 Paket	213.815.800
1.06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	40 Paket	58.302.800	DAU/DD L/DID		43 Paket	64.133.080
1.06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 Paket	52.928.000	DAU/DD L/DID		5 Paket	58.220.800

1.06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 Dokumen	8.100.000	DAU /DDL/DID		12 Dokumen	8.910.000
1.06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	4 Laporan	23.078.000	DAU /DDL/DID		4 Laporan	25.385.800
1.06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	15 Laporan	404.511.000	DAU /DDL/DID		15 Laporan	444.962.100
1.06	01	2.07		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur			**6.550.00**			**20**	**7.205.000**
1.06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Kota Palu	5 Paket	6.550.000			**7 paket**	7.205.000
1.06	**01**	**2.08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tersedianyan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dan Terdokumentasinya Administrasi Keuangan**			**733.750.088**			**20**	**807.125.000**
1.06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	57.900.000	DAU /DDL/DID		12 Laporan	63.690.000

1.06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jsa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	675.850.088	DAU /DD L/DI D		12 Laporan	743.435.000
1.06	**01**	**2.09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**430.420.000**			**20**	**473.462.000**
01.06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharan dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	12 Unit	237.500.000	DAU /DD L/DI D		14 Unit	261.250.000
1.06	01	2.09	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dianas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	9 Unit	162.320.000	DAU /DD L/DI D		9 unit	178.552.000
1.06	01	2.09	10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Palu	54 Unit	14.400.00	DAU /DD L/DI D		58 Unit	15.840.000

1.06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana atau Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prsarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	18 Unit	16.200.000	DAU/DDL/DID		18 Unit	17.820.000
1.06	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Presentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Kota Palu**	**100%**	**477.200.000**			**20**	**313.555.000**
1.06	**02**	**2.02**		**PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN KOTA**	**Presentase Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota**			**33.500.000**			**20**	**36.850.000**
1.06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Palu	4 Dokumen	33.500.000	DAU/DDL/DID		4 Dokumen	36.850.000
1.06	**02**	**2.03**		**PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**			**443.700.000**			**20**	**276.705.000**

1.06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan kapasitas Pekerja social Masyarakat Kabupaten/Kota	Kota Palu	92 Orang	213.500.000	DAU /DDL/DID		95 Orang	23.485.000
1.06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	9 Orang	36.700.000	DAU /DDL/DID		9 Orang	40.370.000
1.06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	46 Keluarga	193.500.000	DAU /DDL/DID		46 Keluarga	212.850.000
1.06	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Presentase tercapainya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**Kota Palu**	**100%**	**28.000.000**			**20**	**30.800.000**
1.06	**03**	**2.01**		**PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase pelayanan dan Perlindungan Sosial Hukum Bagi Korban Eks ploitasi Perdagangan**			**28.000.000**				**30.800.000**

				UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	**Perempuan dan Anak**							
1.06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Palu	5 Orang	28.000.000	DAU/DDL/DID		5 Orang	30.800.000
1.06	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Presentase(%) Penyandang Disabiltas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti. Presentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar,lansia terlantar,Disabilitas,ODGJ Terlantar dan Gelandangan pengemis**	**Kota Palu**	**100%**	**883.101.954**			**90**	**1.029.725.613**
1.06	**04**	**2.01**		**REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG**	**Presentase Pelayanan Sosial**			**871.389.454**			**20**	**1.016.841.863**

				DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL	**Dasar Penyandnag Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di luar Panti Sosial**							
1.06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	50 Orang	19.450.500	DAU /DD L/DI D		50 Orang	21.395.000
1.06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	230 Orang	200.000.000	DAU /DD L/DI D		230 Orang	64.716.514
1.06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	28 Orang	1.275.300	DAU /DD L/DI D		28 Orang	64.025.000

1.06	04	2.03	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	71 Orang	787.913.954	DAU /DD L/DI D		71 Orang	866.705.349
1.06	**04**	**2.02**		**REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DILUAR PANTI SOSIAL**	**Presentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**			**11.712.500**			**20**	**12.883.750**
1.06	04	2.02	14	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitaraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/kota	Kota Palu	1 Dokumen	11.712.500	DAU /DD L/DI D		1Dokumen	40.370.000
1.06	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Presentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha dan Presentase Msayarakat yang Mendapatkan Jaminan Sosial (BPJS)**	**Kota Palu**	**100%**	**7.347.580.745**			**20**	**10.9269.057.425**
1.06	**05**	**2.02**		**PENGELOLAHAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH**	Presentase data Fakir miskin Cakupan Daerah			**7.347.580.745**				**10.9269.057.425**

				KABUPATEN/KOTA	Kabupaten/Kota							
1.06	05	2.02	02	Pengelolahan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Program Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kota Palu	100 Keluarga	462.688.000	DAU /DDL/DID		100 Keluarga	808’013.800
1.06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan kabupaten/Kota	Kota Palu	250 Orang	6.884.892.745	DAU /DDL/DID		250 Orang	10.121.043.625
1.06	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Presentase capaian Penanganan Bencana, Presentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggapa darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**920.768.510**			**100**	**1.045.845.361**
1.06	**06**	**2.01**		**PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Perlindungan social Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**			**793.783.510**			**20**	**906.161.861**

1.06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) kabupaten/Kota	Kota Palu	50 Orang	379.858.300	DAU /DD L/DI D		50 Orang	417.844.130
1.06	06	2.01	02	Penyedian Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dab Kelengkapan lainnya Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	50 Orang	365.300.210	DAU /DD L/DI D		50 orang`	401.830.231
1.06	06	2.01	03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	JumlahTempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	46 Unit	34.500.000			46 Unit	70.950.000
1.06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikosial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososia Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	50 Orang	14.125.000	DAU /DD L/DI D		50 Orang	15.537.500
1.06	**06**	**2.02**		**PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat**			**126.985.000**				**139.683.500**

				BENCANA KABUPATEN/KOTA	**terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**							
1.06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	33 Orang	126.985.000	DAU /DDL/DID		33 Orang	**139.683.500**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu system perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah. Penyusunan Renja perangkat daerah memuat program kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dan berpedoman pada Renstra perangkat daerah. Sekretariat Daerah Kota Palu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024

TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 (isinya hasil analisis tabel sebelumnya)				Catatan Penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1				*2*	*3*	*5*	*6*	*7*		*8*
1.06				**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**15.577.446.442**		
1.06	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**Kota Palu**	**100%**	**5.920.795.233**		
1.06	**01**	**2.01**		**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	**Kota Palu**	**4 Dokumen**	**3.937.500**		
1.06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 dokumen	562.500	DAU/DDL/DID	
1.06	01	2.01	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	750.000	DAU/DDL/DID	
1.06	01	2.03	03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	1.625.000	DAU/DDL/DID	

1.06	01	2.01	06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.000.000	DAU/DD L/DID	
1.06	**01**	**2.02**		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	Tersusunya laporan keuangan dan aset			**4.154.839.845**		
2.	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	40 Orang/Bulan	4.152.914.845	DAU/DD L/DID	
1.06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Kota Palu	2 Laporan	1.925.000	DAU/DD L/DID	
1.06	**01**	**2.06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Jumlah Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersi Kantor, AlatTulis Kantor, Bahan Cetakan, Penggandaan, Bahan Bacaan, Iklan Media Cetak, Makanan dan Minuman, Tamu danKegiatan			**591.297.800**		
1.06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Palu	15 Paket	44.378.000	DAU/DD L/DID	
1.06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	40 paket	58.302.800	DAU/DD L/DID	
1.06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 Paket	52.928.000	DAU/DD L/DID	
1.06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 Dokumen	8.100.000	DAU/DD L/DID	
1.06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	4 Laporan	23.078.000	DAU/DD L/DID	

1.06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	15 Laporan	404.511.000	DAU/DD L/DID	
1.06	01	2.07		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur			**6.550.00**		
1.06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	Kota Palu	5 Paket	6.550.000		
1.06	**01**	**2.08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tersedianyan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dan Terdokumentasinya Administrasi Keuangan**			**733.750.088**		
1.06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	57.900.000	DAU/DD L/DID	
1.06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jsa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	675.850.088	DAU/DD L/DID	
1.06	**01**	**2.09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tersedianya ruang pelayanan dan tempat parkir kantor, Terpeliharanya Peralatan Kantor**			**430.420.000**		
01.06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharan dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	12 Unit	237.500.000	DAU/DD L/DID	
1.06	01	2.09	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	9 Unit	162.320.000	DAU/DD L/DID	

				Dianas Operasional atau Lapangan						
1.06	01	2.09	10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Palu	54 Unit	14.400.00	DAU/DDL/DID	
1.06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana atau Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prsarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	18 Unit	16.200.000	DAU/DDL/DID	
1.06	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Presentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Kota Palu**	**100%**	**477.200.000**		
1.06	**02**	**2.02**		**PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN KOTA**	**Presentase Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota**			**33.500.000**		
1.06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Palu	12 Dokumen	33.500.000	DAU/DDL/DID	
1.06	**02**	**2.03**		**PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**			**443.700.000**		
1.06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan kapasitas Pekerja social Masyarakat Kabupaten/Kota	Kota Palu	92 Orang	213.500.000	DAU/DDL/DID	
1.06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	9 Orang	36.700.000	DAU/DDL/DID	

				Kabupaten/Kota						
1.06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	46 Keluarga	193.500.000	DAU/DDL/DID	
1.06	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Presentase tercapainya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**Kota Palu**	**100%**	**28.000.000**		
1.06	**03**	**2.01**		**PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL**	**Presentase pelayanan dan Perlindungan Sosial Hukum Bagi Korban Eks ploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak**			**28.000.000**		
1.06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Palu	5 Orang	28.000.000	DAU/DDL/DID	
1.06	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Presentase(%) Penyandang Disabiltas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti. Presentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar,lansia**	**Kota Palu**	**100%**	**883.101.954**		

					terlantar,Disabilitas,ODGJ Terlantar dan Gelandangan pengemis					
1.06	**04**	**2.01**		**REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL**	**Presentase Pelayanan Sosial Dasar Penyandnag Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di luar Panti Sosial**			**871.389.454**		
1.06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	50 orang	19.450.500	DAU/DDL/DID	
1.06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian da Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	230 Orang	200.000.000	DAU/DDL/DID	
1.06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	28 Orang	1.275.300	DAU/DDL/DID	
1.06	04	2.03	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	71 Orang	787.913.954	DAU/DDL/DID	
1.06	**04**	**2.02**		**REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DILUAR PANTI SOSIAL**	**Presentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**			**11.712.500**		

1.06	04	2.02	14	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitaraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/kota	Kota Palu	1 Dokumen	11.712.500	DAU/DDL/DID	
1.06	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Presentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha dan Presentase Msayarakat yang Mendapatkan Jaminan Sosial (BPJS)**	**Kota Palu**	**100%**	**7.347.580.745**		
1.06	**05**	**2.02**		**PENGELOLAHAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase data Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			**7.347.580.745**		
1.06	05	2.02	02	Pengelolahan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Program Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kota Palu	100 Keluarga	462.688.000	DAU/DDL/DID	
1.06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan kabupaten/Kota	Kota Palu	250 Orang	6.884.892.745	DAU/DDL/DID	
1.06	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Presentase capaian Penanganan Bencana, Presentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggapa darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**920.768.510**		
1.06	**06**	**2.01**		**PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Perlindungan social Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**			**793.783.510**		
1.06	06	2.01	01	Penyedian Makanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) kabupaten/Kota	Kota Palu	50 Orang	379.858.300	DAU/DDL/DID	

1.06	06	2.01	02	Penyedian Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dab Kelengkapan lainnya Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	50 Orang	365.300.210	DAU/DD L/DID	
1.06	06	2.01	03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	JumlahTempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	46 Unit	34.500.000		
1.06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikosial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososia Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	50 Orang	14.125.000	DAU/DD L/DID	
1.06	**06**	**2.02**		**PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**			**126.985.000**		
1.06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	33 Orang	126.985.000	DAU/DD L/DID	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan komitmen seluruh aparatur sipil negara di lingkup Dinas Sosial Kota Palu yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2022-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2022-2026. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Renja merupakan rencana operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan dan menjadi pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Palu.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Palu yang disusun berdasarkan RKPD, selain itu Renja juga sebagai landasan perencanaan teknis tahunan bagi Dinas Sosial. Isinya lebih memusatkan pada arah tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Renja sebagai dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan dalam proses perencanaan dan menentukan arah kebijakan pembangunan langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berfikir rasional, produktif dan berdisiplin. Bekerja efisien dan efektif rencana pembangunan jangka panjang daerah 2022-2026. Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Palu akan menjadi pedoman kerja kesejahteraan sosial yang akan di laksanakan Dinas Sosial Kota Palu.

Dengan tersusunnya Renja ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan setiap kebijakan terutama dalam hal penganggaran dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bagian di lingkup Dinas Sosial Kota Palu, selanjutnya program dan kegiatan yang akan ditetapkan dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan secara konsisten.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALU

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah. Undang-Undang dan Permendagri tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD).

Perubahan Rencana Kerja OPD adalah rancangan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Tahapan penyusunan Renja Perubahan diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja, pengumpulan data dan informasi),

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis Renja K/L dan Renja Provinsi, hasil evaluasi, tujuan, sasaran dan rencana kerja) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan Perubahan Renja, pengesahan Renja dan Penetapan Perubahan Renja oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang pelayanan dan pembinaan diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Penyusunan Perubahan Renja OPD dilakukan karena adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, sehingga perlu diadakan pergeseran anggaran guna memaksimalkan dana yang ada untuk kegiatan yang lebih prioritas.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan OPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra OPD yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
24. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender;

25. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
27. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2024 bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai dengan Renstra OPD dan mengacu kepada Perubahan RKPD Tahun 2024. Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja 2024, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Memberi masukan kepada Pemerintah Kota Palu dalam mengambil kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Memberi gambaran kepada pihak-pihak yang terkait lainnya yang membutuhkan/memerlukan dukungan serta mengambil peran dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4. Memberikan arah bagi peningkatan kualiatas hidup Perempuan dan Anak.
5. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan OPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
6. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
- 2.4 Review terhadap Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III Rencana kerja dan pendanaan

Bab IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TRIWULAN II TAHUN 2024

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan di dalam Perubahan Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Evaluasi pelaksanaan renja OPD sampai dengan Triwulan II dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun 2023) dan perkiraan capaian sampai dengan triwulan II tahun berjalan (Tahun 2024) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DP3A 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	BELANJA LANGSUNG								
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip OPD**							
2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2	0,40
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2	0,40
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2	0,40
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	3	0,30
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**							
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	150 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	100%	56	0,37
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**							
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	4	0,40
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	8 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	8	0,53
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	190 Paket	38 Paket	37 Paket	24 Paket	64,86%	62	0,33
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	5 Paket	6 Paket	4 Paket	66,67%	9	0,36
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Media	2 Media	2 Media	2 Media	100%	4	0,40
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	10 Laporan	7 Laporan	4 Laporan	57,14%	14	0,28
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165 Laporan	32 Laporan	28 Laporan	16 Laporan	57,14%	48	0,29
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**							
2.08.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0	0,00
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**							
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	6	0,40
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7 Laporan	58,33%	19	0,32
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**							
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit R4	2 Unit R4	2 Unit R4	1 Unit R4	50,00%	3	0,30

2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	5	Paket	6 Paket	4 Paket	66,67%	9	0,36
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Media	2	Media	2 Media	2 Media	100%	4	0,40
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	10	Laporan	7 Laporan	4 Laporan	57,14%	14	0,28
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165 Laporan	32	Laporan	28 Laporan	16 Laporan	57,14%	48	0,29
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**								
2.08.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0	0,00
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**								
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	3	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	6	0,40
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12	Laporan	12 Laporan	7 Laporan	58,33%	19	0,32
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**								
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit R4	2	Unit R4	2 Unit R4	1 Unit R4	50,00%	3	0,30
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit R4 & R2	3	Unit R4 & R2	3 Unit R4 & R2	2 Unit R4 & R2	66,67%	5	0,33
2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Paket	5	Paket	3 Paket	2 Paket	66,67%	7	0,28
2.08.02	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**								
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**								
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	205 PD	41	PD	41 PD	0 PD	0%	41	0,20
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	41 PD	8	PD	0 PD	0 PD	0%	8	0,20

2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**								
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1	0,20
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio KDRT**								
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya pencegahan kekerasan terhadap perempuan**								
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota **(DAK)**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0	0,00
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 PD	4	PD	4 PD	0 PD	0%	4	0,20
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan**								
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	280 Orang	56	Orang	72 Orang	15 Orang	20,83%	71	0,25
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota **(DAK)**	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Layanan	0	Layanan	0 Layanan	0 Layanan	0%	0	0,00
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)**								
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak**								
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	41 PD	8	PD	11 PD	0 PD	0,00%	8	0,20
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan	4	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	4	0,20
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**								
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1	0,20

2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**							
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak**							
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	2	0,20
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Indeks Kota Layak Anak**							
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha**							
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	41 PD	0 PD	0 PD	0 PD	0%	0	0,00
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1	0,20
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**							
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	60	0,40
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1	0,20
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan perlindungan khusus anak**							
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak**							
2.08.07.2.01.01	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	23 PD	4 PD	20 Orang	0 Orang	0%	4	0,17
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**							
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota **(DAK)**	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Layanan	0 Layanan	0 Layanan	0 Layanan	0%	0	0,00
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**							
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **(DAK)**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0	0,00

Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun berjalan (tahun 2024) belum tercapai secara keseluruhan dikarenakan program dan kegiatan masih sementara dalam proses pelaksanaan, dan realisasi akan nampak pada akhir tahun 2024. Begitu juga tingkat capaian realisasi target Renstra belum bisa tercapai maksimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keberhasilan kinerja OPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah			3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD			13,33	13,33	13,33	14	13,33	13,33	13,33	14	
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta			89,29	89,29	89,29	89,29	89,29	89,29	89,29	89,29	
4	Rasio KDRT			0,07	0,07	0,06	0,06	0,03	0,04	0,06	0,06	
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan			31,38	31,38	31,38	31,38	31,38	31,38	31,38	31,38	
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu			100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit			100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu			100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			41,44	39,44	37,44	35,44	41,44	41,44	37,44	35,44	
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum			100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan			100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan			100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD			0,96	0,96	0,96	0,96	86,06	86,06	0,96	0,96	
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP			0,93	0,93	0,93	0,93	26,06	26,06	0,93	0,93	
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA			1,11	1,11	1,11	1,11	23,17	23,17	1,11	1,11	
16	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina			160	165	170	175	157	384	170	175	
17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			98,05	98,11	98,14	98,21	98,09	98,37	98,14	98,21	
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			67,83	67,93	68,05	68,09	65,36	67,84	68,05	68,09	
19	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			32,97	33,02	33,07	33,12	38,69	28,39	33,07	33,12	
20	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota			0,041	0,036	0,046	0,041	0,030	0,053	0,046	0,041	
21	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			0,071	0,066	0,075	0,071	0,037	0,037	0,075	0,071	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen
3. Belum optimalnya layanan pemenuhan hak anak
4. Masih rendahnya akses ekonomi terhadap perempuan dan kualitas keluarga
5. Belum optimalnya fungsi keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak
6. Masih tingginya tingkat perkawinan usia anak
7. Belum optimalnya data gender dan anak serta sistem data terpilah

Sinkronisasi 53 Program Kerja Wali Kota terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

- Palu Adipura : Tim Perempuan Adipura di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
- Palu Ramah : koordinasi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA), pembinaan puskesmas ramah anak dan sekolah ramah anak
- Palu berbagi : Paket Bantuan Anak Korban Bencana Alam, Anak Korban Kekerasan, Anak Yatim Piatu Terdampak Covid 19 dan Paket Sembako untuk keluarga prasejahtera

- Pengembangan prasarana dan pelestarian seni budaya : pengembangan pusat kreatifitas anak terhadap forum anak
- Palu ramah diffabel : Pendampingan korban kekerasan dan korban diffabel
- Event komunitas tahunan anak muda kota palu : Puncak peringatan Hari Anak Nasional tingkat kota palu
- Palu kota sehat : Pendampingan dan penjangkauan warga binaan di lapas perempuan, pembentukan Perda Perlindungan Perempuan, pendampingan Rumah Aman untuk korban kekerasan, Pendampingan dan penjangkauan warga binaan di lapas anak
- Penguatan UMKM : Praktek Ketrampilan Perempuan di 4 Kecamatan, Penguatan Perempuan Eks Warga Binaan dan Pelatihan Ekonomi Kreatif bagi Kelompok Rentan Transgender (Praktek Salon)

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review terhadap rancangan perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Rancangan perubahan RKPD. Review terhadap rancangan perubahan RKPD dapat dijabarkan pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Nilai SAKIP OPD**	**B**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai SAKIP OPD**	**B**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	210.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	67.045.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.020.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.020.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	510.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	510.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Laporan	1.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Laporan	1.350.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase realisasi keuangan**	**95 %**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase realisasi keuangan**	**95 %**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	28 Org	3.425.303.349	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	28 Org	3.425.303.349	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		
	Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2 Paket	1.175.400	Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2 Paket	1.175.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	17.655.450	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	17.655.450	
	Penyediaan Barang Cetakan dan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	6 Paket	16.248.400	Penyediaan Barang Cetakan dan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	6 Paket	16.248.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.700.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.275.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	2.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Laporan	208.447.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	219.728.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	45.632.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	67.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	478.611.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	433.994.400	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100 %**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100 %**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	270.280.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	320.280.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	16.620.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	16.620.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Paket	17.860.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Paket	15.020.000	
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**98,21 %**		**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**98,21 %**		
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**100 %**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**100 %**		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Palu	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	41 PD	20.233.100	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Palu	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	41 PD	3.308.100	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		**Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**	**100 %**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**	**100 %**		
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	14.519.900	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	3.854.950	

	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		**Rasio KDRT**	**0,06 %**		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**Rasio KDRT**	**0,06 %**		
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**Tersedianya pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**100 %**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Tersedianya pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**100 %**		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	41 PD	16.052.900	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 PD	4.967.500	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		**Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan**	**100 %**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan**	**100 %**		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	80 Org	101.482.850	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	80 Org	147.570.950	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		**Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)**	**68,89 %**		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)**	**68,89 %**		
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Tersedianya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak**	**100 %**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Tersedianya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak**	**100 %**		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 PD	15.238.750	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 PD	9.971.700	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Laporan	19.342.400	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	5.825.600	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	**100 %**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	**100 %**		
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	33.876.875	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.550.950	

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		**Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**100 %**		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**100 %**		
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Tersedianya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak**	**100 %**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Tersedianya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak**	**100 %**		
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	28.623.850	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	21.935.750	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		**Indeks Kota Layak Anak**	**Madya**		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Indeks Kota Layak Anak**	**Madya**		
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		**Tersedianya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha**	**100 %**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Tersedianya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha**	**100 %**		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	29.220.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.274.100	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		**Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**100 %**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**100 %**		
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Org	100.064.350	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Org	97.384.200	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.070.900	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.110.900	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		**Cakupan perlindungan khusus anak**	**100 %**		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**Cakupan perlindungan khusus anak**	**100 %**		
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**Tersedianya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak**	**100 %**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Tersedianya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak**	**100 %**		
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Palu	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	20 Org	20.787.050	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Palu	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	20 Org	6.706.550	
				TOTAL USULAN PAGU ANGGARAN	**4.923.411.524**					**4.923.411.249**	**-**

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat baik dari LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui kegiatan Musrenbang baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan tahun 2024 tidak memperoleh masukan/usulan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALU

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu mengalami pergeseran anggaran, dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terkait adanya kebijakan dari Kementerian maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu sebelum dan setelah perubahan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu sebelum dan setelah perubahan Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
	BELANJA				**5.399.367.974**		**4.923.411.249**	**(475.956.725)**	**-8,82%**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP OPD**			**4.923.154.024**		**4.607.949.999**	**(315.204.025)**	**-6,40%**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**3.090.000**		**69.925.000**	**66.835.000**	**2163%**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	210.000	7 Dokumen	67.045.000	66.835.000	31826%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	1.020.000	1 Dokumen	1.020.000	-	0%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	510.000	1 Dokumen	510.000	-	0%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	2 Laporan	1.350.000	2 Laporan	1.350.000	-	0%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase realisasi keuangan**			**3.680.559.174**		**3.425.303.349**	**(255.255.825)**	**-6,94%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Kota Palu	28 Orang	3.680.559.174	28 Orang	3.425.303.349	(255.255.825)	-6,94%	

	Administrasi Umum Perangkat	**Persentase pemenuhan kebutuhan**			**360.501.250**		**259.607.250**	**(100.894.000)**	**-27,99%**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Kota Palu	2 Paket	1.175.400	2 Paket	1.175.400	-	0%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	2 Paket	7.000.000	0 Paket	-	(7.000.000)	-100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Kota Palu	33 Paket	17.655.450	33 Paket	17.655.450	-	0%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Kota Palu	6 Paket	16.248.400	6 Paket	16.248.400	-	0,00%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Kota Palu	2 Dokumen	2.700.000	2 Dokumen	2.700.000	-	0%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Kota Palu	12	7.275.000	7 Laporan	2.100.000	(5.175.000)	-71,13%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	33 Laporan	308.447.000	28 Laporan	219.728.000	(88.719.000)	-29%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**			**524.243.600**		**501.194.400**	**(23.049.200)**	**-4,40%**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	3 Laporan	45.632.000	3 Laporan	67.200.000	21.568.000	47%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	478.611.600	12 Laporan	433.994.400	(44.617.200)	-9,32%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**			**354.760.000**		**351.920.000**	**(2.840.000)**	**-1%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	2 Unit	320.280.000	2 Unit	320.280.000	-	0%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	3 Unit	16.620.000	3 Unit	16.620.000	-	0%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	6 Paket	17.860.000	3 Paket	15.020.000	(2.840.000)	-16%	

	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**			**34.753.000**		**7.163.050**	**(27.589.950)**	**-79,39%**	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**			**20.233.100**		**3.308.100**	**(16.925.000)**	**-83,65%**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	41 PD	20.233.100	41 PD	3.308.100	(16.925.000)	-84%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**			**14.519.900**		**3.854.950**	**(10.664.950)**	**-73%**	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Palu	1 Dokumen	14.519.900	1 Dokumen	3.854.950	(10.664.950)	-73%	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Rasio KDRT**			**167.535.750**		**152.538.450**	**(14.997.300)**	**-8,95%**	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya pencegahan kekerasan terhadap perempuan**			**16.052.900**		**4.967.500**	**(11.085.400)**	**-69,06%**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	41 PD	16.052.900	20 PD	4.967.500	(11.085.400)	-69,06%	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan**			**151.482.850**		**147.570.950**	**(3.911.900)**	**-2,58%**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kota Palu	80 Orang	151.482.850	80 Orang	147.570.950	(3.911.900)	-2,58%	

	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)**			**79.158.650**		**21.348.250**	**(57.810.400)**	**-73%**	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak**			**34.581.150**		**15.797.300**	**(18.783.850)**	**-54%**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan	Kota Palu	8 PD	15.238.750	4 PD	9.971.700	(5.267.050)	-35%	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	8 Laporan	19.342.400	4 Laporan	5.825.600	(13.516.800)	-69,88%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**			**44.577.500**		**5.550.950**	**(39.026.550)**	**-87,55%**	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	8 Dokumen	44.577.500	1 Dokumen	5.550.950	(39.026.550)	-87,55%	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**			**28.623.850**		**21.935.750**	**(6.688.100)**	**-23,37%**	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak**			**28.623.850**		**21.935.750**	**(6.688.100)**	**-23,37%**	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Palu	2 Dokumen	28.623.850	2 Dokumen	21.935.750	(6.688.100)	-23,37%	

	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Indeks Kota Layak Anak**			**145.355.650**		**105.769.200**	**(39.586.450)**	**-27%**	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha**			**39.220.400**		**6.274.100**	**(32.946.300)**	**-84,00%**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 Dokumen	39.220.400	1 Dokumen	6.274.100	(32.946.300)	-84,00%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**			**106.135.250**		**99.495.100**	**(6.640.150)**	**-6,26%**	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	33 Orang	100.064.350	33 Orang	97.384.200	(2.680.150)	-2,68%	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 Dokumen	6.070.900	1 Dokumen	2.110.900	(3.960.000)	-65,23%	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Cakupan perlindungan khusus anak**			**20.787.050**		**6.706.550**	**(14.080.500)**	**-67,74%**	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak**			**20.787.050**		**6.706.550**	**(14.080.500)**	**-67,74%**	
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Palu	20 Org	20.787.050	20 Org	6.706.550	(14.080.500)	-67,74%	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penyusunan rancangan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan dokumen RENJA ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

d. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan dokumen Rencana Kinerja (RENJA) Perubahan Dinas Lingkungan hidup Kota Palu Tahun 2024 dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa landasan hukum dengan uraian sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran

Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; dan
31. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu;
32. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Perubahan adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah:

a. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
b. Dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
c. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu tahun 2024 ini terdiri dari 4 (empat) bab. Disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II
- 2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
- 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

BAB IV PENUTUP
- 4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 4.2 Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup**								
2.11	**Dinas Lingkungan Hidup**								
2:11:01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai SAKIP OPD							
2.11 . 01 . 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2.11 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	8 Dokumen	57%
2.11 . 01 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	7 Dokumen	117%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.11 . 01 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	7 Dokumen	117%
2.11 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	42 Dokumen	58%
2.11 . 01 . 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
2.11 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	534 orang	247 Orang	87 Orang	81 Orang	93,1%	328 Orang	133%
2.11 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50%	6 Laporan	61%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.11 . 01 . 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
2.11 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	9 Paket	4 Paket	1 Paket	8%	10 Paket	33%
2.11 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	25 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	27 Paket	245%
2.11 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	12 Paket	4 paket	3 paket	75%	15 Paket	60%
2.11 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65 Dokumen	13 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	8%	14 Dokumen	22%
2.11 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	31 Laporan	31 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	125%	36 Laporan	116%
2.11 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131 Laporan	18 Laporan	17 Laporan	5 Laporan	29%	23 Laporan	18%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.11 . 01 . 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
2.11 . 01 . 2.07 . 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	6 Unit	3 Unit	-	0%	6 Unit	37,5%
2.11 . 01 . 2.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	1 Unit	25%	1 Unit	
2.11 . 01 . 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
2.11 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	30 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	36 Laporan	50%
2.11 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	30 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	36 Laporan	50%
2.11 . 01 . 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.11 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	353 Unit	235 Unit	57 Unit	23 Unit	40%	257 Unit	73%
2.11 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	326 Unit	70 Unit	54 Unit	9 Unit	17%	79 Unit	24%
2.11 . 01 . 2.09 . 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	218 Unit	12 Unit	28 Unit	208%	246 Unit	410%
2.11 . 02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup**							
2.11 . 02 . 2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.11 . 02 . 2.01 . 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	16 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	-	0%	3 Dokumen	19%
2.11 . 03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								
2.11 . 03 . 2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								
2.11 . 03 . 2.01 . 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	8 Dokumen	7 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	7 Dokumen	86%
2.11 . 03 . 2.01 . 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.11 . 03 . 2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								
2.11 . 03 . 2.02 . 01	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	6 Titik	3 Titik	1 Titik	1 Titik	100%	4 Titik	67%
2.11 . 03 . 2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								
2.11 . 03 . 2.03 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	11 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	-	0%	8 Dokumen	73%
2.11 . 04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.11 . 04 . 2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**								
2.11 . 04 . 2.01 . 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Ha	78,5 Ha	5 Ha	11,5 Ha	230%	90 Ha	100%
2.11 . 04 . 2.01 . 05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Ha	46 Ha	33 Ha	30,5 Ha	92%	76,5 Ha	100%
2.11 . 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**								
2.11 . 06 . 2.01	**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.11 . 06 . 2.01 . 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	17 Dokumen	10 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen	300%	19 Dokumen	112%
2.11 . 06 . 2.01 . 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	10 Laporan	1 Laporan	11 Laporan	100%	21 Laporan	350%
2.11 . 08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								
2.11 . 08 . 2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	6 Lembaga	2 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	3 Lembaga	50%
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**								
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**								
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6 Ton	122.419,17 Ton	1 Ton	53538,2 Ton	100%	175.957,37 Ton	100%
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6 Unit	18 Unit	1 Unit	9 Unit	100%	27 Unit	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Analisis kinerja pelayanan DLH merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan DLH sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu tahun 2021-2026 ditentukan 5 (lima) indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang akan dicapai dari tahun 2021 hingga 2026. Indikator kinerja tersebut mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2021 – 2026.

Dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa pencapaian pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu pada tahun 2024 termuat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kualitas Udara			85,88	85,98	86,08	86,18	90,67	-	90,77	90,87	
2	Indeks Kualitas Air			65,39	65,49	65,59	65,69	52	-	65,49	65,59	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan			69,55	70,73	71,92	73,10	75,75	-	75,85	75,95	
4	Nilai Evaluasi SAKIP			BB	A	A	A	BB	-	A	A	
5	Indeks Pelayanan Publik			C	B-	B	B	C	-	B-	B	
6			Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	17	18	19	20	25	-	18	19	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7			Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	83%	83%	84%	85%	-	-	84%	85%	
8			Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	20,6	22,6	24,9	27,4	-	-	24,9	27,4	
9			Persentase sampah yang terangkut	100	100	100	100	100	-	100	100	
10			Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat	786,1	822,6	872,2	872,2	-	-	872,2	872,2	
11			Persentase jumlah sampah yang tertangani	72	71	70	70	96,47	-	70	70	
12			Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	70,95%	69,92%	68,86%	68,86%	75%	-	68,86%	68,86%	
13			Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0	0	0	0	-	-	0	0	
14			Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	74,6	74,94	76,62	75,62	-	-	76,62	75,62	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu tahun 2021-2026 mengacu kepada pencapaian visi misi Pemerintah Kota Palu tahun 2021-2026, yaitu :

Tujuan 1

- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana

  Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, didukung sasaran Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator sasaran :

  - Indeks Kualitas Udara
  - Indeks Kualitas Air
  - Indeks Tutupan Lahan

Tujun 2

- Mewujudkan reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

  Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, didukung sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator sasaran :

  - Nilai Evaluasi SAKIP
  - Indeks Pelayanan Publik.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Perumusan program dan kegiatan sangat penting dalam Pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan rencana program sebagai berikut :

Tabel 3.1
Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Palu**	**Nilai SAKIP OPD**	**BB**	**12.972.052.914**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Palu**	**Nilai SAKIP OPD**	**BB**	**12.972.052.914**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**109.456.750**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**90.203.750**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	91.997.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	73.869.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.586.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.586.000	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.503.050	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.503.050	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.370.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.245.700	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase realisasi keuangan**	**95%**	**8.870.444.994**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase realisasi keuangan**	**95%**	**8.522.913.817**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 orang/bulan	8.866.291.644	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 orang/bulan	8.518.160.467	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	4.153.350	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	4.753.350	
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**512.485.850**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**805.067.500**	
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	40.566.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	18.301.500	
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.036.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	102.695.700	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	52.185.950	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	67.127.350	
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1.000.000	
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	39.123.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	39.123.000	
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 Laporan	297.572.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 Laporan	576.820.000	
1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**100%**	**26.206.200**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**100%**	**5.706.200**	
1.4.1	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	3.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1.500.000	
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	23.206.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.206.200	
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1.986.404.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1.927.573.500**	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	307.416.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	323.990.300	
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.660.988.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.603.583.200	
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**1.485.054.320**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**1.475.854.320**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	103 Unit	927.661.320	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	103 Unit	926.461.320	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	380.023.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	365.623.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	177.370.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	183.770.000	
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Kota Palu	**Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup**	**100%**	**440.489.000**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Kota Palu	**Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup**	**100%**	**423.289.700**	
2.1	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**100%**	**440.489.000**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**100%**	**423.289.700**	
2.1.1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	440.489.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	423.289.700	
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Palu**	**Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**100%**	**766.522.912**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kota Palu**	**Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**100%**	**631.861.550**	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.1	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**100%**	**662.502.122**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**100%**	**527.840.910**	
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Palu	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	148.749.900	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Palu	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	148.749.900	
3.1.2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 Dokumen	513.752.222	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 Dokumen	379.091.010	
3.2	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**100%**	**51.810.860**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**100%**	**51.810.860**	
3.2.1	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Palu	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	51.810.860	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Palu	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	51.810.860	
3.3	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**100%**	**52.209.930**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**100%**	**52.209.930**	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	52.209.930	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	52.209.930	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kota Palu**	**Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**100%**	**8.850.869.650**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kota Palu**	**Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**100%**	**9.599.384.650**	
4.1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**100%**	**8.850.869.650**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**100%**	**9.599.384.650**	
4.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Palu	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Ha	2.045.950.450	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Palu	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Ha	2.254.067.250	
4.1.2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kota Palu	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	6.804.919.200	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kota Palu	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	7.345.317.400	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Kota Palu**	**Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**100%**	**180.413.050**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Kota Palu**	**Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**100%**	**124.653.050**	
5.1	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**180.413.050**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**124.653.050**	
5.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Palu	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	156.693.050	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Palu	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	104.293.050	
5.1.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan	Kota Palu	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	1 Badan Usaha	23.720.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan	Kota Palu	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Badan Usaha	20.360.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					Pengelolaan Lingkungan Hidup					
6	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kota Palu**	**Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**100%**	**2.387.639.400**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kota Palu**	**Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**100%**	**2.740.259.400**	
6.1	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**2.387.639.400**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**2.740.259.400**	
6.1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	5 Lembaga	2.387.639.400	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	Kota Palu	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5 Lembaga	2.740.259.400	
7	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Kota Palu**	**Persentase jumlah sampah yang tertangani**	**70%**	**34.967.130.210**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Kota Palu**	**Persentase jumlah sampah yang tertangani**	**70%**	**39.313.987.460**	
7.1	**Pengelolaan Sampah**	**Kota Palu**	**Terlaksananya pengelolaan sampah**	**72%**	**34.967.130.210**	**Pengelolaan Sampah**	**Kota Palu**	**Terlaksananya pengelolaan sampah**	**72%**	**39.313.987.460**	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.1.1	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kota Palu	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	50.0000 Ton	23.192.643.860	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kota Palu	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	50.000 Ton	26.314.003.460	
7.1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	11.774.486.350	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	12.999.984.000	

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah perubahan. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Perubahan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
[1]					[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
2	**11**				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup**				**65.660.754.947**		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**Kota Palu**	**BB**	**12.972.052.914**	**APBD**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**4 Dokumen**	**90.203.750**	**APBD**	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	73.869.000	APBD	
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	6.586.000	APBD	
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	3.503.050	APBD	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
[1]					[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Laporan	6.245.700	APBD	
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	**Kota Palu**	**95%**	**8.522.913.817**	APBD	
2	11	01	2.02	06	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	87 orang/bulan	8.518.160.467	APBD	
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 Laporan	4.753.350	APBD	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**805.067.500**	**APBD**	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	10 Paket	18.301.500	APBD	
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	102.695.700	APBD	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	5 Paket	67.127.350	APBD	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
[1]					[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	5 Dokumen	1.000.000	APBD	
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 Laporan	39.123.000	APBD	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	39 Laporan	576.820.000	APBD	
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**5.706.200**	**APBD**	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	2 Unit	1.500.000	APBD	
		01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	2 Unit	4.206.200	APBD	
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**1.927.573.500**	**APBD**	
2	05	01	15	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	323.990.300	APBD	
2	05	01	15	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	1.603.583.200	APBD	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
[1]					[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**1.475.854.320**	**APBD**	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	103 Unit	926.461.320	APBD	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	11 Unit	365.623.000	APBD	
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	10 Unit	183.770.000	APBD	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Kota Palu**	**100%**	**423.289.700**	**APBD**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
[1]					[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Kota Palu**	**100%**	**423.289.700**	**APBD**	
2	11	02	2.01	01	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 Dokumen	423.289.700	APBD	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**Kota Palu**	**100%**	**631.861.550**	**APBD**	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Kota Palu**	**100%**	**527.840.910**	**APBD**	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Palu	1 Dokumen	148.749.900	APBD	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
[1]					[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kota Palu	12 Dokumen	379.091.010	APBD	
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**51.810.860**	**APBD**	
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kota Palu	1 Titik	51.810.860	APBD	
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**52.209.930**	**APBD**	
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Kota Palu	1 Dokumen	52.209.930	APBD	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
[1]					[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Kota Palu**	**100%**	**9.599.384.650**	**APBD**	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**9.599.384.650**	**APBD**	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	5 Ha	2.254.067.250	APBD	
				05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	10 Unit	7.345.317.400	APBD	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**Kota Palu**	**100%**	**124.653.050**	**APBD**	
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**124.653.050**	**APBD**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
[1]					[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kota Palu	1 Dokumen	104.293.050	APBD	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 Badan Usaha	20.360.000	APBD	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**Kota Palu**	**100%**	**2.740.259.400**	**APBD**	
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**2.740.259.400**	**APBD**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
[1]					[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kota Palu	5 Lembaga	2.740.259.400	APBD	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase jumlah sampah yang tertangani**	**Kota Palu**	**70%**	**39.313.987.460**	**APBD**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Terlaksananya pengelolaan sampah**	**Kota Palu**	**72%**	**39.313.987.460**	**APBD**	
2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kota Palu	50.000 Ton	26.314.003.460	APBD	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Palu	1 Unit	12.999.984.000	APBD	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Palu Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Kota Palu Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Tahun 2024 merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu menyusun Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Tahun 2023.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;
3. Penyusunan Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah;
5. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;
2. Perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu;
3. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu memperhatikan Renja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan

kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan nepotisme (lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851):
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesPia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Palu (Lembaran

Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor);

17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Palu tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

21. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
22. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.
23. Peraturan Walikota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
24. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14)
25. Peraturan walikota Palu Nomor 15 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk memberikan arahan dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Palu:

1. Sebagai bahan perencanaan selama 1 tahun;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2024;
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2024;

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2021-2026.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.
- 2.3 Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Palu

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

3.1 Perubahan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu

3.2 Perubahan Indikator Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu

3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu 2016-2021

Sebagaimana Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

Berdasarkan evaluasi kinerja berbasis web (E-Mep), laporan pelaksanaan APBD sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024 (selain belanja gaji), maka perbandingan antara target kinerja fisik dan keuangan dengan realisasi fisik dan keuangan adalah sebagai berikut:

Target dan Capaian Fisik/Keuangan Triwulan II

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1.	Fisik	57.57	57,52
2.	Keuangan	57,67	43,90

Kemudian terkait dengan capaian kinerja program dapat kami sampaikan sebagaimana tabel berikut:

Target dan Realisasi Kinerja Program s.d Triwulan II Tahun 2024

NO	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2024 (%)	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2024	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	58,86	44,52	Terdapat beberapa target kinerja yang baru selesai di akhir tahun
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Rasio penduduk berKTP el per satuan penduduk	%	42,13	42,13	Terdapat beberapa target kinerja yang baru selesai di akhir tahun
3.	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian Cakupan Penerbitan Akta Perceraian Kepemilikan akta kelahiran Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil Persentase pemenuhan kebutuhan pencatatan sipil	%	49,40	45,94	Terdapat beberapa target kinerja yang baru selesai di akhir tahun

		masyarakat				
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaaninformasi administrasikependudukan	%	3,18	3,18	Terdapat beberapa target kinerja yang baru selesai di akhir tahun
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	0	0	Program Dan kegiatan akan dilaksanakan pada TW III dan IV

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					target dan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(10/4)
2 2.12	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN PELAYANAN DASAR Administrasi**								
2. 12.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	Nilai SAKIP A	100%						
2. 12. 01. 2. 01	**Administrasi Perkantoran Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	75%	8 dokumen	160,00%
2. 12. 01.2. 01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	0,00%
01.01	Penyusunan Dokumen Perecanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	0,00%
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	0,00%
01.03		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dokumen SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	0,00%

2. 12. 01.2. 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**													
02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	36/60	orang/bulan	36/12	orang/bulan	36/12	orang/bulan	36/6	orang/bulan	100%	36/6	bulan	40,00%
02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	laporan	1	laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	0	Dokumen	0,00%
2. 12. 01.2. 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**													
05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	20	Orang	7	Orang	0	Orang	0%	0	Orang	00,00%
2. 12. 01.2. 05	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**													
06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	paket	20	paket	7	paket	0	paket	0%	0	item	00,00%
06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	Paket	13	Paket	13	paket	0	paket	0%	0	paket	00,00%
06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96	Paket	96	Paket	0	paket	0	item	0%	0	item	00,00%
06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13	paket	13	paket	13	paket	13	paket	50%	11	paket	50 %
06 .08	Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	100%
06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rpat Koordniasi dan Konsultasi SKPD												
2. 12. 01.2. 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah**													
07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	48	unit	48	unit	0	unit	0	unit	0.0%	0	unit	00,00%
2. 12. 01. 2. 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													
08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	Dokumen	100%	8	Bulan	66,67%
08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	6	Dokumen	50%	6	Bulan	50,00%

2. 12. 01. 2. 09	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**													
09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	156	Bulan	156	unit	100	Bulan	12	Dokumen	100%	12	Bulan	100,00%
09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit	0	Unit	30	Unit	0	Unit	100%	0	Unit	00,00%
09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Pkt	0	Pkt	1	Pkt	0	Pkt	0%	0	Pkt	00,00%
2.12.02	**Program Pendaftaran Penduduk**		100%											
2. 01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**													
02.01.01	Pendataan Penduduk Non permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil pendataan penduduk Non permanen dan Rentan administrasi Kependudukan Pendaftaran Penduduk	2400	dokumen	2400	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	0	Dokumen	00,00%
02.01.02	Pencatatan, Penataausahaan dan Penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	7200	dokumen	7200	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	0	Dokumen	00,00%
02.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	24000	dokumen	24000	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	0	Dokumen	00,00%
2. 01. 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12000	laporan	1200	laporan	1200	laporan	1300	Dokumen	100%	1000	Dokumen	100,00%
02.01.05	Pencatatan, Penataausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	24000	laporan	24000	laporan	0	Laporan	0	laporan	0%	0	laporan	00,00%
2. 02 02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk												
02 2.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	11	dokumen	11	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	0	dokumen	00,00%
2. 12. 03	**Program Pencatatan Sipil**		100%											
2. 01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**													

2. 01 01	Pencatatan, Penataushaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	9000	Dokumen Pencatatan Sipil	9000	Dokumen Pencatatan Sipil	4500	Dokumen Pencatatan Sipil	4500	Dokumen Pencatatan Sipil	50%	4500	Dokumen Pencatatan Sipil	50,00%					
2. 01 0. 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	2	layanan	50%	20000	Dokumen Akta Kelahiran	50,00%					
03.02.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**																	
	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	12	Dokumen pencatatan sipil	12	Dokumen pencatatan sipil		0	0		0	0		00,00%					
2.012.004	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**																		
2. 12. 04. 2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**																		
2.01.01	Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2	Data Agregat	1	Data Agregat	1	Data Agregat	1	Data Agregat	100%	2	Data Agregat	100,00%					
2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data	11	Opd	11	Opd	11	Opd	0	Opd	0%	11	Opd	100,00%					
2.12.05	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**		100%																
05. 2. 01	**Penyusunan Profil Kependudukan**																		
05. 2. 01. 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhabn Yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	75	Buku	38	Buku	37	Buku	37	Buku	100%	75	Buku	100,00%					

Hasil evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sampai dengan triwulan II untuk capaian kinerja fisik dan anggaran Hampir mencapai target yang diinginkan sehingga realisasi dapat dikategorikan baik.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kota Palu

Administrasi Kependudukan Memegang peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi hasil pembangunan baik bagi Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat oleh karena itu ketersediaan Dokumen dan Data Kependudukan di semua tingkat Pemerintahan Kota Palu menjadi faktor kunci keberhasilan bagi Pembangunan di Kota Palu. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk menetap keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama dan memilih tempat tinggal di wilayah NKRI dan meninggalkannya, serta berhak kembali di daerah asal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan satu-satunya OPD pelayanan di Kota Palu yang melayani masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukannya. Sebagai unit pelayanan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kinerja sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakannya pelayanan kependudukan secara online menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bekerja sama dengan Rumah sakit /Puskesmas, OPD dan Kecamatan;
2. Telah dilaksanakan Stelsel Aktif Pemerintah dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem pelayanan keliling;
3. Telah dilakukannya percepatan pelayanan perekaman KTP Elektronik di 8 (delapan) Kecamatan dan kelurahan-kelurahan,
4. sehingga masyarakat lebih terbantu dalam pengurusan KTP Elektronik;
5. Penggunaan Kertas putih sudah pada 18 dokumen kependudukan yang diterbitkan;
6. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sudah pada 18 dokumen kependudukan yang diterbitkan;
7. Pemanfaatan data Kependudukan;
8. Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan Permendagri 102 tahun 2019;
9. Pemanfaatan hak akses bagi Instansi yang melakukan PKS;
10. Telah dilaksanakan Inovasi Pelayanan Mobile terintegrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu.

Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu berdasarkan sasaran dan target renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu periode sebelumnya (2016-2021), pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2023 (periode tahun lalu) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	SPM/Standar Nasonal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				REALISASI CAPAIAN		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan Masyrakat Kota Palu			83,25	89,35	95,45		100	100	95,45	100	
	Indeks kepuasan masyarakat			80	80	85		90	95	85	90	
	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk			0,671	0,668	0,665		0,662	0,659	0,665	0,662	
	Rasio anak (0-18 tahun) beraktekelahiran			100	100	100		100	100	100	100	
	Ketersediaan database kependudukan skala kota			Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	
	Cakupan penerbitan akta kelahiran			92%	184%	368%		736%	1472%	368%	736%	
	Perekaman KTP elektronik			100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Kepemilikan akta kelahiran			100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama			22	22	22		22	22	22	22	
	Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian			100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Rasio anak (0-17 tahun kurang satu hari) ber-KIA			30%	30%	50%		50%	50%	50%	50%	
	Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah			100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Penerbitan Akta Perceraian			100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu berdasarkan sasaran dan target renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu periode sebelumnya (2016-2021), pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2023 (periode tahun lalu) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu merupakan hasil telaahan Renstra Dirjen Kependudukan dan Renstra Provinsi Sulteng, serta hasil telaahan RTRW dan KLHS, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Gambaran pelayanan OPD;
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra OPD;
3. Implikasi RT/RW bagi pelayanan OPD dan;
4. Impilkasi KLHS bagi pelayanan OPD;

Dengan demikian maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota palu sebagai berikut:

1. Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum maksimal 100%
2. Kepemilikan Akte kelahiran Usia 0-18 tahun belum mencapai target Nasional
3. Belum di manfaatkan data kependudukan di segala urusan Pelayanan Publik Perencanaan Pembangunan, Demokrasi, secara maksimal

4. Masih Rendahnya Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
5. Pemanfaatan teknologi dalam percepatan pelayanan administrasi kependudukan belum maksimal
6. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan dilapangan.
7. Adanya warga/masyarakat yang mengangap akta kematian tidak penting, sehingga utuk penggurusannya nanti terkait dengan hak waris.
8. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan mobile pelayanan pada masyarakat

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari tingkat Pusat, Provinsi maupun Daerah, Perubahan RKPD tahun 2024 ditetapkan lebih mengarah kepada peningkatan bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan dan perindustrian, perhubungan dan lingkungan hidup.

Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan Perubahan RKPD, maka penetapan skala prioritas pembangunan akan

menjadi lebih mudah dan jelas dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi maupun pelaksanaan perencanaan.

Adapun Misi yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu adalah misi ke empat (4) yaitu:

Menciptakan Pemerintahan Yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani.

Melalui misi ini, Pemerintah Kota Palu mengharapkan Percepatan terwujudnya tujuan strategis yang meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam mendukung pencapaian misi tersebut yang terkait dengan tugas dan sfungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu yaitu melalui sasaran strategis yaitu Optimalisasi pelayanan publik berbasis IT dengan arah kebijakan (1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan serta standar operasional prosedur (SOP), (2) Mewujudkan pelayanan publik yang berstandar internasional, (3) Membangun one touch info Kota Palu dalam penyediaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

Kode Rekening						RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
2	**12**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					
2	**12**	**2.12.0.00.0.00 .01.00**				**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	Kota Palu				**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	Kota Palu				
2	**12**	**2.12.0.00.0.00 .01.00**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	Kota Palu	Nilai sakip	A	**6.658.607.030**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	Kota Palu	Nilai sakip	BB	**6.663.662.536**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00 .01.00**	**01**	**2.01**		**Perencanaan,Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Presentase Perencanaan Penganggaran dan Evaliasi Kinerja Perangkat Daearh		**107.253.150**	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Presentase Perencanaan Penganggaran dan Evaliasi Kinerja Perangkat Daearh		112.615.808	
2	12	2.12.0.00.0.00. 01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18.365.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18.365200	
2	12	2.12.0.00.0.00. 01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.439.950	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.439.950	
2	12	2.12.0.00.0.00. 01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.000.000	

Kode Rekening						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB	LOKASI	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dokumen SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Laporan	68.448.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dokumen SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Laporan	68.448.000	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Palu	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	**3.992.394.730**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Palu	Cakupan Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	95%	**3.997.450.236**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/ bulan	3.979.578.480	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/ bulan	3984.633.986	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.816.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.816.250	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota palu	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota palu	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	80 org	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	80 org	-	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Palu	Cakupan Umum Perangkat Daerah	100%	**877.115.150**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Palu	Cakupan Umum Perangkat Daerah	100%	**920.970.908**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor		Jumlah penyediaan komponen inst Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	3.662.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor		Jumlah penyediaan komponen inst Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	7 Paket	3.662.800	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Unit	6.114.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Unit	6.114.800	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96 paket	553.037.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96 paket	553.037.800	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	42.371.750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	42.371.750	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.050.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.050.000	

Kode Rekening						RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	61.738.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	61.738.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	206.140.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	206.140.000	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Palu	Cakupan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Palu	Cakupan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51 Buah	0	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51 Buah	-	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Palu	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**1.170.724.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Palu	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**1.170.724.000**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	168.462.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	168.462.800	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umur Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.002.261.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umur Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.002.261.200	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Palu	Cakupan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	**511.120.000**	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Palu	Cakupan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	**511.120.000**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	312.320.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	312.320.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	138 unit	13.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	138 unit	13.800.000	
		2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Pkt	185.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Pkt	185.000.000	

Kode Rekening						RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PENTING
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	Kota Palu	Cakupan Penerbitan Akta Perceraian Kepemilikan Presentase/Cakpan Penerbitan Akta Pencatatan sipil/presentase pemenuhan kebutuhan pencatatan sipil masyrakat/cakupan kepemilikan akta perkawinan/buku nikah/cakupan kepemilikan kutipan akta kematian	66,8%	**109.050.000**	**Program Pendaftaran Penduduk**	Kota Palu	Cakupan Penerbitan Akta Perceraian Kepemilikan Presentase/Cakpan Penerbitan Akta Pencatatan sipil/presentase pemenuhan kebutuhan pencatatan sipil masyrakat/cakupan kepemilikan akta perkawinan/buku nikah/cakupan kepemilikan kutipan akta kematian	66,8%	**109.050.000**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Kota Palu	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100%	**109.050.000**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Kota Palu	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100%	**109.050.000**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	12000 Dokumen	109.050.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	12000 Dokumen	109.050.000	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**03**			**Program Pencatatan Sipil**	Kota Palu		100%	**108.211.750**	**Program Pencatatan Sipil**			100%	**108.211.750**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kota Palu		100%	**108.211.750**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**			100%	**108.211.750**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Pencatatan, Penataushaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	9000 dokumen	17.580.000	Pencatatan, Penataushaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	9000 dokumen	17.580.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 layanan	90.631.750	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 layanan	90.631.750	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Kota Palu	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	**42.550.000**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	**42.550.000**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Kota Palu	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	**28.800.000**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	**42.550.000**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	25.000.000	Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	28.800.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan data Kependu		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	13 dokumen	3.800.000	Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	13 dokumen	25.000.000	

Kode Rekening						RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PENTING
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Kota Palu	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	**13.750.000**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	**13.750.000**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.03	03	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	13.750.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	13.750.000	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**05**			**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	Kota Palu	**Cakupan pengelolaan profil kependudukan**	100%	**24.420.000**	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**		**Cakupan pengelolaan profil kependudukan**	100%	**24.420.000**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**05**	**2.01**		Penyusunan Profil Kependudukan		Cakupan Penyusunan Profil Kependudukan	100%	**24.420.000**	Penyusunan Profil Kependudukan		Cakupan Penyusunan Profil Kependudukan	100%	**24.420.000**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhabn Yang lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	24.420.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhabn Yang lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	**24.420.000**	
								J U M L A H		**6.942.838.780**					**6.947.894.286**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat, perencanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan meskipun hanya sebagian dari usulan masyarakat namun secara keseluruhan sebenarnya telah sejalan dan menggambarkan keinginan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan oleh Pemerintah kota palu ditingkat kecamatan yang secara khusus ditujukan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tidak ada. Dengan demikian pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota palu dapat diasumsikan tidak menemui kendala bagi masyarakat umum, akan tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota palu tetap terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024, maka indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun sebelum dan sesudah Perubahan 2024 dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Sasaran 2024

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	TARGET PERANGKAT DAERAH	
				Sebelum Perubahan (%)	Setelah Perubahan (%)
1.	Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Presentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Masyarakat Kota Palu	95,45	95,45
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85

3.2 Perubahan Indikator Kinerja Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024, maka indikator kinerja program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Program Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Program Prioritas (53 Program)Pembangunan	Indikator Kinerja program	Satuan	Target RPJMD	Target Kinerja Program Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten /Kota	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	44,52
2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Rasio penduduk berKTP el per satuan pendduk	%	100,00	42,13
3	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian Cakupan Penerbitan Akta Perceraian Kepemilikan akta kelahiran Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil Persentase pemenuhan kebutuhan pencatatan sipil masyarakat	%	100,00	45,94
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	%	100	3,18
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	100	0

Susunan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 900.1,15.5-1317 2023

Kode Rekening						PROGRAM DAN KEGIATAN
2	**12**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
2	**12**	**2.12.0.00.0.00. 01.00**				**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	**12**	**2.12.0.00.0.00. 01.00**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**
2	**12**	**2.12.0.00.0.00. 01.00**	**01**	**2.01**		**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
2	12	2.12.0.00.0.00. 01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	12	2.12.0.00.0.00. 01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	12	2.12.0.00.0.00. 01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2	12	2.12.0.00.0.00. 01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dokumen SKPD
2	**12**	**2.12.0.00.0.00. 01.00**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
2	12	2.12.0.00.0.00. 01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kode Rekening						PROGRAM DAN KEGIATAN
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umur Kantor
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kode Rekening						PROGRAM DAN KEGIATAN
2	**12**	**2.12.0.00.0.0 0.01.00**	**03**			**Program Pencatatan Sipil**
2	**12**	**2.12.0.00.0.0 0.01.00**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**
2	12	2.12.0.00.0.0 0.01.00	03	2.01	01	Pencatatan, Penataushaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
2	12	2.12.0.00.0.0 0.01.00	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
2	**12**	**2.12.0.00.0.0 0.01.00**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
2	**12**	**2.12.0.00.0.0 0.01.00**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**
2	12	2.12.0.00.0.0 0.01.00	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan
2	12	2.12.0.00.0.0 0.01.00	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan
2	**12**	**2.12.0.00.0.0 0.01.00**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
2	12	2.12.0.00.0.0 0.01.00	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	**12**	**2.12.0.00.0.0 0.01.00**	**05**			**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**
2	**12**	**2.12.0.00.0.0 0.01.00**	**05**	**2.01**		Penyusunan Profil Kependudukan
2	12	2.12.0.00.0.0 0.01.00	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhabn Yang lain

Tabel 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024
KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Kode Rekening						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024							CATATAN PENTING
									RENJA 2024		APBD 2024		PERUBAHAN RENJA 2024		Bertambah / berkurang		
									TARGET	PAGU INDIKATIF	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	Rp	%	
1						2	3	4	5	6			7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
2	**12**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**											
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**				**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		Kota Palu		**6.475.144.253**		**6.918.636.062**		**6.942.838.780**	**24.202.718**	0,35	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	Nilai Sakip A	Kota Palu		**6.028.602.253**		**6.540.164.112**		**6.658.607.030**	**118.442.918**	1.81	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.01**		**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		4 Dokumen	**101.613.150**		**101.613.150**	4 Dokumen	**107.253.150**	**5.640.000**	5,55	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	18.365.200		18.365.200	1 Dokumen	18.365.200	-	-	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD		1 Dokumen	11.439.950		11.439.950	1 Dokumen	11.439.950	-	-	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		1 Dokumen	9.000.000		9.000.000	1 Laporan	9.000.000	-	-	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dokumen SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		1 Laporan	62.808.000		62.808.000	95%	68.448.000	**5.640.000**	8 ,98	

Kode Rekening						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024							CATATAN
									RENJA 2024		APBD 2024		PERUBAHAN RENJA 2024		Bertambah / berkurang		
									TARGET	PAGU INDIKATIF	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	Rp	%	PENTING
1						2	3	4	5	6			7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	**3.895.998.703**	**95%**	**4.087.474.362**	95%	**3.992.394.730**	**95.079.632**	**2,33**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 orang/ bulan	3.884.461.703		4.074.713.362	36 orang/ bulan	3.979.578.480	95.134.882	2,33	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	11.537.000		12.761.000	1 Laporan	12.816.250	55.250	0,43	
2	12	**2.12.0.00.0.00.01.00**	02	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**			**10.600.500**		**10.600.500**			**(10.600.500)**	-100,00	
2	12		02	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20 org	10.600.500		10.600.500	20 org		(10.600.500)	-100,00	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	Kota Palu	**100%**	**478.338.306**		**764.704.500**	**100%**	**877.115.150**	**112.410.650**	14,70	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen inst Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7 Paket	3.662.800		3.662.800	7 Paket	3.662.800	-	0,00%	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	2.500.000		2.500.000	9 Unit	6.114.800	3.614.800	144,59	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		96 paket	85.059.300		307.059.300	96 paket	553.037.800	245.978.500	80,11	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 paket	81.797.200		98.333.950	13 paket	42.371.750	55.962.200)	-56,91	

Kode Rekening						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024								CATATAN PENTING
									RENJA 2024		APBD 2024		PERUBAHAN RENJA 2024		Bertambah / berkurang		
									TARGET	PAGU INDIKATIF	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	Rp	%	
		1				2	3	4	5	6			7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan		2 Dokumen	10.300.000		10.300.000	2 Dokumen	4.050.000	(6.250.000)	**-60,68**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	25.696.000	12 laporan	73.525.450	12 laporan	61.738.000	11.787.450	-16,03	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		24 laporan	269.323.000	24 laporan	269.323.000	24 laporan	206.140.000	(63.183.000)	-23,46	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**		**100%**	**1.500.000**	**100%**	**1.500.000**		**-**	(1.500.000)	-100,00	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	1.500.000	1 unit	1.500.000			(1.500.000)	-100,00	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kota Palu	100%	**1.178.831.600**	100%	**1.182.431.600**	100%	**1.170.724.000**	**-11.707.600**	**-0,99**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	asa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	157.200.000	12 laporan	160.800.000	12 laporan	168.462.800	7.662.800	4,77	

2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umur Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 laporan	1.021.631.600	12 laporan	1.021.631.600	12 laporan	1.002.261.200	(19.370.400)	- 1,90	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**		100%	**361.720.000**	100%	**391.840.000**	100%	**511.120.000**	**119.280.000**	0,44	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		156 unit	335.320.000	156 unit	365.440.000	156 unit	312.320.000	-53.120.000	- 14,54	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan ainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 unit	26.400.000	25 unit	26.400.000	25 unit	13.800.000	(12.600.000)	- 47,73	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 unit	185.000.000	185.000.000	100,00	

Kode Rekeni ıg						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024								CATATAN
									RENJA 2024		APBD 2024		PERUBAHAN RENJA 2024		Bertambah / berkurang		
									TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	Rp	%	PENTING
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk**	Kota Palu	0,665	**180.210.000**	0,665	**136.860.000**	0,665	**109.050.000**	**-27.810.000**	**-20,32**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Terpenuhinya Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		100%	**180.210.000**	100%	**136.860.000**	100%	**109.050.000**	**-27.810.000**	-20,32	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Palu	2400 Dokumen	23.340.000							
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	Kota Palu	12000 Dokumen	156.870.000	12000 Dokumen	136.860.000	12000 Dokumen	109.050.000	-27.810.000	-20,32	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**03**			**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase penerbitan akta pencatatan sipil**		100%	**142.440.000**	100%	**142.439.950**	100%	**108.211.750**	**(34.228.250)**	**-24,03**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Terpenuhinya Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kota Palu	100%	**142.440.000**	100%	**142.439.950**	100%	**108.211.750**	**(34.228.250)**	**-24,03**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Pencatatan, Penataushaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Palu	9000 dokumen	23.340.000	9000 dokumen	23.340.000	9000 dokumen	17.580.000	(5.760.000)	**-24,68**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		2 layanan	119.100.000	2 layanan	119.099.950	2 layanan	90.631.750	(28.468.250)	-23,90	

Kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024								CATATAN
				RENJA 2024		APBD 2024		PERUBAHAN RENJA 2024		Bertambah /		
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	Rp	%	PENTING
2 12 2.12.0.00.0.00.01.00 04	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Informasi Administrasi Kependudukan**		100%	**93.472.000**	100%	**68.752.000**	100%	**42.550.000**	**(50.922.000)**	- 54 ,48	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.00 04 2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		100%	**66.820.000**	100%	**42.100.000**	100%	**28.800.000**	**(38.020.000)**	- 56 ,90	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.00 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kota Palu	2 Dokumen	34.500.000	2 Dokumen	34.500.000	2 Dokumen	25.000.000	(9.500.000)	- 27 ,54	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.00 04 2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		13 dokumen	32.320.000	13 dokumen	7.600.000	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	3.800.000	(3.800.000)	- 11 ,76	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.00 04 2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		100%	**26.652.000**	100%	**26.652.000**	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan	**13.750.000**	**(12.902.000)**	- 48 ,41	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.00 04 2.03 05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan		1 Laporan	26.652.000	1 Laporan	26.652.000	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan	13.750.000	(12.902.000)	- 48 ,41	

			Informasi Administrasi Kependudukan						Data Kependudukan				
2 12	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**05**	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Cakupan pengelolaan profil kependudukan**	Kota Palu	100%	**30.420.000**	100%	**30.420.000**	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**24.420.000**	**(6.000.000)**	- 19 ,72	
212	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**05 2.01**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan**		100%	**30.420.000**	100%	**30.420.000**	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**24.420.000**	**(6.000.000)**	- 19 ,72	
212	2.12.0.00.0.00.01.00	05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhabn Yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		1 Dokumen	30.420.000	1 Dokumen	30.420.000	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24.420.000	(6.000.000)	- 19 ,72	
			J U M L A H				**6.475.144.259**		**6.918.636.062**		**6.942.838.780**			

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bagi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil

Rencana Kerja perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekwensi yang terjadi harus menjadi tanggungjawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2024 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode tahun 2024.

Semoga dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tahun Anggaran 2024 dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kota Palu khususnya dalam pembangunan kependudukan, Pencatatan sipil sesuai dengan

Misi Walikota Palu yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dalam misi ke Empat (4) yaitu: ‘’ Menciptakan Pemerintahan Yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani. sehingga dalam implementasinya diperlukan komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.



PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Kerja Perubahan OPD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja PerubahanOPD. Undang-Undang dan Permendagri tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari perangkat daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Renja Perubahan Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan DPPKB Kota Palu Tahun 2024 adalah Dokumen perencanaan DPPKB Kota Palu Untuk periode Tahun 2024yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan, yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Palu dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Perubahan DPPKB Kota Palu memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perubahan OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD

Proses penyusunan dokumen Renja Perubahan DPPKB tahun 2024 mengacu pada mekanisme penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada garis kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026 sesuai Visi dan Misi Wali Kota Palu. Tahapan penyusunan Renja DPPKB Kota Palu dimulai dari persiapan penyusunan rancangan Renja DPPKB, penyusunan rancangan Renja DPPKB, penyusunan rancangan akhir RenjaPerubahan DPPKB dan Penetapan Renja Perubahan DPPKB Kota Palu.Oleh karena itu penyusunan rancangan renjaPerubahan OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra

OPD. Tahap penetepan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan Pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja Perubahan OPD menjadi Pedoman dilingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Olehnya itu dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka disusunlah Rencana KerjaPerubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanatahun 2024sebagai dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah tahunan sebagai penjabaran dari Renstra OPD yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Renja PerubahanTahun 2024Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sisitem Informasi Keluarga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
21. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
22. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana kerja Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2024 bagi Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sesuai dengan Renstra OPD yang mengacu kepada RKPD tahun 2024. Tujuan dari penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan 2024, yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, programdan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Memberi masukan kepada Pemerintah Kota Palu dalam mengambil kebijakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Memberi gambaran kepada pihak-pihak yang terkait lainnya yang membutuhkan/memerlukan dukungan serta mengambil peran dalam kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
5. Menjadi dokumen acuan untuk pembuatan Rencana Kerja Tahunan.
6. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun Renja Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistimatika Penulisan

Rencana KerjaPerubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana Kota Palu tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen Renja.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja Perangkat Daerah, proses penyusunan renja, keterkaitan antara renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHANDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaSampai dengan Triwulan II dan capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Menyajikan tabel 2.2 analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas P2KB Kota Palu

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palu

Berisikan Uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas P2KB
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas P2KB
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas P2KB

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD; Memuat Tabel 2.4

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan Pengamatan pelaksanaan musrembang kota. Memuat tabel 2.5

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALU

Memuat Rencana Kerja Perubahan Program Kegiatan Serta Pendanaan dari Program dan Kegiatan DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALUSAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palu Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Rentra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PerubahanOPD sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan di dalam Rancangan Akhir Renja Perubahan OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan OPD sampai dengan triwulan II.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sampai Dengan Triwulan II dan Pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Nilai Sakip OPD	B	B	B	B			
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan,Penganggaran an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2	2
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD DAN Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2	2
2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1	1
2.14.01.2.010006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	100	2	2
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	6 Bulan	6	18	1,50
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1	1
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 paket	1 paket	100	2	2
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	2 Paket	20 paket	20 paket	1	22	5, 50

2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disesiakan	4 jenis	2 Paket	3 paket	2 Paket	0,67	4	1,00
2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Media	2 Media	24 media	12 media	1	4	2,00
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 SPD	25SPD	25 SPD	20 SPD	0,80	45	1,80
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Kominikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7 Bulan	0,58	19	1,58
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jassa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	7 Bulan	0,58	19	1,58
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pperorangan Dinas atau Kendaraan Ddinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	56 Unit	56 Unit	56 unit	26 Unit	0,46	82	1,46

2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 unit	8 Unit	0,16	58	1,16
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)							
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalaian Kuantitas Penduduk							
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	6 Kali	6 kali	1 kali	1 Kali	1	7	1,17
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarag	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 kali	1 kali	1 kali	0 kali	0	1	1
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Kali	1 kali	1 kali	1 Kali	100	2	2
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data Informasi Keluarga	Tersedianya Pencatatan dan pengumpulan Informasi Keluarga	1 Kali	1 Kali	0	0	0	1	1
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 kali	1 Kali	1 kali	1 Kali	100	2	2
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana(KB) Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern							

		Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr)							
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	CAKUPAN Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Kb sesuai Kearifan Budaya Lokal							
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional Dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional Dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	8 unit	8 Kali	2 Kali	2 Kali	0,25	10	1,25
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa(Rakordes), Dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa(Rakordes), Dan Mini Lokakarya (Minilok)	8 Kali	8 kali	4 kali	o	0	8	1
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	8 Kali	8 Kali	8 kali	0	0	8	1

2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan,dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Kali	4 kali	4 kali	0	0	4	1
	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	8 kali	8 kali	8 kali	0	0	8	1
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapanagan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapanagan KB (PKB/PLKB)							
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4 Kali	4 Kali	4 Kali	1	0,25	5	1,25
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistrinusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan saran penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringann dan Jejaringnya	12 kali	12 Kali	12 Kali	6 Kali	0,50	10	1,50
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4 Kali	4 Kali	4 Kali	2 Kali	0,50	6	1,50

2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 kali	2 Kali	2 Kali	0 Kali	0	2	1
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100	2	2
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100	2	2
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasioanl Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasioanl Pelayanan KB Bergerak	10 Kali	10 Kali	8 kali	1 kali	0,13	11	1,10
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							

2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kkesrtaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kersehatan Ber-KB	1 kali	1 Kali	1 Kali	0	0	1	1
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Kelurga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Kelurga Berkualitas	8 Kali	8 Kali	8 Kali	4 Kali	0,50	12	1,50
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun. Cakupan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)							
2.14.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Akseptor UPPKA							
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha Peningkatan pendapatan keluarga	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100	2	2

2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA	Jumlah Laporan Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA	4 TW	4 TW	4 TW	1 TW	0,25	5	1,25
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA	Jumlah Kader Penyediaan Biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA	4 TW	4 TW	4 TW	2 Tw	0,50	6	1,50

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu, didasarkan pada hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja dengan berdasarkan pada tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kota Palu, yaitu

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana yang terjangkau dan berkualitas
3. Peningkatan Pembangunan Berwawasan Kependudukan melalui Advokasi dan KIE
4. Mengembangkan Jejaring Kemitraan Dalam Pengelolaan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, target capaian, realisasi dan pengukuran berdasarkan pembobotan dari masing-masing kegiatan atau mencakup Input, Output dan Outcome.Pada tahun anggaran 2024, masing-masing indicator kinerja telah ditetapkan rencana capaian kinerjanya.Yang di dalamnya mencakup sasaran yang mengindikasikan ukuran keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu.

Adapun predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No.	Skala Nilai	Kesimpulan Evaluasi
1	85 – 100	Sangat Berhasil
2	70 - 84,99	Berhasil
3	55 - 69,99	Cukup Berhasil
4	< 54,99	Tidak Berhasil

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKota Palu

No	Indikator	SPM/ stan-dar nasi-onal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. An-alis-is
				2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	13
1	Jumlah Peserta KB Aktif/PA			46,024	55,228	46,024	55,228	55,228	55,228	46,024	55,228	
2	Jumlah peserta KB Aktif miskin (KPS-KS1) dan rentan lainnya yang mendapat pembinaan dan alokon garatis			62,16	5,349	62,16	71,23	71,23	71,23	62,16	71,23	
3	Jumlah PIK Remaja/ Mahasiswa dibentuk dan dibina			48	41	48	53	53	53	48	53	
4	Jumlah ormas tkt kota yang terlibat dalam pengelolaan , pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB			35	38	35	35	35	35	35	35	

5	**Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan KS1**			**93**	**53**	**73**	**63**	**48,57**	**60,3**	**49,21**	**48,57**	
6	**Jumlah tenaga bidan yang memperoleh pembinaan teknis**			**25**	**96**	**25**	**30**	**30**	**30**	**25**	**30**	
7	**Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang terlatih**			**278**	**385**	**278**	**297**	**297**	**297**	**278**	**297**	
8	**Jumlah PUS**			**62,16**	**70,974**	**80,34**	**80,49**	**70,80**	**70,80**	**79,96**	**70,80**	
9	**Jumlah ormas tkt kota yang bergerak dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga**											
10	**Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS**			**185**	**265**	**185**	**146**	**146**	**146**	**185**	**146**	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu

strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanasebagai berikut:

1. *Penurunan Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate* (TFR)
2. Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi
3. Penurunan Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun per 1000 kelahiran
4. Pengembangan kelompok Tri Bina dan UPPKS
5. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeed Need) masih relatif cukup tinggi;
6. Pembinaan Kesertaan ber-KB dan pengintegrasian program lintas sektor dalam pengembangan kampung KB belum begitu optimal

Review Terhadap Rancangan Perubahan P- RKPD

Review terhadap rancangan Perubahan P-RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel Tabel 2.4 berikut in

Tabel. T-C.31 (Tabel 2.4)

Review terhadap Rancangan Perubahan P-RKPD tahun 2024

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu

No.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**7.542.502.491**					**12.153.613.565**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				**5.234.220.541**					**6.113.148.443**
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dikumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.431.000	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Cakupan Perencanaan,Penganggaran an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.425.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	389.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	387.500

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.326.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD DAN Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.325.000
	koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.326.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.325.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	389.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Laporan	387.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	Persentase Realisasi Keuangan	95%	3.770.998.766	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.203.003.093

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang/bulan	3.769.672.266	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang/bulan	4.201.553.093
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.326.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.450.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	Persentase pemenuhan Kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	345.256.775	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	303.258.350
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	683.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	682.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	22.445.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	28.156.850	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1633 buah	33.025.650

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paker Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	41.583.925	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disesiakan	4 Paket	13.914.200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	3.600.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	248.788.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan	252.036.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	705.774.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.183.008.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Pediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	73.800.000	Penyediaan Jasa Kominikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan	12 laporan	98.520.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	631.974.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jassa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	1.084.488.000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	408.760.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	420.454.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	56 Unit	398.810.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Pperorangan Dinas atau Kendaraan Ddinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	60 Unit	403.314.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	6.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	44 Unit	17.140.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana [Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 Unit	3.550.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana [Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	0
	Program Pengendalian Penduduk	Kota Palu	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,7	78.911.000					0

	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Palu	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalaian Kuantitas Penduduk	100%	13.394.500	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Palu	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0%	0
	'Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Kota Palu	Terlaksananya rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	100%		'Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Kota Palu	Terlaksananya rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	1 Kali	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.394.500	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	0	0

	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	59.377.500	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	148.462.500
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Palu	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	6.139.00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarag	Kota Palu	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Sistem Informasi Keluarga	1Laporan	6.562.500
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Palu	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	5.320.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Palu	Jumlah Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0 Laporan	81.600.000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Palu	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	54.057.500	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Palu	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	60.300.000

	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kota Palu	CakupanPembinaan Keluarga Berencana (KB)	100%	1.717.557.448	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kota Palu	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana(KB) Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr)	100%	3.116.393.252
	Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Palu	Terlaksananya Advokasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal Budaya Lokal	100%	446.038.260	Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Palu	CAKUPAN Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Kb sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	717.305.250

	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Palu	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	4.975.000	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Palu	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan,dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Kali	100.000.000

	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Palu	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	8 Dokumen	84.663.260	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Palu	Jumlah Dokumentasi Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	8 Dokumen	109.305.250

	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam),Rapat Koordinasi Desa(Rakerdes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Palu	Jumlah Laporan Mekanisme Operasioanl Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan,dan Keluarga Berencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	104.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Ddesa (Rakerdes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Palu	Jumlah Laporan Mekanisme Operasioanl Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 laporan	120.000.000

	Pengelolaan Operasioanl dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pemngelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	212.400.000	Pengelolaan Operasioanl dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pemngelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana)	6 Laporan	248.000.000
	Pengendalian Program KKBPK	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	8 Laporan	40.000.000	Pengendalian Program KKBPK	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	8 Laporan	140.000.000
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Palu	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB?PLKB)	100%	110.00.0000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Palu		100%	138.000.000
	Penggerakan Kader Instiitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Palu	Jumlah Kader Yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100 Kader	110.00.0000	Penggerakan Kader Instiitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Palu	Jumlah Kader Yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100 Kader	138.000.000

	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Palu	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistrinusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.029.728.604	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Palu	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistrinusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		1.241.459.672
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Palu	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan saran penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringann dan Jejaringnya	35 Laporan	41.134.800	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Palu	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan saran penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringann dan Jejaringnya	12 Laporan	40.500.000

	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Palu	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	50 Orang	789.640.404	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12 kali	988.905.492
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Palu	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) dan sarana penunjang pelayanan KB	2 Dokumen	8.844.200	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Palu	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Dokumen	7.805.490
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	30 Unit	151.172.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 set	155.996.000
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Palu	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Dokumen		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Palu	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Dokumen	7.805.490

	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	20.700.000	Pembinaan Pelayanan Keluargga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	29.250.000
	Dukungan Operasioanl Pelayanan KB Bergerak	Kota Palu	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	8 Laporan	18.237.200	Dukungan Operasioanl Pelayanan KB Bergerak	Kota Palu	Jumlah Laporan Dukungan Operasioanl Pelayanan KB Bergerak	8 Laporan	11.197.200

	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan dan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Palu	Terwujudnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KAB/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	769.847.300	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Palu	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	1.019.628.330
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaann Pelayanan Pembinaan Ber-KB	Kota Palu	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mmitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4 Organisasi	7.887.300	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kkesrtaan Ber-KB	Kota Palu	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kersehatan Ber-KB	1 kali	7.879.800

	Integritas Pembangunan Lintas Sektor Kampung KB	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Integritas Pembangunan Lintas Sektor Kampung KB	1 Dokumen	9.000.000	Integritas Pembangunan Lintas Sektor Kampung KB	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Integritas Pembangunan Lintas Sektor Kampung KB	-	0
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Kelurga Berkualitas	Kota Palu	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Kelurga Berkualitas	4 TW	371.960.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Kelurga Berkualitas	Kota Palu	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Kelurga Berkualitas	-	0

	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	Kota Palu	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	18 Kampung KB	381.000.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	Kota Palu	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	18 Kampung KB	1.011.748.530

IV	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kota Palu	Cakupan Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 Fungsi Keluarga	77%	2.229.370.950	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kota Palu	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun. Cakupan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	100%	2.678.899.860

	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Palu	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan daan Kesejahteraan Keluarga	76%	2.229.370.950	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Palu	Cakupan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100%	2.678.899.860

	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga UPPKS	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Kkeluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga//UPPKS)	4 Laporan	60.000.000	Orientasi dan PELATIHAN Teknis Pengelola Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga UPPKA	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Kkeluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga//UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Kkeluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga//UPPKS)	4 Laporan	300.000.000

	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanna/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Palu	Jumlah Kader yang mengikuti orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100 Kader	204.619.800	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	100 Kader	213.799.860

	Penyediaan Biaya Operasioanl Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR, BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA	Kota Palu	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Keluarga/UPPKS	4 TW	1.964.751.150	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Palu	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	4 Tw	2.165.100.000

	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana,Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi berencana,Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4 Laporan	25.020.250	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana,Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi berencana,Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0	0

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui Musrembag terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kota.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui kegiatan Musrembang baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan memperolah beberapa masukan/usulan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

TABEL. 2.5

Usulan Program dan Kegiatandari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Palu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Lolu Selatan Kec.Palu Timur	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Pembangunan Sekretariat Kampung KB
2.	Program Kesejahteraan Keluarga/ Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga./ Sub Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Generasi Berencana) untuk Mencegah Stunting	Kelurahan Ujuna Kec. Palu Barat	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk Mencegah Stunting	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Konseling dan Pendampingan Bagi Pemuda dan Remaja

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALU

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu yang akan dilaksanakan tahun 2024 dapat dilihat padaTabel. T-C.33 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**10.235.699.763**		**11.857.857.064**	**1.622.157.301**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**B**	**5.640.161.342**		**5.964.863.193**	**324.701.851**		
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**4 Dokumen**	**3.425.000**	**4 dokumen**	**3.425.000**	**0**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**1 Dokumen**	**387.500**	**1 dokumen**	**387.500**	**0**		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Jumlah Dokumen RKA-SKPD DAN Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Kota Palu**	**1 Dokumen**	**1.325.000**	**1 dokumen**	**1.325.000**	**0**		

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Kota Palu**	**1 Dokumen**	**1.325.000**	**1 dokumen**	**1.325.000**	**0**		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Kota Palu**	**1 Laporan**	**387.500**	**1 dokumen**	**387.500**	**0**		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**1**	**4.015.524.392**		**4.203.003.093**	**187.478.701**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**Kota Palu**	**37 orang/bulan**	**4.014.074.392**	**37 orang/bulan**	**4.201.553.093**	**187.478.701**		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Kota Palu**	**1 Laporan**	**1.450.000**	**1 Laporan**	**1.450.000**	**0**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**1**	**288.569.950**		**288.216.600**	**-353.350**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan**	**Kota Palu**	**1 Paket**	**682.500**	**1 Paket**	**682.500**	**0**		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan**	**Kota Palu**	**20 Paket**	**22.455.250**	**3 Paket**	**33.025.650**	**10.570.400**		

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disesiakan**	**Kota Palu**	**1 Paket**	**9.784.200**	**3 Paket**	**17.244.450**	**7.460.250**		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan**	**Kota Palu**	**24 Dokumen**	**3.600.000**	**24 Dokumen**	**3.600.000**	**0**		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Kota Palu**	**25 Laporan**	**252.048.000**	**25 Laporan**	**233.664.000**	**-18.384.000**		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**922.608.000**	**100%**	**1.130.608.000**	**208.000.000**		
	Penyediaan Jasa Kominikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan**	**Kota Palu**	**12 Laporan**	**75.720.000**	**12 Laporan**	**98.520.000**	**22.800.000**		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Jumlah Laporan Penyediaan Jassa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan**	**Kota Palu**	**12 Laporan**	**846.888.000**	**12 Laporan**	**1.032.088.000**	**185.200.000**		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**410.034.000**	**1**	**339.610.500**	**-70.423.500**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Jumlah Kendaraan Pperorangan Dinas atau Kendaraan Ddinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya**	**Kota Palu**	**56 Unit**	**403.314.000**	**56 Unit**	**322.470.500**	**-80.843.500**		

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara**	**Kota Palu**	**50 Unit**	**6.720.000**	**44 unit**	**17.140.000**	**10.420.000**		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**	**Kota Palu**	**1,7**	**279.581.000**	**1,7**	**288.462.500**	**8.881.500**		
	Pemanduan dan Sikronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian penduduk kuantitas penduduk	**Terlaksananya Pemanduan dan Sikronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian penduduk kuantitas penduduk**	**Kota Palu**	**100%**	**79.995.000**	**100%**	**140.000.000**	**60.005.000**		
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	**Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)**	**Kota Palu**	**1 Kegiatan**	**79.995.000**	**1 Kegiatan**	**140.000.000**	**60.005.000**		
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**199.586.000**	**1**	**148.462.500**	**-51.123.500**		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarag	**Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga**	**Kota Palu**	**1 Laporan**	**69.586.000**	**1 Laporan**	**6.562.500**	**-63.023.500**		
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	**Jumlah Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga**	**Kota Palu**	**1 Laporan**	**69.600.000**	**1 Laporan**	**81.600.000**	**12.000.000**		

	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	**Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB**	**Kota Palu**	**1 Dokumen**	**60.300.000**	**1 Dokumen**	**60.300.000**	**0**		
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana(KB) Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr)**	**Kota Palu**	**100%**	**2.058.607.421**	**100%**	**293.486.151**	**-1.765.121.270**		
	Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**CAKUPAN Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Kb sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Kota Palu**	**100%**	**553.188.050**	**100%**	**568.243.000**	**15.054.950**		
	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	**Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan ,dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja**	**Kota Palu**	**10 Organisasi**	**79.995.000**	**10 Organisasi**	**100.000.000**	**20.005.000**		
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapanagan KB (PKB/PLKB)	**Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapanagan KB (PKB/PLKB)**	**Kota Palu**	**100%**	**110.000.000**		**138.000.000**	**28.000.000**		

	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	**Jumlah Kader Yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)**	**Kota Palu**	**100 orang**	**110.000.000**	**100 orang**	**138.000.000**	**28.000.000**		
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	**Terlaksananya Pengendalian dan Pendistrinusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**1.006.579.571**	**100%**	**1.219.870.639**	**213.291.068**		
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	**Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan saran penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringann dan Jejaringnya**	**Kota Palu**	**35 Laporan**	**35.100.000**	**12 Kali**	**40.500.000**	**5.400.000**		
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	**Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**	**Kota Palu**	**50 orang**	**782.525.814**	**50 orang**	**988.902.439**	**206.376.625**		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	**Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB**	**Kota Palu**	**2 Dokumen**	**7.805.490**	**2 Dokumen**	**625.000**	**-7.180.490**		

	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	**Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB**	**Kota Palu**	**30 unit**	**149.671.067**	**30 unit**	**155.996.000**	**6.324.933**		
	Pembinaan Pelayanan Keluargga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya**	**Kota Palu**	**1 Laporan**	**20.700.000**	**1 Laporan**	**29.250.000**	**8.550.000**		
	Dukungan Operasioanl Pelayanan KB Bergerak	**Jumlah Laporan Dukungan Operasioanl Pelayanan KB Bergerak**	**Kota Palu**	**8 Laporan**	**10.777.200**	**8 Laporan**	**4.597.200**	**-6.180.000**		
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Kota Palu**	**100%**	**388.839.800**	**100%**	**1.008.747.872**	**619.908.072**		
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kersehatan Ber-KB**	**Kota Palu**	**4 organisasi**	**7.879.800**	**4 organisasi**	**7.879.800**	**0**		
	Integritas Pembangunan Lintas Sektor Kampung KB	**Jumlah Dokumen Hasil Integritas Pembangunan Lintas Sektor Kampung KB**	**Kota Palu**	**1 Dokumen**	**9.000.000**	**1 Dokumen**	**0**	**-9.000.000**		

	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Kelurga Berkualitas	**Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Kelurga Berkualitas**	**Kota Palu**	**18 Kampung**	**371.960.000**	**18 Kampung**	**1.008.747.872**	**636.787.872**		
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun. Cakupan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)**	**Kota Palu**	**100%**	**2.257.350.000**	**100%**	**2.669.669.860**	**412.319.860**		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Cakupan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**Kota Palu**	**76%**	**2.257.350.000**	**1**	**2.669.669.860**	**412.319.860**		
	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA	**Jumlah Laporan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA**	**Kota Palu**	**25 unit**	**360.000.000**	**25 unit**	**300.000.000**	**-60.000.000**		

	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	**Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)**	**Kota Palu**	**4 laporan**	**0**	**4 Laporan**	**204.569.860**	**204.569.860**		
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	**Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan**	**Kota Palu**	**547 Orang**	**1.897.350.000**	**547 Orang**	**2.165.100.000**	**267.750.000**		
		JUMLAH			**12.153.613.565**		**11.857.857.064**			

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Palu, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada awal tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kota Palu.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, penyusunan rancangan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD**.**



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kota Palu dalam rangka pelaksanaan tugasnya menyusun Perencanaan Program dan kegiatannya yang dihimpun secara sistematis dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD Tahun 2021 - 2026 yang merupakan pedoman kerja kurun waktu lima tahun yang kemudian dijabarkan ke dalam perubahan rencana kerja (RENJA) PD tahunan dengan menyelaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya yang menjadi acuan kerja bagi Dinas Perhubungan Kota Palu pada setiap tahunnya.

Perubahan Renja PD berisi tentang Kebijakan Umum Dinas Perhubungan Kota Palu, Program/kegiatan pembangunan dibidang Perhubungan, baik yang diusulkan oleh masing-masing bagian maupun seksi dan usulan dari masyarakat. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2021-2026 .Perubahan Renja PD ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya, usulan hasil Musrenbang serta mengakomodir pokok pikiran dari wakill rakyat (hasil reses DPRD). Perubahan Rencana kinerja Dinas Perhubungan Kota Palu memuat analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa mendatang. Dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2024 memuat daftar program, kegiatan dan dan pagu dana.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan (Renja PD) Kota Palu 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
10. Peraturan Pemerintah no 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona; (RPJMN) Tahun 2020-2024
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2006 Tentang pedoman dan proses perencanaan di lingkungan Departemen Perhubungan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubaha Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
17. Peraturan Daerah Kota Palu No. 04 tahun 2010 tentang Musrenbang
18. Peraturan Daerah Kota Palu No. 16 tahun 2011 tentang RT/RW
19. Peraturan Daerah Kota Palu No. 17 tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu tahun 2005 – 2025.
20. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagimana telah di ubah dengan peraturan wali kota palu nomor 6 tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

21. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas perhubungan Kota Palu sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Wali Kota no 9 Tahun 2020 tentang Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas perhubungan Kota Palu.
22. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
23. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Palu tahun 2024 dimaksudkan adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan dana pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun mendatang. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2024 adalah:

1. Menyelaraskan dan mengintegrasikan perencanaan tahunan dengan Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu tahun 2021-2026, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya.
2. Menjadikan renja sebagai suatu perangkat manajerial perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palu tahun

sebelumnya serta indikator kinerja Dinas yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Palu dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TW II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan TW II Tahun 2024 dan Tahun berkenaan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palu
- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TW II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan TW II Tahun 2024 dan Tahun Berkenaan

Secara umum pelaksanaan pembangunan dibidang Perhubungan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Palu pada TW II Tahun 2024 telah terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target sesuai yang telah di tetapkan. Adapun program program yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini terdiri dari 2 (Dua) Program 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dengan uraian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
      1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      1.3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
      2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
   3. Administrasi Kepegawaian:
      3.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

3.2 Bimbigan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
   4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu
   4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
   5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
   6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), dengan uraian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
   - 1.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
   - 1.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
   - 2.1 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
   - 3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
   - 4.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jarinagn Trayek Jalan Kabupaten/Kota
   - 5.1 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
   - 5.2 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkpan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota;
   - 6.1 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
7. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
   - 7.1 Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C

8. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:
    8.1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
    9.1 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan TW II Tahun 2024 menghasilkan capaian indikator kinerja output sebesar 45,43 % yang termasuk dalam kategori predikat cukup tinggi. Adapun realisasi keseluruhan anggaran untuk belanja sebesar Rp. 7.058.319.288,- dari total anggaran sebesar Rp. 15.710.775.130,-. Adapun uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut :

I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan yang memenuhi target dengan rincian sebagai berikut :
    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, diuraikan sebagai berikut :
        1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah outputnya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari target 2 Dokumen dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4.109.250,- terealisasi sebesar Rp 1.474.050,- atau 35,87%

1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD outputnya Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dari target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen dan dengan rencana anggaran sebesar Rp.6.234.000,- terealisasi sebesar Rp.5217.000,- atau 83,69%

1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dari target 1 Dokumen dengan rencana anggaran sebesar Rp.5.960.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00%.

1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dari target 2 Dokumen dengan rencana anggaran sebesar Rp.4.079.450,- terealisasi sebesar Rp.851.550,- atau 20,87%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, diuraikan sebagai berikut :

2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN target 12 bulan terealisasi 6 bulan atau 50%, dengan rencana anggaran sebesar Rp.8.734.319.930,- terealisasi sebesar Rp.4.764.475.916,- atau 54.55%.

2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD target 12 laporan terealisasi 6 laporan atau 50%, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 14.575.950,- terealisasi sebesar Rp 4.859.250,- atau 33,34%.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, diuraikan sebagai berikut :

3.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan target 12 bulan terealisasi 6 bulan atau 50%, dengan rencana anggaran sebesar Rp.13.442.500,- terealisasi sebesar Rp 1725.000,- atau 12,83%.

3.2 Sub Kegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Peundang-undangan target 1 orang, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 44.273.000,- terealisasi sebesar Rp 0,- atau 0,00%.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, diuraikan sebagai berikut :

4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor target 19 buah terealisasi 7 buah atau 36%, dengan rencana anggaran sebesar Rp.1.273.000,- terealisasi sebesar Rp.201.000,- atau 15,79%.

4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor target 14 jenis terealisasi 2 jenis atau 11%, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 73.191.200,- terealisasi sebesar Rp. 8.412.400,- atau 11,49%.

4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor target 12 bulan terealisasi 6 bulan atau 50%, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 55.380.100,- terealisasi sebesar Rp. 9.849.700,- atau 17,97%.

4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan target 6 jenis terealisasi 3 jenis atau 50%, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.925.400,- terealisasi sebesar Rp. 2.123.000,- atau 13,33%.

4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan target 1 Dokumen dengan rencana anggaran sebesar Rp. 52.542.800,- terealisasi sebesar Rp. 1.050.000,- atau 2,00%.

4.6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu target 12 bulan terealisasi 6 bulan atau 50%, dengan rencana anggaran sebesar Rp.7.660.000,- terealisasi sebesar Rp.875.000,- atau 11,42%.

4.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target 24 OK terealisasi 10 OK atau 44%, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 333.532.000,- terealisasi sebesar Rp. 148.313.104,- atau 44,47%.

5. Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, diuraikan sebagai berikut :

5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan target 1 unit teraalisasi 0 unit atau 0% dengan rencana anggran sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, diuraikan sebagai berikut :

6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik target 12 bulan terealisasi 6 bulan atau 50%, dengan rencana anggaran sebesar Rp 126.731.200,- terealisasi sebesar Rp. 44.478.152,- atau 35,10%.

6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor target 12 bulan terealisasi 6 bulan atau 50%, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 2.832.861.600,- terealisasi sebesar Rp. 1.221.592.468,- atau 43,12%.

7. Pemelihraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, duraikan sebagai berikut:
    7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan target 16 unit terealisasi 8 unit atau 50%, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 330.035.000,- terealisasi sebesar Rp. 141.020.500,- atau 42,73%.
    7.2 Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, target 54 unit dengan rencana anggaran sebesar Rp. 268.640.000,- terealisasi sebesar Rp 41.769.200,- atau 15,55%.
    7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya target 8 unit terealisasi 1 unit atau 4%, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 5.720.000,- terealisasi sebesar 255.000,- atau 4,46%.
    7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target 14 unit terealisasi 9 unit atau 29%, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4.380.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.165.000,- atau 29,41%.

II. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), terdiri dari 9 kegiatan dan 11 sub kegiatan yang memenuhi target dengan rincian sebagai berikut
    1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, diuraikan sebagai berikut :
        1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota target 31 unit dengan rencana

anggaran sebesar Rp. 53.473.000,- terealisasi sebesar Rp 402.000,- atau 0,75%.

1.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan target 17 Traffic light dengan rencana anggaran sebesar Rp. 63.944.750,- terealisasi sebesar Rp. 12.245.000,- atau 19,15%.

2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, diuraikan sebagai berikut :

   2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C target 3 terminal dengan rencana anggaran sebesar Rp. 41.332.400,- terealisasi sebesar Rp 9.517.300,- atau 23,03%.

3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, diuraikan sebagai berikut :

   3.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota target 142 titik dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.242.711.300,- terealisasi sebesar Rp 258.989.798,- atau 20,84%.

4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, diuraikan sebagai berikut :

   4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor target 12 bulan terealisasi 6 bulan atau 50%, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 53.734.600,- terealisasi sebesar Rp 2.700.000,- atau 5,02%.

5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota :

5.1 Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota target 4 laporan terealisasi 1 laporan atau 25%, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 26.199.750,- terealisasi sebesar Rp 2.700.000,- atau 10,31%.

5.2 Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas target 50 Dokumen dengan rencana anggaran sebesar Rp. 103.370.500,- terealisasi sebesar Rp 484.200,- atau 0,47%.

6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, diuraikan sebagai berikut :

   6.1 Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin target 12 bulan terealisasi 6 bulan atau 50%, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 14.836.300,- terealisasi sebesar Rp 2.160.000,- atau 14,56%.

7. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan di uraikan sebagai berikut:

   7.1 Sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C target 4 laporan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 17.980.000 terealisasi Rp. 2.242.500 atau 12,47%

8. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, diuraikan sebagai berikut :

   8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota target 12

bulan terealisasi 6 bulan atau 50%, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 675.780.950,- terealisasi sebesar Rp 233.561.900,- atau 34,56%.

9. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, diuraikan sebagai berikut :
   9.1 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota target 12 bulan terealisasi 6 bulan atau 50%, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 447.545.200,- terealisasi sebesar Rp 131.545.200,- atau 29,41%.

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2020 terhadap capaian renstra Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2016-2021 di uraikan dalam tabel 2.1

Tabel . 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas perhubungan kota Palu

Nama OPD: Dinas Perhubungan Kota Palu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulanll tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota								
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 dok	8 Dok	80%
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	80%
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 dok	1 d	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	80%
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dok	1 Dok	0	0	100%	0	0	0%
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN	530 org	85 org	90 org	90 org	100%	94 org	359 org	67%
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	44 lap	73%
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2	15	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24 lap	0	0	0	0	12 lap	12 lap	50%
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	1 paket	0	0	0	1 paket	1 paket	50%
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	200 orang	0	0	0	0%	50 orang	50 orang	25%
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	1 orang	0	0	0%	2 org	3 org	30%
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	115 paket	25 paket	23 paket	23 paket	100%	21 paket	69 paket	60%
2	15	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	79 paket	25 paket	9 paket	9 paket	100%	9 paket	43 paket	54%
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 paket	12 Bln	30 paket	30 paket	100%	30 paket	60 paket	40%
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 paket	7 paket	6 paket	6 paket	100%	6 paket	19 paket	63%
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 dok	7 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dok	21 dok	60%
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36 lap	60%
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36 lap	60%
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	0	1 unit	0	0%	3 unit	4 unit	100%
2	15	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 paket	0	0	0	0%		0	0%
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36 lap	60%
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36 lap	60%
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	192 unit	17 unit	34 unit	34 unit	100%	18 unit	52 unit	35%
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	235 unit	36 uni	47 unit	47 unit	100%	41 unit	88 unit	52%
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175 unit	25 unit	35 unit	35 unit	100%	54 unit	114 unit	65%
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	0	2 unit	20%
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55 unit	1 unit	11 unit	11 unit	100%	13 unit	55 unit	80%

Page 1

Page 2

2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 dok	0	1 dok	1 dok	100%	0	1 dok	33%
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100%	2 paket	7 paket	100%
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	20 unit	17 unit	17 unit	17 unit	100%		17 unit	85%
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						17 unit		
2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	2 dok	0	0	0	0		0	0
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	3 paket	0	1 paket	0	100%	0	0	0
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
2	15	02	2.03	06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	3 unit	0	0	0	0	3 unit	3 unit	100%
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 paket	0	0	0	0%	0	0	0%
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	60 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	36 Bln	60%
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4 paket	0	1 paket	1 paket	100%	13 paket	13 paket	100%
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 dokumen	0	0	0	0	0	0	0
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	4 unit	0	0	0	0	0	0	0
2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 laporan	0	0	0	0	0	0	0
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							0	
2	15	02	2.06	02	Pengadaan dan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 pkt	0	1 paket	1 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
2	15	02	2.06	16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	4 pkt	0	0	0	0	0	0	0%
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	36 ap	12 lap	0	0	0	12 lap	24 lap	60%
2	15	02	2.06	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/	24 ap	0	0	0	0	0	0	0
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	36 lap	12lap	12lap	12lap	100%	12lap	36 Bln	100%
2	15	02	2.07	06	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	24 lap	0	0	0	0	0	0	0
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	10 lap	0	0	0	0	2 lap	2 lap	20%
2	15	02	2.08	06	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	10 lap	0	0	0	0	0	0	0
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	48 lap	0	0	0	0	0	0	0
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2	15	02	2.09	03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	11 trayek	6 trayek	6 trayek	6 trayek	100%	6 trayek	6 trayek	54%
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	20 lap	33%
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2	15	02	2.14	03	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	48 lap	12 lap	0	0	0	0	0	0
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0	0	0
2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 dok	0	1 dok	0	0	0	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD Dinas Perhubungan Kota Palu

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Wali Kota no 9 Tahun 2020 tentang Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas perhubungan Kota Palu. Dinas Perhubungan Kota Palu mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kota Palu juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

Perumusan kebijakan urusan Perhubungan;

i. Pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan;
ii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan;2
iii. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
iv. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Palu dalam diuraikan sebagaimana termuat dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Palu

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Dinas Perhubungan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1	Jumlah penumpang angkutan darat melalui terminal		✓	94.701	108.906	130.687	163.359	150647	49223-	130.687	163.359	
2	Jumlah trayek angkutan umum		✓	8 Trayek	8 Trayek	10 Trayek	10 Trayekk	6 trayek	6 trayek	10 Trayek	10 Trayekk	
3	Jumlah uji kir angkutan umum		✓	97 unit	102 unit	112	122 unit	441	229	112	122 unit	
4	Persentase layanan angkutan darat		✓	19,51%	21,04%	23,14%	25,92%	14,47%%	6,3%	23,14%	25,92%	
5	Persentase Pemenuhan Uji Kendaraan (KIR)		✓	2%	2,42%	2,66%	2,90%	10,5%	5,45%	2,66%	2,90%	
6	Pemasangan Rambu-rambu		✓	45%	59,09%	72,70%	86,32%	12,73%	13,34%	72,70%	86,32%	
7	Jumlah Revitalisasi Titik Parkir		✓	50	100	160	229	203	184	160	229	
8	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Kota Palu		✓	14	17	20	17	10	14	20	17	
9	Rasio konektivitas kabupaten/kota		✓	0.58	0.58	0.72	0.72	0,43	0,43	0.72	0.72	
10	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		✓	14	17	20	22	24	28	20	22	
11	Indeks Kota Layak Huni		✓	60	✓	63	63,5	-	-	63	63,5	
12	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan Kota Palu		✓	CC (>50-60)	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	-	-	B (>60-70)	B (>60-70)	
13	Nilai SAKIP		✓	B (65,50)	B(66,50)	B(67,50)	B(68,50)	B	B	B(67,50)	B(68,50)	

Sumber data : Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2021-2026

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palu.

Secara garis besar dapat di gambarkan bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan transportasi dalam Wilayah Kota Palu pada saat ini adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan tertib penyelenggaraan administrasi dan peraturan sesuai Perda dan Perwali.
- Penataan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas (MRLL) pada ruas-ruas jalan strategis dalam mengurai titik kemacetan
- Penyediaan Transportasi Massal yang murah dan ramah lingkungan

- Munculnya transportasi *online b*erbasi IT di wilayah Kota Palu
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional dalam rangka penertiban angkutan umum, angkutan barang dan angkutan tradisional (becak, dokar, ojek)
- Penertiban parkir, parkir liar dan pengelolaan potensi titik parkir
- Kurangnya kesadaran pengguna jalan terhadap ketertiban Lalu-Lintas
- Minimnya fasilitas keselamatan, perlengkapan sarana dan prasara tranportasi yang memadai baik dibidang darat.
- Keterbatasan SDM penyelenggara dibidang transportasi khususnya transportasi darat yang memiliki kualifikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana gedung kantor maupun penunjang operasional lapangan
- Penyerahan/pelimpahan kewenangan anatara pusat, propinsi dan daerah belum terselenggara secara penuh.

Berdasarkan gambaran mengenai pelayanan sistem transportasi darat yang ada di Kota Palu maka yang menjadi isu strategis yaitu :

- Revitalisasi perparkiran kota palu dalam rangka mengoptimalkan potensi titik parkir yang ada di Kota Palu
- Reformasi dan revitalisasi moda transportasi melalui program bus by the service
- Melakukan pelayanan angkutan massal perkotaan melalui bus rapit trans (BRT) bagi anak sekolah.

2.4 Review terhadap akhir RKPD

Telaahan terhadap rancangan akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan Kota Palu dan tingkat kinerja yang dicapai terkait prioritas program/kegiatan dan dana pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap awal RKPD dapat terlihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan RKPD Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2024

Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**12.954.836.899**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**26.977.350**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	4.109.250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	4.109.250
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	6.234.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	8.433.750
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7.813.950	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	9.813.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 lap	4.079.450	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 lap	4.620.550
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**8.745.299.249**
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 OB	8.701.279.249	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 OB	8.721.379.249
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Lap	22.365.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	23.920.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**		**57.715.500**
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 org	Rp 13.442.500	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 org	Rp 13.442.500
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	Rp 44.273.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 org	Rp 44.273.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**720.276.500**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	1.273.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	1.273.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 paket	24.262.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	136.471.200
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 pakt	55.380.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 paket	58.190.400
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	15.925.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 item	16.843.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dok	47.142.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dok	47.142.800
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	7.660.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	7.660.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 lsp	333.532.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	452.696.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	35.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**		**2.700.408.300**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	126.731.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	136.731.200
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	2.657.661.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.563.677.100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**704.160.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	330.035.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	385.420.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasioanal atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	41 unit	268.640.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasioanal atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	45 unit	308.640.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	55 unit	5.720.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	8 unint	5.720.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23 unit	4.380.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17 unit	4.380.000

Page 1

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**CAKUPAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**CAKUPAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**9.420.598.200**
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**117.417.750**
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	20 unit	53.473.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	20 unit	53.473.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	12 unit	63.944.750	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	17 traffic light	63.944.750
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**CakupanPengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		**40.204.400**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**CakupanPengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		**40.204.400**
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	2 unit	40.204.400	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	3 unit	40.204.400
Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Cakupan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**			**Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Cakupan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**		**978.320.800**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	1.022.218.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	978.320.800
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**			**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**42.133.600**
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	24 unit	42.133.600	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 unit	42.133.600
Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**			**Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**231.179.200**
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	1 paket	670.888.500	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	3 item	207.329.200
Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota	Jumlah laporam forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	12 laporan	24.174.750	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 laporan	23.850.000
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**			**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**		**14.836.300**
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Andalalin	12 laporan	14.836.300	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 laporan	14.836.300
Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan	**Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan**			**Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan**	**Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan**		**14.047.500**
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 laporan	13.957.500	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	4 laporan	14.047.500
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**7.399.542.450**
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 nunit	7.567.542.450	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 unit	7.399.542.450
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**582.916.200**
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	552.026.200	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	582.916.200
			Rp22.782.339.849				**22.375.435.099**

Page 3

2.5 Penelaahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu proses perencanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Palu adalah melakukan pengumpulan informasi usulan masyarakat melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kota Palu , dan mengakomodir pokok pikiran dari para wakil rakyat yang menghasilkan kesepakatan program/kegiatan antara pelaku pembangunan yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja PD dan usulan kebutuhan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Palu. Sehingga diharapkan adanya peran serta masyarakat yang nantinya akan mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil serta usulan dari kegiatan Musrenbang didapati beberapa usulan dari pemangku kepentingan yang diusulkan untuk pelaksanaan program/kegiatan di Tahun 2023 dan diupayakan dapat ditindaklanjuti dalam program/kegiatan Tahun 2024 dengan ketentuan telah sesuai dengan kriteria teknis yang telah ditetapkan. Penyesuaian teknis utamanya dilakukan dengan cara melakukan survai/penelitian lokasi dan kemudian dilakukan perhitungan sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh peraturan teknis terkait. Sehingga dapat disimpulkan apakan usulun tersebut bisa ditindaklanjuti ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas perhubungan Kota Palu.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan yang di uraikan pada tabel 2.5

TABEL 2.5

USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

KOTA PALU

NS PERHUBUNGAN KOTA PALU

NO	Usulan	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	ESARAN / VOLUM		CATATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*
1	Pemasangan Rambu-Rambu Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota/Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	RT 6 (Sekolah),Tawaeli	Jumlah Pemasangan RAMBU-RAMBU			di terima dan akan di tindak lanjuti di pengagaran 2024	USULAN MUSRENBANG
			Jalan Bulangisi RT 01,Tawaeli				Ditolak karena memerlukan kajian lebih lanjut	USULAN MUSRENBANG
2	Pengadaan Marka Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota/Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jln. Makonda RT 01 RW.01, Kota Palu	Jumlah Marka Jalan				USULAN MUSRENBANG
3	Pembuatan Portal	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota/Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	RT.01/RW.17, Kota Palu, Mantikolore	Jumlah Pembuatan Portal	*6*	*titik*	ditolak berdasarkan hasil survey portal yang dimkasud merupakan komplej perumahan sehingga memerlukan kajian lebih lanjut	USULAN MUSRENBANG
			RT. 03/RW.17, Kota Palu,Mantikolore		*10*	*titik*	ditolak berdasarkan hasil survey portal yang dimkasud merupakan komplej perumahan sehingga memerlukan kajian lebih lanjut	USULAN MUSRENBANG
			JL. MH.THAMRIN LRG I RT 002 RW 04, Kota Palu				ditolak berdasarkan hasil survey portal yang dimkasud merupakan komplej perumahan sehingga memerlukan kajian lebih lanjut	USULAN MUSRENBANG
4	Permintaan pengadaan cermin cembung	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota/Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	semua jalan titik BTN Bawah Rt,04/RW 05 Kota Palu	Jumlah Pengadaan Cermin Cembung			Ditolak karena berdasarkan hasil survey jalan yang dimaksud merupakan jalan lurus dan tidak terhambat/terhalangi tat guna lahan	USULAN POKIR
5	Pembuatan dermaga		KELURAHAN TONDO DAN KELURAHAN LAYANA INDAH, Kota Palu				merupakan kewenangan dari Dinas Pertanian	USULAN POKIR
6	Bantuan untuk masalah parkir bagi ojol agar dibebaskan masalah parkir		Jalan Sisingamangaraja, Kota Palu				terkait pengelolaan ojol Bukan merupakan kewenagan Dinas Perhubungan Kota Palu	USULAN POKIR
7	Bantuan untuk BBM bersubsidi bagi ojol		Jalan Sisingamangaraja, Kota Palu				terkait pengelolaan ojol Bukan merupakan kewenagan Dinas Perhubungan Kota Palu	USULAN POKIR
8	Mohon agar parkir liar ditertibkan	*PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir/Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*	Jalan Sisingamangaraja, Kota Palu	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			telah dilakukan dengan melakukan revisi perda dan perwali tengan pengelolaan parkir tepi jalan umum yang memuat denda dan kurungan terhadap Juru Parkir Ilegal	USULAN POKIR
9	Mohon dibuatkan aturan untuk perlindungan mitra ojol		Jalan Sisingamangaraja, Kota Palu				terkait pengelolaan ojol Bukan merupakan kewenagan Dinas Perhubungan Kota Palu	USULAN POKIR

Page 1

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan untuk Dinas Perhubungan Kota Palu tahun 2024 berdasarkan pada kebutuhan di Dinas Perhubugan Kota Palu diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NAMA OPD : *DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU*

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	RENCANA T.A 2024						CATATAN PENTING
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG		
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU	TARGET CAPAIAN KINERJA	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =(8-6)	10= (9/6)	11
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan									
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	1 Dokumen	Rp 4.109.250	2 Dokumen	Rp 4.109.250	Rp -	0	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	Palu	1 Dokumen	Rp 6.234.000	1 Dokumen	Rp 8.433.750	Rp 2.199.750	35	
03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palu	1 Dokumen	Rp 5.960.000	1 Dokumen	Rp 9.813.800	Rp 3.853.800	65	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	1 Dokumen	Rp 4.079.450	1 Dokumen	Rp 4.620.550	Rp 541.100	13	
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	108 OB	Rp 8.734.319.930	108 OB	Rp 8.721.379.249	Rp (12.940.681)	0	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Palu	12 Laporan	Rp 14.575.950	12 Laporan	Rp 23.920.000	Rp 9.344.050	64	
2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Cakupan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah								
10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	50 Orang	Rp 13.442.500	50 Orang	Rp 13.442.500	Rp -	0	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	1 Orang	Rp 44.273.000	1 Orang	Rp 44.273.000	Rp -	0	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palu	19 buah	Rp 1.273.000	19 buah	Rp 1.273.000	Rp -	0	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palu	8 item	Rp 73.191.200	8 item	Rp 136.471.200	Rp 63.280.000	86	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palu	30 item	Rp 55.380.100	30 item	Rp 58.190.400	Rp 2.810.300	5	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Palu	6 Item	Rp 15.925.400	6 Item	Rp 16.843.100	Rp 917.700	6	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Palu	7 Dokumen	Rp 52.542.800	7 Dokumen	Rp 47.142.800	Rp (5.400.000)	-10	
08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palu	12 Laporan	Rp 7.660.000	12 Laporan	Rp 7.660.000	Rp -	0	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Rp 333.532.000	12 Laporan	Rp 452.696.000	Rp 119.164.000	36	
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Palu	1 Unit	Rp 35.000.000		Rp -	Rp (35.000.000)	-100	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan								
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palu	12 Laporan	Rp 126.731.200	12 Laporan	Rp 136.731.200	Rp 10.000.000	8	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palu	12 Laporan	Rp 2.832.861.600	12 Laporan	Rp 2.563.677.100	Rp (269.184.500)	-10	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Palu	40 Unit	Rp 330.035.000	40 Unit	Rp 385.420.000	Rp 55.385.000	17	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasioanal atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Palu	47 Unit	Rp 268.640.000	47 Unit	Rp 308.640.000	Rp 40.000.000	15	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Palu	35 Unit	Rp 5.720.000	35 Unit	Rp 5.720.000	Rp -	0	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palu	11 Unit	Rp 4.380.000	11 Unit	Rp 4.380.000	Rp -	0	

2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar														
	15				Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan														
		02			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)													
			2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													
				02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	Palu	4	item	Rp	53.473.000	4	item	Rp	53.473.000	Rp	-	0	
				04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Palu	17	Unit	Rp	63.944.750	17	Unit	Rp	63.944.750	Rp	-	0	
			2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C													
				06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Palu	3	Unit	Rp	41.332.400	3	Unit	Rp	40.204.400	Rp	(1.128.000)	-3	
			2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir													
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Palu	12	Laporan	Rp	1.242.711.300	12	Laporan	Rp	978.320.800	Rp	(264.390.500)	-21	
			2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
				01	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Palu	1	Paket	Rp	53.734.600	1	Paket	Rp	42.133.600	Rp	(11.601.000)	-22	
			2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
				16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Palu	6	item	Rp	103.370.500	10	item	Rp	207.329.200	Rp	103.958.700	101	
				15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Palu	12	Laporan	Rp	26.199.750	12	Laporan	Rp	23.850.000	Rp	(2.349.750)	-9	
			2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota													
				05	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Palu	12	Laporan	Rp	14.836.300	12	Laporan	Rp	14.836.300	Rp	-	0	
			2.08		Audit dan inspeksi keselamtan LLAJ di Jalan	Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan													
				06	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Palu	2	Laporan	Rp	17.980.000	2	Laporan	Rp	14.047.500	Rp	(3.932.500)	-22	
			2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
				01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Palu	10	Trayek	Rp	675.780.950	10	Trayek	Rp	7.399.542.450	Rp	6.723.761.500	995	
			2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
				03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Palu	12	Dokumen	Rp	447.545.200	12	Dokumen	Rp	582.916.200	Rp	135.371.000	30	
										Rp	15.710.775.130			Rp22.375.435.099	Rp	6.664.659.969		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun untuk dapat digunakan dalam pencapaian tujuan, sasaran program/kegiatan bidang perhubungan khususnya perhubungan darat guna mengsukseskan visi dan misi pemerintah daerah Kota Palu. Keberhasilan dalam pencapaian Tujuan dan sasaran tersebut perlu ditunjang dengan manajemen, koordinasi, komitmen dan disiplin para penyelenggara pemerintah dari para pemangku kepentingan lainnya (Stakeholder) serta dukungan dan partisipasi masyarakat secara umum.

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 dan rencana tindak lanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prioritas

Program/Kegiatan yang berupa usulan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada Tahun 2023.

2. Sinkronisasi

Sinkronisasi dan koordinasi dengan PD pemangku kepentingan dalam membuat sebuah program/kegiatan penting dilakukan guna mencapai tujuan yang lebih terarah, tepat sasaran, efektif dan efesien.

3. Sinergitas

Pentingnya sinergitas dan kerjasama kemitraan yang kondusif antara berbagai pihak terkait untuk saling mendukung dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang akan dilakukan (Kepolisian, TNI,ORGANDA, PO dll).

Dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Palu Tahun 2024 ini diharapkan mampu memberikan hasil sesuai target dan capaian yang telah ditetapkan.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALU

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), menyusun Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra OPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu tahun 2024 harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah, bersinergi dengan

prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, serta harus menjadikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditentukan oleh kementerian terkait sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu.

Dalam hal pelaksanaan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu menyusun Perencanaan Program dan kegiatannya yang dihimpun secara sistematis dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman kerja kurun waktu lima tahun yang kemudian di jabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD tahunan sebagai acuan kerja bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu untuk setiap tahunnya.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Renja-OPD) Kota Palu 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 TAhun 2020 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-
12. 2024;

13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Musrenbang
17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu;
18. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 ;
19. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016 - 2021;
20. Peraturan Daerah Kota Palu No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

22. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 tahun 2022 tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.
23. Peraturan Walikota Palu No.4 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
24. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15)

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu dimaksudkan adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun mendatang. Adapun tujuan penyusunan Renja OPD adalah:

1. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan daerah (RKPD).
2. Menciptakan sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan tahunan, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu dan RKPD.
3. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
4. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu.

5. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penyusunan Rancangan Renja Perubahan 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan yang meliputi :

1.1. Latar Belakang,
1.2. Landasan Hukum,
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
2.5. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan pengumpulan usulan dari masyarakat melalui MUSRENBANG.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang hal-hal mendapat perhatian dalam pelaksanaan program/kegiatan dan yang belum sesuai dengan kebutuhan anggaran, serta rencana tindak lanjut Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

Rancangan Akhir Rencana Kerja – Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (RENSTRA). Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik kota Palu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

Pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya,

mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi seperti yang terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Sakip OPD	B	BB	BB				

					DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2	**16**	**01**	**2,01**		**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**4**						
2	16	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	4	2	1	50%	5	50%
2	16	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	4	2	1	50%	5	50%
2	16	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	2	1	0	0%	2	40%
2	16	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	2	1	0	0%	2	40%
2	**16**	**1**	**2.02**		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Realisasi Keuangan**							

2	16	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2340	936	468	234	50%	1.170	50%
2	16	1	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	2	1	0	0%	2	40%
2	**16**	**1**	**2.03**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**							
2	16	1	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	2	1	0	0%	2	40%
2	16	1	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	2	1	0	0%	2	40%
2	16	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	2	1	0	0%	2	40%
2	16	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	2	1	0	0%	2	40%

2	16	1	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	2	1	0	0%	2	40%
2	16	1	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	2	1	0	0%	2	40%
2	16	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	2	1	0	0%	2	40%
2	**16**	**1**	**2.08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**						-	
2	16	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	2	1	0	0%	2	40%
2	16	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	2	1	0	0%	2	40%
2	**16**	**1**	**2.09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**						-	
2	16	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	20	8	4	2	50%	10	50%

					Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
2	16	1	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	8	4	2	50%	10	50%
2	16	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115	46	23	0	0%	46	40%
2	16	1	2,09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	6	6	0	0%	6	40%
2	**16**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik**							
2	**16**	**2**	**2.01**		**PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Palu							
2	**16**	**2**	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	20	8	4	0	0%	8	40%
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAN**	**Cakupan Pengelolaan**							

					APLIKASI INFORMATIKA	**Aplikasi Informatika**						-	
2	**16**	**03**	**2.02**		**PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						-	
2	**16**	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	20	8	4	0	0%	8	40%
2	16	3	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	15	6	3	0	0%	6	40%
2	16	3	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	20	8	4	0	0%	8	40%
2	16	3	2,02	12	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	5	2	1	0	0%	2	40%
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase pemenuhan data statistik Sektoral							
2	**20**	**02**	**2.0**		**Penyelenggaraan Statistik**	Cakupan Penyelenggaraan							

			1		**Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Palu							
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	20	8	4	0	0%	8	40%
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	4	2	1	0	0%	2	50%
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	205	33	41	0	0%	33	16%
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi							
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terselenggaranya Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5	2	1	0	0%	2	40%
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis	Jumlah Laporan Analisis							

					Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10	4	2	0	0%	4	40%
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	20	8	4	0	0%	8	40%

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu didukung 5 program, 9 kegiatan dan 30 sub kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.371.069.918,- (Sembilan miliar tiga ratus tujuh Puluh satu juta Tujuh enam puluh sembilan ribu Sembilan ratus delapan belas rupiah) dengan rincian :

a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.223.045.655,-, realisasi sampai dengan triwulan II, sebesar Rp. 1.864.847.180,- atau nilai serapan anggarannya sebesar 44%.

b) Belanja Barang Jasa sebesar Rp.6.437.482.500,- hingga triwulan II realisasinya sebesar Rp. 2.326.644.552,- dengan nilai serapan anggaran 36%.

c) Belanja Modal sebesar Rp. 82.252.200,- dengan realisasi hingga triwulan II Rp. 2.400.000 atau capaian serapan anggarannya sebesar 2,9%.

Berdasarkan Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu Tahun 2024 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a) Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang telah direncanakan

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada APBD Perubahan 2024 triwulan II, baik program maupun kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan.

b) Program/kegiatan telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan

Pada dasarnya semua program / kegiatan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan.

c) Program / kegiatan yang telah melebihi target kinerja yang telah di rencanakan

Pelaksanaan kegiatan APBD 2024 hingga triwulan II secara umum tidak ada program atau pun kegiatan yang melebihi target kinerja yang telah direncanakan

d) Faktor-faktor pendukung terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

1. Manajemen pelaksanaan kegiatan yang terarah dari tahap penyusunan rencana kinerja, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, sehingga realisasi program/kegiatan di tahun berjalan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah.
3. Tersedianya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD.
4. Komitmen dari pengampu program / kegiatan untuk tetap konsisten dalam pencapaian target kinerja yang menjadi tolak ukur dalam pelaksananan kegiatan tersebut.

e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi/dampak yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD antara lain Realisasi Renja Tahun 2024 mempengaruhi terhadap pencapaian target Program Renstra OPD, dimana pada Posisi Bulan Juni tahun 20224 terealisasi sebesar 40% dari target 100% yang direncanakan.

f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1. *Meningkatkan kualitas pendampingan / asistensi kepada perangkat daerah mitra dalam setiap tahapan penyusunan renstra dan Renja perangkat daerah.*
2. *Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil renja dan renstra perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya*
3. *Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.*

   Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.
4. *Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan.*

Belum memadainya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian dan seksi. Perlunya penambahan pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai. Serta pengadaan bimbingan dan pelatihan bagi pegawai yang sudah ada.

5. *Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.*

   Aspek kerugian negara diupayakan resikonya dapat diminimalisir. kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Analisis KinerjaPelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian telah memiliki tolak ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja dan sebagai penjabaran akuntabilitas.

Analisis kinerja pelayanan ini merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditetapkan, baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021 –2026. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.2 (TC-30) berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKU/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE	0	2,4	2.6	3	2,54		2.6	3	
2	Jumlah Perangkat Daerah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	100%	100%	100%	98,80%		100%	100%	
3	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemrintah kota.	0	85%	90%	100%	100%		90%	100%	

	pemerintah daerah kota											
4	Penerapan sistem Pengamanan Informasi		Indeks Kami	0	25%	25%	75%	16,3%		25%	75%	
5	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dam menyusun perencanaan pembangunan daerah		Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0	50%	75%	100%	80,84%		75%	100%	
6	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		Persentase OPD yang menggunakan dta statistik dalam melakukan evaluasi pembagunan daerah	0	50%	75%	100%	80,84%		75%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu.

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kota Palu adalah :

1. Implementasi e-Government

Implementasi e-Government di Kota Palu berkembang cukup signifikan, oleh karena itu perlu terus dikembangkan di berbagai aspek yang mendorong tercapainya efektifitas dan efisiensi kinerja dan pelayanan publik yang mencakup antara lain : Infrastruktur, aplikasi, Kelembagaan, perencanaan dan kebijakan pada seluruh

perangkat daerah di Kota Palu. Sangat Penting untuk dilakukan pengintegrasian sistem-sistem aplikasi yang ada di seluruh perangkat daerah, sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam kinerja dan pelayanan publik. Terutama dikembangkannya infrastruktur jaringan TIK, terutama jaringan TIK berbasis F.O (Fiber Optic) secara menyeluruh, sehingga dapat diwujudkan kecepatan pelayanan jaringan dan kinerja OPD-OPD dan fungsi pelayanan publik dapat maksimal.

2. Data Center, Comand Center dan Media Center

Pembangunan data center yang baik dan terintegrasi diharuskan mempunyai beberapa sarana penunjang yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan peralatan yang lainnya dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Desain dan pembangunan data center yang baik dengan terintegrasi diharuskan mengacu pada standarisasi internasional dan implementator yang akan membangun data center. Adapun manfaat data center sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan e-government di Kota Palu yang semakin berkembang, serta memberikan akses data dan informasi bagi aparatur dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu saat ini hanya memiliki Command Center yang selama ini berfungsi sebagai pemantau CCTV ATCS, tempat kegiatan / pertemuan Via video Confrence dan terkadang sebagai tempat rapat oleh perangkat daerah.

3. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang- Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu agar mampu melaksanakannya serta menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (source), saluran (channel) dan penerima (receiver) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang top-down tidak lagi relevan untuk diterapkan. Masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang bottom-up adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.

Terkait dengan Perencanaan Pembangunan Kota Palu dalam hal pengembangan teknologi informasi, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

a) Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam mencapai Good Governance.

b) Belum optimal keterisian data statistik sektoral OPD pada googledrive
c) Belum optimalnya pelayanan publik berbasis TIK
d) Belum terintegrasinya data seluruh perangkat daerah
e) Belum adanya sistem informasi teknologi yang digunakan dalam pendataan.
f) Belum optimalnya regulasi tentang tata kelola komunikasi informatika, statistik dan Persandian.
g) Sumber daya aparatur Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian belum memadai.
h) Belum optimalnya infrastruktur jaringan TIK.
i) Belum maksimalnya peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi smart city.
j) Belum optimalnya diseminasi informasi
k) Belum optimal pemberdayaan komunitas informasi masyarakat.
l) Belum optimalmya layanan interaktif pemerintah dan masyarakat.
m) Belum terbentuknya lembaga Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (bakohumas) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
n) Kurangnya sarana dan prasarana perangkat terkait pengelolaan data statistik sektoral.
o) Kurangnya SDM dalam pengelolaan data statistik sektoral
p) Kurangnya dukungan anggaran dalam pengelolaan data statistik sektoral.
q) Belum optimalnya tugas dan fungsi kelembagaan persandian

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Palu Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kota Palu Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu Tahun 2023.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024

No.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**10.534.159.461**					**10.883.152.875**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Nilai SAKIP OPD	BB	**5.217.824.561**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Nilai SAKIP OPD	BB	**5.325.541.875**
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**4 Dokumen**	**25.825.000**	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**4 Dokumen**	**27.928.350**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.745.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.745.000

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.745.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.745.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.940.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.493.350
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.395.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.945.000
	ADMINISTRASI		**Persentase Realisasi**	**95%**	**4.108.085.961**	**ADMINISTRASI**		**Persentase**	**95%**	

	KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		**Keuangan**			**KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**		**Realisasi Keuangan**		**4.267.567.125**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 org/bln	4.096.676.961	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 org/bln	4.254.557.125
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	11.409.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	13.010.000
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**224.583.500**	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**252.503.200**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	974.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	974.000

			yang Disediakan					yang Disediakan		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	34.038.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	61.958.200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	13.006.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	13.006.500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.746.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.746.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	7.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	7.100.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	9.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	9.700.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	154.018.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	154.018.000
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**100%**	**359.896.100**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**100%**	**340.794.700**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	34.200.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	13.199.100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	325.695.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	327.595.600
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**499.434.000**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**436.748.500**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	322.220.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	267.100.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	38.144.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	28.018.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	730.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	5.110.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	138.340.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	136.520.000
2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN**		**Cakupan pengelolaan informasi dan**	100%	**952.051.200**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN**		**Cakupan pengelolaan informasi dan**	**100%**	**1.440.391.200**

	KOMUNIKASI PUBLIK		**komunikasi publik**			**KOMUNIKASI PUBLIK**		**komunikasi publik**		
	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**	100%	**952.051.200**	**PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.440.391.200**
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 dokumen	952.051.200	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 dokumen	1.440.391.200
3	**PROGRAM PENGELOLAN APLIKASI INFORMATIKA**		**Cakupan pengelolaan aplikasi informatika**	**100%**	**4.085.983.000**	**PROGRAM PENGELOLAN APLIKASI INFORMATIKA**		**Cakupan pengelolaan aplikasi informatika**	**100%**	**3.778.027.350**
	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Terlaksananya Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**4.085.983.000**	**PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Terlaksananya Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**3.778.027.350**

	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 dokumen	3.673.376.050	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 dokumen	3.430.950.350
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 unit	304.320.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 unit	289.402.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4 dokumen	72.580.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4 dokumen	28.350.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	35.706.950	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	29.325.000

4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**Persentase pemenuhan data statistik Sektoral**	**100%**	**145.586.450**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**Persentase pemenuhan data statistik Sektoral**	**100%**	**217.797.200**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		**Terselenggaranya Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**145.586.450**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**		**Terselenggaranya Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**217.797.200**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dokumen	96.558.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dokumen	181.435.000
	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	7.674.750	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	3.837.200
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	41 Perangkat Daerah	18.640.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	41 Perangkat Daerah	9.811.300
	Pengembagan Infrastruktur		Jumlah Infra Struktur Statistik	1 unit	22.713.700	Pengembagan Infrastruktur		Jumlah Infra Struktur Statistik	1 Unit	22.713.700

5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi**	**100%**	**132.714.250**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi**	**100%**	**121.395.250**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Terselenggaranya Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**132.714.250**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Terselenggaranya Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**121.395.250**
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dokumen	12.637.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dokumen	12.637.000
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	2 laporan	64.845.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	2 laporan	64.859.000

			Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 laporan	55.232.250	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 laporan	43.899.250

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu dengan hasil pencapaian target tahunan. Rancangan awal perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik senantiasa diselaraskan dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat Kotamadya. Salah satu proses perencanaan yang dilakukan melakukan pengumpulan informasi usulan masyarakat melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kota Palu dan forum SKPD, yang menghasilkan kesepakatan program/kegiatan antara pelaku pembangunan yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja SKPD dan usulan kebutuhan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan kota palu, sehingga diharapkan adanya

peran serta masyarakat yang nantinya akan mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil Musrenbang dan Forum SKPD Kota Palu Tahun 2023 usulan pembangunan bidang komunikasi dan informatika dari pemangku kepentingan yang diusulkan untuk pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 adalah "Belanja CCTV" Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu telah menampung usulan tersebut diatas dan telah dimasukan dalam program kegiatan Tahun 2024, seperti yang tampak pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepetingan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Capaian
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kota Palu			
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Cakupan pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaran Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		
	Belanja CCTV (CCTV dan Kabel, instalasi listrik, box panel , UPS dan NVR)			2 Set	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

3.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2024

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merumuskan kebijakan operasional Dinas, mengendalikan dan membina serta memberikan pelayanan teknis di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu secara terpadu bersama-sama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yang ditetapkan secara menyeluruh dan terpadu serta memberikan kesatuan pandangan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas terdiri dari 5 Program, 9 kegiatan dan 30 sub kegiatan.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu pada prisnsipnya membutuhkan masukan berupa pendanaan untuk

mengakomodir program/kegiatan yang mengalami pergeseran atau sebagai dana tambahan untuk optimalisasi kegiatan-kegiatan tertentu. Perubahan Rencana Kerja dan pagu anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu dapat dilihat pada table 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
								Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1					2	3	4	5	6	7	8	9= (8-6)	10 = (9/6)	11
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**10.534.159.461**		**10.883.152.875**	348.993.414	3,3	
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5.217.824.561**		**5.325.541.875**	107.717.314	2,1	
2	**16**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**			**25.825.000**		**27.928.350**	2.103.350	8,1	
2	16	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	6.745.000	1 Dokumen	6.745.000	0	-	

2	16	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	6.745.000	1 Dokumen	6.745.000	0	-	
2	16	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		1 Dokumen	6.940.000	1 Dokumen	7.493.350	553.350	8,0	
2	16	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	5.395.000	1 Laporan	6.945.000	1.550.000	28,7	
2	**16**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan**			**4.108.085.961**		**4.267.567.125**	159.481.164	3,9	
2	16	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		39 Orang/b	4.096.676.961	39 Orang/bln	4.254.557.125	157.880.164	3,9	
2	16	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD		1 Laporan	11.409.000	1 Laporan	13.010.000	1.601.000	14,0	
2	**16**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi**			**224.583.500**		**252.503.200**	27.919.700	12,4	

						Umum Perangkat Daerah								
2	16	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	974.000	1 Paket	974.000	0	-	
2	16	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	34.038.500	1 Paket	61.958.200	27.919.700	82,0	
2	16	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	13.006.500	1 Paket	13.006.500	0	-	
2	16	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	5.746.500	1 Paket	5.746.500	0	-	
2	16	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	7.100.000	1 Dokumen	7.100.000	0	-	
2	16	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	9.700.000	1 Laporan	9.700.000	0	-	
2	16	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD		1 Laporan	154.018.000	12 Laporan	154.018.000	0	-	
2	**16**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**			**359.896.100**	100%	**340.794.700**	-19.101.400	- 5,3	
2	16	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya		1 Laporan	34.200.500	12 Laporan	13.199.100	-21.001.400	- 61,4	

						Air dan Listrik yang Disediakan								
2	16	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	325.695.600	12 Laporan	327.595.600	1.900.000	0,6	
2	**16**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**			**499.434.000**		**436.748.500**	-62.685.500	-12,6	
2	16	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		18 Unit	322.220.000	4 Unit	267.100.000	-55.120.000	-17,1	
2	16	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 Unit	38.144.000	4 Unit	28.018.500	-10.125.500	-26,5	
2	16	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		16 Unit	730.000	10 Unit	5.110.000	4.380.000	600,0	
2	16	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 Unit	138.340.000	2 Unit	136.520.000	-1.820.000	-1,3	
2	**16**	**2**			**PROGRAM**	**Cakupan pengelolaan**		100%	**952.051.200**	100%	**1.440.391.200**	488.340.000		

					PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**informasi dan komunikasi publik**								51,3	
2	**16**	**2**	**2,01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten / Kota**	**Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Palu**		100%	**952.051.200**	100%	**1.440.391.200**	488.340.000		51,3	
2	16	2	2,01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		4 Dokumen	952.051.200	4 Dokumen	1.440.391.200	488.340.000		51,3	
2	**16**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Cakupan pengelolaan aplikasi informatika**		100%	**4.085.983.000**	100%	**3.778.027.350**	-307.955.650		-7,5	
2	**16**	**3**	**2,02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Cakupan pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		100%	**4.085.983.000**	100%	**3.778.027.350**	-307.955.650		-7,5	
2	16	3	2,02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		4 Dokumen	3.673.376.050	4 Dokumen	3.430.950.350	-242.425.700		-6,6	
2	16	3	2,02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		1 Unit	304.320.000	3 Aplikasi	289.402.000	-14.918.000		-4,9	
2	16	3	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan		4 Dokumen	72.580.000	1 Dokumen	28.350.000	-44.230.000		-60,9	

					Daerah	Komunikasi Pemerintah Daerah								
2	16	3	2,02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE		1 Dokumen	35.706.950	1 Dokumen	29.325.000	-6.381.950	-17,9	
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase pemenuhan data statistik sektoral**			**145.586.450**		**217.797.200**	72.210.750	49,6	
2	**20**	**2**	**2,01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Palu**		100%	**145.586.450**	100%	**217.797.200**	72.210.750	49,6	
2	20	2	2,01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		4 Dokumen	96.558.000	4 Dokumen	181.435.000	84.877.000	87,9	
2	20	2	2,01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		1 Dokumen	7.674.750	1 Dokumen	3.837.200	-3.837.550	-50,0	
2	20	2	2,01	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		41 Orang	18.640.000	41 Orang	9.811.300	-8.828.700	-47,4	
2	20	2	2,01	5	Pengembangan Infrastruktur		-	-	22.713.700	-	22.713.700	-	-	
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**			**132.714.250**		**121.395.250**	-11.319.000	-8,5	

2	**21**	**2**	**2,01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkup Daerah Kota Palu**			**132.714.250**		**121.395.250**	-11.319.000	- 8,5	
2	21	2	2,01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		1 Dokumen	12.637.000	1 Dokumen	12.637.000	0	-	
2	21	2	2,01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2 Laporan	64.845.000	2 Laporan	64.859.000	14.000	0,0	
2	21	2	2,01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		4 Laporan	55.232.250	4 Laporan	43.899.250	-11.333.000	- 20,5	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026. Rancangan akhir Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu disusun dengan berdasarkan azas perencanaan yang terpadu dan optimal yang berbasis kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel dan sebagai tolak ukur untuk melaksanakan program/kegiatan tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2024 juga bertujuan sebagai pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu selama Tahun Anggaran 2024, serta sebagai alat pengukur pencapaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan oleh tim, individu, dan institusi organisasi dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Selain itu, Renja Perubahan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitman pimpinan dan segenap staf Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu.

Semoga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu tahun 2024 ini memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA PALU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu yang disusun sebagai Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu, untuk periode satu tahun, dan juga sebagai dasar penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Tahun 2022 merupakan penjabaran atas Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Tahun 2021-2026. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu (RKPD) Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja yang merupakan acuan dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja Tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja dilakukan untuk mendapatkan singkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan RKPD Perubahan Pemerintah Kota Palu. Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu serta sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja

Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat kegiatan penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Tahun 2022 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kemampuan manajemen Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu dalam menghasilkan produk perencanaan dan penganggaran yang tepat (waktu, prosedur serta aturan), sinkron (lintas program, lintas sektor, lintas kabupaten / kota dan pusat) dan selaras dengan arah kebijakan yang ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata tugas, Fumgsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu;
31. Peraturan Walikota Palu Nomor 4 tahun 2024 Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Kerja;
32. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Palu (P-RKPD).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen perubahan rancana kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu tahun 2024 adalah selaras dengan maksud dan tujuan strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu Tahun 2021-2026 yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program/kegiatan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Anggaran Tahun 2024 ;
b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Palu Tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.
c. Menyusun tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu.
d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsisten serta keselarasan antara dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas

Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SEMESTER II.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester II
2.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Rencana Kerja Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA KOTA PALU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pengendalian pelaksanaan rencana kerja dimaksudkan untuk menjamin bahwa prioritas, sasaran program dan kegiatan serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam rencana kerja dapat terlakasan. Hal ini adalah sebagai tolok ukur capaian kinerja pada Dinas Koperasi,UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu, dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan RKPD Pemerintah Daerah. Khususnya Rencana priotitas Dinas Koperasi,UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu .

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, sehingga dengan melihat tabel diatas dapat di lihat bahwa 9 (Sembilan) program dan 12 (Duabelas) kegiatan akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada target capaian program renstra Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 dan capaian kinerja pemerintah daerah sesuai dengan visi misinya yang diaplikasikan kedalam 53 program prioritas pembangunan daerah.

Secara keseluruhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu merumuskan 9 (Sembilan) program dan 12 (duabelas) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut di alokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, secara rinci rencana dan realisasi program kegiatan sampai dengan triwulan dua tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
2	**07**				**Urusan Tenaga Kerja**								
					Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja	100 %	-	-	-	-	-	-
					Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1 Dok	-	-	-	-	-	-
					Penyusunan Rencana Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Makro	1 Dok	-	-	-	-	-	-
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	10 %						

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompotensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	1100 Org	150 Org	210	-	0	150	14
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompotensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1100 Org	150 Org	210	-	0	150	14
					Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	-	-	-	-	-	-
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Tersertifikasi	46 Lembaga	-	-	-	-	-	-
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	46 Lembaga	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Yang terdaftar dan Memiliki Izin	230 Lembaga	-	-	-	-	-	-
					Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegras	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	230 perizinan	-	-	-	-	-	-
					Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Layanan Konsultansi Produktifitas Kerja	1 Layanan	-	-	-	-	-	-
					Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	100 Perusahaan	-	-	-	-	-	-
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dok	-	-	-	-	-	-
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	43,6%	8,7	8,7	8,7	100	26,16	60
					Pelayanan antar Kerja Didaerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	2750 Org	550					
					Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	50 Orang	-					

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2750 Org	550					
					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	550 Org	-					
					Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	2100 Org	-	-	-	-	-	-
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data Informasi Pasar Kerja Yang tersedia	60 Dok	12	12	6	50	18	30
					Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60 Dok	12	12	6	50	18	30

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	32670 orang	6534	6750	3001	44,4	9535	29
					Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	2500 Orang	-	-	-	-	-	-
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Migran Yang terfasilitasi	21 Org	-	-	-	-	-	-
					Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 Org	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	1 orang	-	-	-	-	-	-
					Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Purna PMI yang diberdayakan	10 Org	-	-	-	-	-	-
					Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi IMTA	60 Dok	-	-	-	-	-	-
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perpanjangan IMTA	60 Dok	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	100 %	20	20	20	100	85	85
					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian yang terverifikasi	36 Dok	-	-	-	-	36	100
					Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	150 Perusahaan	-	-	-	-	30	100
					Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	150 Perusahaan	-	-	-	-	4	100

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	-	-	-	-	2	100
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial	350 Kasus	40	30	30	100	110	31
					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	200 Perkara	40	40	18	45	58	29

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota								
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	350 Perkara	70	30	18	60	88	25
					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Anggota Organisasi serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Yang Terverifikasi	50 Asosiasi serikat Pekerja	10	-	-	-	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	60 Laporan	12	-	-	-	-	-
					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Pekerja yang mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5 Dok	1	-	-	-	-	-
2	**1 7**				**Urusan Koperasi Dan UMKM**								
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	18,98 %	3.7	3,7	3,7	100	11,1	58
					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dalam Dearah Kabupaten / Kota	215 Koperasi	40	20	20	100	80	37

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	215 Koperasi	20	50	45	90	65	30
					Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	215 Koperasi	20	50	45	90	65	30
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi aktif	5,2 %	1,04					

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	41 Koperasi	10	40	-	-	10	24
					Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	215 Unit Usaha	40	40	-	-	40	19
					Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	5 Unit Usaha	-	1	-	0	-	0
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	**Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan latihan perkoperasian**	100 %	20	20	20	100	60	60

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Koperasi Yang Dilatih Dalam Daerah Kota	215 Koperasi	80	80	0	0	80	37
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	400 Org	80	80	0	0	80	20
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	5 %	-	-	-	-	-	-
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dalam Kabupaten/Kota	25 Koperasi	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	25 Koperasi	-	-	-	-	-	-
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	66 %	13	13	7,8	60	20,8	31,5

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	5000 UMKM	200	200	120	60	320	6
					Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	4500 UMKM	200	200	120	60	320	7

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	5000 UMKM	-	-	-	-	-	-
					Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	5000 UMKM	-	-	-	-	-	-
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit	-	-	-	-	-	-
					Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku	250 Org	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
						Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro							
					Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	5,1 %	1,02	1,02	1,02	100	3,6	60
					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Keci	1200 UMKM	200	200	200	100	600	50
					Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang difasilitasi Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,	1200 UMKM	200	200	-	-	200	17

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
						Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi							
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Daerah	100 %	20	20	4,6	24,6	24,6	24
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Yang Tersusun	110 dok	22	22	22	100	66	60
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dok	4	4	4	100	12	60
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dok	1	1	1	100	3	60

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dok	1	1	1	100	3	60
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dok	1	1	1	100	3	60
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dok	1	1	1	100	3	60

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	10 Dok	2	2	2	100	4	40
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Lap	12	12	6	100	18	30
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	2085 dok	417	429	202	100	419	15
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	14	14	8	47	42	16
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250 Dok	50	50	25	50	75	30

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1750 Dok	350	350	136	39	486	28
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dok	1	1	1	100	2	40
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dok	2	2	2	100	4	40
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang	70 Dok	14	14	14	100	41	60

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dok	2	2	1	50	3	30
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Dok	12	12	6	50	18	30
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	60 Dok	12	12	6	50	18	30
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dok	12	12	6	50	18	30
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	130930 Paket	24320	11586	1948	17	26268	20

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	350 Paket	70	70	-	0	70	20
					Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	10	10	-	0	10	17
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	10	-	-	0	10	20
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80000 Paket	21472	1400	1400	100	22872	29
					Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50000 Paket	2662	1000	500	50	3162	6,3

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dok	24	24	12	50	36	30
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12	12	6	50	18	30
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultsi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	60	60	30	50	90	30
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia	59 Unit	12	-	-	-	12	20
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	-	-	-	-	-	-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	12	-	-	-	12	27
					Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180 Laporan	24	24	12	50	36	20

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Penyediaan Jasa Komukasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12	12	6	50	18	30
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12	12	6	50	18	30
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Yang Terpelihara	127 Unit	20	20	20	100	60	47
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	3	3	3	100	6	40

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	6	6	6	100	12	40
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Terpelihara	91 Unit	11	11	-	0	11	12
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	-	-
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang /Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4)
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	-	-

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, sehingga dengan melihat tabel diatas dapat di lihat bahwai 9 (Sembilan) program dan 12 (Duabelas) kegiatan akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada target capaian program renstra Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 untuk dapat mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi untuk melihat bagaimana upaya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebljakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan. Analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu Tahun 2021-2026. Di bawah ini disajikan tabel analisis

pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu.

Capaian kinerja pelayanan dinas koperasi umkm dan tenaga kerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Umkm dan Tenaga Kerja Kota Palu

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	SPM Tenaga Kerja (Permenaker No 2 Tahun 2014)											
A	Pelayanan Pelatihan Kerja											
1	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	60				45	50			45	50	
B	Pelayanan Penempatan Kerja											
2	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40				0,54	0,77			0,54	0,77	
C	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial											
3	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50				0,35	0,30			0,35	0,30	
D	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek											
3	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek aktif	50				0.47	0.6			0.47	0.6	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
II	Koperasi dan UMKM											
A	Koperasi											
5	Persentase Koperasi Sehat		4,33			52,37	57,6			52,37	57,6	
6	Persentase Koperasi yang ditingkatkan Kapasitas dan Kualitas Usaha		5			25	30			25	30	
B	UMKM											
7	Persentase Usaha Mikro Yang ditingkatkan Kapasitas dan Kualitas produk		2			0.59	0.79			0.59	0.79	
III	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah											
8	Nilai Sakip OPD		85			BB	A			BB	A	
9	Survey Kepuasan Masyarakat		90			A	A			A	A	

Capaian kinerja pelayanan dinas koperasi umkm dan tenaga kerja sampai dengan tahun 2024 belumlah sesuai dengan target indikator kinerja daerah sehingga perlu dilakukan reviuw terhadap target capaian kinerja pada pelaksanaan perubahan APBD-P tahun 2024 dengan melihat besarnya target yang ditetapkan akan tetapi tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan beberapa kegiatan yang menunjang program prioritas daerah bidang tenaga kerja, koperasi dan UMKM perlu untuk dipertimbangkan, review terhadap rancangan APBD-P perubahan dan analisis kebutuhan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan tahun 2024
Kota Palu

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Urusan Tenaga Kerja				Rp 1,021,499,050					Rp 932,030,150	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Palu	Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja	100	91,405,800	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Palu	Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja	100	91,405,800	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen perencanaan tenaga kerja	1 dok	91,405,800	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen perencanaan tenaga kerja	1 dok	91,405,800	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen Rencana Kerja Makro	1 dok	91,405,800	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen Rencana Kerja Makro	1 dok	91,405,800	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Palu	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2	538,925,000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Palu	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2	538,925,000	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompotensi		Jumlah Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	210	538,925,000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompotensi		Jumlah Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	210	538,925,000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompotensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	210	538,925,000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompotensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	210	538,925,000	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Palu	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0,54	90,053,750	Program Penempatan Tenaga Kerja	Palu	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0,54	53,224,250	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Data Informasi Pasar Kerja Yang tersedia	12 Dok	90,053,750	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Data Informasi Pasar Kerja Yang tersedia	12 Dok	53,224,250	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	6750 Org	90,053,750	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem	6750 Org	53,224,250	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Online (Karir Hub)			
	Program Hubungan Industrial	Palu	Persentase penyelesaian hubungan industrial	100	301.084.500	Program Hubungan Industrial	Palu	Persentase penyelesaian hubungan industrial	100	248.475.250	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja yang terverifika	12	51,387,300	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja yang terverifika	12	51,387,300	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4	51,387,300	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta	4	51,387,300	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Jamsostek serta Pengupahan			
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial	40	249,697,200	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial	40	197,087,800	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	40	249,697,200	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	40	197,087,800	
II	URUSAN KOPERASI DAN UKM				10.128.060.118					12.715.767.951	
	Program	Palu	Persentase	19	114,957,900	Program	Palu	Persentase	19	63,209,900	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Pemeriksaan dan Pengawasan		koperasi aktif			Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Pemeriksaan dan Pengawasan		koperasi aktif			
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Kota		Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	50	114,957,900	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Kota		Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	50	63,209,900	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	50	114,957,900	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas	50	63,209,900	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kabupaten/ Kota					Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota			
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Palu	Persentase koperasi sehat	1,9	33,525,000	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Palu	Persentase koperasi sehat	1,9	4,810,000	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi Sehat	41	33,525,000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi Sehat	41	4,810,000	
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	41	33,525,000	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	1	4,810,000	
	Program		Persentase	100	140,276,350	Program		Persentase		190,678,400	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendidikan Dan Pelatihan Perkoprasian		pemenuhan kebutuhan pendidikan dan latihan perkoperasian			Pendidikan Dan Pelatihan Perkoprasian		pemenuhan kebutuhan pendidikan dan latihan perkoperasian			
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi Yang Dilatih	50	140,276,350	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi Yang Dilatih		190,678,400	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50	140,276,350	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		190,678,400	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Palu	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	13	550,263,100	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Palu	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	13	531.572.540	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi,	200 UMKM	550,263,100	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi,	700 UMKM	531.572.540	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 Unit Usaha	550,263,100	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	700 Unit Usaha	531.572.540	
	Program Pengembangan UMKM	Palu	Cakupan pengembangan UMKM	4,7 Persen	3,380,792,350	Program Pengembangan UMKM	Palu	Cakupan pengembangan UMKM	4,7 Persen	6.216.673.092	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha		Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala	220	3,380,792,350	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha		Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dengan	220	6.216.673.092	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kecil		Usaha Menjadi Usaha Kecil			Kecil		Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah UMKM yang terfasilitasi	220	3,162,583,000	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah UMKM yang terfasilitasi	220	4.585.769.600	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	220	218,209,350	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	220	1.630.903.492	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Daerah	100 Persen	5,908,245,418	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Daerah	100 Persen	5,708,824,019	
	Penganggaran, dan Evaluasi		Jumlah Dokumen Perencanaan,	22	23,273,500	Penganggaran, dan Evaluasi		Jumlah Dokumen	22 Dok	28.073.450	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kinerja Perangkat Daerah		Penganggaran dan Kinerja Yang Tersusun			Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Yang Tersusun			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	3,551,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	3,551,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	8,490,700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	8,490,700	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	7.093,800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	11.893.750	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	1	4,138,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Laporan	4,138,000	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	14	4.317,522,818	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	429 Dok	4.206.861.069	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	4,311,272,618	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	4.200.610.869	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	2,987,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	2,987,200	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Akhir Tahun SKPD					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	3,263,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	3,263,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		6.951.150					6.951.150	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		6.951.150					6.951.150	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum	8	675,496,350	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum	11586 paket	608.636.750	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	35	4.120.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran	70 Paket	4,120,400	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	n Bangunan Kantor		n Bangunan Kantor yang Disediakan			an Bangunan Kantor		gan Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	280.907.400	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	411.957.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1400	36.777.950	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1400 Paket	44.847.450	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9000	11.325.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket	11,325,400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	1.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	1.400.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	800	7,284,200	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7,284,200	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	333,681,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	127,702,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah		Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	511,411,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 laporan	511,411,600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	45	57,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	57.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35	453,811,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	453,811,600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah Barang Yang Terpelihara	20	373,590,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah Barang Yang Terpelihara	23 Unit	346,890,000	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	330,220,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara	9	303,520,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	37,650,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	37,650,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	5,720,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	2	5,720,000	
Jumlah Pagu RAPBD-P					11.149.529,168					13.647.798.101	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Program Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja merupakan program Prioritas RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut, pemilihan kegiatan untuk masing – masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja. Kegiatan yang dipilih menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu.

Pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi kinerja, masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak kebijakan yang dibuat serta sebagai laporan petanggungjawaban.

Perumusan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu dilakukan dengan terlebih dahulu mengevaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya dan memperhitungkan prakiraan maju pada tahun berikutnya agar kesinambungan program dapat terintegrasi sesuai target kinerja dalam visi misi RPJMD Pemerintah Kota Palu. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu pada Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sarasan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
			Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Rp	%	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
07	Tenaga Kerja			Rp1,021,469,050		Rp 932,030,150	(89,438,900)	(8,76)	
02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja	100 Persen	91,405,800	100 Persen	91,405,800	-	0	
02.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen perencanaan tenaga kerja	1 Dok	91,405,800	1 Dok	91,405,800	-	0	
01.001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Kerja Makro	1 Dok	91,405,800	1 Dok	91,405,800	-	0	
03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2 Persen	538,925,000	2 Persen	538,925,000	-	0	
03.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompotensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	210 org	538,925,000	210 org	538,925,000	-	0	
01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompotensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	210 Org	538,925,000	210 Org	538,925,000	-	0	
04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	87 Persen	90,053,750	87 ersen	53,224,250	(36,829,500)	(40,90)	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data Informasi Pasar Kerja Yang tersedia	12 Dok	90,053,750	12 Dok	53,224,250	(36,829,500)	(40,90)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sarasan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
			Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Rp	%	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
01.03	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	6750 Org	90,053,750	6750 Org	53,224,250	(36,829,500)	(40,90)	
05	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian hubungan industrial	0,2 Persen	301.084.500	0,2 ersen	248,475,100	(52,609,400)-	(17,47)	
02,01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja yang terverifika	12 Dok	51,387,300	12 Dok	51,387,300	-	0	
01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 lap	51,387,300	4 lap	51,387,300	-	0	
02.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial	110 Perkara	249,697,200	110 perkara	197,087,800	(52,609,400)	(21,07)	
02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	40 Perkara	249,697,200	40 Perkara	197,087,800	(52,609,400)	(21,07)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sarasan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
			Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Rp	%	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
17	Urusan Koperasi dan UKM			10.128.060.118		13.347.588.051	3,219,527,933	31,79	
03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Pemeriksaan dan Pengawasan	Persentase koperasi aktif	18,98 persen	114,957,900	18,98 persen	63,209,900	(51,748,000)	(45.01)	
03.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	100 Koperasi	114,957,900	100 Koperasi	63,209,900	(51,748,000)	(45.01)	
01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha	114,957,900	50 Unit Usaha	63,209,900	(51,748,000)	(45.01)	
04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	5,2 persen	33,525,000	5,2 persen	4,810,000	(28,715,000)	(85,65)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sarasan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
			Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Rp	%	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
04.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	50 Koperasi	33,525,000	50 Koperasi	4,810,000	(28,715,000)	(85,65)	
01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	1 Unit Usaha	33,525,000	1 Unit Usaha	4,810,000	(28,715,000)	(85,65)	
	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoprasian	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan latihan perkoperasian	100 Persen	140,276,350	100 Persen	190,678,400	50,402,050	35,93	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Dilatih	50 Org	140,276,350	50 Org	190,678,400	50,402,050	35,93	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Org	140,276,350	50 Org	190,678,400	50,402,050	35,93	
07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100 Persen	550,263,100	100 Persen	531,572,540	(18.690.560)	(3,52)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sarasan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
			Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Rp	%	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
07.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	200 UMKM	550,263,100	200 UMKM	531,572,540	(18.690.560)	(3,52)	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	500 UMKM	550,263,100	1000 UMKM	531,572,540	(18.690.560)	(3,52)	
08	Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	4,7 Persen	3,380,792,350	4,7 Persen	6,216.673.092	2.835.880.741	45.62	
08.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	200 UMKm	3,380,792,350	200 UMKM	6,216.673.092	2.835.880.741	45.62	
01.01	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang terfasilitasi	200 UMKM	3.162.583.000	200 UMKM	4.585.769.600	1.423.186.600	79,49	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan,	220 UMKM	218,209,350	220 UMKM	1.630.903.492	1,412.694.142	486,32	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sarasan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
			Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Rp	%	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
		Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi							
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Daerah	100 Persen	5,908,245,418	100 Persen	5.708.824.019	(330,986,849)	(5,60)	
01.01	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Yang Tersusun	22 Dok	23,273,500	22 Dok	28.073.450	4.799.950	17.10	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	3,551,000	4 Dok	3,551,000	-	200	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	8,490,700	1 Dok	8,490,700	-	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7.093,800	1 Dok	11.893.750	4.799.950	40.36	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Laporan	4,138,000	2 Laporan	4,138,000	-	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sarasan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
			Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Rp	%	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	429 Dok	4.317,522,818	429 Dok	4.206.861.069	(110,661,749)	(0.97)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	4,311,272,618	14 Bulan	4,200.610.869	(110,661,749)	(0.97)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dok	2,987,200	2 dok	2,987,200	0	0	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		3,263,000		3,263,000	-	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	12 Dok	6.951.150		6.951.150	-	0	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	6.951.150		6.951.150	-	0	
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	11586 paket	675,496,350	11586 paket	608.636.750	(66.859.600)	(10.99)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sarasan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
			Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Rp	%	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	70 Paket	4.120.000	70 Paket	4.120.000	-	0	
	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	280.907.400	10 Paket	411.957.300	131.049.900	31.81	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1400 Paket	36.777.950	1400 Paket	44.847.450	8.069.500	17,99	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket	11.325.400	10000 Paket	11,325,400	-	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	1,400,000	24	1,400,000	-	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	7,284,200	12 laporan	7,284,200	-	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	333,681,000	60 laporan	127,702,000	(205,979,000)	(61,73)	
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 laporan	511,411,600	24 laporan	511,411,600	-	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Tujuan, Sarasan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
			Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Rp	%	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	57.600.000	12 laporan	57.600.000,00	-	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	453,811,600	12 laporan	453,811,600	-	0	
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Yang Terpelihara	24 Unit	373,590,000	24 Unit	346,890,000	(26,700.000	(7,15)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	330,220,000	9 Unit	303,520,000	(26,700.000)	(8,09)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	37,650,000	12 Unit	37,650,000	-	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,720,000	1 Unit	5,720,000	-	0	
	Jumlah Pagu Anggaran			11.149.529.168		14.279.618.201	3.172.211.931	22,40	

BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk selalu mempersiapkan dan mengembangkan kualitas sistem kinerja perencanaannya agar semakin menghampiri proses yang ideal dan persyaratkan sesuai aturan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting oleh karena dalam mengaplikasikan berbagai persoalan - persoalan terkait perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan lebih banyak para pelaku dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntunan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keperpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu selain menjadi pelaksana kegiatan selama tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan perangkat darah dan seluruh staf

Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa akan datang .

Dalam Upaya tersebut diharapkan dapat melakukan berbagai perubahan menuju perbaikan serta penyesuaian guna mempertanggung jawabkan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Beberapa sasaran yang telah di tetapkan beserta indikatornya diharapkan dapat dipenuhi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu melalui program kegiatan yang telah disusun beserta anggaran yang akan di peruntukkan bagi kelangsungan jalannya program kegiatan tersebut.

Prioritas untuk pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2024 Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu berkosentrasi untuk melaksanakan model Perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam proses perencanaan dan kerjasama semua stakeholder.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Administrator KEK Palu, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada Pasal 343 Permendagri disebutkan bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuain dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Perubahan Administrator KEK Palu Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2024, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palu Tahun 2024.

Renja Perubahan Administrator KEK Palu Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Administrator KEK Palu yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kota Palu maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 Administrator KEK Palu mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Perubahan Kota Palu Tahun 2024.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Administrator KEK Palu Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilaksanakan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

- Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah setelah terbit Surat Edaran Kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- Penyusunan Rancangan Perubahan berpedoman pada antara lain Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai triwulan II.
- Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah Melalui Bappeda untuk diverifikasi.
- Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi Rancangan Akhir Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Perubahan RKPD.
- Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi.

– Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renja Perubahan Administrator KEK tahun 2024 dengan RKPD Perubahan Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu khususnya 53 program unggulan dalam urusan penanaman modal yaitu program unggulan pelayanan perizinan cepat (quick service license).

Renja Perubahan Administrator KEK Palu juga mendukung sasaran DPMPTSP Kota Palu yakni meningkatkan realisasi penanaman modal dimana targetnya pada tahun 2024 realisasi investasi di kota Palu total sebesar Rp. 425,43 Milyar. Renja Administrator KEK Palu juga mendukung sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah yakni meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN serta daya tarik investasi dimana pada tahun 2024 ditargetkan realisasi investasi di Sulawesi Tengah total sebesar Rp. 37,750 Trilyun. Tema RKPD provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yaitu pengelolaan terpadu UMKM, pemulihan pasca bencana dan pendidikan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Sedangkan keterkaitan dengan RKP Nasional tahun 2024 yang memuat tema pemulihan ekonomoi dan reformasi struktural, Administrator KEK mendukung rencana kerja kementrian Investasi/BKPM yang menargetkan nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp. 1.650 Trilyun. Target tersebut sebagai salah satu upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4% - 6,0%.

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab dalam pemberian Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) yang diperlukan bagi pelaku usaha dalam Kawasan Ekonomi Khusus Palu dan melakukan pengawasan serta pengendalian operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Palu. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Administrator KEK Palu yang profesional dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka hal tersebut diatas, maka disusunlah Renja Perubahan Administrator KEK Palu Tahun Anggaran 2024 sebagai penjabaran dari RKPD Perubahan Kota Palu Tahun 2024 yang telah ditetapkan dan sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Administrator KEK Palu Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Palu;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran

Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
29. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi satuan organisasi pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu;
30. Peraturan Walikota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
31. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Perubahan Administrator KEK Palu Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai penyesuaian dari hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun anggaran 2024 khususnya pencapaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Hal ini dilakukan agar program kerja dan kegiatan sesuai dengan program kerja dan kegiatan dalam RKPD Perubahan Kota Palu Tahun 2024.

Renja Perubahan ini juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Administrator KEK Palu Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Administrator KEK Palu Tahun Anggaran 2024, yaitu:

1. Menterjemahkan program dan kegiatan yang ada pada RKPD Perubahan Kota Palu Tahun 2024.
2. Mewujudkan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan perubahan Tahun 2024.
3. Mewujudkan dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu tahun Anggaran 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Administrator KEK Palu Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Administrator KEK Palu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Administrator KEK Palu
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Administrator KEK Palu
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ADMINISTRATOR KEK PALU

3.1 Rencana Kerja Administrator KEK Palu

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Administrator KEK Palu sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Administrator KEK Palu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Triwulan II Tahun Berjalan 2024
Administrator KEK Palu

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2023	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
2				Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar/Bidang Penanaman Modal								
2.18				**Administrator KEK**								
2.18	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Sakip OPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
2.18	***01***	***2.01***		***Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan Administrator KEK***	**25 dok**	**5 dok**	**5 dok**	**5 dok**	**100%**		
2.18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dok	6 dok	1 dok	1 dok	100%	7	70%
2.18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dok	3 dok	1 dok	1 dok	100%	4	80%
2.18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dok	3 dok	1 dok	0 dok	0%	3	60%
2.18	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	3 dok	1 dok	1 dok	100%	4	80%
2.18	***01***	***2.02***		***Administrasi keuangan perangkat daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi keuangan Administrator KEK***	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%		
2.18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	36 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	42	70%
2.18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dok	3 dok	1 dok	1 dok	100%	4	80%
2.18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 dok	0% dok	1 dok	1	-	1	-

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5÷7)	10=(9/4)
2.18	**01**	**2.05**		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Kegiatan administrasi Kepegawaian Administrator KEK***	**100%**	-	-	-	-	-	-
2.18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya	140 pkt	18 pkt	0 pkt	0	-	1800%	-
2.18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0	-	0	-	0	-
2.18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 ok	0	1 ok	0	-	0	-
2.18	**01**	**2.06**		***Administrasi umum perangkat daerah***	***Jumlah Kegiatan administrasi Umum Administrator KEK***	**100%**	-	**100%**	**86%**	86%		0%
2.18	01	2.06	01	Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 pkt	2 pkt	1 pkt	1 pkt	100%	3	60%
2.18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 unit	40 unit	1 unit	0 unit	0%	40	100%
2.18	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 tw	12 tw	4 tw	2 tw	50%	14	70%
2.18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 tw	12 tw	3 tw	2 tw	67%	14	70%
2.18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 tw	0 tw	2 tw	0 tw	0%	0	0%
2.18	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 tw	12 tw	4 tw	2 tw	50%	14	70%
2.18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 org/kali	92 org/kali	22 org/kali	9 org/kali	41%	101	101%
2.18	**01**	**2.07**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Administrator KEK***	**100%**	0%	**100%**	**0%**	0%		0%
2.18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 unit	0 unit	1 unit	0 unit	-	0,04	-
2.18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0	-	0	-	0	-
2.18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0	-	0	-	0	-
2.18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	-	0	-	0	-
2.18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0 pkt	-	0	-	0	-
2.18	**01**	**2.08**		***Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Cakupan jasa penunjang urusan Administrator KEK***	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%		0%
2.18	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 bln	36 bln	12 bln	6 bln	50%	42	70%
2.18	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 bln	12 tw	12 bln	6 bln	50%	18	30%
2.18	**01**	**2.09**		***Pemeliharaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Cakupan Pemeliharaaan sarana dan prasarana penunjang Administrator KEK***	**100%**	**100%**	100%	100%	100%		
2.18	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 uk	30 uk	12 bln	5 bln	42%	35	58%
2.18	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 uk	21 unit	14 unit	14 unit	100%	35	58%
2.18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0	-	0	-	0	-
2.18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 pkt	0	-	0	-	0	-
2.18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 uk	33 uk	18 uk	0 uk	0%	33	59%
2.18	**02**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Pemberian Fasilitas/Insentif**	**47** investor						
2.18	**02**	**2.01**		***Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Cakupan Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif di Bidang Penanaman Modal***	100%	-	-	-	-	-	-
2.18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20 pu	0	-	0	-	0	-
2.18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pelaksanaan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	20 pu	0	-	0	-	0	-
2.18	**03**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Jumlah Investor**	**40**				-		
2.18	**03**	**2.01**		***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota***	***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal***	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	-	-
2.18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	5 kali	3 kali	1 kali	0 kali	0%	3	60%
2.18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	5 kali	3 kali	1 kali	1 kali	100%	4	80%
2.18	**04**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Indeks Kepuasa**	**Baik**				-	-	-
2.18	**04**	**2.01**		***Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota***	***Cakupan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal***	**100%**				-		
2.18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui OSS	20 tw	11 tw	3 tw	2 tw	67%	13	65%
2.18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	20 tw	8 tw	2 tw	2 tw	100%	10	50%
2.18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pelaksanaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	20 tw	8 tw	2 tw	2 tw	100%	10	50%
2.18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Pelaksanaan Koordiinasi dan sinkronisasi penetapan dan pemberian fasilitas/insentif	5 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100%	3	60%
2.18	**05**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal**	100%		100%	100%	100%		0%
2.18	**05**			***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Cakupa Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal***	**100%**	-	-	-	-	-	-
2.18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 tw	2	1 tw	1 tw	100%	3	300%
2.18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	1 tw	2	1 tw	1 tw	100%	3	300%
2.18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	55 bln	22 bln	12 bln	12 bln	100%	34	62%
2.18	**06**			**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Sistem Informasi Pendukung Penanaman Modal**	100%	100%	100%	100%	100%		
2.18	**06**	**2.01**		***Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Cakupan Pengelolaan Data dan Inormasi yang Terintegrasi***	100%	100%	-	-	-	-	-
2.18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengelolaan Data dan Informasi terintegrasi secara elektronik	20 kali	10 kali	1 kali	1 kali	100%	11	55%

Dari hasil tampilan tabel 2.1 tersebut dapat dilihat terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum mencapai target paling tidak sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2024 yaitu:

- Belanja Modal berupa pengadaan kendaraan bermotor ronda empat dan Laptop yang diarahkan menjadi Silpa.
- Kegiatan Bidang Perizinan yang dirubah belanjanya pada Triwulan IV Tahun 2024.
- Kelebihan Honorarium PHL yang akan dialihkan pada Belanja lainnya pada Triwulan IV.
- Belanja Tenaga Ahli pada bidang Monev yang dialihkan untuk kegiatan pameran di MTQ Kota Palu.
- Honorarium Tenaga Ahli pada kegiatan Bidang Perizinan ditiadakan dan dialihkan pada kegiatan lain.
- Dan kegiatan-kegiatan lain yang masih ada sisa anggaran di alihkan ke kegiatan lain
- Adanya perubahan kebijakan Pimpinan Daerah.

Kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil dalam perencanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Administrator KEK Kota Palu adalah sebagai berikut:

- Dokumen Rencana Pembangunan harus dipedomani sesuai dengan pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan daerah setiap tahunnya;
- Perlunya konsistensi penyusunan program/kegiatan OPD;
- Konsistensi antara dokumen perencanaan dalam penyusunan program/kegiatan serta penganggaran, akan mendukung capaian indikator kinerja, yang bertujuan untuk melihat dan menilai sejauh mana capaian keberhasilan dokumen perencanaan pembangunan baik tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Administrator KEK Palu

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu dengan beberapa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021- 2026, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu telah mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan pelayanan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu. Keberhasilan kinerja Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Administrator KEK Palu

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase Kenaikan Nilai Investasi di KEK	-		5,00%	0,06%	0,14%	0,18%	1,85%	591%	0,14%	0,18%	

Dari Tabel 2.2 diatas dapat terlihat indikator pada tahun 2023 dapat mencapai target melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra Administrator KEK Palu Tahun 2021-2026.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Administrator KEK Palu

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal di Kota Palu dengan sasaran strategis meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan di Kota Palu dan terkhusus Kawasan Ekonomi Khusus Palu. Penciptaan lingkungan yang kondusif dalam mendukung investasi serta promosi penanaman modal daerah dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan merupakan suatu

proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan evaluasi kegiatan.

Dalam upaya peningkatan pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) Perizinan dan non Perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus Palu dapat dioperasionalisasikan. Isu-isu strategis Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu sebagai berikut:

1. Lemahnya Daya Tarik daerah di bidang Penanaman Modal.
2. Lemahnya Sumber Daya dan Daya Saing Penanaman Modal di Daerah.
3. Kurangnya Pengendalian terhadap investasi terkait resiko lingkungan.

2.4. Review terhadap Perubahan RKPD

Review terhadap Perubahan RKPD Kota Palu dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Administrator KEK Palu, dengan arahan Wali Kota Palu terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Administrator KEK Palu berdasarkan Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024.

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Perubahan Tahun 2024 dijabarkan ke dalam Tabel 2.3 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap RKPD Perubahan tahun 2024
Kota Palu

ADMINISTRATOR KEK PALU

No	RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Palu	**Nilai SAKIP OPD**	100%	**2.500.018.352**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Palu	**Nilai SAKIP OPD**	100%	**2.533.786.392**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	**3.250.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Palu	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	**3.210.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	1.375.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	1.365.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	240.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	240.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	1.375.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	1.365.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	**Persentase realisasi keuangan**	100%	**1.845.973.842**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase realisasi keuangan**	**100%**	**1.845.968.842**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.845.473.842	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.845.473.842	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	240.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	255.000	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kota Palu**	**Jumlah Kegiatan administrasi Kepegawaian Administrator KEK**	**100%**	**15.335.000**	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	4.500.000	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	10.835.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	100%	**232.718.810**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	100%	**200.297.250**	
	Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	1.550.000	Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	999.900	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	21.069.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	9.800.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	13.854.460	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	14.949.200	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	3.966.350	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	8.931.150	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	2.610.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	450.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	7.755.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	3.640.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	181.914.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	161.527.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	100%	**37.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	100%	**18.500.000**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	37.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	18.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%	**164.850.700**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Palu	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%	**225.806.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	54.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	72.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	110.850.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	153.806.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	100%	**216.225.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	100%	**224.669.300**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	212.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	175.239.300	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	35.640.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	2.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	9.290.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	1.125.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	4.500.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Palu	**Cakupan Promosi Penanaman Modal**	100%	**74.598.500**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Kota Palu	**Cakupan Promosi Penanaman Modal**	100%	**85.283.000**	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	**Terpublikasinya Kawasan Ekonomi Khusus Palu**	100%	**74.598.500**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terpublikasinya Kawasan Ekonomi Khusus Palu**	100%	**85.283.000**	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Palu	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	637.500	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	100%	84.458.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	100%	73.961.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	100%	825.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Palu	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	100%	**170.279.550**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Kota Palu	**Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Indeks Kepuasan Masyarakat**	100%	**235.090.000**	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	**Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non perizinan**	100%	**170.279.550**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Palu**	**Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non perizinan**	100%	**235.090.000**	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%	99.621.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Palu	Cakupan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal	100%	55.420.000	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Palu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100%	9.163.550	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100%	108.510.000	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Palu	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100%	1.225.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Palu	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100%	28.395.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Palu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	100%	60.270.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Palu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	100%	42.765.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Palu	**Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal**	100%	**19.885.000**						
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	**Tercapainya Kegiatan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan**	100%	**19.885.000**						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	11.250.000						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	935.000						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100%	7.700.000						
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Palu	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	100%	**89.378.000**						
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	**Terpenuhinya Sistem Pendukung Penanaman Modal**	100%	**89.378.000**						
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100%	89.378.000						

Dari tabel 2.3 di atas dapat terlihat bahwa hasil analisis kebutuhan perubahan Tahun 2024 tidak berbeda jauh dengan Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan masyarakat dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD untuk Perubahan Tahun Anggaran 2024 pada Administrator KEK Palu tidak ada masukan/usulan yang diterima.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ADMINISTRATOR KEK PALU

3.1 Rencana Kerja Administrator KEK Palu

Dalam Renja Perubahan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu Tahun 2024, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu sebagai pelaksana pelayanan satu pintu (PTSP) di Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu berperan dalam merealisasikan Visi dan Misi Wali Kota Palu yang terdapat dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 khususnya pada Misi ke-1 *Membangun perekonomian yang mandiri dan siap berdaya saing dalam per ekonomian regional dan global*:

1. Kota Palu adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa.
2. Kota Palu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah
3. Iklim Investasi di Kota Palu yang mulai berbenah dan berkembang kembali, sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Palu.
4. Adanya kebijakan yang dituangkan dalam peraturan berupa kemudahan dan penyederhanaan dalam pengurusan izin.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Penetapan indikator kinerja untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Administrator KEK Palu, yang secara khusus mengukur keberhasilan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Prestasi kerja tahun 2024 dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Administrator KEK Palu, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Administrator KEK Palu kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) OPD itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Administrator KEK Palu tahun 2021-2026.

Berdasarkan pertimbangan diatas Administrator KEK Kota Palu telah menetapkan rencana kerja dan pendanaan sebelum dan setelah perubahan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2024

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
								Renja 2024		APBD 2024		Perubahan Renja		Bertambah/Berkurang		
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-8)	12=(11/6)	13
2																
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**2.854.159.392**		**3.198.105.177**		**3.197.969.621**			
2	**18**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	Palu	**B**	**2.533.786.392**		2.878.997.177		2.911.929.621	Rp 32.932.444	0,01	
2	18	01	***2.01***		*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Cakupan Dokumen Perencanaan OPD*			**3.210.000**		Rp 3.210.000		Rp 3.210.000	Rp -	0,00	
2	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dok	1.365.000	1 Dok	1.365.000	1 Dok	Rp 1.365.000	Rp -	0,00	
2	18	'01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	240.000	1 Dok	240.000	1 Dok	Rp 240.000	Rp -	0,00	
2	18	'01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dok	240.000	1 Dok	240.000	1 Dok	Rp 240.000	Rp -	0,00	
2	18	'01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaina Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Lap	1.365.000	1 Lap	1.365.000	1 Dok	Rp 1.365.000	Rp -	0,00	
2	18	01	***2.02***		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Cakupan Administrasi keuangan OPD*			**1.845.968.842**		Rp 2.038.371.627		Rp 2.143.437.271	Rp 105.065.644	0,06	
2	18	'01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		18 bln	1.845.473.842	12 bln	2.037.876.627	12 bln	Rp 2.142.942.271	Rp 105.065.644	0,06	
2	18	'01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dok	240.000	1 Dok	240.000	1 Dok	Rp 240.000	Rp -	0,00	
2	18	'01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Dok	255.000	1 Dok	255.000	1 Dok	Rp 255.000	Rp -	0,00	
2	18	01	***2.05***		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Cakupan administrasi Kepegawaian OPD*			**15.335.000**		Rp 15.335.000		Rp 7.000.000	-Rp 8.335.000	-0,54	
2	18	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	4.500.000	18 Paket	4.500.000	18 Paket	Rp 7.000.000	Rp 2.500.000	0,56	
2	18	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan		1 org/kali	10.835.000	1 org/kali	10.835.000	- Kali	Rp -	-Rp 10.835.000	-1,00	
2	18	01	***2.06***		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Cakupan administrasi Umum OPD*		100%	**200.297.250**		Rp 199.335.250		Rp 224.726.350	Rp 25.391.100	0,13	
2	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		1 Paket	999.900	36 bh	999.900	57 bh	Rp 2.056.200	Rp 1.056.300	1,06	
2	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.800.000	1 unit	9.800.000	- unit	Rp -	-Rp 9.800.000	-1,00	
2	18	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	14.949.200	6 paket	14.949.200	6 paket	Rp 20.642.450	Rp 5.693.250	0,38	
2	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	8.931.150	3 tw	9.078.150	4 tw	Rp 10.703.700	Rp 1.625.550	0,18	
2	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dok	450.000	6 bln	450.000	- bln	Rp -	-Rp 450.000	-1,00	
2	18	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Lap	3.640.000	116 dos	3.640.000	98 dos	Rp 2.750.000	-Rp 890.000	-0,24	
2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15 Lap	161.527.000	22 org/kali	160.418.000	36 org/kali	Rp 188.574.000	Rp 28.156.000	0,17	
2	18	01	***2.07***		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan jasa penunjang urusan OPD*		100%	**18.500.000**		Rp 18.500.000		Rp -	-Rp 18.500.000	-1,00	
2	18	01	2,07	01	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kenaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	18.500.000	1 Unit	18.500.000	- Unit	Rp -	-Rp 18.500.000	-1,00	
2	18	01	***2.08***		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan jasa penunjang urusan OPD*		100%	**225.806.000**		Rp 379.646.000		Rp 238.496.000	-Rp 141.150.000	-0,63	
2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Lap	72.000.000	12 bln	90.000.000	12 bln	Rp 54.250.000	-Rp 35.750.000	-0,50	
2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Lap	153.806.000	12 Bln	289.646.000	12 Bln	Rp 184.246.000	-Rp 105.400.000	-0,69	
2	18	01	***2.09***		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan Pemeliharaaan sarana dan prasarana penunjang OPD*		100%	**224.669.300**		Rp 224.599.300		Rp 295.060.000	Rp 70.460.700	0,31	
2	18	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan terbayarnya pajak kendaraan Dinas		7 Unit	175.239.300	12 bln	175.239.300	12 Bln	Rp 203.800.000	Rp 28.560.700	0,16	
2	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan		1 Unit	35.640.000	21 unit	35.640.000	11 unit	Rp 12.500.000	-Rp 23.140.000	-0,65	
2	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor		2 Unit	9.290.000	13 unit	9.220.000	21 unit	Rp 77.040.000	Rp 67.820.000	7,30	
2	18	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan peralatan gedung kantor		1 Unit	4.500.000	18 uk	4.500.000	4 uk	Rp 1.720.000	-Rp 2.780.000	-0,62	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-8)	12=(11/6)	13
2	**18**	**03**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Jumlah Investor**			**85.283.000**		Rp 82.574.000		Rp 90.239.000	Rp 7.665.000	0,09	
2	18	03	***2.01***		*Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Cakupan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal*			**85.283.000**		Rp 82.574.000		Rp 90.239.000	Rp 7.665.000	0,09	
2	18	03	2,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal		1 Dok	84.458.000	1 kali	81.749.000	1 kali	Rp 90.239.000	Rp 8.490.000	0,10	
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		1 Dok	825.000	1 kali	825.000	0 kali	Rp -	-Rp 825.000	-1,00	
2	**18**	**04**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Indeks Kepuasa**		Baik	**235.090.000**		Rp 236.534.000		Rp 195.801.000	-Rp 40.733.000	-0,17	
2	18	04	***2.01***		*Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Cakupan Pelayanan Perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal*			**235.090.000**		Rp 236.534.000		Rp 195.801.000	-Rp 40.733.000	-0,17	
2	18	04	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan		1 Dok	55.420.000	4 dok	59.864.000	4 dok	Rp 60.276.000	Rp 412.000	0,01	
2	18	04	2,01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		1 pu	108.510.000	11 pu	107.010.000	11 pu	Rp 125.190.000	Rp 18.180.000	0,17	
2	18	04	2,01	07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis		100 Org	28.395.000	12 ku	26.895.000	12 ku	Rp 8.895.000	-Rp 18.000.000	-0,63	
2	18	04	2,01	08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		1 kegiatan usaha	42.765.000	4 pu	42.765.000	4 pu	Rp 1.440.000	-Rp 41.325.000	-0,97	
2	**18**	**05**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**cakupan pengendalian dan evaluasi penanaman modal**										
2	18	05	***2.01***		*Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Tercapainya kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan*										
2	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal										
2	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal										
2	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan										
2	**18**	**06**			**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**										
2	18	06	***2.01***		*Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah/Kabupaten*	*Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi perizinan dan non perizinan*										
2	18	06	2,01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengelolaan Data dan Informasi terintegrasi secara elektronik										

Dari Tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa secara umum pada perubahan anggaran tahun 2024 terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 147.201.139 yang disebabkan defisit APBD Kota Palu Tahun 2024, adapun pada kegiatan lain terdapat pergeseran sesuai kebutuhan.

BAB IV
P E N U T U P

Demikian Renja Perubahan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai penjabaran RKPD Perubahan Kota Palu Tahun 2024 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja Perubahan memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Dokumen Renja diharapkan menjadi salah satu instrumen institusi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Perubahan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu Tahun 2024 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Perubahan Kota Palu Tahun 2024 guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALU

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang yang terkait dengan urusan masing-masing perangkat daerah dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk menentukan arah yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024 maka Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palu menyusun Renja berdasarkan indikator program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2024. Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Kota Palu Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang di rumuskan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Kota Palu Tahun 2024 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2024, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dari Kota Palu. Rancangan akhir Renja ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Palu.

Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palu bertanggungjawab atas Semua Program dan Kegiatan yang

telah di Programkan ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun N, baik pelaksanaan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan. Program dan kegiatan harus berdasarkan Visi dan Misi serta Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja serta target yang telah di tetapkan.

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tanggungjawab untuk melakukan tugas analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik dan integratif dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palu melakukan Perubahan Renja Tahun 2023 didasari pada kebutuhan akan pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan Tujuan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Palu, melakukan Inovasi Inovasi terkait tatacara penyusunan perencanaan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolahan Keuangan Daerah,
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Musyawarah perencanaan pembangunan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 4, tambahan lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4).
19. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor7);
21. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

22. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemdua dan Olahraga Kota Palu.
23. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan olahraga dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini adalah:

1. Terwujudnya integrasi, dan sinergitas kegiatan antar bagian, antar kegiatan, antar fungsi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan;
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pembangunan daerah. Perencanaan

pelaksanaan dan Evaluasi perencanaan, penganggaran, kegiatan; serta evaluasi

4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pembangunan daerah.
5. Perencanaan pelaksanaan dan Evaluasi

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kota Palu Tahun Anggaran 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, memuat penjelasan ringkas tentang Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan, tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, yang mengatur kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang di jadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pereangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistimatika Penulisan, memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah dan susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pereangkat Daerah, memuat analisis kinerja Kota Palu

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, memuat isu isu yang berkaitan dengan perencanaan Kota Palu dan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, memuat review terkait perencanaan dan penganggaran Kota Palu

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, memuat tentang usulan program dan kegiatan yang terkait kemasyarakatan dan Kota Palu.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA PALU

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palu melaksanakan 4 (Empat) program dan 11 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;**

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
- Sub Kegiatan:
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan:
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan:
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Alat Rumah Tangga
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan:
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan:
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub Kegiatan:
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak
    Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda

- Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan:
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula

- Peningkatan Kepemimpinan, Kepoloporan dan Kesukarelawan Pemuda

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan:
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar.
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan:
  - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
  - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingka Kabupaten/Kota
  - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
- Sub Kegiatan:
  - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi

- Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Olahraga Rekreasi.

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
- Sub Kegiatan:
    - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dispora Kota Palu s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Dispora Tahun 2024)	Realisasi Capaian Target Resntra Perangkat Daerah s/d Triwulan II	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10= (5+7)*	*11 = (9/4)*
2	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
2,19	**Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu**									
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP OPD**	-	-	**BB**	**85,6**	**85,6**	**80**	**80**	**88,89**

2.19.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	**100**	**1 Dokumen**	**100**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**60**
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	1 Laporan	1 Dokumen	97,6	1 Laporan	1 Laporan	60
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	-	-	**32 Orang**	**25 Orang**	**100**	**25 Orang**	**25 Orang**	**97,92**
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	32 Orang/ 12 Bulan	25 Orang/ 12 Bulan	100	32 Orang/ 12 Bulan	25 Orang/ 12 Bulan	60
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	-	-	**74 Paket**	**73 Paket**	**100**	**60%**	**60%**	**60**
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	60

2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	5 Paket	5 Paket	100	1 Paket	-	50
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Alat Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Alat Rumah tangga	-	-	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	-	60
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	12 Paket	11 Paket	99,5	1 Paket	-	60
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	8 Paket	7 Paket	88,3	1 Paket	-	60
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	60
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	15 Laporan	15 laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	39,47
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	26 Laporan	26 Laporan	99,2	1 Laporan	5 Laporan	53,33
2.19. 01. 2.07	**Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang/Aset Penunjang Kinerja Aparatur Dispora**	-	-	**-**	**-**	-	**100%**	**-**	**66,67**

	Daerah	**Kota Palu**								
2.19. 01. 2.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	10 Unit	-	-
2.19. 01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	**24 Laporan**	**22 Laporan**	**91,5**	**60%**	**60%**	**60**
2.19. 01. 2.08. 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12 Laporan	10 Laporan	89,5	1 Laporan	8 Laporan	60
2.19. 01. 2.08. 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	12 Laporan	12 Laporan	92,7	1 Laporan	8 Laporan	60
2.19. 01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	-	-	**39 Unit**	**39 Unit**	**90**	**2 Unit**	**1 Unit**	**60**

2.19. 01. 2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	6 Unit/ 12 Bulan	5 Unit/ 12 Bulan	89,9	1 Unit/ 12 Bulan	1 Unit/ 36 Bulan	60
2.19. 01. 2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	33 Unit/ 12 Bulan	33 Unit/ 12 Bulan	100	1 Unit/ 12 Bulan	-	60
2.19. 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA**	**Persentase Pengembangan Daya Saing Pemuda**	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19. 02.2.01	**Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-

2.19. 02.2.01.02	Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19. 02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19. 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**	-	-	**81,82%**	**75%**	**91,66**	**86,67%**	**86,67%**	**93,46**
2.19. 03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	**4 Paket**	**4 Paket**	**95**	**1 Dokumen**	**16 Dokumen**	**50**
2.19. 03.2.01.02	Koordinasi,Singkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	94,2	1 Dokumen	15 Dokumen	60

	Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar									
2.19. 03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan Rekreasi	-	-	3 Paket	3 Paket	99,8	1 Unit	1 Laporan	33,33
2.19. 03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota**	-	-	**8 Dokumen**	**77 Dokumen**	**85,71**	**53,33%**	**40%**	**40**
2.19. 03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	4 Dokumen	52 Dokumen	77,5	-	-	25
2.19. 03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	4 Dokumen	25 Dokumen	86,1	1 Dokumen	10 Dokumen	25
2.19. 03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan	-	-	250 Orang	250 Orang	94,8	35 Orang	160 Orang	60

	Kejuaraan	Kejuaraan								
2.19. 03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Tercapainnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**93,8**	**1 Dokumen**	**41,67%**	**41,67**
2.19. 03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	93,8	1 Dokumen	10 Dokumen	66,67
2.19. 03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	-	0
2.19. 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	-	-	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**98,4**	**1 Laporan**	**1 laporan**	**66,67**
2.19. 04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	-	-	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**98,4**	**1 Laporan**	**1 laporan**	**66,67**
2.19. 04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-	-	3 Laporan	3 Laporan	98,4	1 Laporan	1 Laporan	60

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispora

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu mempunyai tugas membantu Wali Kota Palu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan kepemudaan dan keolahragaan

Dinas Pemuda Olahraga mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas serta melaksanakn evaluasi dan pelaporan dibidang pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijakan bidang pemuda dan olahraga, penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta prasarana dan sarana.

Untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu Tahun 2024, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu Tahun 2021-2026.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispora Kota Palu

No.	Indikator Kinerja	IKU/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Jumalah Medali Yang Diperoleh	2	2	2	2	2	2	49	-	2	2	
2	Presentase Pemuda Yang Aktif Dalam Kepemudaan	-	23,6	24,6	26,5	27,2	28,7	46,6	-	27,7	28,7	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu.

Isu-isu penting terkait dengan tugas, fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan adalah

1. Sarana dan prasarana olahraga masih sangat terbatas;
2. Pembinaan olahragawan dan usia dini belum berjalan maksimal;
3. Minimnya pembinaan secara kontinyu terhadap atlet,
4. Minimnya penghargaan Terhadap olahragawan yang berprestasi;
5. Belum adanya penetapan cabang olahraga ungggulan di Kota Palu;

Disamping isu-isu dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan yang dikemukakan di atas, masih terdapat permasalahan lain yang merupakan isu Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya di bagian sekretariat, yaitu:

fasilitas kerja belum memadai;

1. Terbatasnya sumber daya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. Kurangnya pengembangan sumber daya aparatur.

Dari isu-isu tersebut di atas yang penting untuk ditindaklanjuti guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palu yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan

Dalam dokumen Rencana Kerja memuat Informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota palu.

Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program/kegiatan serta kolompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD-P Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024

Kode	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**										
2,19	**Bidang Kepemudaan dan Olahraga**				**10.964.877.385**					**10.964.877.385**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Palu**	**NILAI SAKIP OPD**	**B**	**5.131.383.557**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Kota Palu**	**NILAI SAKIP OPD**	**B**	**4.891.831.285**	
2.19.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	**23.112.500**	**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	**23.112.500**	

2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	23.112.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	23.112.500	
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase realisasi keuangan**	**95%**	**3.639.708.207**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase realisasi keuangan**	**95%**	**3.639.708.207**	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan Asn	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/ bulan	3.639.708.207	Penyediaan Gaji danTunjangan Asn	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/ bulan	3.639.708.207	
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**289.313.650**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**289.313.650**	

2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.984.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.984.800	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	8.238.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	8.238.500	
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Alat Rumah Tangga	Kota Palu	Jumlah Penyediaan Alat Rumah tangga	1 paket	9.083.500	Penyediaan Alat Rumah Tangga	Kota Palu	Jumlah Penyediaan Alat Rumah tangga	1 paket	9.083.500	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	71.332.350	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	71.332.350	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	24.900.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	24.900.000	

2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 dokumen	4.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 dokumen	4.200.000	
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 laporan	7.231.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 laporan	7.231.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	168.582.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	168.582.000	
2.19. 01. 2.07	**Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang/Aset Penunjang Kinerja Aparatur Dispora Kota Palu**	**100%**	**250.000.000**	**Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Palu	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang/Aset Penunjang Kinerja Aparatur Dispora Kota Palu**	**100%**	**250.000.000**	

2.19. 01. 2.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 unit	250.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 unit	250.000.000	
2.19. 01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**897.263.200**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**657.893.200**	
2.19. 01. 2.08. 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	56.000.000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	56.000.000	
2.19. 01. 2.08. 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	841.263.200	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	601.893.200	

2.19. 01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**281.986.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**281.986.000**	
2.19. 01. 2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	278.236.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	278.236.000	
2.19. 01. 2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 unit	3.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 unit	3.750.000	
2.19. 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA**	**Kota Palu**	**Persentase Pengembangan Daya Saing Pemuda**	**100%**	**84.193.900**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA**	**Kota Palu**	**Persentase Pengembangan Daya Saing Pemuda**	**100%**	**84.193.900**	

2.19. 02.2.01	**Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota**		**84.193.900**	**Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota**		**84.193.900**	
2.19. 02.2.01.02	Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Kota Palu	Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	-	84.193.900	Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Kota Palu	Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	-	84.193.900	
2.19. 02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan kepeloporan dan Kesukarelawan	Kota Palu	-	-	-	Peningkatan Kepemimpinan kepeloporan dan	Kota Palu	-	-	-	

	Pemuda					Kesukarelawan Pemuda					
2.19. 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Kota Palu**	**Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**	**100%**	**5.217.566.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Kota Palu**	**Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**	**100%**	**5.794.966.000**	
2.19. 03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1.523.940.700**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1.523.940.700**	
2.19. 03.2.01.02	Koordinasi,Singkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi	Kota Palu	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dan Satuan Pendidikan	1 dokumen	1.114.107.300	Koordinasi,Singkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga	Kota Palu	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 dokumen	1.114.107.300	

	Oleh Satuan Pendidikan Dasar		Dasar			dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar					
2.19. 03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan Rekreasi	3 Paket	409.833.400	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan Rekreasi	3 Paket	409.833.400	
2.19. 03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksanany a Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota**	**100%**	**2.429.686.800**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota**	**100%**	**2.429.686.800**	
2.19. 03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/	Kota Palu	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	

						Kota					
2.19. 03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	4 dokumen	321.331.000	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	4 dokumen	321.331.000	
2.19. 03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kota Palu	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	250 orang	2.108.355.800	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kota Palu	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	250 orang	2.108.355.800	
2.19. 03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Kota Palu**	**Tercapainnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**100%**	**1.263.938.500**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Kota Palu**	**Tercapainnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**100%**	**1.841.338.500**	
2.19. 03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga	5 dokumen	822.838.500	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	5 dokumen	822.838.500	

			Rekreasi								
2.19. 03.2.05.02	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kota Palu	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	2 kegiatan	441.100.000	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kota Palu	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	2 kegiatan	1.018.500.000	
2.19. 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Kota Palu**	**Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**100%**	**193.886.200**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Kota Palu**	**Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**100%**	**193.886.200**	
2.19. 04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**100%**	**193.886.200**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**100%**	**193.886.200**	
2.19. 04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	3 Laporan	193.886.200	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	3 Laporan	193.886.200	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kota Palu yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah melalui musyawarah pencanaan pembangunan (Musrenbang).

Usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Perwakilan Kecamatan dalam Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan sampai Kota, pada umumnya masuk pada Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. sesuai nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palu dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perencanaan Kota Palu Tahun 2021-2026 dan RKPD-P Kota Palu Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Palu periode 2021- 2026 berdasarkan tugas dan fungsi. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palu Tahun 2024 yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Dispora Kota Palu Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024					
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=(8-6)*	*10=(9/6)*
2,19	**Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu**								
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP OPD**	**Kota Palu**	**B**	**5.756.674.057**	**BB**	**4.904.226.285**	**500.499.772**	
2.19.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**4 dokumen**	**23.112.500**	**4 dokumen**	**23.112.500**	-	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kota Palu	1 Laporan	23.112.500	1 Laporan	23.112.500	-	

		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	**Kota Palu**	**95%**	**3.639.708.207**	**95%**	**3.639.525.935**	**-**	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	32 orang/ bulan	3.639.708.207	32 orang/ bulan	3.639.525.935	2.891.272	
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**362.204.150**	**100%**	**301.708.650**	**8.238.500**	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	3.984.800	1 paket	3.984.800	-	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	8.238.500	5 paket	0	8.238.500	
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Alat Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Alat Rumah tangga	Kota Palu	1 paket	9.083.500	1 paket	9.083.500		

2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 paket	71.332.350	12 paket	71.332.350	-	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	8 paket	24.900.000	8 paket	24.900.000	-	
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	7 dokumen	4.200.000	7 dokumen	4.200.000	-	
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	15 laporan	7.231.000	15 laporan	7.231.000	-	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	26 Laporan	233.234.000	26 Laporan	180.977.000	-	
2.19. 01. 2.07	**Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang/Aset Penunjang Kinerja Aparatur Dispora Kota Palu**	**Kota Palu**	**100%**	**250.000.000**	**-**	**0**	**250.000.000**	

2.19. 01. 2.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	6 unit	250.000.000	-	0	250.000.000	
2.19. 01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**1.199.663.200**	**100%**	**657.893.200**	**- 239.370.000**	
2.19. 01. 2.08. 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	56.000.000	12 laporan	56.000.000	-	
2.19. 01. 2.08. 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	1.143.663.200	12 laporan	601.893.200	- 239.370.000	
2.19. 01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**281.986.000**	**100%**	**281.986.000**	-	

2.19. 01. 2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	6 unit	278.236.000	6 unit	278.236.000	-	
2.19. 01. 2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	33 unit	3.750.000	33 unit	3.750.000	-	
2.19. 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA**	**Persentase Pengembangan Daya Saing Pemuda**	**Kota Palu**	**100%**	**362.135.900**	-	**84.193.900**	-	
2.19. 02.2.01	**Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**		**362.135.900**		**84.193.900**		
2.19. 02.2.01.02	Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing	Kota Palu	-	84.193.900	-	84.193.900	-	

		Wirausaha Pemula							
2.19. 02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	-	Kota Palu	-	277.942.000	-	0	-	
2.19. 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**	**Kota Palu**	**100%**	**5.210.772.000**	**100%**	**6.126.738.800**	-	
2.19. 03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**806.382.600**	**100%**	**1.523.940.700**	-	
2.19. 03.2.01.02	Koordinasi,Singkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Kota Palu	1 dokumen	317.732.600	1 dokumen	1.114.107.300	-	

2.19. 03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan Rekreasi	Kota Palu	3 Paket	488.650.000	3 Paket	409.833.400	-	
2.19. 03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**2.431.702.300**	**100%**	**2.529.686.800**	-	
2.19. 03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	-	0	-	100.000.000	-	
2.19. 03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	4 dokumen	321.331.000	4 dokumen	321.331.000	-	
2.19. 03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraa	Kota Palu	250 orang	2.110.371.300	250 orang	2.108.355.800		

		n Kejuaraan							
2.19. 03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Tercapainnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Kota Palu**	**100%**	**1.972.687.100**	**100%**	**2.073.111.000**	-	
2.19. 03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kota Palu	5 dokumen	824.187.100	5 dokumen	930.211.300	-	
2.19. 03.2.05.02	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kota Palu	2 kegiatan	1.148.500.000	2 kegiatan	1.142.900.000	-	
2.19. 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Kota Palu**	**100%**	**165.451.700**	**100%**	**193.886.200**	**21.565.500**	
2.19. 04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Kota Palu**	**100%**	**165.451.700**	**100%**	**193.886.200**	**21.565.500**	

2.19. 04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kota Palu	3 Laporan	165.451.700	3 Laporan	193.886.200	21.565.500	
TOTAL PAGU SEBELUM:					**11.495.033.657**	**TOTAL PAGU SESUDAH:**	**10.916.459.657**		

BAB IV

PENUTUP

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan komitmen seluruh aparatur sipil negara di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu yang disusun berdasarkan perubahan kedua Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu Tahun 2016-2021 yang mengacu pada perubahan kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Perubahan Renja merupakan rencana operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan dan menjadi pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu.

Renja yang disampaikan menggambarkan program dan kegiatan dari bidang-bidang di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga yang akan dilaksanakan sebagai tahapan dalam proses perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 dan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana aksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu demi menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kerjasama, kontribusi dan komitmen yang kuat dari seluruhelemen.

Terwujudnya program dan kegiatan tidak terlepas dari komponen pendukung antara lain:

1. Adanya anggaran yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga
2. Adanya pemahaman manfaat dan fungsi kerjasama dari aparatur sipil negara di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga
3. Tersedianya sumber daya manusia berkualitas dengan kuantitas yang memadai, kreatif dan berwawasan luas dan terbuka.

Tersusunya Perubahan Renja ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan setiap kebijakan terutama dalam hal penganggaran dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu, selanjutnya program dan kegiatan yang akan ditetapkan dapat menjadi pedoman yang disesuaikan dengan RKPD tahun 2024 dan akan dilaksanakan secara prospektif, realistis, dan akuntabel serta transparan dalam menetapkan prioritas pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan visi misi pemerintah kota Palu.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PALU

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan acuan dasar dalam penyusunan setiap Dokumen Perencanaan Pembangunan. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (P-Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembasngunan Daerah (RKPD) .

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keberadaan Perubahan dokumen Rencana Kerja (P-Renja) tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga Perubahan Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan. Setiap Perangkat Daerah akan berupaya untuk menyusun Perubahan Renja dengan kualitas yang baik, oleh karena itu salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterkaitan secara konsisten dan sinergis antara muatan materi Renja dengan dokumen perencanaan lainnya secara komperehensif. Sehingga Perubahan Renja Perangkat Daerah secara konkrit dapat memberikan landasan hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang tidak terlepaskan dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah. Maka dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sudah selaras dengan dokumen perencanaan Dokumen RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah,

dengan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dan Perpustakaan Nasional.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu sebagai Organisasi Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Perubahan Renja sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyelenggaraan urusan Kearsipan dan urusan Perpustakaan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu melakukan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berisi kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undangan nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata cara,Penggunaan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041;
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005– 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun

2010– 2015, sebagaimana diubah dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021.

15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2015(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11);
16. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
18. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Tahun 2024.

A. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu dan mengacu kepada RKPD Kota Palu Tahun Anggaran 2024. Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Adalah Acuan pengelolaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan administrasi Dinas dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan

B. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja 2024 , yaitu:

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Kota Palu sebagai institusi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan administrasi Dinas dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan sehingga perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PALU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PALU

4.1 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Pendanaan

BAB IV PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PALU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Data Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Tahun 2024 dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.1. sebagai berikut :

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu pada tahun 2022 melaksanakan 2 (dua) urusan, 6 (enam) Program, 15 (lima belas kegiatan), dan 40 (Empat Puluh) sub kegiatan.

Dengan terpenuhinya sebagian target kinerja hasil/keluaran dari program/kegiatan memberikan implikasi yang positif terhadap pencapaian target program Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dimana dapat mempercepat pencapaian target karena tidak adanya target yang menjadi beban pada tahun selanjutnya. Adapun yang menjadi faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada Tahun 2024 adalah karena penyusunan rencana anggaran khususnya pada input/sumber daya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja yang ingin dicapai.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 serta Rekapitulasi.

Realisasi Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sampai dengan Triwulan II dan Pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu

Kode Rekening	Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Cakupan Pembinaa Perpustakaan**							
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**						
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan	Tersedianya Aplikasi Perpustakaan	100%	1 Layanan	1 Aplikasi	-	0,00	1 Aplikasi	0,01

	Elektronik	Eloktronik							
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembinaan Perpustakaan di Kota Palu	100%	50 Perpustakaan Terbina	50 Perpustakaan Terbina	-	0,00	50 Perpustakaan Terbina	0,5
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembinaan Perpustakaan Khusus	100%	46 Perpustakaan Khusus	46 Perpustakaan Khusus	46 Perpustakaan Khusus	100	92 Perpustakaan Khusus	0,92
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelola Perpustakaan Daerah yang Terlatih	100%	25 Orang	25 Orang	-	0,00	25 Orang	0,25
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terwujudnya Pelayanan dan Penyediaan Bahan Pustaka	100%	192 Eks	233 Buku	-	0,00	192 Eks	1,92
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Perpustakaan Sekolah, Kelurahan, dan TBM	100%	1 Dokumen	-	-	0,00	1 Dokumen	0,01
Pembudayaan Gemar Membaca	**Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat**	**100%**							

Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Daerah Kabupaten/ Kota**								
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terwujudnya Pemenang Lomba Budaya Gemar membaca	100%	18 Orang		18 Orang	18 Orang	100	36 Orang	0,36
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Tersedianya Sarana Pustaka Berbasis Inklusi Sosial	100%	4 Perpustakaan		4 Kelompok	8 Kelompok	200	12 Kelompok	0,12
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Duta Baca Sekolah	100%	3 Orang		3 Orang	3 Orang	100	6 Orang	0,06
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	**Cakupan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**100%**							
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksannya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**							
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah	Terwujudnya Kemitraan Bersama Masyarakat	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	0,00	1 Kegiatan	0,01

	kuno								
2.23.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**							
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**3 Dokumen**	**4 Dokumen**	**3 Dokumen**	100	**6 Dokumen**	**0,06**
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	2 dokumen	0,02
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	2 dokumen	0,02
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	2 dokumen	0,02
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	-	1 Laporan	-	0,00	-	0,00

2.24.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**7 Bulan**	**58,33**	**19 Bulan**	**0,19**
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	100%	12 Bulan	12 Bulan	7 Bulan	58,33	19 Bulan	0,19
2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	-	1 Laporan	-	0,00	-	0,00
2.24.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00	3 Dokumen	0,03
2.24.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**						
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Bahan Penerangan Kantor	100%	1 Jenis	3 Jenis	-	0,00	1 Jenis	0,01
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor	100%	1 Paket	6 unit	-	0,00	1 Paket	0,01

2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	1 Paket	86 Jenis	43 Jenis	50,00	44 Jenis/Paket	0,44
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	16447 lbr	45541 lbr	-	0,00	61988 lbr	619,88
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	3 Media	3 Media	3 Media	100	6 Media	0,06
2.24.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	304 Dos	505 Dos	91 Dos	18,02	395 Dos	3,95
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	17 Orang	24 Orang	3 Orang	12,50	20 Orang	0,2
2.24.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%						
2.24.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Banguan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor	100%	0	0	0	0,00	0	0,00
2.24.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**						

2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50,00	18 Bulan	0,18
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50,00	18 Bulan	0,18
2.24.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**						
2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	100%	3 unit	7 unit	3 unit	42,86	6 unit	0,06
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Pajak Kemdaraan Dinas Lapangan	100%	2 unit	3 unit	1 unit	33,33	3 unit	0,03
2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan	100%	19 unit	15 unit	-	0,00	19 unit	0,19

		Peralatan dan Mesin Lainnya							
2.24.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	16 unit	6 unit	-	0,00	16 unit	0,16
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Cakupan Pengelolaan Arsip**	**100%**						
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**						
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terciptanya Pemngelolaan Arsip Dinamis	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	0,02
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terwujudnya Penyusutan Arsip Dinamis	100%	45 OPD/BUMD	45 OPD/BUMD	-	0,00	45 OPD/BUMD	0,45
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**						

2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Terwujudnya Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	0,01
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terwujudnya Pemeliharaan Arsip Statis	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	0,01
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Naisonal Tingkat Kabupaten/Kota**		**100%**						
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Tersedianya Aplikasi Arsip Digital E-Arsip	100%	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	0,00	1 Aplikasi	0,01
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembinaan/ Pelatihan SDM Kearsipan	100%	45 Orang	45 Orang	-	0,00	45 Orang	0,45

2.24.03	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**100%**						
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun**	**Terlaksananya Penyusutan dan Pemusnahan Arsip**	**100%**						
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terwujudnya Penyusutan dan Pemusnahan Arsip	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	0,00	1 Kegiatan	0,01
2.24.03.2.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**						
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Terwujudnya Arsip Terjaga dan Arsip Vital	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0,00	1 Kegiatan	0,01

2.24.03.2.05	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Terlaksananya Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**100%**						
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Terwujudnya Penelusuran Arsip Statis	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	0,01
2.24.04	**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**Cakupan Arsip Statis Yang Dilestarikan**	**100%**						
2.24.04.2.01	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup**	**100%**						
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	Tersedianya SOP dan Pelayanan Arsip Tertutup	100%	9 SOP	9 Orang	-	0,00	9 SOP	0,01

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan dukungan melalui layanan Kearsipan dan Perpustakaan dalam penyelengaraan dan pembangunan daerah baik ditingkat provinsi maupun daerah khususnya Kota Palu.

Selanjutnya Dinas kearsipan dan perpustakaan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan mengarahkan kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Dinas kearsipan dan perpustakaan telah di tetapkan sebagai unit kerja pelayanan pembangunan Daerah Kota Palu yang menjalankan tugas fungsi kewenangan serta tanggung jawab di bidang kearsipan perpustakaan. terus berupaya meningkatkan perannya sebagai pengambil kebijakan/keputusan, koordinator, dan administrator, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan daerah melalui kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang bersifat mendukung kegiatan perencanaan pembangunan. Selama kurun waktu satu tahun terakhir produk- produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut : :

1) Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD Kota Palu 2021-2026;
2) Dokumen RKPD tahunan;
3) Dukomen Renja dan Renstra
4) Dokumen Laporan Keuangan Bulanan;
5) Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) Kota Palu
6) Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun;
7) Dokumen monitoring dan evaluasi pembinaan perpustakaan;
8) Dokumen Pendataan dan Penataan Arsip Daerah ;
9) Aplikasi .

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu memberikan kontribusi terhadap pencapaian target indikator kinerja pada misi ketiga yaitu Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi Terhadap Bencana

dan Covid-19 dan Misi Keempat yaitu Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani. Kontribusi Pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) sebesar %. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :

1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan Perda.
2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda.
3) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada.
4) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dari jumlah program di RPJMD sebanyak 10 program yang dituangkan ke dalam RKPD sebanyak 10 program atau 100% dengan target 100%.
5) Tersusunnya Laporan Renja dan Renstra rencana 2 Laporan terealisasi 2 Laporan atau 100%.
6) Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan dari rencana 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%.
7) Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) Kota Palu dari rencana 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%.
8) Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun dari rencana 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%.
9) Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pembinaan perpustakaan dari rencana 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%.
10) Tersusunnya tahapan perencanaan yang terkelola berbasis IT dari rencana 4 aplikasi terealisasi 4 aplikasi atau 100%.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	11	12	12	13
1	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun		0,97	0,84	0,88	0,90	0,95					
2	Rasio judul buku dengan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		30,00	20,00	20,83	21,43	31,25	196,4				
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,012	0,008	0,010	0,011	0,011					
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/bulan		296	258	271	275	292	205				
5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat		3	2	2	2	3	2				
6	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku		33	15	20	25	29	21				
7	Jumlah SDM Pengelola kearsipan		30	10	15	20	25	123				
8	Rasio penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		100%	100%	100%	100%	100%					
9	Terwujudnya penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip		100%	100%	100%	100%	100%					

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Meski pencapaian kinerja dapat dikatakan baik, masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD yaitu :

1. Rendahnya kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya Arsip dan Perpustakaan.
2. Fasilitas pendukung layanan masih terbatas.
3. Masih kurangnya sumber daya manusia yang profesional dibidang Kearsipan dan Perpustakaan.
4. Belum berfungsinya perpustakaan secara optimal sehingga aktifitas pendidikan formal dan masyarakat pada umumnya masih kesulitan memperoleh informasi yang bermutu.
5. Ketentuan informasi pada masyarakat semakin meningkatkan sedangkan penyediaan sumber-sumber informasi sangat terbatas.
6. Promosi tentang perpustakaan dan minat baca belum dilaksanakan karena sarana dan prasarana belum tersedia.
7. Masih rendahnya kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam tentang Kota Palu oleh dinas instansi perangkat daerah.
8. Belum terlaksana kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam, karena sarana dan prasarana tidak tersedia.
9. Masih rendahnya kualitas sumber daya perpustakaan dan kearsipan.
10. Sarana dan Prasarana arsip dan pustaka yang belum memadai.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Perencanaan Kinerja tahunan pada dasarnya adalah aplikasi berbagai kegiatan tahunan yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu, dengan mengacu kepada RPJMD Kota Palu, dan sesuai periode waktu pelaksanaan Perubahan Renja, dituntut pula kesesuaian dengan Rancangan Perubahan RKPD Kota Palu dan berdasarkan hasil review terhadap rancangan Perubahan

RKPD Kota Palu Tahun 2024, Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Tahun 2024 telah sesuai dengan RKPD tersebut. Dalam Dokumen rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang evaluasi program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

No.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
I	**Pembinaan Perpustakaan**	**Kota Palu**	**Persentase Capaian Pembinaan Perpustakaan**	**100%**	**373.268.300**	**Pembinaan Perpustakaan**	**Kota Palu**	**Persentase Capaian Pembinaan Perpustakaan**	**100%**	**342.127.550**
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**289.788.900**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**266.573.150**
	Pengembangan dan PemeliharaanLayanan Perpustakaan Elektronik	Kota Palu	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	8.350.000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Palu	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	2.350.000
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional	50 perpustakaan	40.580.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional	50 perpustakaan	31.698.150

			Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya					Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	46 perpustakaan	11.615.000	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	46 perpustakaan	11.615.000
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 orang	21.743.900	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 orang	15.710.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Palu	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	192 eks	207.500.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Palu	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	192 eks	205.200.000
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan,	Kota Palu	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah	1 dokumen	0	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan	Kota Palu	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah	1 dokumen	0

	dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota		
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ kota	**Kota Palu**	**Terwujudnya Budaya Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota**	**100%**	**83.479.400**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ kota**	**Kota Palu**	**Terwujudnya Budaya Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota**	**100%**	**75.554.400**
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Palu	Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	18 orang	24.170.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Palu	Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	18 orang	23.195.000
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Palu	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	4 perpustakaan	45.209.400	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Palu	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	4 perpustakaan	38.109.400
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 orang	14.100.000	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 orang	14.250.000

II	**Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno**	**100%**	**5.210.000**	**Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno**	**100%**	**5.785.000**
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	**Kota Palu**	**Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno**	**100%**	**5.210.000**	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Palu**	**Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno**	**100%**	**5.785.000**
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Palu	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang	5.210.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Palu	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang	5.785.000
III	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kta Palu**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**6.339.121.192**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**6.097.243.416**

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	**Kota Palu**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	**7.200.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**7.200.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	1 Laporan	1.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	1 Laporan	1.800.000

	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kota Palu**	**Persentase realisasi keuangan**	**95%**	**4.366.927.292**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase realisasi keuangan**	**95%**	**4.192.767.916**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/ bulan	4.362.007.292	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/ bulan	4.187.847.916
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.520.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.520.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester	2 Laporan	2.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester	2 Laporan	2.400.000

	SKPD		an SKPD					an SKPD		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**942.191.500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**915.103.100**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.131.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.131.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	827.088.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	800.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	49.822.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	49.822.100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.147.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.147.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	6.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	6.400.000

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	6.337.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	6.337.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	32.265.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	32.265.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**681.132.400**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**692.252.400**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	210.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	210.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	471.132.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	482.252.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**341.670.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**289.920.000**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	303.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	256.750.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	17.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	17.600.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	2.150.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	2.150.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	18.920.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	13.420.000

IV	**Pengelolaan Kearsipan**	**Kota Palu**	**Cakupan tata kelola arsip dinamis dan arsip statis**	**100%**	**96.576.100**	**Pengelolaan Kearsipan**	**Kota Palu**	**Cakupan tata kelola arsip dinamis dan arsip statis**	**100%**	**46.032.100**
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**48.272.100**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**46.032.100**
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Palu	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1 berkas	17.249.600	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Palu	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1 berkas	17.249.600
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Palu	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	45 berkas	19.820.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Palu	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	45 berkas	19.830.000
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan	41 Laporan	11.202.500	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan	41 OPD	8.952.500
	Pengelolaan Arsip Ststis Daerah Kabupaten/ Kota	**Kota Palu**	**Terwujudnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota**	**100%**	**26.254.000**	**Pengelolaan Arsip Ststis Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Palu**	**Terwujudnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota**	**100%**	**0**
	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kota Palu	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	1 arsip	8.003.000	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kota Palu	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	1 arsip	0

	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Palu	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 arsip	18.251.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Palu	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 arsip	0
	Pengelolaan Simpul jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**100%**	**22.050.000**	**Pengelolaan Simpul jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**100%**	**0**
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kota Palu	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 layanan	11.595.000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kota Palu	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 layanan	0
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	45 laporan	10.455.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	45 laporan	0
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Yang	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10**	**100%**	**5.906.600**	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 Tahun**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun**	**100%**	**5.105.000**

	Memiliki Retensi Dibawah 10 Tahun		**Tahun**							
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Palu	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	45 Arsip	5.906.600	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Palu	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	45 Arsip	5.105.000
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	**Kota Palu**	**Terwujudnya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab/Kota**	**100%**	**5.344.000**	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan**	**Kota Palu**	**Terwujudnya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab/Kota**	**100%**	**5.344.000**
	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	8 daftar	5.344.000	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	8 daftar	5.344.000

	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	**Kota Palu**	**Terwujudnya Pencarian Arsip Statis Kab/Kot**	**100%**	**1.575.000**	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Kota Palu**	**Terwujudnya Pencarian Arsip Statis Kab/Kot**	**100%**	**1.575.000**
	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip	Kota Palu	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	1 arsip	1.575.000	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip	Kota Palu	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	1 arsip	1.575.000
VI	**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**Kota Palu**	**Cakupan perizinan penggunaan arsip**	**100%**	**3.850.000**	**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**Kota Palu**	**Cakupan perizinan penggunaan arsip**	**100%**	**3.850.000**
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup di Kbupaten/Kota	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**100%**	**3.850.000**	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**100%**	**3.850.000**
	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	Kota Palu	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	9 SOP	3.850.000	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	Kota Palu	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	9 SOP	3.850.000
JUMLAH					**6.830.851.192**					**6.507.062.066**

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi - asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kota Palu yang langsung ditujukan kepada OPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Kota Palu dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan sampai musrenbang tingkat Kota Palu usulan program/kegiatan dari bottom up yang di tujukan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu ada. Sehingga dalam penelaahan usulan program/kegiatan yang harus dimuat Renja 2024 usulan OPD sendiri sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu dan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Palu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Rehab Taman Baca	Ulujadi	Pengembangan Minat Baca Masyarakat	15.000.000/ 1 Taman Baca	
2	Pengadaan Perpustakaan Mini	Palu Barat	Pengembangan Literasi Masyarakat	-	Pemindahan Pojok Baca yang dari Taman GOR ke Perpustakaan Mini di Palu Barat

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Tahun 2024 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu merumuskan 2 (dua) urusan, 6 (enam) Program, 15 (lima belas kegiatan), dan 40 (empat puluh) sub kegiatan. Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				Renja 2024		APBD 2024		Perubahan Renja		Bertambah/ Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-8)	12=(11/6)	13
I	**Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Capaian Pembinaan Perpustakaan**	**Kota Palu**	**100%**	**186.300.000**	**100%**	**373.268.300**	**100%**	**342.127.550**	**- 31.140.750**	**- 0,17**	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**134.392.500**	**100%**	**289.788.900**	**100%**	**266.573.150**	**- 23.215.750**	**- 0,17**	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Kota Palu	1 Layanan	26.800.000	1 Layanan	8.350.000	1 Layanan	2.350.000	- 6.000.000	- 0,22	

	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kota Palu	50 perpustakaan	32.256.000	50 perpustakaan	40.580.000	50 perpustakaan	31.698.150	- 8.881.850	- 0,28	
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Palu	46 perpustakaan	16.790.000	46 perpustakaan	11.615.000	46 perpustakaan	11.615.000	0	0	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	25 orang	21.327.500	25 orang	21.743.900	25 orang	15.710.000	- 6.033.900	- 0,28	

	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kota Palu	192 eks	32.755.000	192 eks	207.500.000	192 eks	205.200.000	- 2.300.000	- 0,07	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	6.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ kota	**Terwujudnya Budaya Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**51.907.500**	**100%**	**83.479.400**	**100%**	**75.554.400**	**- 7.925.000**	**- 0,15**	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kota Palu	18 orang	23.510.000	18 orang	24.170.000	18 orang	23.195.000	- 975.000	- 4,14	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kota Palu	4 perpustakaan	14.687.500	4 perpustakaan	45.209.400	4 perpustakaan	38.109.400	- 7.100.000	- 0,48	

	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Kota Palu	3 orang	13.710.000	3 orang	14.100.000	3 orang	14.250.000	150.000	0,01	
II	**Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno**	**Kota Palu**	**100%**	**22.980.000**	**100%**	**5.210.000**	**100%**	**5.785.000**	**575.000**	**0,02**	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	**Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno**	**Kota Palu**	**100%**	**22.980.000**	**100%**	**5.210.000**	**100%**	**5.785.000**	**575.000**	**0,02**	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Palu	13 orang	22.980.000	orang	5.210.000	orang	5.785.000	575.000	0,02	
III	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**5.006.804.883**	**100%**	**6.253.075.396**	**100%**	**6.097.243.416**	**-155.831.980**	**- 0,31**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**4 dokumen**	**3.281.315**	**4 dokumen**	**7.200.000**	**4 dokumen**	**7.200.000**	**0**	**0**	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	1.458.362	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	364.591	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	729.181	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Laporan	729.181	1 Laporan	1.800.000	1 Laporan	1.800.000	0	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase realisasi keuangan**	**Kota Palu**	**95%**	**3.853.236.878**	**95%**	**4.282.681.496**	**95%**	**4.192.767.916**	- 89.913.500	- 0,02	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	39 orang/ bulan	3.851.535.455	39 orang/ bulan	4.277.761.496	39 orang/ bulan	4.187.847.916	- 89.913.500	- 0,02	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	486.121	1 Laporan	2.520.000	1 Laporan	2.520.000	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	2 Laporan	1.215.302	2 Laporan	2.400.000	2 Laporan	2.400.000	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**315.632.290**	**100%**	**942.191.500**	**100%**	**915.103.100**	**- 27.088.400**	**- 0,08**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	500.000	1 paket	10.131.000	1 paket	10.131.000	0	0	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	49.756.800	1 paket	827.088.400	1 paket	800.000.000	- 27.088.400	- 0,54	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	61.730.290	1 paket	49.822.100	1 paket	49.822.100	0	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	13.345.200	1 paket	10.147.500	1 paket	10.147.500	0	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	3 dokumen	5.180.000	3 dokumen	6.400.000	3 dokumen	6.400.000	0	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	5.480.000	1 laporan	6.337.500	1 laporan	6.337.500	0	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	12 laporan	179.640.000	12 laporan	32.265.000	12 laporan	32.265.000	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**454.104.400**	**100%**	**681.132.400**	**100%**	**692.252.400**	**11.120.000**	**0,02**	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	174.000.000	12 laporan	210.000.000	12 laporan	210.000.000	0	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	280.104.400	12 laporan	471.132.400	12 laporan	482.252.400	11.120.000	0,03	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**380.550.000**	**100%**	**341.070.000**	**100%**	**289.920.000**	**- 51.150.000**	**- 0,13**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	7 unit	338.400.000	7 unit	303.000.000	7 unit	256.750.000	- 46.250.000	- 0,13	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	3 unit	37.400.000	3 unit	17.600.000	3 unit	17.600.000	0	0	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	1 unit	2.500.000	1 unit	2.150.000	1 unit	2.150.000	0	0	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Palu	6 unit	2.250.000	6 unit	18.920.000	6 unit	13.420.000	- 5.500.000	- 2,44	
IV	**Pengelolaan Kearsipan**	**Cakupan tata kelola arsip dinamis dan arsip statis**	**Kota Palu**	**100%**	**126.887.500**	**100%**	**96.576.100**	**100%**	**46.032.100**	**- 50.544.000**	**- 0,39**	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**63.897.000**	**100%**	**48.272.100**	**100%**	**46.032.100**	**- 48.272.100**	**- 0,75**	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kota Palu	1 berkas	56.133.000	1 berkas	17.249.600	1 berkas	17.249.600	0		
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kota Palu	45 berkas	7.764.000	45 berkas	19.820.000	45 berkas	19.830.000	10.000	0,00	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan	Kota Palu	41 OPD	30.148.000	41 Laporan	11.212.500	41 OPD	8.952.500	- 2.260.000	- 0,07	

	Pengelolaan Arsip Ststis Daerah Kabupaten/ Kota	**Terwujudnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**11.183.000**	**100%**	**26.254.000**	**100%**	**0**	**- 26.254.000**	**- 2,34**	
	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Kota Palu	1 arsip	5.138.000	1 arsip	8.003.000	1 arsip	0	- 8.003.000	- 1,55	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kota Palu	1 arsip	6.045.000	1 arsip	18.251.000	1 arsip	0	- 18.251.000	- 3,01	
	Pengelolaan Simpul jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**51.807.500**	**100%**	**22.050.000**	**100%**	**0**	**- 22.050.000**	**- 0,42**	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kota Palu	1 layanan	36.162.500	1 layanan	11.595.000	1 layanan	0	- 11.595.000	- 0,32	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan	Kota Palu	45 laporan	15.645.000	45 laporan	10.455.000	45 laporan	0	- 10.455.000	- 0,66	

	Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota										
V	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Persentase pemenuhan kebutuhan perlindungan dan penyelamatan arsip**	**Kota Palu**	**100%**	**14.742.265**	**100%**	**12.825.600**	**100%**	**12.024.000**	**- 801.600**	**- 0,05**	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 Tahun	**Terlaksananya Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun**	**Kota Palu**	**100%**	**5.284.765**	**100%**	**5.906.600**	**100%**	**5.105.000**	**- 801.600**	**- 1,53**	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kota Palu	45 Arsip	5.284.765	45 Arsip	5.906.600	45 Arsip	5.105.000	- 801.600	- 1,53	
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah	**Terwujudnya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab/Kota**	**Kota Palu**	**100%**	**4.163.500**	**100%**	**5.344.000**	**100%**	**5.344.000**	**0**	**0**	

	Kecamatan dan Desa/ Kelurahan											
	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Palu	8 daftar	4.163.500	8 daftar	5.344.000	8 daftar	5.344.000	0	0	
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	**Terwujudnya Pencarian Arsip Statis Kab/Kot**	**Kota Palu**	**100%**	**5.294.000**	**100%**	**1.575.000**	**100%**	**1.575.000**	**0**	**0**	
	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Kota Palu	1 arsip	5.294.000	1 arsip	1.575.000	1 arsip	1.575.000	0	0	
VI	**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**Cakupan perizinan penggunaan arsip**	**Kota Palu**	**100%**	**3.675.000**	**100%**	**3.850.000**	**100%**	**3.850.000**	**0**	**0**	
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup di	**Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di**	**Kota Palu**	**100%**	**3.675.000**	**100%**	**3.850.000**	**100%**	**3.850.000**	**0**	**0**	

	Kabupaten/Kota	**Kabupaten/Kota**										
	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	Kota Palu	9 SOP	3.675.000	9 SOP	3.850.000	9 SOP	3.850.000	0	0	
JUMLAH					**5.361.389.648**		**6.746.605.396**		**6.507.062.066**			

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kearsipan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kota Palu dan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024.

Evaluasi terhadap hasil Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS PARIWISATA KOTA PALU

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Perubahan Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk Menyusun Perubahan Renja Tahun 2024 setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen RKPD, RENSTRA dan penyusunan RAPBD maka Dinas Pariwisata Kota Palu perlu Menyusun Perubahan Renja Tahun 2024.

Perencanaan kerja merupakan Langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi

pemerintah pada tahun n+1 dalam rangka pelaksanaan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrument pertanggung jawaban Perencanaan

Kerja ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi, sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan pariwisata Kota Palu 1 (satu) tahun ke depan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah.

Anggota tim adalah pejabat dan staf yang benar-benar siap dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara

penuh dalam menyiapkan dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah, orientasi mengenai Perubahan

Renja Tahun 2024 Perangkat

Daerah, orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024, hubungan Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat

Daerah dengan dokumen perencanaan lain serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran

daerah, Penyusunan Agenda Kerja

- Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 sampai dengan penetapan Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah.
- Pengumpulan Data dan Informasi
  Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka Panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu parallel dengan pembuatan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap
perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perubahan(RENJA) Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada RENSTRA Perangkat Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kota Palu TAHUN 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,
penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan kota palu, melalui penyelenggaraan Musrembang tahunan
yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pariwisata Kota Palu sebagai Perangkat Daerah pada TAHUN 2024 ini menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kota Palu TAHUN 2024 . Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kota Palu TAHUN 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Wali Kota Palu, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Palu tahun 2021-2026,

mengacu pada visi pembangunan Kota Palu tahun 2021-2026 yaitu:“MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAN”

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Pariwisata Kota Palu TAHUN 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Palu TAHUN 2024 yang telah ditetapkan.

Prioritas pembangunan kepariwisataan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

(satu) tahun, Rencana Kerja Perubahan Pemerintah daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun Perubahan Renja Tahun 2024 tahun, Perubahan Renja Tahun 2024 Pembangunan jangka Menengah yang selanjunya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk peeriode 5 (lima) tahun.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata TAHUN 2024

adalah:

1. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
10. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional
13. (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah RPJPD, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan;

17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
    Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota PaluNomor 4 Tahun 2010 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Palu (Lembaran daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota PaluTahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016 - 2021 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan daerah Kota Palu Nomor 7 tahun

2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
24. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tugas Fungsi dan tata Cara Kerja Dinas Pariwisata;
25. Permendagri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
26. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15);

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Pariwisata Kota Palu disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 1 (satu) tahunan agar lebih terarah, tertib dan dinamis adalah:

a. Memberikan arah dan pedoman/acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan bidang

pariwisata;

b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perencanaan pembangunan bidang Pariwisata;

c. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah

d. untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan;

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 Perubahan sebagai berikut

a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Pariwisata Kota Palu;

b. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;

c. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorentasidan berbasis pada pengurangan kemiskinan dan PUG (Pengarus Utamaan Gender);

d. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJMD Kota Palu tahun 2016-2021;

e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kota Palu TAHUN 2024 disusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud

1.4 Tujuan

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024 PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024 Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Teerhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHANPERUBAHANPERUBAHANDAN PENDANAAN PERANGK PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024 DINAS PARIWISATA KOTA PALU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perubahan Tahun 2024 Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024 Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024 Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024, adalah seperti pada Tabel Berikut:

Tabel TC.21

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Palu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata pada PAD	100		100%	38,06	38,06	38,06	38,06%

		01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	ilai Sakip Dinas Pariwisata	100		100%	49.51	49.51	49.51	50%
			2,01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan SKPD	100		100%	50	50	50	50%
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan SKPD	100		100%	11,32	11,32	11,32	11,32%
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan SKPD	100		100%	100	100	100	100%
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan SKPD	100		100%	0	0	0	0%
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan SKPD	100		100%	50	50	50	50%

			2,02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Pelayanan pertanggun gjawaban dan laporan	100		100%	52,72	52,72	52,72	52,72%
				01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100		100%	58,63	58,63	58,63	58,63%
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD		100		100%	42,79	42,79	42,79	42,79%
			2,06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		100		100%	47,27	47,27	47,27	47,27%
				02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		100%		100%	100	100	100	100%
				04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR		100%		100%	63,75	63,75	63,75	64%
				05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGADAAN		100%		100%	36,46	36,46	36,46	36%
				06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		100%		100%	11,76	11,76	11,76	11,76%
				08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU		100%		100%	45,45	45,45	45,45	45%
				18	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH		100%		100%	42,89	42,89	42,89	43%

			2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		100%	42,74	42,74	42,74	43%
				02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Persentase Pembayaran listrik, telp dan internet kantor	100%		100%	47,27	47,27	47,27	47%
				03	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR		100		100	47,27	47,27	47,27	47%
		01			PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%		100%	52.16	52.16	52.16	52%
			2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		100%	45,50	45,50	45,50	46%
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100%		100%	45,50	45,50	45,50	46%
		02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		100%		100%	37.10	37.10	37.10	37%
			2.02		PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA		100%		100%	37.10	37.10	37.10	37%

				02	Perencanaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis PariwisataKabupaten/Kota	100%		100%	8,36	8,36	8,36	8 %
			2,03		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA		100%		100%	8,36	8,36	8,36	8 %
				04	PENGADAAN/PEMELIHARAAN/ REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA		100%		100%	8,36	8,36	8,36	8 %
				06	PEMBERDAYAAN MASYARAKATAN DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA		100%		100%	0	0	0	0%
			2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	0	0	0	0%
				12	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kabupaten/Kota		100%		100%	0	0	0	0%
		03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		100%		100%	17,15	17,15	17,15	18,85%
			2,01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		100%		100%	27.05	27.05	27.05	27%

				01	Penguawatan Promosi Melaluui Media cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dalam dam Luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	100%		100%	18,52	18,52	18,52	18,52%
				02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terselesainya Pemasaran pariwisata	100%		100%	56.71	56.71	56.71	56.71%
				03	Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	100%		100%	0	0	0	0%
		05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		100%		100%	20.66	20.66	20.66	21%

			2,01		PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR		100%		100%	20.66	20.66	20.66	21%
				06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%		100%	8,56	8,56	8,56	8,56%
				10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata		100%		100%	0	0	0	0%
			2,02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		100%		100%	0	0	0	0%
				01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		100%		100%	0	0	0	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembentukan Dinas Pariwisata Kota Palu merupakan implementasi dari Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Pariwisata Kota Palu melaksanakan fungsi penunjang (Technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi pengatur urusan penunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, seperti terlihat pada Tabel Berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Palu

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kunjungan Wisatawan :		Presentase Kunjungan Wisata	100	103,385	**118,835**	254,770	267,508	116,865	278,845	364,997	254,770	267,508	
	Wisata Nusantara			100	100,500	115,950	251,878	264,472	115,927	278,643	362,483	251,878	264,472	
	Wisata Mancanegara			100	2,885	2,885	2,892	3,036	938	202	2,514	2,892	3,036	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kota Palu merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Palu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata Kota Palu berdasarkan pada Peraturan Walikota Palu Nomor 20 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Palu memiliki 3 bidang dan 1 sekretariat.

Adapun 4 (empat) Bidang tersebut adalah:

a) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata yang terdiri dari tigakegiatan yaitu:
   1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata
   2. Seksi Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata
   3. Seksi Tata Kelola Destinas dan Pemberdayaan Masyarakat

b) Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari tiga kegiatan yaitu:
   1. Seksi Pengembangan SDM Manusia dan Infrastruktur
   2. Seksi Pengembangan Industri Kreatif
   3. Seksi Ekonomi Kreatif Seni

c) Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari tiga kegiatan yaitu:
   1. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata
   2. Seksi Pelayanan Informasi dan Pariwisata
   3. Seksi Analisi Data Pasar

Setiap bidang memiliki indikator dan target kinerja yang spesifik sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan di masing-masing bidang, dimana kinerja masing-masing bidang ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Kota Palu. Sasaran tersebut sesuai dengan arah kebijakan kepariwisataan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan.

B. **Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

   a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

- Belum OptimalnyaPengembangan Destinasi Pariwisata/Agrowisata Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi Pariwisata, maka sesuai telaah visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diatas, dapat disimpulkan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Pariwisata Kota Palu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi- misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu :

a. **Faktor Penghambat:**
   1. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dan informasi, dalam salah satu strategi promosi dan pemasaran pariwisata Kota Palu.
   2. Belum memadainya kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik.
   3. Terbatasnya kelembagaan kepariwisataan yang terkelola dengan baik dan berkelanjutan terutam yang berbasis komunitas/kemasyarakatan
   4. Masih rendahnya kesadaran wisata dan penerapan sapta pesona oleh stakeholder kepariwisataan, pelaku pariwisata maupun masyarakat.
   5. Belum optimalnya sinergi antar instansi

(Perangkat Daerah) yang menangani ekonomi kreatif di Kota Palu.

6. Belum optimalnya fasilitasi bagi parpelaku ekonomi kreatif untuk berekspresi dalam menguatkan pariwisata KotaPalu.
7. Belum optimalnya relasi/kerjasama antar pelaku ekonomi kreatif dengan para pelaku jasa usaha pariwisata (hotel,restoran,dsb.) yang ada di Kota Palu.
8. Belum meratanya pementasan atraksi wisata di titik-titik strategis pariwisata Kota Palu.
9. Perlunya penguatan atraksi pariwisata berbasis budaya khas daerah sebagai keunikan atraksi pariwisata di Kota Palu.
10. Belum optimalnya fungsi pengiriman misi kesenian sebagai sarana promosi pariwisata Kota Palu.
11. Masih minimnya atraksi pariwisata yang diselenggarakan di malam hari, sebagai daya tarik pariwisata bagi wisatawan yang Berkunjung ke Kota Palu.

b. Faktor pendorong

1. Tumbuh dan berkembangnya usaha pariwisata di Kota Palu, yang

meningkatkan amenitas pariwisata.

2. Tumbuh dan berkembangnya pelaku ekonomi kreatif di bidang pariwisata, yang menyediakan berbagai produk dan jasa yang menarik minat wisatawan.
3. Semakin meningkatnya sadar wisata dikalangan masyarakat.
4. Citra Kota Palu yang nyaman dan kondusif sebagai tujuan wisata

C. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

1. Perangkat regulasi teknis yang komprehensif terkait dengan pengawasandan pembinaan usaha kepariwisataan.
2. Sadar wisata di lingkungan aparatur pemerintah kota, pengelola daya Tarik wisata, pelaku pariwisata dan masyarakat perlu lebih diperkuat.
3. Terbatasnya keberadaan Tourist Information Center (TIC) di Kota Palu.
4. Bahan promosi yang terbatas, dan kurang dapat diakses dengan
5. Belum maksimalnya kualitas layanan akomodasi hotel (khususnya nonbintang) di Kota Palu.
6. Website (situs) Dinas Pariwisata belum terkelola dengan optimal sebagai media informasi dan promosi pariwisata yang terpercaya dikarenakan pengelolaannya yang masih tersentral dan sangat terbatas kapasitasnya.
7. Membangun dan mempertahankan citra

Kota Palu sebagai Kota Pariwisata yang nyamandan aman bagi wisatawan.

8. Diharapkan arah kebijakan nasional tetap berlanjut untuk membangun kawasan strategis pariwisata, yang sempat terhenti terpengaruh dengan adanya Bencana Alam dan wabah corona virus menjadi tantangan pengembangan pariwisata Kota Palu untuk dapat tetap menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di tahun yang akan datang.
9. Mengembangkan model pelayanan secara online selling untuk produk kreasi.

b. Peluang

Peluang Dinas Pariwisata Kota Palu meliputi:

1. Berlanjutnya Kebijakan pariwisata di level nasional yang mendorong pengembangan potensi wisata budaya.
2. Akses domestik yang relatif mudah menuju Palu dari darat danudara, serta akses penerbangan internasional langsung sudah mulai reguler dan diminati wisatawan mancanegara.

3. Bertambahnya fasilitas untuk kenyamanan wisatawan di bandara Palu International membuka peluang semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Palu.

D. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindak lanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Berdasarkan hasil analisis terhadapisu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan Strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan.

2.4. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD tahun 2021 yang disampaikan, telah dicermati oleh Dinas Pariwisata khususnya yang menjelaskan keter kaitan sasaran dinas dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta tentang Rencana Kerja PerubahanPerubahanPerubahandan pendanaan (pagu indikatif) yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan. Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata melibatkan personil- personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah. Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021-2026 seperti terdapat dalam Sebagai Berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
6. Pemerintahan Daerah

II. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

III. Program Pemasaran Pariwisata

IV. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

V. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Palu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BIDANG PARIWISATA	**Kota Palu**			**7.396.490.651**	**BIDANG PARIWISATA**	**Kota Palu**			**9.019.977.107**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Nilai Sakip OPD**	**B**	**4.782.393.276**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Nilai Sakip OPD**	**B**	**4.917.570.907**	
a.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**9.172.850**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**18.972.800**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3.697.850	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5.397.800	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumrn RKA-SKPD	Dokumen	1.425.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumrn RKA-SKPD	Dokumen	1.425.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.425.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.425.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2.625.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	10.725.000	

b.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Kota Palu**	**Persentasi Realisasi Keuangan**	**100%**	**3.710.747.676**	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Kota Palu**	**Persentasi Realisasi Keuangan**	**100 %**	**3.639.505.957**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	3.708.094.276	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	3.636.292.557	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Kooerdinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2.653.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Kooerdinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3.213.400	
c.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kota Palu***	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***365.017.950***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kota Palu***	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100 %***	***278.237.350***	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	59.231.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	23.109.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	31.875.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	7.793.150	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	10.828.350	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undang	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undang	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3.300.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	9.900.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	9.900.000	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	259.884.000	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	222.334.000	
d.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**435.164.800**	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**574.564.800**	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	63.348.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	56.348.800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	371.816.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	518.216.000	
c.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**259.240.000**	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**403.240.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	259.240.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	403.240.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	3.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	3.050.000	

2	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi**	**Kota Palu**	**Cakupan Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata**	**100%**	**412.753.613**	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi**	**Kota Palu**	**Cakupan Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata**	**100 %**	**284.877.600**	
a.	***Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota***	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**100%**	**233.957.649**	***Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota***	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**100 %**	**204.877.600**	
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	233.957.649	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	204.877.600	
a.	***Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota***	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**100%**	**160.031.914**	***Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota***	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**100 %**	**80.000.000**	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	1 Laporan	60.278.650	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	1 Laporan	-	

	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan Terpelihara	Unit	99.753.264	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan Terpelihara	Unit	80.000.000	
b.	***Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota***	**Kota Palu**	**Terlaksananya Penetapan Tanda daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota**	**100%**	**18.764.050**	***Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota***	**Kota Palu**	**Terlaksananya Penetapan Tanda daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota**	**100 %**	**-**	
	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Palu	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	18.764.050	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Palu	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	-	
3	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Kota Palu**	**Cakupan Pemasaran Pariwisata**	**100%**	**1.884.769.512**	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Kota Palu**	**Cakupan Pemasaran Pariwisata**	**100 %**	**3.057.069.350**	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	***Kota Palu***	***Jumlah Promosi Wisata di Luar Negeri***	***100%***	1.884.769.512	***Pemasaran Pariwisata Dalam dan dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota***	***Kota Palu***	***Jumlah Promosi Wisata di Luar Negeri***	***100 %***	***2.778.069.350***	

	Penguatan Promosi Melalui Media cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	363.000.000	Penguatan Promosi Melalui Media cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	84.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	1.430.472.262	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	2.973.069.350	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	91.297.250	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	-	
4	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Kota Palu**	**Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**100%**	**316.574.250**	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Kota Palu**	**Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**100 %**	**760.459.250**	

a.	***Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar***	**Kota Palu**	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar**	**100%**	**241.224.250**	***Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar***	**Kota Palu**	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar**	**100 %**	**707.189.250**	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Palu	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daza Manusia Ekonomi Kreatif	100%	165.000.000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daza Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Palu	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daza Manusia Ekonomi Kreatif	100 %	630.965.000	
	Fasilitasi Sertifkasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifkasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	20 Orang	76.224.250	Fasilitasi Sertifkasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifkasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	20 Orang	76.224.250	
b.	***Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif***	***Kota Palu***	***Terlanksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif***	***100%***	***75.350.000***	***Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif***	***Kota Palu***	***Terlanksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif***	***100 %***	***53.270.000***	

	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendamping Ekonomi Kreatif	Kota Palu	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikutiPelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendamping Ekonomi Kreatif	20 Orang	75.350.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendamping Ekonomi Kreatif	Kota Palu	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikutiPelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendamping Ekonomi Kreatif	20 Orang	53.270.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Bagian ini di uraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepetingan, baik dari kelompok masyarakat terkait yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah dari penelitian lapangan, dan pengamatan pelaksanaan Musrembang Kelurahan. Selain itu ada juga pokok-pokok Pikiran yang disampaikan DPRD Kota Palu yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Palu

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	**2**	**3**	**3**	**4**	**5**
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	KOTA PALU	Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	2 KEGIATAN	Pembangunan Gerbang Nalodo Likuifaksi
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	KOTA PALU	Jumlah Ekonomi Kreatif Yang dibina	6 KEGIATAN	Pengadaan Alat Musik
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	KOTA PALU		2 KEGIATAN	EVENT

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan secara rinci yang telah dirumuskan Dinas Pariwisata terlampir dalam lampiran 5 rencana kerjaini. Rangkuman rencana program, kegiatan dan pendanaan dituangkan dalam Tabel 3.1 yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 Kota Palu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				Renja Tahun 2024		APBD Tahun 2024		Perubahan Renja Tahun 2024		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Taget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-8)	12=(11/8)	13
	BIDANG PARIWISATA	**Kota Palu**			**7.396.490.651**		**9.289.148.221**		**9.019.977.107**	**269.171.114**	**-2,90%**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Palu**	**Nilai Sakip OPD**	**B**	**4.782.393.276**	**B**	**4.829.740.421**	**B**	**4.917.570.907**	**87.830.486**	**1,82%**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kota Palu**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**9.172.850**	**4 Dokumen**	**54.004.850**	**4 Dokumen**	**18.972.800**	**35.032.050**	**64,87%**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	3.697.850	1 Dokumen		1 Dokumen	5.397.800	1.699.950	45,97%	

	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah				3,697,850					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumrn RKA-SKPD	1 Dokumen	1.425.000	1 Dokumen	1,425,000	1 Dokumen	1.425.000	-	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.425.000	1 Dokumen	1,425,000	1 Dokumen	1.425.000	-	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.625.000	1 Laporan	47,457,000	1 Laporan	10.725.000	-36.732.000	-77,40%	
	Administrasi Keuangan Perangkat	**Kota Palu**	**Persentasi Realisasi Keuangan**	**100%**	**3.710.747.676**	**100%**	**3.438.787.821**	**100%**	**3.639.505.95**	**200.718.1**	**5,84%**	

	Daerah								**7**	**36**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	3.708.094.276	38 Orang/Bulan	3,436,134,421	38 Orang/Bulan	3.636.292.557	200.158.136	5,83%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Kooerdinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2.653.400	5 Laporan	2,653,400	5 Laporan	3.213.400	560.000	21,10%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Kota Palu***	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***365.017.950***	***100%***	**364.692.950**	***100%***	**278.237.350**	**-86.455.600**	**-23,71%**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	59.231.100	4 Paket	59,231,100	-	-	-59.231.100	-100,00%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	23.109.700	5 Paket	23,109,700	6 paket	31.875.000	8.765.300	37,93%	
	Penyediaan	Kota Palu	Jumlah	1 Paket		1 Paket						

	Barang Cetakan dan Penggandaan		Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		7.793.150		7,793,150	1 paket	10.828.350	3.035.200	38,95%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undang	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	5.100.000	27 Dokumen	5.100.000	24 dokumen	3.300.000	- 1.800.000	-35,29%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	9.900.000	11 Laporan	9,900,000	10 laporan	9.900.000	-	0,00%	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	259.884.000	25 Laporan	259,559,000	12 laporan	222.334.000	- 37.225.000	-14,34%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**435.164.800**	**100%**	**594.764.800**	100%	574.564.800	-20.200.000	-3,40%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	63.348.800	14 Laporan	63.348.800	12 laporan	56.348.800	- 7.000.000	-11,05%	

			disediakan									
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	371.816.000	12 Laporan	531.416.000	12 laporan	518.216.000	-13.200.000	-2,48%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**259.240.000**	**100%**	**377.490.000**	100%	406.290.000	28.800.000	7,63%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	259.240.000	6 Unit	374,440,000	6 unit	403.240.000	28.800.000	7,69%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	7 Unit	3.050.000	23 Unit	3,050,000	7 unit	3.050.000	-	0,00%	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	**Kota Palu**	**Cakupan Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata**	**100%**	**412.753.613**	**100%**	**398.339.550**	100%	284.877.600	-113.461.950	-28,48%	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pengelolaan Kawasan**	**100%**	**233.957.649**	**100%**		100%	204.877.600	-1.500.000	-0,73%	

	Kabupaten/Kota		**Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**				**206,377,600**					
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	233.957.649	1 Dokumen	206,377,600	1 Dokumen	204.877.600	-1.500.000	-0,73%	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota**	**100%**	**160.031.914**	**100%**	**173.197.900**	100%	80.000.000	-93.197.900	-53,81%	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ kota	1 Laporan	60.278.650	1 Laporan	73,197,900			-73.197.900	-100,00%	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan Terpelihara	3 Unit	99.753.264	3 Unit	100,000,000	2 unit	80.000.000	-20.000.000	-20,00%	
	Penetapan	**Kota Palu**	**Terlaksanan**	**100%**		**100%**						

	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		**ya Penetapan Tanda daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota**		**18.764.050**		**18,764,050**	**100%**	**-**	**- 18.764.050**	**-100,00%**	
	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Palu	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	18.764.050	1 Laporan	18,764,050			- 18.764.050	-100,00%	
	Program Pemasaran Pariwisata	**Kota Palu**	**Cakupan Pemasaran Pariwisata**	**100%**	**1.884.769.512**	**100%**	**3.068.529.300**	100%	3.057.069.350	-11.459.950	-0,37%	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	***Kota Palu***	***Jumlah Promosi Wisata di Luar Negeri***	***100%***	1.884.769.512	***100%***	**3.068.529.300**	100%	3.057.069.350	-11.459.950	-0,37%	
	Penguatan Promosi Melalui Media cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Promosi	363.000.000	4 Promosi	183,000,000	4 promosi	84.000.000	-99.000.000	-54,10%	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran	Kota Palu	Jumlah Laporan Kegiatan	10 Dokumen	1.430.472.262	28 Dokumen	2,825,640,300	10	2.973.069.350	147.429.05	5,22%	

	Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					Kegiatan		0		
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	91.297.250	4 Dokumen	59,889,000			-59.889.000	-100,00%	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**Kota Palu**	**Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**100%**	**316.574.250**	**100%**	**992.538.950**	100%	760.459.250	-232.079.700	-23,38%	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Kota Palu**	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar**	**100%**	**241.224.250**	**100%**	**917.188.950**	100%	707.189.250	-209.999.700	-22,90%	

	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Palu	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daza Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	165.000.000	20 Orang	840,964,700	20 orang	630.965.000	- 209.999.700	-24,97%	
	Fasilitasi Sertifkasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifkasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	20 Orang	76.224.250	25 Orang	76.224.250	20 orang	76.224.250	-	0,00%	
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	***Kota Palu***	***Terlanksanya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif***	***100%***	***75.350.000***	***100%***	**75.350.000**	100%	53.270.000	-22.080.000	**-29,30%**	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendamping Ekonomi Kreatif	Kota Palu	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikutiPelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendamping Ekonomi Kreatif	25 Orang	75.350.000	25 Orang	75.350.000	25 orang	53.270.000	**- 22.080.000**	**-29,30%**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Pariwisata Kota Palu TAHUN 2024 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan bidang kepariwisataan Kota Palu dalam kurun waktu 1(satu) tahun. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata Rencana Kerja Perubahan yang disusun mengacu pada RKPD Perubahan Tahun 2024 sebagai jabaran tahunan RPJMD 2021 - 2026.

Perubahan Renja Tahun 2024 memuat kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun lebih rinci, agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 ini diucapkan terima kasih. Tentunya Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Pariwisata Kota Palu Tahun 2024 ini dapat terlaksana dan mencapai tujuannya bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Palu dan jajarannya, serta masyarakat dan Stakeholder.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU

LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 11 ayat (3) bahwa Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas (a) Renstra Perangkat Daerah, dan (b) Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen perangkat daerah, Rencana Kerja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi.

Penyusunan Rencana Kerja dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, terukur, dan berkelanjutan

dengan berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan yang partisipatif, teknokratik, politis serta *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Pemerintah Kota Palu ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, sedangkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, hingga Nasional.

Pada tataran tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Renja Perubahan Setda Kota Palu Tahun 2024 diorientasikan untuk mendukung visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yaitu Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah adalah : 1. Meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar; 2. Mewujudkan reformasi birokrasi, supermasi hukum dan penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan ham; 3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan; 4. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah; 5. Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan; 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan; 7. Melakukan sinergitas kerjasama pembangunan antar daerah

bertetangga sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga; 8. Meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital dan 9. Mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Untuk tingkat Nasional, Renja Setda Kota Palu menyelaraskan dengan dokumen Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri termuat dalam Visi "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI)" dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat; 2) Profesional, Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya; 3) Proaktif atau sebagai tindakan yang lebih aktif, Kementerian

Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 4) Inovatif, Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun prioritas pembangunan nasional meliputi : 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 5. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, 6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Renja Perubahan Setda Kota Palu Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Perubahan Kota Palu Tahun 2024, Renstra Setda Kota Palu Tahun 2021-2026, RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025, dengan tetap memperhatikan RTRW Kota Palu 2021 – 2041, serta memperhatikan dan selaras dengan agenda dan arah kebijakan RKP Nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2024 merupakan tahapan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Palu

Tahun 2021-2026. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 secara jelas telah mengatur mekanisme dan waktu pelaksanaan penyusunan Renja. Penyusunan Renja Setda Kota Palu dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.

Renja Perubahan Setda Kota Palu Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah serta sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja Perubahan Sekretariat Daerah digunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dibiayai APBD dan APBN, serta Renja Perubahan Setda Kota Palu Tahun 2024 akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Setda Kota Palu Tahun 2024 dan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Musyawarah Rencana Pembangunan Kota Palu;
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
18. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 31);
19. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Setda Kota Palu disusun dengan maksud

untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta kerangka pendanaan dan pengalokasian anggaran yang akan dilakukan pada tahun perencanaan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara substansial, normatif, dan operasional penyusunan Renja Perubahan Setda Kota Palu Tahun 2024 bertujuan :

a. Sebagai arah kebijakan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang akan dilaksanakan dalam satu tahun;
b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi di lingkup Sekretariat Daerah Kota Palu terutama terkait pelaporan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
c. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Kota Palu yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif;
d. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah Kota Palu dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Plafon Anggaran Sementara yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. Sebagai arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
f. Menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Perubahan Setda Kota Palu Tahun 2024 berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dangan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2021-2026
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH
BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Palu adalah penjabaran perencanaan tahunan dari perencanaan strategis. Dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran. Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah guna mengetahui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan.

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Palu melaksanakan 3 (tiga) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan. Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan bertujuan untuk mencapai sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal dan kebangsaan;
3. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
4. Meningkatnya penataan regulasi daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada

tabel berikut :

a. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024;

TABEL 2.1
REALISASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
s.d TW II TAHUN 2024

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (R/Tx100%)
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**34.142.197.868**	**11.593.991.890**	**33,96%**
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**126.237.050**	**31.622.380**	**25,05%**
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.500.000	0	0,00%
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.485.850	6.540.000	35,38%
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	21.025.700	0	0,00%
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.225.500	25.082.380	32,06%
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.167.661.066**	**4.974.241.763**	**32,80%**
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.129.331.066	4.951.466.763	32,64%
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.590.000	17.590.000	100,00%
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	20.740.000	5.185.000	25,00%
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**53.000.000**	**0**	**0,00%**
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	53.000.000	0	0,00%
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**18.175.250**	**8.992.000**	**49,47%**
4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18.175.250	8.992.000	49,47%
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.778.214.600**	**2.647.571.950**	**45,82%**
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.957.500	6.000.000	42,99%
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	389.513.250	145.197.600	37,28%
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	104.419.850	58.718.138	56,23%
4.01.01.2.06.0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.129.825.000	1.007.900.000	47,32%
4.01.01.2.06.0007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.140.499.000	1.429.756.212	45,53%
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.880.471.964**	**175.844.540**	**6,10%**
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	595.900.000	0	0,00%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (R/Tx100%)
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	2.284.571.964	175.844.540	7,70%
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.274.004.600**	**1.546.523.709**	**36,18%**
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	1.250.000	16,67%
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	651.048.000	359.476.207	55,22%
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.009.439.000	320.225.369	31,72%
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.606.017.600	865.572.133	33,21%
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.339.219.000**	**441.702.274**	**32,98%**
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.152.115.000	400.520.924	34,76%
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.090.000	8.020.000	25,57%
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.000.000	0	0,00%
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.014.000	33.161.350	44,80%
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**1.160.268.088**	**430.240.532**	**37,08%**
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	831.743.088	369.183.682	44,39%
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	63.525.000	41.550.000	65,41%
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	265.000.000	19.506.850	7,36%
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**1.430.226.450**	**715.113.225**	**50,00%**
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	621.000.000	310.500.000	50,00%
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	490.500.000	245.250.000	50,00%
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	318.726.450	159.363.225	50,00%
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**1.040.304.400**	**337.349.517**	**32,43%**
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	90.996.500	34.885.300	38,34%
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	457.402.400	99.345.000	21,72%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (R/Tx100%)
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	130.274.450	1.800.000	1,38%
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	361.631.050	201.319.217	55,67%
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**874.415.400**	**284.790.000**	**32,57%**
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	639.300.000	222.900.000	34,87%
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	96.140.000	33.910.000	35,27%
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	138.975.400	27.980.000	20,13%
4.01.02	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**22.479.475.734**	**3.447.526.903**	**15,34%**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**2.789.972.800**	**373.851.413**	**13,40%**
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	2.207.581.500	27.433.585	1,24%
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	92.582.000	29.860.520	32,25%
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	489.809.300	316.557.308	64,63%
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**18.191.345.834**	**2.311.242.890**	**12,71%**
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.172.807.234	1.874.732.565	20,44%
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	6.374.944.000	0	0,00%
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.371.588.100	251.338.686	18,32%
4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	272.006.500	36.920.900	13,57%
4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.000.000.000	148.250.739	14,83%
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**1.498.157.100**	**762.432.600**	**50,89%**
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	825.808.100	439.900.000	53,27%
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	606.694.000	302.182.600	49,81%
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	65.655.000	20.350.000	31,00%
4.01.03	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**2.428.383.050**	**1.614.487.866**	**66,48%**
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**275.225.050**	**130.463.955**	**47,40%**
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	146.212.100	65.295.595	44,66%
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	129.012.950	65.168.360	50,51%
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**1.234.242.250**	**896.534.100**	**72,64%**
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program	898.011.550	784.550.800	87,37%

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (R/Tx100%)
	Pembangunan			
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	244.326.100	99.383.300	40,68%
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	91.904.600	12.600.000	13,71%
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**680.535.850**	**267.452.011**	**39,30%**
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	257.012.000	159.452.011	62,04%
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	313.629.000	106.500.000	33,96%
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	109.894.850	1.500.000	1,36%
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**238.379.900**	**132.665.000**	**55,65%**
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	12.175.000	225.000	1,85%
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	226.204.900	132.440.000	58,55%
	Total	**59.050.056.652**	**16.468.633.859**	**27,89%**

Realisasi pelaksanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 dari total anggaran sebesar Rp. 59.050.056.652,- yang terealisasi sejumlah Rp. 16.468.633.859,- atau mencapai 27,89%. Gambaran lengkap evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 terhadap program, kegiatan, sub kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap renstra, target kinerja dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.2

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja s.d TW II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9 (5+7)*	*10 (9/4)*
4	**01**	**01**				**INDEKS REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU**	**A (90)**	**B (64,19)**	**A (82)**	**B (64,19)**	**B (64,19)**	**B (64,19)**	**B (64,19)**
						NILAI SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU	**BB (80)**	**B (63,05)**	**BB (72)**	**A (81,50)**	**A (81,50)**	**A (81,50)**	**A (81,50)**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**PERSENTASE KETERCAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**97%**	**100%**	**45%**	**45%**	**53%**	**53%**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30 Dokumen**	**12 Dokumen**	**6 Dokumen**	**4 Dokumen**	**75%**	**18 Dokumen**	**55%**
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	60%
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	5 Dokumen	50%
4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	5 Dokumen	50%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja s.d TW II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9 (5+7)*	*10 (9/4)*
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	60%
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**78%**	**78%**	**76%**	**76%**
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Org/Bulan	115 Org/Bulan	110 Org/Bulan	120 Org/Bulan	109%	120 Org/Bulan	109%
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50 Laporan	20 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	30 Laporan	60%
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	33%	9 Laporan	60%
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**	**40%**	**40%**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja s.d TW II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9 (5+7)*	*10 (9/4)*
4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0	0%	2 Dokumen	40%
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**
4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	30 Dokumen	50%
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**71%**	**71%**	**56%**	**56%**
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	3 Paket	60%
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	24 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	30 Paket	50%
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	24 Paket	12 Paket	7 Paket	58%	31 Paket	52%
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	398.125 Laporan	159.250 Laporan	79.625 Laporan	45.800 Laporan	58%	205.050 Paket	52%
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	823 Laporan	366 Laporan	213 Laporan	186 Laporan	87%	552 Laporan	67%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja s.d TW II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9 (5+7)*	*10 (9/4)*
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**9%**	**9%**	**54%**	**54%**
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	4 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	4 Unit	80%
4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	957 Unit	240 Unit	120 Unit	20 Unit	17%	260 Unit	27%
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**52%**	**52%**	**51%**	**51%**
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	30 Laporan	50%
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	7 Laporan	58%	31 Laporan	52%
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	30 Laporan	50%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja s.d TW II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9 (5+7)*	*10 (9/4)*
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	30 Laporan	50%
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**39%**	**39%**	**50%**	**50%**
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	540 Unit	216 Unit	108 Unit	54 Unit	50%	270 Unit	50%
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	900 Unit	360 Unit	180 Unit	90 Unit	50%	450 Unit	50%
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	4 Unit	2 Unit	0 Unit	0%	4 Unit	16 %
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.757 Unit	640 Unit	320 Unit	175 Unit	55%	815 Unit	46%
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**58%**	**58%**	**70%**	**70%**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja s.d TW II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9 (5+7)*	*10 (9/4)*
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Org/Bulan	2 Org/Bulan	2 Org/Bulan	1 Org/Bulan	50%	2 Org /Bulan	100%
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	16 Paket	8 Paket	6 Paket	75%	22 Paket	60%
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang /Tahun	4 Orang	4 Orang	2 Orang	50%	2 Orang	50%
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Cakupan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	60 Paket	24 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	30 Paket	50%
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	60 Paket	24 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	30 Paket	50%
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	60 Paket	24 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	30 Paket	50%
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Cakupan Terlaksananya Penataan Organisasi**	**100%**	**75%**	**100%**	**25%**	**25%**	**45%**	**45%**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja s.d TW II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9 (5+7)*	*10 (9/4)*
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0	0%	2 Dokumen	40%
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	0	0%	2 Laporan	40%
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0%	1 Dokumen	40%
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	60%
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	30 Laporan	50%
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	30 Laporan	50%
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	30 Laporan	50%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja s.d TW II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9 (5+7)*	*10 (9/4)*
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**PERSENTASE KETERCAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**100%**	**100%**	**100%**	**63%**	**63%**	**50%**	**50%**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**58%**	**58%**	**51%**	**51%**
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	111 Dokumen	44 Dokumen	22 Dokumen	10 Dokumen	45%	54 Dokumen	49%
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	20 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	10 Dokumen	50%
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	870 Dokumen	346 Dokumen	175 Dokumen	135 Dokumen	77%	481 Dokumen	55%
						Indeks Kerukunan Umat Beragama	**88%**	**87,24%**	**85%**	**87,24%**	**87,24%**	**87,24%**	**87,24%**
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**60%**	**100%**	**44%**	**44%**	**31%**	**31%**
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	54 Dokumen	20 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	50%	25 Dokumen	46%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja s.d TW II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9 (5+7)*	*10 (9/4)*
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	27 Dokumen	8 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	20%	9 Dokumen	33%
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	25 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	40%	12 Dokumen	48%
4	01	02	2.02	0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerjasama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	14.550 Keluarga	2.500 Keluarga	2.900 Keluarga	950 Keluarga	32%	3.450 Keluarga	23%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja s.d TW II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9 (5+7)*	*10 (9/4)*
4	01	02	2.02	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	26.240 Keluarga	0	5.760 Keluarga	4.600 Keluarga	79%	4.600 Keluarga	17%
						Indeks Kualitas Kebijakan	**90%**	**0%**	**80%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Cakupan Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**100%**	**98%**	**100%**	**60%**	**60%**	**60%**	**60%**
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	6.455 Dokumen	2.510 Dokumen	1.296 Dokumen	648 Dokumen	50%	3.158 Dokumen	49%
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	60 Kasus	38 Kasus	12 Kasus	10 Kasus	83%	48 Kasus	80%
4	01	03	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5.690 Dokumen	2.437 Dokumen	1.138 Dokumen	550 Dokumen	48%	2987 Dokumen	52%
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**PERSENTASE KETERCAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**100%**	**100%**	**100%**	**32%**	**32%**	**60%**	**60%**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja s.d TW II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9 (5+7)*	*10 (9/4)*
						Persentase Bahan Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	**85%**	**13%**	**75%**	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Terlaksananya Kebijakan Pembinaan BUMD dan BLUD serta Pengendalian & Distribusi Perekonomian**	**100%**	**100%**	**100%**	**59%**	**59%**	**57%**	**57%**
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	93 Dokumen	29 Dokumen	21 Dokumen	8 Dokumen	38%	37 Dokumen	40%
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	40 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	80%	14 Laporan	35%
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	20 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	10 Dokumen	50%
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	30 Laporan	50%
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	20 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	2Laporan	50%	10 Laporan	50%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja s.d TW II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9 (5+7)*	*10 (9/4)*
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**100%**	**100%**	**100%**	**16%**	**16%**	**36%**	**36%**
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.034 Dokumen	396 Dokumen	205 Dokumen	63 Dokumen	30%	459 Dokumen	44%
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.080 Dokumen	333 Dokumen	208 Dokumen	38 Dokumen	18%	371 Dokumen	34%
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	433 Orang	123 Orang	84 Orang	2 Orang	2%	125 Orang	29%
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, UMKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0%	0	0%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja s.d TW II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s.d TW II Tahun 2024
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9 (5+7)*	*10 (9/4)*
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	6 Dokumen	6 Dokumen	0	0	0%	6 Dokumen	100%
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan	6 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0%	0	0%

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan antara lain :

   a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD realisasi 33% dari target 3 Laporan yang terealisasi 1 Laporan, karena harusnya kegiatan tersebut dibuatkan laporannya per triwulan, tetapi laporan yang tersedia baru triwulan I;
   b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD realisasi 0% dari target 1 dokumen belum ada yang terealisasi, karena kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV;
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi 0% dari target 1 Unit belum ada yang terealisasi, karena kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV;
   d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realisasi 17% dari target 120 Unit yang terealisasi 20 Unit, karena sesuai pembagian anggaran kas belanja modal dilaksanakan pada triwulan IV;
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi 0% dari target 2 Unit belum ada yang terealisasi, karena kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV;
   f. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan realisasi 0% dari target 1 Dokumen belum ada yang terealisasi, karena kegiatan sementara dalam proses pelaksanaan dan setelah pelaksanaan kegiatan dituangkan

dalam satu dokumen;

g. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana realisasi 0% dari target 1 Laporan belum ada yang terealisasi, karena kegiatan sementara dalam proses pelaksanaan penilaian pusat dan hasil penilaian pusat biasanya keluar di akhir tahun atau awal tahun berikutnya;
h. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi realisasi 0% dari target 1 dokumen belum ada yang terealisasi, karena kegiatan sementara dalam proses pelaksanaan penilaian pusat dan hasil penilaian pusat biasanya keluar di akhir tahun atau awal tahun berikutnya;
i. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan realisasi 45% dari target 22 Dokumen yang terealisasi 10 Dokumen, terjadi kesalahpahaman dalam penetapan target, di mana jumlah dokumen yang digandakan ikut dihitung dalam penentuan jumlah target kegiatan;
j. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial realisasi 20% dari target 5 Dokumen yang terealisasi 1 Dokumen;
k. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat realisasi 40% dari target 5 Dokumen yang terealisasi 2 Dokumen;
l. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerjasama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat realisasi 32% dari target 2.900 Keluarga yang terealisasi 950 Keluarga;
m. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum realisasi 48% dari target 1.138 Dokumen yang terealisasi 550 Dokumen;
n. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD realisasi 38% dari target 21 Dokumen yang terealisasi 8 Dokumen, harusnya realisasi kinerja sudah mencapai 50% tetapi terjadi kesalahan dalam perhitungan target, di mana harusnya setiap triwulan menghasilkan 4 dokumen yaitu 3 dokumen BUMD dan 1 dokumen BLUD;

o. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa realisasi 30% dari target 205 Dokumen yang terealisasi 63 Dokumen;
p. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik realisasi 18% dari target 208 Dokumen yang terealisasi 38 Dokumen;
q. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa realisasi 2% dari target 84 Orang yang terealisasi 2 Orang;
r. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan realisasi 0% dari target 1 dokumen belum ada yang terealisasi, setiap triwulan dibuatkan laporan kegiatan dan pada akhir triwulan kegiatan tersebut akan dibuatkan dalam satu dokumen; dan
s. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air realisasi 0% dari target 2 dokumen belum ada yang terealisasi, setiap triwulan dibuatkan laporan kegiatan dan pada akhir triwulan kegiatan tersebut akan dibuatkan dalam satu dokumen;

2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Selain sub kegiatan yang telah disebutkan di atas rata-rata realisasi program/kegiatan/sub kegiatan telah mencapai target

50% ke atas.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi 109% dari target 110 Org/Bulan yang teralisasi 120 Org/Bulan, adanya ketambahan ASN Pindahan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;

   Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :
   a. Dalam hal penyerapan anggaran, antara perencanaan anggaran kas program/kegiatan/sub kegiatan pertriwulan tidak sesuai dengan pelaksanaan yang telah dibuat oleh masing-masing bagian dan pada saat perencanaan anggaran kas tidak memperhitungkan apakah dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
   b. Tidak memperhitungkan jumlah kebutuhan dan waktu pelaksanaannya, sehingga menyebabkan penyerapan anggaran setiap bulannya tidak memenuhi target yang telah direncanakan; dan
   c. Kurang seimbangnya antara beban tugas dan alokasi anggaran, serta dukungan sarana dan prasarana penunjang menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menyebabkan menurunnya kinerja.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

   Masih adanya beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai target akan menyebabkan target capaian kinerja dalam renstra dan bila hal ini tidak segera diperbaiki bisa menyebabkan

pencapaian tujuan dari perangkat daerah tidak tercapai.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

   Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

   a. Dalam perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan aspek indikator dan target kinerja harus jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan; dan
   b. Untuk meningkatkan efisiensi anggaran harus memperhatikan aspek kepatutan, kewajaran, realistis, rasional dan proposional, agar dalam pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target kinerja kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1); Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu

Tahun 2024 Nomor 4); bahwa kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam pengoordinasian perumusan kebijakan daerah; pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah; pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Pemerintah Daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024, maka ditetapkan rencana pencapaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif. Adapun indikator kinerja pelayanan yang termuat dalam Rencana Strategis terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Realisasi pencapaian kinerja pelayanan sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PALU

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU/IKK Target Akhir Renstra	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Persentase bahan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam		85%	70%	73%	75%	83%	85%	13%	25%	76%	84%	
2.	Indeks Kerukunan Umat Beragama		88	82,5	84	85	86	88	0	0	86	87	
3.	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Palu		A (90)	B (65)	BB (75)	A (82)	A (85)	A (90)	B (64,19)	B (64,19)	A (83)	A (86)	
4.	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kota Palu		BB (80)	B (65)	B (70)	BB (72)	BB (76)	BB (80)	B (63,05)	A (81,50)	BB (73)	BB (77)	
5.	Indeks Kualitas Kebijakan		90	75	78	80	85	90	0	0	81	86	
6.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama		89%	28,5%	37,9%	50%	67%	89%	0	0	51%	68%	
7.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		89%	28,5%	37,9%	50%	67%	89%	78,41%	75,60%	51%	68%	

8.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		89%	28,5%	37,9%	50%	67%	89%	41,84%	0	51%	68%	

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 pencapaian kinerja pelayanan dengan indikator kinerja *Persentase bahan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam* realisasi sebesar 25% dari target 75%, tidak tercapainya target dari indikator kinerja *Persentase bahan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam,* karena semua dokumen pemantauan dan evaluasi yang dihasilkan masih dalam tahap pelaksanaan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

Indikator kinerja *Indeks Kerukunan Umat Beragama* tidak terealisasi, dalam pertemuan pendampingan penyusunan Lakip Perangkat Daerah dan Lakip Pemerintah Kota Palu serta hasil evaluasi dari Tim Menpan RB di Yogyakarta Tahun 2023 untuk indikator kinerja *Indeks Kerukunan Umat Beragama* dipindahkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Indikator kinerja *Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Palu* mendapat nilai B (64,19) dari target A (82), tidak tercapainya indikator kinerja *Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Palu* berdasarkan hasil rekomendasi dari tim evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat OPD belum sepenuhnya berjalan optimal;
2. Monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan Reformasi Birokrasi di level OPD;
3. Belum ada agen perubahan/kelompok budaya kerja di level OPD dan perubahan mindset belum optimal dilakukan.

Indikator kinerja *Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kota Palu* memperoleh nilai BB (72) dari target A (81,50), melebihi dari target yang ditetapkan, berdasarkan hasil penilaian tim Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu, adapun hal-hal yang harus diperbaiki sesuai rekomendasi dari tim sebagai berikut :

1. Membuat website resmi Sekretariat Daerah Kota Palu agar dapat mengupload dokumen Laporan Kinerja sehingga memudahkan publik untuk mengaksesnya; dan
2. Mendorong dan melakukan Evaluasi serta membuat langkah-langkah strategi perbaikan untuk menghadapi permasalahan yang dapat menghambat upaya pencapaian kinerja, sehingga pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun berikutnya sesuai dengan realisasi kinerja yang diharapkan.

Indikator kinerja *Indeks Kualitas Kebijakan* tidak tercapai sedikitpun dari target 80, tidak tercapainya indikator kinerja *Indeks Kualitas Kebijakan* disebabkan karena dari Bagian Hukum selaku penanggung jawab capaian kinerja belum melakukan pengukuran kualitas kebijakan yang dihasilkan, dimana Bagian Hukum belum memiliki admin IKK yang akan melakukan pengukuran melalui sistim informasi IKK pada ikk.lan.go.id dan pengukuran IKK dilakukan terhadap kebijakan yang dikeluarkan selama 1 tahun serta pengukuran IKK dilakukan 2 tahun dengan maksud agar dapat dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dihasilkan.

Untuk indikator kinerja kunci *Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama* belum ada yang terealisasi dari target 50%.

Indikator kinerja *Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif* yang terealisasi sejumlah 75,60% pencapaian ini melebihi target 50% yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja *Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan* belum ada yang terealisasi dari target 50%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Wali Kota dalam pengoordinasian perumusan kebijakan daerah; pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah; pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Pemerintah Daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Masih belum optimal kerjasama dalam bidang kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan;
2. Kerjasama antar OPD masih kurang efektif;
3. Masih kurangnya koordinasi antar OPD atau instansi luar dalam melakukan kegiatan yang menghadirkan dan meminta sambutan pimpinan daerah atau pelaksanaan kegiatan tekhnis lainnya;
4. Banyaknya OPD yang belum memahami penginputan sirup;
5. Ketepatan pelaporan realisasi OPD belum memenuhi standar dan belum tepat waktu;
6. Belum maksimalnya pencapaian kinerja pelayanan bagian Perekonomian dan SDA dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;

7. Kurangnya keterampilan dan penguasaan teknis pengawasan pengelolaan BUMD, sehingga belum berjalan baik dari aspek monitoring maupun evaluasi kinerjanya;
8. Kurangnya SDM yang mampu menganalisis dan merancang secara baik aspek perundangan, kebijakan maupun sektoral pada aspek pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
9. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
10. Belum maksimalnya evaluasi produk hukum daerah, masih banyaknya peraturan daerah yang belum tertindaklanjuti menjadi norma operasional berupa Perwali, Peraturan Daerah yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat, diindikasikan tidak dilaksanakan beberapa perda oleh masyarakat;
11. Masih kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai; dan
12. Masih belum stabilnya kapasitas jaringan dan keterampilan tenaga teknis penunjang pelaksanaan e-government di tingkat Sekretariat Daerah.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksesibilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan, secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan serta menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya

yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, bila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 2021-2026, adalah sebagai berikut :

a. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Penerapan reformasi birokrasi yang baik merupakan prasyarat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan bisa diterima oleh masyarakat. Oleh karenanya, reformasi birokrasi pemerintah daerah haruslah senantiasa dilanjutkan secara terus menerus, sehingga setahap demi setahap akan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya yaitu restrukturisasi dan refungsionalisasi terhadap kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Pemberdayaan sumber daya aparatur lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat, bukan aparatur minta

dilayani oleh masyarakat. Penataan sumber daya aparatur juga diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sumber daya aparatur juga harus dapat mendukung tercapainya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas, efisiensi, penanganan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Manajemen kepegawaian diarahkan menuju profesionalisme birokrasi, lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektivitas, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment sistem*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

c. Penataan dan Harmonisasi Produk Hukum

Dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik perlu dibarengi dengan penataan dan harmonisasi produk hukum daerah. Dengan penataan dan sosialisasi produk hukum diharapkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Peningkatan Pembinaan BUMD

Untuk dapat meningkatkan kinerja BUMD maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance),* diperlukan regulasi kebijakan daerah yang terkait dengan pembinaan BUMD dan didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, menganalisa perkembangan di bidang perekonomian, sumber daya alam dan dapat menilai Kinerja BUMD dan BLUD, serta tersedianya database yang *up to date.*

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki, dengan melihat dan membandingkan antara rencana pembangunan dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan.

Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan RKPD Perubahan Kota Palu, maka penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan jelas dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan. Berkaitan dengan arah kebijakan RKPD Perubahan Kota Palu dengan memperhatikan sasaran, prioritas pembangunan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Kode Rekening	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kota Palu**		**100%**	**46.509.741.504**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kota Palu**		**100%**	**64.167.885.199**
		Kota Palu	**Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Palu**	**A (82)**		**Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Palu**	**Kota Palu**	**Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Palu**	**A (82)**	
		Kota Palu	**Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kota Palu**	**BB (72)**		**Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kota Palu**	**Kota Palu**	**Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kota Palu**	**BB (72)**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Palu**	**Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**29.596.478.720**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Palu**	**Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**36.813.420.815**
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**98.836.700**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**126.241.050**
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.205.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.440.000
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	19.317.450	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	17.550.000

Kode Rekening	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	19.788.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	19.787.050
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.526.050	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	80.464.000
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Realisasi Keuangan**	**100%**	**13.313.403.982**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Realisasi Keuangan**	**100%**	**15.501.333.388**
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang /Bulan	13.275.073.982	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang /Bulan	15.463.003.388
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	17.590.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	17.590.000

Kode Rekening	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	3 Laporan	20.740.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	3 Laporan	20.740.000
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**53.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**53.000.000**
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	53.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	53.000.000
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**18.175.250**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**18.175.250**
4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	18.175.250	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	18.175.250
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**5.976.585.600**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**8.245.075.300**

Kode Rekening	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.957.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.957.500
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	389.513.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	443.650.750
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	104.419.850	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	104.419.850
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.625 Laporan	2.129.825.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.625 Laporan	3.129.825.000
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213 Laporan	3.338.870.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213 Laporan	4.553.222.200
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100%**	**228.072.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100%**	**1.271.051.439**
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	18.500.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0

Kode Rekening	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	120 Unit	209.572.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	120 Unit	1.271.051.439
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**3.480.840.600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**4.607.326.200**
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.500.000
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	651.048.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	861.369.600
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.009.439.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.009.439.000
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.812.853.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.729.017.600

Kode Rekening	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**1.264.219.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**2.017.254.000**
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	108 Unit	1.152.115.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	108 Unit	1.839.150.000
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	29.090.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	29.090.000
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	9.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	75.000.000
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	320 Unit	74.014.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	320 Unit	74.014.000
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**985.268.088**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**1.160.268.088**

Kode Rekening	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang /Bulan	831.743.088	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang /Bulan	831.743.088
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	63.525.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	63.525.000
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang /Tahun	90.000.000	Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang /Tahun	265.000.000
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Cakupan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100%**	**1.430.226.450**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Cakupan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100%**	**1.937.403.600**
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Palu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	621.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Palu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	828.000.000
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	490.500.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	654.000.000

Kode Rekening	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Palu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	318.726.450	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Palu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	455.403.600
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Kota Palu**	**Cakupan Terlaksananya Penataan Organisasi**	**100%**	**1.049.935.650**	**Penataan Organisasi**	**Kota Palu**	**Cakupan Terlaksananya Penataan Organisasi**	**100%**	**940.627.500**
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	100.626.750	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	87.516.000
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	457.402.400	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	436.231.000
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Palu	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	130.428.300	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Palu	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	114.274.450
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	361.478.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	302.606.050
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Kota Palu**	**Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**1.697.915.400**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Kota Palu**	**Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**935.665.000**

Kode Rekening	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	639.300.000	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	670.205.000
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	96.140.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	115.640.000
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Palu	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	962.475.400	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Palu	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	149.820.000
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kota Palu**	**Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**14.490.874.034**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kota Palu**	**Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**23.734.803.734**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Kota Palu**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan**	**100%**	**2.552.937.800**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Kota Palu**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan**	**100%**	**3.067.385.800**
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	22 Dokumen	2.217.276.500	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	22 Dokumen	2.188.476.500
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	129.277.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	97.537.000
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	175 Dokumen	206.384.300	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	175 Dokumen	781.372.300

Kode Rekening	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
		Kota Palu	**Indeks Kerukunan Umat Beragama**	**85%**			**Kota Palu**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama**	**85%**	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Kota Palu**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**10.842.863.834**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Kota Palu**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**18.320.615.834**
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	3.602.373.234	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	11.514.463.234
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	4.596.896.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	4.162.558.000

Kode Rekening	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	1.371.588.100	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	1.371.588.100
4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	2.900 Keluarga	272.006.500	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	2.900 Keluarga	272.006.500

Kode Rekening	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Palu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	5.760 Keluarga	1.000.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Palu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	5.760 Keluarga	1.000.000.000
		Kota Palu	**Indeks Kualitas Kebijakan**	**80%**			**Kota Palu**	**Indeks Kualitas Kebijakan**	**80%**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Kota Palu**	**Cakupan Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**100%**	**1.095.072.400**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Kota Palu**	**Cakupan Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**100%**	**2.346.802.100**
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Palu	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1.296 Dokumen	403.093.400	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Palu	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1.296 Dokumen	1.024.783.100
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Palu	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	626.324.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Palu	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	1.267.064.000
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Palu	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1.138 Dokumen	65.655.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Palu	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1.138 Dokumen	54.955.000
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kota Palu**	**Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**2.422.388.750**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kota Palu**	**Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**3.619.660.650**

Kode Rekening	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
		Kota Palu	**Persentase Bahan Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**75%**			**Kota Palu**	**Persentase Bahan Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**75%**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Kebijakan Pembinaan BUMD dan BLUD serta Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**	**100%**	**264.920.050**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**100%**	**262.725.050**
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	17 Dokumen	155.907.100	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	17 Dokumen	150.862.100
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Laporan	109.012.950	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Laporan	111.862.950
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Kota Palu**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**100%**	**1.213.518.950**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Kota Palu**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**100%**	**1.922.232.950**
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	912.465.800	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	1.613.341.450

Kode Rekening	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	244.188.150	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	232.636.500
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	56.865.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	76.255.000
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Kota Palu**	**Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**100%**	**705.569.850**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Kota Palu**	**Terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa**	**100%**	**1.140.147.650**
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	205 Dokumen	266.707.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	205 Dokumen	631.092.500
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	208 Dokumen	328.968.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	208 Dokumen	400.160.300
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	84 Orang	109.894.850	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	84 Orang	108.894.850

Kode Rekening	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**100%**	**238.379.900**	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Kota Palu**	**Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**100%**	**294.555.000**
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, UMKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	12.175.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, UMKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	4.175.000
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	226.204.900	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	290.380.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD Kota Palu. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang, dimulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan sampai Musrembang tingkat Kota. Selain dari hasil usulan Musrenbang terdapat juga Hasil Reses Anggota DPRD Kota Palu yang turun ke Daerah Pemilihan untuk mendengar aspirasi dari Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Pokok Pikiran (Pokir). Dari hasil usulan Musrenbang dan Pokir digunakan sebagai bahan menyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah. Adapun usulan hasil Musrenbang tingkat Kota dan Pokir yang diprogramkan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut ini :

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KOTA PALU

SEKRETARIAT DAERAH

No Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**PERSENTASE KETERCAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan**		
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
					Pembuatan Tapal Batas Kelurahan dan Kecamatan	RT.02/RW.05, Kota Palu, Talise Valangguni, Mantikulore			Verifikasi Kecamatan
					Masalah Tapal Batas Kelurahan	Kelurahan Kawatuna, Kota Palu			Diteruskan ke Forum SKPD
					Masalah Tapal Batas Kelurahan	Jl. Veteran, Kota Palu			Diteruskan ke Forum SKPD

No Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**				
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
					Pembinaan Majelis Talim	RT.001 RW.04, Kota Palu, Silae, Ulujadi			Dikembalikan
					Pengadaan Buku Iqra Untuk TPA	Layana Indah RT 07, Mantikulore		20 Buah	Verifikasi Kecamatan
					Pengadaan Al-Qur'an Buku Iqra dan Perlengkapan Mengaji	Wilayah Kelurahan Besusu Timur RT 004 RW 002, Kota Palu, Palu Timur		1 Paket	Usulan disetujui
					Pemberdayaan Majelis Ta'lim	RT.02/RW.08, Kota Palu, Lasoani, Mantikulore			Verifikasi Kecamatan
					Honor Tenaga Pendidik TPA	TPA. Saudara Muslim RT.002 / RW.003, Kota Palu, Kayumalue Pajeko, Palu Utara		4 Orang	Usulan disetujui
					Honor Tenaga Pendidik TPA	TPA. Annisa Jalan Kayu Rampe RT.003/ RW.002, Kota Palu, Kayumalue Pajeko, Palu Utara		4 Orang	Usulan disetujui
					Honor Tenaga Pendidik TPA	TPQ. Baitul Qira'ah Jalan Rata Lembah RT.001 / RW.002, Kota Palu, Kayumalue Pajeko, Palu Utara		4 Orang	Usulan disetujui
					Pengadaan Buku Iqra Dan Al-Quran TPA	RW.01, RW.02, RW.03, Kota Palu, Taipa, Palu Utara			Verifikasi Kecamatan
					Permintaan Guru Mengaji	RT.01/RW.09 Lrg. Sintuvu, Kota Palu, Lolu Utara, Palu Timur			Dikembalikan
					Permintaan Guru Mengaji	RT.02/RW.09, Kota Palu, Lolu Utara, Palu Timur			Dikembalikan
					Permintaan Guru Mengaji	RT.03/RW.09 Lrg. Singgani, Kota Palu, Lolu Utara, Palu Timur			Dikembalikan
					Pembuatan Sarana dan Prasarana Taman Pengajian	Jalan Anoa RT.001/RW.005, Kota Palu			Dikembalikan
					Bantuan ATK dan Iqra, Al-Qur'an buat TPA	Jalan Jamur, Kota Palu			Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan Pengadaan Alquran Baju Seragam Majelis Taklim	Jl. Lamalipu (Baku Ganda) Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara, Kota Palu			
					Bantuan Pengadaan Alquran Baju Seragam Majelis Taklim	Jl. Pangeran Hidayat Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, Kota Palu		200 Buah	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan untuk Guru Mengaji	Jalan Sungai Manonda BTN Grand Citra, Kota Palu			Ditolak

No Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					Pembuatan Sarana dan Prasarana Taman Pengajian	Jl. Kedondong, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan Seragam Majelis Ta'qlim	Jl. Trans Sulawesi Kel. Lambara, Kota Palu		1 Kelompok	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan Seragam Majelis Ta'qlim	Jl. Sampaga Biru Kel. Lambara, Kota Palu		1 Kelompok	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan Seragam Majelis Ta'qlim	Jl. Lobu Kel. Pantoloan Boya, Kota Palu		1 Kelompok	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan Seragam Majelis Ta'qlim	Jl. Merpati, Kota Palu		40 Pcs	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Pembuatan Sarana dan Prasarana Taman Pengajian	Jl. Baiya Raya Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Pembangunan TPA Karemea	Jalan Moh. Amin Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan ATK dan Iqra, Al-Qur'an buat TPA	Jalan Kamboja, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan Pengadaan Alquran, Baju Seragam Majelis Taklim	Jln. Ketapang, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan Pengadaan Alquran, Baju Seragam Majelis Taklim	Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan Beasiswa untuk Pelajar dan Mahasiswa Sekota Palu	Jln. Miangas Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur, Kota Palu			
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian		

No Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
							Penduduk dan KB		
					Pengadaan Baju Seragam Majelis Ta'lim	Seluruh Majelis Ta'lim yang ada di Kelurahan Lambara, Tawaeli			Verifikasi Kecamatan
					Pengadaan Alat Rabana dan Gambus	Majelis Ta'lim di RW 04, Kota Palu, Lambara, Tawaeli			Verifikasi Kecamatan
					Pengadaan Seragam Santri Pengajian	Masjid yang Melaksanakan Kegiatan Palu Mengaji, Kel. Tawanjuka, Tatanga		20 Orang	Verifikasi Kecamatan
					Pengadaan Al-Quran	RT 10, Kota Palu, Besusu Tengah, Palu Timur		10 Buah	Usulan disetujui
					Pengadaan Alat Rabana dan Gambus	Jl. Nunumbuku, Kota Palu, Poboya, Mantikulore			Verifikasi Kecamatan
					Pengadaan Alat Perlengkapan Mengaji	RT.01/RW.15, Kota Palu, Tondo, Mantikulore		1 Paket	Usulan disetujui
					Pengadaan Perlengkapan/Sarana Majelis Taklim	Wilayah RT 004 RW 02, Kota Palu, Besusu Timur, Palu Timur		1 Paket	Usulan disetujui
					Pengadaan Ayat Suci Al-Qur'an	RT.001 RW.001, Kota Palu, Palupi, Tatanga		10 Buah	Verifikasi Kecamatan
					Pengadaan Alat Rabana dan Gambus	Kelurahan Kamonji, Kota Palu, Palu Barat		1 Paket	Usulan disetujui
					Pengadaan Buku Iqra dan Al-Quran TPA	Kelurahan Kamonji, Kota Palu, Palu Barat		1 Paket	Usulan disetujui
					Pengadaan Ayat Suci Al-Qur'an	Jl. Nunumbuku, Kota Palu, Poboya, Mantikulore		10 Buah	Verifikasi Kecamatan
					Pengadaan Tempat Pengajian Untuk Anak (TPA)	RT01/RW08, Kota Palu, Lasoani, Mantikulore			Verifikasi Kecamatan
					Pengadaan Tempat Pengajian Untuk Anak (TPA)	Jl. Elang II, RT01/RW08, Kota Palu, Lasoani, Mantikulore			Verifikasi Kecamatan
					Pengadaan Perlengkapan/Sarana Majelis Taklim	Jalan Danau Talaga RT 004 RW 001, Kota Palu, Siranindi, Palu Barat		1 Paket	Usulan disetujui
					Pengadaan Tempat Pengajian Untuk Anak (TPA)	Jl. Lr. Tjimpolo RT 002 RW 003 Kel. Siranindi, Kota Palu, Siranindi, Palu Barat			Dikembalikan
					Pengadaan Al-Quran	RT.005 RW.003, Kota Palu, Bayaoge, Tatanga			Verifikasi Kecamatan
					Pengadaan Al-Qur'an Buku Iqra dan Perlengkapan Mengaji	Wilayah RT.03 RW.11 Kelurahan Lolu Selatan, Kota Palu, Palu Timur		1 Paket	Usulan disetujui
					Pengadaan Tempat Pengajian Untuk Anak (TPA)	Jln. Malonda Lorong Tsunami I, Kota Palu, Watusampu, Ulujadi			Dikembalikan
					Pengadaan Tempat Pengajian Untuk Anak (TPA)	RW. 003 Kelurahan Pantoloan, Kota Palu, Tawaeli			Dikembalikan
					Pengadaan Tempat Pengajian Untuk Anak (TPA)	RW.004 Kelurahan Pantoloan, Kota Palu, Tawaeli			Dikembalikan

No Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					Pengajian Rutin Warga dan Fasilitas Penunjang	RW. 007 Kelurahan Pantoloan, Kota Palu, Tawaeli			Dikembalikan
					Pembinaan Majelis Talim	Pantoloan, Kota Palu, Tawaeli			Dikembalikan
					Pengadaan Tempat Pengajian Untuk Anak (TPA)	Lambagu, Kota Palu, Pantoloan, Tawaeli			Dikembalikan
					Rehabilitasi Masjid	Jl. Tentena III di RT.006 RW.04, Kota Palu, Silae, Ulujadi		1 Paket	Usulan disetujui
					Rehabilitasi Masjid	Masjid Al-Amin RT.006 RW.04, Kota Palu, Silae, Ulujadi		1 Paket	Usulan disetujui
					Pembangunan Masjid	RT 20, Kota Palu, Layana Indah, Mantikulore			Verifikasi Kecamatan
					Pembangunan Masjid	Kompleks Perumahan BTN Pengawu Permai RT.003/RW.05, Kota Palu, Tatanga			Verifikasi Kecamatan
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid	RT. 005/ RW. 008, Kota Palu, Petobo, Palu Selatan			Verifikasi Kecamatan
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid	BTN Petobo Permai, Kota Palu			Verifikasi Kecamatan
					Beasiswa S1 bagi Anak yang Tidak Mampu	Jl. Melati RT.002/RW.001, Kota Palu, Kawatuna, Mantikulore		1 Orang	Usulan disetujui
					Beasiswa S1 bagi Anak yang Tidak Mampu	Jl. Bulu Masomba RT.001/RW.001, Kota Palu, Kawatuna, Mantikulore		3 Orang	Usulan disetujui
					Beasiswa S1 bagi Anak yang Tidak Mampu	Jl. Gunung Lolo RT.001/RW.002, Kota Palu, Kawatuna, Mantikulore		4 Orang	Usulan disetujui
					Beasiswa S1 bagi Anak yang Tidak Mampu	Jl. Mamara RT.002/RW.002, Kota Palu, Kawatuna, Mantikulore		1 Orang	Usulan disetujui
					Beasiswa S1 bagi Anak yang Tidak Mampu	Jl. Kebun Sari RT.003/RW.003, Kota Palu, Kawatuna, Mantikulore		3 Orang	Usulan disetujui
					Beasiswa S1 bagi Anak yang Tidak Mampu	Uwentumbu RW.005, Kota Palu, Kawatuna, Mantikulore		4 Orang	Usulan disetujui
					Pemberian Beasiswa Untuk Masyarakat Kurang Mampu	RT.001/RW.007 (7 Rumah Tangga), Kota Palu, Tanamodindi, Mantikulore			Verifikasi Kecamatan
					Pembagunan Menara Masjid	Jl. Kampung Nelayan, Kota Palu, Talise, Mantikulore			Verifikasi Kecamatan
					Pemberian Beasiswa Untuk Masyarakat Kurang Mampu	Kelurahan Talise, Kota Palu, Mantikulore			Verifikasi Kecamatan
					Bantuan Pendidikan untuk Warga yang Tidak Mampu	Jl. Merpati, Kota Palu, Talise Valangguni, Mantikulore			Verifikasi Kelurahan

No Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					Bantuan Pendidikan untuk Warga yang Tidak Mampu	Jl. Tombolotutu RT 03 dan 04 RW 03, Kota Palu, Talise, Mantikulore			Verifikasi Kelurahan
					Pembangunan Masjid	Jl. Padat Karya RT 03 / RW 04, Kota Palu, Lasoani, Mantikulore		1 Paket	Verifikasi Kecamatan
					Pembangunan Masjid	Jl. Bulumasomba 1, RT.03/RW.04, Kota Palu, Lasoani, Mantikulore			Verifikasi Kecamatan
					Pembangunan Masjid	Jl. Woodward, Kota Palu, Lolu Selatan, Palu Timur		1 Paket	Usulan disetujui
					Pemberian Beasiswa Untuk Masyarakat Kurang Mampu	Wilayah Kelurahan Lolu Selatan, Kota Palu, Palu Timur		5 Orang	Usulan disetujui
					Perbaikan Tempat Wudhu Mesjid	Masjid Al-Aqrabin Jalan Kayu Rampe RT.003 / RW.002, Kota Palu, Kayumalue Pajeko, Palu Utara		1 Paket	Usulan disetujui
					Perbaikan WC Mesjid	Masjid Al-Aqrabin Jalan Kayu Rampe RT.003 / RW.002, Kota Palu, Kayumalue Pajeko, Palu Utara			ditolak
					Rehabilitasi Pagar Masjid	BTN I RT 04 / RW 04, Kota Palu, Mamboro, Palu Utara		1 Paket	Usulan disetujui
					Pemasangan Paving di Halaman Masjid	Masjid Atta'un, Kota Palu, Besusu Barat, Palu Timur		1 Paket	Usulan disetujui
					Pembangunan Sarana Religi (Masjid Tua)	Wilayah RT. 001 / RW. 01, Kota Palu, Besusu Barat, Palu Timur			Ditolak
					Pengadaan Perlengkapan Masjid	Kelurahan Silae, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Pengadaan Perlengkapan Masjid	Kelurahan Silae, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan Pembangunan Mushola	Jln. Pusparagam Tatanga, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Pembangunan Mesjid	Jl. Lasapandi Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Pembangunan Mesjid	Jl. Datumasuci Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Pengadaan Alat Cuci Karpet untuk Mesjid	Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat, Kota Palu		4 Unit	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					Hibah Rumah Ibadah Gereja GPDI	Lorong Singgani Kel. Lolu Utara, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Hibah Gereja GSJA	Jalan Tanjung Manimbaya Kel. Tatura Utara, Kota Palu			Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Hibah Gereja GKMI	Jalan Tanjung Satu Kel. Tatura Selatan, Kota Palu			
					Bantuan Pembangunan Mushola	SDN Inpres Ujuna 1 Palu, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Perbaikan Mesjid	Jalan Tentena Raya, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan Beasiswa untuk Pelajar dan Mahasiswa Sekota Palu	Jalan Tentena Raya, Kota Palu		25 Orang	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Pembangunan Atap Parkiran Kendaraan/ Kanopi	Jalan Tg. Tada 2 Mesjid Al-Istiqamah, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Pengadaan Perlengkapan Masjid	JL. Marhandu Lobu Kel. Pantoloan Boya, Kota Palu		1 Kelompok	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan Dana Hibah Mesjid	Masjid Al-Furqan, Masjid Al-Hidayah, Masjid Nurul Ikhlas, Masjid Sabhul Khaerat dan Masjid Mun Zelan Kel. Petobo Kec. Palu Selatan, Kota Palu		5 Mesjid	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan Dana Hibah Mesjid	Jln. Anoa, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Pembangunan Gereja	Jl. Setia Budi Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur, Kota Palu		1 Unit	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Perbaikan Mesjid	JL Andudana Kel. Baiya Kec. Tawaeli, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan Pembangunan Mushola	Jl. Dayodara RT 01 / RW 07 Kecamatan Mantikulore, Kota Palu		15 Dos	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan Beasiswa untuk Pelajar dan Mahasiswa Sekota Palu	Kecamatan Mantikulore, Kota Palu		50 Orang	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan Beasiswa untuk Pelajar dan Mahasiswa Sekota Palu	Jln. Miangas Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur, Kota Palu			Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					Bantuan Beasiswa untuk Pelajar dan Mahasiswa Sekota Palu	Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, Kota Palu			Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Pembangunan Mesjid	Jln. Padat Karya Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore, Kota Palu			Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Bantuan Dana Hibah Mesjid	Jln. Tadulako Kelurahan Besusu Tengah, Kota Palu		1 Paket	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
					Pengadaan Mobiler	Jl. Dayodara RT 0/ RW 07, Kota Palu			Dikembalikan
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		
					Pelatihan Mengurus Jenazah	RT.02/RW.08, Kota Palu, Tondo, Mantikulore		320 Orang	Usulan disetujui
					Pengadaan Honor Bagi Pegawai Syara	Pantoloan Boya, Kota Palu, Tawaeli		46 Orang	
					Pengadaan Keperluan Kedukaan (Kain Kafan)	Jalan Bali (RT 04/8), Kota Palu			Dikembalikan
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		
					Pengadaan Pangkalan Gas 3 Kg	Jl. Moma Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara, Kota Palu			Ditolak
					Sidak Kios yang Menjual Gas Elpiji 3 Kg	Kota Palu, Kota Palu		30 Orang	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

No Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
					Pengadaan Pangkalan Gas 3 Kg	RT 05 RW 06, Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Birobuli Selatan, Kota Palu			Ditolak
					Pengawasan Gas LPG	Jl. Miangas, Kota Palu			Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Rencana kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang telah dicapai oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana kerja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah, karena rencana kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah. Penyusunan rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, pendanaan, target capaian dan berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah serta mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan di Kota Palu yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya capaian rencana strategis Sekretariat Daerah dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dan program prioritas perangkat daerah serta untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 (10-6)*	*12 (11/6)*	*13*
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		**Kota Palu**		**46.509.741.504**		**58.197.319.264**		**64.167.885.199**	**17.658.143.695**	**37,97**	
		Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Palu	**Kota Palu**	**A (82)**		**A (82)**		**A (82)**				
		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kota Palu	**Kota Palu**	**BB (72)**		**BB (72)**		**BB (72)**				
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**29.596.478.720**	**100%**	**33.889.460.480**	**100%**	**36.813.420.815**	**7.216.942.095**	**24,38**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**6 Dokumen**	**98.836.700**	**6 Dokumen**	**126.237.050**	**6 Dokumen**	**126.241.050**	**27.404.350**	**27,73**	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	9.205.000	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	8.440.000	-765.000	-8,31	
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	2 Dokumen	19.317.450	2 Dokumen	18.485.850	2 Dokumen	17.550.000	-1.767.450	-9,15	
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	2 Dokumen	19.788.200	2 Dokumen	21.025.700	2 Dokumen	19.787.050	-1.150	-0,01	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 (10-6)*	*12 (11/6)*	*13*
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Laporan	50.526.050	1 Laporan	78.225.500	1 Laporan	80.464.000	29.937.950	59,25	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**13.313.403.982**	**100%**	**14.914.923.678**	**100%**	**15.501.333.388**	**2.187.929.406**	**16,43**	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	110 Org/Bulan	13.275.073.982	110 Org/Bulan	14.876.593.678	110 Org/Bulan	15.463.003.388	2.187.929.406	16,48	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	10 Laporan	17.590.000	10 Laporan	17.590.000	10 Laporan	17.590.000	0	0,00	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	3 Laporan	20.740.000	3 Laporan	20.740.000	3 Laporan	20.740.000	0	0,00	
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**53.000.000**	**100%**	**53.000.000**	**100%**	**53.000.000**	**0**	**0,00**	
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	53.000.000	1 Dokumen	53.000.000	1 Dokumen	53.000.000	0	0,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 (10-6)*	*12 (11/6)*	*13*
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**18.175.250**	**100%**	**18.175.250**	**100%**	**18.175.250**	**0**	**0,00**	
4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu	12 Dokumen	18.175.000	12 Dokumen	18.175.000	12 Dokumen	18.175.250	0	0,00	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**5.976.585.600**	**100%**	**5.778.214.600**	**100%**	**8.245.075.300**	**2.268.489.700**	**37,96**	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	13.957.500	1 Paket	13.957.500	1 Paket	13.957.500	0	0,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Paket	389.513.250	12 Paket	389.513.250	12 Paket	443.650.750	54.137.500	13,90	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	12 Paket	104.419.850	12 Paket	104.419.850	12 Paket	104.419.850	0	0,00	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	79.625 Laporan	2.129.825.000	79.625 Laporan	2.129.825.000	79.625 Laporan	3.129.825.000	1.000.000.000	46,95	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	213 Laporan	3.338.870.000	213 Laporan	3.140.499.000	213 Laporan	4.553.222.200	1.214.352.200	36,37	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**228.072.000**	**100%**	**2.880.471.964**	**100%**	**1.271.051.439**	**1.042.979.439**	**457,30**	
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	1 Unit	18.500.000	1 Unit	595.900.000	1 Unit	0	-18.500.000	-100,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 (10-6)*	*12 (11/6)*	*13*
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	120 Unit	209.572.000	120 Unit	2.284.571.964	120 Unit	1.271.051.439	1.061.479.439	506,50	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**3.480.840.600**	**100%**	**4.274.004.600**	**100%**	**4.607.326.200**	**1.126.485.600**	**32,36**	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palu	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	7.500.000	0	0,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	651.048.000	12 Laporan	651.048.000	12 Laporan	861.369.600	210.321.600	32,31	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	1.009.439.000	12 Laporan	1.009.439.000	12 Laporan	1.009.439.000	0	0,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	1.812.853.600	12 Laporan	2.606.017.600	12 Laporan	2.729.017.600	916.164.000	50,54	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**1.264.219.000**	**100%**	**1.339.219.000**	**100%**	**2.017.254.000**	**753.035.000**	**59,57**	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	108 Unit	1.152.115.000	108 Unit	1.152.115.000	108 Unit	1.839.150.000	687.035.000	59,63	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	180 Unit	29.090.000	180 Unit	29.090.000	180 Unit	29.090.000	0	0,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 (10-6)*	*12 (11/6)*	*13*
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kota Palu	2 Unit	9.000.000	2 Unit	84.000.000	2 Unit	75.000.000	66.000.000	733,33	
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kota Palu	320 Unit	74.014.000	320 Unit	74.014.000	320 Unit	74.014.000	0	0,00	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Presentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**985.268.088**	**100%**	**1.160.268.088**	**100%**	**1.160.268.088**	**175.000.000**	**17,76**	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	2 Org/Bulan	831.743.088	2 Org/Bulan	831.743.088	2 Org/Bulan	831.743.088	0	0,00	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Palu	8 Paket	63.525.000	8 Paket	63.525.000	8 Paket	63.525.000	0	0,00	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	4 Org/Thn	90.000.000	4 Org/Thn	265.000.000	4 Org/Thn	265.000.000	175.000.000	194,44	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Cakupan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**1.430.226.450**	**100%**	**1.430.226.450**	**100%**	**1.937.403.600**	**507.177.150**	**35,46**	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Palu	12 Paket	621.000.000	12 Paket	621.000.000	12 Paket	828.000.000	207.000.000	33,33	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 (10-6)*	*12 (11/6)*	*13*
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Palu	12 Paket	490.500.000	12 Paket	490.500.000	12 Paket	654.000.000	163.500.000	33,33	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kota Palu	12 Paket	318.726.450	12 Paket	318.726.450	12 Paket	455.403.600	136.677.150	42,88	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Cakupan Terlaksananya Penataan Organisasi**	**Kota Palu**	**100%**	**1.049.935.650**	**100%**	**1.040.304.400**	**100%**	**940.627.500**	**-109.308.150**	**-10,41**	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Palu	1 Dokumen	100.626.750	1 Dokumen	90.996.500	1 Dokumen	87.516.000	-13.110.750	-13,03	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Palu	1 Laporan	457.402.400	1 Laporan	457.402.400	1 Laporan	436.231.000	-21.171.400	-4,63	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Palu	1 Dokumen	130.428.300	1 Dokumen	130.274.450	1 Dokumen	114.274.450	-16.153.850	-12,39	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	361.478.200	1 Dokumen	361.631.050	1 Dokumen	302.606.050	-58.872.150	-16,29	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Kota Palu**	**100%**	**1.697.915.400**	**100%**	**874.415.400**	**100%**	**935.665.000**	**-762.250.400**	**-44,89**	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Palu	12 Laporan	639.300.000	12 Laporan	639.300.000	12 Laporan	670.205.000	30.905.000	4,83	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Palu	12 Laporan	96.140.000	12 Laporan	96.140.000	12 Laporan	115.640.000	19.500.000	20,28	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Palu	12 Laporan	962.475.400	12 Laporan	138.975.400	12 Laporan	149.820.000	-812.655.400	-84,43	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 (10-6)*	*12 (11/6)*	*13*
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Kota Palu**	**100%**	**14.490.874.034**	**100%**	**21.879.475.734**	**100%**	**23.734.803.734**	**9.243.929.700**	**63,79**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan**	**Kota Palu**	**100%**	**2.552.937.800**	**100%**	**2.789.972.800**	**100%**	**3.067.385.800**	**514.448.000**	**20,15**	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Palu	22 Dokumen	2.217.276.500	22 Dokumen	2.207.581.500	22 Dokumen	2.188.476.500	-28.800.000	-1,30	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Palu	4 Dokumen	129.277.000	4 Dokumen	92.582.000	4 Dokumen	97.537.000	-31.740.000	-24,55	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Palu	175 Dokumen	206.384.300	175 Dokumen	489.809.300	175 Dokumen	781.372.300	574.988.000	278,60	
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	**Kota Palu**	**85%**		**85%**		**85%**				
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Kota Palu**	**100%**	**10.842.863.834**	**100%**	**17.591.345.834**	**100%**	**18.320.615.834**	**7.477.752.000**	**68,96**	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Palu	12 Dokumen	3.602.373.234	12 Dokumen	8.572.807.234	12 Dokumen	11.514.463.234	7.912.090.000	219,64	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan	Kota Palu	5 Dokumen	4.596.896.000	5 Dokumen	6.374.944.000	5 Dokumen	4.162.558.000	-434.338.000	-9,45	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 (10-6)*	*12 (11/6)*	*13*
		Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB										
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kota Palu	5 Dokumen	1,371,588,100	5 Dokumen	1,371,588,100	5 Dokumen	1.371.588.100	0	0,00	
4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	2.900 Keluarga	272.006.500	2.900 Keluarga	272.006.500	2.900 Keluarga	272.006.500	0	0,00	
4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Palu	5.760 Keluarga	1.000.000.000	5.760 Keluarga	1.000.000.000	5.760 Keluarga	1.000.000.000	0	0,00	
		Indeks Kualitas Kebijakan	**Kota Palu**	**80%**		**80%**		**80%**				
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Cakupan Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Kota Palu**	**100%**	**1.095.072.400**	**100%**	**1.498.157.100**	**100%**	**2.346.802.100**	**1.251.729.700**	**114,31**	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Palu	1.296 Dokumen	403.093.400	1.296 Dokumen	825.808.100	1.296 Dokumen	1.024.783.100	621.689.700	154,23	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 (10-6)*	*12 (11/6)*	*13*
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Palu	12 Kasus	626.324.000	12 Kasus	606.694.000	12 Kasus	1.267.064.000	640.740.000	102,30	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kota Palu	1.138 Dokumen	65.655.000	1.138 Dokumen	65.655.000	1.138 Dokumen	54.955.000	-10.700.000	-16,30	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Kota Palu**	**100%**	**2.422.388.750**	**100%**	**2.428.383.050**	**100%**	**3.619.660.650**	**1.197.271.900**	**49,43**	
		Persentase Bahan Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	**Kota Palu**	**75%**		**75%**		**75%**				
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Terlaksananya Kebijakan Pembinaan BUMD dan BLUD serta Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**	**Kota Palu**	**100%**	**264.920.050**	**100%**	**275.225.050**	**100%**	**262.725.050**	**-2.195.000**	**-0,83**	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Palu	17 Dokumen	155.907.100	17 Dokumen	146.212.100	17 Dokumen	150.862.100	-5.045.000	-3,24	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Palu	10 Laporan	109.012.950	10 Laporan	129.012.950	10 Laporan	111.862.950	2.850.000	2,61	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Kota Palu**	**100%**	**1.213.518.950**	**100%**	**1.234.242.250**	**100%**	**1.922.232.950**	**708.714.000**	**58,40**	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 (10-6)*	*12 (11/6)*	*13*
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota Palu	4 Dokumen	912.465.800	4 Dokumen	898.011.550	4 Dokumen	1.613.341.450	700.875.650	76,81	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Palu	12 Laporan	244.188.150	12 Laporan	244.326.100	12 Laporan	232.636.500	-11.551.650	-4,73	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Palu	4 Laporan	56.865.000	4 Laporan	91.904.600	4 Laporan	76.255.000	19.390.000	34,10	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Kota Palu**	**100%**	**705.569.850**	**100%**	**680.535.850**	**100%**	**1.140.147.650**	**434.577.800**	**61,59**	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palu	205 Dokumen	266.707.000	205 Dokumen	257.012.000	205 Dokumen	631.092.500	364.385.500	136,62	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Palu	208 Dokumen	328.968.000	208 Dokumen	313.629.000	208 Dokumen	400.160.300	71.192.300	21,64	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palu	84 Orang	109.894.850	84 Orang	109.894.850	84 Orang	108.894.850	-1.000.000	-0,91	
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Kota Palu**	**100%**	**238.379.900**	**100%**	**238.379.900**	**100%**	**294.555.000**	**56.175.100**	**23,57**	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,	Kota Palu	1 Dokumen	12.175.000	1 Dokumen	12.175.000	1 Dokumen	4.175.000	-8.000.000	-65,71	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11 (10-6)*	*12 (11/6)*	*13*
		Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, UMKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja										
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kota Palu	2 Dokumen	226.204.900	2 Dokumen	226.204.900	2 Dokumen	290.380.000	64.175.100,0	28,37	

BAB IV
PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional, menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD Perubahan Kota Palu Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu dan menjadi pedoman dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan yang disampaikan menggambarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dari 9 (sembilan) bagian di lingkup Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan sebagai tahapan dalam proses perencanaan dan

penganggaran pada tahun 2024 dan merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja demi menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu, yang mana keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kerjasama, kontribusi dan komitmen yang kuat dari seluruh personil.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, seluruh ASN di Lingkup Sekretariat Daerah secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dan hal ini tidak terlepas dari komponen pendukung antara lain :

1. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan kegiatan perangkat daerah;
2. Adanya kerjasama dari aparatur sipil negara di lingkup Sekretariat Daerah;
3. Tersedianya sumber daya manusia berkualitas yang memadai serta berwawasan ke depan;
4. Melaksanakan Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
5. Menjaga konsistensi antara RKPD Perubahan, Rencana Kerja Perubahan, Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan;
6. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan tidak menyimpang dari Rencana Kerja;
7. Untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja secara berkala baik triwulanan maupun semesteran.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan staf berdasarkan tugas dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya suatu Rencana Kerja bukan hanya pada perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat diimplementasikan, oleh karena itu diperlukan proses, waktu dan konsisten dalam pelaksanaannya.



PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA PALU NOMOR 16
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan Rencana Kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA Perubahan berpedoman pada renstra Sekretariat DPRD Kota Palu dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD yang keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Palu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Palu dan pada akhirnya Renja Sekretariat DPRD Kota Palu digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Palu. Adapun Proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Pejabat struktural dan Pejabat Fungsional dan staf dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Palu melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD Kota Palu merupakan bagian internal dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu. Dengan Demikian Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) Perubahan

Sekretariat DPRD sama dengan landasan pambangunan nasional maupun pembangunan daerah. Secara spesifikasi landasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 1114);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10)
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 161 Tahun 2024);
16. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025
18. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palu tahun 2024 adalah :

1. Menciptakan Sinkronisasi dan Konsistensi antara Perencanaan Tahunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palu dan RKPD;
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial perencanaan yang efektif dan akuntabel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan;
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan pengaanggaran tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Palu;
4. Menyediakan Informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD Kota Palu serta Indikator Kinerja Sekretariat yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Palu sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kota Palu, sehingga dapat terintegrasi antara perencanaan pembangunan tahunan Sekretariat DPRD dengan perencanaan tahunan Kota Palu.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Palu Triwulan II

Sekretariat DPRD Kota Palu pada Triwulan II tahun 2024 telah melaksanakan 2 (dua) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja. Terhadap masing-masing program tersebut telah dievaluasi dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi baik anggaran maupun capaian indikatornya, dengan hasil sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Dengan anggaran sebesar Rp.31.943.488.832,- realisasi anggaran sebesar Rp.12.786.976.173,- atau 40,03%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah, capaian kegiatan berdasarkan realisasi keuangan atas target adalah sebesar 100%

   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, capaian kegiatan berdasarkan realisasi keuangan atas target adalah sebesar 100%

   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, capaian kegiatan berdasarkan realisasi keuangan atas target adalah sebesar 100%

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Dengan anggaran sebesar Rp.14.487.838.550,- realisasi anggaran Rp.7.277.771.126,- atau sebesar 50,23%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1) Kegiatan Reses capaian kegiatan berdasarkan berdasarkan realisasi keuangan atas target adalah 70,91%

2) Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD dalam Daerah, capaian kegiatan berdasarkan realisasi keuangan atas target adalah 53,75%

3) Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD, capaian kegiatan berdasarkan realisasi keuangan atas target adalah 23,97%

Secara keseluruhan alokasi anggaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Palu sebesar Rp.46.431.327.382,- melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu pada DPA Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2024. Dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ini mencapai Rp.20.273.567.092,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 43,66%.

Untuk perolehan rata-rata nilai nilai kinerja dapat dilihat pada Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Palu sampai Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.1

TABEL 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU TRIWULAN II TAHUN 2024

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota Tahun 2024 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota sampai Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d Tahun 2024 (%)	
								I		II							
						K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)
1					2	3		4		5		6		7			
4	02	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**31.943.488.832**	**16,62%**	**5.308.697.450**	**40,03%**	**12.786.976.173**	**40,03%**	**12.786.976.173**	**40,03%**	**12.786.976.173**		
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**41.980.050**	**0,00%**	**-**	**29,40%**	**12.342.950**	**29,40%**	**12.342.950**	**29,40%**	**12.342.950**		
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	23.849.500	0,00%	-	29,95%	7.142.500	29,95%	7.142.500	29,95%	7.142.500		
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	5.837.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	7.062.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	5.230.450	0,00%	-	99,43%	5.200.450	99,43%	5.200.450	99,43%	5.200.450		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**4.973.879.445**	**13,33%**	**662.906.331**	**45,61%**	**2.268.453.195**	**45,61%**	**2.268.453.195**	**45,61%**	**2.268.453.195**		
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	4.970.504.445	13,34%	662.906.331	45,57%	2.265.078.195	45,57%	2.265.078.195	45,57%	2.265.078.195		
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	3.375.000	0,00%	-	100,00%	3.375.000	100,00%	3.375.000	100,00%	3.375.000		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**	**466.648.900**	**6,04%**	**28.199.805**	**8,14%**	**37.986.125**	**8,14%**	**37.986.125**	**8,14%**	**37.986.125**		
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	466.648.900	6,04%	28.199.805	8,14%	37.986.125	8,14%	37.986.125	8,14%	37.986.125		

					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	**2.995.894.000**	**7,68%**	**230.201.172**	**24,34%**	**729.217.627**	**24,34%**	**729.217.627**	**24,34%**	**729.217.627**		
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	15.222.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	405.478.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	11.100.300	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	985.727.400	8,27%	81.560.700	16,07%	158.370.700	16,07%	158.370.700	16,07%	158.370.700		
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	109.091.300	17,74%	19.356.500	36,07%	39.344.550	36,07%	39.344.550	36,07%	39.344.550		
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	870.935.000	0,65%	5.624.464	39,55%	344.444.464	39,55%	344.444.464	39,55%	344.444.464		
4	02	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	314.936.900	16,50%	51.949.600	25,18%	79.316.500	25,18%	79.316.500	25,18%	79.316.500		
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	283.402.000	25,30%	71.709.908	38,02%	107.741.413	38,02%	107.741.413	38,02%	107.741.413		
					Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**1.169.463.800**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**		
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	599.400.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	570.063.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**2.463.958.700**	**13,41%**	**330.322.275**	**37,22%**	**917.160.482**	**37,22%**	**917.160.482**	**37,22%**	**917.160.482**		
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	42.500.000	20,00%	8.500.000	30,59%	13.000.000	30,59%	13.000.000	30,59%	13.000.000		
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	536.320.000	23,24%	124.622.275	39,57%	212.245.517	39,57%	212.245.517	39,57%	212.245.517		
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1.885.138.700	10,46%	197.200.000	36,70%	691.914.965	36,70%	691.914.965	36,70%	691.914.965		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**624.759.300**	**5,60%**	**35.015.000**	**18,88%**	**117.939.200**	**18,88%**	**117.939.200**	**18,88%**	**117.939.200**		
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	296.379.000	11,81%	35.015.000	35,83%	106.204.200	35,83%	106.204.200	35,83%	106.204.200		
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	83.240.300	0,00%	-	1,66%	1.385.000	1,66%	1.385.000	1,66%	1.385.000		
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	109.300.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	135.840.000	0,00%	-	7,62%	10.350.000	7,62%	10.350.000	7,62%	10.350.000		
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**100%**	**19.206.904.637**	**20,94%**	**4.022.052.867**	**45,32%**	**8.703.876.594**	**45,32%**	**8.703.876.594**	**45,32%**	**8.703.876.594**		
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100%	18.187.493.937	22,11%	4.022.052.867	47,86%	8.703.876.594	47,86%	8.703.876.594	47,86%	8.703.876.594		
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100%	819.410.700	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100%	200.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		

4	02	02			**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100%**	**14.487.838.550**	**12,70%**	**1.840.499.461**	**50,23%**	**7.277.771.126**	**50,23%**	**7.277.771.126**	**50,23%**	**7.277.771.126**		
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**100%**	**567.266.100**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	0,00%	-	0,00%	-		
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100%	567.266.100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	**100%**	**117.270.100**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**		
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	100%	27.272.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%	18.360.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	100%	33.537.350	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	100%	24.840.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	100%	13.260.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**100%**	**29.700.000**	**0,00%**	**-**	**22,78%**	**6.765.000**	**22,78%**	**6.765.000**	**22,78%**	**6.765.000**		
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	100%	29.700.000	0,00%	-	22,78%	6.765.000	22,78%	6.765.000	22,78%	6.765.000		
					Peningkatan Kapasitas DPRD	**100%**	**928.240.000**	**7,00%**	**65.000.000**	**23,97%**	**222.500.000**	**23,97%**	**222.500.000**	**23,97%**	**222.500.000**		
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100%	487.500.000	7,38%	36.000.000	21,85%	106.500.000	21,85%	106.500.000	21,85%	106.500.000		
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	100%	348.000.000	8,33%	29.000.000	33,33%	116.000.000	33,33%	116.000.000	33,33%	116.000.000		
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	100%	92.740.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		

					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**100%**	**2.170.683.850**	**0,00%**	**-**	**60,63%**	**1.315.987.850**	**60,63%**	**1.315.987.850**	**60,63%**	**1.315.987.850**		
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	100%	314.896.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	100%	1.855.787.850	0,00%	-	70,91%	1.315.987.850	70,91%	1.315.987.850	70,91%	1.315.987.850		
					Fasilitasi Tugas DPRD	**100%**	**10.674.678.500**	**16,63%**	**1.775.499.461**	**53,70%**	**5.732.518.276**	**53,70%**	**5.732.518.276**	**53,70%**	**5.732.518.276**		
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	10.646.291.000	16,67%	1.774.599.461	53,75%	5.721.943.276	53,75%	5.721.943.276	53,75%	5.721.943.276		
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	100%	28.387.500	3,17%	900.000	37,25%	10.575.000	37,25%	10.575.000	37,25%	10.575.000		
Jumlah						**100%**	**46.431.327.382**	**15,40%**	**7.149.196.911**	**43,21%**	**20.064.747.299**	**43,21%**	**20.064.747.299**	**43,21%**	**20.064.747.299**	**43,21%**	

2.2 **Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD Kota Palu sebagai unsur pelayanan (Administrasi) terhadap DPRD Kota Palu. Sesuai dengan tugas dan fungsi Tugas Pokok Sekretariat SPRD Kota Palu yaitu:

1) Memberikan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
2) Memberikan Pelayanan Administrasi Keuangan DPRD
3) Memberikan Pelayanan rapat-rapat DPRD
4) Penyediaan dan pengkordinasian tenaga ahli yang di perlukan DPRD
5) Memberikan pelayanan protokoler, pengaduan masyarakat dan kehumasan serta perpustakaan.

Maka untuk mengetahui kinerja Sekretariat DPRD Kota Palu dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tahun 2021-2026 untuk optimalisasi fungsi pelayanan adalah Tabel 2.2 (TC.30)

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SET. DPRD KOTA PALU

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[11]	[12]	[14]
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100	25%	50%	75%	100%	33%	75%	
2	Pembahasan Kebijiakan Anggaran		18	6 Keg	12 Keg	18 Keg	24 Keg	33%	18 Keg	
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		282	94 DOK	188 DOK	282 DOK	376 DOK	33%	282 DOK	
4	Peningkatan Kapasitas DPRD		81	27 DOK	54 DOK	81 DOK	108 DOK	33%	81 DOK	
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		1028	220 Lap	440 Lap	660 Lap	880 Lap	33%	660 Lap	
6	Fasilitasi Tugas DPRD		1524	508	1016	1524	2032	33%	1524	
7	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
8	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
9	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kota Palu sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelayanan terhadap DPRD Kota Palu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) maupun pemerintahan yang bersih (clean government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state) dengan salah satu sasarannya adalah Optimalisasi peran fungsi dan fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu yang mempunyai fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Berdasarkan analisis, isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Palu adalah sebagai berikut:

- Relatif kurangnya cepatnya penemuan kembali surat-surat dinas yang diperlukan untuk bahan-bahan rapat DPRD Kota Palu
- Relatif lemahnya fungsi kehumasan dan pelayanan perpustakaan
- Relatif lambatnya penyelesaian risalah, notulen rapat dan laporan singkat hasil rapat alat kelengkapan DPRD Kota Palu
- Belum terjadwalnya agenda kegiatan DPRD Kota Palu per masa sidang dalam 1 (satu) tahun masa persidangan
- Relatif lemahnya percepatan penyelesaian administrasi keuangan, khususnya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan laporan hasil konsultasi kegiatan SDM DPRD Kota Palu, kegiatan reses, kunjungan kerja, kunjungan lapangan dan/atau studi banding.
- Belum tertibnya pelayanan administrasi dan inventarisasi batang/ dan atau asset daerah
- Lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kota Palu
- Dukungan Staf Ahli DPRD belum terlaksana secara efektif dan efisien

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Palu merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Palu dan berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kota Palu Tahun 2023,

review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU

Kode Rekening				Rancangan Awal RKPD			Rancangan Awal RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif 2024 (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
[1]				[2]		[3]	[4]	[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]		[11]	[12]
4	02	01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		Palu					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Palu					
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1.709.930	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	23.849.500	
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.414.319	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.837.500	
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.414.319	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	7.062.600	
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1.544.041	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	5.230.450	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	4.982.072.117	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	4.970.504.445	
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	2.572.551	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	3.375.000	
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	Orang	77.604.274	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	Orang	466.648.900	

4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15	Jenis	6.687.714	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15	Jenis	15.222.600	
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	40	Jenis	69.841.702	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	40	Jenis	405.478.500	
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Palu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	5	Jenis	4.737.782	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Palu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	5	Jenis	11.100.300	
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	81	Jenis	949.050.480	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	81	Jenis	985.727.400	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	19	Jenis	90.671.328	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	19	Jenis	109.091.300	
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	17	Media	736.137.567	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	17	Media	870.935.000	
4	02	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Palu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.020	Lembar	390.196.909	Fasilitas Kunjungan Tamu	Palu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.020	Lembar	314.936.900	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26	Kali	219.427.388	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26	Kali	283.402.000	
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	599.400.000	
4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaYang Disediakan	35	Unit	61.039.014	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaYang Disediakan	35	Unit	570.063.800	

4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.697	Lembar	31.449.234	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.697	Lembar	42.500.000	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12	Bulan	546.156.703	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12	Bulan	536.320.000	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1	Lingkungan	1.091.931.811	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1	Lingkungan	1.885.138.700	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25	Unit	436.174.525	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25	Unit	296.379.000	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	42.282.125	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	83.240.300	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	50	Item	39.813.292	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	50	Item	109.300.000	
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Gedung	20.521.200	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Gedung	135.840.000	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Palu	Jumlah Anggota DPRD Yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35	Org/Bulan	18.785.874.384	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Palu	Jumlah Anggota DPRD Yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35	Org/Bulan	18.187.493.937	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	35	Orang	246.144.149	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	35	Orang	819.410.700	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Palu	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check-Up DPRD	35	Orang	204.170.730	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Palu	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check-Up DPRD	35	Orang	200.000.000	

4	02	02		**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**		**Palu**					**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Palu**					
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1	Perda	561.251.224	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1	Perda	567.266.100	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	Dokumen	4.721.448	Pembahasan KUA dan PPAS	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	Dokumen	27.272.500	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Dokumen	4.593.841	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Dokumen	18.360.250	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dokumen	4.593.841	Pembahasan APBD	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dokumen	33.537.350	
	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Dokumen	4.593.841	Pembahasan APBD Perubahan	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Dokumen	24.840.000	
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	Dokumen	4.593.841	Pembahasan Laporan Semester	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	Dokumen	13.260.000	
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pengguna Anggaran	4	TW	25.576.212	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pengguna Anggaran	4	TW	29.700.000	
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Palu	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	9	Buku	92.836.431	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Palu	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	9	Buku	487.500.000	
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Palu	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12	Bulan	286.859.876	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Palu	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12	Bulan	348.000.000	

4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Palu	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12	Bulan	312.381.217	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Palu	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12	Bulan	92.740.000	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Palu	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	Kali	215.226.575	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Palu	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	Kali	314.896.000	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	CW	5.174.369.354	Pelaksanaan Reses	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	CW	1.855.787.850	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	40	Kali	9.743.598.918	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Palu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	40	Kali	10.861.113.850	
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Palu	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	Paket	33.968.908	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Palu	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	Paket	28.387.500	
Jumlah										**45.511.805.115**						**46.646.150.232**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Tidak terdapat Program dan Kegiatan yang dilaksanakan merupakan usulan dari masyarakat karena tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Palu tidak bersentuhan langsung ke masyarakat (NIHIL). Namun Sekretariat DPRD Kota Palu akan tetap mendukung Program dan Kegiatan dari Pemerintah Daerah terutama Visi dan Misi dari Walikota Palu.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PALU

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Palu

Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian rencana strategis, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Penyusunan Renja mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Sekretariat DPRD juga merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Palu

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu, Sekretariat DPRD Kota Palu wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja guna mewujudkan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2021-2026. Adapun rencana kerja dan pendanaan indikator kinerja program/kegiatan Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun 2024 adalah sebagaimana dilihat pada table berikut: Tabel 3.1

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024										Keterangan
			Lokasi	Renja 2024		APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Bertambah/ Berkurang			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rp	%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]
4 02 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**												
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	1 Dokumen	1.709.930	1 Dokumen	23.849.500	1 Dokumen	7.742.500	(16.107.000)	(67,54)		
4 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palu	1 Dokumen	2.414.319	1 Dokumen	5.837.500	1 Dokumen	5.837.500	-	-		
4 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palu	1 Dokumen	2.414.319	1 Dokumen	7.062.600	1 Dokumen	7.062.600	-	-		
4 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	1 Laporan	1.544.041	1 Laporan	5.230.450	1 Laporan	5.200.700	(29.750)	(0,57)		
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	14 Bulan	4.982.072.117	14 Bulan	4.970.504.445	14 Bulan	4.803.130.445	(167.374.000)	(3,37)		
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	1 Dokumen	2.572.551	1 Dokumen	3.375.000	1 Dokumen	3.375.000	-	-		

4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palu	7	Orang	77.604.274	7	Orang	466.648.900	7	Orang	497.927.900	31.279.000	6,70	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Palu	15	Jenis	6.687.714	15	Jenis	15.222.600	15	Jenis	12.222.600	(3.000.000)	(19,71)	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Palu	40	Jenis	69.841.702	40	Jenis	405.478.500	40	Jenis	113.027.500	(292.451.000)	(72,12)	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Palu	5	Jenis	4.737.782	5	Jenis	11.100.300	5	Jenis	8.741.400	(2.358.900)	(21,25)	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Palu	81	Jenis	949.050.480	81	Jenis	985.727.400	81	Jenis	824.793.750	(160.933.650)	(16,33)	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Palu	19	Jenis	90.671.328	19	Jenis	109.091.300	19	Jenis	112.289.500	3.198.200	2,93	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Palu	17	Media	736.137.567	17	Media	870.935.000	17	Media	894.535.000	23.600.000	2,71	
4	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Palu	5.020	Lembar	390.196.909	5.020	Lembar	314.936.900	5.020	Lembar	300.785.300	(14.151.600)	(4,49)	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	26	Kali	219.427.388	26	Kali	283.402.000	26	Kali	283.402.000	-	-	
4	01	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	-	Unit	-	1	Unit	599.400.000	3	Unit	-	(599.400.000)	(100,00)	
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaYang Disediakan	Palu	35	Unit	61.039.014	35	Unit	570.063.800	35	Unit	162.475.800	(407.588.000)	(71,50)	

4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu	4.697	Lembar	31.449.234	4.697	Lembar	42.500.000	4.697	Lembar	45.500.000	3.000.000	7,06	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Palu	12	Bulan	546.156.703	12	Bulan	536.320.000	12	Bulan	452.000.000	(84.320.000)	(15,72)	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Palu	1	Lingkungan	1.091.931.811	1	Lingkungan	1.885.138.700	1	Lingkungan	1.855.638.700	(29.500.000)	(1,56)	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palu	25	Unit	436.174.525	25	Unit	296.379.000	25	Unit	243.515.400	(52.863.600)	(17,84)	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palu	4	Unit	42.282.125	4	Unit	83.240.300	4	Unit	53.024.000	(30.216.300)	(36,30)	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Palu	50	Item	39.813.292	50	Item	109.300.000	50	Item	58.950.000	(50.350.000)	(46,07)	
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palu	1	Gedung	20.521.200	1	Gedung	135.840.000	1	Gedung	30.500.000	(105.340.000)	(77,55)	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD Yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Palu	35	Org/Bulan	18.785.874.384	35	Org/Bulan	18.187.493.937	35	Org/Bulan	17.819.993.937	(367.500.000)	(2,02)	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Palu	35	Orang	246.144.149	35	Orang	819.410.700	35	Orang	945.244.400	125.833.700	15,36	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check-Up DPRD	Palu	35	Orang	204.170.730	35	Orang	200.000.000	35	Orang	-	(200.000.000)	(100,00)	

4	02	02		**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**																	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Palu	1	Perda	561.251.224	1	Perda	567.266.100	1	Perda	217.266.100	(350.000.000)	(61,70)	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Palu	2	Dokumen	4.721.448	2	Dokumen	27.272.500	2	Dokumen	12.120.000	(15.152.500)	(55,56)	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palu	2	Dokumen	4.593.841	2	Dokumen	18.360.250	2	Dokumen	12.960.000	(5.400.250)	(29,41)	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Palu	1	Dokumen	4.593.841	1	Dokumen	33.537.350	1	Dokumen	20.745.000	(12.792.350)	(38,14)	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Palu	1	Dokumen	4.593.841	1	Dokumen	24.840.000	1	Dokumen	14.340.000	(10.500.000)	(42,27)	
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Palu	2	Dokumen	4.593.841	2	Dokumen	13.260.000	2	Dokumen	-	(13.260.000)	(100,00)	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pengguna Anggaran	Palu	4	TW	25.576.212	4	TW	29.700.000	4	TW	29.700.000	-	-	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Palu	12	Bulan	286.859.876	12	Bulan	487.500.000	12	Bulan	418.500.000	(69.000.000)	(14,15)	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	-	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Palu	12	Bulan	312.381.217	12	Bulan	348.000.000	12	Bulan	348.000.000	-	-	
4	02	02	2.04	08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	-	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Palu	9	Buku	92.836.431	9	Buku	92.740.000	9	Buku	92.740.000	-	-	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Palu	12	Kali	215.226.575	12	Kali	314.896.000	12	Kali	314.896.000	-	-	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Palu	3	CW	5.174.369.354	3	CW	1.855.787.850	3	CW	3.618.470.700	1.762.682.850	94,98	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Palu	40	Kali	9.743.598.918	40	Kali	10.646.291.000	40	Kali	11.971.109.000	1.324.818.000	12,44	
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	-	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Palu	1	Paket	33.968.908	1	Paket	28.387.500	1	Paket	28.387.500	-	-	
				TOTAL							**45.511.805.115**			**46.431.327.382**			**46.646.150.232**	**214.822.850**		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Palu Tahun Anggaran 2024 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Palu dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Kota Palu maupun APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan bisa menutupi seluruh kebutuhan program/kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palu dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang nantinya dialokasikan kepada Sekretariat DPRD Kota Palu. Alokasi anggaran indikatif pada tahun 2024 yang diperuntukan untuk membiayai seluruh kegiatan dan program kerja dikelompokan dalam belanja langsung rutin serta belanja urusan pemerintahan umum yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Palu.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan

Sekretariat DPRD Kota Palu untuk tahun 2024 dibuat dengan harapan dapat di Laksanakan sesuai target yang telah ditetapkan dalam rumusan kebijakan.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA PALU

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. serta digunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang yang terkait dengan urusan masing-masing perangkat daerah dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk menentukan arah yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024 maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu menyusun Renja Perubahan berdasarkan indikator program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2024. Dalam proses penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Palu Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang di rumuskan dalam rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Palu Tahun 2024 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2024, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dari Bappeda Kota Palu.

Rancangan akhir Renja Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Palu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu (Bappeda) bertanggungjawab atas Semua Program dan Kegiatan yang telah di Programkan ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun N, baik pelaksanaan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda sebagai fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan. Program dan kegiatan harus berdasarkan Visi dan Misi serta Tujuan , Sasaran dan Indikator Kinerja serta target yang telah di tetapkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tanggungjawab untuk melakukan tugas analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik dan integratif dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 didasari pada kebutuhan akan pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan Tujuan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Palu, melakukan Inovasi Inovasi terkait tatacara penyusunan perencanaan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Palu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran

Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2).

31. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026;
32. Peraturan Wali Kota No 28 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
33. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 15)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Palu Tahun 2024

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran Perubahan 2024 sesuai dengan Renstra Bappeda Kota Palu dan mengacu kepada RKPD Perubahan Kota Palu Tahun Anggaran 2024. Renja Perubahan Bappeda adalah acuan pengganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di lingkup bappeda kota palu.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Palu Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Memberikan acuan bagi Bappeda Kota Palu dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Bappeda Kota Palu;

3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Bappeda Kota Palu dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);
4. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Bappeda Kota Palu Tahun Anggaran 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, memuat penjelasan ringkas tentang Renja Pereangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan, tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, yang mengatur kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang di jadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pereangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistimatika Penulisan, memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah dan susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pereangkat Daerah, memuat analisis kinerja Bappeda Kota Palu

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, memuat isu isu yang berkaitan dengan perencanaan Bappeda Kota Palu dan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, memuat review terkait perencanaan dan penganggaran Bappeda Kota Palu

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, memuat tentang usulan program dan kegiatan yang terkait kemasyarakatan dan Bappeda Kota Palu

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA PALU

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA PALU SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Sampai Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda

Pada Tahun 2024 Bappeda Kota Palu melaksanakan 2 (Dua) program dan 8 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;**

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
- Sub Kegiatan:
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-P SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan:
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan:
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
    - Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan:
    - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub Kegiatan:
    - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
    - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
    - Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;**
- Kegiatan Penyusunan, Perencanaan dan Pendanaan
- Sub Kegiatan:
    - Analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah
    - Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya
    - Pelaksanaan konsultasi publik

    - Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/Lintas SKPD
    - Pelaksanaan musrenbang kabupaten kota
    - Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan
    - Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- Kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah,
- Sub Kegiatan:
    - Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
    - Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD
    - Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten kota
- Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah di kabupaten kota
- Sub Kegiatan:
    - Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten kota
    - Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
    - Monitoring, Evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024					Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
5.01.01	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**													
5.01.01.2.01	**Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Cakupan dokumen perencanaan OPD**	**100**	**%**	**11**	**Dok**	**6**	**Dok**	**5**	**Dok**	**83,33**	**4**	**Dok**	**4,00**
5.01.01.2.01.01	penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	15	Dok	6	Dok	3	Dok	2	Dok	**66,67**	8	Dok	**53,33**
5.01.01.2.01,02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Bappeda	5	Dok	2	Dok	1	Dok	1	Dok	**100,00**	3	Dok	**60,00**
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-P Bappeda	5	Dok	2	Dok	1	Dok	1	Dok	**100,00**	3	Dok	**60,00**
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	5	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	**100,00**	2	Dok	**40,00**
5.01.01.2.02	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Cakupan administrasi keuangan OPD**	**100**	**%**		**%**		**%**		**%**			**%**	**75,00**

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024					Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
5.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	60	Orang / Bulan	23	Orang / Bulan	12	Orang / Bulan	6	Orang / Bulan	50	29	Orang / Bulan	**50,00**
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dan aset	10	Laporan	4	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	50	5	Laporan	50,00
5.01.01.2.06	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**		**%**		**%**		**%**	0		**%**	**348,63**
5.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pengadaan alat listrik dan penerangan kantor	5	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100	3	Paket	**60,00**
5.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20	Paket	8	Paket	4	Paket	2	Paket	50	10	Paket	**50,00**
5.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor dan materai	300	Paket	120	Paket	60	Paket	60	Paket	100	180	Paket	**60,00**
5.01.01.2.06.05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	25	Paket	10	Paket	5	Paket	5	Paket	100	15	Paket	**60,00**

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024					Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
5.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan jasa media	20	Dokumen	8	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	12	Dokumen	**60,00**
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah pelaksanaan penyediaan makan dan minum	75	Laporan	30	Laporan	15	Laporan	8	Laporan	53,3	38	Laporan	**50,67**
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat konsultasi/koordinasi ke luar daerah	235	Laporan	94	Laporan	47	Laporan	37	Laporan	78,7	131	Laporan	**55,74**
5.01.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang OPD**	**100**	**%**		**%**		**%**		**%**			**%**	**77,50**
5.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan Listrik	Jumlah pelaksanaan pemenuhan kebutuhan komunikasi dan informasi	60	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	7	Bulan	50	31	Bulan	**51,67**
5.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga pendukung	60	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	7	Bulan	50	31	Bulan	**51,67**
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah**	**100**	**%**		**%**		**%**		**%**			**%**	**121,96**

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024					Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
5.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	85	Unit	34	Unit	17	Unit	10	Unit	50	44	Unit	**51,76**
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	75	Unit	30	Unit	15	Unit	10	Unit	50	40	Unit	**53,33**
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan laiinnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	87	Unit	34	Unit	17	Unit	10	Unit	50	44	Unit	**50,57**
5.01.02	**Program perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**		**100**	**%**		**%**		**%**		**%**	0		**%**	**100%**
5.01.02.2.01	**Penyusunan perencanaan dan pendanaan**	**Cakupan dokumen perencanaan Pembangunan daerah**	**100**	**%**		**%**		**%**		**%**	0		**%**	**51,90**
5.01.02.2.01.01	Analisis kondisi daerah,permasalahan,dan isu strategis pembangunan daerah	Jumlah pelaksanaan pendampingan perencanaan pembangunan	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	50	2	Dokumen	**40,00**
5.01.02.2.01.02	Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembanguan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah	10	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	50	4	Dokumen	**40,00**

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024					Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
5.01.02.2.01.03	Pelaksana konsultasi publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik/Tahapan penyusunan RPJMD	5	Berita Acara	2	Berita Acara	1	Berita Acara	1	Berita Acara	50	3	Berita Acara	**60,00**
5.01.02.2.01.04	Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD	10	Berita Acara	4	Berita Acara	2	Berita Acara	2	Berita Acara	50	6	Berita Acara	**60,00**
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota	10	Berita Acara	4	Berita Acara	2	Berita Acara	1	Berita Acara	33,3	5	Berita Acara	**50,00**
5.01.02.2.01.06	Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan	5	Dok Usulan	2	Dok Usulan	1	Dok Usulan	1	Dok Usulan	100	3	Dok Usulan	**60,00**
5.01.02.2.01.07	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten /kota	Jumlah Dokumen RPJMD, RKPD dan RKPD-Perubahan	15	Dokumen	6	Dokumen	3	Dokumen	2	Dokumen	33,3	8	Dokumen	**53,33**
5.01.02.2.02	**Analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah**	**Cakupan data dan informasi yang di gunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan**	**100**	**%**		**%**		**%**		**%**	0		**%**	**32,50**

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024					Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
5.01.02.2.02.01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah aplikasi Penyadian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	2	Dokumen	**40,00**
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	Jumlah dokumen laporan penyusunan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)	100	Orang	40	Orang	20	Orang	0	Orang	46,2	40	Orang	**40,00**
5.01.02.2.02.03	penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen SIPD/Jumlah Dokumen Kinerja Ekonomi Kecamatan	10	Dok	4	Dok	2	Dok	1	Dok	0	5	Dok	**50,00**
5.01.02.2.03	**Pengendalian,evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan daerah**	**Cakupan dokumen evaluasi dan pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah**	**100**	**%**		**%**		**%**		**%**	0		**%**	**66,67**

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024					Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9=(5+7)		10=(9/4)
5.01.02.2.03.01	Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten kota	Jumlah dokumen evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran /Jumlah dokumen evaluasi Renja OPD	20	Dok	8	Dok	4	Dok	2	Dok	50	10	Dok	**50,00**
5.01.02.2.03.03	Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring pelaksanaan pembangunan daerah/Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan DAK	10	Kerjasama	8	Kerjasama	2	Kerjasama	2	Kerjasama	46,2	10	Kerjasama	**100,00**
5.01.02.2.03.01	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah pelaksanaan Kerjasama pembangunan daerah	20	Dok	8	Dok	4	Dok	2	Dok		10	Dok	**50,00**

Perubahan Rencana kerja (P-Renja) tahun anggaran 2024 berdasarkan pencapaian dan pelaksanaan program kegiatan yang tersaji pada Tabel 2.1, menjelaskan secara garis besar bahwa pelaksanaan program kegiatan berjalan sesuai dengan target, dalam pelaksanaan terdapat beberapa kegiatan, sub kegiatan telah mencapai 100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kota Palu telah menghasilkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah serta telah menyelesaikan berbagai penugasan lainnya dalam rangka koordinasi dan kerjasama pembangunan, baik secara regional maupun nasional. Penugasan lainnya tersebut dihasilkan melalui suatu proses koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis/pengkajian kebijakan, baik ditingkat propinsi maupun daerah khususnya Kota Palu.

Selanjutnya Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan mengarahkan kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Bappeda terus berupaya meningkatkan perannya sebagai pengambil kebijakan/keputusan, thinktank, koordinator, dan administrator, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan daerah melalui kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang bersifat mendukung kegiatan perencanaan pembangunan. Sebagai institusi perencana selama kurun waktu satu tahun terakhir produk-produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1) Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Palu 2021-2026;
2) Dokumen RKPD tahunan;
3) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

4) Buku SIPD Kota Palu;
5) Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
6) Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) Kota Palu;
7) Dokumen Renja 2024
8) Dokumen Laporan Keuangan dan Aset samapi Semester 1 Tahun 2023
9) Dokumen Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip) Tahun 2022
10) Dokumen Laporan Penyusunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD);

Pada Tahun Anggaran 2023 Bappeda Kota Palu memberikan kontribusi terhadap pencapaian target indikator kinerja pada tujuan keempat pada misi keempat yaitu melakukan penataan dan rasionalisasi program, kegiatan, dan anggaran. Kontribusi Pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) sebesar 91,3 %. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :

1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah di tetapkan dengan PERDA;
2) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan RPJMD yang telah di tetapkan dengan PERDA / PERKADA;
3) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan RKPD tahun N+1 dan RKPD Perubahan Tahun N yang telah di tetapkan dengan PERDA;
4) Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD;
5) Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD;
6) Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2. di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA				ADA	ADA	ADA			ADA	ADA	
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA				ADA	ADA	ADA			ADA	ADA	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada				ADA	ADA	ADA			ADA	ADA	
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada				ADA	ADA	ADA			ADA	ADA	
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD				Konsisten	Konsisten	Konsisten			Konsisten	Konsisten	
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD				Konsisten	Konsisten	Konsisten			Konsisten	Konsisten	
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW				Sesuai	Sesuai	Sesuai			Sesuai	Sesuai	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Palu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda Kota Palu mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan daerah;
2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan daerah;
3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan daerah;
4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan urusan pemerintahan daerah.

Di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi berbagai permasalahan sebagai berikut :

1) Belum tersedianya pejabat fungsional perencana dan pengolah data dan informasi
2) Pemahaman aparatur tentang perencanaan pembangunan daerah belum merata.
3) Terjadinya perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
4) Masih terdapat inkonsisten pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan
5) Hasil evaluasi dan pengendalian belum secara maksimal di gunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

6) Pengelolaan data ditangani masing-masing OPD dan belum terintegrasi berbasis teknologi informasi, dan terstandarisasi.
7) Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi dalam mendukung tugas sebagai unsur penunjang perencanaan daerah.

Selain permasalahan di atas, Bappeda menghadapi tuntutan yang semakin kuat dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) akan produk perencanaan pembangunan yang berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang *SMART*, S berarti *Spesific* (memiliki tujuan tertentu), M berarti *Measurable* (dapat diukur), A berarti *Chiveable*, (dapat dicapai), R berarti *Reasonable* (memiliki alasan), dan T berarti *Timelines* (ada jangka waktu kapan akan dicapai). Untuk mewujudkan hal tersebut, Bappeda pun didorong agar dapat mengoptimalkan berbagai pendekatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Palu, yaitu pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, *top down* dan *bottom up*. Namun dengan dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana yang semakin baik serta peraturan perundang-undangan yang semakin lengkap maka tantangan tersebut secara bertahap dan berkesinambungan diupayakan dapat terpenuhi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadai kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada

sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari tingkat Pusat, Provinsi maupun daerah, RKPD Perubahan tahun 2024 ditetapkan lebih mengarah kepada peningkatan bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan dan perindustrian, perhubungan dan lingkungan hidup.

Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan RKPD, maka penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan jelas dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi maupun pelaksanaan perencaan.

Berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Bappeda sebagai badan yang bertugas sebagai perencana berada pada tujuan keempat pada misi keempat yaitu melakukan penataan dan rasionalisasi program, kegiatan, dan anggaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD-P Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu**	**100%**	**7.318.595.957**	**Progrm Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**	**Kota Palu**	**Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu**	**100%**	**7.312.629.253**
1	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan Dokumen Perencanaan OPD**	**100%**	**50.037.100**	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Kota Palu	**Cakupan Dokumen Perencanaan OPD**	**100%**	**54.918.900**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.087.450	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.427.450
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	7.927.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	4.821.250
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	7.147.150	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.444.900
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	16.875.300	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	23.225.300
2	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	Kota Palu	**Cakupan Administrasi keuangan OPD**	**100%**	**4.810.002.813**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	Kota Palu	**Cakupan Administrasi keuangan OPD**	**100%**	**4.944.431.409**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	4.734.198.163	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	4.870.299.209
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	75.804.650	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	74.132.150
3	**Administrasi umum perangkat daerah**	Kota Palu	**Cakupan administrasi Umum OPD**	**100%**	**706.066.750**	**Administrasi umum perangkat daerah**	Kota Palu	**Cakupan administrasi Umum OPD**	**100%**	**702.101.650**

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.716.700	Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.716.700
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	137.492.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	180.187.700
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	74.640.100	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	74.640.100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14.108.550	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14.216.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Media	15.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Media	15.200.000
	Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	39.940.800	Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	39.940.800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	421.968.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	604.800.400
4	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kota Palu	**Cakupan jasa penunjang urusan OPD**	**100%**	**955.876.750**	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kota Palu	**Cakupan jasa penunjang urusan OPD**	**100%**	**828.646.750**
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.320.000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	940.556.750	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	823.646.750
5	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kota Palu	**Cakupan Pemeliharaaan sarana dan prasarana penunjang OPD**	**100%**	**796.612.544**	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kota Palu	**Cakupan Pemeliharaaan sarana dan prasarana penunjang OPD**	**100%**	**782.530.544**
	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	562.482.000	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	876.300.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit	37.920.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit	30.420.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 unit	196.210.544	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 unit	196.210.544

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**100%**	**3.995.809.750**	**Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**100%**	**3.313.123.650**
1	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Kota Palu	**Cakupan dokumen perencanaan Pembangunan daerah**	**100%**	**1.649.507.450**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Kota Palu	**Cakupan dokumen perencanaan Pembangunan daerah**	**1**	**1.426.821.450**
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJPD maka rancangan teknokratik)	1 Dokumen	500.384.900	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJPD maka rancangan teknokratik)	1 Dokumen	458.604.900
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Telaahan	47.840.100	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Telaahan	37.905.100
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Palu	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	183.996.800	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Palu	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	126.546.800
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Palu	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	65.535.100	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Palu	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	65.235.100
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Berita Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	384.041.950	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Berita Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	356.951.950
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Palu	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Dokumen Usulan	50.504.350	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Palu	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Dokumen Usulan	50.504.350
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	417.204.250	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	331.073.250
2	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Kota Palu	**Cakupan data dan informasi yang di gunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan**	**100%**	**1.244.588.750**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Kota Palu	**Cakupan data dan informasi yang di gunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan**	**100%**	**1.014.588.750**
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	100%	294.922.500	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	262.128.050
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kota Palu	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	41 Orang	770.625.150	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kota Palu	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	41 Orang	614.219.600

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang	1 Dok	179.041.100	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang	1 Dok	138.241.100
3	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan dokumen evaluasi dan pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah**	**100%**	**1.101.713.550**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan dokumen evaluasi dan pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah**	**100%**	**871.713.450**
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di kabupaten kota	4 Laporan	417.279.150	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di kabupaten kota	4 Laporan	346.367.250
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Palu	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	2 Laporan Kerjasama	115.231.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Palu	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	2 Laporan Kerjasama	102.631.000
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	569.203.400	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	422.715.200
	TOTAL				**11.314.405.707**					**11.175.752.903**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi - asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kota Palu yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Bappeda Kota Palu maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kota Palu dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan sampai musrenbang tingkat Kota Palu usulan program/kegiatan dari *bottom up* yang di tujukan ke Bappeda belum ada. Sehingga dalam penelaahan usulan program/kegiatan yang harus dimuat Renja Perubahan 2024 adalah usulan Perangkat Daerah sendiri sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah mengikuti visi misi Wali Kota Palu periode 2021-2026

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bappeda Kota Palu dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kota Palu Tahun 2021-2026 dan RKPD-P Kota Palu Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Palu periode 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsi. Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kota Palu Tahun 2024 yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Tahun 2024
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=9/6	11
5.01.01	**Progrm Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Palu**	**100**	**7.318.595.957**	**100**	**7.312.629.253**	**-5.966.704**	**-0,08 %**	**APBD**
5.01.01.2.01	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Cakupan Dokumen Perencanaan OPD**	**Kota Palu**	**100**	**50.037.100**	**100**	**54.918.900**	**4.881.800**	**9,76 %**	**APBD**
5.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 Dokumen	18.087.450	3 Dok	20.427.450	2.340.000	12,94 %	APBD
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan dokumen RKA SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7.927.200	1 dok	4.821.250	-3.105.950	-39,18 %	APBD
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7.147.150	1 dok	6.444.900	-702.250	-9,83%	APBD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=9/6	11
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 dokumen	16.875.300	1 Dok	23.225.300	6.350.000	37,63 %	APBD
5.01.01.2.02	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Cakupan Administrasi keuangan OPD**	**Kota Palu**	**100**	**4.810.002.813**	**100**	**4.944.431.409**	**134.428.596**	**2,79 %**	**APBD**
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	33 Orang	4.734.198.163	12 Bulan	4.870.299.259	136.101.096	2,87%	APBD
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	16 Laporan	75.804.650	1 Dok	74.132.150	-1.672.500	-2,21%	APBD
5.01.01.2.06	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Cakupan administrasi Umum OPD**	**Kota Palu**	**100**	**706.066.750**	**100**	**702.101.650**	**-3.965.100**	**-0,56 %**	**APBD**
5.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	2.716.700	1 Tahun	2.716.700	-	0,00%	APBD
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	2 Paket	137.492.200	4 Unit	180.187.700	-1.865.100	-1,36%	APBD
5.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	74.640.100	1 Tahun	74.640.100	-	0,00%	APBD
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	4 Paket	14.108.550	1 Tahun	14.108.550	-	0,00%	APBD
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	4 Media	15.200.000	12 Bulan	15.200.000	-	0,00%	APBD
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	15 Laporan	39.940.800	12 Kali	39.940.800	-	0,00%	APBD
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	47 Laporan	421.968.400	47 Kali	419.868.400	-2.100.000	-0,50%	APBD
5.01.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Cakupan jasa penunjang urusan OPD**	**Kota Palu**	**100**	**955.876.750**	**100**	**828.646.750**	**-127.230.000**	**-13,31 %**	**APBD**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=9/6	11
5.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	15.320.000	12 Laporan	5.000.000	-10.320.000	-67,36%	APBD
5.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	20 Laporan	940.556.750	20 Laporan	823.646.750	-116.910.000	-12,43%	APBD
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Cakupan Pemeliharaaan sarana dan prasarana penunjang OPD**	**Kota Palu**	**100**	**796.612.544**	**100**	**782.530.544**	**-14.082.000**	**-1,77%**	**APBD**
5.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	17 unit	562.482.000	12 Bulan	876.300.000	-6.582.000	-1,17%	APBD
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	17 unit	37.920.000	1 Tahun	30.420.000	-7.500.000	-19,78%	APBD
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	17 unit	196.210.544	1 Tahun	196.210.544	-	0,00%	APBD
5.01.02	**Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah**	**Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**Kota Palu**	**100**	**3.995.809.750**	**100**	**3.313.123.650**	**-682.686.100**	**-17,09%**	**APBD**
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Cakupan dokumen perencanaan Pembangunan daerah**	**Kota Palu**	**100**	**1.649.507.450**	**100**	**1.426.821.450**	**-222.686.000**	**-13,50%**	**APBD**
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJPD maka rancangan teknokratik)	Kota Palu	1 Dokumen	500.384.900	12 Kali	458.604.900	-41.780.000	-8,35%	APBD
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kota Palu	2 Telaahan	47.840.100	4 Kali	37.905.100	-9.935.000	-20,77%	APBD
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kota Palu	1 Berita Acara	183.996.800	1 Kali	126.546.800	-57.450.000	-31,22%	APBD
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Palu	2 Berita Acara	65.535.100	2 Kali	65.235.100	-300.000	-0,46%	APBD
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Palu	3 Berita Acara	384.041.950	3 Kali	356.951.950	-27.090.000	-7,05%	APBD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10=9/6	11
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kota Palu	1 Dokumen Usulan	50.504.350	1 Dok	50.504.350	-	0,00%	APBD
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Palu	3 Dokumen	417.204.250	3 Dok	331.073.250	-86.131.000	-20,64 %	APBD
5.01.02.2.02.	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Cakupan data dan informasi yang di gunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan**	**Kota Palu**	**100**	**1.244.588.750**	**100**	**1.014.588.750**	**-230.000.000**	**-18,48 %**	**APBD**
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Palu	100%	294.922.500	1 Aplikasi	262.128.050	-32.794.450	-11,12 %	APBD
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Palu	41 Orang	770.625.150	1 Dok	614.219.600	-156.405.550	-20,30 %	APBD
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	#REF!	Kota Palu	1 Dok	179.041.100	1 Dok	138.241.100	-40.800.000	-22,79 %	APBD
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**Cakupan dokumen evaluasi dan pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah**	**Kota Palu**	**100**	**1.101.713.550**	**100**	**871.713.450**	**-230.000.100**	**-20,88 %**	**APBD**
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di kabupaten kota	Kota Palu	4 Laporan	417.279.150	13 Dok	346.367.250	-70.911.900	-16,99 %	APBD
5.01.02.2.03.01	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kota Palu	2 Laporan Kerja sama	115.231.000	4 Kali	102.631.000	-12.600.000	-10,93 %	APBD
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Palu	4 Laporan	569.203.400	11 Dok	422.715.200	-146.488.200	-25,74 %	APBD
					11.314.405.707		**11.175..752.903**	**-138.652,804**	**-1.23 %**	

BAB IV
PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Palu Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran - sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Perubahan Bappeda Kota Palu Tahun 2024 harus menerapkan prinsip - prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda Kota Palu, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing - masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan Penyusunan

Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kota Palu Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kota Palu Tahun 2024 harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
b. Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kota Palu Tahun 2024 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Palu harus memperhatikan / mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKPD, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota Palu, Rancangan RPJMD Kota Palu 2021-2026, Rancangan RKPD Kota Palu Tahun 2023, serta Visi misi Kepala Daerah periode 2021-2026.

Adapun hal hal lain yang perlu untuk di perhatikan dalam penyusunan Renja dalam keterkaitannya;

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih itensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar

proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan disusun sebagai penjabaran Rencana Stategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu Tahun 2021–2026, yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJKMD) Kota Palu Tahun Anggaran 2021–2026. RENSTRA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kota Palu (RKPD) Kota Palu tahun 2024. Hal ini untuk mendapatkan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Munculnya paradigma baru dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilatar belakangi oleh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas, sedangkan dalam penentuan program dan kegiatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu sebagai dasar Peraturan Perundang-undangan meliputi:

a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 140);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 517);

g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatural Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

k. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

l. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010–2030

(Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);

m. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Kota Palu tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
n. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
o. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
p. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 13);
q. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan teknis dan pedomaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 bagi masing-masing bidang dan sekretariat dalam rangka mengemban Visi dan Misi Wali Kota Palu, sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu Tahun 2021–2026 dan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kota Palu untuk menyusun Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya

dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKAP-OPD) Kota Palu.

a. RENJA-P adalah merupakan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih diarahkan untuk penanggulangan permasalahan yang sedang dan akan timbul di tengah-tengah masyarakat yang dinamis dengan tuntutan reformasi yang terus bergulir.
b. RENJA-P adalah merupakan perencanaan dan pendekatan pembangunan yang bersifat sentralisasi serta memberikan kebebasan lebih besar kepada daerah untuk menentukan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mengatasi masalah daerahnya sesuai dengan tuntutan Otonomi Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan kegiatan tahunan secara efisien, akuntabel, transpan, mempertajam prioritas program kegiatan dan kesinambungan program kegiatan dari tahun ke tahun serta menjadi instrumen dalam penyusunan kegiatan tahunan dengan bermuara pada:

a) Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2024;
b) Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2024; dan
c) Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen RENJA-P Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Triwulan II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD Kota Palu Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Palu
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III: Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan BPKAD Kota Palu

Bab IV : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD Kota Palu Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pada Anggaran Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu melaksanakan 3 Program dan 11 kegiatan dan 58 Sub Kegiatan. Keseluruhan Program bertujuan untuk mencapai sasaran yaitu:

1. Terciptanya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
2. Pemerintahan bersih, berwibawa, konstitusional, efisien dan efektif;
3. Tersusunnya hasil evaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu; dan
4. Meningkatkan proporsi belanja langsung yang menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu dan Berbagai belanja daerah dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Belanja ini di Anggarkan Sebesar Rp.11.713.106.346,- dan sampai triwulan II Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 5.606.721.036,-(47.87%).
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
   Belanja ini di Anggarkan Sebesar Rp.7.509.837.200,- dan sampai triwulan II Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.1.890.267.120,-(25.17%).
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
   Belanja ini di Anggarkan Sebesar Rp.1.615.535.150,- dan sampai triwulan II Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.536.828.390,-(33.23%).

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP BPKAD Kota Palu**	**A**	**CC**	**BB**	**A**	**35%**	**BB**	**83%**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**34%**	**8 Dokumen**	**40%**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	36%	2 Dokumen	40%
5	01	.01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0%	2 Dokumen	40%
5	01	.01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0%	2 Dokumen	40%
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	40%
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**57%**	**95%**	**40%**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	290 Orang	58 Orang	58 Orang	58 Orang	52%	116 Orang	40%
5	01	.01	2.02	05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	93%	2 Laporan	40%
5	01	.01	2.02	07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	27%	4 Laporan	40%
5	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**
5	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis	Jumlah ASN Yang Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis	160 Orang	82 Orang	5 Orang	4 Orang	0%	86 Orang	40%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**100%**	**100%**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	81%	2 Paket	40%
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45%	2 Paket	40%
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	58%	2 Paket	40%
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	39%	2 Paket	40%
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan/Peraturan Perundang- Undangan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35%	2 Dokumen	40%
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan Dan Minuman Tamu	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	58%	2 Laporan	40%
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/ Konsultasi	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	51%	2 Laporan	40%
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	31%	2 Dokumen	40%
5	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**45%**	**100%**	**100%**
5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air/Listrik	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	42%	0 Laporan	40%
5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	47%	0 Laporan	40%
5	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**23%**	**100%**	**100%**
5	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	120 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	34%	48 Unit	40%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
5	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara	20 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	0%	8 Unit	40%
5	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Yang Dipelihara	965 Unit	193 Unit	193 Unit	193 Unit	22%	386 unit	40%
5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0%	3 Unit	40%
5	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	15%	0 Unit	40%
5	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	165 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	64%	66 Unit	40%
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**28%**	**WTP**	**WTP**
5	**02**	**02**	**1.01**		**Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Cakupan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**17%**	**100%**	**100%**
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0%	4 Dokumen	40%
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0%	4 Dokumen	40%
5	02	02	1.01	03	Koordinasi ,Penyusunan Dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun/diverifikasi	205 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	0%	82 Dokumen	40%
5	02	02	1.01	04	Koordinasi ,Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun/diverif ikasi	205 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	0%	82 Dokumen	40%
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah dokumen DPASKPD yang disusun/diverifikasi	205 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	52%	82 Dokumen	40%
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	17%	4 Dokumen	40%
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20%	4 Dokumen	40%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi/ Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	24%	6 Dokumen	40%
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Pendapatan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pendapatan	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14%	2 Dokumen	40%
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	45%	4 Orang	40%
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Cakupan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**39%**	**100%**	**100%**
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25%	2 Dokumen	40%
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah pelaksanaan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	47%	4 Dokumen	40%
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	48%	2 Dokumen	40%
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/P emotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	39%	3 Laporan	40%
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan Penerimaan/Pe ngeluaran Kas/Pemungut an/Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	80 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	36%	32 Laporan	40%
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Orang	1 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	1 Orang	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**54%**	**100%**	**100%**
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	17%	4 Laporan	40%
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	62%	8 Dokumen	40%
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	30 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	37%	12 Laporan	40%
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	95%	6 Laporan	40%
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	67%	4 Dokumen	40%
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	44%	3 Dokumen	40%
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan/Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	0%
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase pemenuhan kebutuhan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0%	2 Laporan	40%
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**35%**	**100%**	**100%**
5	**02**	**03**	**1,01**		**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**35%**	**100%**	**100%**
5	**02**	**03**	**1,01**	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga yang disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	54%	4 Dokumen	40%
5	02	03	1,01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0%	2 Dokumen	40%
5	02	03	1,01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	19%	6 Dokumen	40%
5	02	03	1,01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	39%	2 Dokumen	40%
5	02	03	1,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	52%	2 Laporan	40%
5	02	03	1,01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33%	2 Laporan	40%
5	02	03	1,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	190 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	8%	76 Laporan	40%
5	02	03	1,01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25%	2 Laporan	40%
5	02	03	1,01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	82%	2 Laporan	40%
5	02	03	1,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	40%	4 Laporan	40%
5	02	03	1,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	59%	2 Laporan	40%
5	02	03	1,01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	15 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	9%	6 Orang	40%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Palu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Bidang Keuangan sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berperan penting dalam (1) Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus sesuai standar akuntansi pemerintahan (akrual), (2) informasi yang ada dalam nota laporan keuangan harus cukup memadai sehingga pembaca laporan dapat memahami isinya.

Pemerintah Kota Palu telah Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023, Opini tersebut menunjukkan Kinerja Keuangan Daerah Kota Palu, yang semakin baik.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Adapun Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Sekretaris;
    1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
c. Bidang Anggaran;
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
    2. Sub Bidang Belanja Langsung;
    3. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;

d. Bidang Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi;
    1. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan;
    2. Sub Bidang Penatausahaan Belanja;
    3. Sub Bidang Akuntansi;
e. Bidang Aset Daerah;
    1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Penggunaan Barang Milik Daerah;
    2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
    3. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU/ IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase SILPA Terhadap APBD		IKK	3,20%	3%	2,75%	2,50%	10,25	3%	2,75%	2,50%	
2	Persentase belanja pendidikan 20%		IKK	22,58%	23,04%	24,02%	24,50%	23,37	13,02%	24,02%	24,50%	
3	Persentase belanja Kesehatan 10%		IKK	26,3%	27,05%	27,37%	27,65%	21,07	8,42%	27,37%	27,65%	
4	Dana Bagi Hasil Kab/Kota		IKK	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	83,40	0,05%	0,05%	0,05%	
5	Penetapan APBD		IKK	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
6	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kepegawaian		IKK	19,69%	20,18%	20,68%	21,20%	20,49%	20,18%	20,68%	21,20%	
7	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		IKK	19,99%	20,0%	20,01%	20,02%	43,15%	20,0%	20,01%	20,02%	
8	Opini Laporan Keuangan		IKU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
9	Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		IKK	19,99%	20,00%	20,01%	20,02%	5,01%	20,00%	20,01%	20,02%	
10	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		IKK	19,99%	20,00%	20,01%	20,02%	10,19%	20,00%	20,01%	20,02%	
11	Manajemen Aset											
	a. Apakah ada daftar asset tetap?		IKK	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
	b. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap		IKK	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
	c. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan		IKK	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
	d. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?		IKK	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. ldentifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. lsu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. lsu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, `berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala

Daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain). Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi BPKAD Kota Palu pada Tahun 2021-2026 tidak terlepas dengan permasalahan dan isu –isu strategis pembangunan di Kota Palu.

Adapun isu strategis Kota Palu adalah

1. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Membangun Ekonomi Kerakyatan;
3. Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
4. Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman; dan
5. Pembangunan Infrastruktur.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang keuangan, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang berubah secara cepat dan tidak dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia yang ada;
2. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada proses penyusunan laporan keuangan;

3. Integrasi pengelolaan keuangan daerah melalui Implementasi Sistem Pemerintah Daerah (SIPD);
4. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKPD); dan
5. Optimalisasi penggunaan tanda tangan elektronik pada setiap dokumen keuangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Palu**	**Nilai SAKIP BPKAD Kota Palu**	**BB**	**11,865,020,652**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Kota Palu**	**Nilai SAKIP BPKAD Kota Palu**	**BB**	**11,865,020,652**	
2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**171,548,350**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**171,548,350**	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	66,482,650	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	66,482,650	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	38,446,900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	38,446,900	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	35,180,900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	35,180,900	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	31,437,900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	31,437,900	
2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Realisasi Keuangan**	**95%**	**7,514,710,514**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Realisasi Keuangan**	**95%**	**7,514,710,514**	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58 org/bln	7,431,103,564	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58 org/bln	7,431,103,564	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	31,168,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	31,168,400	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	1 Laporan	52,438,550	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	1 Laporan	52,438,550	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4 Orang**	36,372,000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4 Orang**	36,372,000	
11	Bimbingan teknis	Kota Palu	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis	4 Orang	36,372,000	Bimbingan teknis	Kota Palu	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis	4 Orang	36,372,000	
2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1,602,494,100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1,602,494,100**	
01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palu	Jumlah pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	3,715,400	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Palu	Jumlah pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	3,715,400	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Paket	190,962,800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Paket	190,962,800	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah pengadaan bahan logistik kantor	1 Paket	302,413,150	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah pengadaan bahan logistik kantor	1 Paket	302,413,150	
05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	25,797,950	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	25,797,950	
06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kota Palu	Jumlah penyediaan bahan bacaan/peraturan perundang- undangan	1 Dokumen	29,895,800	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kota Palu	Jumlah penyediaan bahan bacaan/peraturan perundang- undangan	1 Dokumen	29,895,800	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah penyediaan makan dan minum tamu	1 Laporan	203,175,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	1 Laporan	203,175,000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi/ Konsultasi	1 Laporan	583,737,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi/ Konsultasi	1 Laporan	583,737,000	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palu	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	262,797,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palu	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	262,797,000	
2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**-**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**-**	**-**	
01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	
2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1,889,372,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1,889,372,000**	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah penyediaan jasa komunikasi/sumber daya air/listrik	0 Laporan	574,517,600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah penyediaan jasa komunikasi/sumber daya air/listrik	0 Laporan	574,517,600	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	0 Laporan	1,314,854,400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	0 Laporan	1,314,854,400	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**650,523,688**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**650,523,688**	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	24 Unit	441,600,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	24 Unit	441,600,000	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	4 Unit	24,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	4 Unit	24,000,000	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah peralatan/mesin yang Dipelihara	193 Unit	55,400,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah peralatan/mesin yang Dipelihara	193 Unit	55,400,000	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	22,400,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	22,400,000	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0 Unit	95,973,688	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0 Unit	95,973,688	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	33 Unit	11,150,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	33 Unit	11,150,000	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Kota Palu**	**Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk)**	**WTP**	**7,419,292,700**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Kota Palu**	**Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**	**WTP**	**7,419,292,700**	
1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100%**	**2,255,988,050**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**100%**	**2,255,988,050**	
01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Palu	Jumlah Dokumen KUA Dan PPAS	2 Dokumen	46,875,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Palu	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	46,875,000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Kota Palu	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2 Dokumen	48,150,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Kota Palu	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2 Dokumen	48,150,000	
03	Koordinasi ,Penyusunan Dan Verivikasi RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun /diverifikasi	41 Dokumen	81,000,000	Koordinasi ,Penyusunan Dan Verivikasi RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun/diverifikasi	41 Dokumen	81,000,000	
04	Koordinasi ,Penyusunan Dan Verivikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun /diverifikasi	41 Dokumen	81,000,000	Koordinasi ,Penyusunan Dan Verivikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun/diverifikasi	41 Dokumen	81,000,000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	41 Dokumen	372,649,250	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Kota Palu	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun/diverifikasi	41 Dokumen	372,649,250	
07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentangAPBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Palu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun	2 Dokumen	374,233,750	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentangAPBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Palu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun	2 Dokumen	374,233,750	
08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Palu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	2 Dokumen	83,109,750	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD &Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Kota Palu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	2 Dokumen	83,109,750	
09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Kota Palu	Jumlah Koordinasi/ Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bid.Anggaran	3 Dokumen	68,357,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bid. Anggaran	Kota Palu	Jumlah Koordinasi/ Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	68,357,000	
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Palu	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Orang	34,345,800	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Palu	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Orang	34,345,800	
13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	2 Dokumen	1,066,267,500	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1,066,267,500	
2,02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100%**	**796,006,450**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100%**	**796,006,450**	
01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	108,252,000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	108,252,000	
03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Palu	Pelaksanaan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pener bitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	228,194,950	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	228,194,950	
05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	168,522,700	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	168,522,700	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan PelaksanaanPemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	130,816,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/P emotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	130,816,000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Palu	Jumlah laporan Penerimaan/Pe ngeluaran Kas/Pemungutan/Pemoto ngan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	16 Dokumen	160,220,800	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Palu	Jumlah laporan Penerimaan/Pe ngeluaran Kas/Pemungutan/Pemotongn Atas SP2D dengan Instansi Terkait	16 Dokumen	160,220,800	
11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	-	-	
2,03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100%**	**1,367,298,200**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100%**	**1,367,298,200**	
01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Palu	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	278,875,500	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Palu	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	278,875,500	
02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	4 Dokumen	156,040,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	4 Dokumen	156,040,000	
03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Palu	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	6 Laporan	125,026,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwula nan dan Semesteran	Kota Palu	Jumlah Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	6 Laporan	125,026,000	
04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	390,814,700	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	390,814,700	
05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tenta ng Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	211,259,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tenta ng Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	211,259,000	
07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	205,283,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	205,283,000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen Kebijakan/Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen Kebijakan/Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	
10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	
2,04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**3,000,000,000**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**3,000,000,000**	
09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	3,000,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	3,000,000,000	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Kota Palu**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**1,442,285,200**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Kota Palu**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**1,442,285,200**	
3,01	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Kota Palu**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**1,442,285,200**	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Kota Palu**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**1,442,285,200**	
01	Penyusunan Standar Harga	Kota Palu	Jumlah dokumen standar harga yang disusun	2 Dokumen	243,794,000	Penyusunan Standar Harga	Kota Palu	Jumlah dokumen standar harga yang disusun	2 Dokumen	243,794,000	
02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	63,885,000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	63,885,000	
03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	90,124,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	90,124,000	
04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	3,025,050	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	3,025,050	
05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	99,360,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	99,360,000	
06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	65,298,150	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	65,298,150	
07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	38 Laporan	292,800,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	38 Laporan	292,800,000	
08	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	98,950,000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	98,950,000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	59,348,000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	59,348,000	
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanga nan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	318,735,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanga nan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	318,735,000	
11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Laporan	70,841,000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Laporan	70,841,000	
13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah PemerintahKabupaten/Kota	3 Orang	36,125,000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Orang	36,125,000	
Jumlah Anggaran				**20,726,598,552**		**Jumlah Anggaran**			**20,726,598,552**		

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu mengarah pada pelayanan keuangan dan aset daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga tidak ada usulan dari Musrenbang dan Pokir secara khusus yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu umumnya aspirasi diarahkan kepada Perangkat Daerah Teknis.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diupayakan untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD KOTA PALU

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu yang termuat dalam program RPJMD Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				Renja 2024		APBD 2024		Perubahan Renja		Bertambah	Berukurang	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	Rupiah	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=(10-8)*	*12=(11/8)*	*13*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Nilai SAKIP BPKAD Kota Palu**	**Kota Palu**	**BB**	**11.345.021.959**	**BB**	**11.586.737.652**	**BB**	**11,865,020,652**	**278.283.000**	**2,40%**	
2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**4 Dokumen**	**170.258.700**	**4 Dokumen**	**170.258.350**	**4 Dokumen**	**171,548,350**	**1.290.000**	**0,76%**	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Palu	1 Dokumen	64.976.900	1 Dokumen	64.976.650	1 Dokumen	66,482,650	1.506.000	2,32%	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Kota Palu	1 Dokumen	38.446.900	1 Dokumen	38.446.900	1 Dokumen	38,446,900	-	0,00%	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	Kota Palu	1 Dokumen	35.396.900	1 Dokumen	35.396.900	1 Dokumen	35,180,900	- 216.000	-0,61%	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Kota Palu	1 Laporan	31.438.000	1 Laporan	31.437.900	1 Laporan	31,437,900	-	0,00%	
2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan**	**Kota Palu**	**95%**	**6.751.879.771**	**95%**	**7.014.536.564**	**95%**	**7,514,710,514**	**500.173.950**	**7,13%**	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	58 org/ bln	6.681.630.871	58 Org/ Bln	6.930.167.614	58 Org/bln	7,431,103,564	500.935.950	7,23%	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Palu	1 Laporan	31.456.500	1 Laporan	31.456.400	1 Laporan	31,168,400	- 288.000	-0,92%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				Renja 2024		APBD 2024		Perubahan Renja		Bertambah	Berukurang	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	Rupiah	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-8)	12=(11/8)	13
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Kota Palu	1 Laporan	38.792.400	1 Laporan	52.912.550	1 Laporan	52,438,550	- 474.000	-0,90%	
2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**54.572.000**	**100%**	**54.572.000**	**4 Orang**	**36,372,000**	**-18.200.000**	**-33,35%**	
11	Bimbingan teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis	Kota Palu	5 Orang	54.572.000	5 Orang	54.572.000	4 Orang	36,372,000	- 18.200.000	-33,35%	
2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**1.442.663.400**	**100%**	**1.574.404.650**	**100%**	**1,602,494,100**	**28.089.450**	**1,78%**	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	1 Paket	3.715.400	1 Paket	3.715.400	1 Paket	3,715,400	-	-0,00%	
02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Kota Palu	1 Paket	270.776.700	1 Paket	405.818.100	1 Paket	190,962,800	- 214.855.300	-52,94%	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan bahan logistik kantor	Kota Palu	1 Paket	305.713.150	1 Paket	302.413.150	1 Paket	302,413,150	-	-0,00%	
05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	1 Paket	25.837.150	1 Paket	25.837.150	1 Paket	25,797,950	- 39.200	-0,15%	
06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/peraturan perundang- undangan	Kota Palu	12 Dokumen	12.000.000	12 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	29,895,800	17.895.800	149,13%	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	Kota Palu	12 Laporan	170.925.000	12 Laporan	170.925.000	1 Laporan	203,175,000	32.250.000	18,87%	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi/ Konsultasi	Kota Palu	40 Laporan	367.899.000	40 Laporan	367.899.000	1 Laporan	583,737,000	215.838.000	58,67%	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	285.797.000	1 Dokumen	285.796.850	1 Dokumen	262,797,000	- 22.999.850	-8,05%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				Renja 2024		APBD 2024		Perubahan Renja		Bertambah	Berukurang	
				Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	Rupiah	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-8)	12=(11/8)	13
2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**266.700.000**	-	-	-	-	-	-	
01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Kota Palu	1 Unit	266.700.000	-	-	-	-	-	-	
2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**2.056.104.400**	**100%**	**2.020.284.400**	**100%**	**1,889,372,000**	**-130.912.400**	**-6,48%**	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi/sumber daya air/listrik	Kota Palu	12 Laporan	602.800.000	12 Laporan	634.300.000	12 Laporan	574,517,600	- 59.782.400	-9,42%	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Palu	12 Laporan	1.453.304.400	12 Laporan	1.385.984.400	12 Laporan	1,314,854,400	- 71.130.000	-5,13%	
2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**602.843.688**	**100%**	**752.681.688**	**100%**	**650,523,688**	**-102.158.000**	**-13,57%**	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kota Palu	24 Unit	439.200.000	24 Unit	439.200.000	24 Unit	441,600,000	2.400.000	0,55%	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	Kota Palu	4 Unit	24.000.000	4 Unit	24.000.000	4 Unit	24,000,000	-	0,00%	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin yang Dipelihara	Kota Palu	193 Unit	70.370.000	193 Unit	70.370.000	193 Unit	55,400,000	- 14.970.000	-21,27%	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Palu	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	22,400,000	2.400.000	12,00%	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara direhabilitasi	Kota Palu	1 Unit	39.473.688	1 Unit	189.311.688	0 Unit	95,973,688	- 93.338.000	-49,30%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				Renja 2024		APBD 2024		Perubahan Renja		Bertambah	Berukurang	
				Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	Rupiah	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-8)	12=(11/8)	13
11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Palu	33 Unit	9.800.000	33 Unit	9.800.000	33 Unit	11,150,000	1.350.000	13,78%	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**	**Kota Palu**	**WTP**	**9.644.216.500**	**WTP**	**7.509.837.200**	**WTP**	**7,419,292,700**	**-90.544.500**	**-1,21%**	
1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Cakupan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**2.026.103.050**	**100%**	**2.287.823.050**	**100%**	**2,255,988,050**	**-31.835.000**	**-1,39%**	
01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	Kota Palu	2 Dokumen	44.275.000	2 Dokumen	47.875.000	2 Dokumen	46,875,000	-1.000.000	-2,09%	
02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	Kota Palu	2 Dokumen	33.375.000	2 Dokumen	48.650.000	2 Dokumen	48,150,000	- 500.000	-1,03%	
03	Koordinasi ,Penyusunan Dan Verivikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKASKPD yang disusun/diverifikasi	Kota Palu	41 Dokumen	108.000.000	41 Dokumen	108.000.000	41 Dokumen	81,000,000	- 27.000.000	-25,00%	
04	Koordinasi ,Penyusunan Dan Verivikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun/diverif ikasi	Kota Palu	41 Dokumen	108.000.000	41 Dokumen	108.000.000	41 Dokumen	81,000,000	- 27.000.000	-25,00%	
05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun/diverifikasi	Kota Palu	41 Dokumen	222.929.250	41 Dokumen	432.814.250	41 Dokumen	372,649,250	- 60.165.000	-13,90%	
07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentangAPBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun	Kota Palu	2 Dokumen	355.973.750	2 Dokumen	374.533.750	2 Dokumen	374,233,750	- 300.000	-0,08%	
08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	Kota Palu	2 Dokumen	83.359.750	2 Dokumen	83.359.750	2 Dokumen	83,109,750	- 250.000	-0,30%	
09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi/ Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Kota Palu	3 Dokumen	69.387.000	3 Dokumen	69.387.000	3 Dokumen	68,357,000	-1.030.000	-1,48%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				Renja 2024		APBD 2024		Perubahan Renja		Bertambah	Berukurang	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	Rupiah	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-8)	12=(11/8)	13
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	34.845.800	1 Dokumen	34.845.800	1 Dokumen	34,345,800	- 500.000	-1,43%	
13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	JumlahPembinaanPenganggaranDaerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	2 Dokumen	965.957.500	2 Dokumen	980.357.500	2 Dokumen	1,066,267,500	85.910.000	8,76%	
2,02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Cakupan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**798.735.450**	**100%**	**798.735.450**	**100%**	**796,006,450**	**-2.729.000**	**-0,34%**	
01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	122.112.000	1 Dokumen	122.112.000	1 Dokumen	108,252,000	-13.860.000	-11,35%	
03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah pelaksanaan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Palu	2 Dokumen	237.194.950	2 Dokumen	237.194.950	2 Dokumen	228,194,950	-9.000.000	-3,79%	
05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Palu	1 Dokumen	168.522.700	1 Dokumen	168.522.700	1 Dokumen	168,522,700	-	-0,00%	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/P emotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Palu	1 Laporan	110.160.000	1 Laporan	110.160.000	1 Laporan	130,816,000	20.656.000	18,75%	
09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan Penerimaan/Pengeluaran Kas/Pemungutan/Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Palu	16 Dokumen	160.745.800	16 Dokumen	160.745.800	16 Dokumen	160,220,800	- 525.000	-0,33%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				Renja 2024		APBD 2024		Perubahan Renja		Bertambah	Berukurang	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	Rupiah	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-8)	12=(11/8)	13
2,03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**1.419.378.000**	**100%**	**1.423.278.700**	**100%**	**1,367,298,200**	**-55.980.500**	**-3,93%**	
01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Palu	2 Laporan	344.986.000	2 Laporan	344.986.000	2 Laporan	278,875,500	- 66.110.500	-19,16%	
02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Palu	4 Dokumen	145.835.000	4 Dokumen	145.835.000	4 Dokumen	156,040,000	10.205.000	7,00%	
03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Palu	6 Laporan	125.926.000	6 Laporan	125.926.000	6 Laporan	125,026,000	- 900.000	-0,71%	
04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Palu	3 Laporan	390.914.000	3 Laporan	394.814.700	3 Laporan	390,814,700	-4.000.000	-1,01%	
05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Kota Palu	2 Dokumen	205.534.000	2 Dokumen	205.534.000	2 Dokumen	211,259,000	5.725.000	2,79%	
07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaa n dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	206.183.000	1 Dokumen	206.183.000	1 Dokumen	205,283,000	- 900.000	-0,44%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				Renja 2024		APBD 2024		Perubahan Renja		Bertambah	Berukurang	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	Rupiah	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-8)	12=(11/8)	13
2,04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**5.400.000.000**	**100%**	**3,000,000,000**	**100%**	**3,000,000,000**	**-**	**0,00%**	
09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase pemenuhan kebutuhan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Palu	1 Laporan	5.400.000.000	1 Laporan	3,000,000,000	1 Laporan	3,000,000,000	-	0,00%	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**1.465.535.050**	**100%**	**1.615.535.150**	**100%**	**1,442,285,200**	**-173.249.950**	**-10,72%**	
3,01	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**1.465.535.050**	**100%**	**1.615.535.150**	**100%**	**1,442,285,200**	**-173.249.950**	**-10,72%**	
01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Yang Disusun	Kota Palu	2 Dokumen	257.082.000	2 Dokumen	257.082.000	2 Dokumen	243,794,000	- 13.288.000	-5,17%	
02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Disusun	Kota Palu	1 Dokumen	73.622.000	1 Dokumen	63.885.000	1 Dokumen	63,885,000	-	0,00%	
03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	115.006.000	3 Dokumen	91.246.000	3 Dokumen	90,124,000	-1.122.000	-1,23%	
04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	2.350.000	1 Dokumen	3.010.000	1 Dokumen	3,025,050	15.050	0,50%	
05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 Laporan	65.050.000	1 Laporan	90.440.000	1 Laporan	99,360,000	8.920.000	9,86%	
06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 Laporan	145.285.000	1 Laporan	89.948.150	1 Laporan	65,298,150	- 24.650.000	-27,40%	
07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Palu	38 Laporan	273.800.000	38 Laporan	331.300.000	38 Laporan	292,800,000	- 38.500.000	-11,62%	
08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 Laporan	161.450.000	1 Laporan	150.950.000	1 Laporan	98,950,000	- 52.000.000	-34,45%	
09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 Laporan	73.118.050	1 Laporan	52.348.000	1 Laporan	59,348,000	7.000.000	13,37%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024								Catatan Penting
				Renja 2024		APBD 2024		Perubahan Renja		Bertambah	Berukurang	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	Rupiah	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-8)	12=(11/8)	13
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanga nan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Palu	2 Dokumen	227.535.000	2 Dokumen	361.735.000	2 Dokumen	318,735,000	- 43.000.000	-11,89%	
11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Kota Palu	1 Laporan	54.737.000	1 Laporan	79.091.000	1 Laporan	70,841,000	-8.250.000	-10,43%	
13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	41 Orang	16.500.000	41 Orang	44.500.000	41 Orang	36,125,000	-8.375.000	-18,82%	
Jumlah Anggaran					**22.454.773.509**		**20.712.110.002**		**20.726.598.552**	**14.488.550**	**0,07%**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2024 ini merupakan pelaksaaan serta penetapan berbagai program dan kegiatan sebagai pedoman bagi segenap aparatur untuk melaksanakan serta memudahkan dalam pengendalian penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak terlepas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah serta tergantung pada Aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sendiri dan peran semua pihak yang ada kepentingannya dengan kepegawaiaan dan keuangan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah di buat akan mengalami perubahan/penyesuaian karena beberapa faktor antara lain:

a. Regulasi/aturan dari Pemerintah Pusat;
b. Kebijakan–kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palu; dan
c. Karena kebutuhan/kepentingan organisasi lain.

Namun perubahan-perubahan yang dilakukan tidak terlalu jauh berbeda dengan garis-garis besar perencanaan yang telah disusun.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan yang semakin kompleks hendaknya dibarengi dengan peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek Pendidikan Formal, Lokakarya, Seminar

dan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Meningkatkan peran serta kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dalam meningkatkan pengelolaan keuangan secara transparan, dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 ini diharapkan pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu dapat lebih meningkat menuju kearah pelayanan prima.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALU

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu untuk periode 1 (satu) tahun (2024) sebagai penterjemahan tahun pertama dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu tahun 2021-2026. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan Renja, tahap penyusunan

rancangan Renja dan tahap penetapan Renja. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu tahun 2024 dan selanjutnya untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tahun 2024 dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan resmi, Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu, sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi & Misi Pemerintah Kota Palu.

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Kota Palu tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu tahun 2024 dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Kota Palu tahun 2024, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Kota Palu, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap

pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Palu 2021-2026. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu dilakukan dengan pengesahan oleh Wali Kota Palu, selanjutnya Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu menetapkan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu untuk menjadi pedoman di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Kota Palu pada tahun anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencan Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 13);

22. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 32);
23. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dalam penyusunan awal program/kegiatan/sub kegiatan, dan menjadi acuan bagi rencana penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah periode 2021-2026 dan mengacu kepada rancangan awal RKPD Kota Palu Tahun 2024.

Tujuan penyusunan rancangan awal Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menentukan rencana prioritas program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024 dengan mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Palu Tahun 2024.
2. Pedoman bagi seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Kota Palu dalam menjalankan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Sebagai dokumen pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Palu.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALU TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda Kota Palu
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda Kota Palu
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALU

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan TW II Tahun 2024 dan Tahun Berkenaan

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024), serta dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Palu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu tahun-tahun sebelumnya. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Kota Palu serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2023, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2021 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pada Tahun Anggaran 2023, Target capaian Badan Pendapatan Daerah untuk Terwujudnya pengelolaan PAD yang andal menuju kemandirian pembiayaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja Utama (IKU) terhadap pendapatan daerah dengan uraian capaian indikator kinerja menurut bidang urusan

penyelenggaraan tingkat outcome penerimaan daerah adalah sebagai berikut :

1) Pajak Daerah sebesar Rp. 125.069.039.600,00 atau 9,07 %
2) Retribusi Daerah Rp. 93.084.847.123,00 atau 7,49%;
3) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 2.750.000.000,00 atau 0,21%;
4) Lain-lain PAD yang Sah Rp. 126.687.886.190,88 atau 9,69%;

Dalam mendukung capaian kinerja utama, pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kota Palu telah melaksanakan 2 program, yang terdiri dari Program Pengelolaan Pendapatan sebagai program urusan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sifatnya non urusan/*supporting*. Terhadap program yang terkait dengan urusan dapat dianalisis sebagai berikut :

Realisasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan urusan yang telah memenuhi target kinerja sesuai dengan yang direncanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2021-2026`	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5.02 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**								
5.02 . 01 . 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
5.02 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	100
5.02 . 01 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	100
5.02 . 01 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	100
5.02 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Laporan	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2021-2026`	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02 . 01 . 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
5.02 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	380 orang/bulan	76 orang/bulan	76 orang/bulan	76 orang/bulan	100	304 Orang/Bulan	100
5.02 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	4 Laporan	100
5.02 . 01 . 2.05 .	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
5.02 . 01 . 2.05 .	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	4 Paket	0
5.02 . 01 . 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
5.02 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	4 Paket	100
5.02 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlengkapann kantor pada operasionalisasi peralatan kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	4 Paket	100
5.02 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	4 Paket	100
5.02 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	4 Paket	100
5.02 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2021-2026`	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Tamu	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	4 Laporan	100
5.02 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	4 Laporan	100
5.02 . 01 . 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
5.02 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	4 Laporan	100
5.02 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	4 Laporan	100
5.02 . 01 . 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
5.02 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100	80 Unit	100
5.02 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	2 unit	2 Unit	2 Unit	100	8 Unit	100
5.02 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	40 Unit	100
5.02 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100	0	0
5.02 . 01 . 2.09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	4 Unit	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2021-2026`	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02 . 04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**								
5.02 . 04 . 2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**								
5.02 . 04 . 2.01 . 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	100
5.02 . 04 . 2.01 . 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	4 Laporan	100
5.02 . 04 . 2.01 . 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100
5.02 . 04 . 2.01 . 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	500 Obyek Pajak	100 Obyek Pajak	100 Obyek Pajak	100 Obyek Pajak	100	400 Obyek Pajak	100
5.02 . 04 . 2.01 . 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	100
5.02 . 04 . 2.01 . 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	500 Layanan	100 Layanan	100 Layanan	100 Layanan	100	400 Layanan	100
5.02 . 04 . 2.01 . 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	100
5.02 . 04 . 2.01 . 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil peleksanaan penagihan pajak daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2021-2026`	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02 . 04 . 2.01 . 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	100
5.02 . 04 . 2.01 . 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kota Palu sebagai lembaga penunjang urusan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Palu.

Tahun 2023 merupakan periode dalam pelaksanaan Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun (periode Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026), yaitu sasaran "**tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD)**" dengan indikator kinerja utama (IKU) "**Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah***"*.

Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu pada tahun 2023 telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2023, serta merujuk pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Palu periode Tahun 2021-2026 yang selaras dengan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai manivestasi dari penggunaan anggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mestinya dapat terukur realisasi dan pemanfaatannya, serta mempertimbangkan sumber daya yang dikelola, namun tetap memperhitungkan target kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya berdasarkan periode Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026.

Analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah, oleh karena itu. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2023 adalah :

1) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 347.591.772.913,88 atau 26,59% dari total pendapatan Rp 1.307.071.875.522,62
2) Jumlah pajak daerah sebanyak 11 pajak daerah.

Sedangkan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Pajak Daerah sebesar Rp. 125.069.039.600,00 atau 9,56%;
2) Retribusi Daerah Rp. 93.084.847.123,00 atau 7,12%
3) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 2.750.000.000,00 atau 0,21%;
4) Lain-lain PAD yang Sah Rp. 126.687.886.190,88 atau 9,69%;

Hasil analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2023 disajikan dalam tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2023

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Nilai SAKIP OPD		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	B	B	A	-	B	BB	-	-
2.	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah			25.43	26.59	27.65	28.77		24.22		
3.	Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD			43.4	44.1	46.2	45.3		59.60		
4.	Rasio Hasil Retribusi Daerah terhadap PAD			9.14	9.15	9.66	9.39		6.14		
5.	Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD			0.85	0.87	0.89	0.91		1.17		
6.	Rasio Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap PAD			46.61	45.88	43.25	44.4		33.09		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Palu adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Palu mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
d. Pengelolaan kesekretariatan Badan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

Berdasarkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026, visi pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah " ***Membangun Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta professional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan local dan keagamaan".*** Dan misi pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah :

1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;

2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang Tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana covid-19;
4. Menciptakan pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani.

Misi Pemerintah Kota Palu yang berhubungan dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu adalah :

Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.

Melalui misi ini, pemerintah Kota Palu mengharapkan terwujudnya tujuan strategis meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, melalui sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas , transparansi, dan kinerja pemerintahan;
2. Meningkatnya mutu Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Meningkatnya kinerja pelayanan publik;
4. Pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi;
5. Meningkatnya penataan regulasi daerah.

Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam mendukung pencapaian misi tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pemerintahan Daerah Kota Palu dalam rangka

pencapaian sasaran strategis **meningkatkan penerimaan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah sebagai berikut:

Strategi : *Mendorong hadirnya inovasi pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya.*

Arah Kebijakan : *Menghadirkan inovasi pada setiap OPD (satu OPD lima inovasi)*

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kota Palu tidak terlepas dari Berbagai permasalahan yang dihadapi, Permasalahan tersebut antara lain :

a. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah;
b. Sistim manajemen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah belum memanfaatkan teknologi informasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Kurangnya SDM yang memahami pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah;
d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Review terhadap RKPD Kota Palu dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat realisasi kinerja yang dicapai oleh

Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.

Pembangunan daerah Kota Palu yang mengacu pada visi dan misi pemerintahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, perlu di operasionalkan melalui menjabarkan prioritas pembangunan daerah pada tiap-tiap misi. Tujuan prioritas pembangunan adalah memberi arah dan fokus pembangunan Kota Palu dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Prioritas pembangunan diharapkan akan menjadi agenda utama pembangunan yang akan diimplementasikan dan terukur dalam upaya mewujudkan Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan. Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026 di atas, maka prioritas pembangunan Kota Palu adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif;
2. Mewujudkan SDM unggul, tangguh dan berdaya saing;
3. Mewujudkan infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif;
4. Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Pencapaian target dan sasaran SDGs.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD Kota Palu Tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kota Palu merencanakan program yang mendukung

prioritas tersebut sesuai dengan hasil rumusan analisis kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 seperti disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Palu Tahun 2024
dan Rumusan Kebutuhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Penting
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
5.	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**										
5.02	**Badan Pendapatan Daerah**				**35.193.354.609**					**36.953.022.339,45**	
5.02 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		Nilai SAKIP OPD	A	**25.811.874.459**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai SAKIP OPD**	A	**27.102.468.181,95**	
5.02 . 01 . 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	**96.356.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	**101.173.800**	
5.02 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	19.814.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	20.804.700	
5.02 . 01 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10.114.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10.619.700	
5.02 . 01 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	10.114.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	10.619.700	
5.02 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	56.314.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	59.129.700	

5.02 . 01 . 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase realisasi keuangan	100%	**21.699.017.959**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase realisasi keuangan	100%	**22.783.968.856,95**	
5.02 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang	21.682.978.959	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang	22.767.127.906,95	
5.02 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.039.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.840.950	
5.02 . 01 . 2.05 .	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	**213.006.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	**223.656.300**	
5.02 . 01 . 2.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	213.006.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	223.656.300	
5.02 . 01 . 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	**1.305.627.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	**1.370.908.455**	
5.02 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.460.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.783.420	
5.02 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	186 Unit	472.371.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	186 Unit	495.989.550	
5.02 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	267.565.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	280.943.250	
5.02 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	52.040.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	54.642.735	

5.02 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	28.600.0000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	30.030.000	
5.02 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	37.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	38.850.000	
5.02 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	441.590.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	463.669.500	
5.02 . 01 . 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	**1.465.277.400**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	**1.538.541.270**	
5.02 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	701.120.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	736.176.000	
5.02 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	764.157.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	802.365.270	
5.02 . 01 . 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	**1.032.590.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	**1.084.219.500**	
5.02 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Kendaraan	570.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Kendaraan	598.710.000	
5.02 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Kendaraan	181.180.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Kendaraan	190.239.000	
5.02 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 Unit	173.030.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 Unit	181.681.500	
5.02 . 01 . 2.09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	108.180.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	113.589.000	

5.02 . 04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**		Capaian pemenuhan target PAD	100%	**9.381.480.150**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**		Capaian pemenuhan target PAD	100%	**9.850.554.157,5**	
5.02 . 04 . 2.01	**Pengelolaan pendapatan Daerah**		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100%	**9.381.480.150**	**Pengelolaan pendapatan Daerah**		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100%	**9.850.554.157,5**	
5.02 . 04 . 2.01 . 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	150.419.350	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	157.940.317,5	
5.02 . 01 . 2.09 . 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100%	1.800.060.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100%	1.890.063.000	
5.02 . 01 . 2.09 . 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100%	178.210.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100%	187.120.500	
5.02 . 01 . 2.09 . 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Palu	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100%	4.625.305.100	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Palu	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100%	4.856.570.355	
5.02 . 01 . 2.09 . 08	Penetapan wajib pajak daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100%	465.335.000	Penetapan wajib pajak daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100%	488.601.750	
5.02 . 01 . 2.09 . 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Palu	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	376.141.200	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Palu	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	394.948.260	
5.02 . 01 . 2.09 . 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Palu	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100%	124.567.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Palu	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100%	130.795.350	
5.02 . 01 . 2.09 . 11	Penagihan pajak daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100%	1.042.167.500	Penagihan pajak daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100%	1.094.275.875	
5.02 . 01 . 2.09 . 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100%	40.050.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100%	42.052.500	
5.02 . 01 . 2.09 . 13	Pengendalian,pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100%	579.225.000	Pengendalian,pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100%	608.186.250	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Uraian pada sub bab ini merupakan hasil penelaahan usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi - asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kota Palu yang langsung ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu pelaksanaan Musyarwarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Palu untuk dimuat pada Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai urusan penunjang pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka pencapaian Visi-Misi Wali Kota Palu periode 2021-2026.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALU

Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan hasil pengelolaan pendapatan daerah yang implementatif dan sistem inovasi daerah dari tahun ke tahun, maka langkah operasionalnya adalah dengan menerjemahkan rencana kerja dan pendanaan kedalam usulan program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.

Badan Pendapatan Daerah Kota Palu dalam menyusun rancangan awal Renja Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu periode 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsi.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2023 dituangkan kedalam 2 (Dua) Program 7 (Tujuh) Kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan.

Adapun rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Rencana kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
5.02	**Badan Pendapatan Daerah**				**Rp 35.193.354.609**		**Rp 34.365.939.759**	**-Rp 827.414.850**	-2,8	
5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP OPD**	**A**		**Rp 25.811.874.459**		**Rp 25.379.033.359**	**-Rp 432.841.100**	-1,7	
5.02 . 01 . 2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	**5 Dokumen**	**Rp 96.356.000**	**5 Dokumen**	**Rp 96.356.000**	**Rp -**	0,00	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	Rp 19.814.000	1 Dokumen	Rp 19.814.000	Rp -	0,00	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	Rp 10.114.000	1 Dokumen	Rp 10.114.000	Rp -	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	Rp 10.114.000	1 Dokumen	Rp 10.114.000	Rp -	0,00	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Laporan	Rp 56.314.000	1 Laporan	Rp 56.314.000	Rp -	0,00	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan**		**100%**	**Rp 21.699.017.959**	**100%**	**Rp 21.677.577.959**	-Rp 21.440.000	-0,10	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	76 Orang	Rp 21.682.978.959	76 Orang	Rp 21.661.538.959	-Rp 21.440.000	-0,10	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	Rp 16.039.000	1 Laporan	Rp 16.039.000	Rp -	0,00	
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Rp 213.006.000**	**-**	**Rp -**	-Rp 213.006.000	-100,00	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu		Rp 213.006.000	-	Rp -	-Rp 213.006.000	-100,00	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Rp 1.305.627.100**	**100%**	**Rp 1.659.672.000**	Rp 354.044.900	27,12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Palu	1 Paket	Rp 6.460.400	1 Paket	Rp 6.460.400	Rp -	0,00	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Palu	186 Unit	Rp 472.371.000	186 Unit	Rp 657.612.000	Rp 185.241.000	39,22	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Palu	1 Paket	Rp 267.565.000	1 Paket	Rp 295.837.800	Rp 28.272.800	10,57	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	1 Paket	Rp 52.040.700	1 Paket	Rp 78.427.800	Rp 26.387.100	50,70	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Palu	2 Dokumen	Rp 28.600.000	2 Dokumen	Rp 68.600.000	Rp 40.000.000	139,86	
5.02.01.2.06.01	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 Laporan	Rp 37.000.000	1 Laporan	Rp 37.000.000	Rp -	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
5.02.01.2.06.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	50 Laporan	Rp 441.590.000	50 Laporan	Rp 515.734.000	Rp 74.144.000	16,79	
5.02 . 01 . 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**Rp 1.465.277.400**	**100%**	**Rp 1.010.137.400**	-Rp 455.140.000	-31,06	
5.02 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Palu	1 Laporan	Rp 701.120.000	1 Laporan	Rp 255.120.000	-Rp 446.000.000	-63,61	
5.02 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Junlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Palu	1 Laporan	Rp 764.157.400	1 Laporan	Rp 755.017.400	-Rp 9.140.000	-1,20	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**100%**	**Rp 1.032.590.000**	**100%**	**Rp 935.290.000**	-Rp 97.300.000	-9,42	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	35 Kendaraan	Rp 570.200.000	35 Kendaraan	Rp 583.200.000	Rp 13.000.000	2,28	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	2 Kendaraan	Rp 181.180.000	2 Kendaraan	Rp 163.460.000	-Rp 17.720.000	-9,78	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Palu	186 Unit	Rp 173.030.000	186 Unit	Rp 180.450.000	Rp 7.420.000	4,29	
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Palu	1 Paket	Rp 108.180.000	1 Paket	Rp 8.180.000	-Rp 100.000.000	-92,44	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Capaian Pemenuhan Target PAD**		**100%**	**Rp 9.381.480.150**	**100%**	**Rp 8.986.906.400**	-Rp 394.573.750	-4,21	
5.02.04.2.01	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**100%**	**Rp 9.381.480.150**	**100%**	**Rp 8.986.906.400**	-Rp 394.573.750	-4,21	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	Rp 150.419.350	1 Dokumen	Rp 173.819.350	Rp 23.400.000	15,56	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kota Palu	1 Laporan	Rp 1.800.060.000	1 Laporan	Rp 1.903.311.500	Rp 103.251.500	5,74	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pmeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Palu	1 Laporan	Rp 178.210.000	1 Laporan	Rp 178.210.000	Rp -	0,00	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	Kota Palu	100 Objek Pajak	Rp 4.625.305.100	100 Objek Pajak	Rp 4.625.304.850	-Rp 250	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	Rp 465.335.000	1 Dokumen	Rp 464.709.800	-Rp 625.200	-0,13	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Palu	100 Layanan	Rp 376.141.200	100 Layanan	Rp 200.446.200	-Rp 175.695.000	-46,71	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verfikasi	Kota Palu	1 Dokumen	Rp 124.567.000	1 Dokumen	Rp 125.729.200	Rp 1.162.200	0,93	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Derah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	Rp 1.042.167.500	1 Dokumen	Rp 738.055.500	-Rp 304.112.000	-29,18	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	Rp 40.050.000	1 Dokumen	Rp 40.050.000	Rp -	0,00	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	Rp 579.225.000	1 Dokumen	Rp 537.270.000	-Rp 41.955.000	-7,24	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu tahun 2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam penyusunan Renja ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Palu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palu sehingga diharapkan mampu menerjermahkan visi, misi dan agenda Walikota Palu selaku Kepala Daerah berikut strategi, kebijakan, dan capaian program dalam RPJMD dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Good Governance.*

Dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Palu ini juga diharapkan dapat menjadi suatu dokumen perencanaan yang dapat pula menjadi pedoman pada semua sektor baik Umum atau Pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan usaha secara sistematik dan terus menerus menganalisa kondisi dan pelaksanaan dari pembangunan Kota Palu sehingga dapat membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA PALU

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Brida Kota Palu tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja tahunan Brida Kota Palu untuk sisa periode kerja tahun 2024. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan resmi, Perubahan Renja Brida Kota Palu tahun 2024 mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara arah kebijakan program pada Brida dengan arah kebijakan program prioritas Pemerintah Kota Palu yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) Tahun 2024.

Proses penyusunan Perubahan Renja Brida Tahun 2024 mengacu pada rumusan arah kebijakan program pembangunan dalam Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Brida Kota Palu sampai dengan Triwulan II

tahun 2024 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian periode III Renstra Brida Kota Palu 2021-2026. Tahap penetapan rancangan akhir Perubahan Renja Brida Kota Palu dilakukan dengan pengesahan oleh Wali Kota Palu, selanjutnya Kepala Brida Kota Palu menetapkan Perubahan Renja untuk menjadi pedoman di lingkungan Brida Kota Palu dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dituangkan ke dalam rumusan Perubahan APBD pada tahun anggaran 2024.

Latar belakang penyusunan Perubahan Renja Brida Kota Palu Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Perubahan Renja Brida tahun 2024 merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Brida yang ditetapkan dalam Renstra Brida 2021-2026 dengan mengacu pada arahan operasional dalam Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024.
b. Perubahan Renja Brida tahun 2024 merupakan sarana penyesuaian antara arah kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan Brida dengan arah kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kota Palu hasil evaluasi tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Palu tahun 2024.
c. Perubahan Renja Brida tahun 2024 merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Brida sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana realisasi dan capaian kinerja serta capaian Renstra Brida Kota Palu, untuk dijadikan rujukan bagi perumusan kebijakan umum perubahan APBD Kota Palu Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renja Brida Kota Palu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
21. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
23. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 4);

24. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Brida Kota Palu Tahun 2024 adalah untuk melakukan penyesuaian rencana kerja tahun berjalan dengan perubahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Palu berdasarkan isu strategis yang berkembang sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 untuk selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Brida Kota Palu sampai dengan akhir tahun berjalan (tahun 2024).

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Brida Kota Palu Tahun 2024 adalah**:**

1. Sebagai pedoman dalam menentukan dan menyesuaikan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan tahun anggaran 2024 dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024.
2. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kelitbangan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya

dan efektivitas pencapaian kinerja Brida Kota Palu sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Sebagai media evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan periode pelaksanaan Renja Brida sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, serta media sinkronisasi kebijakan program/kegiatan antar dokumen perencanaan pada perubahan anggaran tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Brida Kota Palu tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BRIDA KOTA PALU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Brida Kota Palu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Balitbangda Kota Palu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Brida Kota Palu
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Brida Kota Palu
- 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BRIDA KOTA PALU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Brida Kota Palu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Brida Kota Palu

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dengan target realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan (2024). Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kinerja Brida dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan terhadap capaian Renstra Brida serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi periode pelaksanaan Renja Brida sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Brida Kota Palu s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Brida 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024						Realisasi Capaian Target Renstra Brida s/d Triwulan II tahun 2024			
											Target Renja Brida Tahun 2024		Realisasi Renja Brida Triwulan II tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																
							4		5		6		7		8 (7/6)		9 (5+7)		10 = (9/4)	
1					2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5					**Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**															
	5				**Bidang Urusan : Penelitian dan Pengembangan**			**21.728.589.197**		**10.930.186.535**		**4.334.076.706**		**1.982.039.227**		**45,73**		**12.912.225.762**		**59,43**
		1			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai SAKIP Brida Palu**	**90 (A)**	**20.165.966.904**	**80,46 (A)**	**7.566.246.919**	**80 (BB)**	**4.130.686.306**	**-**	**1.974.039.227**	-	**47,79**	**80,46 (A)**	**9.540.286.146**	**89,4**	**47,31**
			2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Brida Kota Palu**	**25 Dokumen**	**46.725.000**	**10 Dokumen**	**5.090.000**	**5 Dokumen**	**3.240.000**	**1 Dokumen**	**-**	**20**	**0**	**11 Dokumen**	**5.090.000**	**44**	**10,89**
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Brida Kota Palu	10 Dokumen	13.250.000	4 Dokumen	1.940.000	2 Dokumen	1.440.000	1 Dokumen	-	50	0	5 Dokumen	1.940.000	50	14,64
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Brida Kota Palu	5 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	1.100.000	1 Dokumen	600.000	-	-	-	0	2 Dokumen	1.100.000	40	8,46
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Brida Kota Palu	5 Dokumen	13.000.000	2 Dokumen	1.100.000	1 Dokumen	600.000	-	-	-	0	2 Dokumen	1.100.000	40	8,46
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Brida Kota Palu	5 Laporan	7.475.000	2 Laporan	950.000	1 Laporan	600.000	-	-	-	0	2 Laporan	950.000	40	12,71
			2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan Brida Kota Palu**	**96%**	**16.149.068.080**	**90,72%**	**5.602.037.808**	**94%**	**3.196.805.206**	**45,73%**	**1.647.858.599**	**48,65**	**51,55**	**45,73%**	**7.249.896.407**	**47,64**	**44,89**
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Brida Kota Palu	30 Orang/ 60 Bulan	16.122.718.080	30 Orang/ 12 Bulan	5.598.997.808	27 Orang/ 12 Bulan	3.194.765.206	27 Orang/ 6 Bulan	1.647.858.599	50	51,58	27 Orang/ 30 Bulan	7.246.856.407	50	44,95
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Brida Kota Palu	5 Laporan	8.750.000	2 Laporan	1.100.000	1 Laporan	600.000	-	-	-	0	2 Laporan	1.100.000	40	12,57

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Brida 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024						Realisasi Capaian Target Renstra Brida s/d Triwulan II tahun 2024			
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan							Target Renja Brida Tahun 2024		Realisasi Renja Brida Triwulan II tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							4		5		6		7		8 (7/6)		9 (5+7)		10 = (9/4)	
1					2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Brida Kota Palu	20 Laporan	17.600.000	8 Laporan	1.940.000	4 Laporan	1.440.000	2 Laporan	-	50	0	10 Laporan	1.940.000	50	11,02
			2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Brida Kota Palu**	**100%**	**1.731.141.304**	**40%**	**561.650.881**	**60%**	**296.807.900**	**40%**	**92.203.570**	**66,67**	**31,07**	**40%**	**653.854.451**	**40**	**37,77**
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.106.471	2 Paket	1.640.400	1 Paket	903.000	-	-	-	0	2 Paket	1.640.400	40	32,12
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.263.812	1 Paket	36.900.000	0	-	-	-	-	0	1 Paket	36.900.000	50	73,41
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	152.383.362	8 Paket	84.728.160	4 Paket	33.480.100	2 Paket	13.679.000	50	40,86	10 Paket	98.407.160	50	64,58
				5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	48.797.659	6 Paket	24.733.125	3 Paket	11.611.800	1 Paket	2.741.250	33,33	23,61	7 Paket	27.474.375	46,67	56,30
				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	29.600.000	2 Dokumen	4.550.000	1 Dokumen	1.800.000	-	450.000	-	25	2 Dokumen	5.000.000	40	16,89
				8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	38 Laporan	16.150.000	9 laporan	3.825.000	6 Laporan	2.700.000	-	-	-	0	9 Laporan	3.825.000	23,68	23,68
				9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	1.428.840.000	41 Laporan	405.274.196	23 Laporan	246.313.000	10 Laporan	75.333.320	43,48	30,58	51 Laporan	480.607.516	42,5	33,64
			2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang/Aset Milik Brida Kota Palu**	**100%**	**79.700.000**	**5,56%**	**23.560.000**	**66,67%**	**66.200.000**	**5,56%**	**-**	**8,33**	**0,00**	**5,56%**	**23.560.000**	**5,56**	**29,56**
				1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	1 Unit	23.560.000	2 Unit	50.000.000	-	-	-	0	1 Unit	23.560.000	50	47,12
				5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	29.700.000	-	-	9 Unit	16.200.000	-	-	-	0	-	-	-	0
			2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Brida Kota Palu**	**100%**	**1.032.480.520**	**40%**	**408.131.533**	**60%**	**283.593.200**	**40%**	**115.646.908**	**66,67**	**40,78**	**40%**	**523.778.441**	**40**	**50,73**
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi/sumber daya air/listrik kantor	60 Laporan	319.200.000	24 Laporan	122.905.400	12 Laporan	69.840.000	6 Laporan	31.449.850	50	45,03	30 Laporan	154.355.250	50	48,36
				4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 Laporan	713.280.520	24 Laporan	285.226.133	12 Laporan	213.753.200	6 Laporan	84.197.058	50	39,39	30 Laporan	369.423.191	50	51,79

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Brida 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024						Realisasi Capaian Target Renstra Brida s/d Triwulan II tahun 2024			
											Target Renja Brida Tahun 2024		Realisasi Renja Brida Triwulan II tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																
							4		5		6		7		8 (7/6)		9 (5+7)		10 = (9/4)	
1					2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Brida Kota Palu**	**100%**	**1.126.852.000**	**40%**	**965.776.697**	**60%**	**284.040.000**	**40%**	**118.330.150**	**66,67**	**41,66**	**40%**	**1.084.106.847**	**40**	**96,21**
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	24 Unit/ 60 Bulan	1.095.752.000	21 Unit/ 24 Bulan	679.436.725	21 Unit/ 12 Bulan	267.600.000	21 Unit/ 6 Bulan	116.580.150	50	43,57	21 Unit/ 30 Bulan	796.016.875	50	72,65
				6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin yang dipelihara	35 Unit/ 60 Bulan	21.500.000	32 Unit/ 24 Bulan	56.698.380	18 Unit/ 12 Bulan	11.560.000	18 Unit/ 6 Bulan	600.000	50	5,19	32 Unit/ 30 Bulan	57.298.380	50	266,5
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Brida Kota Palu yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit/ 60 Bulan	9.600.000	36 Unit/ 24 Bulan	229.641.592	8 Unit/ 12 Bulan	4.880.000	8 Unit/ 6 Bulan	1.150.000	50	23,57	8 Unit/ 30 Bulan	230.791.592	50	2404,08
		2			**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti**	**92,73%**	**1.119.639.614**	**75%**	**2.887.375.636**	**86,67%**	**-**	**50%**	**-**	**57,69**	**0**	**50%**	**2.887.375.636**	**53,92**	**257,88**
			2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase Implementasi Rencana Riset bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**100%**	**478.860.314**	**50%**	**1.319.905.107**	**61,11%**	**-**	**50%**	**-**	**81,82**	**0**	**50%**	**1.319.905.107**	**50**	**275,63**
				2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5 Laporan	143.975.000	3 Laporan	572.646.350	-	-	-	-	-	0	3 Laporan	572.646.350	60	397,74
				3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	3 Laporan	75.000.000	1 Laporan	128.657.691	-	-	-	-	-	0	1 Laporan	128.657.691	33,33	171,54
				5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	7 Laporan	203.583.814	4 Laporan	581.790.166	-	-	-	-	-	0	4 Laporan	581.790.166	57,14	285,77
				12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	56.301.500	1 Laporan	36.810.900	-	-	-	-	-	0	1 Laporan	36.810.900	50	65,38
			2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Implementasi Rencana Riset bidang Sosial dan Kependudukan**	**100,00%**	**453.408.987**	**40%**	**746.223.229**	**53,33%**	**-**	**40%**	**-**	**75**	**12,25**	**40%**	**746.223.229**	**40**	**164,58**
				1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	152.347.342	-	-	-	-	-	0	1 Dokumen	152.347.342	25	121,88
				3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	4 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen	125.666.637	-	-	-	-	-	0	1 Dokumen	125.666.637	25	86,67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Brida 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024						Realisasi Capaian Target Renstra Brida s/d Triwulan II tahun 2024			
											Target Renja Brida Tahun 2024		Realisasi Renja Brida Triwulan II tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			4		5		6		7		8 (7/6)		9 (5+7)		10 = (9/4)	
1					2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	5 Dokumen	128.408.987	3 Dokumen	363.445.962	-	-	-	-	-	0	3 Dokumen	363.445.962	60	283,04
				10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	104.763.288	-	-	-	-	-	0	1 Dokumen	104.763.288	50	190,48
			2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Implementasi Rencana Riset bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**100%**	**187.370.313**	**41,67%**	**821.247.300**	**75%**	**-**	**41,67%**	**-**	**55,56%**	**0**	**41,67%**	**821.247.300**	**41,67**	**273,27**
				1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6 Dokumen	132.370.313	4 Dokumen	527.938.600	-	-	-	-	-	0	4 Dokumen	527.938.600	66,67	398,83
				12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
				13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	293.308.700	-	-	-	-	-	0	1 Dokumen	293.308.700	50	838,02
		2			**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah**	**83,33%**	**442.982.679**	**81,25%**	**476.563.980**	**75%**	**203.390.400**	**65%**	**8.000.000**	**86,67**	**3,93**	**65%**	**484.563.980**	**78**	**109,39**
			2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**1. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah**	**73,17%**	**42.982.679**	**39,02%**	**476.563.980**	**48,78%**	**203.390.400**	**48,78%**	**8.000.000**	**100-**	**3,93**	**48,78%**	**484.563.980**	**66,67**	**109,39**
						2. Jumlah Penerapan Inovasi Daerah	**25 Inovasi**		**13 Inovasi**		**15 Inovasi**		**13 Inovasi**		**86,67**	**3,93**	**13 Inovasi**		**52**	**109,39**
				1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	337.982.679	2 Dokumen	270.840.130	1 Dokumen	203.390.400	-	8.000.000		3,93	2 Dokumen	278.840.130	40	82,50
				2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5 Laporan	105.000.000	3 Laporan	205.723.850	-	-	-	-	-	0	3 Laporan	205.723.850	60	195,93
						Jumlah		**21.728.589.197**		**10.930.186.535**		**4.334.076.706**		**1.982.039.227**		**45,73**		**12.912.225.762**		**59,43**

Berdasarkan realisasi Renja Brida sampai dengan triwulan II tahun 2024 di atas, ada beberapa hal yang perlu dianalisis dan ditindaklanjuti pada Perubahan Renja Brida Kota Palu tahun 2024, khususnya terhadap kegiatan yang terkait dengan urusan riset dan inovasi daerah sebagai berikut :

1. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan.

   Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran sebagaimana yang telah direncanakan sampai dengan triwulan II tahun 2024 terdiri dari :

No.	Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi TW II	% Capaian
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase implementasi rencana riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	61,11%	50%	81,82
2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase implementasi rencana riset bidang sosial dan kependudukan	53,33%	40%	75
3.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase implementasi rencana riset bidang ekonomi dan pembangunan	75%	41,67%	55,56
4.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah penerapan Inovasi Daerah	15 Inovasi	13 Inovasi	86,67

2. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan.

   Hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran khususnya terkait indikator fasilitasi penerapan inovasi daerah, dengan rincian realisasi sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi TW II	% Capaian
1.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	48,78%	48,78%	100

3. Realisasi Kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan.

   Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja tidak menunjukkan adanya realisasi kegiatan urusan riset dan inovasi yang melebihi target kinerja keluaran seperti yang direncanakan sampai dengan triwulan II tahun 2024.

4. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja kegiatan.

   Tidak terpenuhinya target kinerja beberapa kegiatan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

   a. Kebijakan teknis dari Pimpinan Daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan hasil-hasil riset yang telah dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya rekomendasi riset/kajian yang mendukung penyelesaian permasalahan daerah dan percepatan pencapaian prioritas program unggulan pemerintah Kota Palu. Kebijakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan masih rendahnya pemanfaatan hasil-hasil riset dalam perumusan kebijakan/perencanaan pembangunan daerah, sehingga berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran pada semua kegiatan riset di tahun anggaran 2024.

   b. Kinerja penerapan inovasi daerah yang belum tercapai disebabkan oleh rendahnya pengetahuan perangkat daerah terkait bentuk, kriteria dan pemenuhan parameter/indikator/identitas sebuah inovasi daerah

dengan status “penerapan”. Kondisi ini mewajibkan Tim Fasilitator inovasi daerah yang disebut sebagai Tim Klinik Inovasi Bergerak masih membutuhkan waktu lebih lama dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator penerapan inovasi daerah dengan mengunjungi langsung setiap perangkat daerah.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Brida Kota Palu.

   Implikasi yang timbul akibat dari tidak terealisasikannya kinerja keluaran kegiatan adalah pencapaian target kinerja program riset dan inovasi daerah periode Renstra Brida 2021-2026 sampai dengan triwulan II tahun 2024 menjadi tidak tercapai dan sangat mempengaruhi hasil pengukuran kinerja ASN Brida Kota Palu dan perencanaan kinerja di tahun berikutnya. Keterlambatan pencapaian target kinerja keluaran kegiatan juga berimplikasi pada lambannya pemenuhan dukungan capaian target kinerja program prioritas pemerintah kota Palu yang dijabarkan dalam 53 program unggulan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk meningkatkan pencapaian target kinerja kegiatan.
   a. Menindaklanjuti hasil evaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024, dengan menerapkan tindakan pengendalian secara efektif untuk percepatan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran pada semester II tahun 2024.
   b. Pencermatan dan penyesuaian kegiatan sesuai arah kebijakan Perubahan RKPD Kota Palu tahun 2024 untuk

selanjutnya ditindak lanjuti pada usulan rencana kerja dan perubahan APBD 2024.

c. Meningkatkan koordinasi bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk menjaga konsistensi usulan pada perubahan rencana kerja dan anggaran tahun 2024 sampai pada level Pimpinan Daerah, serta memastikan bahwa usulan Perubahan Renja sudah mendukung sepenuhnya prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Brida Kota Palu

Brida Kota Palu turut berkontribusi dalam mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Pemerintah Kota Palu berdasarkan penjabaran dalam dokumen RPJMD Kota Palu 2021-2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan yang dimiliki. Untuk itu sasaran kinerja pelayanan Brida Kota Palu selain difokuskan pada pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi, juga diarahkan pada pencapaian tujuan, sasaran dan program prioritas pemerintah kota Palu.

Pengukuran sasaran kinerja pelayanan Brida Kota Palu mendasarkan pada tolok ukur pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang diperoleh dari representasi akumulasi capaian indikator kinerja program Brida Kota Palu. Pada tahun anggaran 2023 capaian kinerja pelayanan Brida Kota Palu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja untuk sasaran pertama, yaitu Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator kinerja *Nilai Evaluasi SAKIP Brida Kota Palu* di tahun 2023 telah direalisasikan dengan nilai 80,46 (predikat A), lebih besar dari target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 dengan nilai

75 (predikat BB), sehingga angka capaian kinerja mencapai 107,3% dengan predikat sangat berhasil.

2. Capaian kinerja untuk sasaran strategis "Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset" dengan indikator kinerja *Persentase Hasil Riset yang Dimanfaatkan*, telah direalisasikan sebesar 75% lebih rendah dari target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 81,82%, dengan angka capaian kinerja sasaran strategis mencapai 91,66% dengan predikat sangat berhasil.
3. Capaian kinerja untuk sasaran strategis "Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah" dengan indikator kinerja *Indeks Inovasi Daerah*, telah direalisasikan dengan skor 51,05 atau lebih besar dari target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 dengan skor 50, sehingga angka capaian kinerja mencapai 102,1% dengan predikat sangat berhasil.

Pencapaian kinerja pelayanan Brida Kota Palu dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Brida Kota Palu

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKU/ IKK	Target Renstra Brida Kota Palu					Realisasi		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024 (TW II)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Nilai Evaluasi SAKIP Brida Kota Palu		90 (A)	70 (B)	75 (BB)	80 (BB)	85 (A)	90(A)	80,46 (A)	-	80 (BB)	85 (A)	90(A)	
2.	Persentase Implementasi Rencana Riset		100%	22,22%	48,89%	62,22%	77,78%	100%	44,44%	44,44%	44,44%	77,78%	100%	
3.	Persentase Hasil Riset yang Dimanfaatkan		92,73%	80,00%	81,82%	86,67%	90,24%	92,73%	75%	50%	86,67%	90,24%	92,73%	
4.	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah		73,17%	19,51%	36,59%	48,78%	60,98%	73,17%	39,02%	48,78%	48,78%	60,98%	73,17%	
5.	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah		83,33%	62,50%	66,67%	75%	80,00%	83,33%	81,25%	65%	75%	80%	83,33%	

6.	Indeks Inovasi Daerah		80	40	50	60	70	80	51,05	-	60	70	80	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Brida Kota Palu

Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Brida Kota Palu merupakan unsur pelaksana urusan penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Brida mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila yang menjadi kewenangan Daerah.

Brida Kota Palu menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

1) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
2) Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta lnvensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;

4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
5) Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
6) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
7) Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat herbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
8) Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah; dan
9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugasnya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Brida Kota Palu melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dan diwujudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Brida Kota Palu. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan riset belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas kinerja/produk hasil riset. Hal kritis yang mempengaruhi kinerja pelayanan diantaranya masih ditemukannya inkonsistensi proses perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target tahunan dalam dokumen Renstra Balitbangda sehingga kesinambungan pencapaian sasaran kinerja Brida Kota Palu menjadi bias. Disisi lain kegiatan penelitian yang dilaksanakan

belum sepenuhnya mendukung pemecahan permasalahan dan isu strategis daerah, sehingga hasil riset belum sepenuhnya termanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam pembangunan kota Palu.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Brida Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset;
2) Hasil riset belum sepenuhnya menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan menyelesaikan permasalahan utama daerah;
3) Rendahnya jumlah proporsi inovasi yang terimplementasikan: dan
4) Belum tersedianya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Kota Palu.

Permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas sangat mempengaruhi pencapaian akhir dari kinerja Brida Kota Palu dan tentu saja berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, diantaranya:

1) Strategi pemerintah Kota Palu dalam mendorong hadirnya inovasi pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya belum terwujud secara maksimal.
2) Percepatan penerapan program kerja unggulan pemerintah Kota Palu menjadi terhambat disebabkan rekomendasi hasil kajian terkait program unggulan tersebut belum terimplementasi secara baik di tingkat OPD.
3) Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Brida belum maksimal.

Selain permasalahan di atas, Brida Kota Palu menghadapi tantangan yang semakin kuat dari para pemangku kepentingan (stakeholders) akan produk riset yang berkualitas dan

implementatif. Tantangan tersebut berupa perumusan kebijakan daerah yang belum didasarkan pada hasil-hasil riset, masih rendahnya budaya inovasi di tingkat perangkat daerah dan masyarakat, serta belum terbangunnya jejaring litbangjirap, invensi dan inovasi di tingkat daerah, regional dan nasional. Untuk itu kedudukan Brida Kota Palu sebagai lembaga penunjang urusan penelitian dan pengembangan serta inovasi di daerah menjadi semakin penting dalam berkontribusi untuk percepatan reformasi birokrasi dan penguatan inovasi.

Peluang bagi penyelenggaran tugas dan fungsi Brida di tahun 2024 diantaranya adalah keberadaan Kota Palu sebagai kota jasa dan kota penyanggah perekonomian di provinsi Sulawesi Tengah yang mengharuskan adanya peningkatan daya saing daerah, kemudahan akses kerjasama ekonomi antar daerah melalui penguatan Kawasan Ekonomi Khusus, penguatan UMKM berbasis kearifan lokal, serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan PAD. Upaya tersebut semakin mewarnai tantangan bagi Brida dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perumus rekomendasi kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Sudah semestinya Brida Kota Palu mendapat dukungan secara teknokratik serta dukungan penganggaran program dan kegiatan dalam menunjang perbaikan kinerja kelitbangan. Melakukan berbagai pendekatan inklusif dengan perangkat daerah dan lembaga riset lainnya menjadi suatu keharusan untuk dapat mengidentifikasi dan mengkaji berbagai permasalahan strategis yang sedang dihadapi daerah, termasuk memberi penguatan tentang kebijakan inovasi untuk mendorong daya saing daerah. Melalui dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana yang semakin baik, serta peraturan perundang-undangan yang

semakin lengkap maka tantangan dan peluang tersebut secara bertahap dan berkesinambungan dapat terpenuhi.

Berdasarkan kedudukan, tantangan dan peluang yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam perumusan Perubahan Renja Brida perlu memperhatikan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas akhir tahun 2024, yaitu :

a. Peningkatan kinerja pelayanan Brida yang tangguh dan professional melalui percepatan penerapan sasaran reformasi birokrasi, pengembangan manajemen kinerja yang akuntabel dan transparan, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dan pengelolaan aset yang tertib administrasi.
b. Mendorong kebijakan riset dan inovasi daerah yang implementatif dan berdaya saing melalui penguatan rencana riset yang mendukung arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Palu, optimalisasi penerapan rekomendasi hasil-hasil riset, serta mendorong penerapan kebijakan inovasi daerah untuk peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya dilingkungan birokrasi dan masyarakat Kota Palu.
c. Mendorong koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah melalui percepatan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) merupakan kerangka lanjutan dalam menghimpun dan

menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perubahan RKPD disusun dengan maksud untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta kerangka pendanaan dan pengalokasian anggaran yang akan dilakukan pada tahun perencanaan.

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil evaluasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis dan evaluasi kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renja pada triwulan sebelumnya dan tingkat kinerja yang dicapai, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Brida Kota Palu berdasarkan Perubahan RKPD Kota Palu tahun 2024.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang mengarah pada dukungan pencapaian program unggulan Pemerintah Kota Palu sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024, Brida Kota Palu merencanakan fokus program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung prioritas tersebut sesuai dengan hasil rumusan analisis kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 seperti disajikan pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024 dan Rumusan Kebutuhan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Hasil Kebutuhan Analisis					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**										
5.05	**Penelitian dan Pengembangan**										
5.05. 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Nilai SAKIP OPD**	**A**	**4.130.686.306**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Nilai SAKIP Brida Kota Palu**	**80**	**4.007.183.293**	
5.05. 01. 2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda Kota Palu**	**4 Dokumen**	**3.240.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Brida Kota Palu**	**5 Dokumen**	**3.240.000**	
5.05. 01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.440.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Brida Kota Palu	2 Dokumen	1.440.000	
5.05. 01. 2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Brida Kota Palu	1 Dokumen	600.000	
5.05. 01. 2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Brida Kota Palu	1 Dokumen	600.000	
5.05. 01. 2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Brida Kota Palu	1 Laporan	600.000	
5.05. 01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Realisasi Keuangan**	**95%**	**3.196.805.206**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Realisasi Keuangan Brida Kota Palu**	**94%**	**3.200.309.993**	
5.05. 01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	3.194.765.206	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Brida Kota Palu	27 Orang/ 12 Bulan	3.198.269.993	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Hasil Kebutuhan Analisis					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5.05. 01. 2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Brida Kota Palu	1 Laporan	600.000	
5.05. 01. 2.02. 07	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Balitbangda Kota Palu	4 Laporan	1.440.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Brida Kota Palu	4 Laporan	1.440.000	
5.05. 01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**296.807.900**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Brida Kota Palu**	**60%**	**265.684.100**	
5.05. 01. 2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	903.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	903.000	
5.05. 01. 2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.480.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	34.585.600	
5.05. 01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.611.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.773.500	
5.05. 01. 2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000	
5.05. 01. 2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	2.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	900.000	
5.05. 01. 2.03. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	246.313.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Brida Kota Palu	20 Laporan	215.722.000	
5.05. 01. 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**66.200.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Palu	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Brida Kota Palu**	**11,11%**	**3.000.000**	
5.05. 01. 2.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Hasil Kebutuhan Analisis					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5.05. 01. 2.07. 05	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	16..200.000	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	
5.05. 01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Palu	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**283.593.200**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Palu	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Brida Kota Palu**	**60%**	**249.393.200**	
5.05. 01. 2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	69.840.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	63.840.000	
5.05. 01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	213.753.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	185.553.200	
5.05. 01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**284.040.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Palu	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Brida Kota Palu**	**60%**	**285.556.000**	
5.05. 01. 2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	267.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	270.406.000	
5.05. 01. 2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	11.560.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	7.830.000	
5.05. 01. 2.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	4.880.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	7.320.000	
5.05. 02	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang ditindaklanjuti**	**90,91%**	**203.390.400**	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Kota Palu**	**1. Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti** **2. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah**	**86,67%** **75%**	**190.590.400**	
5.05. 02. 2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Kota Palu**	**Cakupan kelompok usaha baru yang menerapkan teknologi tepat guna (TTG)**	**5 Inovasi**	**203.390.400**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Kota Palu**	**1. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah** **2. Jumlah Penerapan Inovasi Daerah**	**48,78%** **15 Inovasi**	**190.590.400**	Dukungan terhadap prioritas pembangunan Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di semua Instansi
5.05. 02. 2.04. 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	203.390.400	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	190.590.400	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD 2024					Hasil Kebutuhan Analisis					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				Jumlah Pagu Indikatif	**4.334.076.706**					**4.197.773.693**	

Hasil kebutuhan analisis berdasarkan tabel review terhadap rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 di atas telah dilakukan beberapa hal berikut ini:

1) Optimalisasi dukungan pencapaian kinerja utama Brida kota Palu, yaitu terkait penerapan kebijakan inovasi daerah, melalui *refocusing* sub kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
2) *Refocusing* dilakukan melalui efisiensi anggaran sub kegiatan yang dianggap tidak berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja, dan mengalokasikan anggaran pada sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Brida kota Palu di tahun 2024.
3) Penyesuaian kinerja dan target kinerja untuk mengakomodir kebijakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Brida kota Palu di tahun 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi - asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kota Palu yang langsung ditujukan kepada Brida Kota Palu maupun berdasarkan hasil pengumpulan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musyarwarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Palu.

Hasil pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kota Palu tidak terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari *bottom up* yang ditujukan ke Brida Kota Palu, sehingga dalam penelaahan usulan program/kegiatan yang harus dimuat pada Perubahan Renja Brida Kota Palu tahun

2024 hanyalah usulan internal Brida Kota Palu sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai urusan penunjang penelitian dan pengembangan daerah serta dalam upaya mendukung percepatan pencapaian kinerja program prioritas pemerintah Kota Palu sesuai dokumen Perubahan RKPD Kota Palu tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BRIDA KOTA PALU

Brida Kota Palu berkontribusi untuk mewujudkan pencapaian Visi-Misi Pemerintah Kota Palu khususnya Misi Keempat sesuai dengan penjabaran dalam RPJMD Kota Palu 2021-2026. Penyusunan Perubahan Renja Brida Kota Palu Tahun 2024 telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian mengikuti arah kebijakan dan program prioritas dalam Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024 dengan tetap mengacu pada target kinerja tahun ketiga periode Renstra Brida Kota Palu 2021-2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan penerapan inovasi daerah yang berdaya saing, maka langkah operasionalnya adalah dengan menerjemahkan rencana kerja dan pendanaan kedalam usulan program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Brida Kota Palu.

Perubahan Renja Brida Kota Palu Tahun 2024 yang dituangkan dalam rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta rencana pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Brida Kota Palu Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/(Berkurang)		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9=(8-6)	10=(9/6)	*11*
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
5.05	**Penelitian dan Pengembangan**									
5.05. 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP Brida Kota Palu**	**Kota Palu**	**80**	**4.130.686.306**	**80**	**4.007.183.293**	**(123.503.013)**	**- 2,99**	
5.05. 01. 2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Brida Kota Palu**	**Kota Palu**	**5 Dokumen**	**3.240.000**	**5 Dokumen**	**3.240.000**	**0**	-	
5.05. 01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Brida Kota Palu	Kota Palu	2 Dokumen	1.440.000	2 Dokumen	1.440.000	0	-	
5.05. 01. 2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Brida Kota Palu	Kota Palu	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	600.000	0	-	
5.05. 01. 2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Brida Kota Palu	Kota Palu	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	600.000	0	-	
5.05. 01. 2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Brida Kota Palu	Kota Palu	1 Laporan	600.000	1 Laporan	600.000	0	-	
5.05. 01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan Brida Kota Palu**	**Kota Palu**	**94%**	**3.196.805.206**	**94%**	**3.200.309.993**	**3.504.787**	**0,11**	
5.05. 01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Brida Kota Palu	Kota Palu	30 Orang/ 12 Bulan	3.194.765.206	27 Orang/ 12 Bulan	3.198.269.993	3.504.787	0,11	
5.05. 01. 2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	Kota Palu	1 Laporan	600.000	1 Laporan	600.000	0	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/(Berkurang)		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9=(8-6)	10=(9/6)	*11*
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Brida Kota Palu								
5.05. 01. 2.02. 07	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Brida Kota Palu	Kota Palu	4 Laporan	1.440.000	4 Laporan	1.440.000	0	-	
5.05. 01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Brida Kota Palu**	**Kota Palu**	**60%**	**296.807.900**	**60%**	**265.684.100**	**(31.123.800)**	**- 10,49**	
5.05. 01. 2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	903.000	1 Paket	903.000	0,00	-	
5.05. 01. 2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 Paket	33.480.100	4 Paket	34.585.600	1.105.500	3,3	
5.05. 01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 Paket	11.611.800	3 Paket	11.773.500	161.700	1,39	
5.05. 01. 2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	0,00	-	
5.05. 01. 2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	6 Laporan	2.700.000	6 Laporan	900.000	(1.800.000)	- 66,67	
5.05. 01. 2.03. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Brida Kota Palu	Kota Palu	20 Laporan	246.313.000	20 Laporan	215.722.000	(30.591.000)	- 12,42	
5.05. 01. 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Brida Kota Palu**	**Kota Palu**	**66,67%**	**66.200.000**	**11,11%**	**3.000.000**	**(63.200.000)**	**- 95,47**	
5.05. 01. 2.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	2 Unit	50.000.000	-	0	(50.000.000)	- 100	
5.05. 01. 2.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	16.200.000	1 Paket	3.000.000	(13.200.000)	- 81,48	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/(Berkurang)		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9=(8-6)	10=(9/6)	*11*
5.05. 01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Brida Kota Palu**	**Kota Palu**	**60%**	**283.593.200**	**60%**	**249.393.200**	**(34.200.000)**	**- 12,06**	
5.05. 01. 2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	69.840.000	12 Laporan	63.840.000	(6.000.000)	- 8,59	
5.05. 01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	213.753.200	12 Laporan	185.553.200	(28.200.000)	- 13,19	
5.05. 01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Brida Kota Palu**	**Kota Palu**	**60%**	**284.040.000**	**60%**	**285.556.000**	**1.516.000**	**0,53**	
5.05. 01. 2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	19 Unit	267.600.000	19 Unit	270.406.000	2.806.000	1,05	
5.05. 01. 2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	11 Unit	11.560.000	11 Unit	7.830.000	(3.730.000)	- 32,27	
5.05. 01. 2.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	12 Unit	4.880.000	12 Unit	7.320.000	2.440.000	50	
5.05. 02	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**1. Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti** **2. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah**	**Kota Palu**	**86,67%** **75%**	**203.390.400**	**86,67%** **75%**	**190.590.400**	**(12.800.000)**	**- 6,29**	
5.05. 02. 2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**1. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah** **2. Jumlah Penerapan Inovasi Daerah**	**Kota Palu**	**48,78%** **15 Inovasi**	**203.390.400**	**48,78%** **15 Inovasi**	**190.590.400**	**(12.800.000)**	**- 6,29**	Dukungan terhadap prioritas pembangunan Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di semua Instansi
5.05. 02. 2.04. 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Palu	1 Dokumen	203.390.400	1 Dokumen	190.590.400	(12.800.000)	- 6,29	
Jumlah Pagu Indikatif					**4.334.076.706**		**4.197.773.693**	**(136.303.013)**	**- 3,14**	

BAB IV
PENUTUP

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Perubahan Renja Brida Kota Palu Tahun 2024 merupakan dokumen rencana perubahan kinerja dan anggaran tahunan sebagai penjabaran tahun ketiga dari perencanaan strategis Brida periode Renstra Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024. Perubahan Renja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator-indikator kinerja dan target yang sedang dan akan dilaksanakan dalam sisa tahun anggaran 2024 sehingga pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dapat terukur secara efektif dan efisien.

Dalam rangka meningkatkan kualitas produk riset dan inovasi daerah maka dalam penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan program, maupun antar program dengan sasaran kinerja, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Brida Kota Palu.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan riset dan inovasi pada Tahun 2024, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan pada Perubahan Renja Brida Kota Palu Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Perubahan Renja Brida Kota Palu Tahun 2024 mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMD Kota Palu, Perubahan RKPD Kota Palu dan Renstra Brida Kota Palu) dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian kinerja dan terget kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai pada periode ketiga Renstra Brida Kota Palu 2021-2026; dan
b. Penyusunan anggaran pada Perubahan Renja Brida Tahun 2024 berbasis kebutuhan program serta program berbasis kinerja, dengan tetap memperhatikan dukungan pencapaian program prioritas Pemerintah Kota Palu sebagai bentuk penerapan sistem akuntabilitas kinerja Brida Kota Palu.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya mewujudkan kinerja riset sebagai *think thank* perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan daerah, Brida Kota Palu memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

a. Dalam rangka sinergitas program riset dan inovasi daerah untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil riset dan penerapan inovasi daerah, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
b. Implementasi Perubahan Renja Brida Kota Palu Tahun 2024 tetap memperhatikan dukungan pencapaian Visi-Misi serta program kerja unggulan Pemerintah Kota Palu yang tertuang dalam program prioritas daerah tahun 2024.

Perubahan Renja Brida Kota Palu Tahun 2024 selain menjadi acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

di sisa perjalanan tahun anggaran 2024, berfungsi pula sebagai sarana evaluasi guna peningkatan kinerja Brida Kota Palu kedepan. Perubahan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh aparatur Brida Kota Palu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Perubahan Renja Brida Kota Palu Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Tahapan persiapan, penetapan maupun implementasinya dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) hingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Aggaran Perubahan (DPA-P) harus memperhatikan dan menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan daerah.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT KOTA PALU

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kota Palu Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Inspektorat Tahun 2024 yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, dan diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Inspektorat Kota Palu merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu yang mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal diatas maka Inspektorat Kota Palu merupakan lembaga pengawas internal yang berkewajiban mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut serta mengacu kepada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja.

Pada akhirnya Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Palu ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun

sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis. Koreksi dapat dilakukan jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
17. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Daerah.

18. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah No. 13 Tahun 2023).
19. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah No. 15 Tahun 2024).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Palu Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kota Palu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kota Palu dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada. Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Palu tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Kota Palu tahun 2021-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kota Palu.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional
f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan.
g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan
Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan
2.3 Fungsi
2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
2.5 Masyarakat
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Palu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Palu

Realisasi kinerja tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Palu dalam menjalankan fungsi utamanya dengan sasaran kegiatan. Capaian kinerja Inspektorat Kota Palu dilakukan cara membandingkan Target kinerja dengan Realisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Inspektorat Kota Palu Tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Pencapaian Kinerja sasaran Inspektorat tahun 2024 adalah:

1. Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola Pemerintahan, yang diukur dengan Indikator Sasaran “Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)”. Pada tahun 2023 target Nilai Kapabilitas APIP adalah pada level 3, dengan hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah pada level 3 (untuk 6 elemen penilaian). Dengan demikian target nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Palu tercapai di tahun 2023.
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat, yang diukur dengan indikator sasaran “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”. Sasaran Kinerja Inspektorat ini merupakan sasaran baru di tahun 2023 dengan target nilai B.

Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan TW II (sd Juni 2024) sebagai berikut : Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Secara rinci evaluasi output per sub kegiatan dapat dilihat pada laporan sd TW II (Per 30 Juli 2024) EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD (INSPEKTORAT) TA. 2024 atau Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Inspektorat Per Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**								
6 01	**Inspektorat Daerah**								
6 01 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai SAKIP OPD**							
6 01 01 2	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							
6 01 01 2 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	3 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50	5	
6 01 01 2 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2	
6 01 01 2 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2	
6 01 01 2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**							
6 01 01 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	57 Orang/Bulan	57 Orang/Bulan	57 Orang/Bulan	100	114	
6 01 01 2 05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	2	
6 01 01 2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							
6 01 01 2 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	25 Orang	35 Orang	Orang	-	25	
6 01 01 2 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	6 Orang	2 Orang	2 Orang	100	8	

6 01 01 2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**							
6 01 01 2 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	1 Paket	4 Paket	2 Paket	50	3	
6 01 01 2 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1 Paket	1 Paket	Paket	-	1	
6 01 01 2 04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	1 Paket	4 Paket	2 Paket	50	3	
6 01 01 2 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	1 Paket	4 Paket	2 Paket	50	3	
6 01 01 2 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	1 Paket	4 Paket	2 Paket	50	3	
6 01 01 2 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	-	1	
6 01 01 2 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1 Laporan	13 Laporan	10 Laporan	77	11	
6 01 01 2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**							
6 01 01 2 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	-	1	
6 01 01 2 04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	-	1	
6 01 01 2	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**							
6 01 01 2 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	17 Unit	13 Unit	7 Unit	54	24	
6 01 01 2 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	100%	37 Unit	10 Unit	5 Unit	50	42	
6 01 01 2 11	Pemeliharaan/Rejhabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	17 Unit	17 Unit	10 Unit	59	27	

6 01 02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Cakupan penyelenggaraan pengawasan**							
6 01 02 2	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Terwujudnya Obyek Pemeriksaan disetiap OPD sesuai ketentuan yang berlaku**							
6 01 02 2 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100%	6 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	50	10	
6 01 02 2 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	5 Laporan	10 Laporan	4 Laporan	40	9	
6 01 02 2 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	100%	12 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	20	13	
6 01 02 2 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100%	5 Laporan	19 Laporan	4 Laporan	21	9	
6 01 02 2 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	100%	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	Kesepakatan	-	1	
6 01 02 2 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	60	8	
6 01 02 2	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu**							
6 01 02 2 02	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	5 Laporan	13 Laporan	5 Laporan	38	10	
6 01 03	**Program Perumusan Kebijakan/Pendampingan dan Asistensi**	**Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**							
6 01 03 2	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Cakupan Pendampingan dan Asistensi**							
6 01 03 2 02	Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100%	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	-	1	
6 01 03 2 03	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100%	6 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	10	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah salah satu agenda pemerintah pusat dan daerah yang sedang gencar dilaksanakan sekarang ini, berbagai regulasi telah dikeluarkan dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diharapkan dalam penyempurnaan berbagai ketentuan dan peraturan ini penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan akan semakin terbuka, akuntabel, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, membuka partisipasi masyarakat, keserasian dan keterpaduan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

Dalam rangka menunjang kebutuhan untuk menjadi lembaga APIP yang akuntabel maka menjadi agenda utama bagi Inspektorat Daerah untuk meningkatkan kapabilitasnya. Dalam hal ini sesuai dengan target nasional maka Inspektorat Daerah Kota Palu mempertahankan level 3 pada tahun 2024.

Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien maka perlu penjaminan akan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam hal ini sesuai target daerah maka diharapkan pada tahun 2024 Pemerintah Daerah berada level berkembang. Adapun gambaran mengenai pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Palu dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Palu

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[11]		[12]	[13]	[14]
1	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	-	3	3,00	3,15	3,15	3,50	3,75	3,075	3,175	-	-	Hasil Penilian BPKP
2	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	-	2	2,20	2,30	2,30	2,50	2,60	2,390	2,484	-	-	Hasil Penilian BPKP
3	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	-	Hasil Penilian BPKP

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Kota Palu tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain

1. Belum optimalnya kualitas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palu.
2. Rendahnya Komitmen pimpinan perangkat daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia APIP.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kota Palu merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Kota Palu dan

berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan Kota Palu Tahun 2024, review terhadap Rancangan awal RKPD Perubahan tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut**:**

Tabel 2.3.

Review Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**Kota Palu**			**10.822.453.234**	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**Kota Palu**		**11.643.424.367**		
6 01	**Inspektorat Daerah**	**Kota Palu**			**10.822.453.234**	**Inspektorat Daerah**	**Kota Palu**		**11.643.424.367**		
6 01 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Nilai SAKIP OPD**	**BB**	**10.490.497.884**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**		**10.918.477.617**		
6 01 01 2	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**5.625.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**10.875.000**		
6 01 01 2 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.375.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	8.625.000		
6 01 01 2 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.125.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1.125.000		
6 01 01 2 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1.125.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1.125.000		
6 01 01 2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase realisasi keuangan**	**100%**	**9.201.176.284**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**9.250.206.817**		
6 01 01 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	9.199.676.284	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		57 Orang/Bulan	9.249.081.817		
6 01 01 2 05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1.500.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.125.000		
6 01 01 2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**45.420.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**47.583.000**		
6 01 01 2 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	300.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		25 Orang	2.400.000		
6 01 01 2 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	45.120.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		6 Orang	45.183.000		

6 01 01 2		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**195.441.800**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**278.087.000**		
6 01 01 2 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.401.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	3.401.500		
6 01 01 2 06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	1 Paket	21.866.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	-		
6 01 01 2 04		Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	55.098.900	Penyediaan Bahan Logistik		1 Paket	55.098.900		
6 01 01 2 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.119.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	7.784.600		
6 01 01 2 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Paket	3.550.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Dokumen	1.050.000		
6 01 01 2 08		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dokumen	8.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	8.250.000		
6 01 01 2 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	91.155.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	202.502.000		
6 01 01 2		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**489.384.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**558.995.800**		
6 01 01 2 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	83.920.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Laporan	78.675.600		
6 01 01 2 04		Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	405.464.800	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor		1 Laporan	480.320.200		
6 01 01 2		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**553.450.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**772.730.000**		
6 01 01 2 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	532.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		17 Unit	753.300.000		
6 01 01 2 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	10 Unit	7.180.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		37 Unit	7.180.000		
6 01 01 2 11		Pemeliharaan/Rejhabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	13.470.000	Pemeliharaan/Rejhabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		17 Unit	12.250.000		

6 01 02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Kota Palu**	**Cakupan penyelenggaraan pengawasan**	**100%**	**304.694.300**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Kota Palu**	**100%**	**690.433.300**		
6 01 02 2	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**Terwujudnya Obyek Pemeriksaan disetiap OPD sesuai ketentuan yang berlaku**	**100%**	**282.983.950**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**100%**	**597.472.950**		
6 01 02 2 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	56.075.500	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		6 Laporan	89.825.500		
6 01 02 2 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan	40.446.100	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		5 Laporan	84.321.100		
6 01 02 2 03	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	15.615.000	Reviu Laporan Kinerja		12 Laporan	23.115.000		
6 01 02 2 04	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	19 Laporan	23.283.500	Reviu Laporan Keuangan		5 Laporan	84.987.500		
6 01 02 2 06	Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	42.123.350	Kerjasama Pengawasan Internal		1 Kesepakatan	66.138.350		
6 01 02 2 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	5 Dokumen	105.440.500	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP		5 Dokumen	249.085.500		
6 01 02 2	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**		**Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu**	**100%**	**21.710.350**	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**		**100%**	**92.960.350**		
6 01 02 2 02	Pengawasan dengan tujuan tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	13 Laporan	21.710.350	Pengawasan dengan tujuan tertentu		5 Laporan	92.960.350		
6 01 03	**Program Perumusan Kebijakan/Pendampingan dan Asistensi**	**Kota Palu**	**Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**100%**	**27.261.050**	**Program Perumusan Kebijakan/Pendampingan dan Asistensi**	**Kota Palu**	**100%**	**34.513.450**		
6 01 03 2	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**		**Cakupan Pendampingan dan Asistensi**	**100%**	**27.261.050**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**		**100%**	**34.513.450**		
6 01 03 2 02	Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Perangkat Daerah	1.950.000	Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		1 Perangkat Daerah	7.875.000		
6 01 03 2 03	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	25.311.050	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		6 Kegiatan	26.638.450		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat tidak langsung berhubungan dengan usulan program atau kegiatan dari masyarakat, namun ketugasannya selaku Instansi Pengawas yang juga terkait dengan pelayanan masyarakat yaitu: melakukan pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi, serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui pemeriksaan khusus atau investigatif dan sub kegiatan Penelitian Penelaahan Informasi dengan fokus dugaan KKN, penyalahgunaan wewenang, hambatan pelayanan publik, pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melakukan Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yaitu: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan dan tata ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Lingkungan Hidup, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bidang pengendalian penduduk dan Keluaraga Berencana, bidang Perhubungan, bidang komunikasi dan Informatika, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Penanaman Modal, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perpustakaan dan kearsipan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang pemerintahan umum.

Mereview Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah dimana dalam kegiatan review tersebut diantaranya memperbandingkan kesesuaian Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang yang merupakan usulan dari masyarakat. Adapun Tabel 2.4 (nihil) tidak dibuat karena Inspektorat tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung.

BAB 3

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALU

Berdasarkan Regulasi tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Kota Palu berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024. Adapun perubahan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 tidak lepas dari Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2024. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**		**Kota Palu**		**10.822.453.234**		**11.643.424.367**	**820.971.133**	**53**	
6 01	**Inspektorat Daerah**		**Kota Palu**		**10.822.453.234**		**11.643.424.367**	**820.971.133**	**53**	
6 01 01	**Program Penunjang Urusan Pemeri**	**Nilai SAKIP OPD**	**Kota Palu**	**BB**	**10.490.497.884**		**10.918.477.617**	**427.979.733**	**40**	
6 01 01 2	**Perencanaan, Penganggaran dan Ev**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**5.625.000**	**100%**	**10.875.000**	**5.250.000**	**2**	
6 01 01 2 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan I	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	3.375.000	4 Dokumen	8.625.000	5.250.000	1,56	
6 01 01 2 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokume	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1.125.000	1 Dokumen	1.125.000	-	0,00	
6 01 01 2 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokume	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1.125.000	1 Dokumen	1.125.000	-	0,00	
6 01 01 2	**Administrasi Keuangan Perangkat I**	**Persentase realisasi keuangan**		**100%**	**9.201.176.284**	**100%**	**9.250.206.817**	**49.030.533**	**- 0**	
6 01 01 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		57 Orang/Bulan	9.199.676.284	57 Orang/Bulan	9.249.081.817	49.405.533	0,01	
6 01 01 2 05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Aki	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.125.000	- 375.000	-0,25	
6 01 01 2	**Administrasi Kepegawaian Perangka**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**45.420.000**	**100%**	**47.583.000**	**2.163.000**	**7**	
6 01 01 2 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-und	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		35 Orang	300.000	35 Orang	2.400.000	2.100.000	7,00	
6 01 01 2 11	Bimbingan Teknis Implementasi Perat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2 Orang	45.120.000	2 Orang	45.183.000	63.000	0,00	

6	01	01	2		**Administrasi Umum Perangkat Dae**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**		**100%**	**195.441.800**	**100%**	**278.087.000**	**82.645.200**	**-** **1**	
6	01	01	2	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	3.401.500	4 Paket	3.401.500	-	0,00	
6	01	01	2	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan		1 Paket	21.866.600	1 Paket	-	- 21.866.600	-1,00	
6	01	01	2	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	55.098.900	4 Paket	55.098.900	-	0,00	
6	01	01	2	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	12.119.800	4 Paket	7.784.600	- 4.335.200	-0,36	
6	01	01	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4 Paket	3.550.000	4 Paket	1.050.000	- 2.500.000	-0,70	
6	01	01	2	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Dokumen	8.250.000	1 Dokumen	8.250.000	-	0,00	
6	01	01	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi da	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		13 Laporan	91.155.000	13 Laporan	202.502.000	111.347.000	1,22	
6	01	01	2		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**100%**	**489.384.800**	**100%**	**558.995.800**	**69.611.000**	**0**	
6	01	01	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbe	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	83.920.000	1 Laporan	78.675.600	- 5.244.400	-0,06	
6	01	01	2	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Ka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	405.464.800	1 Laporan	480.320.200	74.855.400	0,18	
6	01	01	2		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**		**100%**	**553.450.000**	**100%**	**772.730.000**	**219.280.000**	**32**	
6	01	01	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		13 Unit	532.800.000	13 Unit	753.300.000	220.500.000	41,39	
6	01	01	2	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin la	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		10 Unit	7.180.000	10 Unit	7.180.000	-	0,00	
6	01	01	2	11	Pemeliharaan/Rejhabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		17 Unit	13.470.000	17 Unit	12.250.000	- 1.220.000	-9,06	

6 01 02	**Program Penyelenggaraan Pengawa**	**Cakupan penyelenggaraan pengawasan**	**Kota Palu**	**100%**	**304.694.300**	**100%**	**690.433.300**	**385.739.000**	**10**	
6 01 02 2	**Penyelenggaraan Pengawasan Inter**	**Terwujudnya Obyek Pemeriksaan disetiap OPD sesuai ketentuan yang berlaku**		**100%**	**282.983.950**	**100%**	**597.472.950**	**314.489.000**	**7**	
6 01 02 2 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daer	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		8 Laporan	56.075.500	8 Laporan	89.825.500	33.750.000	0,60	
6 01 02 2 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah D	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		10 Laporan	40.446.100	10 Laporan	84.321.100	43.875.000	1,08	
6 01 02 2 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		5 Laporan	15.615.000	5 Laporan	23.115.000	7.500.000	0,48	
6 01 02 2 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		19 Laporan	23.283.500	19 Laporan	84.987.500	61.704.000	2,65	
6 01 02 2 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		1 Kesepakatan	42.123.350	1 Kesepakatan	66.138.350	24.015.000	0,57	
6 01 02 2 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		5 Dokumen	105.440.500	5 Dokumen	249.085.500	143.645.000	1,36	

6 01 02 2	**Penyelenggaraan Pengawasan Deng**	**Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu**		**100%**	**21.710.350**	**100%**	**92.960.350**	**71.250.000**	**3**	
6 01 02 2 02	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		13 Laporan	21.710.350	13 Laporan	92.960.350	71.250.000	3,28	
6 01 03	**Program Perumusan Kebijakan/Pendampingan dan Asistensi**	**Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Kota Palu**	**100%**	**27.261.050**	**100%**	**34.513.450**	**7.252.400**	**3**	
6 01 03 2	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Cakupan Pendampingan dan Asistensi**		**100%**	**27.261.050**	**100%**	**34.513.450**	**7.252.400**	**3**	
6 01 03 2 02	Pendampingan Asistensi, Verifikasi da	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		1 Perangkat Daerah	1.950.000	1 Perangkat Daerah	7.875.000	5.925.000	3,04	
6 01 03 2 03	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		4 Kegiatan	25.311.050	4 Kegiatan	26.638.450	1.327.400	0,05	

BAB 4
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Palu Tahun 2024 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai bulan Juli 2024 (Cut Off 30 Juli 2024) Triwulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwal Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Inspektorat Kota Palu berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palu tahun 2024 dan bersifat indikatif.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah Kota Palu, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu seperti di bidang Reformasi Birokrasi, Audit, dan lainnya.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 KECAMATAN PALU SELATAN

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya di singkat dengan RENJA adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Fungsi Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Palu Selatan untuk periode 1 (Satu) tahun kedepan (Perencanaan Jangka Menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Palu Selatan (RENSTRA) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Palu Selatan selama kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Palu.

Adapun proses penyusunan Renja Kecamatan Palu Selatan periode 2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Palu Selatan.
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Palu Selatan.
4. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Palu Selatan.
5. Penetapan Renja Kecamatan Palu Selatan.

Perubahan Rencana Kerja menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh Kecamatan Palu Selatan, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII,dan IX yang ada pada RPJMN 2021-2026. Dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawasi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Palu Selatan disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Tahun 2024 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan

Kecamatan Palu Selatan. Sejajar dengan itu, muatan Renja Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program Renstra Kecamatan Palu Selatan. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Palu Selatan Kota Palu selama satu tahun anggaran.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. Renstra Kecamatan Palu Selatan Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2023;
2. Renja Kecamatan Palu Selatan Tahun 2024 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Perubahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022;
3. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Palu Selatan

Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 34);
28. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Tahun 2024 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman

perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Palu Selatan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Palu Selatan dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Palu Selatan.
3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan kewilayahan.
4. Secara faktual : menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Palu Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun substansi penyusunan Renja (Perubahan Rencana Kerja) menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 latar belakang,
- 1.2 landasan hukum,
- 1.3 maksud dan tujuan dan
- 1.4 sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Palu Selatan Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Palu Selatan,
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Palu Selatan,
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Selatan,
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD dan

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Rencana Kerja yang sesuai dengan Program dan Kegiatan Kecamatan Palu Selatan yang berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program kegiatan. Kaidah-kaidah pelaksanaannya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Selatan.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II KECAMATAN PALU SELATAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 dan capaian Renstra Kecamatan Palu Selatan sampai dengan TW II.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Palu Selatan selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing- masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk melakukan evaluasi anggaran di tahun 2024, Kecamatan Palu Selatan mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Wali Kota kepada Camat. Tugas Pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota Palu

Adapun fungsi dari Kecamatan Palu Selatan adalah :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan perda dan Perkada;

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Palu Selatan melaksanakan 4 (empat) program, 11 (sepuluh) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh dua) Sub. kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan.

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah
a. Pengadaan Mebel

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Jabatan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidaka Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

3.3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan

a. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga,warga dan kelompok masyarakat

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Kecamatan Palu Selatan sampai dengan tahun 2026 serta Rekapitulasi Realisasi sampai dengan TW II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Palu Selatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Palu Selatan sampai dengan tahun 2024 Kota Palu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	TARGE 2021	TARGE 2022	TARGE 2023	TARGE 2024	TARGE 2025	TARGE 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4							5	6	7	8 = 7 / 6 x 100	9=(5+7)	10=(9/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**B**												
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	24 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen						
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	0%	3 Dokumen	0.500 Dokumen
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	0%	3 Dokumen	0.500 Dokumen
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	0%	3 Dokumen	0.500 Dokumen
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	0%	3 Dokumen	0.500 Dokumen
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	100%												
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	415 Orang	83 Orang	83 Orang	83 Orang	83 Orang	83 Orang	83 Orang	249 Orang	83 Orang	80 Orang	96%	329 Orang	0.793 Orang
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	100%												
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	127 Paket	17 Paket	15 Paket	20 Paket	20 Paket	25 Paket	30 Paket	52 Paket	20 Paket	- Paket	0%	52 Paket	0.409 Paket
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	24 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	12 Paket	4 Paket	2 Paket	50%	14 Paket	0.583 Paket
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	12 Paket	3 Paket	2 Paket	67%	14 Paket	0.778 Paket
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	420 Dokumen	84 Dokumen	84 Dokumen	84 Dokumen	84 Dokumen	84 Dokumen	84 Dokumen	252 Dokumen	84 Dokumen	42 Dokumen	50%	294 Dokumen	0.700 Dokumen
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	66 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	33 Laporan	11 Laporan	6 Laporan	55%	28 Laporan	0.424 Laporan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	51 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	48 Laporan	0.471 Laporan

| | | |

| | | |

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa kegiatan diatas telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kebijakan Pimpinan yang mendukung pencapaian target.
2. Sarana dan prasaran yang memadai.
3. SDM Kecamatan mendukung dalam pelaksanakan program kegiatan di maksud.
4. Upaya percepatan realiasi fisik sesuai dengan rencana anggaran kegiatan / triwulan

Akan tetapi ada beberapa program kegiatan yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan antara lain :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana
2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Usulan kegiatan yang diusulkan oleh pihak kelurahan kurang memperhatikan kenaikan harga barang ataupun material terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan, sehingga hal menghampat pekerjaan dilapangan.
2. Karena adanya keterbatasan anggaran maka untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan akan terlaksana maksimal pada triwulan IV
3. Ketersediaan anggaran pada kas daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Selatan

Kecamatan Palu Selatan yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Palu Selatan dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026.

Kecamatan Palu Selatan merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Palu Selatan sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palu Selatan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palu Selatan. Indikator Kinerja Utama tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Palu. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Palu Selatan dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Selatan
Kota Palu

NO	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2024	2024	2021	2022	2024	2024	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1	Nilai evaluasi kinerja kecamatan		2600	2750	2850	2950	2650	3000	3000	3050	Agar setiap tahun nilai bertambah
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		80,00%	81,00%	82,00%	83,00%	81,00%	84,00%	84,80%	85,00%	

1.2. Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Palu Selatan yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Palu Selatan lima tahun mendatang adalah sebahai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Palu Selatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarkat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan palu selatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di

Kota Palu telah melaksanakan PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perizinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2023, permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut yaitu:

1) Belum maksimalnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan
2) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan perlu ditingkatkan, 4) Minimnya SDM Petugas Pelayanan.
3) Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang belum memadai secara maksimal

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan melibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-

kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Palu Selatan melalui kegiatan fisik maupun non fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan Lembaga masyarakat. Adapun lembaga pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangg (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Karang Taruna (KARTAR);
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
6. Lembaga Adat;
7. LINMAS;
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarkat; dan
9. Lembaga Lainnya.

Dengan adanya peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut diharapkan dapat bersingkronisasi dengan program dan kegiatan Kecamatan Palu Selatan dalam pencapaian 53 program pembangunan pemerintah Kota Palu. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Palu Selatan yang mendukung 53 Program program pembangunan pemerintah Kota Palu adalah

1. Bidang Ekonomi
    1) Peningkatan akses jalan bagi warga
2. Sosial Kependudukan
    1) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya
    2) Pemberian jaminan kesehatan bagi pekerja padat karya dan pengawas
3. Infrastruktur
    1) Pembangunan jalan dan drainase jalan lingkungan
4. Birokrasi & Keuangan
    1) Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer
    2) Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kecamatan
    3) Penyediaan sarana dan prasarana peralatan operasional kantor
5. Pelayanan Dasar
    1) Kesehatan
        - Palu Kota Sehat
        - BPJS gratis bagi warga tidak mampu
        - Tunjangan kesehatan
    2) Lingkungan
        - Palu Adipura
        - Palu Terang

2.4. Review Terhadap Rancangan Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) Rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah c) Perubahan Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Selatan berdasarkan RKPD Kota Palu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se-Kota Palu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Palu Selatan.

Review terhadap Rancangan_Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel. 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Palu**	**Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**9,423,535,698**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Palu**	**Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**9,423,535,698**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**20,412,250**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5 dokumen**	**20,412,250**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,432,250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,432,250
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,490,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,490,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,490,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,490,000
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase realisasi keuangan**	**100%**	**7,337,034,348**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase realisasi keuangan**	**95%**	**7,337,034,348**
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	83 orang/ bulan	7,337,034,348	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 orang/ bulan	7,337,034,348
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**399,878,700**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**399,878,700**
7	Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	5,692,000	Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	5,692,000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	81,309,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	81,309,700
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	103,096,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	103,096,000
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	46,350,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	46,350,000
11	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		17,600,000	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	17,600,000
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	25,625,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	25,625,000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		120,206,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	120,206,000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**		**4,500,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**		**4,500,000**
	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	4,500,000	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	4,500,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1,294,300,400**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1,294,300,400**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,728,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,728,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	81 Laporan	1,193,572,400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	81 Laporan	1,193,572,400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**367,410,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	**100%**	**367,410,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	352,920,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	352,920,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 unit	14,490,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	49 unit	14,490,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 unit	-

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kota Palu**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Baik**	**5,925,350**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Baik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Baik**	**5,925,350**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kota Palu**			**5,925,350**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kec. Palu Barat**	**Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat**	100%	**5,925,350**
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5,925,350	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5,925,350
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kota Palu**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100%**	**7,746,755,200**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kota Palu**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100%**	**7,746,755,200**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kota Palu**	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	**100%**	**6,201,630,400**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kota Palu**	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	**100%**	**6,201,630,400**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30 Lembaga Kemasyarakatan	47,266,500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan	30 Lembaga Kemasyarakatan	47,266,500
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 unit	1,176,450,700	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Saran dan Prasarana yang terbangun	29 unit	1,176,450,700
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas	4,977,913,200	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas	4,977,913,200

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kec. Palu Selatan**		**100%**	**1,509,124,800**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kec. Palu Selatan**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**1,509,124,800**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	30 Lembaga	1,509,124,800	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	30 Lembaga	1,509,124,800
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Kec. Palu Selatan**	Cakupan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan kelurahan		**36,000,000**	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Cakupan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan kelurahan		**36,000,000**
	Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga,warga dan kelompok masyarakat	**Kota Palu**	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarag dalam membangun kerjasama antar keluarga,warga,dan kelompok masyarakat	50 keluarga	36,000,000	Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga,warga dan kelompok masyarakat	Kota Palu	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarag dalam membangun kerjasama antar keluarga,warga,dan kelompok masyarakat	50 keluarga	36,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kec. Palu Selatan**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100%**	**101,681,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kota Palu**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100%**	**101,681,000**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec. Palu Selatan**	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**100%**	**101,681,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kota Palu**	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**100%**	**101,681,000**
	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	22 Orang	101,681,000	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	22 Orang	101,681,000
JUMLAH					**17,277,897,248**	**JUMLAH**				**17,277,897,248**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024, terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi - asosiasi, Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Selatan sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2024 terdapat dua usulan Program kegiatan. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.6:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Program Pemberdayaan Masyarakat	Kota Palu	Terbangunnya Sarana dan Prasarna dan Pemberdayaan Masyarakat dan Terlaksanannya Pemberdayaan Masyarakat di 5 Kelurahan	1,000,000,000	**Dau e-Mark**
JUMLAH				1,000,000,000	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALU SELATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kantor Kecamatan Palu Selatan maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan

6) Fasilitasi Kunjungan Tamu

7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

   1) Pengadaan Mebel

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub. Kegiatan yaitu :

   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan

   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik meliputi kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :

   1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :

      1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang meliputi Kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub. Kegiatan yaitu :

   1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

   2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

   3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu:

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

3. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan

1) Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat

4. Program Penyelenggaaraan Urusan Pemerintah Umum yang meliputi Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri darai 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :

1) Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional

Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Palu Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Palu periode 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsi. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Tahun 2024 yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

TABEL 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Palu Selatan Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Palu Selatan							13.606.611.409,00	17.277.898.248,00	18.409.317.810,00							0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							13.606.611.409,00	17.277.898.248,00	18.409.317.810,00							0,00	
	7	01				KECAMATAN							13.606.611.409,00	17.277.898.248,00	18.409.317.810,00							0,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD				B	B	8.554.871.159,00	9.403.536.698,00	9.520.047.360,00							0,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	20.413.250,00	20.413.250,00	20.413.250,00			-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	-		0,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.432.850,00	5.432.850,00	1.634.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	1 Dokumen	5.432.850,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.490.000,00	7.490.000,00	2.205.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	1 Dokumen	7.490.000,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	7.490.400,00	7.490.400,00	2.276.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	0 Dokumen	7.490.400,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	1 Laporan	0,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	6.950.368.809,00	7.337.034.348,00	7.337.034.348,00			-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	-	100 %		KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	6.950.368.809,00	7.337.034.348,00	7.430.528.360,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	83 Orang/bulan	7.430.528.360,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	0 Laporan	0,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	399.878.700,00	399.878.700,00	399.878.700,00			-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	100 %	0,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	6.950.368.809,00	7.337.034.348,00	7.430.528.360,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	83 Orang/bulan	7.430.528.360,00	KECAMATAN PALU SELATAN			
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																						
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	0 Laporan	0,00	KECAMATAN PALU SELATAN			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	399.878.700,00	399.878.700,00	399.878.700,00			-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	100 %	0,00	KECAMATAN PALU SELATAN			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.692.000,00	5.692.000,00	5.692.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	1 Paket	5.692.000,00	KECAMATAN PALU SELATAN			
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	81.309.700,00	81.309.700,00	63.001.700,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	1 Paket	81.309.700,00	KECAMATAN PALU SELATAN			
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																						
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	103.096.000,00	103.096.000,00	97.660.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	1 Paket	103.096.000,00	KECAMATAN PALU SELATAN			
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46.350.000,00	46.350.000,00	46.706.300,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	1 Paket	46.706.300,00	KECAMATAN PALU SELATAN			
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																						
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	1 Dokumen	17.600.000,00	KECAMATAN PALU SELATAN			
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																						

								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	25.625.000,00	25.625.000,00	25.625.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	1 Laporan	25.625.000,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	120.206.000,00	120.206.000,00	179.829.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	1 Laporan	179.829.000,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00			-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	100 %	0,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																				
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	7.000.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	1 Unit	15,000,000	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	812.300.400,00	1.274.300.400,00	1.274.300.400,00			-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	100 %	1.274.300.400,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Aparatut sipil negara																				
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.728.000,00	100.728.000,00	122.240.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	1 Laporan	122.240.000,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	711.572.400,00	1.173.572.400,00	1.177.050.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	1 Laporan	1.177.050.000,00	KECAMATAN PALU SELATAN

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	367.410.000,00	367.410.000,00	367.410.000,00			-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	100 %	367.410.000,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	352.920.000,00	352.920.000,00	330.120.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	1 Unit	330.120.000,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	14.490.000,00	14.490.000,00	10.880.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	1 Unit	14.490.000,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Aparatut sipil negara	1 Unit	0,00	KECAMATAN PALU SELATAN
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Baik	Baik	5.925.350,00	5.925.350,00	8.425.350,00							0,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	-			100 %	100 %	5.925.350,00	5.925.350,00	5.925.350,00			-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	100 %	15,000,000	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.925.350,00	5.925.350,00	8.425.350,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Msyarakat	1 Dokumen	8.425.350,00	KECAMATAN PALU SELATAN

3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kecamatan Mantikulore)				100 %	100 %	4.944.133.900,00	7.766.755.200,00	8.774.562.600,00							0,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			100 %	100 %	47.266.500,00	47.266.500,00	47.266.500,00			-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	100 %	50,000,000	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	47.266.500,00	47.266.500,00	47.266.500,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	1 Lembaga Kemasyarakatan	47.266.500,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	4.305.742.600,00	6.174.363.900,00	6.174.363.900,00			-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Lembaga kemasyarakatan	-	0,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	1.008.559.600,00	1.176.450.700,00	796.997.700,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Lembaga kemasyarakatan	10 Unit	1.176.450.700,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3.297.183.000,00	4.997.913.200,00	6.110.884.800,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	6.110.884.800,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			100 %	100 %	555.124.800,00	1.509.124.800,00	1.509.124.800,00			-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	-	100 %	1.509.124.800,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	555.124.800,00	1.509.124.800,00	1.781.613.600,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Lembaga kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.781.613.600,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	-	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00			-	-	Kelompk masyarakat	-	36.000.000,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50 keluarga	50 keluarga	36.000.000,00	36.000.000,00	37.800.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Kelompk masyarakat	50 keluarga	75,000,000	KECAMATAN PALU SELATAN
4	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Ulujadi)				100 %	100 %	101.681.000,00	101.681.000,00	106.282.500,00							0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 %	100 %	101.681.000,00	101.681.000,00	101.681.000,00			-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	100 %	0,00	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				22orang	10 Orang	101.681.000,00	101.681.000,00	106.282.500,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Masyarakat	22orang	106.282.500,00	KECAMATAN PALU SELATAN
												J U M L A H	**13.606.611.409,00**	**17.277.898.248,00**	**18.409.317.810,00**							**20,714,289,460**	

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Tahun 2024, dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Palu Selatan Kota Palu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Selatan Kota Palu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Palu Selatan. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Palu Selatan Kota Palu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Selatan Kota Palu tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Palu Selatan pada tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Palu Selatan, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Palu Selatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan MUSRENBANG tingkat Kecamatan dan Kelurahan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Palu harus memperhatikan / mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKPD, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota Palu, RPJMD Kota Palu 2021-2026, Rancangan RKPD Kota Palu Tahun 2024, serta Visi misi Kepala Daerah periode 2021-2026.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Selatan Tahun 2024 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya untuk dapat mendukung program-program pemerintah pusat maupun daerah.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 KECAMATAN MANTIKULORE

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat dengan RENJA adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Fungsi Rencana Kerja perangkat Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Mantikulore Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Mantikulore untuk periode 1 (Satu) Tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Mantikulore (RENSTRA) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Mantikulore selama kurun waktu 1 (satu) Tahun dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Palu.

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mantikulore periode 2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rancangan Awal Renja.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Mantikulore.
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Mantikulore.
4. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Mantikulore.
5. Penetapan Renja Kecamatan Mantikulore.

Perubahan Rencana Kerja menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada Tahun kedepan atau Tahun-Tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh Kecamatan Mantikulore, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional

dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII,dan IX yang ada pada RPJMN 2021-2026 dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawasi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Mantikulore disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Mantikulore Tahun 2024 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Mantikulore. Sejajar dengan itu, muatan Renja Kecamatan Mantikulore Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program Renstra Kecamatan Mantikulore. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan Tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Mantikulore selama 1 (satu) Tahun anggaran.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Mantikulore Tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. Renstra Kecamatan Mantikulore Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
2. Perubahan Renja Kecamatan Mantikulore Tahun 2024 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024;

3. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap Tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Mantikulore di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran

Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 34);

28. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mantikulore Tahun 2024 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Mantikulore untuk periode 1 (satu) Tahun ke depan.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mantikulore Tahun 2024 ini adalah, sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Mantikulore dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Mantikulore.
3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan kewilayahan.
4. Secara faktual : menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Mantikulore.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun substansi penyusunan Renja (Rencana Kerja) menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mantikulore Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Mantikulore

2.2 Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Mantikulore

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mantikulore

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Rencana Kerja yang sesuai dengan Program dan Kegiatan Kecamatan Mantikulore yang berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program kegiatan. Kaidah-kaidah pelaksanaannya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantikulore.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II KECAMATAN MANTIKULORE TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 dan capaian Renstra Kecamatan Mantikulore sampai dengan Triwulan II.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mantikulore adalah penjabaran perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Peubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Mantikulore ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Mantikulore selama Tahun 2024 dan perkiraan target Tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes),

manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk melakukan evaluasi anggaran di Tahun 2024, Kecamatan Mantikulore mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Wali Kota kepada Camat. Tugas Pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota Palu.

Adapun fungsi dari Kecamatan Mantikulore adalah :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan perda dan Perkada;

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Mantikulore melaksanakan 4 (Empat) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub. Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1 Penyelenggaan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c. Pemberdayaan Masyakat di Kelurahan

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a. Penyelanggaraan Lembaga Kemasyarakatan
b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Keluarga

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

4.1. Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Mantikulore Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Kecamatan Mantikulore sampai dengan Tahun 2026 serta Rekapitulasi Realisasi sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Mantikulore dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mantikulore sampai dengan Tahun 2023 Kota Palu

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 S/D 2026 Akhir Periode Rentsra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan S/D Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024						Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
							Target Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Renja OPD Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = (5+7)		10 = (9/4*100)	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan**					2673		-							
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	20	Dokumen												
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	3	Dokumen	60,000	%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	3	Dokumen	60,000	%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	3	Dokumen	60,000	%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	3	Dokumen	60,000	%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan**	100%													
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	510	Orang	101	Orang	103	Orang	101	Orang	98	%	202	Orang	39,608	Orang
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasi lKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	%	3	Laporan	60,000	Laporan

7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%																
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	118	Paket	44	Paket	44	Paket	22	Paket	50	%	66	Paket	55,932	Paket			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20	Paket	8	Paket	8	Paket	4	Paket	50	%	12	Paket	60,000	Paket			
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	118	Paket	44	Paket	44	Paket	22	Paket	50	%	66	Paket	55,932	Paket			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	20	Paket	8	Paket	4	Paket	4	Paket	100	%	12	Paket	60,000	Paket			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	6	Paket	3	Paket	3	Paket	100	%	9	Paket	60,000	Paket			
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	492	Dokumen	198	Dokumen	99	Dokumen	99	Dokumen	100	%	297	Dokumen	60,366	Dokumen			
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Laporan	22	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	100	%	33	Laporan	60,000	Laporan			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137	Laporan	54	Laporan	27	Laporan	27	Laporan	100	%	81	Laporan	59,124	Laporan			
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	100%																
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6	Unit	4	Unit	1	Unit	2	Unit	200	%	6	Unit	100,000	Unit			
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	48	Paket	20	Paket	20	Paket	10	Paket	50	%	30	Paket	62,500	Paket			
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	48	Paket	20	Paket	10	Paket	10	Paket	100	%	30	Paket	62,500	Paket			
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	48	Unit	20	Unit	10	Unit	10	Unit	100	%	30	Unit	62,500	Unit			
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48	Unit	20	Unit	10	Unit	10	Unit	100	%	30	Unit	62,500	Unit			
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%																
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	%	36	Laporan	60,000	Laporan			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	405	Laporan	162	Laporan	81	Laporan	81	Laporan	100	%	243	Laporan	60,000	Laporan			
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	100%																
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	112	Unit	44	Unit	22	Unit	22	Unit	100	%	66	Unit	58,929	Unit			
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	333	Unit	126	Unit	63	Unit	63	Unit	100	%	189	Unit	56,757	Unit			
7 01 02 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	193	Unit	70	Unit	35	Unit	35	Unit	100	%	105	Unit	54,404	Unit			

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK				84,50%		-									
7.01.02.2.01	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	100%															
7 01 02 2 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	%	3	Laporan	60,000	Laporan		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%				2673		-									
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	100%															
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Terlaksananya Musrenbang	200	Lembaga	80	Lembaga	40	Lembaga	40	Lembaga	100	%	120	Lembaga	60,000	Lembaga		
7.1.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	95	Unit	32	Unit	16	Unit	16	Unit	100	%	48	Unit	50,526	Unit		
7.1.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35	Pokmas	14	Pokmas	7	Pokmas	7	Pokmas	100	%	21	Pokmas	60,000	Pokmas		
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan**	100%															
7.1.02.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	200	Lembaga	80	Lembaga	40	Lembaga	40	Lembaga	100	%	120	Lembaga	60,000	Lembaga		
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Keluarga	500	Keluarga	200	Keluarga	100	Keluarga	40	Keluarga	40	%	240	Keluarga	48,000	Keluarga		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%				2673		-									
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100%															
7.1.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	182	Orang	80	Orang	24	Orang	-	Orang	-	%	80	Orang	43,956	Orang		

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa kegiatan diatas sudah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kebijakan Pimpinan yang mendukung pencapaian target.
2. Sarana dan prasaran yang memadai.
3. SDM Kecamatan mendukung dalam pelaksanakan program kegiatan di maksud.

Akan tetapi ada beberapa program kegiatan yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan antara lain :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya perbedaan volume pekerjaan yang mengakibatkan pembengkakan pada rencana anggaran biaya pada beberapa pekerjaan.
2. Tidak maksimalnya KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dalam menangani Pekerjaan yang dilimpahkan, sehingga sangat berpengaruh pada realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2024 di Kecamatan Mantikulore.
3. Karena adanya kebijakan mengenai pengelolaan pada kegiatan dana Alokasi Umum Tambahan (DAUT) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pada tahap ke II tidak dapat direalisasikan sebanyak 100 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mantikulore

Kecamatan Mantikulore yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Mantikulore dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026.

Kecamatan Mantikulore merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Mantikulore sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mantikulore Tahun 2021-2026 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mantikulore sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mantikulore. Indikator Kinerja Utama tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) Kecamatan Mantikulore Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dalam Rancangan RPJMD Perubahan Kota Palu Tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Palu. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Mantikulore dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MANTIKULORE

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RESTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				2022	2024	2024	2024	2024	2024	2024
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	x	xi	xi	xii
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84,00 %	84,50 %	85,00 %	85,74 %	-	Baik 84,76	Baik 84,77
2	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)			2573	2673	2773	-	-	2673	2773

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RESTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	x	xi	xi	xii
1	Nilai Reformasi Kecamatan Mantikulore			Baik 84,75	Baik 84,76	Baik 84,77	-	-	Baik 84,76	Baik 84,77
2	Nilai SAKIP Kecamatan Mantikulore			B	BB	A	-	-	BB	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Baik	Baik	Baik	-	-	Baik	Baik
4	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			20%	25%	30%	-	-	25%	30%
5	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			80%	82%	83%	-	-	82%	83%

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Mantikulore yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Mantikulore 5 (lima) Tahun mendatang adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mantikulore sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarkat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan ditingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Palu telah melaksanakan PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data Tahun 2020, permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut yaitu : 1) Masih rendahnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan, 2) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan perlu ditingkatkan, 3) Belum Terlaksananya Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan, 4) Minimnya SDM Petugas Pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan melibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat

melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga Kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Mantikulore melalui kegiatan fisik maupun non fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Adapun lembaga pemberdayaan Masyarakat yang di fasilitasi oleh Kecamatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangga (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Karang Taruna (KARTAR);
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
6. Lembaga Adat;
7. LINMAS;
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat; dan
9. Lembaga Lainnya.

Dengan adanya peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut diharapkan dapat bersingkronisasi dengan program dan kegiatan Kecamatan Mantikulore dalam pencapaian 53 program

pembangunan pemerintah Kota Palu. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Mantikulore yang mendukung 53 Program program pembangunan pemerintah Kota Palu adalah :

1. Bidang Ekonomi

1) Penguatan UMKM

2. Sosial Kependudukan

1) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya
2) Palu Religi
3) Event olahraga tahunan Kota Palu

3. Infrastruktur

1) Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu
2) Ruang terbuka hijau/public area per-Kecamatan

4. Birokrasi & Keuangan

1) Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer
2) Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan

5. Pelayanan Dasar

1) Kesehatan

1) Palu Kota Sehat
2) BPJS gratis bagi warga tidak mampu
3) Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah

2) Lingkungan

4) Palu Adipura
5) Palu Terang

2.4. Review Terhadap Rancangan Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu Tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) Rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana kerja Kecamatan Mantikulore berdasarkan RKPD Kota Palu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se-Kota Palu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Mantikulore.

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Palu				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Palu				
a)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.990.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.990.400	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	14.528.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	14.528.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	14.528.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	14.528.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	8.746.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	8.746.500	
b)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu				
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	..... Orang	9.063.158.972	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	..... Orang	9.063.158.972	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasi lKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.078.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasi lKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.078.000	

c)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu				
7	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12.129.600	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12.129.600	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	258.066.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	258.066.400	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	3.495.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	3.495.800	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Paket	330.946.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Paket	330.946.200	
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	61.836.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	61.836.000	
12	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	27.000.000	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	27.000.000	
13	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	77.330.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	77.330.000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	321.375.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	321.375.000	
d)	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Palu				Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Palu				
15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	-	
16	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	107.648.000	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	107.648.000	
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	10.800.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	10.800.000	
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	5.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	5.000.000	
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30.949.600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30.949.600	

e)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Palu				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Palu				
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	307.776.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	307.776.000	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1.126.438.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1.126.438.400	
f)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Palu				Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Palu				
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	511.240.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	511.240.000	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	38.460.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	38.460.000	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	18.300.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	18.300.000	
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
g)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja					
25	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	23.356.800	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	23.356.800	

C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kota Palu				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kota Palu				
h)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Palu				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Palu				
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Terlaksananya	Lembaga	138.066.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Terlaksananya	Lembaga	138.066.000	
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1.131.324.761	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1.131.324.761	
28	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	Pokmas	6.568.775.600	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	Pokmas	6.568.775.600	
i)	Pemberdayaan Lembaga	Kota Palu				Pemberdayaan Lembaga	Kota Palu				
29	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga	2.363.361.600	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga	2.363.361.600	
30	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Keluarga	Kota Palu	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Keluarga	Keluarga	132.859.400	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Keluarga	Kota Palu	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Keluarga	Keluarga	132.859.400	
D.	Program Penyelenggaraan Urusan	Kota Palu				Program Penyelenggaraan Urusan	Kota Palu				
j)	Penyelenggaraan Urusan	Kota Palu				Penyelenggaraan Urusan	Kota Palu				
31	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	232.450.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	232.450.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024, terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi - asosiasi, Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mantikulore sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2022 terdapat satu usulan Program kegiatan. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Program Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Mantikulore	Terbangunnya Sarana dan Prasarna dan Pemberdayaan Masyarakat	1.600.000.000	

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MANTIKULORE

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kantor Kecamatan Mantikulore maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
7) Fasilitas Kunjungan Tamu
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1) Peningkatan Efektifitass Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, meliputi kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
    2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    3) Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
    1) Pembinaan Kerukunan Antarsuku Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.

Kecamatan Mantikulore dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Palu Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Palu periode 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsi. Rencana Kerja

Kecematan Mantikulore Tahun 2024 yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya dapat dilihat pada Tabel TC. 33 dibawah ini.

Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEC. MANTIKULORE TAHUN 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 6	10 = 9/6	11
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**12.370.820.872**		**12.164.982.328**			
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**100%**	**48.792.900**		**69.592.900**	**20.800.000**		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	10.990.400	1 Dokumen	10.990.400	-	-	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	14.528.000	1 Dokumen	22.528.000	8.000.000	0,551	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	14.528.000	1 Dokumen	22.528.000	8.000.000	0,551	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Laporan	8.746.500	1 Laporan	13.546.500	4.800.000	0,549	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**100%**	**9.073.236.972**	**100%**	**9.007.316.728**			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	101 Orang	9.063.158.972	101 Orang	8.993.240.728	- 69.918.244	- 0,008	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasi lKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	10.078.000	1 Laporan	14.076.000	3.998.000	0,397	

7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**100%**	**1.092.179.000**	**100%**	**1.063.279.000**			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	5 Jenis	12.129.600	5 Jenis	12.129.600	-	-	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Palu	5 Jenis	258.066.400	5 Jenis	141.251.400	- 116.815.000	- 0,453	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Palu	5 Jenis	3.495.800	5 Jenis	3.495.800	-	-	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Kota Palu	5 Jenis	330.946.200	5 Jenis	293.446.200	- 37.500.000	- 0,113	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 Paket	61.836.000	3 Paket	60.736.000	- 1.100.000	- 0,018	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Palu	138 Dokumen	27.000.000	138 Dokumen	27.000.000	-	-	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 Laporan	77.330.000	11 Laporan	77.330.000	-	-	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	19 Laporan	321.375.000	19 Laporan	447.890.000	126.515.000	0,394	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**154.397.600**	**100%**	**32.744.300**			
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	24 Unit	-	24 Unit	-	-	#DIV/0!	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	50 Unit	107.648.000	50 Unit	12.648.000	- 95.000.000	- 0,883	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Palu	1 Unit	10.800.000	1 Unit	8.096.300	- 2.703.700	- 0,250	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Palu	1 Unit	5.000.000	1 Unit	-	- 5.000.000	- 1,000	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	9 Unit	30.949.600	9 Unit	12.000.000	- 18.949.600	- 0,612	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**1.434.214.400**	**100%**	**1.423.809.400**			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	36 Laporan	307.776.000	36 Laporan	204.096.000	- 103.680.000	- 0,337	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	48 Laporan	1.126.438.400	48 Laporan	1.219.713.400	93.275.000	0,083	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**568.000.000**	**100%**	**568.240.000**			
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	25 Unit	511.240.000	25 Unit	511.480.000	240.000	0,000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Palu	78 Unit	38.460.000	78 Unit	38.460.000	-	-	
7 01 02 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	46 Unit	18.300.000	46 Unit	18.300.000	-	-	

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik**	**N/A**	**100%**	**23.356.800**	**100%**	**23.356.800**			
7.01.02.2.01	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat**		**Jenis**	**23.356.800**	**Jenis**	**23.356.800**			
7 01 02 2 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Terlaksananya Musrenbang)	Kota Palu	1 Laporan	23.356.800	1 Laporan	23.356.800	-	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**100%**	**10.201.527.961**	**100%**	**11.159.459.761**			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**100%**	**7.838.166.361**	**100%**	**8.193.786.961**			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Terlaksananya Musrenbang)	Kota Palu	40 Lembaga Kemasyarakatan	138.066.000	40 Lembaga Kemasyarakatan	138.066.000	-	-	
7.1.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	26 Unit	1.131.324.761	26 Unit	1.131.324.761	-	-	
7.1.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	10 Pokmas	6.568.775.600	10 Pokmas	6.924.396.200	355.620.600	0,054	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**100%**	**2.363.361.600**	**100%**	**2.965.672.800**			
7.1.02.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	40 Lembaga Kemasyarakatan	2.363.361.600	40 Lembaga Kemasyarakatan	2.965.672.800	602.311.200	0,255	
7.1.02.2.03.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mambangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mambangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Keluarga	Kota Palu	100 Kelauarga	132.859.400	100 Kelauarga	132.859.400	-	-	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**100%**	**232.450.000**	**100%**	**232.450.000**			
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**100%**	**232.450.000**	**100%**	**232.450.000**			
7.1.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 orang	232.450.000	54 orang	232.450.000	-	-	
JUMLAH					**22.828.155.633**		**23.580.248.889**			

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantikulore Tahun 2024, dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Mantikulore sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantikulore selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Mantikulore. Perubahan Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Mantikulore sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Mantikulore Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Mantikulore untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2024, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Mantikulore pada Tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Mantikulore, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan

misi Kecamatan Mantikulore diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Mantikulore, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan MUSRENBANG tingkat Kecamatan dan Kelurahan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Palu harus memperhatikan / mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKPD, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota Palu, Rancangan RPJMD Kota Palu 2021-2026, Rancangan RKPD Kota Palu Tahun 2024, serta Visi misi Kepala Daerah periode 2021-2024.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Mantikulore Tahun 2024 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada Tahun berikutnya untuk dapat mendukung program-program Pemerintah Pusat maupun Daerah.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 KECAMATAN PALU BARAT

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya di singkat dengan RENJA adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Fungsi Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Palu Barat untuk periode 1 (Satu) tahun kedepan (Perencanaan Jangka Menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Palu Barat (RENSTRA) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Palu Barat selama kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Palu.

Adapun proses penyusunan Renja Kecamatan Palu Barat periode 2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Palu Barat.
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Palu Barat.
4. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Palu Barat.
5. Penetapan Renja Kecamatan Palu Barat.

Perubahan Rencana Kerja menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh Kecamatan Palu Barat, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni

menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII,dan IX yang ada pada RPJMN 2021-2026. Dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawasi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Palu Barat disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2024 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Palu Barat. Sejajar dengan itu, muatan Renja Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program Renstra Kecamatan Palu Barat. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Palu Barat Kota Palu selama satu tahun anggaran.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. Renstra Kecamatan Palu Barat Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
2. Renja Kecamatan Palu Barat Tahun 2024 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Perubahan Rencana Kerja

Tahunan (RKT) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022;

3. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Palu Barat Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 34);
28. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Acara Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15;)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2024 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Palu Barat untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Palu Barat dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Palu Barat.
3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan kewilayahan.
4. Secara faktual : menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Palu Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun substansi penyusunan Renja (Perubahan Rencana Kerja) menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 dan capaian Renstra Kecamatan Palu Barat sampai dengan TW II.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Barat

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II KECAMATAN PALU BARAT TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 dan capaian Renstra Kecamatan Palu Barat sampai dengan TW II.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Palu Barat selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan

(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing- masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk melakukan evaluasi anggaran di tahun 2023, Kecamatan Palu Barat mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Wali Kota kepada Camat. Tugas Pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota Palu

Adapun fungsi dari Kecamatan Palu Barat adalah :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Palu Barat melaksanakan 4 (empat) program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub. kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    1. 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan.
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah
a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pengadaan Mebel
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Jabatan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidaka Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

3.3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

a. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Kecamatan Palu Barat sampai dengan tahun 2026 serta Rekapitulasi Realisasi sampai dengan TW II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Perrkiraan Realisasi Capaain Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6 x 100	9=(5+7)	10=(9/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**B**						
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	20 Dokumen						
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	**2** Dokumen	1 Dokumen	**1** Dokumen	100%	3 Dokumen	60,00 %
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	**2** Dokumen	1 Dokumen	**1** Dokumen	100%	2 Dokumen	40,00 %
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	**2** Dokumen	1 Dokumen	**1** Dokumen	100%	2 Dokumen	40,00 %
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	**2** Dokumen	1 Dokumen	**1** Dokumen	100%	2 Dokumen	40,00 %
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	100%						
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.636 Org/Bln	1.440 Org/Bln	732 Org/Bln	**366** Org/Bln	50%	1.806 Org/Bln	49,67 %
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasi lKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	60,00 %

7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	100%						
7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	- Paket	1 Paket	Paket	0%	Paket	- %
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	101 Paket	41 Paket	5 Paket	- Paket	0%	- Paket	- %
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	26 Paket	8 Paket	6 Paket	3 Paket	50%	11 Paket	42,31 %
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	6 Paket	3 Paket	2 Paket	50%	8 Paket	50,00 %
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	477 Dokumen	195 Dokumen	84 Dokumen	42 Dokumen	50%	237 Dokumen	49,69 %
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55 Laporan	22 Laporan	11 Laporan	6 Laporan	50%	28 Laporan	50,00 %
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124 Laporan	39 Laporan	27 Laporan	14 Laporan	50%	53 Laporan	42,34 %
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	100%					1 Tahun	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	50%	3 Unit	50,00 %
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Paket	10 Paket	3 Paket	2 Paket	50%	12 Paket	46,00 %
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 Unit	11 Unit	3 Unit	2 Unit	50%	13 Unit	36,76 %
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%					1 Tahun	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	30 Laporan	50,00 %
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	404 Laporan	162 Laporan	80 Laporan	40 Laporan	50%	202 Laporan	50,00 %

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	100%						
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	103 Unit	37 Unit	13 Unit	7 Unit	50%	44 Unit	42,23 %
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	331 Unit	115 Unit	61 Unit	31 Unit	50%	146 Unit	43,96 %
7 01 02 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	189 Unit	63 Unit	31 Unit	16 Unit	50%	79 Unit	41,53 %
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Baik**						
7.01.02.2.01	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	100%						
7 01 02 2 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50%	3 Laporan	50,00 %
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100%**						
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%						
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 Lembaga	60 Lembaga	30 Lembaga	15 Lembaga	50%	75 Lembaga	50,00 %
7.1.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	1913 Unit	1.655 Unit	86 Unit	Unit	0%	Unit	- %
7.1.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas	14 Pokmas	7 Pokmas	4 Pokmas	50%	18 Pokmas	50,00 %

7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%						
7.1.02.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	150 Lembaga	60 Lembaga	30 Lembaga	15 Lembaga	50%	75 Lembaga	50,00 Lembaga
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakata	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok	150 Keluarga	- Keluarga	50 Keluarga	25 Keluarga	50%	25 Keluarga	16,67 Keluarga
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100%**						
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%						
7.1.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	176 Orang	44 Orang	24 Orang	12 Orang	50%	56 Orang	31,82 Orang

Berdasarkan Tabel diatas di Tahun 2024 Kecamatan Palu Barat terdapat ketambahan Satu Kegiatan dan Dua Sub Kegiatan. Yang terdiri atas

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terdapat dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Kegiatan Baru Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Terkait dengan pencapaian target sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, bahwa kegiatan diatas sebagian besar sudah mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kebijakan Pimpinan yang mendukung pencapaian target.
2. Sarana dan prasaran yang memadai.
3. SDM Kecamatan mendukung dalam pelaksanakan program kegiatan di maksud.

Adapun terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai terget dikarenakan kegiatan tersebut kami alihkan dalam Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Barat

Kecamatan Palu Barat yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan

utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Palu Barat dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026.

Kecamatan Palu Barat merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Palu Barat sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palu Barat Tahun 2021-2026 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palu Barat sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Palu Barat. Indikator Kinerja Utama tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Palu. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Palu Barat dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Barat
Kota Palu

NO	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
[1]	[2]	[4]	[6]	[7]	[8]		[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Palu Barat		B	B	B		B	B	B		
2	Nilai SAKIP Kecamatan Palu Barat		B	BB	A		B	BB	BB		
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik	Baik	Baik		Baik	Sangat Baik	Baik		
4	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan		20%	20%	36%		20%	20%	20%		
5	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan		95%	95%	97%		95%	97%	95%		

2.3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Palu Barat yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Palu Barat lima tahun mendatang adalah sebahai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Palu Barat sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarkat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di

tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Palu telah melaksanakan PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perizinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2022, permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut yaitu: 1) Masih rendahnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan, 2) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan perlu ditingkatkan, 3) Belum Terlaksananya Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan, 4) Minimnya SDM Petugas Pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan melibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Palu Barat melalui kegiatan fisik maupun non fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan

melibatkan Lembaga masyarakat. Adapun lembaga pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangg (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Karang Taruna (KARTAR);
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
6. Lembaga Adat;
7. LINMAS;
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarkat; dan
9. Lembaga Lainnya.

Dengan adanya peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut diharapkan dapat bersingkronisasi dengan program dan kegiatan Kecamatan Palu Barat dalam pencapaian 53 program pembangunan pemerintah Kota Palu. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Palu Barat yang mendukung 53 Program program pembangunan pemerintah Kota Palu adalah :

1. Bidang Ekonomi
    1) Penguatan UMKM
2. Sosial Kependudukan
    1) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya
    2) Palu Religi
    3) Event olahraga tahunan Kota Palu

3. Infrastruktur
    1) Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu
    2) Ruang terbuka hijau/public area per-kecamatan
4. Birokrasi & Keuangan
    1) Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer
    2) Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan
5. Pelayanan Dasar
    1) Kesehatan
        - Palu Kota Sehat
        - BPJS gratis bagi warga tidak mampu
        - Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah
    2) Lingkungan
        - Palu Adipura
        - Palu Terang

2.4. Review Terhadap Rancangan Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) Rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah c) Perubahan Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Barat berdasarkan RKPD Kota Palu sifatnya sebagai pendukung

dari pelaksanaan Renja OPD se-Kota Palu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Palu Barat.

Review terhadap Rancangan_Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kecamatan Palu Barat				**15.452.560.540**	**Kecamatan Palu Barat**				**15.950.926.675**
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Palu	Nilai SAKIP OPD	B	8.499.781.356	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Palu	Nilai SAKIP OPD	B	8.724.064.824
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	33.130.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	38.350.200
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.222.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.222.800
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	11.383.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	11.383.500
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	11.783.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	11.783.500
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	4.740.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	9.960.400
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	Persentase realisasi keuangan	95%	6.120.601.522	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	Persentase realisasi keuangan	95%	6.069.601.522
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang/ bulan	6.115.213.322	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang/ bulan	6.064.213.322
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.388.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.388.200

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	585.791.950	Administrasi Umum Perangkat Daera	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	912.812.850
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 paket	36.531.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	59.698.900
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	240.979.350	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	247.955.650
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	41.528.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	41.528.300
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	99 dokumen	16.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 dokumen	12.600.000
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 laporan	26.439.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 laporan	29.694.000
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 laporan	221.714.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	521.336.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100%	42.301.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100%	108.620.200
01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	25.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	22.000.000
02	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	10.600.000	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	77.920.200

03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	6.701.800	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	8.700.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.304.797.084	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.192.116.252
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	121.959.084	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	127.338.252
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	81 laporan	1.182.838.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.064.778.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	413.158.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pe	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	402.563.800
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	389.760.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	382.540.000
02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 unit	12.943.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 unit	12.943.800
03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 unit	10.455.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 unit	7.080.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kota Palu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	17.208.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kota Palu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	17.208.500
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Kota Palu	Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat	100%	17.208.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintaha	Kota Palu	Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat	100%	17.208.500
01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	17.208.500	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	17.208.500

III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kota Palu	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	6.776.770.684	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kota Palu	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	7.006.803.351
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Palu	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	5.441.899.384	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Palu	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	5.475.282.051
01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30 lembaga kemasyarakatan	55.350.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30 lembaga kemasyarakata n	55.350.000
02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	646 unit	1.294.091.334	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	646 unit	879.975.701
03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 pokmas	4.092.458.050	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 pokmas	4.539.956.350
9	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palu	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	1.215.024.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palu	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	1.411.674.000
01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	30 lembaga kemasyarakatan	1.215.024.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	30 lembaga kemasyarakatan	1.411.674.000
10	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Palu	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	119.847.300	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kel	Kota Palu	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	119.847.300
01	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 keluarga	119.847.300	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 keluarga	119.847.300

IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kota Palu	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	158.800.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kota Palu	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	202.850.000
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Palu	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	158.800.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Palu	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	202.850.000
01	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	54 orang	158.800.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	54 orang	202.850.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023, terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi - asosiasi, Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Barat sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2023, Usulan Musrembang termuat dalam Tabel 2.6 dengan rincian :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	**Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Kota Palu**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan**		
	a Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Palu	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan		
	I Pembangunan Sarana dan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	1 Paket	Usulan Musrembang 2023
	1 Pembuatan Plat Deker Kecamatan Palu Barat	Kota Palu		1 Paket	Siranindi
	II Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Kota Palu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Paket	Usulan Musrembang 2023
	1 Pengadaan Al-Quran			1 Paket	Siranindi
	2 Pengadaan Buku Iqra Dan Al-Quran TPA			1 Paket	Kamonji

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALU BARAT

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kantor Kecamatan Palu Barat maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3. Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan
   6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Pengadaan Mebel
   2) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan
   3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub. Kegiatan yaitu :

    1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan

    2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

    3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik meliputi kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :

    1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :

        1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang meliputi Kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub. Kegiatan yaitu :

    1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

    2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

    3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu:

   1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, terdiri atas 1 (satu) Sub. Kegiatan

   1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakata

4. Program Penyelenggaaraan Urusan Pemerintah Umum yang meliputi Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri darai 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :

   1) Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional

Kecamatan Palu Barat Kota Palu dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Palu Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Palu periode 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsi. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2024 yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Palu Barat Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Bertambah / Berkurang		Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
				Target	Rp	Target	Rp	Rp	%	
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.00	**Kecamatan Palu Barat**				**15.452.560.540**		**15.950.926.675**	**-498.366.135**	**0,00%**	
7 1 7.01.0.00.0.00.04.00 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	8.499.781.356	B	8.724.064.824	-224.283.468	0,00%	
7 1 7.01.0.00.0.00.04.00 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	33.130.200	4 dokumen	38.350.200	-5.220.000	0,00%	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.00 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	5.222.800	1 Dokumen	5.222.800	0	0,00%	
7 1 7.01.0.00.0.00.04.00 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	11.383.500	1 dokumen	11.383.500	0	0,00%	
7 1 7.01.0.00.0.00.04.00 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	11.783.500	1 dokumen	11.783.500	0	0,00%	
7 1 7.01.0.00.0.00.04.00 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	4.740.400	1 laporan	9.960.400	-5.220.000	0,00%	

7 01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	6.120.601.522	95%	6.069.601.522	51.000.000	0,00%	
7 01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	61 orang/ bulan	6.115.213.322	61 orang/ bulan	6.064.213.322	51.000.000	0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	5.388.200	1 Laporan	5.388.200	0	0,00%	
7 01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	585.791.950	100%	912.812.850	-327.020.900	0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Kota Palu**	1 paket	2.500.000			2.500.000	0,00%	
7 01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	22 paket	36.531.300	7 paket	59.698.900	-23.167.600	0,00%	
7 01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	240.979.350	4 paket	247.955.650	-6.976.300	0,00%	
7 01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	41.528.300	3 paket	41.528.300	0	0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	99 dokumen	16.100.000	84 dokumen	12.600.000	3.500.000	0,00%	
7 01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	26.439.000	11 laporan	29.694.000	-3.255.000	0,00%	
7 01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	27 laporan	221.714.000	52	521.336.000	-299.622.000	0,00%	

7 01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	42.301.800	100%	108.620.200	-66.318.400	0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	25.000.000	1 unit	22.000.000	3.000.000	0,00%	
7 01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	2 paket	10.600.000	1 paket	77.920.200	-67.320.200	0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	3 unit	6.701.800	3 unit	8.700.000	-1.998.200	0,00%	
7 01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.304.797.084	100%	1.192.116.252	112.680.832	0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	121.959.084	12 laporan	127.338.252	-5.379.168	0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	81 laporan	1.182.838.000	12 laporan	1.064.778.000	118.060.000	0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penu	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	413.158.800	100%	402.563.800	10.595.000	0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	22 unit	389.760.000	22 unit	382.540.000	7.220.000	0,00%	
7 01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	63 unit	12.943.800	63 unit	12.943.800	0	0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	35 unit	10.455.000	34 unit	7.080.000	3.375.000	0,00%	

7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Palu	Baik	17.208.500	Baik	17.208.500		0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan y	Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat	Kota Palu	100%	17.208.500	100%	17.208.500		0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	2	2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 laporan	17.208.500	1 laporan	17.208.500		0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kota Palu	100%	6.776.770.684	100%	7.006.803.351		0,00%	
7 01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Palu	100%	5.441.899.384	100%	5.475.282.051		0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	3	2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	baga kemasyara	55.350.000	30 lembaga kemasyarakatan	55.350.000		0,00%	
7 01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	646 unit	1.294.091.334	646 unit	879.975.701		0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	3	2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	7 pokmas	4.092.458.050	7 pokmas	4.539.956.350		0,00%	
7 01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palu	100%	1.215.024.000	100%	1.411.674.000		0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	3	2.03 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	baga kemasyara	1.215.024.000	30 lembaga kemasyarakatan	1.411.674.000		0,00%	

7 1	7.01.7.01.7.01.01.00	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kelua	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	100%	119.847.300	100%	119.847.300		0,00%	
7 1	7.01.7.01.7.01.01.00	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	50 keluarga	119.847.300	50 keluarga	119.847.300		0,00%	
7 01	7.01.0.00.0.00.04.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Palu	100%	158.800.000	100%	202.850.000		0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Palu	100%	158.800.000	100%	202.850.000		0,00%	
7 1	7.01.0.00.0.00.04.00	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 orang	158.800.000	54 orang	202.850.000		78,28%	

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2024, dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Palu Barat Kota Palu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat Kota Palu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Palu Barat. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Palu Barat Kota Palu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat Kota Palu tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Palu Barat Kota Palu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Palu Barat pada tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Palu Barat, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Palu Barat diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Palu Barat Kota Palu, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan MUSRENBANG tingkat Kecamatan dan Kelurahan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Palu harus memperhatikan / mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKPD, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota Palu, RPJMD Kota Palu 2021-2026, Rancangan RKPD Kota Palu Tahun 2024, serta Visi misi Kepala Daerah periode 2021-2026.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Barat Tahun 2024 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya untuk dapat mendukung program-program pemerintah pusat maupun daerah.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

KECAMATAN PALU TIMUR

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya di singkat dengan RENJA adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Fungsi Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Ulujadi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Ulujadi untuk periode 1 (Satu) tahun kedepan (Perencanaan Jangka Menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Ulujadi (RENSTRA) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Palu Timur selama kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Palu.

Adapun proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Palu Timur periode 2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Palu Timur.
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Palu Timur.
4. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Palu Timur.
5. Penetapan Renja Kecamatan Palu Timur.

Perubahan Rencana Kerja menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh Kecamatan Ulujadi, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII,dan IX yang ada pada RPJMN 2021-2026. Dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawasi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Palu Timur disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Perubahan Rencana kerja (P-Renja) Kecamatan Ulujadi Kota Palu Tahun 2024 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan

dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Ulujadi. Sejajar dengan itu, muatan Renja Kecamatan Ulujadi Kota Palu Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program Renstra Kecamatan Ulujadi. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) Kecamatan Palu Timur Kota Palu selama satu tahun anggaran.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Ulujadi Kota Palu Tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. Renstra Kecamatan Palu Timur Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
2. Renja Kecamatan Palu Timur Tahun 2024 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2023;
3. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Ulujadi Kota

Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran

Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 34);
28. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Timur Kota Palu Tahun 2024 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Palu Timur untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Timur Kota Palu Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Palu Timur dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.

2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Palu Timur.
3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan kewilayahan.
4. Secara faktual : menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Palu Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun substansi penyusunan Perubahan Renja (Perubahan Rencana Kerja) menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Kecamatan Palu Timur.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Timur
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Palu Timur
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja yang sesuai dengan Program dan Kegiatan Kecamatan Palu Timur yang berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024

BAB V PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program kegiatan. Kaidah-kaidah pelaksanaannya, serta rencana tindak lanjkut yang akan dilaksanakan melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Timur.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II KECAMATAN PALU TIMUR TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Palu Timur sampai dengan Triwulan II

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Timur adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Palu Timur ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Palu Timur selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes),

manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk melakukan evaluasi anggaran di tahun 2024, Kecamatan Palu Timur mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Wali Kota kepada Camat. Tugas Pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota Palu

Adapun fungsi dari Kecamatan Palu Timur adalah :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan perda dan Perkada;

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Palu Timur melaksanakan 4 (Empat) program, 12 (Sepuluh) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh dua) Sub. kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

3.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

a. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Ulujadi Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Kecamatan Ulujadi sampai dengan tahun 2026 serta Rekapitulasi Realisasi Keuangan Kecamatan Ulujadi Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Palu Timur dan Pencapaian Renstra Kecamatan
Palu Timur sampai dengan tahun 2024 Kota Palu

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 S/D 2026 Akhir Periode Rentsra PD)	Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	5 Tahun	1 Tahun		
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		5 Tahun	1 Tahun		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Tahun	1 Tahun		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Tahun	1 Tahun		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Tahun	1 Tahun		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Tahun	1 Tahun		
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasi lKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangangan Akhir Tahun SKPD	5 Tahun	1 Tahun		

7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		5	Tahun	1	Tahun		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5	Tahun	1	Tahun		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasi lKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangangan Akhir Tahun SKPD	5	Tahun	1	Tahun		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5	Tahun	1	Tahun		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5	Tahun	1	Tahun		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Tahun	1	Tahun		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Tahun	1	Tahun		
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		5	Tahun	1	Tahun		
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	Tahun	1	Tahun		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Tahun	1	Tahun		
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Tahun	1	Tahun		
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		5	Tahun	1	Tahun		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Tahun	1	Tahun		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Tahun	1	Tahun		
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		5	Tahun	1	Tahun		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Tahun	1	Tahun		

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	Tahun	1	Tahun		
7 01 02 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Tahun	1	Tahun		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik**	5	Tahun	1	Tahun		
7.01.02.2.01	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat**	5	Tahun	1	Tahun		
7 01 02 2 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Tahun	1	Tahun		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		5	Tahun	1	Tahun		
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		5	Tahun	1	Tahun		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan	5	Tahun	1	Tahun		
7.1.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Saran dan Prasarana yang terbangun	5	Tahun	1	Tahun		
7.1.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Tahun	1	Tahun		
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		5	Tahun	1	Tahun		
7.1.02.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Tahun	1	Tahun		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		5	Tahun	1	Tahun		
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		5	Tahun	1	Tahun		
7.1.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5	Tahun	1	Tahun		

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa kegiatan diatas sudah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kebijakan Pimpinan yang mendukung pencapaian target.
2. Sarana dan prasaran yang memadai.
3. SDM Kecamatan mendukung dalam pelaksanakan program kegiatan di maksud.

Akan tetapi ada beberapa program kegiatan yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan antara lain :

1. Pekan Olah Raga dan Seni
2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya perbedaan volume pekerjaan yang mengakibatkan pembengkakan pada remncana anggran biaya pada beberapa pekerjaan.
2. Tidak cukupnya waktu pelaksanaan pekerjaan yang mendekati akhir tahun, sehingga tidak dapat dilaksanakan
3. Karena adanya kebijakan mengenai pengelolaan pada kegiatan dana Alokasi Umum Tambahan (DAUT) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pada tahap ke II tidak dapat direalisasikan sebanyak 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Timur

Kecamatan Ulujadi yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Ulujadi dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026.

Kecamatan Ulujadi merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Palu Timur sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palu Timur Tahun 2021-2026 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palu Timur sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ulujadi. Indikator Kinerja Utama tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Palu Timur Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dalam Rancangan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Palu. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Palu Timur dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Timur

Kota Palu

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RESTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai Reformasi Kecamatan Palu Timur			Baik 84,75	Baik 84,76	Baik 84,77	-	-	Baik 84,76	Baik 84,77
2	Nilai SAKIP Kecamatan Palu Timur			B	BB	A	-	-	BB	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Baik	Baik	Baik	-	-	Baik	Baik
4	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			20%	25%	30%	-	-	25%	30%
5	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			80%	82%	83%	-	-	82%	83%

2.3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Ulujadi yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Palu Timur lima tahun mendatang adalah sebahai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ulujadi sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarkat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Palu telah melaksanakan PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan

perizinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2021, permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut yaitu: 1) Masih rendahnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan, 2) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan perlu ditingkatkan, 3) Belum Terlaksananya Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan, 4) Minimnya SDM Petugas Pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan melibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Ulujadi melalui kegiatan fisik maupun non fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Adapun lembaga pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi boleh Kecamatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangg (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Karang Taruna (KARTAR);
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
6. Lembaga Adat;
7. LINMAS;
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarkat; dan
9. Lembaga Lainnya
10. Lembaga lainnya.

Dengan adanya peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut diharapkan dapat bersingkronisasi dengan program dan kegiatan Kecamatan Palu Timur dalam pencapaian 53 program pembangunan pemerintah Kota Palu. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Palu Timur yang mendukung 53 Program program pembangunan pemerintah Kota Palu adalah :

1. Bidang Ekonomi
    1) Penguatan UMKM
2. Sosial Kependudukan
    1) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya
    2) Palu Religi
    3) Event olahraga tahunan Kota Palu
3. Infrastruktur
    1) Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu
    2) Ruang terbuka hijau/public area per-Kecamatan

4. Birokrasi & Keuangan
    1) Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer
    2) Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kecamatan
5. Pelayanan Dasar
    1) Kesehatan
        1) Palu Kota Sehat
        2) BPJS gratis bagi warga tidak mampu
        3) Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah
    2) Lingkungan
        4) Palu Adipura
        5) Palu Terang

2.4. Review Terhadap Rancangan Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) Rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Perubahan Rencana kerja Kecamatan Palu Timur berdasarkan RKPD Kota Palu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se-Kota Palu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Palu Timur.

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.3 di bawah ini.

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANGCANGAN AKHIR RKPD 2024

NO	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program /Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
1	**-5**	**-7**	**-6**	**-8**	**-9**	**-5**	**-7**	**-6**	**-8**	**-9**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kec. Palu Timur**	**Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**8,299,584,238**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kec. Palu Timur**	**Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**8,299,584,238**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec. Palu Timur**	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	**21.770.900**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Palu Timur**	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	**21.770.900**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Palu Timur	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6.905.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Palu Timur	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6.905.200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Palu Timur	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	60 Dokumen	2.892.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Palu Timur	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	60 Dokumen	2.892.100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Kec. Palu Timur	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	60 Dokumen	5.092.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Kec. Palu Timur	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	60 Dokumen	5.092.100

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Palu Timur	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	6.881.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Palu Timur	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	6.881.500
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kec. Palu Timur**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan**	**100%**	**6.026.163.838**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Palu Timur**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan**	**100%**	**6.026.163.838**
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kec. Palu Timur	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	6.019.112.838	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kec. Palu Timur	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	6.019.112.838
	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Palu Timur	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	7.051.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Palu Timur	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Dokumen	7.051.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec. Palu Timur**	**Terlaksananya Administrasi Umum**	**100%**	**551.805.300**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Palu Timur**	**Terlaksananya Administrasi Umum**	**100%**	**551.805.300**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Palu Timur	Tersedianya Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Jenis	99.384.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Palu Timur	Tersedianya Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Jenis	99.384.400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Palu Timur	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32 Jenis	183.161.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Palu Timur	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32 Jenis	183.161.800
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Palu Timur	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	39.384.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Palu Timur	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	9 Jenis	39.384.400
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Palu Timur	Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Jasa Media	2 Media	16.800.000	Penyediaan Bahaan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kec. Palu Timur	Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Jasa Media	2 Media	16.800.000

	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Palu Timur	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	1010 dos	17.466.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Palu Timur	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	1010 dos	17.466.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan konsultasi SKPD	Kec. Palu Timur	Terlaksananya Rapat Konsultasi/Koordinasi keluar daerah	100%	195.035.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD	Kec. Palu Timur	Terlaksananya Rapat Konsultasi/Koordinasi keluar daerah	10 Kali	195.035.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Palu Timur	**Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**177.250.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Palu Timur**	**Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**177.250.000**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Palu Timur	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32 Jenis	183.161.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Palu Timur	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32 Jenis	183.161.800
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Palu Timur	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	39.384.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Palu Timur	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	9 Jenis	39.384.400
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Palu Timur	Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Jasa Media	2 Media	16.800.000	Penyediaan Bahaan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kec. Palu Timur	Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Jasa Media	2 Media	16.800.000
	Pengadaan Mebel	Kec. Palu Timur	Tersedianya Kebutuhan Mebel	1 Jenis	2.750.000	Pengadaan Mebel	Kec. Palu Timur	Tersedianya Kebutuhan Mebel	2 Jenis	2.750.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kec. Palu Timur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 jenis	159.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kec. Palu Timur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 jenis	159.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kec. Palu Timur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	100%	15.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kec. Palu Timur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	100%	15.500.000

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec. Palu Timur**	**Cakupan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.154.204.200**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Palu Timur**	**Cakupan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.154.204.200**
	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kec. Palu Timur	Tersedianya Jasa Komunikasi, Informasi Media Baca dan Listrik	12 Bulan	135.099.200	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kec. Palu Timur	Tersedianya Jasa Komunikasi, Informasi Media Baca dan Listrik	12 Bulan	135.099.200
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Palu Timur	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	1.019.105.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Palu Timur	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	1.019.105.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec. Palu Timur**	**Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**368.390.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Palu Timur**	**Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**368.390.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Palu Timur	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	323.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Palu Timur	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	323.900.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Palu Timur	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 jenis	5.720.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Palu Timur	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 jenis	5.720.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Palu Timur	Terlaksnannya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	35.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Palu Timur	Terlaksnannya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 jenis	41.578.944

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Palu Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	-	3.770.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Palu Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 jenis	3.770.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Kec. Palu Timur**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**22.241.700**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec. Palu Timur**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**22.241.700**
	Koordinasi PenyelenggaraanKegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec. Palu Timur**			**22.241.700**	**Koordinasi PenyelenggaraanKegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Palu Timur**			**22.241.700**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Palu Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	22.241.700	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Palu Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	22.241.700
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Kec. Palu Timur**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**98.66%**	**5.834.752.993**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kec. Palu Timur**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**98.66%**	**5.834.752.993**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**4.436.594.993**					
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec. Palu Timur	Terlaksananya Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	2 Kali	53.510.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec. Palu Timur	Terlaksananya Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	2 Kali	53.510.000
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kec. Palu Timur	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur dasar Kelurahan	5 Kelurahan	695.450.193	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kec. Palu Timur	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur dasar Kelurahan	5 Kelurahan	695.450.193

	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Kec. Palu Timur	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Kelurahan	3.687.634.800	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Kec. Palu Timur	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Kelurahan	3.687.634.800
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	**Kec. Palu Timur**	**Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**1.213.609.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**Kec. Palu Timur**	**Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**1.213.609.000**
	Penyelengaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Palu Timur	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan	1.213.609.000	Penyelengaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Palu Timur	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan	1.213.609.000
	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Kec. Palu Timur**	**Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kejasama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat**	**100%**	**184.549.000**	**Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Kec. Palu Timur**	**Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kejasama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat**	**100%**	**184.549.000**
	Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	**Kec. Palu Timur**	**Terlaksanya Program PKK Kecamatan dan Kelurahan**	**1 Kali**	**184.549.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Palu Timur**	**Terlaksanya Program PKK Kecamatan dan Kelurahan**	**1 Kali**	**184.549.000**
	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golonagn lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Kec. Palu Timur	Terlaksananya MTQ di Tingkat Kecamatan	1 Kali	136.553.500	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golonagn lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Kec. Palu Timur	Terlaksananya MTQ di Tingkat Kecamatan	1 Kali	136.553.500
	JUMLAH		**14.293.132.431**		**JUMLAH**				**14.293.132.431**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023, terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi - asosiasi, Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Timur sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2023 terdapat dua usulan Program kegiatan. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Palu

Nama Perangkat Daerah : Kecamataan Palu Timur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Palu Timur			
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kecamatan Palu Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	624,964,131	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Palu Timur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Keluraha	184,549,000	
JUMLAH				**809,513,131**	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN
Palu Timur

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kantor Kecamatan Ulujadi maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

4) Fasilitas Kunjungan Tamu

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1) Peningkatan Efektifitass Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, meliputi kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan

2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

3) Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

1) Pembinaan Kerukunan Antarsuku Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.

Kecamatan Palu Timur Kota Palu dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Palu Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Palu periode 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsi. Rencana Kerja Kecamatan Ulujadi Kota Palu Tahun 2024 yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
	Kecamatan Palu Timur		Kec. Palu Timur		**14,293,132,431**		**14,784,515,548**	**491,383,117**	**3,44 %**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kec. Palu Timur		**8,299,584,238**		**8,256,967,217**	**42,617,021**	0,15%	
7.01.01. 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Eveluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Palu Timur	5 dokumen	**21,770,900**	5 dokumen	**21,770,900**	**-**	**0%**	
7.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Palu Timur	8 dokumen	6,905,200	8 dokumen	6,905,200	-	0%	
7.01.01. 2.01.02	Koordinasi dan Pnyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Palu Timur	60 dokumen	2,892,100	60 dokumen	2,892,100	-	0%	
7.01.01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Palu Timur	60 dokumen	5,092,100	60 dokumen	5,092,100	-	0%	

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Palu Timur	5 dokumen	6,881,500	5 dokumen	6,881,500	-	0%	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan**	Kec. Palu Timur		**6,026,163,838**		**5,966,349,480**	**-59,814,358**	**0,99%**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Palu Timur	12 bulan	6,019,112,838	12 bulan	5,959,298,480	-59,814,358	-0,99%	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Palu Timur	1 dokumen	7,051,000	1 dokumen	7,051,000	-	0%	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Kec. Palu Timur		**551,805,300**		**726,680,637**	**174.875.337**	**31.69%**	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Palu Timur	3 paket	99,384,400	3 paket	78.707.700	-20.676.700	-20.80%	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Palu Timur	4 paket	183,161,800	4 paket	174.468.400	-8.693.400	-4.75%	

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Palu Timur	9 jenis	39,958,100	9 jenis	39,987,850	29,750	0.07%	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Palu Timur	2 media	16,800,000	2 media	16,800,000	-	0%	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Palu Timur	1010 dos	17,466,000	1010 dos	17,466,000	-	0%	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Palu Timur	10 kali	195,035,000	10 kali	399.250.687	204.215.687	104.71 %%	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Kec. Palu Timur	100%	**172,250,000**	**100%**	**19,700,000**	**-157.550.000**	**-88.89%**	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Kebutuhan Mebel	Kec. Palu Timur	1 paket	2,750,000	1 paket	14,700,000	11.950.000	434.55 %%	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Palu Timur	1 jenis	159,000,000	1 jenis	1,500,000	-157,500,000	-99.06%	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Palu Timur	10 unit	15,500,000	10 unit	3,500,000	-12,000,000	-77.42%	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Palu Timur		**1,154,204,200**		**1,141,804,200**	**-12.400.000**	**-1.07%**	

7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Palu Timur	12 bulan	135,099,200	12 bulan	134,899,200	-200,000	0,15%	
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Palu Timur	12 bulan	1,019,105,000	12 bulan	1,006,905,000	-12,200,000	-1.20%	
7.01.01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Kec. Palu Timur		**368,390,000**		**380,662,000**	**12,272,000**	**3.33%**	
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Peeliharaan, Pajak, dan Perizinanan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Palu Timur	12 unit	323,900,000	12 unit	323,900,000	-	0%	
7 01 02 2 09 11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Peeliharaan, Pajak, dan Perizinanan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Palu Timur	52 unit	5,720,000	53 unit	11,440,000	5,720,000	100%	
7 01 02 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Palu Timur	5 unit	35,000,000	5 unit	41,552,000	6,552,000	18.72%	
7 01 02 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya	Kec. Palu Timur	15 unit	3,770,000	15 unit	3,770,000	-	0%	
7.0.1.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	Kec. Palu Timur		**22,241,700**		**3,341,700**	**-18,900,000**	**-84.98%**	

7.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	#REF!	Kec. Palu Timur		**22,241,700**		**3,341,700**	**-18,900,000**	**-84.98%**	
7.01.01.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Palu Timur	1 Laporan	22,241,700	1 Laporan	3,341,700	-18.900.000	-84.98%	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan KECAMATAN PALU TIMUR**	Kec. Palu Timur		**53,510,000**		**53,510,000**	**-**	**0%**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kec. Palu Timur		**53,510,000**		**53,510,000**	**-**	**0%**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan / Kelurahan	Kec. Palu Timur	2 kali	53,510,000	2 kali	53,510,000	-	0%	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan**	Kec. Palu Timur	**100%**	**4,436,594,993**	**100%**	**4,611,603,831**	**175,008,838**	**3.94%**	
7.1.02.2.02.02	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Dasar	Kec. Palu Timur	32 unit	695,450,193	30 unit	624,964,131	-70,486,062	-10,14%	
7.1.02.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Palu Timur	7 pokmas	3,687,634,800	7 pokmas	3,933,129,700	245,494,900	6,66%	

7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan**	Kec. Palu Timur	**100%**	**1,213,609,000**		**1,584,859,000**	**371,250,000**	**30.59%**	
7.1.02.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Palu Timur	12 bulan	1,213,609,000	12 bulan	1,584,859,000	371,250,000	30.59%	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Kec. Palu Timur	**100%**	**184,549,000**		**184,549,000**	**-**	**0%**	
7.1.02.2.03.01	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kec. Palu Timur	100%	184,549,000	100%	184,549,000	-	0%	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Kec. Palu Timur		**136,553,500**		**143,194,800**	**6,641,300**	**4.86%**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Kec. Palu Timur		**136,553,500**		**143,194,800**	**6,641,300**	4.86%	
7.1.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	Kec. Palu Timur	1 Kali	136,553,500	1 Kali	143,194,800	6,641,300	4.86%	

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ulujadi Kota Palu Tahun 2024, dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Palu Timur Kota Palu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palu Timur Kota Palu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Ulujadi. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Palu TimurKota Palu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palu Timur Kota Palu tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Palu Timur Kota Palu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Ulujadi pada tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Palu Timur, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Palu Timur diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Ulujadi Kota Palu, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah.

serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan MUSRENBANG tingkat Kecamatan dan Kelurahan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Palu harus memperhatikan / mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKPD, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota Palu, Rancangan RPJMD Kota Palu 2016-2022, Rancangan RKPD Kota Palu Tahun 2023, serta Visi misi Kepala Daerah periode 2021-2026.

Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ulujadi Tahun 2024 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada Tahun berikutnya untuk dapat mendukung program-program Pemerintah Pusat maupun Daerah.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 KECAMATAN TATANGA

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA PALU NOMOR 16
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya di singkat dengan P-RENJA adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Fungsi Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Tatanga Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tatanga untuk periode 1 (Satu) tahun kedepan (Perencanaan Jangka Menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Tatanga (RENSTRA) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Tatanga selama kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Palu.

Adapun proses penyusunan P-RENJA Kecamatan Tatanga periode 2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan P-RENJA.
2. Penyusunan Rancangan Awal P-RENJA Kecamatan Tatanga.
3. Penyusunan Rancangan P-RENJA Kecamatan Tatanga.
4. Perumusan Rancangan Akhir P-RENJA Kecamatan Tatanga.
5. Penetapan P-RENJA Kecamatan Tatanga.

Perubahan Rencana Kerja menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh Kecamatan Tatanga, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII,dan IX yang ada pada RPJMN 2021-2026. Dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawasi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Tatanga disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Tatanga Kota Palu Tahun 2024 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula

segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Tatanga. Sejajar dengan itu, muatan P-RENJA Kecamatan Tatanga Kota Palu Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program Renstra Kecamatan Tatanga. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Tatanga Kota Palu selama satu tahun anggaran.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Tatanga Kota Palu Tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. Renstra Kecamatan Tatanga Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
2. P-RENJA Kecamatan Tatanga Tahun 2024 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Perubahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022;
3. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam P-RENJA untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Tatanga Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 34);
28. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun

2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tatanga Kota Palu Tahun 2024 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman

perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Tatanga untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tatanga Kota Palu Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Tatanga dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Tatanga.
3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan kewilayahan.
4. Secara faktual : menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Tatanga.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun substansi penyusunan P-RENJA (Perubahan Rencana Kerja) menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 latar belakang,

1.2 landasan hukum,

1.3 maksud dan tujuan dan

1.4 sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI P-RENJA HASIL EVALUASI P-RENJA KECAMATAN TATANGA TAHUN LALU

2.1 evaluasi pelaksanaan P-RENJA Kecamatan Tatanga Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Tatanga,

2.2 analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tatanga,

2.3 isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tatanga,

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIII PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Rencana Kerja yang sesuai dengan Program dan Kegiatan Kecamatan Tatanga yang berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program kegiatan. Kaidah-kaidah pelaksanaannya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Tatanga

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) KECAMATAN TATANGA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) dan capaian Renstra Kecamatan Tatanga Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tatanga adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Tatanga ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tatanga selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing- masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk melakukan evaluasi anggaran di tahun 2024, Kecamatan Tatanga mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Wali Kota kepada Camat. Tugas Pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota Palu

Adapun fungsi dari Kecamatan Tatanga adalah :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;

2. Mengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Tatanga melaksanakan 4 (empat) program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub. kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    1. 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan.
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD.

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah
a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pengadaan Mebel
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Jabatan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidaka Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

b. Penyelenggaraan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan P-RENJA Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Kecamatan Tatanga dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan P-RENJA Kecamatan Tatanga dan Pencapaian Renstra Kecamatan Tatanga sampai dengan tahun 2024 Kota Palu

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 S/D 2026 Akhir Periode Rentsra PD)	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (N-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6 x 100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60.00%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60.00%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60.00%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60.00%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	326 Orang	131 Orang	65 Orang	65 Orang	100%	65 Orang	196 Orang	60.12%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60.00%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1156 Komponen	523 Komponen	211 Komponen	211 Komponen	100%	211 Komponen	734 Komponen	63.49%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	33 Paket	17 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	21 Paket	63.64%

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6 x 100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	0 Paket	0 Paket	- Paket	- Paket	#DIV/0!	- Paket	- Paket	#DIV/0!
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	40 Paket	13 Paket	9 Paket	9 Paket	100%	9 Paket	22 Paket	55,00%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	6 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	100%	3 Tahun	9 Tahun	60,00%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	492 Dokumen	195 Dokumen	99 Dokumen	99 Dokumen	100%	99 Dokumen	294 Dokumen	59,76%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55 Dokumen	22 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen	33 Dokumen	60,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124 Dokumen	39 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	100%	27 Dokumen	66 Dokumen	53,23%
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	50,00%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Paket	4 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	9 Paket	47,37%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Paket	4 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	60,00%
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34 Paket	11 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	14 Unit	41,18%
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34 Paket	11 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	14 Unit	41,18%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	415 Laporan	166 Laporan	83 Laporan	83 Laporan	100%	83 Laporan	249 Laporan	60,00%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	24 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit	38 Unit	56,72%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	0 Unit	0 Unit	- Unit	- Unit	#DIV/0!	- Unit	- Unit	#DIV/0!
7 01 02 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	574 Unit	219 Unit	115 Unit	115 Unit	100%	115 Unit	334 Unit	58,19%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik**								
7.01.02.2.01	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat**								
7 01 02 2 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60,00%

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6 x 100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan**								
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan								
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 Lembaga	60 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	100%	30 Lembaga	90 Lembaga	60.00%
7.1.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	93 Unit	38 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	53 Unit	56.99%
7.1.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas	14 Pokmas	7 Pokmas	7 Pokmas	100%	7 Pokmas	21 Pokmas	60.00%
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**									
7.1.02.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	150 Lembaga	60 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	100%	30 Lembaga	90 Lembaga	60.00%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**									
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**									
7.1.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	346 Orang	127 Tahun	73 Tahun	73 Tahun	100%	73 Tahun	200 Tahun	57.80%

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa kegiatan diatas sudah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kebijakan Pimpinan yang mendukung pencapaian target.
2. Sarana dan prasaran yang memadai.
3. SDM Kecamatan mendukung dalam pelaksanakan program kegiatan di maksud.

Akan tetapi ada beberapa program kegiatan yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan antara lain :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana
2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kurang maksimalnya KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dalam menangani Pekerjaan yang dilimpahkan oleh pihak kelurahan sehingga sangat berpengaruh terhadap realisasi anggaran di Kecamatan Tatanga
2. Usulan kegiatan yang diusulkan oleh pihak kelurahan kurang memperhatikan kenaikan harga barang ataupun material terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan, sehingga hal menghampat pekerjaan dilapangan.

3. Karena adanya kebijakan mengenai pengelolaan pada kegiatan dana Alokasi Umum Tambahan (DAUT) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pada tahap ke II tidak dapat direalisasikan sebanyak 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tatanga

Kecamatan Tatanga yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Tatanga dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026.

Kecamatan Tatanga merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Tatanga sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi

Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tatanga Tahun 2021-2026 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tatanga sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tatanga. Indikator Kinerja Utama tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tatanga Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Palu. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Tatanga dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tatanga Kota Palu

Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tatanga		B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Nilai SAKIP Kecamatan Tatanga		B	BB	A	A	A	B	BB	A	A	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik 84,75	Baik 84,76	Baik 84,77	Baik 84,78	Baik 84,79	Baik 84,75	Baik 84,76	Baik 84,77	Baik 84,78	
4	Tingkat pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan		20%	25%	30%	35%	40%	20%	25%	30%	35%	
5	Cakupan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan		80%	82%	83%	84%	85%	80%	82%	83%	84%	

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tatanga Kota Palu

Setelah Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan							
Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani							
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Nilai Rata-rata Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)	2800	2850	2920	2950	2975
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,75%	84,76%	84,91%	86,78%	87,91%

2.3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Tatanga yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Tatanga lima tahun mendatang adalah sebahai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tatanga sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarkat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di

tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Palu telah melaksanakan PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perizinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2022, permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut yaitu: 1) Masih rendahnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan, 2) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan perlu ditingkatkan, 3) Belum Terlaksananya Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan, 4) Minimnya SDM Petugas Pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan melibatan masyarakat

dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Tatanga melalui kegiatan fisik maupun non fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaan

kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan Lembaga masyarakat. Adapun lembaga pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangg (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Karang Taruna (KARTAR);
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
6. Lembaga Adat;
7. LINMAS;
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarkat; dan
9. Lembaga Lainnya.

Dengan adanya peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut diharapkan dapat bersingkronisasi dengan program dan kegiatan Kecamatan Tatanga dalam pencapaian 53 program pembangunan pemerintah Kota Palu. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Tatanga yang mendukung 53 Program program pembangunan pemerintah Kota Palu adalah :

1. Bidang Ekonomi
    1) Penguatan UMKM
2. Sosial Kependudukan
    1) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya
    2) Palu Religi

3) Event olahraga tahunan Kota Palu

3. Infrastruktur
   1) Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu
   2) Ruang terbuka hijau/public area per-kecamatan
4. Birokrasi & Keuangan
   1) Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer
   2) Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan
5. Pelayanan Dasar
   1) Kesehatan
      - Palu Kota Sehat
      - BPJS gratis bagi warga tidak mampu
      - Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah
   2) Lingkungan
      - Palu Adipura
      - Palu Terang

2.4. Review Terhadap Rancangan Program RKPD Kota Palu Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) Rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah c) Perubahan Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tatanga berdasarkan RKPD Kota Palu sifatnya sebagai pendukung

dari pelaksanaan P-RENJA OPD se-Kota Palu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Tatanga.

Review terhadap Rancangan_Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel. 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	-5	-7	-6	-8	-9	-5	-7	-6	-8	-9	-10
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**100%**	**9.009.400.813**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**100%**	**8.912.911.955**	
1	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**100%**	**43.832.900**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**100%**	**43.832.900**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Tatanga	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	10.030.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Tatanga	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	10.030.400	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Tatanga	Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.328.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Tatanga	Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.328.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Tatanga	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.328.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Tatanga	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.328.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Tatanga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	7.146.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Tatanga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	7.146.500	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**100%**	**6.466.091.589**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**100%**	**6.617.732.115**	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Tatanga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	6.458.475.589	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Tatanga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	6.610.116.115	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec Tatanga	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	7.616.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec Tatanga	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	7.616.000	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**100%**	**610.489.600**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**100%**	**634.824.600**	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Tatanga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	7.270.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Tatanga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	7.270.300	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	-5	-7	-6	-8	-9	-5	-7	-6	-8	-9	-10
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Tatanga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	48.012.900	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Tatanga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	56.020.800	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Tatanga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	222.482.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Tatanga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	259.486.500	
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Tatanga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lembar/ Dokumen/ Laporan	46.294.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Tatanga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lembar/ Dokumen/ Laporan	46.294.000	
11	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Kec Tatanga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Surat Kabar/Media	20.400.000	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Kec Tatanga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Surat Kabar/Media	20.400.000	
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Tatanga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dos	61.474.600	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Tatanga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dos	40.798.000	
13	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec Tatanga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	204.555.000	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec Tatanga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	204.555.000	
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**53.600.700**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**34.876.316**	
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Tatanga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	Rp 35.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Tatanga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	Rp -	
15	Pengadaan Mebel	Kec Tatanga	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	18.600.700	Pengadaan Mebel	Kec Tatanga	Jumlah Pengadaan Meberl yang di adakan	Unit	34.876.316	
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kec Tatanga	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung	Jenis		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kec Tatanga	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung	Jenis		
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**1.428.756.024**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**1.173.096.024**	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Tatanga	Jumlah Rekening listrik air dan jasa komunikasi yang telah terbayar	12 Bulan	172.233.224	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Tatanga	Jumlah Rekening listrik air dan jasa komunikasi yang telah terbayar	12 Bulan	166.233.224	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Tatanga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1.256.522.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Tatanga	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terlayani	12 Bulan	1.006.862.800	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**406.630.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**408.550.000**	
19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Kec Tatanga	Pemeliharaan mobil Jabatan	Unit/Bulan		Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Kec Tatanga	Pemeliharaan mobil Jabatan	Unit/Bulan		
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Tatanga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit/Bulan	369.360.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Tatanga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit/Bulan	371.280.000	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Tatanga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	18.270.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Tatanga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	18.270.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	-5	-7	-6	-8	-9	-5	-7	-6	-8	-9	-10
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Tatanga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	19.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Tatanga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	19.000.000	
		N/A	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Baik**	**15.513.200**		**N/A**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Baik**	**15.513.200**	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**N/A**	**Prosentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik**	**100%**	**15.513.200**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**N/A**	**Prosentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik**	**100%**	**15.513.200**	
7	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**100%**	**15.513.200**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**100%**	**15.513.200**	
23	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Tatanga	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	15.513.200	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Tatanga	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	15.513.200	
			Tingkat pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan		**7.017.909.040**			**Tingkat pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan**		**7.844.388.275**	
		N/A	**Cakupan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan**	**95%**	**6.874.459.040**		**N/A**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan**	**95%**	**7.700.938.275**	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**100%**	**6.874.459.040**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**100%**	**7.700.938.275**	
8	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**100%**	**5.362.705.440**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**100%**	**5.672.434.675**	
24	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec Tatanga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24 lembaga kemasyarakatan	85.820.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec Tatanga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24 lembaga kemasyarakatan	77.820.000	
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Tatanga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 unit	711.882.490	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec Tatanga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 unit	623.026.625	
26	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Tatanga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 pokmas/ ormas	4.565.002.950	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Tatanga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 pokmas/ ormas	4.971.588.050	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	-5	-7	-6	-8	-9	-5	-7	-6	-8	-9	-10
9	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**100%**	**1.428.633.600**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**100%**	**1.945.383.600**	
27	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Tatanga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	24 lembaga kemasyarakatan	1.428.633.600	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Tatanga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	24 lembaga kemasyarakatan	1.945.383.600	
10	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**			**100%**	**83.120.000**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**			**100%**	**83.120.000**	
28	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar -Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kec Tatanga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	83.120.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar -Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kec Tatanga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	83.120.000	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**100%**	**143.450.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**100%**	**143.450.000**	
11	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**100%**	**143.450.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**100%**	**143.450.000**	
29	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal Regional dan Nasional	Kec Tatanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Keg	143.450.000	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal Regional dan Nasional	Kec Tatanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Keg	143.450.000	
	JUMLAH				**16.042.823.053**	**JUMLAH**				**16.772.813.430**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024, terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi - asosiasi, Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tatanga sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2024 terdapat dua usulan Program kegiatan. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.6:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				
8	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				
24	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tatanga	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan	30 Lembaga	
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tatanga	Persentase Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	25 Paket	
26	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tatanga	Jumlah kegiatan Permberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas	

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TATANGA

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kantor Kecamatan Tatanga maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3. Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan
   6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Pengadaan Mebel
   2) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan
   3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub. Kegiatan yaitu :

    1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan

    2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

    3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik meliputi kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :

    1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :

        1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang meliputi Kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub. Kegiatan yaitu :

    1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

    2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

    3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu:

   1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

   2) Penyelenggaraan Kesadaran Keluarga dalam Mebangun Kerja Sama Antar keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat

4. Program Penyelenggaaraan Urusan Pemerintah Umum yang meliputi Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri darai 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :

   1) Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional

Kecamatan Tatanga Kota Palu dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Palu Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Palu periode 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsi. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tatanga Kota Palu Tahun 2024 yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 2.8 dibawah ini.

TABEL 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Tatanga Tahun 2024

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	5	6	5	6	8
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**9.009.400.813**		**8.912.911.955**		**- 96.488.858**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				43.832.900		43.832.900		-	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tatanga	1 Dokumen	10.030.400	1 Dokumen	10.030.400	1 Dokumen	-	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tatanga	1 Dokumen	13.328.000	1 Dokumen	13.328.000	1 Dokumen	-	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tatanga	1 Dokumen	13.328.000	1 Dokumen	13.328.000	1 Dokumen	-	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tatanga	1 Dokumen	7.146.500	1 Dokumen	7.146.500	1 Dokumen	-	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				6.466.091.589		6.617.732.115		151.640.526	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	Kec. Tatanga	65 Orang	6.458.475.589	65 Orang	6.610.116.115	65 Orang	151.640.526	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tatanga	1 Laporan	7.616.000	1 Laporan	7.616.000	1 Laporan	-	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				610.489.600		634.824.600		24.335.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Kec. Tatanga	211 Komponen	7.270.300	211 Komponen	7.270.300	211 Komponen	-	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kec. Tatanga	4 Paket	48.012.900	4 Paket	56.020.800	4 Paket	8.007.900	

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	5	6	5	6	8
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Kec. Tatanga	0 Paket		0 Paket		0 Paket	-	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Kec. Tatanga	9 Paket	222.482.800	9 Paket	259.486.500	9 Paket	37.003.700	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tatanga	3 Tahun	46.294.000	3 Tahun	46.294.000	3 Tahun	-	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	Kec. Tatanga	99 Dokumen	20.400.000	99 Dokumen	20.400.000	99 Dokumen	-	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tatanga	11 Dokumen	61.474.600	11 Dokumen	40.798.000	11 Dokumen	- 20.676.600	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tatanga	27 Dokumen	204.555.000	27 Dokumen	204.555.000	27 Dokumen	-	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				53.600.700		34.876.316		- 18.724.384	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Tatanga	1 Unit	35.000.000	1 Unit	-	1 Unit	- 35.000.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Tatanga	5 Paket	18.600.700	5 Paket	34.876.316	5 Paket	16.275.616	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				1.428.756.024		1.173.096.024		- 255.660.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tatanga	12 Laporan	172.233.224	12 Laporan	166.233.224	12 Laporan	- 6.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tatanga	83 Laporan	1.256.522.800	83 Laporan	1.006.862.800	83 Laporan	- 249.660.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				406.630.000		408.550.000		1.920.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Tatanga	14 Unit	369.360.000	14 Unit	371.280.000	14 Unit	1.920.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kec. Tatanga	115 Unit	18.270.000	115 Unit	18.270.000	115 Unit	-	
7 01 02 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tatanga	Unit	19.000.000	Unit	19.000.000	Unit	-	

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	5	6	5	6	8
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik**			15.513.200		15.513.200		-	
7.01.02.2.01	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat**			15.513.200		15.513.200		-	
7 01 02 2 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tatanga	1 Laporan	15.513.200	1 Laporan	15.513.200	1 Laporan	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan**			6.874.459.040		7.700.938.275		826.479.235	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan			5.362.705.440		5.672.434.675		309.729.235	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tatanga	30 Lembaga	85.820.000	30 Lembaga	77.820.000	30 Lembaga	- 8.000.000	
7.1.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	Kec. Tatanga	15 Unit	711.882.490	15 Unit	623.026.625	15 Unit	- 88.855.865	
7.1.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tatanga	7 Pokmas	4.565.002.950	7 Pokmas	4.971.588.050	7 Pokmas	406.585.100	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				1.428.633.600		1.945.383.600		516.750.000	
7.1.02.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. Tatanga	30 Lembaga	1.428.633.600	30 Lembaga	1.945.383.600	30 Lembaga	516.750.000	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				83.120.000		83.120.000		-	
7.1.02.2.03.01	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Tatanga	0 Keluarga	83.120.000	0 Keluarga	83.120.000	0 Keluarga	-	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				143.450.000		143.450.000		-	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				143.450.000		143.450.000		-	
7.1.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tatanga	73 Tahun	143.450.000	73 Tahun	143.450.000	73 Tahun	-	
					16.042.823.053		**16.772.813.430**		**729.990.377**	

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Tatanga Kota Palu Tahun 2024, dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Tatanga Kota Palu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Tatanga Kota Palu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tatanga. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Tatanga Kota Palu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Tatanga Kota Palu tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Tatanga Kota Palu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024, P-RENJA ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Tatanga pada tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya P-RENJA Kecamatan Tatanga, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Tatanga diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Tatanga Kota Palu, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan MUSRENBANG tingkat Kecamatan dan Kelurahan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Palu harus memperhatikan / mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKPD, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota Palu, RPJMD Kota Palu 2021-2026, Rancangan RKPD Kota Palu Tahun 2024, serta Visi misi Kepala Daerah periode 2021-2026.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Tatanga Tahun 2024 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya untuk dapat mendukung program-program pemerintah pusat maupun daerah.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 KECAMATAN TAWAELI

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA PALU NOMOR 16
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya di singkat dengan RENJA adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Fungsi Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Tawaeli Tahun 2024 merupakan

dokumen perencanaan Kecamatan Tawaeli untuk periode 1 (Satu) tahun kedepan (Perencanaan Jangka Menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Tawaeli (RENSTRA) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Tawaeli selama kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Palu.

Adapun proses penyusunan Renja Kecamatan Tawaeli periode 2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Tawaeli.
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Tawaeli.
4. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tawaeli.
5. Penetapan Renja Kecamatan Tawaeli.

Perubahan Rencana Kerja menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh Kecamatan Tawaeli, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII,dan IX yang ada pada RPJMN 2021-2026. Dan sesuai dengan arah

pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawasi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Tawaeli disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Tawaeli Kota Palu Tahun 2024 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan

program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Tawaeli. Sejajar dengan itu, muatan Renja Kecamatan Tawaeli Kota Palu Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program Renstra Kecamatan Tawaeli. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Tawaeli Kota Palu selama satu tahun anggaran.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Tawaeli Kota Palu Tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. Renstra Kecamatan Tawaeli Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
2. Renja Kecamatan Tawaeli Tahun 2024 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Perubahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022;
3. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Tawaeli Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran

Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 34);

28. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tawaeli Kota Palu Tahun 2024 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman

perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Tawaeli untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tawaeli Kota Palu Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Tawaeli dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Tawaeli.

3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan kewilayahan.
4. Secara faktual : menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Tawaeli.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun substansi penyusunan Renja (Perubahan Rencana Kerja) menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. latar belakang,
- 1.2. landasan hukum,
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tawaeli Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Tawaeli, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tawaeli,
- 2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tawaeli,
- 2.3. Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Rencana Kerja yang sesuai dengan Program dan Kegiatan Kecamatan Tawaeli yang berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program kegiatan. Kaidah-kaidah pelaksanaannya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Tawaeli.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II KECAMATAN TAWAELI TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 dan capaian Renstra Kecamatan Tawaeli sampai dengan TW II.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tawaeli adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Tawaeli ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tawaeli selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing- masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk melakukan evaluasi anggaran di tahun 2024, Kecamatan Tawaeli mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Wali Kota kepada Camat. Tugas Pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota Palu

Adapun fungsi dari Kecamatan Tawaeli adalah :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;

2. Mengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Tawaeli melaksanakan 4 (empat) program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub. kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   1. 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan.
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah
a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pengadaan Mebel
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Jabatan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidaka Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan golongan Lainnya Guna

Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Kecamatan Tawaeli sampai dengan tahun 2026 serta Rekapitulasi Realisasi sampai dengan TW II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Tawaeli dan Pencapaian Renstra Kecamatan Tawaeli sampai dengan tahun 2024 Kota Palu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6 x 100	9=(5+7)	10=(9/4)
	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	**Nilai Evaluasin Kinerja kecamatan**		**2.650**	**2.750**				
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		**82**	**83**				
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	5 Tahun	imen					
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	60,000 %
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40,000 %
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40,000 %
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40,000 %
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	100%						
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.142 Orang	714 Orang	728 Orang	408 Orang	56%	2 Orang	0,082 %
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasi lKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	20,000 %
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**							
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Banguanan Kantor	3 Paket	- Paket	1 Paket	- Paket		Paket	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	142 Paket	81 Paket	3 Paket	- Paket	0%	81 Paket	57,042 %
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	66 Paket	48 Paket	6 Paket	3 Paket	50%	51 Paket	77,273 %
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	2 Paket	67%	5 Paket	33,333 %
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	18 Dokumen	30,000 %
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	6 Laporan	55%	17 Laporan	30,909 %
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74 Laporan	14 Laporan	15 Laporan	6 Laporan	40%	20 Laporan	27,027 %
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**							
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	- Unit	2 Unit	- Unit	0%	- Unit	0 %
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	82 Paket	6 Paket	6 Paket	- Paket	0%	6 Paket	7,3171 %
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	6 Unit	6 Unit	- Unit	0%	6 Unit	20 %

1	2	3	4		5		6		7		8 = 7 / 6 x 100	9=(5+7)		10=(9/4)	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%												
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	24	Laporan	0,400	%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	300	Laporan	60	Laporan	60	Laporan	60	Laporan	100%	120	Laporan	0,400	%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	100%												
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	81	Unit	15	Unit	15	Unit	6	Unit	40%	21	Unit	0,259	%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	170	Unit	90	Unit	20	Unit	15	Unit	75%	105	Unit	0,618	%
7 01 02 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28	Unit	12	Unit	8	Unit	3	Unit	38%	15	Unit	0,536	%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**													
7.01.02.2.01	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	100%												
7 01 02 2 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	2	Laporan	0,400	%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan**													
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan													
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	125	Lembaga	25	Lembaga	25	Lembaga	25	Lembaga	100%	50	Lembaga	0,400	%
7.1.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	10	Unit	-	Unit	5	Unit	-	Unit	0%	-	Unit	-	%
7.1.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35	Pokmas	7	Pokmas	7	Pokmas	3	Pokmas	43%	10	Pokmas	0,286	%
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan													
7.1.02.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	125	Lembaga	25	Lembaga	25	Lembaga	13	Lembaga	52%	38	Lembaga	0,304	%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**													
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%												
7.1.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	176	Orang	54	Orang	22	Orang	-	Orang	0%	54	Orang	0,307	%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Keluraha														
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga	150	Keluarga	0	Keluarga	50	Keluarga	15	Keluarga	30%	15	Keluarga	0,100	%

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa kegiatan diatas sudah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kebijakan Pimpinan yang mendukung pencapaian target.
2. Sarana dan prasaran yang memadai.
3. SDM Kecamatan mendukung dalam pelaksanakan program kegiatan di maksud.

Akan tetapi ada beberapa program kegiatan yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan antara lain :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana
2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kurang maksimalnya KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dalam menangani Pekerjaan yang dilimpahkan oleh pihak kelurahan sehingga sangat berpengaruh terhadap realisasi anggaran untuk Triwulan II tahun 2024 di Kecamatan Tawaeli
2. Usulan kegiatan yang diusulkan oleh pihak kelurahan kurang memperhatikan kenaikan harga barang ataupun material terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan, sehingga hal menghampat pekerjaan dilapangan.
3. Karena adanya kebijakan mengenai pengelolaan pada kegiatan dana Alokasi Umum Tambahan (DAUT) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pada tahap ke II tidak dapat direalisasikan sebanyak 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tawaeli

Kecamatan Tawaeli yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Tawaeli dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026.

Kecamatan Tawaeli merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Tawaeli sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tawaeli Tahun 2021-2026 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tawaeli sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tawaeli. Indikator Kinerja Utama tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tawaeli Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran

dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Palu. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Tawaeli dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tawaeli

Kota Palu

NO	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[]9	[10]	[11]	[12]
1	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tawaeli	-	Baik	Baik	Baik	Baik	-	-	Baik	B	
2	Nilai SAKIP Kecamatan Tawaeli		B	BB	A	A		BB	BB	A	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik	Baik	Baik	Baik			Baik	Baik	
4	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		20%	20%	35%	36%	-	-	35%	36%	
5	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		20%	95%	95%	97%		-	95%	97%	

2.3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Tawaeli yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Tawaeli lima tahun mendatang adalah sebahai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tawaeli sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarkat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di

tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Palu telah melaksanakan PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perizinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2022, permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut yaitu: 1) Masih rendahnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan, 2) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan perlu ditingkatkan, 3) Belum Terlaksananya Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan, 4) Minimnya SDM Petugas Pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan melibatan masyarakat

dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Tawaeli melalui kegiatan fisik maupun non fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaan

kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan Lembaga masyarakat. Adapun lembaga pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangg (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Karang Taruna (KARTAR);
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
6. Lembaga Adat;
7. LINMAS;
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarkat; dan
9. Lembaga Lainnya.

Dengan adanya peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut diharapkan dapat bersingkronisasi dengan program dan kegiatan Kecamatan Tawaeli dalam pencapaian 53 program pembangunan pemerintah Kota Palu. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Tawaeli yang mendukung 53 Program program pembangunan pemerintah Kota Palu adalah :

1. Bidang Ekonomi
    1) Penguatan UMKM
2. Sosial Kependudukan
    1) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya
    2) Palu Religi

3) Event olahraga tahunan Kota Palu

3. Infrastruktur
   1) Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu
   2) Ruang terbuka hijau/public area per-kecamatan
4. Birokrasi & Keuangan
   1) Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer
   2) Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan
5. Pelayanan Dasar
   1) Kesehatan
      - Palu Kota Sehat
      - BPJS gratis bagi warga tidak mampu
      - Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah
   2) Lingkungan
      - Palu Adipura
      - Palu Terang

2.4. Review Terhadap Rancangan Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) Rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah c) Perubahan Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tawaeli berdasarkan RKPD Kota Palu sifatnya sebagai pendukung

dari pelaksanaan Renja OPD se-Kota Palu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Tawaeli.

Review terhadap Rancangan_Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel. 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya Kinerja Kecamnatan		Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	2650		Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	2650				
			Indeks Kepuasan Masyarakat	82%		Indeks Kepuasan Masyarakat	82%				
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kec. Tawaeli				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kec. Tawaeli				
a)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tawaeli				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tawaeli				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tawaeli	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.237.650	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tawaeli	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.237.650	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec. Tawaeli	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	10.413.750	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec. Tawaeli	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	10.413.750	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Tawaeli	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	5.073.750	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Tawaeli	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	5.073.750	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tawaeli	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 Dokumen	1.666.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tawaeli	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 Dokumen	1.666.000	
b)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tawaeli				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tawaeli				
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tawaeli	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	12 Bulan	5.157.995.032	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tawaeli	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	12 Bulan	5.157.995.032	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tawaeli	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2.001.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tawaeli	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2.001.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
c)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tawaeli				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tawaeli				
7	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tawaeli	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket		Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tawaeli	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		-	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tawaeli	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	98.922.250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tawaeli	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		98.922.250	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tawaeli	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tawaeli	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tawaeli	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	228.629.160	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tawaeli	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	38 Paket	228.629.160	
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tawaeli	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	30.318.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tawaeli	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	30.318.000	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tawaeli	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tawaeli	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12.600.000	
13	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Tawaeli	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Tawaeli	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	36.000.000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tawaeli	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	156.080.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tawaeli	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	156.080.000	
d)	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec. Tawaeli				Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec. Tawaeli				
15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tawaeli	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tawaeli	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit		
16	Pengadaan Mebel	Kec. Tawaeli	Tersedianya Mebel	Paket	-	Pengadaan Mebel	Kec. Tawaeli	Tersedianya Mebel	1 Paket		
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tawaeli	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tawaeli	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit		
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tawaeli	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tawaeli	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tawaeli	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tawaeli	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
e)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kec. Tawaeli				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kec. Tawaeli				
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tawaeli	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	71.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tawaeli	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	71.800.000	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tawaeli	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	558.810.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tawaeli	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	558.810.400	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
f)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Tawaeli				Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Tawaeli				
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tawaeli	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	355.639.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tawaeli	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	355.639.200	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tawaeli	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	35.390.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tawaeli	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	35.390.000	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tawaeli	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2.550.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tawaeli	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2.550.000	
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Tawaeli				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Tawaeli				
g)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja	Kec. Tawaeli				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja	Kec. Tawaeli				
25	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tawaeli	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	18.519.850	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tawaeli	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	18.519.850	
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Tawaeli				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Tawaeli				
h)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Tawaeli				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Tawaeli				
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tawaeli	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Terlaksananya	Lembaga Kemasyarakatan	38.555.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tawaeli	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Terlaksananya	9 Kali	38.555.000	
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tawaeli	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1.159.818.863	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tawaeli	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1.159.818.863	
28	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tawaeli	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	Pokmas / Orang	4.707.321.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tawaeli	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat		4.707.321.000	
i)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Tawaeli				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Tawaeli				
29	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tawaeli	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	806.578.650	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tawaeli	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		806.578.650	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
i)	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Tawaeli				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Tawaeli				
30	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Keluarga	Kec. Tawaeli	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar	50 Keluarga	51.915.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Keluarga	Kec. Tawaeli	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar		51.915.000	Penyesuaian Terhadap Kepmen 050-5889 Tahun 2021
D.	Program Penyelenggaraan Urusan	Kec. Tawaeli				Program Penyelenggaraan Urusan	Kec. Tawaeli				
j)	Penyelenggaraan Urusan	Kec. Tawaeli				Penyelenggaraan Urusan	Kec. Tawaeli				
31	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tawaeli	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal.	Jumlah Orang (56 Kafilah)	211.700.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tawaeli	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal.	26 Kafilah	211.700.000	
					14.385.374.295					14.385.374.295	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024, terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi - asosiasi, Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tawaeli sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2024 terdapat dua usulan Program kegiatan. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.6:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Program Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Tawaeli	Terbangunnya sarana dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat	1.000.000.000	Dana PIK

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TAWAELI

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kantor Kecamatan Tawaeli maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3. Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan
   5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Pengadaan Mebel
   2) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan
   3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub. Kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik meliputi kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :

    1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :

        1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang meliputi Kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub. Kegiatan yaitu :

    1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

    2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

    3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu:

    1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Penyelenggaaraan Urusan Pemerintah Umum yang meliputi Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri darai 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :

   1) Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional

      Kecamatan Tawaeli Kota Palu dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Palu Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Palu periode 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsi. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tawaeli Kota Palu Tahun 2024 yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 2.8 dibawah ini.

TABEL 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Tawaeli Tahun 2024

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
(1)	(2)	(3)	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota									
a)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tawaeli	1 Dokumen	9.237.650	1 Dokumen	8.187.650	(1.050.000)	- 11	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kecamatan Tawaeli	1 Dokumen	10.413.750	1 Dokumen	10.313.750	(100.000)	- 1	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kecamatan Tawaeli	1 Dokumen	5.073.750	1 Dokumen	4.973.750	(100.000)	- 2	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kecamatan Tawaeli	1 Dokumen	1.666.000	1 Dokumen	1.616.000	(50.000)	- 3	
b)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							-		
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	Kecamatan Tawaeli	12 Bulan	5.157.995.032	12 Bulan	5.145.314.927	(12.680.105)	- 0	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Tawaeli	2 Dokumen	2.001.000	2 Dokumen	2.001.000	-	-	
c)	Administrasi Umum Perangkat Daerah							-		
7	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tawaeli	Paket	4.972.600	Paket	6.706.500	1.733.900		
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tawaeli	Paket	44.283.800	Paket	90.831.500	46.547.700	105	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tawaeli	Paket	256.245.600	Paket	203.641.400	(52.604.200)	- 21	
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Tawaeli	Paket	27.319.550	Paket	27.451.500	131.950	0	
12	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tawaeli	Dokumen	12.600.000	Dokumen	12.600.000	-	-	
13	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tawaeli	Laporan	32.020.800	Laporan	32.020.800	-	-	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tawaeli	Laporan	191.909.000	Laporan	191.909.000	-	-	

(1)	(2)	(3)	4	5		7		9=(8-6)	10=(9/6)	11
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan									
15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas	Kecamatan	Unit	18.500.000	Unit	50.000.000	(31.500.000)		
16	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Kecamatan	Paket	70.000.000	Paket	64.089.800	5.910.200		
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	Unit	14.337.800	Unit	10.831.200	3.506.600		
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Kecamatan	Unit	125.000.000	Unit	17.660.290	107.339.710		
e)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-		
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tawaeli	Laporan	73.300.000	Laporan	70.502.448	(2.797.552)	- 4	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tawaeli	Laporan	940.510.400	Laporan	867.398.400	(73.112.000)	- 8	
f)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-		
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kecamatan Tawaeli	12 Unit	355.639.200	12 Unit	319.980.000	(35.659.200)	- 10	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tawaeli	Unit	35.390.000	Unit	36.390.000	1.000.000	3	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tawaeli	Unit	2.550.000	Unit	5.298.000	2.748.000	108	
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							-		
g)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							-		
25	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tawaeli	Dokumen	18.519.850	Dokumen	18.519.850	-	-	
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							-		
h)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							-		
26	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Terlaksananya Musrenbang)	Kecamatan Tawaeli	Lembaga Kemasyarakatan	38.555.000	Lembaga Kemasyarakatan	38.555.000	-	-	
27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kecamatan Tawaeli	Unit	1.159.818.863	Unit	662.373.874	(497.444.989)	- 43	
28	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tawaeli	Pokmas / Orang	4.707.321.000	Pokmas / Orang	5.810.466.000	1.103.145.000	23	
i)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							-		
29	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Tawaeli	Lembaga Kemasyarakatan	806.578.650	Lembaga Kemasyarakatan	1.051.828.650	245.250.000	30	
i)	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							-		
30	Kerjasama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Keluarga	Kecamatan Tawaeli	50 Keluarga	51.915.000	50 Keluarga	51.915.000	-		

(1)	(2)	(3)	4	5		7		9=(8-6)	10=(9/6)	11
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							-		
j)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							-		
31	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Tawaeli	Jumlah Orang (45 Kafilah)	211.700.000	Jumlah Orang (45 Kafilah)	192.250.000	(19.450.000)	- 9	
					14.385.374.295		15.005.626.289			

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Tawaeli Kota Palu Tahun 2024, dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Tawaeli Kota Palu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Tawaeli Kota Palu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tawaeli. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Tawaeli Kota Palu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Tawaeli Kota Palu tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Tawaeli Kota Palu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Tawaeli pada tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Tawaeli, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Tawaeli diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Tawaeli Kota Palu, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan MUSRENBANG tingkat Kecamatan dan Kelurahan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Palu harus memperhatikan / mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKPD, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota Palu, RPJMD Kota Palu 2021-2026, Rancangan RKPD Kota Palu Tahun 2024, serta Visi misi Kepala Daerah periode 2021-2026.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Tawaeli Tahun 2024 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya untuk dapat mendukung program-program pemerintah pusat maupun daerah.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 KECAMATAN ULUJADI

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya di singkat dengan RENJA adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Fungsi Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Ulujadi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Ulujadi untuk periode 1 (Satu) tahun kedepan (Perencanaan Jangka Menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Ulujadi (RENSTRA) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Ulujadi selama kurun waktu satu tahun dengan

memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Palu.

Adapun proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ulujadi periode 2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Ulujadi.
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Ulujadi.
4. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Ulujadi.
5. Penetapan Renja Kecamatan Ulujadi.

Perubahan Rencana Kerja menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh Kecamatan Ulujadi, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan

selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII,dan IX yang ada pada RPJMN 2021-2026. Dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawasi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Ulujadi disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Perubahan Rencana kerja (P-Renja) Kecamatan Ulujadi Kota Palu Tahun 2024 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Ulujadi. Sejajar dengan itu, muatan Renja Kecamatan Ulujadi Kota Palu Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program Renstra Kecamatan Ulujadi. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) Kecamatan Ulujadi Kota Palu selama satu tahun anggaran.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Ulujadi Kota Palu Tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. Renstra Kecamatan Ulujadi Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
2. Renja Kecamatan Ulujadi Tahun 2024 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Rencana Kerja Tahunan

(RKT) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2023;

3. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Ulujadi Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 34);
28. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ulujadi Kota Palu Tahun 2024 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman

perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Ulujadi untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ulujadi Kota Palu Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Ulujadi dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.

2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Ulujadi.
3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan kewilayahan.
4. Secara faktual : menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Ulujadi.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun substansi penyusunan Perubahan Renja (Perubahan Rencana Kerja) menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Kecamatan Ulujadi
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujadi
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ulujadi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja yang sesuai dengan Program dan Kegiatan Kecamatan Ulujadi yang berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024

BAB V PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program kegiatan. Kaidah-kaidah pelaksanaannya, serta rencana tindak lanjkut yang akan dilaksanakan melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Ulujadi.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II KECAMATAN ULUJADI TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Ulujadi sampai dengan Triwulan II

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ulujadi adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Ulujadi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Ulujadi selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing- masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

   Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk melakukan evaluasi anggaran di tahun 2024, Kecamatan Ulujadi mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Wali Kota kepada Camat. Tugas Pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota Palu

Adapun fungsi dari Kecamatan Ulujadi adalah :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Ulujadi melaksanakan 4 (Empat) program, 12 (Sepuluh) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh dua) Sub. kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    1. 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan.
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah
a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

3.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

a. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
        a. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Ulujadi Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Kecamatan Ulujadi sampai dengan tahun 2026 serta Rekapitulasi Realisasi Keuangan Kecamatan Ulujadi Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6 x 100	9=(5+7)	10=(9/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan**	**B**	**2610**					
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	5 Tahun						
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	3 Dokumen	60.00 %
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	3 Dokumen	60.00 %
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	-	2 Dokumen	40.00 %
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	-	2 Dokumen	40.00 %
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan**	100%						
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4,130 Orang	1,652 Orang	826 Orang	472 Orang	57%	2,124 Orang	51.43 %
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasi lKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	- Laporan	0%	2 Laporan	40.00 %
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%						
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	30 Paket	12 Paket	6 Paket	3 Paket	50%	15 Paket	50.00 %
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	6 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	9 Paket	60.00 %
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	30 Dokumen	50.00 %
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55 Laporan	22 Laporan	11 Laporan	5 Laporan	45%	27 Laporan	49.09 %
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	40 Laporan	20 Laporan	16 Laporan	80%	56 Laporan	56.00 %

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	100%								1	Tahun			
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	Unit	-	Unit	1	Unit	-	Unit	0%	-	Unit	-	%
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	59	Unit	28	Unit	11	Unit	-	Unit	0%	28	Unit	47.46	%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%								1	Tahun			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	7	Laporan	58%	31	Laporan	51.67	%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	7	Laporan	58%	31	Laporan	51.67	%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	100%												
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80	Unit	32	Unit	16	Unit	8	Unit	50.00	40	Unit	50.00	%
7 01 02 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	250	Unit	100	Unit	50	Unit	25	Unit	50%	125	Unit	50.00	%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Baik**												
7.01.02.2.01	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	100%												
7 01 02 2 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	25.00	%

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100%**							
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan**	100%							
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150	Lembaga	60 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	100%	90 Lembaga	60.00 %
7.1.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	100	Unit	40 Unit	20 Unit	- Unit	0%	40 Unit	40.00 %
7.1.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35	Pokmas	14 Pokmas	7 Pokmas	3 Pokmas	43%	17 Pokmas	48.57 %
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%							
7.1.02.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	150	Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	100%	1 Lembaga	0.007 %
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%							
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	250	Keluarga	- Keluarga	50 Keluarga	25 Keluarga	50%	25 Keluarga	10.00 %
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100%**							
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%							
7.1.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	174	Orang	76 Orang	54 Orang	- Orang	0%	76 Orang	43.68 %

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa kegiatan diatas sudah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kebijakan Pimpinan yang mendukung pencapaian target.
2. Sarana dan prasaran yang memadai.
3. SDM Kecamatan mendukung dalam pelaksanakan program kegiatan di maksud.

Akan tetapi ada beberapa program kegiatan yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan antara lain :

1. Pekan Olah Raga dan Seni
2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya perbedaan volume pekerjaan yang mengakibatkan pembengkakan pada remncana anggran biaya pada beberapa pekerjaan.
2. Tidak cukupnya waktu pelaksanaan pekerjaan yang mendekati akhir tahun, sehingga tidak dapat dilaksanakan
3. Karena adanya kebijakan mengenai pengelolaan pada kegiatan dana Alokasi Umum Tambahan (DAUT) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pada tahap ke II tidak dapat direalisasikan sebanyak 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujadi

Kecamatan Ulujadi yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Ulujadi dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026.

Kecamatan Ulujadi merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Ulujadi sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ulujadi Tahun 2021-2026 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ulujadi sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ulujadi. Indikator Kinerja Utama tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ulujadi Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dalam Rancangan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Palu. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Ulujadi dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2

CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN ULUJADI

NO	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai Reformasi Kecamatan Ulujadi		Baik	Baik	Baik	Baik 84,78	-	-	Baik	Baik	
2	Nilai SAKIP Kecamatan Ulujadi		B	BB	A	A	-	BB	BB	A	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik	Baik	Baik	Baik	-	Baik	Baik	Baik	
4	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di		20%	20%	36%	35%	-	-	36%	35%	
5	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di		20%	95%	97%	84%	-	-	97%	84%	

2.3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Ulujadi yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Ulujadi lima tahun mendatang adalah sebahai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ulujadi sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarkat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Palu telah melaksanakan PATEN.

Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perizinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2021, permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut yaitu: 1) Masih rendahnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan, 2) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan perlu ditingkatkan, 3) Belum Terlaksananya Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan, 4) Minimnya SDM Petugas Pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan melibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang

tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Ulujadi melalui kegiatan fisik maupun non fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Adapun lembaga pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi boleh Kecamatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangg (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Karang Taruna (KARTAR);
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
6. Lembaga Adat;
7. LINMAS;
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarkat; dan
9. Lembaga Lainnya
10. Lembaga lainnya.

Dengan adanya peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut diharapkan dapat bersingkronisasi dengan program dan kegiatan Kecamatan Ulujadi dalam pencapaian 53 program pembangunan pemerintah Kota

Palu. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Ulujadi yang mendukung 53 Program program pembangunan pemerintah Kota Palu adalah :

1. Bidang Ekonomi
    1) Penguatan UMKM
2. Sosial Kependudukan
    1) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya
    2) Palu Religi
    3) Event olahraga tahunan Kota Palu
3. Infrastruktur
    1) Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu
    2) Ruang terbuka hijau/public area per-Kecamatan
4. Birokrasi & Keuangan
    1) Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer
    2) Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kecamatan
5. Pelayanan Dasar
    1) Kesehatan
        1) Palu Kota Sehat
        2) BPJS gratis bagi warga tidak mampu
        3) Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah
    2) Lingkungan
        4) Palu Adipura
        5) Palu Terang

2.4. Review Terhadap Rancangan Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) Rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program

prioritas pembangunan daerah c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Perubahan Rencana kerja Kecamatan Ulujadi berdasarkan RKPD Kota Palu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se-Kota Palu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Ulujadi.

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.3 di bawah ini.

TABEL 2.3
Review Terh+B2:R21adap Rancangan Akhir RKPD 2024

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**Kec. Ulujadi**	**Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**100%**	**8,254,331,107**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**Kec. Ulujadi**	**Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**100%**	**8,254,331,107**	
a)	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Ulujadi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**33,764,600**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Ulujadi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**33,764,600**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ulujadi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,104,100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ulujadi	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,104,100	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec. Ulujadi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,242,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec. Ulujadi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,242,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Ulujadi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,982,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Ulujadi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,982,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ulujadi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,436,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ulujadi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,436,500	
b)	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Ulujadi**	**Persentase Realisasi Keuangan**	**100%**	**5,575,915,257**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Ulujadi**			**5,575,915,257**	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ulujadi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	5,570,749,257	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ulujadi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	5,570,749,257	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Ulujadi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5,166,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Ulujadi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5,166,000	
c)	**Administrasi Umum Perangkat Dae**	**Kec. Ulujadi**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah**	**100%**	**651,242,650**	**Administrasi Umum Perangkat Da**	**Kec. Ulujadi**			**651,242,650**	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Ulujadi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	272,584,650	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Ulujadi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	272,584,650	
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ulujadi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	36,778,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ulujadi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	36,778,000	
9	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Ulujadi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	15,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Kec. Ulujadi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	15,400,000	
10	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Ulujadi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	64,240,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Ulujadi	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	64,240,000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ulujadi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	262,240,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ulujadi	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	262,240,000	

d)	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Ulujadi**			**172,420,600**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Ulujadi**			**172,420,600**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Ulujadi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	25,000,000		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Ulujadi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	25,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ulujadi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	147,420,600		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ulujadi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	147,420,600	
e)	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Ulujadi**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1,360,708,000**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Ulujadi**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,360,708,000**	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ulujadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	136,512,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ulujadi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	136,512,000	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ulujadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,224,196,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ulujadi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,224,196,000	
f)	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Kec. Ulujadi**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**460,280,000**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Kec. Ulujadi**			**460,280,000**	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Peeliharaan, Pajak, dan Perizinanan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Ulujadi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	436,740,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Ulujadi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	436,740,000	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ulujadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	58 Unit	23,540,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ulujadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	109 Unit	23,540,000	
B.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Baik**	**21,211,600**		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec. Ulujadi**			**21,211,600**	
g)	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**				**21,211,600**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kec. Ulujadi**			**21,211,600**	
18	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujadi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	21,211,600		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujadi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	21,211,600	
C.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kec. Ulujadi**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100%**	**8,410,938,837**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kec. Ulujadi**			**8,410,938,837**	
h)	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kec. Ulujadi**			**7,103,485,587**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kec. Ulujadi**			**7,103,485,587**	
19	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Ulujadi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30 Lembaga Kemasyarakatan	63,325,000		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Ulujadi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Terlaksananya Musrenbang)	30 Lembaga Kemasyarakatan	63,325,000	
20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Ulujadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	827,372,987		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Ulujadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	827,372,987	
21	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Ulujadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24 Pokmas / Omas	6,212,787,600		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Ulujadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24 Pokmas / Omas	6,212,787,600	

i)	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kec. Ulujadi**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kota Palu**	**1,170,139,200**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kec. Ulujadi**			**1,170,139,200**	
22	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Ulujadi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	30 Lembaga Kemasyarakatan	1,170,139,200	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Ulujadi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	30 Lembaga Kemasyarakatan	1,170,139,200	
i)	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Kec. Ulujadi**	**Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Kota Palu**	**137,314,050**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Kec. Ulujadi**			**137,314,050**	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluraga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	137,314,050	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluraga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	137,314,050	
D.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kec. Ulujadi**			**258,610,000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kec. Ulujadi**			**258,610,000**	
j)	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Ulujadi**			**258,610,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Ulujadi**			**258,610,000**	
23	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Ulujadi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	54 Orang	258,610,000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Ulujadi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	54 Orang	258,610,000	
		Jumlah			**16,945,091,544**					**16,945,091,544**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023, terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi - asosiasi, Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ulujadi sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2023 terdapat dua usulan Program kegiatan. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Palu

Nama Perangkat Daerah : Kecamataan Ulujadi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ulujadi			
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kecamatan Ulujadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	792,774,700	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Ulujadi	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	407,225,300	
JUMLAH				**1,200,000,000**	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ULUJADI

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kantor Kecamatan Ulujadi maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

    1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

    2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

    3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD

    4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

    1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS

    2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

    1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

    2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

    3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

    4) Fasilitas Kunjungan Tamu

    5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

    1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

    2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

    1) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

    2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

    1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan

    2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1) Peningkatan Efektifitass Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, meliputi kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
    2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    3) Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
    1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
    1) Pembinaan Kerukunan Antarsuku Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.

Kecamatan Ulujadi Kota Palu dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Palu Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Palu

periode 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsi. Rencana Kerja Kecamatan Ulujadi Kota Palu Tahun 2024 yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
	Kecamatan Ulujadi		Kec. Ulujadi		**16,945,091,544**		**17,693,870,217**	**748,778,673**	**4.42%**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kec. Ulujadi		**8,254,331,107**		**8,379,493,857**	**125,162,750**	**1.52%**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Eveluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ulujadi		**33,764,600**		**33,764,600**	**-**	**0%**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ulujadi	1 Dokumen	7,104,100	1 Dokumen	7,104,100	-	0%	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Pnyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Ulujadi	1 Dokumen	10,242,000	1 Dokumen	10,242,000	-	0%	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Ulujadi	1 Dokumen	10,982,000	1 Dokumen	10,982,000	-	0%	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ulujadi	1 Laporan	5,436,500	1 Laporan	5,436,500	-	0%	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Keuangan**	Kec. Ulujadi		**5,575,915,257**		**5,574,915,257**	**1,000,000**	0.02%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ulujadi	60 Orang/Bulan	5,570,749,257	60 Orang/Bulan	5,569,749,257	(1,000,000)	-2%	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Ulujadi	2 Laporan	5,166,000	2 Laporan	5,166,000	-	0%	

7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Kec. Ulujadi		**651,242,650**		**831,599,300**	**180,356,650**	27.69%	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Ulujadi	6 Paket	272,584,650	6 Paket	310,318,250	37,733,600	13.84%	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Ulujadi	3 Paket	36,778,000	3 Paket	36,786,050	8,050	0.02%	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Ulujadi	86 Dokumen	15,400,000	86 Dokumen	17,400,000	2,000,000	12.99%	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Ulujadi	11 Laporan	64,240,000	11 Laporan	78,340,000	14,100,000	21.95%	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ulujadi	15 Laporan	262,240,000	21 Laporan	388,755,000	126,515,000	48.24%	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	Kec. Ulujadi		**172,420,600**		**217,986,700**	**45,566,100**	26.43%	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Ulujadi	1 Unit	25,000,000	2 Unit	60,000,000	35,000,000	140.00%	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Ulujadi	18 Unit	147,420,600	11 Unit	157,986,700	10,566,100	7.17%	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urursan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	Kec. Ulujadi		**1,360,708,000**		**1,260,948,000**	**99,760,000**	7.33%	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Ulujadi	12 Laporan	136,512,000	12 Laporan	113,952,000	(22,560,000)	-16.53%	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Ulujadi	12 Laporan	1,224,196,000	12 Laporan	1,146,996,000	(77,200,000)	-6.31%	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Kec. Ulujadi		**460,280,000**		**460,280,000**	**-**	**0%**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Peeliharaan, Pajak, dan Perizinanan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Ulujadi	15 Unit	436,740,000	15 Unit	436,740,000	-	0%	
7 01 02 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Ulujadi	58 Unit	23,540,000	58 Unit	23,540,000	-	0%	
7.0.1.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	Kec. Ulujadi		**21,211,600**		**21,211,600**	**-**	**0%**	
7.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	0	Kec. Ulujadi		**21,211,600**		**21,211,600**	**-**	**0%**	
7.01.01.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujadi	1 Laporan	21,211,600	1 Laporan	21,211,600	-	0%	

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan KECAMATAN ULUJADI**	Kec. Ulujadi		**8,410,938,837**		**9,110,629,760**	**699,690,923**	8.32%	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kec. Ulujadi		**7,103,485,587**		**7,447,676,510**	**344,190,923**	4.85%	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Terlaksananya Musrenbang)	Kec. Ulujadi	30 Lembaga Kemasyarakatan	63,325,000	30 Lembaga Kemasyarakatan	63,325,000	-	0%	
7.1.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. Ulujadi	30 Unit	827,372,987	30 Unit	793,858,210	(33,514,777)	-4.05%	
7.1.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Ulujadi	24 Pokmas / Omas	6,212,787,600	24 Pokmas / Omas	6,590,493,300	377,705,700	6.08%	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kec. Ulujadi	**100%**	**1,170,139,200**		**1,525,639,200**	**355,500,000**	30.38%	
7.1.02.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. Ulujadi	30 Lembaga Kemasyarakatan	1,170,139,200	30 Lembaga Kemasyarakatan	1,525,639,200	355,500,000	30.38%	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Kec. Ulujadi	**100%**	**137,314,050**		**137,314,050**	**-**	**0%**	
7.1.02.2.03.01	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kec. Ulujadi	50 Keluarga	137,314,050	50 Keluarga	137,314,050	-	0%	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Kec. Ulujadi		**258,610,000**		**182,535,000**	**(76,075,000)**	-29.42%	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		Kec. Ulujadi		**258,610,000**		**182,535,000**	**(76,075,000)**	-29.42%	
7.1.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	Kec. Ulujadi	54 Orang	258,610,000	22 Orang	182,535,000	(76,075,000)	-29.42%	

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ulujadi Kota Palu Tahun 2024, dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Ulujadi Kota Palu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ulujadi Kota Palu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Ulujadi. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Ulujadi Kota Palu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ulujadi Kota Palu tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Ulujadi Kota Palu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Ulujadi pada tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Ulujadi, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Ulujadi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Ulujadi Kota Palu, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah.

serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan MUSRENBANG tingkat Kecamatan dan Kelurahan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Palu harus memperhatikan / mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKPD, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota Palu, Rancangan RPJMD Kota Palu 2016-2022, Rancangan RKPD Kota Palu Tahun 2023, serta Visi misi Kepala Daerah periode 2021-2026.

Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ulujadi Tahun 2024 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada Tahun berikutnya untuk dapat mendukung program-program Pemerintah Pusat maupun Daerah.



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 KECAMATAN PALU UTARA

LAMPIRAN XXXX
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA PALU NOMOR 13
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya di singkat dengan RENJA adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Fungsi Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Palu Utara untuk periode 1 (Satu) tahun kedepan (Perencanaan Jangka Menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Palu Utara (RENSTRA) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Palu Utara selama kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Palu.

Adapun proses penyusunan Renja Kecamatan Palu Utara periode 2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Palu Utara.
3. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Palu Utara.
4. Perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Palu Utara.
5. Penetapan Renja Kecamatan Palu Utara.

Perubahan Rencana Kerja menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh Kecamatan Palu Utara, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII,dan IX yang ada pada RPJMN 2021-2026. Dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawasi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Palu Utara disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2024 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Palu Utara. Sejajar dengan itu, muatan Renja

Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program Renstra Kecamatan Palu Utara. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Palu Utara Kota Palu selama satu tahun anggaran.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. Renstra Kecamatan Palu Utara Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
2. Renja Kecamatan Palu Utara Tahun 2024 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Perubahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022;
3. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Palu Utara

Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 34);
28. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 15);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2024 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Palu Utara untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Palu Utara dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Palu Utara.
3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan kewilayahan.
4. Secara faktual : menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Palu Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun substansi penyusunan Renja (Perubahan Rencana Kerja) menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Memuat latar belakang,

1.2 landasan hukum,

1.3 maksud dan tujuan dan

1.4 sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Palu Utara Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Palu Utara,

2.2 Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Palu Utara,

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Utara,

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Rencana Kerja yang sesuai dengan Program dan Kegiatan Kecamatan Palu Utara yang berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program kegiatan. Kaidah-kaidah pelaksanaannya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Utara.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II KECAMATAN PALU UTARA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 dan capaian Renstra Kecamatan Palu Utara sampai dengan TW II.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Palu Utara selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator

tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk melakukan evaluasi anggaran di tahun 2023, Kecamatan Palu Utara mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Wali Kota kepada Camat. Tugas Pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota Palu

Adapun fungsi dari Kecamatan Palu Utara adalah :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan perda dan Perkada;

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Palu Utara melaksanakan 4 (empat) program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub. kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD.

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pengadaan Mebel
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Jabatan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

3.3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

a. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan golongan Lainnya Guna

Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Kecamatan Palu Utara sampai dengan tahun 2026 serta Rekapitulasi Realisasi sampai dengan TW II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja P Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	= 7 / 6 x 10	9=(5+7)	10=(9/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**B**						
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%						
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	60,000 %
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40,000 %
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40,000 %
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40,000 %
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	100%						
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.640 Orang	1.456 Orang	728 Orang	364 Orang	50%	1.820 Orang	50,000 %
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasi lKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	40,000 %

7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	100%					1 Tahun	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	61 Paket	5 Paket	5 Paket	1 Paket	10%	6 Paket	9,016 %
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Paket	8 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	10 Paket	30,303 %
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	29 Paket	8 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	12 Paket	41,379 %
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	6 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	9 Paket	60,000 %
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	468 Dokumen	180 Dokumen	96 Dokumen	96 Dokumen	100%	276 Dokumen	58,974 %
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55 Laporan	22 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100%	33 Laporan	60,000 %
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	31 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%	47 Laporan	43,119 %
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	100%					1 Tahun	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	- Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	54,545 %
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	194 Paket	- Paket	67 Unit	67 Unit	100%	67 Unit	34,536 %
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Paket	6 Paket	2 Unit	2 Unit	100%	8 Unit	50,000 %

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%										1	Tahun				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192	Laporan	12	Laporan	144	Laporan	144	Laporan	100%	156	Laporan	81,250	%			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	292	Laporan	49	Laporan	96	Laporan	96	Laporan	100%	145	Laporan	16,438	%			
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	100%															
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	153	Unit	34	Unit	14	Unit	14	Unit	100%	48	Unit	26,144	%			
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	153	Unit	43	Unit	58	Unit	58	Unit	100%	101	Unit	66,013	%			
7 01 02 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	156	Unit	12	Unit	28	Unit	28	Unit	100%	40	Unit	25,641	%			
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Baik**															
7.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Cakupan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	100%															
7 01 02 2 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	2	Laporan	40,000	%			

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100%**						
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%						
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	135 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	100%	50 Lembaga	37,037 %
7.1.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	137 Unit	28 Unit	27 Unit	27 Unit	100%	55 Unit	40,146 %
7.1.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas	7 Pokmas	7 Pokmas	7 Pokmas	100%	14 Pokmas	40,000 %
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%						
7.1.02.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	125 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	100%	50 Lembaga	40,000 %
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Cakupan Pemberdayaan Mayarakat Kelurahan	100%						
7.1.02.2.03.01	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalalm Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	150 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	100%	75 Keluarga	50,000 %

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100%**						
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%						
7.1.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	176 Orang	22 Orang	56 Orang	56 Orang	100%	78 Orang	44,318 %

Berdasarkan Tabel diatas di Tahun 2024 Kecamatan Palu Utara terdapat ketambahan Satu Kegiatan dan Dua Sub Kegiatan. Yang terdiri atas

1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Kegiatan Baru Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Terkait dengan pencapaian target sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, bahwa kegiatan diatas sebagian besar sudah mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kebijakan Pimpinan yang mendukung pencapaian target.
2. Sarana dan prasaran yang memadai.
3. SDM Kecamatan mendukung dalam pelaksanakan program kegiatan di maksud.

Adapun terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai terget dikarenakan kegiatan tersebut kami alihkan dalam Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Utara

Kecamatan Palu Utara yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Palu Utara dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026.

Kecamatan Palu Utara merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Palu Utara sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palu Utara Tahun 2021-2026 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palu Utara sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palu Utara. Indikator Kinerja Utama tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Palu. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Palu Utara dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3 sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Utara
Kota Palu

NO	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Palu Utara		B	B	B		B	B	B		
2	Nilai SAKIP Kecamatan Palu Utara		B	BB	BB		B	BB	BB		
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik	Baik	Baik		Baik	Baik	Baik		
4	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan		20%	20%	36%		20%	20%	20%		
5	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan		95%	95%	97%		95%	97%	95%		

2.3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daer

ah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Palu Utara yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Palu Utara lima tahun mendatang adalah sebahai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Palu Utara sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarkat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Palu telah melaksanakan PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perizinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2022, permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut yaitu: 1) Masih rendahnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan, 2) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan perlu ditingkatkan, 3) Belum Terlaksananya Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan, 4) Minimnya SDM Petugas Pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan melibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-

kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Palu Utara melalui kegiatan fisik maupun non fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan Lembaga masyarakat. Adapun lembaga pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangg (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Karang Taruna (KARTAR);
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
6. Lembaga Adat;
7. LINMAS;
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarkat; dan
9. Lembaga Lainnya.

Dengan adanya peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut diharapkan dapat bersingkronisasi dengan program dan kegiatan Kecamatan Palu Utara dalam pencapaian 53 program pembangunan pemerintah Kota Palu. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Palu Utara yang mendukung 53 Program program pembangunan pemerintah Kota Palu adalah :

1. Bidang Ekonomi

1) Penguatan UMKM

2. Sosial Kependudukan

1) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya

2) Palu Religi

3) Event olahraga tahunan Kota Palu

3. Infrastruktur

1) Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu

2) Ruang terbuka hijau/public area per-kecamatan

4. Birokrasi & Keuangan

1) Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer

2) Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan

5. Pelayanan Dasar

1) Kesehatan

- Palu Kota Sehat
- BPJS gratis bagi warga tidak mampu
- Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah

2) Lingkungan

- Palu Adipura
- Palu Terang

2.4. Review Terhadap Rancangan Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) Rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah c) Perubahan Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Utara berdasarkan RKPD Kota Palu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se-Kota Palu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Palu Utara.

Review terhadap Rancangan_Program Perubahan RKPD Kota Palu Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Palu**	**Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**7.825.570.657**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Palu**	**Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**7.479.412.105**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**	**17.125.900**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5 dokumen**	**17.125.900**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.865.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.865.400
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.552.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.552.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.552.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.552.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	4.156.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	4.156.500
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase realisasi keuangan**	**100%**	**5.090.741.571**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase realisasi keuangan**	**95%**	**5.043.651.146**
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/ bulan	5.085.280.571	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/ bulan	5.038.190.146
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.461.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasi lKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.461.000

3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1.034.905.800**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**951.207.000**
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.340.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.560.000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	322.058.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	249.289.300
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	246.748.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	233.598.700
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	33.124.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	33.124.000
11	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	27.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	27.000.000
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	57.350.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	57.350.000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	346.285.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	346.285.000
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**100%**	**210.250.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**100%**	**98.095.000**
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	75.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0
15	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	67 Unit	108.250.000	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	67 Unit	72.250.000
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	27.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.845.000

5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**917.092.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**874.508.400**
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	224.880.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	188.880.000
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	692.212.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	685.628.400
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**555.455.386**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Palu**	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	**100%**	**494.824.659**
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	389.940.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	396.340.000
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	8.760.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	58 Unit	25.800.000
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	156.755.386	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	72.684.659
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kota Palu**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Baik**	**7.116.200**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Baik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Baik**	**7.116.200**
7	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kota Palu**			**7.116.200**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kota Palu**	**Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat**	100%	**7.116.200**
23	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7.116.200	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7.116.200

3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kota Palu**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100%**	**6.808.561.848**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kota Palu**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100%**	**7.737.118.548**
8	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kota Palu**	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	**100%**	**6.047.628.048**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kota Palu**	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	**100%**	**6.770.684.748**
24	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25 Lembaga Kemasyarakatan	78.580.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	56.080.000
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	949.827.608	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Saran dan Prasarana yang terbangun	27 Unit	758.825.108
26	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas	5.019.220.440	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas	5.955.779.640
9	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kota Palu**		**100%**	**760.933.800**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kota Palu**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**966.433.800**
27	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	25 Lembaga	760.933.800	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	25 Lembaga	966.433.800
10	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Kota Palu**	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**100%**	**162.361.800**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Kota Palu**	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**100%**	**144.216.800**
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	162.361.800	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	144.216.800
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kota Palu**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100%**	**232.400.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kota Palu**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100%**	**179.460.000**
11	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kota Palu	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**100%**	**232.400.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kota Palu**	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**100%**	**179.460.000**
28	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	54 Orang	232.400.000	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	54 Orang	179.460.000
JUMLAH					**15.036.010.505**	**JUMLAH**				**15.547.323.653**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023, terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi - asosiasi, Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Utara sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2023, Usulan Musrembang termuat dalam Tabel 2.6 dengan rincian :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Palu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**		
	A. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		
	- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalalm Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**		
	Pembuatan Plat Deker	Kecamatan		7 Paket	Usulan Musrenbang
	- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		**Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**		
	Pengadaan Kursi	Kecamatan		3 Paket	Usulan Musrenbang
	Pengadaan Tenda	Kecamatan		3 Paket	Usulan Musrenbang
	Pengadaan Sound System Kecamatan Palu Utara	Kecamatan		1 Paket	POKIR
	Pengadaan tenda terowongan Kecamatan Palu Utara	Kecamatan		1 Paket	POKIR
	Bantuan Kursi Kecamatan Palu Utara	Kecamatan		1 Paket	POKIR

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PALU UTARA

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kantor Kecamatan Palu Utara maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3. Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan
   6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Pengadaan Mebel
   3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub. Kegiatan yaitu :

   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik meliputi kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :

   1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang meliputi Kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub. Kegiatan yaitu :

   1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

   2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

   3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu:

   1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, terdiri atas 1 (satu) Sub. Kegiatan

    1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

4. Program Penyelenggaaraan Urusan Pemerintah Umum yang meliputi Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri darai 1 (satu) Sub. Kegiatan yaitu :

    1) Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional

Kecamatan Palu Utara Kota Palu dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Palu Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Palu periode 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsi. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2024 yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

TABEL 3.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8-6)	10=(9/6)	11
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**Kota Palu**	100%	**7.825.570.657**	100%	**7.479.412.105**			
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	100%	**17.125.900**	100%	**17.125.900**	-	-	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	3.865.400	1 Dokumen	3.865.400	-	-	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	4.552.000	1 Dokumen	4.552.000	-	-	
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	4.552.000	1 Dokumen	4.552.000	-	-	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	4.156.500	1 laporan	4.156.500	-	-	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	**Kota Palu**	100%	**5.090.741.571**	100%	**5.043.651.146**	- 47.090.425	- 1	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	52 orang/ bulan	5.085.280.571	52 orang/ bulan	5.038.190.146	- 47.090.425	- 1	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasi lKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	5.461.000	1 Laporan	5.461.000	-	-	

7 01 01 2.02	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Kota Palu**	100%	**1.034.905.800**	100%	**951.207.000**	-	83.698.800	-	8	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	2.340.000	1 Paket	4.560.000		2.220.000		95	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	2 Paket	322.058.100	2 Paket	249.289.300	-	72.768.800	-	23	
7 01 01 2.02 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Kota Palu	4 Paket	246.748.700	4 Paket	233.598.700	-	13.150.000	-	5	
7 01 01 2.02 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 Paket	33.124.000	3 Paket	33.124.000		-		-	
7 01 01 2.02 06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Palu	24 Dokumen	27.000.000	24 Dokumen	27.000.000		-		-	
7 01 01 2.02 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 Laporan	57.350.000	11 Laporan	57.350.000		-		-	
7 01 01 2.02 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	16 Laporan	346.285.000	20 Laporan	346.285.000		-		-	
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**Kota Palu**	100%	**210.250.000**		**98.095.000**	-	112.155.000	-	53	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Palu	3 unit	75.000.000	3 unit	0	-	75.000.000	-	100	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	6 Paket	108.250.000	1 Paket	72.250.000	-	36.000.000	-	33	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	2 Unit	27.000.000	1 Unit	25.845.000	-	1.155.000	-	4	

7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Palu**	100%	**917.092.000**	100%	**874.508.400**	-	42.583.600	-	5	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	224.880.000	12 Laporan	188.880.000	-	36.000.000	-	16	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	692.212.000	12 Laporan	685.628.400	-	6.583.600	-	1	
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**Kota Palu**	100%	**555.455.386**	100%	**494.824.659**	-	60.630.727	-	11	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	14 Unit	389.940.000	14 Unit	396.340.000		6.400.000		2	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Palu	58 Unit	8.760.000	58 Unit	25.800.000		17.040.000		195	
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	18 Unit	156.755.386	18 Unit	72.684.659	-	84.070.727	-	54	
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Baik**	Baik	**7.116.200**	Baik	**7.116.200**		-		-	
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Cakupan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kota Palu**	100%	**7.116.200**	Kota Palu	**7.116.200**		-		-	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 Laporan	7.116.200	1 Laporan	7.116.200		-		-	

7 01 03		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**Kota Palu**	100%	**6.808.561.848**	100%	**7.737.118.548**		-	
7 01 03 2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	**Kota Palu**	100%	**6.047.628.048**	100%	**6.770.684.748**	723.056.700	12	
7 01 03 2.02 01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	25 Lembaga Kemasyarakatan	78.580.000	25 Lembaga Kemasyarakatan	56.080.000	- 22.500.000	- 29	
7 01 03 2.02 02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	Kota Palu	27 Unit	949.827.608	27 Unit	758.825.108	- 191.002.500	- 20	
7 01 03 2.02 03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	7 Pokmas	5.019.220.440	7 Pokmas	5.955.779.640	936.559.200	19	
7 01 03 2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kec. Palu Barat**	100%	**760.933.800**	100%	**966.433.800**	205.500.000	27	
7 01 03 2.03 01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	25 Lembaga	760.933.800	25 Lembaga	966.433.800	205.500.000	27	
7 01 03 2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kec. Palu Barat**	100%	**162.361.800**	100%	**144.216.800**	- 18.145.000	- 11	
7 01 03 2.06 02		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	50 Keluarga	162.361.800	50 Keluarga	144.216.800	- 18.145.000	- 11	
7 01 05		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Kota Palu**	100%	**232.400.000**	100%	**179.460.000**	- 52.940.000	- 23	
7 01 05 2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kota Palu**	100%	**232.400.000**	100%	**179.460.000**	- 52.940.000	- 23	
7 01 05 2.01 04		Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 Orang	232.400.000	54 Orang	179.460.000	- 52.940.000	- 23	
						15.036.010.505		**15.547.323.653**			

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2024, dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Palu Utara Kota Palu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisein.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Utara Kota Palu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Palu Utara. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Palu Utara Kota Palu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Utara Kota Palu tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Palu Utara Kota Palu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Palu Utara pada tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Palu Utara, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Palu Utara diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Palu Utara Kota Palu, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan MUSRENBANG tingkat Kecamatan dan Kelurahan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Palu harus memperhatikan / mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKPD, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota Palu, RPJMD Kota Palu 2021-2026, Rancangan RKPD Kota Palu Tahun 2024, serta Visi misi Kepala Daerah periode 2021-2026.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Palu Utara Tahun 2024 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya untuk dapat mendukung program-program pemerintah pusat maupun daerah.